IVAN TANIPUTERA

AR-RUZZ MEDIA

JILID 3

ENSIKLOPEDI

KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA

HIKAYAT DAN SEJARAH


BHINNEKA TUNGGAL IKA

Ivan Taniputera

AR-RUZZ MEDIA



ENSIKLOPEDI KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA

HIKAYAT DAN SEJARAH

ENSIKLOPEDI KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA
Hikayat dan Sejarah

Ivan Taniputera

Editor: Aziz Safa & Meita Sandra
Proofreader: Moh Faiz
Desain Cover: Anto
Desain Isi: Joko P.

Diterbitkan Oleh:
AR-RUZZ MEDIA
Jl. Anggrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo,
Depok, Sleman, Yogyakarta 55282
Telp./Fax.: (0274) 488132
E-mail: arruzzwacana@yahoo.com

ISBN: 978-602-313-181-5 (jil. 3)
Cetakan I, 2017

Didistribusikan oleh:
AR-RUZZ MEDIA
Telp./Fax.: (0274) 4332044
E-mail: marketingarruzz@yahoo.co.id

Perwakilan:
Jakarta: Telp./Fax.: (021) 22710564
Malang: Telp./Fax.: (0341) 560988



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Ivan Taniputera
ENSIKLOPEDI KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA: Hikayat dan Sejarah/Ivan Taniputera-Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017
xii + 432 hlm, 18,5 X 25,5 cm
ISBN: 978-602-313-178-5 (no. jil. lengkap)
978-602-313-181-5 (jil. 3)

1. Sejarah
I. Judul II. Ivan Taniputera

KATA PENGANTAR

Bagi negeri kita yang terdiri dari beribu pulau dengan beragam suku bangsa, adat istiadat, dan bahasa, sejarah lokal sesungguhnya merupakan bagian sejarah nasional yang sangat penting dan tak terpisahkan. Sebelumnya, riwayat berbagai kerajaan di Kepulauan Nusantara pascakeruntuhan Majapahit selaku sejarah lokal masih belum banyak disentuh. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh minim dan terseraknya berbagai sumber sejarah. Dewasa ini, tampak kebangkitan minat masyarakat kita terhadap sejarah, baik umum maupun lokal. Banyak buku kajian sejarah lokal telah ditulis, baik oleh para sejarawan dalam maupun luar negeri. Buku ini dimaksudkan sebagai pelengkap kepustakaan sejarah lokal di negeri kita, dimana seiring dengan tumbuhnya minat masyarakat dan kaum cendekiawan, penulis terdorong merangkum sejarah berbagai kerajaan tersebut.

Dengan mencermati berbagai peristiwa penting di berbagai kerajaan itu, yang umumnya tumbuh dan berkembang semenjak abad 16 hingga awal abad 20, pandangan terhadap sejarah nasional secara keseluruhan akan menjadi semakin utuh. Kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara merupakan bagian khazanah budaya bangsa yang berharga. Penelaahan terhadap sejarah berbagai kawasan di seluruh penjuru tanah air akan melengkapi wawasan sejarah bangsa kita.

Tentu saja, buku ini masih jauh dari sempurna. Terdapat lebih dari 300 kerajaan di Kepulauan Nusantara yang eksis hingga akhir abad 19 dan awal abad 20. Sumber-sumber sejarah yang tersedia masih sangat minim dan tidak selalu terdapat informasi memadai bagi masing-masing kerajaan. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa

karya ini semata-mata merupakan rintisan dan perlu penyempurnaan lebih lanjut. Pada mulanya sebelum menyusun buku ini timbul perasaan pesimis dalam diri penulis. Meskipun demikian, akhirnya timbul pemikiran jika tidak memberanikan diri merintis penulisan karya semacam ini, kapan lagi kita akan mempunyai dokumen sejarah lengkap mengenai kerajaan-kerajaan di negeri kita?. Selain itu, penulis teringat akan pepatah "Perjalanan ribuan kilometer hanya dimulai dari satu langkah saja.", itulah sebabnya, penulis memberanikan diri menghasilkan karya sejarah yang masih jauh dari sempurna ini, dengan harapan membangkitkan minat masyarakat terhadap riwayat kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di Bumi Nusantara. Buku ini juga ditujukan membantu para guru sejarah menggali muatan lokal di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, besar pula harapan penulis agar karya ini sedikit banyak sanggup memberikan sumbangsih bagi kemajuan pendidikan sejarah di negeri kita.

Terdapatnya gambar lambang negara kita pada sampul buku ini memperlihatkan bahwa para raja Nusantara telah mempersiapkannya sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 semenjak lama. Meskipun wujudnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebagai contoh, Raja Airlangga telah mempergunakan garuda sebagai simbol kerajaannya. Pencantuman gambar tersebut mencerminkan pula tekad para raja menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika.

DAFTAR ISI

Bab 8
KERAJAAN-KERAJAAN DI KAWASAN NUSA TENGGARA BARAT

A. KERAJAAN-KERAJAAN DI PULAU LOMBOK

I. BANJAR GETAS (PRAYA)

Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Mamela atau di sebelah utara Praya sekarang. Kerajaan Banjar Getas didirikan oleh seorang tokoh bernama Arya Sudarsana (Surengrana), yang kelak dikenal sebagai Arya Banjar Getas. Sebelumnya, Arya Sudarsana pernah mengabdi kepada Raja Selaparang dan kemudian Pejanggik. Namun, ia belakangan bersekutu dengan Karangasem dan menghancurkan kerajaan-kerajaan tersebut. Arya Banjar Getas kemudian berbagi wilayah dengan Karangasem. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Karangasem memperoleh kawasan barat Lombok yang subur dan strategis, sedangkan Arya Banjar Getas mendapatkan bagian tengah dan timur Lombok. Kendati wilayahnya cukup luas, namun Kerajaan Banjar Getas sendiri kelak terbukti mengalami kesulitan dalam mengamankannya.

Agama Islam telah dianut oleh masyarakat di daerah ini dan raja mengharuskan rakyatnya menerapkan syariat Islam dengan ketat. Namun, sistem pemerintahannya masih belum teratur sehingga kerap timbul kekacauan. Kerajaan ini kerap pula mendapat serangan dari luar, seperti penyerbuan Ratu Bayan dan Ratu Buluran. Tetapi serangan oleh kedua orang ini dapat dipatahkan dan mereka semua tewas dalam

pertempuran. Banjar Getas kembali mendapat serangan dari Ratu Kadinding, tetapi dapat pula dipatahkan. Berikutnya, Sultan Muhammad Jalaluddin (Datu Semong) dari Sumbawa pernah pula menyerbu kerajaan ini dengan sebelumnya menghasut orang-orang Ketangga dan Selaparang. Namun, karena pengkhianatan saudaranya, sultan gugur dalam pertempuran ini. Selain serangan dari dalam negeri, Banjar Getas juga mengalami berbagai pemberontakan. Sebagai contoh adalah pemberontakan di Selaparang yang dapat dipatahkan oleh pasukan kerajaan. Akibat pemberontakan ini, rakyatnya dipindahkan ke Sekarbela, Dasan Agung, Midang, dan Rembiga.

Karena kerap mengalami pergolakan, Arya Banjar Getas mendudukkan putra-putra dan keturunannya di berbagai kawasan dalam wilayah kekuasaannya; Raden Ronton di Mamela; Raden Juruh ditempatkan di Batukliang, sedangkan cucunya, Raden Lombok ditempatkan di Pringgabaya. Raden Ronton merupakan cikal bakal bagi perkampungan Berora yang kelak berkembang menjadi Praya. Perkawinan politis dilakukan antara putri Arya Banjar Getas bernama Denda Wiracandra dengan Prabu Karolanala dari Langko yang masih kerabat Pejanggik[1]. Meskipun demikian, beberapa desa-desa otonom di selatan Lombok belum bersedia tunduk kepada Banjar Getas. Hal ini membuka peluang kelak bagi bangkitnya lagi Sakra selaku penerus Pejanggik.

Setelah Arya Banjar Getas meninggal, ia digantikan oleh putranya, Raden Ronton, yang memindahkan pusat pemerintahan ke Berora (kelak disebut Praya). Tahta Banjar Getas selanjutnya beralih lagi kepada Raden Lombok, yang menikah dengan putri Raja Sokong Prawira. Putra mereka, Deneq Bangli menjadi Raja Banjar Getas berikutnya. Semasa pemerintahannya, pecah pemberontakan Demuk Selaparang yang dibantu oleh para bajak laut. Guna memadamkan pergolakan tersebut, raja memerintahkan pamannya menumpas para pemberontak dan mengejar mereka hingga ke Sumbawa. Namun, sesampainya di Labuhan Lombok, pamannya jatuh sakit dan kembali ke Ketangga. Di sanalah ia wafat sehingga digelari Raden Ilang Ketangga (Yang Wafat di Ketangga). Deneq Bangli menjadi Raja Banjar Getas berikutnya dan digantikan kembali oleh Raden Mumbul. Selanjutnya, singgasana Banjar Getas diwariskan kepada putra Raden Mumbul bernama Raden Wiratmaja.

Bersamaan dengan para pengganti Banjar Getas ini, Sakra yang dapat dianggap sebagai penerus Pejanggik mulai berkembang dan menarik perhatian kawasan-kawasan otonom di selatan Lombok yang lebih dekat kekerabatannya dengan mereka ketimbang

---

1. Lihat *Keris di Lombok,* halaman 77.

Banjar Getas. Naik daunnya Sakra ini berawal dari kecurigaan Karangasem terhadap Banjar Getas, rekan aliansinya itu. Oleh karenanya, Sakra dibiarkan berkembang sebagai pengimbang terhadap Banjar Getas. Karangasem menyadari bahwa Sakra yang merupakan keturunan Pejanggik masih mendendam kepada Banjar Getas. Tetapi belakangan, pada 1828 terjadi peperangan antara Sakra dengan kerajaan-kerajaan Bali di Lombok, khususnya Singasari, yang merupakan wakil Karangasem. Sakra dapat dikalahkan dan wilayahnya dibagi-bagi antara berbagai kerajaan Bali di Lombok. Sementara itu, Banjar Getas sendiri dibiarkan tidak diganggu.

Belakangan, peranan Singasari selaku pemegang hegemoni di Lombok digeser oleh Mataram. Raden Wiratmaja merasa hanya terikat kepada Singasari dan bukannya Mataram. Karenanya, Mataram menganggap bahwa Banjar Getas hendak membangkang terhadap kekuasaannya. Menurut cerita *babad* (kisahan berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi peristiwa sejarah), pertikaian antara Mataram dan Banjar Getas dipicu oleh ketidakbersediaan Raden Wiratmaja menyerahkan putrinya bernama Denda Canderawati kepada Raja Mataram[2]. Apapun alasannya, pertempuran antara kedua kerajaan ini pecah pada 1841. Mataram menghasut kawasan-kawasan otonom di sekitar Banjar Getas agar turut bangkit memusuhi kerajaan tersebut, termasuk Sakra yang sebelumnya pernah ditaklukkan Singasari. Selaku keturunan Pejanggik, Sakra memandang kesempatan ini sebagai ajang balas dendam terhadap Banjar Getas mengingat bahwa leluhur mereka pernah dihabisi oleh Arya Banjar Getas.

Akibat hasutan Mataram, daerah-daerah otonom seperti Kopang, Batukliang, Rarang, dan Sakra mulai berniat mengangkat senjata terhadap Banjar Getas. Sengketa perbatasan terjadi antara Kopang dan Batukliang di satu pihak dengan Banjar Getas di pihak lain. Tatkala Banjar Getas menyerang keduanya, mereka memperoleh bala bantuan dari Mataram, yang dipimpin oleh Gusti Gede Wanasara, Ida Made Rai, dan Gusti Made Kaler. Agar tidak jatuh korban terlampau banyak, Mataram menginstruksikan agar pasukan Banjar Getas ditunggu saja di perbatasan antara Banjar Gertas dan Batukliang. Demikianlah, Banjar Getas dikepung oleh pasukan gabungan Kopang, Batukliang, dan Mataram; yang diperkuat oleh Sakra, Batujai, Suradadi, Penujak, Jonggak, Puyung, dan Rarang. Pengepungan yang berkepanjangan selama satu setengah tahun ini menjadikan Banjar Getas kelaparan. Rakyat Banjar

2. Lihat *Keris di Lombok*, halaman 78.

Getas yang mencoba menerobos kepungan demi mendapatkan makanan dibunuh oleh musuh.

Menyadari situasi yang sulit ini, Raden Wiracandra, putra Raden Wiratmaja memutuskan perang habis-habisan melawan musuh. Dalam pertempuran ini, Raden Wiracandra gugur. Ada versi yang menyatakan bahwa ia dibunuh oleh Raden Rinawang, sedangkan versi lainnya (*Babad Sakra*) menyebutkan bahwa Raden Surangsa yang telah membunuh Raden Wiracandra. Raja Banjar Getas terakhir, Raden Wiratmaja, tewas digigit ular di hutan Sundil. Praya, ibu kota Banjar Getas, segera diserbu oleh musuh. Dengan demikian, Kerajaan Banjar Getas berakhir sudah. Raden Tunggul, putra Raden Wiracandra berhasil melarikan diri ke Sumbawa. Sementara itu, putra-putrinya yang lain, seperti Raden Nuna Ali Dinda Mirat, ditawan dan dibawa ke Mataram. Semenjak runtuhnya Banjar Getas, Mataram menjadi pemegang hegemoni atas seluruh Pulau Lombok. Selanjutnya, di Praya yang kini berada di bawah kendali Mataram ditempatkan seorang keturunan Banjar Getas bernama Mamiq (Guru) Sapian sebagai pemimpinnya[3].

II. KEDIRI

Merupakan salah satu kerajaan Bali di Lombok. Cikal bakalnya adalah Gusti Ketut Rai (± 1700) yang merupakan putra Anglurah Ketut Karangasem, Raja Karangasem. Ia digantikan oleh kemenakannya bernama Anak Agung Gede Karangasem, putra Gusti Nyoman Karang dari Pagesangan. Selanjutnya yang memerintah di Kediri adalah putranya, yakni Anak Agung Wayan Karangasem I. Ia digantikan putranya, Anak Agung Wayan Karangasem II. Raja Kediri terakhir adalah Anak Agung Nyoman Rai, putra Anak Agung Wayan Karangasem II. Dia gugur saat Singasari menaklukkan Kediri pada 1805.

III. KURIPAN

Penguasa Kuripan masih kerabat dengan Sakra. Raden Nuna Gede Anggir dari Sakra memiliki putra bernama Raden Gede Kerda. Ia kemudian menikah dengan Denda Bini Ceredeh saudari Deneq Laki Batu dan Deneq Laki Galiran, dua orang bersaudara penguasa Kuripan, sedangkan Deneq Laki Galiran menikah dengan Denda Rangda Bini, saudari Raden Gede Kerda. Pada mulanya, Kuripan membantu Mataram

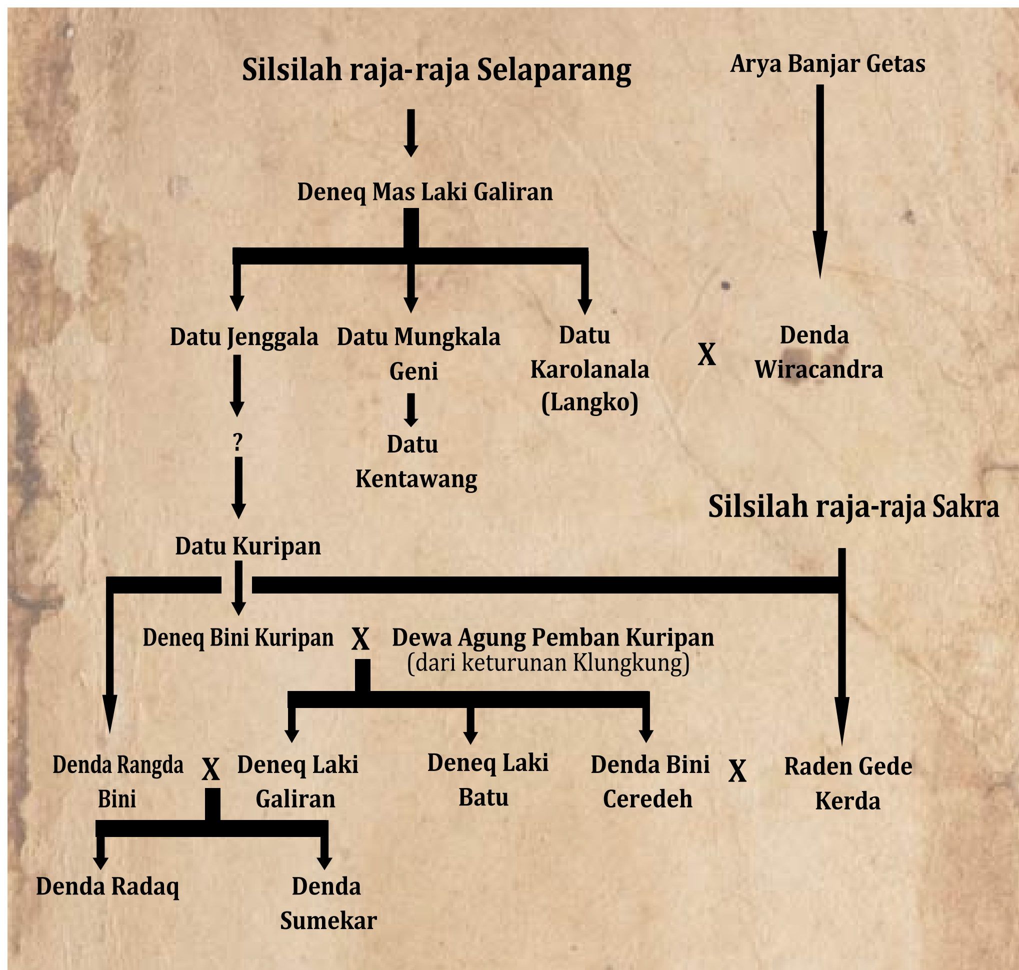
3. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 91.

menaklukkan Singasari sehingga dihadiahi berbagai tambahan wilayah. Menyaksikan bahwa saat itu kondisi Mataram masih belum stabil, saat berlangsungnya pemakaman Deneq Bini Ringgit yang dibunuh oleh Singasari, Raden Gede Kerda mengajak ipar-iparnya menyerbu Mataram. Tetapi ajakan ini ditolak oleh Deneq Laki Batu dan Deneq Laki Galiran sehingga hubungan kedua pihak menjadi renggang.

Deneq Laki Batu yang masih belum menikah mendengar bahwa Mataram hendak melamar Anak Agung Ayu Bulan, putri Anak Agung Pagutan, Raja Pagutan. Pada mulanya lamaran ini diterima oleh Pagutan dengan berat hati, tetapi Deneq Laki Batu kemudian menghasut Raja Pagutan agar membatalkannya dan ganti menikahkan putri itu dengannya. Deneq Laki Batu berjanji memberikan bantuannya dalam menghadapi Mataram dan bila meraih kemenangan kelak, Anak Agung Pagutan akan dijadikan Raja Mataram. Deneq Laki Batu memperhitungkan bahwa karena Anak Agung Pagutan tak memiliki keturunan laki-laki maka bila ia wafat kelak tentu dirinya selaku menantu yang akan menggantikannya.

Deneq Laki Batu kini meminta bantuan iparnya, Raden Gede Kerda, demi melancarkan niatnya itu. Tetapi kini giliran Raden Gede Kerda yang menolak. Karena memiliki wilayah yang luas, Sakra tentunya merupakan sekutu yang amat penting. Namun, karena penolakan Raden Gede Kerda terhadap ajakan bekerja sama tersebut, Deneq Laki Batu gagal mewujudkan rencananya. Pagutan yang telanjur menolak pinangan Mataram ditaklukkan, serta Anak Agung Ayu Bulan ditawan. Putri Raja Pagutan itu kemudian menyampaikan perihal hasutan Deneq Laki Batu yang menjanjikan bantuan tersebut. Akibatnya, kini Kuripan menjadi sasaran penaklukan berikutnya.

Deneq Laki Batu dan Deneq Laki Galiran diundang ke Mataram. Berlaku seolah-olah belum mencium rencana pemberontakan kedua bersaudara tersebut, pihak Mataram menyambut mereka secara meriah. Deneq Laki Batu diterima di istana sebelah timur, sedangkan Deneq Laki Galiran di istana sebelah barat. Dengan memanfaatkan kegemaran masing-masing, pihak Mataram memancing kelengahan mereka. Deneq Laki Batu disuguhi pertandingan sabung ayam. Sementara itu, Deneq Laki Galiran yang gemar menari, setelah disuguhi makanan dan minuman keras, dipersilakan melakukan kesenangannya tersebut. Dalam keadaan lengah dan mabuk, kedua bersaudara itu dibunuh. Peristiwa ini menandai jatuhnya Kuripan. Kedua putri Deneq Laki Galiran yang masing-masing bernama Dinda (Denda) Radaq dan Dinda (Denda) Sumekar diboyong ke Mataram.



Silsilah raja-raja Kuripan
Digambar ulang dari buku *Keris di Lombok*, halaman 70, dengan beberapa perubahan

IV. MATARAM atau MATARAM LOMBOK

Untuk membedakan kerajaan ini dengan Kerajaan Mataram di Jawa, ada beberapa sumber yang menyebutnya sebagai Mataram Lombok atau Mataram Karangasem. Pada mulanya, Mataram merupakan bawahan Singasari dengan rajanya berstatus patih, di mana kerajaan yang disebut terlebih dahulu merupakan wakil Kerajaan Karangasem serta menjadi koordinator bagi kerajaan-kerajaan Bali lainnya di Lombok. Lebih tingginya kedudukan Singasari disebabkan para penguasanya merupakan keturunan I Gusti Made Karangasem (Anglurah Made Karangasem), salah satu di antara tiga penguasa bersama Kerajaan Karangasem di Bali, sedangkan para penguasa Mataram berasal dari garis keturunan I Gusti Ketut Karangasem

(Anglurah Ketut Karangasem), adik I Gusti Nyoman Karangasem. Karena berasal dari keturunan saudara yang lebih muda usianya, para penguasa Mataram dianggap lebih rendah kedudukannya dibanding Singasari. Raja-raja yang memerintah di Mataram adalah sebagai berikut: Anglurah Ketut Karangasem I (Anak Agung Bagus Jelantik atau Dewata Patandakan, 1767–1775), Angkurah Ketut Karangasem II (Dewata Pasaren Anyar Mataram, ?–1830), dan Anglurah Ketut Karangasem III (Dewata Ruma, 1830–1838).

Namun, belakangan Kerajaan Mataram dan Singasari Karangasem berebut hegemoni atas kerajaan-kerajaan lain di Pulau Lombok. Sementara itu, dua kerajaan kecil Bali lainnya, yakni Pagutan dan Pagesangan, memihak Karangasem. Yang menarik dari kancah pertikaian kedua kerajaan ini adalah kehadiran dua orang pedagang asing, yakni George Peacock (G.P.) King dan Mads Johansen Lange. Berikut ini akan diulas terlebih dahulu bagaimana keduanya terlibat dalam peperangan di Lombok.

King merupakan seorang berkebangsaan Inggris yang awalnya bekerja pada perusahaan Inggris Morgan & King di Batavia. Sesudah perusahaan ini bangkrut, King memutuskan pergi ke Lombok guna mengadu nasib karena melihat peluang berupa ramainya perdagangan antara Singapura dengan pulau tersebut. King berambisi menegakkan monopoli perdagangan di Lombok. Untuk itulah ia mendekati Raja Singasari Karangasem dan menjalin relasi dengannya. Kendati demikian, King tak lama kemudian terlibat pertengkaran dengan Raja Singasari sehingga memaksanya melarikan diri ke Kuta, Bali. Namun, King merupakan sosok yang tak mudah putus asa karena pada 1836 ia memutuskan kembali ke Lombok.

Kali ini King menawarkan jasanya kepada Raja Mataram, musuh bebuyutan Raja Singasari. Raja Mataram sangat memercayai King dan mengangkatnya sebagai salah seorang penasihat utama. Ketika pecah perang di Lombok, King banyak membantu Mataram. Ia mengangkut persenjataan dan amunisi yang diperlukan serta membawa pasukan bala bantuan dari Karangasem ke Lombok. Sebaliknya, Mads Lange memihak Singasari. Mads Lange sebelumnya adalah pedagang keturunan Denmark yang menjadi rekan pedagang Skotlandia bernama John Burd. Keduanya kerap mengadakan perdagangan ke China dengan kapal Falcon milik mereka. Secara berkala mereka pergi ke Lombok guna membeli beras untuk diperdagangkan di China. Mads Lange memilih berdomisili di Tanjung Karang yang merupakan wilayah Singasari. Raja memberinya berbagai fasilitas sehingga usahanya makin berkembang.

Malangnya, Singasari dapat dikalahkan oleh Mataram. Ini merupakan kesempatan bagi King menjatuhkan saingannya, tentu saja dengan dukungan sang pemenang, Raja Mataram. Sebagai hukuman karena telah membantu musuh Mataram, Lange tidak diperkenankan menagih uang dari orang-orang yang masih berhutang kepadanya. Itulah sebabnya, Lange jatuh dalam kemiskinan dan terpaksa memulai usahanya lagi dari awal.

Setelah Anglurah Ketut Karangasem III gugur dalam peperangan melawan Singasari, kerajaan tersebut diperintah oleh tiga bersaudara, yakni Anak Agung Ketut Karangasem, Anak Agung Made Karangasem, dan Anak Agung Gede Ngurah Karangasem (Agung Agung Gede Ngurah Karangasem). Anak Agung Ketut Karangasem mangkat pada 1850 sehingga tinggal dua orang saudaranya yang memerintah. Selanjutnya, Anak Agung Made Karangasem mangkat pada 1872. Dengan demikian, tinggal saudara bungsunya yang memerintah sebagai Raja Mataram.

Namun menurut sumber lainnya, setelah gugurnya Raja Mataram Anglurah Ketut Karangasem III, yang memerintah sebagai raja utama adalah I Gusti Ngurah Ketut Karangasem (1831–1869), sedangkan saudaranya, I Gusti Gede Karangasem diangkat sebagai raja muda. Pada 1869, I Gusti Ngurah Ketut Karangasem meninggal sehingga I Gusti Gede Karangasem dinobatkan sebagai penggantinya dengan gelar Ratu Agung Agung Gede Ngurah Karangasem (1870–1894). Pada 1872, ia mengangkat putranya bernama Ratu Agung Agung Wayahan Karangasem sebagai raja muda. Semasa pemerintahannya, hubungan antara Mataram dan Belanda dapat dikatakan baik. Hal ini diperlihatkan oleh hadiah yang diberikan oleh Ratu Agung Agung Wayahan Karangasem kepada gubernur jenderal Belanda di Bogor (30 Juni 1877). Ratu Agung Agung Wayahan Karangasem meninggal karena sakit pada 24 Desember 1877. Oleh karena itu, sebagai wakil raja yang baru diangkat putra lainnya bernama Ratu Agung Agung Ketut Karangasem. Semasa pemerintahan mereka dikeluarkan berbagai undang-undang yang dikenal sebagai *paswara*; antara lain mengatur masalah pemilikan tanah, pembukaan serta pemeliharaan jalan-jalan baru, serta pelestarian lingkungan, umpamanya larangan berburu di hutan demi melindungi margasatwa di dalamnya. Perdagangan di Lombok juga mengalami kemajuan[4]. Pada perkembangan selanjutnya, raja mengangkat lagi putranya bernama Anak Agung Made Karangasem sebagai wakil raja (1884). Dengan demikian, kini terdapat dua orang wakil raja, yakni

4. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 64-67.

Ratu Agung Agung Ketut Karangasem dan Anak Agung Made Karangasem (Anak Agung Made).

Demi membina hubungan yang baik dengan pemerintah kolonial, beberapa kali Kerajaan Mataram mengirimkan utusannya menghadap gubernur jenderal. Sebagai contoh, pada 1886 Raja Mataram mengutus dua orang penggawa (Gusti Nengah Tusan dan Gusti Bagus Pandam) beserta seorang *perbekel* (Bali: Kepala desa) bernama Asyari menyampaikan berbagai hadiah kepada gubernur jenderal di Batavia. Berikutnya, pada 1889 Raja Mataram kembali mengirimkan dua orang penggawa beserta seorang *perbekel*-nya, yang masing-masing bernama Gusti Nengah Tusan, Nyoman Dangin, dan Abdullatif menghadap gubernur jenderal. Relasi yang baik dengan kerajaan-kerajaan di Sumbawa juga dibina. Pada 1887, sewaktu Raja Lombok melangsungkan upacara *dewa yadnya* (persembahan suci kepada Sang Hyang Widhi Wasa), ia mengirim pula hadiah kepada Sultan Sumbawa, Bima, dan Dompu[5].



Patung Agung Agung Gede Ngurah Karangasem
Foto koleksi pribadi, diambil dari Museum Nasional Indonesia, Jakarta

Semasa ketiga orang raja bersaudara di atas masih hidup dan memerintah Mataram bersama-sama, kerajaan tersebut mulai mengembangkan hegemoninya atas seluruh Lombok, Pagutan dikuasai pada 1839, Kuripan jatuh ke tangan Mataram pada 1840, dan terakhir Praya ditaklukkan pada 1841. Dengan demikian, hampir seluruh Pulau Lombok masuk ke dalam genggaman Mataram. Yang masih otonom adalah beberapa desa seperti Batukliang dan Kopang. Kini keduanya menjadi sasaran aneksasi

5. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 70, menyebutkan bahwa nama raja-raja Sumbawa itu adalah sebagai berikut: Sultan Mohammad Djalalludin Ibn al Marhum Mohammad Kaimudin dari Sumbawa; Sultan Abdul-madjid Ibn al Marhum Sultan Abdullah di Bima; dan Sultan Ibrahim Ibn al Marhum Sultan Salahidin dari Dompu.

Mataram, walaupun mereka pernah membantu menaklukkan Praya. Beberapa tahun setelah berakhirnya perang penaklukan Praya, Jro Wirasari, yang berjasa besar dalam peperangan tersebut, difitnah hendak memberontak terhadap Mataram. Ia diundang agar datang ke Mataram. Jro Wirasari beserta pengikut-pengikutnya bertolak ke Mataram memenuhi panggilan tersebut, namun setibanya di Pememang (Lombok Utara) mereka dikeroyok oleh pasukan Mataram di bawah pimpinan Gusti Ketut Ning hingga tewas seluruhnya.

Tindakan Mataram ini tentunya meresahkan pimpinan-pimpinan Sasak lainnya. Ketika Mataram mengalihkan perhatiannya kepada Batukliang dan mengundang pemimpinnya bernama Raden Sumintang, ia menolak memenuhi undangan tersebut karena khawatir bernasib sama seperti Jro Wanasari. Setelah tiga kali membangkang terhadap panggilan Mataram, dikirimlah pasukan di bawah pimpinan Gusti Made Sangka. Agar Batukliang tidak mengalami nasib sama dengan Praya, Raden Sumintang menyerahkan diri di Aikgering dan dihabisi nyawanya oleh Gusti Made Sangka. Menyaksikan pembunuhan tersebut, Tati' Engkis, pengikut setia Raden Sumintang, mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi baru berhasil menewaskan seorang musuh, ia juga kehilangan nyawa menyusul tuannya. Setelah penaklukan Kopang dan Batukliang ini, tiba giliran Raden Amir dari Mamben, Raden Kardiyu dari Korleko, dan Raden Meraja dari Kalijaga. Semuanya terpaksa tunduk kepada kekuasaan Mataram.

Kurang lebih sama dengan peristiwa-peristiwa di atas, pada 1841 Belanda berniat menjalin hubungan dengan raja-raja Bali dan Lombok. Penyebabnya adalah kekhawatiran Belanda apabila pulau-pulau itu jatuh ke tangan pengaruh Inggris, apalagi G.P. King berpengaruh besar di Mataram. Perjanjian dengan Raja Mataram berhasil ditandatangani pada 7 Juni 1843, yang antara lain berisikan butir-butir sebagai berikut[6]:

- Mataram mengakui kekuasaan Belanda atas Lombok.
- Mataram berjanji tak akan menyerahkan pulau tersebut kepada bangsa Eropa lainnya atau menjalin hubungan dengan mereka tanpa seizin Belanda.
- Setiap tiga tahun sekali, Mataram akan mengirimkan utusan kepada gubernur jenderal di Batavia sebagai tanda kesetiaan, dan demikian pula halnya dengan Belanda.
- Mataram akan menghapuskan hak tawan karang.

6. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 99.

- Mataram berjanji melindungi kepentingan-kepentingan Belanda, terutama yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan.
- Pemerintah kolonial Belanda berjanji tak akan mencampuri urusan dalam negeri Mataram.

Raja Anak Agung Ketut Karangasem beserta Patih Gusti Gede Wanasara, Dewa Anom, Gusti Gede Rai, Gusti Ninga Paguyangan, dan Gusti Nyoman Tangkeban, membubuhkan tanda-tangannya pada perjanjian di atas. Hal ini merupakan wujud masuknya pengaruh Belanda di Mataram. Berkat perjanjian tersebut, pengaruh Inggris berangsur-angsur menghilang dari Lombok. Pihak Mataram sendiri memang mematuhi perjanjian itu dengan mengirimkan utusannya ke Batavia setiap tiga tahun sekali. Kesetiaan Mataram terbukti dengan bantuannya terhadap Belanda ketika terlibat permusuhan dengan Karangasem dan Klungkung pada 1849. Namun, di balik bantuan itu, Mataram sebenarnya juga berharap memperoleh daerah Culik dari Karangasem. Mataram menjanjikan bantuan sebesar 6.000 orang prajurit, tetapi hanya 4.000 pasukan yang berhasil dipenuhinya. Pasukan Mataram mendarat di Ujung pada 20 Mei 1849 dan bergabung dengan Gusti Made Jungutan, patih Karangasem yang merasa berhak atas tahta Karangasem. Berkat bala bantuan yang dikirim Mataram ini, Belanda berhasil mengalahkan Karangasem beserta Klungkung. Belanda membalas jasa Mataram dengan menyerahkan Karangasem. Oleh sebab itu, kondisinya kini boleh dikatakan berbalik karena dahulu Mataramlah yang merupakan vasal (daerah taklukan) Karangasem.

Kendati berhasil menguasai seluruh Lombok, kondisi Mataram tidak pernah tenang. Pergolakan yang dipicu oleh masyarakat Sasak kerap terjadi. Ketidakpuasan rakyat Sasak ini disebabkan kesewenang-wenangan Mataram terhadap mereka, antara lain yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Jenuh dengan permasalahan yang mendera negerinya, Raja Mataram bertapa di Batu Bolong demi memohon petunjuk dewata. Bertepatan dengan malam Jumat, raja bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut perasaan raja, saat itu ia sedang berada di Kalijaga. Mimpi ini kemudian ditanyakan artinya kepada beberapa penafsir mimpi. Seorang haji dari desa Sakra bernama Haji Abubakar menafsirkan bahwa raja akan memerintah dengan aman dan damai asalkan memperistri seorang putri Sasak yang berada di desa Kalijaga. Wanita yang hendaknya diperistri oleh raja adalah Dinda Aminah, putri Dea Guru, seorang pemuka Agama Islam di desa Kalijaga.

Raja Mataram mengirimkan Patih Gusti Gede Wanasara melamar putri itu. Namun, lamaran itu ditolak dengan mengatakan bahwa Dinda Aminah sudah bersuami, padahal sesungguhnya belum. Akibatnya, Raja Mataram menjadi murka dan memutuskan menyerang Kalijaga. Ternyata, keberanian Dea Guru dan Dea Meraja, pemimpin kampung Kalijaga, dalam menyikapi lamaran tersebut bermula dari janji Raden Amir, pemimpin Mamben, dan Raden Kardiyu, pemimpin Korleko. Keduanya sepakat memberikan bantuan apabila Mataram menyerang Kalijaga. Mataram mengetahui aliansi ini dan berniat memecah ketiganya. Baik Dea Meraja, Raden Amir, maupun Raden Kardiyu diundang ke Mataram. Tentu saja Dea Meraja menolaknya karena sadar bahwa datang ke Mataram berarti menyerahkan nyawanya. Sementara itu, Raden Amir dan Raden Kardiyu bersedia memenuhinya.

Kedua orang ini disambut oleh Gusti Gede Wanasara yang memerintahkan menangkap serta membawa mereka ke pekuburan guna dijatuhi hukuman mati. Tetapi konon tak satupun senjata tajam mempan terhadap mereka. Patih Mataram melaporkan kepada raja mengenai peristiwa mengesankan tersebut, yang berencana mengampuni mereka asalkan keduanya bersedia membantu Mataram menghancurkan Kalijaga serta menangkap Dea Meraja dan Dea Guru. Pasukan Mataram dengan dibantu Raden Amir dan Raden Kardiyu melancarkan serangan terhadap Kalijaga, tetapi tidak berhasil. Menyadari hal itu, Raden Amir beserta Raden Kardiyu berbalik memihak Kalijaga dan mereka lantas berencana menyerang pertahanan Mataram di Pringgasela.

Rencana ini dibocorkan oleh seorang warga Kalijaga bernama Pe Sriyaman kepada pihak Mataram. Ketika serangan terhadap Pringgasela akhirnya dilancarkan juga, di tengah-tengah berkecamuknya pertempuran, Raden Amir dan Raden Kardiyu teringat janjinya menangkap Dea Guru beserta Dea Meraja. Oleh karenanya, mereka beralih lagi memihak Mataram dan berbalik memimpin pasukannya menghancurkan Kalijaga. Dengan dibantu oleh Pe Sriyaman, mereka berhasil membakar desa Kalijaga. Akibat pengkhianatan ketiga orang ini, pasukan Kalijaga merosot moralnya sehingga mengalami kekalahan telak.

Dea Meraja beserta putranya, Raden Nuna Darmasih melarikan diri ke Sumbawa, sedangkan Dea Guru beserta putrinya bersembunyi di hutan Bungus Jawi. Kendati demikian, pasukan Mataram berhasil menemukan mereka. Dea Guru dipenggal kepalanya dan putrinya, Dinda Aminah, dibawa ke Mataram. Akhirnya, Raja Mataram

menikah dengan Dinda Aminah. Semenjak saat itu, Dinda Aminah diganti namanya menjadi Dinda Nawangsasih, dimana *sasih* sendiri berarti “bulan", sesuai dengan mimpi raja yang kejatuhan bulan.

Memang benar, setelah pernikahan raja dengan Dinda Aminah, kondisi Lombok menjadi lebih aman. Raja Mataram kemudian membangun bekas ibukota Singasari dan selesai pada 1866. Namanya diubah menjadi Cakranegara yang bermakna Negara Menjadi Bulat. Di sana ia membangun puri yang jauh lebih indah dibandingkan istananya di Mataram. Berkat pengaruh Dinda Aminah yang seorang muslimah taat, umat Islam diberi keleluasaan lebih besar dalam menunaikan ibadahnya. Raja bahkan membangun masjid besar, masing-masing di Cakranegara dan Ampenan. Guru-guru mengaji didatangkan pula di istana Mataram. Salah seorang di antara mereka yang paling terkemuka adalah Guru Baok atau Haji Mohammad Yasin dari Kelayu. Cucu raja ada yang beralih menganut agama Islam dan selanjutnya dikenal sebagai Iman Sumantri.

Beberapa pemberontakan kecil-kecilan terjadi, seperti yang dipimpin oleh Syekh Abdulgani, seorang ulama keturunan Arab asal Dompu. Ia mengaku memiliki kekuatan gaib dan oleh warga desa Menjeli dianggap sebagai penjelmaan Raja Pejanggik. Tokoh ini mengumpulkan banyak pengikut di desa tersebut dan menghasut rakyatnya memberontak melawan Mataram. Kendati demikian, Mataram berhasil menumpas pemberontakan ini dan Syekh Abdulgani melarikan diri ke Sumbawa.

Setelah memerintah sendiri pada 1872, Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem mulai lanjut usianya dan urusan pemerintahan diserahkan kepada putra-putranya, Anak Agung Made dan Anak Agung Ketut Karangasem. Putra yang disebut belakangan ini merupakan pribadi yang lemah. Sementara itu, Anak Agung Made lebih ambisius dan sepak terjangnya malah memicu kehancuran Mataram kelak. Ia menerapkan monopoli atas penanaman berbagai komoditas, seperti tembakau dan tebu. Pajak yang berat dibebankan kepada rakyat sehingga meskipun kas kerajaan makin menggelembung, tetapi simpati rakyat malah menurun drastis. Anak Agung Made sangat serakah mengumpulkan harta kekayaan. Wilayah pelabuhan disewakan kepada para syahbandar yang pada gilirannya wajib menyerahkan upeti kepada Anak Agung Made. Jikalau mereka gagal dalam memenuhi kewajibannya, Anak Agung Made tidak segan-segan menindak para syahbandar itu dengan tegas. Insiden dengan Belanda terjadi ketika seorang agen kapal api berkebangsaan Belanda bernama

Patiwail ditangkap pada 1887 karena gagal melunasi hutangnya dan dipenjarakan di Pamotan. Pemerintah Hindia Belanda merasa tersinggung karenanya dan mengajukan dua tuntutan kepada Raja Mataram, yakni mengharuskan Patiwail dibebaskan dan menjamin agar perdagangan candu asal Gianyar jangan sampai bocor ke Jawa. Sebagai jaminan, Mataram wajib membayar jaminan sebesar 7.000 Ringgit. Semua persyaratan pemerintah kolonial di atas diterima oleh Raja Mataram, terkecuali tuntutan pembayaran uang sebesar 7.000 Ringgit itu.

Pada 1891, Mengwi ditaklukkan oleh Badung, Tabanan, Bangli, Klungkung, dan Gianyar. Rajanya tewas dalam Perang Puputan dan wilayah kerajaan tersebut dibagi-bagi antara para pemenang. Serangan ini dilancarkan atas perintah Klungkung karena Mengwi menduduki sebagian wilayah Klungkung. Setelah meluluhlantakkan Mengwi, pasukan gabungan berbagai kerajaan berniat mengarahkan serangannya kepada Karangasem. Karenanya, Raja Karangasem, Anak Agung Gusti Gede Jelantik (1890–1908), memohon bala bantuan kepada Mataram. Tentu saja, Mataram wajib menolong vasalnya yang terancam itu. Bala bantuan di bawah pimpinan Gusti Nengah Bekel dan Ida Wayan Bajra dikirimkan ke Karangasem.

Tidak berapa lama setelah pengiriman bala bantuan terhadap Karangasem, meletus pemberontakan di Praya yang digerakkan oleh Lalu Ismail (Guru Bangkol) dan Mamiq Srinata pada 8 Agustus 1891. Penyebabnya adalah kesewenang-wenangan terhadap warga Sasak yang dilakukan oleh Anak Agung Made dan terbunuhnya seorang ulama bernama Guru Ayang oleh seorang *perbekel* Bali tanpa diketahui kesalahannya. Guru Bangkol telah mengadukan tindakan ini kepada Raja Mataram, namun tak memperoleh tanggapan serius. Akibatnya, Praya bersiap mengangkat senjata melawan Karangasem, apalagi setelah berjanji mendapatkan bala bantuan dari seorang keturunan Arab bernama Tuan Serip, yang mengatakan bahwa Sayid Abdullah (penasihat Dinda Aminah) beserta Datu Pangeran (Iman Sumantri) di Cakranegara telah bersedia membantu mereka. Selain itu, ia mengatakan telah menghubungi desa-desa Sasak lainnya dan para pemimpinnya sepakat bergabung dengan gerakan perlawanan. Namun, pada kenyataannya, hanya dua desa yang telah dihubunginya, yakni Penunjang serta Puyung. Belakangan, Puyung malah memihak Mataram dan melaporkan rencana tersebut.

Mataram bergerak cepat memadamkan pergolakan ini dan peperangan antara kedua belah pihak pecah di Penenteng Aik. Pada kesempatan kali ini, Praya

berhasil mendesak Mataram ke Pakukeling. Kendati demikian, ketika bala bantuan didatangkan, giliran Praya yang terpukul mundur. Dalam pengejarannya terhadap sisa-sisa pasukan Praya, angkatan perang Mataram yang dipimpin oleh Anak Agung Made beserta para panglimanya, Gusti Ketut Gosa, Komang Pengsong, dan Ida Nyoman Gelgel bermarkas di Puyung. Desa Praya menjadi sepi karena rakyatnya mengungsi. Konon, hanya tujuh orang saja yang mempertahankan desa itu, yakni Guru Bangkol, Mamiq Sapian, Mamiq Diraja, Haji Yasin, Amaq Lembain, Amaq Tombok, dan Amaq Gewar. Meskipun demikian, Mataram tetap gagal merebut Praya.

Pengepungan dilakukan selama sebulan, tetapi Praya tidak kunjung jatuh. Bahkan keberanian pasukan Praya dalam melakukan serangan mendadak serta merebut perbekalan Mataram sungguh menurunkan moral pasukan Mataram. Anak Agung Made tertekan dengan keadaan itu, apalagi ayahnya telah memerintahkan agar masalah Praya ini diselesaikan selekas mungkin. Bala bantuan di bawah pimpinan Anak Agung Ketut Karangasem didatangkan, tetapi tak juga membuahkan hasil apa-apa. Mereka juga memaksa para prajurit dari desa-desa Sasak turut membantu pasukan Mataram mengepung Praya. Akhirnya, kedua pimpinan pasukan Mataram ini merasa curiga terhadap para pemuka Sasak yang membantu mereka. Anak Agung Made maupun Anak Agung Ketut Karangasem menuduh orang-orang Sasak tidak berperang dengan sungguh-sungguh. Sebagai pelampiasan kekesalan mereka, Mamiq Wirata beserta anaknya, dipanggil ke Cakranegara dan dibunuh di sana. Empat ratus lima puluh orang prajurit Sasak pengikut Mamiq Wirata tak luput dari kekejaman ini.

Sakra juga dipaksa Mataram turut serta dalam penaklukan Praya. Ketika itu, Sakra di antara desa-desa Sasak lainnya mengirimkan pasukan terbanyak guna mendukung bala tentara Mataram di bawah pimpinan Mamiq Nursasih dan Tuan Guru Haji Ali Batu. Gagalnya penaklukan Praya, menjadikan Anak Agung Made menyangsikan kesungguhan mereka sehingga berniat menghabisi pula kedua pimpinan Sakra tersebut. Apalagi Guru Haji Ali Batu dan Guru Bangkol sama-sama penganut tarekat Naqsyabandiyah. Guru Haji Ali Batu bersama Mamiq Nursasih yang menjadi sasaran pembersihan berikutnya berhasil melarikan diri dan berbalik menyerukan perang melawan Mataram.

Seruan ini bagaikan gayung bersambut di kalangan desa-desa Sasak yang telah menyaksikan kesewenang-wenangan Mataram. Hampir seluruh desa di Lombok tengah dan timur bangkit mendukung gerakan perlawanan terhadap Mataram.

Kebangkitan ini sungguh dashyat dan di luar dugaan karena seluruh pejabat Mataram di desa-desa tersebut disapu bersih. Sakra berhasil mengonsolidasi kekuatannya lagi dan bergabung dengan Praya beserta desa-desa Sasak lainnya. Kini untuk pertama kalinya, keturunan Pejanggik dan Banjar Getas (Praya) merapatkan diri dalam satu barisan demi menghadapi Mataram. Mereka menjadikan Kopang sebagai markas perlawanan dan sepakat melaporkan perkembangan keadaan kepada pemerintah kolonial Belanda melalui surat bertanggal 9 Desember 1891 (7 Jumadilawal 1309)[7].

Surat itu ditandatangani oleh Mamiq Mustiaji dari Kopang, Mamiq Bangkol dari Praya, Mamiq Nursasih dari Sakra, Raden Ginawang dari Batukliang, Raden Ratmawa dari Rarang, Raden Wiranom dari Pringgabaya, dan Raden Melaya Kusuma dari Masbage. Isinya mengadukan kesewenang-wenangan Mataram terhadap rakyat Sasak, seperti mewajibkan mereka melakukan kerja paksa yang disebut *ngayah* (melakukan pekerjaan tanpa mendapat upah); mengambil secara paksa anak-anak Sasak guna dijadikan budak; anak-anak perempuan dipaksa menjadi istri raja atau kaum bangsawan; memaksa rakyat Sasak turut membantu Mataram dalam segenap peperangannya; tanah-tanah yang subur dikuasai oleh kerajaan; orang-orang Islam yang hendak menunaikan ibadahnya dipersulit, umpamanya dalam hal naik haji; orang-orang Sasak diharuskan menanam tanaman yang tinggi nilainya tanpa kompensasi berarti; dan lain sebagainya.

Kaum pemberontak bergerak merebut desa-desa di sebelah barat Sungai Babak sehingga Mataram makin terdesak. Bahkan dalam salah satu pertempuran, Anak Agung Made nyaris kehilangan nyawanya apabila tidak dilarikan oleh anak buahnya. Kini wilayah Mataram tinggal seputar Cakranegara, Mataram, dan Narmada saja. Tetapi berkat persenjataan dan kekayaannya, Mataram sanggup bertahan dan mengumpulkan kembali kekuatannya. Bersamaan dengan itu, rakyat Sasak meminta bantuan pula kepada Belanda, namun karena terikat perjanjian pada 7 Juni 1843, pemerintah kolonial tak dapat begitu saja menurunkan pasukannya menolong mereka. Mataram membeli pula kapal perang *Sri Cakra* dan *Sri Mataram* dari Singapura guna mengamankan perairan Lombok. Ia menjalin pula hubungan dengan orang Tionghoa yang berdiam di Singaraja bernama The Tjiang Tjoe dan Oei Soen Tjioe dari Singapura dalam rangka pengoperasian kapal[8].

7. Lihat *Keris di Lombok*, halaman 93.
8. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 74.

Pembelian kapal perang dan persenjataan dari Inggris ini dipandang oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pelanggaran terhadap perjanjian 1843, khususnya butir kesepakatan bahwa Mataram tidak akan menjalin hubungan dengan bangsa asing lain. Pada awal bulan Mei 1892 terjadi insiden penahanan kapal *Sri Mataram* yang dipergunakan mengangkut 600 prajurit asal Karangasem di Ampenan oleh nakhoda kapal *Java*. Raja Mataram melayangkan protes kepada residen Belanda yang berkedudukan di Singaraja dan menyatakan bahwa pengiriman pasukan bala bantuan dari Karangasem itu sudah semenjak dahulu dijalankan serta tidak menyalahi perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda. Dijelaskan pula bahwa telah menjadi tradisi Mataram dan Karangasem saling membantu jika dilanda peperangan. Raja Karangasem I Gusti Gede Putu juga melayangkan surat protes kepada M.C. Dannenbargh, residen Bali dan Lombok mengenai penahanan tersebut.

Satu persatu desa yang diduduki orang Sasak dapat direbut kembali oleh Mataram. Bertepatan dengan kurun waktu ini, perang di Bali usai sudah dan bala bantuan dari Karangasem dapat didatangkan. Belanda mengingatkan Mataram agar penumpasan terhadap pergolakan Sasak jangan dilakukan terlampau kejam, tetapi Anak Agung Made tidak mengindahkannya sama sekali. Pasukan Mataram dibagi menjadi dua front dalam menghadapi orang-orang Sasak dan demikian pula dengan pasukan Sasak.

Setelah menerima surat laporan dari para pemuka Sasak di atas, pemerintah kolonial Belanda mengirimkan orang-orang Bugis guna memantau perkembangan di Lombok. Melalui perantaraan mereka, para pemuka Sasak melayangkan surat permohonan bala bantuan kepada Belanda tertanggal 20 Februari 1894. Utusan pemerintah kolonial di bawah pimpinan Liefrinck menjumpai pimpinan Sasak di Sakra pada 3 Maret 1894 dan setelah itu kembali ke Buleleng. Selang beberapa hari kemudian, Liefrinck kembali lagi ke Sakra dengan beberapa kapal perang dan membicarakan rencana mengalahkan Mataram. Akibat peperangan yang telah berlarut-larut selama 4 tahun, kegiatan bercocok tanam terbengkalai sehingga rakyat Sasak terancam bencana kelaparan. Pemerintah kolonial Belanda membantu mereka dengan menyumbangkan bahan makanan. Pertempuran antara Mataram dan rakyat Sasak sementara waktu boleh dikatakan terhenti.

Sebelumnya, pada 1893 Belanda telah menawarkan menjadi mediator atau juru damai antara Mataram dan rakyat Sasak, tetapi ditolak oleh Raja Mataram.

Keadaan makin runyam ketika pemerintah kolonial menerima laporan bahwa Anak Agung Made hendak membantai seluruh pemuka Sasak agar tak mengobarkan pemberontakan lagi di kemudian hari. Di samping itu, para pemimpin Sasak telah menyampaikan sikapnya bahwa mereka tak bersedia lagi berada di bawah pemerintahan Mataram. Gubernur jenderal Belanda di Batavia memutuskan bahwa ekspedisi militer ke Lombok tidak dapat ditunda-tunda lagi. Surat pemberitahuan terhadap Bergsma, menteri urusan daerah jajahan, dilayangkan pada 22 Mei 1894 mengenai pentingnya campur tangan pemerintah kolonial guna menertibkan kondisi keamanan di Lombok. Meskipun demikian, sebelum menempuh jalan kekerasan, gubernur jenderal memerintahkan residen Bali dan Lombok mengunjungi terlebih dahulu Raja Mataram sambil melayangkan tuntutan sebagai berikut[9]:

- Raja Mataram meminta maaf terhadap pemerintah kolonial atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya.
- Raja Mataram akan memenuhi tuntutan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
- Anak Agung Made harus diserahkan kepada Belanda.
- Mataram harus menerima campur tangan residen dalam menyelesaikan permasalahan di Lombok.

Tuntutan ini disampaikan di hadapan kedua putra Raja Mataram pada 9 Juni 1894 dan mereka diberikan waktu tiga hari untuk menjawabnya. Dua hari kemudian, residen menerima surat permohonan penundaan waktu yang tak terbatas. Dengan tegas, residen menolaknya dan mengatakan bahwa tiadanya jawaban apapun hingga batas waktu yang telah ditetapkan berarti penolakan terhadap tuntutan di atas. Setelah habisnya masa tenggang waktu, residen tak mendapatkan jawaban apa-apa dan kembali ke Buleleng pada 13 Juni 1894.

Gubernur Jenderal van der Wick memerintahkan pengiriman pasukan ke Lombok pada 3 Juli 1894 yang diberangkatkan dari Surabaya. Seiring dengan persiapan perang ini, pemerintah kolonial memperketat aturan mengenai masuknya logistik dan keperluan perang ke Lombok. Raja-raja Bali diberitahu mengenai hal ini dan mereka menyatakan dukungannya bagi ekspedisi tersebut, bahkan Raja Bangli menyumbangkan fl.1000,- kepada pemerintah kolonial Belanda. Ekspedisi militer yang didukung oleh lima kapal perang ini, yakni *Prins Hendrik*, *Koningin Emma*,

9. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 108.

Tromp, *Sumatera*, dan *Borneo*, mendarat di Ampenan pada 6 Juli 1894. Panglimanya yang bernama J.A. Vetter beserta wakilnya P.P.H. van Ham menyampaikan ultimatum sebagai berikut kepada Raja Mataram[10]:

- Raja Mataram harus bersedia tunduk sepenuhnya di bawah pemerintahan Hindia Belanda.
- Raja harus meminta maaf atas segenap kesalahannya.
- Anak Agung Made harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda.

Pendaratan tentara Belanda dilangsungkan pada 6 Juli 1894 tanpa mengalami hambatan apapun. Pertemuan tak terduga antara van Ham dengan Raja Anak Agung Gusti Gede Jelantik dari Karangasem terjadi pada 8 Juli 1894. Raja Karangasem tersebut pada hakikatnya meminta maaf kepada pemerintah kolonial karena kelalaiannya menanggapi pengumuman Belanda mengenai ekspedisi ke Lombok. Pada pertemuan berikutnya yang berlangsung keesokan harinya, Raja Karangasem kembali menjumpai van Ham dan menyatakan bahwa ia tak mau terlibat dalam permasalahan dengan Raja Mataram tersebut. Ia menyampaikan akan kembali ke Karangasem beserta 1.200 pasukannya, kecuali jika van Ham membutuhkannya.

Raja Mataram mengirimkan surat kepada van Ham tertanggal 10 Juli 1894. Isinya menyatakan bahwa raja bersedia menerima seluruh isi ultimatum di atas, kecuali menyerahkan Anak Agung Made. Van Ham menuntut agar Mataram memenuhi seluruh butir ultimatum tanpa terkecuali, bila tidak, serangan akan tetap dilancarkan. Sehari kemudian, ketika pasukan pemerintah kolonial hendak diberangkatkan, tibalah utusan yang membawa surat Raja Mataram. Kali ini raja dalam suratnya bersedia memenuhi seluruh tuntutan, termasuk yang berkenaan dengan Anak Agung Made. Raja bahkan mengusulkan akan mengasingkan Anak Agung Made ke kawasan Culik. Selain itu, utusan yang ditugaskan menyampaikan pesan memberitahukan bahwa setelah surat tersebut ditulis, Anak Agung Made membunuh dirinya sendiri. Liefrinck dan dua orang penggawa Buleleng yang mengenal Anak Agung Made diutus menyaksikan kebenaran berita itu. Ternyata memang benar bahwa Anak Agung Made telah bunuh diri atau dibunuh dan peristiwanya diperkirakan terjadi setelah Liefrinck tiba di Cakranegara; karena ketika Liefrinck beserta dua orang penggawa Buleleng tiba di istana, mayat Made masih menggelepar.

10. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 109.

Bersamaan kematian Anak Agung Made, serangan terhadap Mataram dibatalkan, tetapi pendaratan pasukan Belanda tetap dilangsungkan hingga selesai. Hanya saja kini bukan sebagai pasukan penyerbu lagi. Vetter, panglima perang ekspedisi Lombok mendirikan kubu-kubu bagi pasukannya yang terletak di antara Mataram dan Karangjangkong serta sebelah barat Meru Cakranegara, berhadapan dengan istana raja. Tak berapa lama berselang, pembicaraan antara Mataram dengan wakil-wakil Sasak digelar. Pertama-tama diadakan pertemuan dengan Mataram, yang diwakili oleh Anak Agung Ketut dan Anak Agung Gusti Gede Jelantik dari Karangasem. Setelah mendapatkan persetujuan gubernur jenderal pembicaraan dengan wakil-wakil Sasak digelar. Berdasarkan hasil perundingan dengan kedua belah pihak, diputuskan:[11]:

- Rakyat Sasak diizinkan membentuk pemerintahan sendiri yang setara dengan Mataram.
- Mataram diharuskan membayar biaya ekspedisi sebesar fl. 1 juta yang harus dilunasi sebelum pasukan pemerintah kolonial meninggalkan Lombok.
- Mataram dibebani kewajiban menyumbang setiap tahunnya sebesar fl.25.000 bagi penyelenggaraan pemerintah Belanda di Lombok.

Mataram menerima seluruh keputusan di atas tanpa syarat. Kini panglima pasukan kolonial memerintahkan agar benteng-benteng pertahanan kedua belah pihak yang bertikai dihancurkan demi menjamin berlangsungnya kedamaian di Lombok. Pasukan Karangasem yang bermarkas di Kotaraja ditarik ke Cakranegara agar dapat dipulangkan selekasnya ke kampung halaman mereka. Warga diperintahkan bercocok tanam sebagaimana biasanya.

Peperangan kelihatannya sudah selesai dan perdamaian dapat dipulihkan. Tetapi setelah beberapa kali mengangsur pembayaran ganti rugi perang, raja tampaknya berubah pikiran karena hasutan seorang Rusia bernama Malingin. Ia menghasut raja agar mengadakan penyergapan terhadap pasukan Belanda yang bersiap meninggalkan Lombok. Rencana serangan mendadak ini sebenarnya telah dibocorkan oleh Amaq Amat penduduk Sukaraja kepada Kapten Infantri Schmidhamer, yang menyampaikannya kepada Vetter. Begitu mendengar hal ini, Vetter menanyakan kebenarannya kepada Anak Agung Gusti Gede Jelantik, tetapi dia menjawab tak pernah mendengar hal semacam itu. Sepucuk surat juga dilayangkan kepada Anak

11. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 111.

Agung Ketut Karangasem yang menanyakan kebenaran desas desus itu, dan bila hanya kabar bohong belaka pencetusnya harus diusut sampai tuntas.

Vetter tenang-tenang saja karena percaya bahwa itu semua cuma rumor. Pasukan pemerintah kolonial yang berada di Cakra ditambah jumlahnya hingga mencapai 400 orang dan mereka semua tidak menyadari datangnya bahaya. Pada 25 Agustus 1894 malam, Vetter beserta van Ham bermalam di perkubuan pasukannya. Memecah keheningan malam, tiba-tiba pada pukul 23.15 terdengar letusan senjata api dan sekonyong-konyong muncul pasukan Mataram menyerang mereka. Kubu pasukan Belanda yang berada di antara Karangjangkong dan Mataram juga tak luput dari serangan. Pertempuran dashyat berkobar dan korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pasukan Belanda yang tak siap banyak menjadi korban dan perlengkapan perang mereka dirampas oleh Mataram. Panglima pasukan Belanda, Vetter terpaksa menyelamatkan dirinya dengan melalui hujan peluru. Untungnya, ia berhasil bergabung dengan pasukan induknya di Ampenan. Van Ham tertembak di bagian dada serta perutnya dan meninggal di Karangjangkong.

Pasukan pemerintah kolonial yang kembali dari tugasnya di pedalaman juga menjadi sasaran empuk serangan Mataram. Pada 1 September 1894, pasukan yang kembali dari Batukliang terkepung di Cakra dan menyerah. Tetapi Raja Mataram membebaskan mereka dengan harapan agar Belanda bersedia mengakhiri perangnya karena Mataram telah dihujani tembakan selama berhari-hari. Akibat serbuan mendadak ini, Belanda kehilangan 97 orang pasukannya, yang terdiri dari sembilan perwira, 50 prajurit berkebangsaan Belanda, dan 38 pasukan pribumi. Korban yang luka-luka berjumlah 237 orang. Menurut Lalu Djelenga dalam bukunya, serangan mendadak yang dipimpin oleh Gusti Ketut Gosa ini justru terjadi di luar pengetahuan raja dan dilancarkan oleh para pengikut Anak Agung Made[12].

Belanda membalas dendam terhadap kerusakan yang diderita pasukannya. Gubernur jenderal menerima laporan mengenai insiden tersebut dan memutuskan pengiriman bala bantuan ke Lombok. Karenanya, Vetter mulai melancarkan serangan balasannya dan berhasil menghancurkan pertahanan Mataram di sebelah barat kota. Mataram sendiri terus dibombardir semenjak 30 Agustus 1894. Perairan sekitar Lombok diblokade oleh Belanda guna mencegah datangnya bala bantuan dari Bali. Sementara itu, Anak Agung Gusti Gede Jelantik, Raja Karangasem, beserta pasukannya

12. Lihat *Keris di Lombok*, halaman 123.

bertolak kembali ke Bali pada 7 Agustus 1894. Dengan demikian, kini Mataram harus berjuang sendirian dan tak dapat mengharapkan bantuan dari manapun juga. Belanda mempersenjatai orang-orang Sasak guna mengalahkan Mataram. Raja Mataram berupaya menarik simpati mereka agar jangan memihak Belanda, tetapi gagal. Agar Belanda menangguhkan serangannya, raja memerintahkan eksekusi terhadap Gusti Ketut Gosa yang dianggap bertanggung jawab terhadap kericuhan yang menimpa negerinya. Orang-orang Sasak dengan suka cita menyambutnya dan menghabisi nyawa Gusti Ketut Kosa yang saat itu tengah menyingkir ke rumah istrinya di Batu Jai. Kepalanya diserahkan kepada pucuk pimpinan pasukan Belanda pada 11 September 1894. Namun, upaya ini tidak menyurutkan sedikitpun niat Belanda menghancurkan Mataram yang dianggap tak berwibawa lagi di hadapan rakyatnya.

Pasukan bala bantuan yang dipimpin oleh M. Segov beserta J.J.K. de Moulin tiba di Lombok dan diperkuat oleh pasukan Madura di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raden Mayangkoro. Satu persatu daerah yang dikuasai Mataram jatuh ke tangan Belanda. Pagutan dan Pagusangan berhasil dikuasai pemerintah kolonial dengan dibantu pasukan Sasak pada 17 September 1894. Gusti Luki, putra Anak Agung Made, tewas saat berlangsungnya serangan tersebut. Malam hari pada 19 dan 20 September 1894, Mataram berupaya merebut kembali kedua kawasan tersebut, tetapi gagal.

Mataram akan menjadi sasaran serangan pada 29 September 1894. Guna mengalihkan perhatian Mataram, pasukan Belanda di bawah pimpinan M. Segov seolah-olah memusatkan kekuatannya di daerah timur laut. Tiga setengah batalion pasukan dikerahkan menyerang Mataram yang melakukan perlawanan dengan hebat. Putra mahkota Anak Agung Ketut Karangasem gugur dalam pertempuran ini dan Mataram akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Peristiwa ini mengakibatkan kemerosotan moral dalam diri pasukan Mataram.

Pada 15 November 1894, tiba kembali pasukan bala bantuan di Ampenan dan serangan kali ini hendak dilancarkan ke Cakranegara, pusat pemerintahan Mataram. Kepanikan timbul di sana dan banyak penduduknya melarikan diri ke pedalaman. Selama berhari-hari Cakranegara dihujani bom oleh pasukan pemerintah kolonial. Jengkal demi jengkal, Belanda berhasil memperoleh kemajuan dan sanggup menguasai daerah sekitar istana. Ketika hampir mencapai tempat kediaman raja, pasukan pemerintah kolonial terpukul mundur sehingga Vetter memutuskan menunda serangan hingga keesokan harinya. Raja memanfaatkan kesempatan ini dan

melarikan diri ke Sasari. Dengan demikian, ketika pasukan Belanda memasuki *puri* sudah dalam keadaan kosong. Bahkan sebelum Belanda tiba, orang-orang Sasak telah menjarah berbagai harta benda dan perhiasan yang ditinggalkan keluarga kerajaan. Di dalam gudang perbendaharaan kerajaan, Belanda menemukan 230 kilogram emas dan 3.180 kilogram uang perak. Bahkan, ekspedisi militer ini berhasil mendapatkan pula naskah *Negarakertagama*, suatu literatur berharga mengenai sejarah Majapahit.

Kini pengepungan dilanjutkan ke Sasari, yakni tempat pelarian Raja Mataram. Pada kesempatan tersebut, raja diperintahkan menyerah dan akan diserang bila menolaknya. Demi menghindari jatuhnya lebih banyak korban, Raja Mataram memutuskan menyerah pada 20 November 1894 bersama dengan putra mahkota Anak Agung Made Jelantik, pengganti Anak Agung Ketut Karangasem yang gugur dalam peperangan. Raja Mataram terakhir ini dibawa ke Ampenan dan selanjutnya diasingkan ke Batavia pada 23 November 1894. Di pengasingannya, raja ditempatkan di Tanah Abang dan meninggal pada 20 Mei 1895. Ekspedisi militer dilanjutkan guna membersihkan sisa-sisa kekuatan Mataram. Tohpati diserang pada 26 November 1894, dan tempat persembunyian putra raja bernama Anak Agung Nengah Karang yang sakit-sakitan dihujani tembakan. Ia beserta pengikutnya menemui ajalnya dalam serbuan ini. Kerabat raja yang tidak mau menyerah seluruhnya melakukan *puputan*. Secara keseluruhan, ekspedisi militer penaklukan Lombok boleh dikatakan berakhir pada 1 Desember 1894. Semenjak saat itu, jatuhlah Lombok dalam kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Wilayah kekuasaan Mataram dibagi menjadi dua bagian, yakni Timuq Juring dan Baret Juring. Kawasan Timuq Juring mayoritas didiami oleh suku Sasak dan dibagi atas berbagai daerah yang dipimpin seorang *perkanggo* (pejabat desa). Sebelumnya, wilayah kekuasaan para *perkanggo* ini merupakan bekas ke-*datu*-an atau kerajaan kecil, seperti Pujut, Praya, Sakra, Rarang, Mantang, Kopang, dan Pringgabaya. Setiap *perkanggo* masih membawahi lagi beberapa *pemekel* (kepala desa). Masing-masing *pemekel* membawahi beberapa *kiliang* (kepala kampung). Wilayah Baret Juring sebagian besar dihuni oleh suku Bali dan terbagi menjadi beberapa daerah yang dipimpin seorang penggawa. Para penggawa membawahi *pemekel*. Selanjutnya kepala desa membawahi beberapa *kiliang*.

V. PAGESANGAN

Pagesangan adalah salah satu kerajaan Bali Awal di Lombok. Cikal bakal kerajaan ini adalah Gusti Nyoman Agung (± 1700), yang merupakan putra Anglurah Ketut Karangasem, Raja Karangasem di Bali. Sumber lain menyebutkan Raja Pagesangan bernama Anak Agung Nyoman Karang[13]. Gusti Nyoman Agung digantikan oleh putranya bernama Anak Agung Putu Lebah (Gusti Wayan Lebah), kurang lebih pada abad 18. Rangkaian raja-raja Pagesangan berikutnya adalah Gusti Nengah Tegeh, Gusti Wayahan Tegeh (1741–1775), Gusti Ketut Karang (1775–± 1783), Anak Agung Lanang Nengah Karangasem (± 1800), dan Anak Agung Nengah Tegeh (1804–1836)[14]. Pagesangan ditaklukkan oleh Singasari pada 1836. Hampir seluruh keluarga raja tewas, kecuali seorang yang berhasil melarikan diri ke Sumbawa.

VI. PAGUTAN

Bersama dengan Pagesangan, Pagutan merupakan salah satu kerajaan Bali Awal di Lombok. Pagutan pernah diperintah oleh Raja Anak Agung Wayan Sidemen[15] (± abad 18), putra Anak Agung Putu Lebah, Raja Pagesangan[16]. Ia menikah dengan Gusti Ayu Ketut Jelantik dan berputra Anak Agung Nengah Sidemen. Putranya ini kemudian menjadi Raja Pagutan berikutnya dan dikenal sebagai Anak Agung Nengah Sidemen I (± abad 18). Pernikahan pertamanya dengan Anak Agung Ayu Sidemen, putri Raja Pagesangan dan Selaparang, Gusti Wayahan Tegeh, membuahkan keturunan Gusti Gede Sidemen, Gusti Alit Sidemen, dan Anak Agung Nengah Sidemen. Raja Anak Agung Nengah Sidemen I menikah pula dengan wanita lain yang tak disebutkan namanya dan memperoleh keturunan Gusti Wayan Banjar serta seorang putri bernama Gusti Ayu Ratih, yang menikah dengan Gusti Ngurah Made Karangasem I, Raja Singasari.

Raja digantikan oleh putranya, Anak Agung Nengah Sidemen, yang juga dikenal sebagai Anak Agung Nengah Sidemen II (± 1800). Ketika raja mangkat, singgasana Pagutan diwarisi oleh Anak Agung Ketut Karang, yang merupakan raja terakhir Pagutan. Setelah runtuhnya Singasari, kerajaan ini ditaklukan oleh Mataram. Pemicu

13. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 48.
14. Lihat manuskrip karya Hans Hagerdhal.
15. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 48.
16. Menurut silsilah yang diberikan oleh Hans Hägerdal.

peperangan antara Pagutan dan Mataram[17] yang menewaskan Raja Anak Agung Ketut Karang beserta patihnya bernama Gusti Ketut Patra adalah pinangan terhadap putri Raja Pagutan bernama Anak Agung Ayu Bulan. Ketika itu, putri Pagutan tersebut hendak dilamar bagi putra Raja Mataram. Lamaran ini diterima oleh Pagutan walau dengan berat hati. Kendati demikian, Raja Kuripan, Dene' Laki Batu, menyarankan agar pinangan itu jangan ditepati dan Kuripan berjanji akan memberikan bantuannya jikalau diserang oleh Mataram. Namun, bantuan dari Kuripan tak kunjung tiba hingga berakhirnya peperangan.

VII. PEJANGGIK

Berdasarkan silsilahnya, para penguasa Pejanggik masih sekerabat dengan Selaparang. Cikal bakal kerajaan ini dapat ditelusuri kepada Deneq Mas Komala Dewa Sempopo yang menyertai ayahnya (Deneq Mas Putra Pengendeng Segara Katon Rambitan) menyepi di Rambitan. Ia memiliki dua orang putra, yakni Dewa Mas Komala Jagat dan Deneq Mas Komala Sari. Putra keduanya ini menikah dengan Mas Inten Putri Anjani, putri Deneq Mas Komala Jagad, yang mewarisi tahta Deneq Mas Putra Pengendeng Segara Katon Rambitan selaku Raja Kayangan. Pernikahan ini dikaruniai tiga orang putra, yakni Deneq Mas Unda Putih, Deneq Mas Gunadam Putih, dan Deneq Mas Suna Putih.

Deneq Mas Unda Putih berputra Pemban Mas Aji Komala (Mas Pamayan), Deneq Mas Bekem Buta Inten Komala Sari, Deneq Mas Permas Gingsiran, dan Deneq Mas Penalang. Mas Pemayan atau Pemban Mas Aji Komala kelak diangkat sebagai wakil pemerintah Gowa di Sumbawa barat pada 30 November 1648. Sementara itu, Deneq Mas Unda Putih meneruskan trah kepemimpinan Pejanggik. Ia digantikan oleh putranya, Deneq Mas Bekem Buta Inten Komala Sari, yang pada gilirannya menurunkan Pemban Mas Meraja Sakti. Putra-putra Deneq Mas Unda Putih lainnya diangkat sebagai penguasa berbagai daerah guna mengukuhkan kekuasaan mereka.

Pejanggik mulanya merupakan vasal Selaparang yang bertugas mengamankan kawasan Lombok bagian selatan, mulai dari pantai barat hingga timur. Pemban Mas Meraja Sakti berhasil membawa Pejanggik ke masa keemasannya. Guna memperkuat tali persaudaraan antara Selaparang dengan vasalnya tersebut, dilangsungkan

17. Berbagai sumber masing-masing menyatakan tahun terjadinya peperangan ini adalah 1838, 1840, atau 1848. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setidaknya pada kurun waktu tersebut Pagutan telah dihancurkan oleh Mataram.

pernikahan antara Pemban Mas Meraja Sakti dengan Putri Mas Sekar Kencana Mulya, putri Raja Dewa Mas Pakel dari Selaparang. Merasa bahwa masa suram Selaparang segera tiba, Raja Dewa Mas Pakel menyerahkan pusaka-pusaka utama Selaparang kepada Pejanggik. Tindakan ini dirasa oleh Pejanggik sebagai legitimasi dalam meneruskan tahta Selaparang.

Pemban Mas Meraja Sakti berputra tiga orang: Pemban Mas Komala Kusuma, Pemban Mas Meraja Pait, dan Pemban Mas Laki. Pemban Mas Komala Kusuma menggantikan ayahnya sebagai Raja Pejanggik. Ia lalu menyerahkan tahta kepada putranya bernama Pemban Mas Meraja Kusuma. Bersamaan dengan itu, di Selaparang tibalah seorang tokoh bernama Arya Sudarsana (belakangan terkenal sebagai Arya Banjar Getas) dari Bali, yang kelak mewarnai sejarah Lombok. Pada mulanya, ia mengabdi kepada Raja Selaparang. Namun, timbul konflik karena Arya Sudarsana dituduh hendak merebut kekuasaan. Selaparang meminta bantuan Sumbawa menyingkirkan Arya Sudarsana. Akhirnya, Arya Sudarsana yang terdesak melarikan diri ke Pejanggik.

Kendati telah diperingatkan ayahnya, Pemban Mas Komala Kusuma, agar tak menerima Arya Sudarsana dan memancing konflik dengan Selaparang, Pemban Mas Meraja Kusuma malah mengabaikan nasihat tersebut. Pemban Mas Meraja Kusuma merasa terkagum-kagum dengan sepak terjak Arya Sudarsana dan mengangkatnya sebagai patih dengan gelar Patih Arya Banjar Getas. Raja Selaparang, Raja Mas Kerta Jagad, yang telah lanjut usia dan tidak memiliki calon penerus, tak dapat berbuat apa-apa selain menyatakan putus hubungan dengan Pejanggik. Raja Pejanggik makin terkesan ketika Arya Banjar Getas mengajukan usulan-usulan dan analisa bahwa Pejanggik lebih luas dan kuat dibandingkan Selaparang sehingga sudah saatnya melepaskan diri dari Selaparang. Bahkan, Pejanggik sudah selayaknya menjadi raja tertinggi di Lombok menggantikan Selaparang. Selain itu, Selaparang terlalu mengandalkan bantuan Sumbawa dan rajanya telah terlalu tua serta tak memiliki calon pewaris tahta. Apabila ia meninggal, kemungkinan besar Sumbawa akan masuk menguasainya. Setelah menyampaikan buah pemikirannya di atas, Arya Banyar Getas berikrar membantu Raja Pejanggik mewujudkan hal-hal tersebut. Sebagai wujud kesetiaannya, Arya Banjar Getas menyerahkan 33 bilah keris kepada raja.

Dalam rangka mewujudkan ambisi Pejanggik, Patih Arya Banjar Getas menerapkan politik atau strategi yang disebut *rerepeq*. Tujuannya memasukkan

kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Lombok ke dalam lingkungan pengaruh Pejanggik. Caranya, Pejanggik menyelenggarakan pesta besar dan Raja Pejanggik hanya mencicipi sedikit saja hidangan yang disediakan pada kesempatan tersebut. Sisanya lantas dibagi-dibagikan ke berbagai kerajaan-kerajaan kecil yang hendak ditaklukkan. Raja-raja yang menerimanya berarti bersedia takluk kepada Pejanggik dan kedudukan penguasanya diturunkan menjadi setingkat *demung* (kepala distrik)[18]. Tentu saja, mereka terpaksa menerimanya dengan berat hati dan kelak menjadi musuh dalam selimut bagi Pejanggik. Berkat diterapkannya politik *rerepeq* ini, Selaparang makin terkucil. Sementara itu, Raja Pemban Mas Meraja Kusuma sendiri makin bergantung kepada Arya Banjar Getas.

Kendati demikian, akhirnya timbul perselisihan antara Arya Banjar Getas dengan Raja Pejanggik. Menurut penuturan *babad*, pertikaian ini diawali oleh Raja Pejanggik yang memerintahkan Arya Banjar Getas melamarkan seorang putri bernama Lala Junti atau Terong Kuning. Tetapi Arya Banjar Getas yang terpesona oleh kecantikan putri ini lantas berupaya mendapatkannya bagi dirinya sendiri. Ia menipu raja dengan menyatakan bahwa putri tersebut kurang menarik. Oleh karenanya, akibat laporan palsu tersebut raja menyerahkan putri itu kepada Arya Banjar Getas. Belakangan raja merasa kecewa dan mengganggu Lala Junti ketika suaminya sedang ditugaskan ke Klungkung dan Karangasem. Sepulangnya dari menunaikan tugas raja di atas, Arya Banjar Getas dilapori istrinya bahwa raja telah berlaku tak senonoh kepadanya. Karena itu, bangkitlah benih perselisihan antara patih dan rajanya.

Dalam rangka menegakkan hegemoni Pejanggik, Arya Banjar Getas berniat menaklukkan Bayan dan Selaparang. Pada saat yang kritis, Raja Bayan dan Selaparang mengirim utusan menjumpai Pemban Mas Komala Kusuma, mantan Raja Pejanggik yang telah turun tahta dan menyerahkan pemerintahan kepada putranya. Mereka meyakinkannya bahwa musuh Pejanggik bukanlah Bayan ataupun Selaparang, melainkan Pagutan dan Pagesangan, dua kerajaan dukungan Karangasem yang telah lama mengincar kesempatan menaklukkan seluruh Lombok. Pemban Mas Komala Kusuma sepakat dengan penjelasan tersebut dan di samping itu, ia merasa prihatin terhadap putranya yang terlalu tergantung kepada Arya Banjar Gentas. Oleh karenanya, dengan memanfaatkan perselisihan antara Klungkung dan Karangasem yang sedang marak saat itu, Pemban Mas Komala Kusuma mengutus Arya Banjar Getas

18. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 45.

ke Klungkung. Misinya adalah meminta dukungan Klungkung dalam menyerang Pagutan beserta Pagesangan.

Arya Banjar Getas mengetahui bahwa aliansi dengan Klungkung dan serangan terhadap Pagutan serta Pagesangan bertentangan dengan rencananya. Oleh sebab itu, ia tidak berangkat ke Klungkung sebagaimana yang diperintahkan oleh Pemban Mas Komala Kusuma melainkan bertolak ke Karangasem. Pihak Karangasem sendiri yang berambisi menguasai Lombok khawatir dengan aliansi yang mungkin terjadi antara Klungkung, Bayan, Selaparang, dan Pejanggik sehingga Raja Karangasem, I Gusti Ketut Karangasem, berupaya mendahului mereka dengan mengirimkan ekspedisi militer ke Lombok pada 1740.

Pemban Mas Komala Kusuma yang telah lanjut usia menyadari bahwa kerajaannya tak akan sanggup bertahan menghadapi Karangasem. Ia lantas membangun kubu pertahanan terakhir di Purwadadi. Sementara itu, putranya, Raja Pemban Mas Meraja Kusuma, diperintahkan menyingkir ke Sumbawa dengan membawa pusaka kerajaan yang masih dapat diselamatkan, sedangkan Pemban Mas Komala Kusuma sendiri menghadang musuh di Tapon, namun dapat dikalahkan dan gugur di tempat itu. Adik-adiknya, yakni Pemban Mas Meraja Pait, dan Pemban Mas Laki Gunung turut pula tewas dalam pertempuran. Benteng pertahanan terakhir Pejanggik di Purwadadi hanya dapat bertahan selama kurang lebih 2 hingga 3 bulan saja dan setelah itu dihancurkan serta diratakan dengan tanah. Peristiwa ini merupakan wujud kehancuran Pejanggik. Arya Banjar Getas lalu mengangkat dirinya sebagai raja dan membangun Kerajaan Banjar Getas yang berbagi wilayah dengan Karangasem.

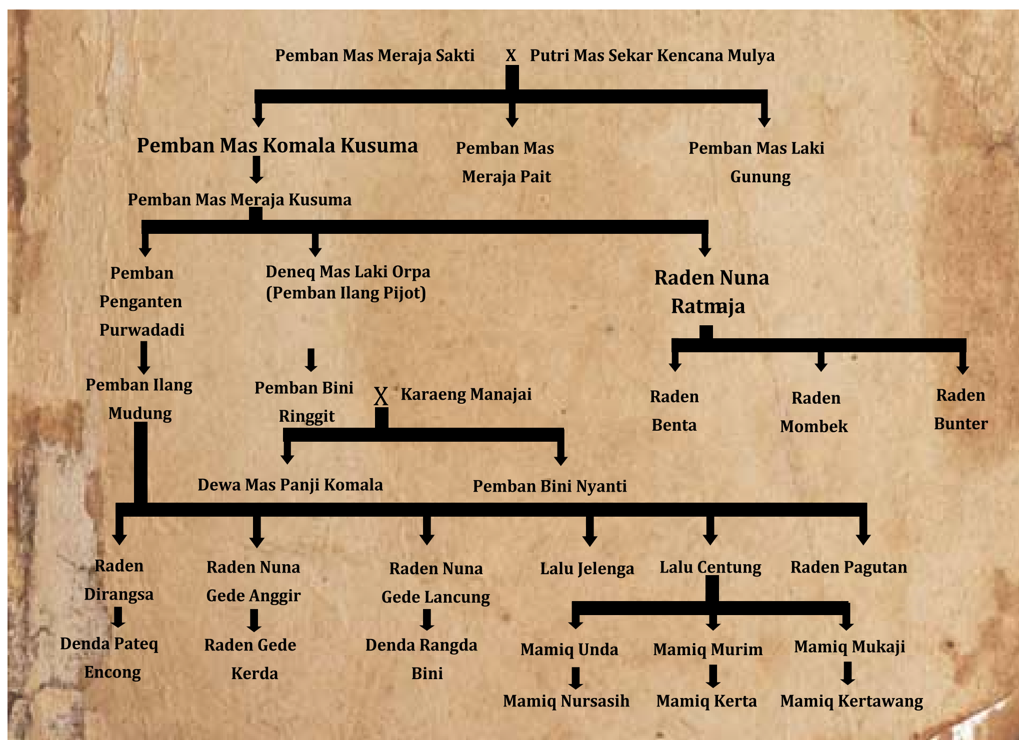
VIII. SAKRA

Kerajaan Sakra dapat dianggap sebagai penerus Pejanggik. Raja Pemban Mas Meraja Kusuma yang menyingkir ke Sumbawa karena kerajaannya dihancurkan oleh Arya Banjar Getas berputra Pemban Penganten Purwadadi. Di tanah pengasingannya ini, ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar sama seperti ayahnya, yakni Pemban Mas Meraja Kusuma. Pemban Penganten Purwadadi menikah dengan seorang bangsawan Sumbawa dan dikaruniai seorang putra bernama Pemban Ilang Mudung. Raja yang dinobatkan di Sumbawa ini tak bersedia menginjakkan kakinya kembali di Lombok sebelum berhasil merebut tahtanya. Hanya putranya, Pemban Ilang Mudung, beserta saudaranya, Deneq Laki Mas Orpa, yang berkali-kali berkunjung ke Lombok guna

membina sisa-sisa pengikut mereka, di mana para pelarian Pejanggik telah membangun kawasan pemukiman di Sakra.

Pemban Ilang Mudung menikah dengan putri bangsawan Sumbawa dan berputra Lalu Jelenga dan Lalu Centung. Ia menikahi pula seorang wanita Lombok dan berputra Raden Dirangsa, Raden Nuna Gede Anggir, Raden Nuna Gede Lancung, dan Raden Pagutan. Kerajaan Singasari yang sebelumnya membantu Banjar Getas menaklukkan Pejanggik merasa khawatir terhadap perkembangan Banjar Getas. Oleh karena itu, Singasari berupaya mencari kekuatan pengimbang terhadap Banjar Getas. Menyadari bahwa bara dendam kerabat Pejanggik terhadap Banjar Getas belum padam, Singasari mempersilakan Pemban Penganten Purwadadi pulang kembali ke Lombok. Namun, ia tak bersedia memenuhi tawaran tersebut dan berikrar tetap tinggal di Sumbawa hingga ajal menjemputnya. Tetapi raja belakangan memperhitungkan bahwa sikap saling mencurigai antara Singasari dan Karangasem ini justru berpotensi menyengsarakan rakyat Lombok sendiri sehingga dia merelakan putranya Pembang Ilang Mudung kembali ke Lombok. Ia memerintahkan pula agar putranya itu membina kembali pengikutnya dalam melawan balik Singasari maupun Banjar Getas apabila saatnya dirasa tepat.

Pemban Ilang Mudung kembali ke Lombok disertai pamannya, Deneq Laki Mas Orpa, yang membawa putrinya bernama Dene Bini Ringgit. Pemban Penganten Purwadadi akhirnya meninggal di Sumbawa dan dikebumikan di desa Jelenga. Gowa berupaya menjajaki Lombok yang dahulu pernah berada di bawah daerah pengaruhnya dengan mengirimkan seorang putra Raja Gowa bernama Karaeng Manajai. Kunjungan ini merupakan awal persekutuan antara Gowa dan Sakra, yang berambisi membangun kekuatannya kembali. Konon, Karaeng Manajai diperintahkan oleh ayahnya mencari jodoh di antara kerabatnya yang berada di Lombok. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Lombok pernah berada di bawah pengaruh Gowa. Setibanya di sana ia menghadap Deneq Laki Mas Orpa beserta saudaranya. Ternyata keris yang dimiliki Karaeng Manajai cocok dengan sarungnya yang ditinggalkan di Lombok. Selain itu, mata cincinnya juga bersesuaian dengan cincin peninggalan leluhurnya di pulau tersebut. Dengan demikian, Karaeng Manajai diakui sebagai kerabat mereka yang terpisah sejak runtuhnya Pejanggik dan Selaparang.



Silsilah para penguasa Sakra
(Digambar ulang dari buku *Keris di Lombok*, halaman 37 & 69, dengan beberapa perubahan)

Pernikahan politis dilangsungkan antara Karaeng Manajai dari Gowa dengan Dene Bini Ringgit yang membuahkan keturunan seorang putra bernama Dewa Mas Panji Komala dan seorang putri bernama Pemban Bini Nyanti. Dene Bini Ringgit memilih berdiam di Ganti. Dewa Mas Panji Komala yang juga dikenal sebagai Lalu Eja karena ayahnya orang luar, terkadang berdiam di Beleka. Berkembangnya Sakra yang masih keturunan Pejanggik ini, ditoleransi oleh Banjar Getas karena saat itu negerinya mulai dicurigai dan tertekan oleh aktivitas kerajaan-kerajaan Bali di pesisir barat Lombok selaku bawahan Karangasem.

Masuknya pengaruh Gowa di Sakra ini membangkitkan kesadaran Karangasem beserta vasal-vasalnya di Lombok, seperti Singasari, Mataram, Pagutan, dan Pagesangan. Mereka lantas bersatu padu dan melupakan pertikaian yang kerap terjadi di antara mereka. Pihak Sakra sendiri sudah tidak sabar melakukan serangan terhadap kerajaan-kerajaan Bali di barat Lombok. Apalagi rakyat Sakra khawatir anak gadisnya akan diminta secara paksa oleh raja-raja kerajaan Bali itu. Meskipun demikian, Karaeng Manajai (yang kemudian digelari *Pemban Aji*) memiliki pertimbangan lain.

Ia berniat membiarkan dahulu kerajaan-kerajaan Bali tersebut dan menunggu hingga mereka dilemahkan oleh pertikaian internal antara mereka sendiri. Dewa Mas Panji Komala beserta ibunya, Dene Bini Ringgit, tidak menyetujui pertimbangan Pemban Aji. Mereka menuduh Karaeng Manajai adalah orang luar sehingga tak sanggup menyelami penderitaan serta kesedihan rakyat Sakra. Penyebab lain perselisihan pendapat ini adalah Karaeng Manajai menikah lagi dengan seorang wanita bernama Bunga asal Matenaling. Dene Bini Ringgit merasa ditelantarkan sehingga hubungan di antara keduanya menjadi renggang. Dalam hal ini, anak-anaknya yang dilahirkan oleh Dene Bini Ringgit membela ibunya.

Pergolakan di Sakra pecah dengan dilancarkannya serangan terhadap kawasan timur dan utara guna pembersihan pasukan Bali pada 1824. Tentu saja, raja-raja Bali di Lombok tak tinggal diam. Mereka mengirimkan angkatan perangnya memasuki daerah Marong, Mujur, Ganti, serta Beleka, bahkan mulai bergerak menuju pusat pertahanan Sakra. Pasukan Bali mendirikan pertahanannya di Kopang. Pasukan Sakra terpukul mundur dan ditarik kembali ke Sakra. Raja Dewa Mas Panji Komala yang dianggap sebagai tokoh pemersatu Sakra masih terlampau muda usianya dan belum berpengalaman dalam peperangan. Ia mengabaikan begitu saja saran-saran penasihatnya, yang mempertimbangkan bahwa peperangan sudah telanjur disulut sehingga jalan terbaik adalah melancarkan serangan keluar. Namun, dengan sombongnya, raja menjawab bahwa bila memang benar raja-raja Bali itu jantan, seharusnya mereka yang datang dan berperang dengannya. Strategi pertahanan defensif dengan membangun pagar pengaman yang kuat lebih dipilih oleh raja. Karena terlena oleh sanjungan yang mereka terima, raja beserta ibunya menjadi lengah. Mereka hanya berpesta pora saja.

Serangan sporadis yang dilakukan prajurit Bali dengan tujuan menggangu mereka memang selalu berhasil dihalau sehingga menambah rasa percaya diri Dewa Mas Panji Komala, padahal saat itu Karangasem beserta vasal-vasalnya sedang melakukan persiapan matang. Pasukan Bali dengan cerdik menghindari masalah dengan Banjar Getas dan memang kerajaan tersebut tidak turut terlibat dalam konflik ini. Pasukan Bali yang melibatkan juga Klungkung dan Karangasem-sebagai induk dari kerajaan vasalnya di Lombok-dibagi tiga saat melancarkan serangannya ke Lombok, yakni pasukan induk dari arah utara, barat, dan timur.

Sayap timur dan barat diperintahkan memancing Sakra dengan terus menerus menembakkan senapannya. Akibatnya, pasukan Sakra terpancing memusatkan

pertahanannya di sisi barat maupun timur. Sementara itu, bala bantuan dari Gowa dan Sumbawa juga tidak kunjung datang karena dihadang oleh kapal-kapal Bali. Pada mulanya, dari arah utara hanya dilakukan serangan-serangan kecil guna menguras tenaga pasukan Sakra serta memancing mereka keluar lebih jauh. Pasukan Sakra yang kekurangan persenjataan tak memiliki pilihan lain dan terpaksa menghambur keluar lalu berperang sebisanya, dan dengan mudah dihabisi oleh pasukan Bali. Para pemimpin dan pemuka Sakra berguguran, seperti Raden Nuna Gede Lancung, Raden Nuna Gede Anggir, Raden Pagutan, Raden Benta, Raden Mombek, Raden Bunter, Raden Suryajaya, dan lain sebagainya.

Pasukan Bali bersenjatakan senapan menyerbu istana Sakra, yang saat itu hanya dipertahankan oleh sedikit orang saja. Raja Dewa Mas Panji Komala gugur dalam serbuan tersebut[19]. Ibunya, Dene Bini Ringgit ditawan dan dibawa ke Singasari sebagai sandera. Kekalahan pada 1828 ini merupakan akhir riwayat Sakra. Putra Raden Nuna Gede Anggir yang masih kanak-kanak dilarikan ke Korlek, yakni Denda Pateq Encong, Raden Gede Kerda, dan Denda Rangda Bini. Belakangan, kepemimpinan di Sakra diteruskan oleh keturunan Raden Gede Kerda dan Lalu Centung yang saat itu berada di Sumbawa. Sisa wilayah Sakra kemudian dibagi-bagikan kepada kerajaan-kerajaan Bali di Lombok. Desa-desa sebelah timur Sungai Babak diserahkan kepada Mataram, Pagesangan memperoleh Suradadi, Suralaga, Surabaya, dan Kembang Kuning, Pagutan mendapatkan Batukliang, Batujai, dan Batutulis, sedangkan lainnya dikuasai Singasari.[20]

IX. SELAPARANG

Setelah keruntuhan Majapahit di Lombok, pernah berdiri beberapa kerajaan kecil, seperti Lombok, Langko, Pejanggik, Parawa, Sokong, Bayan serta desa-desa kecil otonom, yakni Pujut, Tempit, Kedaro, Batu Dendeng, Kuripan, dan Ketawang. Kerajaan Lombok selaku kerajaan yang terkemuka di Pulau Lombok berpusat di Labuhan Lombok. Pusat kerajaan ini terletak di Teluk Lombok yang strategis sehingga banyak dikunjungi pedagang. Menjelang masuknya Agama Islam, pecah pemberontakan di Kerajaan Lombok yang dipimpin oleh Demung Brangbatuh karena menuntut balas kematian adiknya, Patih Sandubaya[21].

19. Ada pula sumber yang memberitakan bahwa raja ini menghilang secara gaib.
20. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 86.
21. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 41.

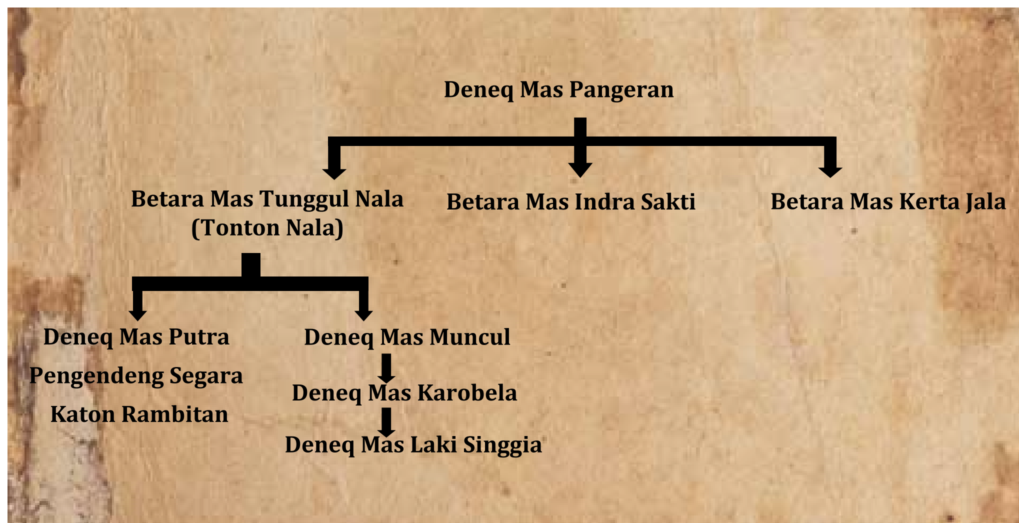
Raja Lombok bunuh diri dan digantikan oleh Prabu Rangkesari. Bertepatan dengan masa pemerintahannya, tibalah Pangeran Prapen, putra Sunan Giri, menyebarkan agama Islam di Lombok. Ia menyiarkan agama Islam di Pejanggik, Parwa, Sokong, Bayan, dan lain sebagainya. Sebagian rakyat Sokong tidak bersedia menganut agama Islam dan melarikan diri ke gunung-gunung. Prabu Rangkesari menganut agama Islam dan atas usul patihnya yang bernama Banda Yuda memindahkan ibukota kerajaan ke Selaparang, yang tidak mudah dijangkau musuh. Kerajaan Lombok atau Selaparang ini membantu usaha Pangeran Prapen dalam mengembangkan agama Islam dan menjalin hubungan yang baik dengan Demak.

Sumber lain merunut sejarah kerajaan ini kepada Kerajaan Lae' yang terletak di desa Lae'.[22] Konon, setelah lewat beberapa masa, penduduk desa Lae' pindah ke tempat lain dan membangun kerajaan bernama Pamatan, yang terletak di Aikmel. Saat Gunung Rinjani meletus, warganya terserak ke berbagai penjuru dan ada sebagian di antara mereka yang mendirikan Kerajaan Suwung (utara Perigi sekarang). Berdasarkan penuturan *Babad Suwung*, pendirinya adalah Betara Indra. Singgasana kerajaan beralih kepada Raden Maspahit. Ketika itu terjadi serbuan Majapahit sehingga Raden Maspait terpaksa melarikan diri ke dalam hutan. Setelah pasukan Majapahit ditarik mundur, Raden Maspait kembali lagi dan mendirikan Kerajaan Batuparang, yang belakangan dikenal sebagai Selaparang.

Terdapat pula sumber yang menyebutkan bahwa Kerajaan Selaparang dahulunya bernama Kayangan. Kerajaan yang berlokasi di daerah pantai ini didirikan oleh Deneq Mas Putra Pengendeng Segara Katon Rambitan[23]. Bandar utamanya adalah Labuhan Lombok, yang namanya menjadi cikal bakal nama Pulau Lombok. Anak tertua raja yang bukan putra mahkota dikirim ke Sumbawa, namun balik lagi ke Lombok dan mendirikan Kerajaan Langko. Itulah sebabnya, ia juga dikenal sebagai Prabu Langko. Leluhur Deneq Mas Putra Pengendeng Segara Katon Rambitan adalah seorang tokoh bernama Deneq Mas Pangeran. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah pangeran Majapahit, yakni anggota ekspedisi penaklukan pimpinan Mpu Nala atau ekspedisi belakangan di bawah pimpinan Gajah Mada. Kendati demikian, ada pula sumber yang menyatakan bahwa Deneq Mas Pangeran adalah Mpu Nala sendiri.

---

22. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 19.
23. Lihat *Keris di Lombok*, halaman 20.



Silsilah cikal bakal Kerajaan Selaparang
(digambar ulang dari buku *Keris di Lombok*, halaman 18, dengan beberapa perubahan)

Pada kurun waktu pemerintahan Deneq Mas Putra Pengendeng Segara Katon Rambitan masuklah ajaran tarekat, yang cenderung menjauhi kehidupan duniawi. Oleh karenanya, raja yang menganut ajaran tersebut terdorong mengundurkan diri dari pemerintahan dan hidup menyepi di Rambitan disertai putra keduanya, Deneq Mas Komala Dewa Sempopo, yang kelak menurunkan raja-raja Pejanggik. Sementara itu, tampuk pemerintahan kerajaan dialihkan kepada Deneq Mas Komala Jagad selaku putra mahkota. Selanjutnya, raja yang mengasingkan diri ini digelari Wali Nyotoq. Dia merupakan pendiri masjid tua Rambitan.

Deneq Mas Komala Jagat menggantikan ayahnya sebagai raja. Hubungan antara Deneq Mas Komala Jagat dengan Prabu Langko, kakaknya yang berlainan ibu, tidaklah harmonis. Kendati Prabu Langko putra tertua, ibunya bukanlah permaisuri sehingga ia tak diperkenankan menggantikan ayahnya menjadi raja. Ia tetap dapat menerima bahwa adiknya diangkat sebagai raja tertinggi di Lombok. Deneq Mas Komala Jagat menikahkan putrinya, Mas Inten Putri Anjani, dengan saudara misannya bernama Deneq Mas Komala Sari (putra Deneq Mas Komala Dewa Sempopo). Mereka kelak menurunkan para penguasa Pejanggik. Namun, ada pula versi yang mengatakan bahwa Mas Inten Putri Anjani tidak menikah dan *moksa* (lenyap secara gaib) menjadi Dewi Anjani, penguasa Gunung Rinjani.

Tahta kerajaan beralih kepada Deneq Mas Kerta Jagat. Kurang lebih pada kurun waktu yang bersamaan dengan pemerintahannya, Kerajaan Gelgel di bawah

pemerintahan Dalem Watu Renggong mulai memperluas kekuasaannya. Lombok pun terancam oleh ekspansi Gelgel. Oleh karenanya, Raja Daeng Mas Kerta Jagat memindahkan pusat kekuasaannya ke daerah pedalaman. Demikianlah, ibu kotaKerajaan Lombok berpindah ke lereng Gunung Rinjani dan kerajaan selanjutnya disebut Selaparang. Itulah sebabnya, Deneq Mas Kerta Jagat dikenal pula sebagai Deneq Mas Kerta Jagat Rinjani.

Pengganti Deneq Mas Kerta Jagat adalah putranya, Deneq Mas Kerta Bumi. Pada zamannya, Lombok menerima perlindungan Gowa yang sedang bergiat melebarkan pengaruhnya. Akibatnya, timbul ketegangan antara Gowa dan Gelgel, yang juga berniat menjadikan Lombok sebagai daerah kekuasaannya. Kendati demikian, munculnya pihak ketiga, yakni Belanda, yang justru menciptakan keseimbangan baru. Gowa khawatir bahwa Belanda akan menjalin aliansi dengan Gelgel sehingga pada 16 Maret 1624 dicapai kesepakatan antara Raja Dalem Seganing dari Gelgel dengan Gowa yang dikenal sebagai Perjanjian Seganing. Berdasarkan perjanjian tersebut, Gowa menarik diri dari Lombok. Dengan demikian, Selaparang tak dapat lagi menikmati perlindungan Gowa.

Seiring dengan berjalannya waktu, Gelgel makin melemah akibat permasalahan internal yang menderanya. Karena itu, Gowa tak merasa khawatir lagi kepada Gelgel dan menebarkan kembali pengaruhnya di Lombok pada 1640, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Seganing. Saat itu, singgasana Selaparang telah beralih kepada Dewa Mas Pakel. Oleh Gowa, ipar Dewa Mas Pakel bernama Pemban Mas Aji Komala diangkat sebagai raja muda atau wakil Gowa di Sumbawa Barat pada 30 November 1648.

Gowa tidak selamanya berjaya dan setelah kekalahannya melawan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) dalam Perang Makassar, Dewa Mas Pakel menyadari bahwa ia tak lagi dapat bertumpu kepada Gowa. Oleh karena itu, ia lalu mengalihkan pusat pemerintahan kepada saudaranya di Pulau Sumbawa. Ini berarti bahwa Selaparang menempatkan dirinya di bawah perlindungan Sumbawa. Pada 1674, Sumbawa menyerahkan Selaparang kepada VOC. Meskipun demikian, pecah pemberontakan terhadap Belanda di Selaparang pada 16 Maret 1675. Pemberontakan berhasil dipadamkan oleh pasukan VOC di bawah pimpinan Kapten Holstejner. Para *regent* (bupati) Selaparang, yakni Raden Abdiwirasentana, Raden Kawisanir Koesing, dan Arya Boesing, diwajibkan membayar ganti rugi berupa 5.000 hingga 15.000 pikul

kayu sepang selama 3 tahun[24]. Jika tak sanggup membayarnya, kewajiban ini dipikul oleh Sultan Sumbawa beserta keturunannya hingga lunas. Menyadari bahwa masa suram Selaparang telah tiba, Dewa Mas Pakel menyerahkan pusaka-pusaka utama kerajaan kepada Pejanggik.

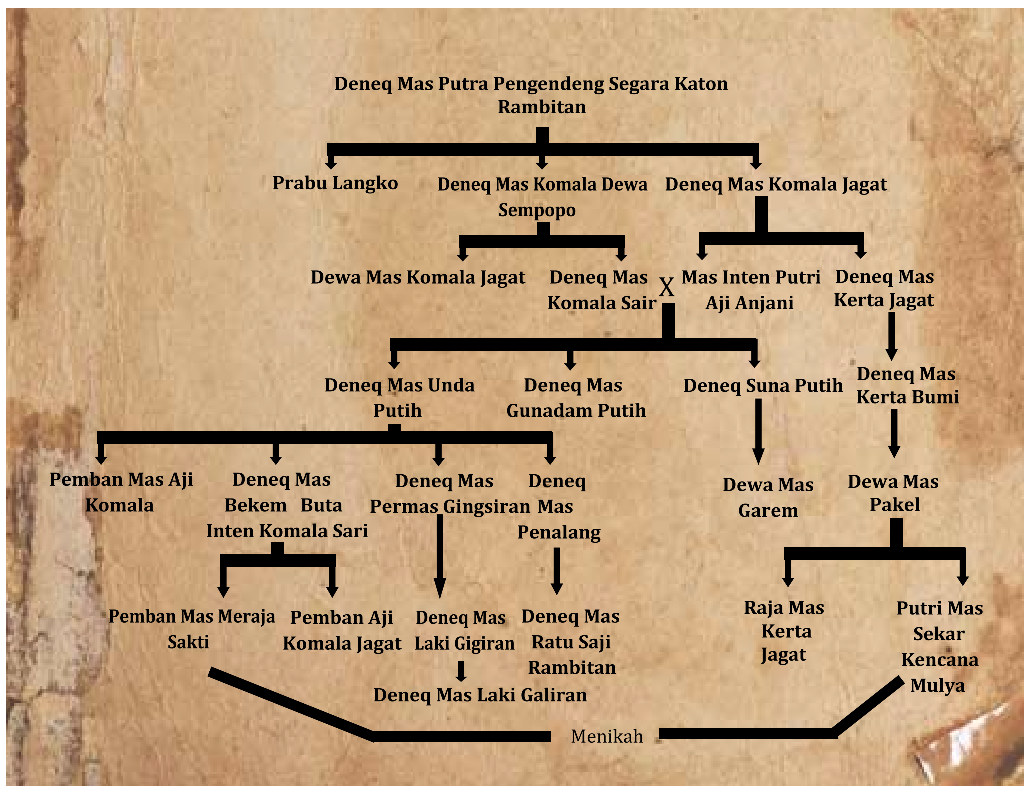
Raja Mas Kerta Jagat menggantikan ayahnya, Dewa Mas Pakel. Semasa pemerintahannya, Bali berupaya menguasai Lombok dengan mendatangkan rakyatnya secara perlahan-lahan ke pesisir barat Lombok. Pemukiman-pemukiman pendatang dari Bali merupakan cikal bakal bagi Kerajaan Pagutan dan Pagesangan. Bersamaan dengan itu, datanglah seorang tokoh yang kelak menentukan jalannya sejarah Lombok, yakni Arya Banjar Getas atau Arya Sudarsana. Terdapat berbagai versi mengenai asal muasal tokoh ini. Ada yang mengatakan bahwa Arya Banjar Getas berasal dari Bali utara dan telah menganut agama Islam. Konon menurut penuturan *babad*, tokoh ini kerap memancing kontroversi. Ketampanannya sampai mengakibatkan jatuhnya putri raja dari tangga karena ingin melihatnya hingga Arya Banjar Getas diundang oleh raja dan dianggap sebagai biang keladi permasalahan. Tetapi ada pendapat bahwa ungkapan ini hanyalah kiasan belaka, yang hendak memperlihatkan bahwa Arya Banjar Getas telah mengumpulkan pengikut guna merebut kekuasaan. Itulah sebabnya raja merasa terganggu dan akhirnya timbul perselisihan antara mereka.

Tokoh yang berasal dari Bali ini merupakan pribadi dengan kecerdasan tinggi hingga meskipun Selaparang telah dibantu oleh vasal-vasalnya, yakni Bayan, Sokong, Buluran, dan Kedinding, tetap tak berhasil mengalahkan Arya Banjar Getas. Karenanya, Selaparang terpaksa meminta bantuan Sumbawa. Pasukan Sumbawa dipimpin sendiri oleh Amasa Samawa atau Sultan Jalaluddin Muhammad Syah I (1702–1723), yang berhasil mendesak Arya Banjar Getas beserta pengikutnya ke arah selatan dan barat. Tetapi Sultan Sumbawa sendiri gugur pada 1723 sehingga Arya Banjar Getas kemudian melarikan diri ke Pejanggik. Hubungan antara Selaparang dengan Pejanggik juga kurang serasi karena Raja Mas Kerta Jagat merasa kesal dengan tindakan ayahnya yang menyerahkan sebagian pusaka kerajaan kepada Pejanggik.

Oleh Raja Pejanggik, Arya Sudarsana diangkat sebagai patih dengan sebutan Patih Arya Banjar Getas. Bahkan kekuasaan atas angkatan perang Pejanggik diserahkan pula kepadanya dan ia dianugerahi gelar Dipati Patinglaga. Hubungan Arya Banjar Getas dengan Raja Pejanggik ternyata tidak selamanya berjalan lancar karena belakangan

24. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 44.

timbul gejolak antara mereka. Akhirnya, dengan bantuan Karangasem, Arya Banjar Getas berhasil meruntuhkan Selaparang dan Pejanggik. Setelah Pejanggik dikalahkan, serangan dialihkan ke Selaparang. Tetapi ada versi yang mengatakan bahwa Raja Selaparang telah meninggal dan belum ada penggantinya sehingga terjadi kekosongan kekuasaan. Akibatnya, perlawanan Selaparang tidak terkoordinasi dengan rapi. Oleh karena itu, mengalahkan Selaparang bukanlah perkara yang sulit. Pada 1740, Arya Banjar Getas menduduki pusat Kerajaan Selaparang dan istananya diratakan dengan tanah. Tamatlah riwayat Selaparang. Arya Banjar Getas lalu membangun pusat pemerintahan di sana yang selanjutnya dikenal sebagai Pringgabaya.



Silsilah raja-raja Selaparang
(digambar ulang dari buku *Keris di Lombok*, halaman 30–31)

X. SENGKONGO

Merupakan salah satu kerajaan Bali di Lombok. Rajanya yang pertama adalah Anak Agung Ketut Sidemen (± abad 18), putra Anak Agung Putu Lebah, Raja Pagesangan. Ia digantikan oleh putranya, Anak Agung Wayan Prasi. Raja berikutnya

adalah Anak Agung Nengah Prasi (–1803), putra Anak Agung Wayan Prasi. Ketika ia wafat pada 1803, Sengkongo diambil alih oleh Pagutan.

XI. SINGASARI atau SINGASARI KARANGASEM

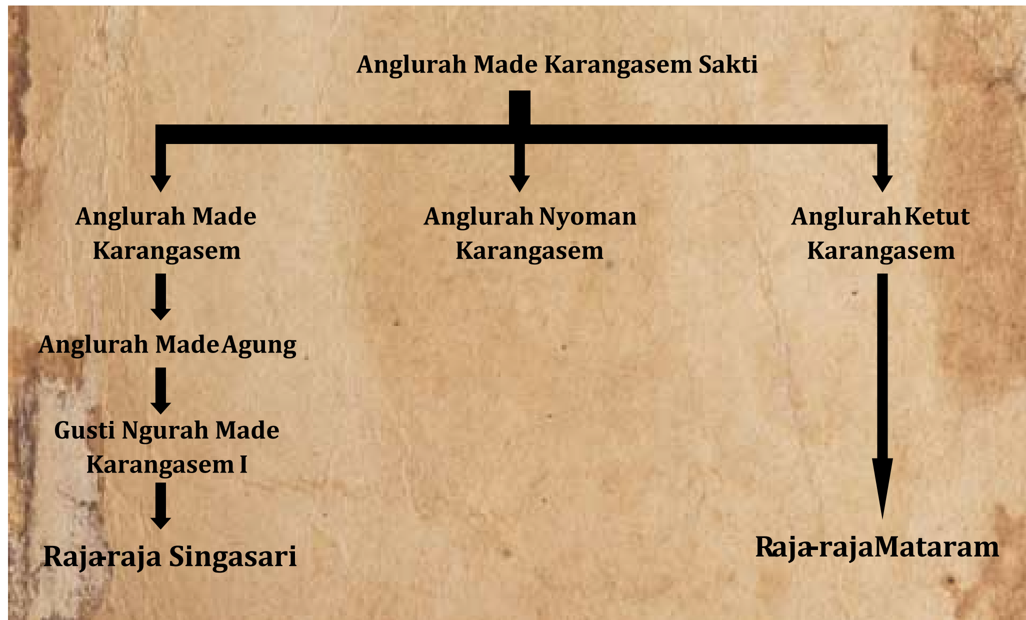
Ketika Kerajaan Banjar Getas (Praya) diserang oleh kerajaan-kerajaan kecil lainnya, rajanya meminta bantuan Karangasem di Bali. Atas restu Raja Karangasem, kerajaan-kerajaan Bali yang ada di Lombok bersama-sama turun membantu Banjar Getas. Di samping itu, Raja Karangasem sendiri mengirimkan pasukan dari Bali ke Lombok guna menghantam musuh-musuh Praya. Meskipun demikian, daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan dengan bantuan raja-raja Bali itu menjadi milik mereka sehingga wilayah Banjar Getas makin menyempit. Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, Karangasem akan menguasai wilayah barat Pulau Lombok, sedangkan Banjar Getas memperoleh bagian timurnya. Di kawasan milik Karangasem, sebagai pelengkap terhadap kerajaan-kerajaan Bali yang telah ada semenjak 1690, yakni Pagutan dan Pagesangan, dibentuklah Kerajaan Singasari dan Mataram.

Pada 1740, Karangasem berhasil menjadi penguasa seluruh Lombok. Guna memantapkan kekuasaannya, Raja Karangasem menempatkan wakilnya bernama I Gusti Wayan Tegeh yang berkedudukan di Tanjungkarang pada 1741. Ia berhasil memperkokoh kekuasaan Karangasem di Lombok melalui kegiatan perpajakan dan perdagangan. Sepeninggalnyapada 1775, ia digantikan oleh kedua orang putranya, yang masing-masing bernama I Gusti Made Karang (I Gusti Ngurah Made), berkedudukan di Tanjungkarang, dan I Gusti Ketut Karang, berkedudukan di Pagesangan. Sepeninggal I Gusti Wayan Tegeh ini terjadi perpecahan dan pertikaian antara para penggantinya sehingga pamor Tanjungkarang merosot serta digantikan oleh Singasari[25].

Oleh karena para penguasa Singasari berasal dari keturunan Anglurah Made Karangasem, putra tertua di antara tiga bersaudara penguasa bersama Karangasem, kerajaan tersebut dijadikan koordinator bagi kerajaan-kerajaan vasal Karangasem lainnya di Bali. Singasari dianggap sebagai kerajaan Bali paling terkemuka di Lombok dan dianggap sebagai wakil Karangasem di Bali, sementara itu Raja Mataram berstatus sebagai patih dan kerajaan-kerajaan lainnya seperti Pagutan beserta Pagesangan berstatus sebagai *manca* (koordinator para *perbekel*). Berbagai kerajaan tersebut saling

25. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 57.

menjalin ikatan kekeluargaan dan membangun aliansi berdasarkan kepentingan bersama. Demi memperkuat persatuan ini, dibangunlah Pura Meru di Singasari pada 1744[26]. Hanya saja jalinan ikatan ini tidak bertahan selamanya. Masing-masing kerajaan kemudian saling bertarung memperebutkan kekuasaan atas yang lainnya.



Silsilah raja-raja Singasari dan Mataram di Lombok

Menurut buku karya Lalu Djelenga, Singasari diperintah secara berturut-turut oleh tiga orang raja yang seluruhnya bergelar I Gusti Made Karangasem[27] yang dalam manuskrip karya Hans Hagerdhal disebut Gusti Ngurah Made Karangasem. Semasa pemerintahan Gusti Ngurah Made Karangasem I (± abad 19), pada 1764 suku Sasak memberontak dengan dukungan dari Kerajaan Sumbawa. Ketika itu, Datu Taliwang beserta Datu Gunung bernama Salombong, Raja Selaparang, dan paman Datu Jereweh, mengirimkan pasukan ke Lombok. Meskipun demikian, serangan ini dapat digagalkan oleh Singasari, bahkan Raja Singasari memaksa Salombong bersama-sama dengannya menyerang Sumbawa. Daerah Alas, Seran, dan Taliwang dapat diduduki oleh Singasari. Menyaksikan pertikaian di Sumbawa ini, VOC turun tangan. Pada 11 Maret 1765 mereka mengirimkan 54 serdadu ke Sumbawa dan belakangan ditambah lagi dengan 39 pasukan yang diangkut dengan kapal *Het Huiz de Manpad*. Namun, Singasari tetap bercokol di Sumbawa hingga 1790.

26. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 49.
27. Lihat *Keris di Lombok*, halaman 108.

Memasuki awal abad 19, Kerajaan Singasari makin besar pengaruhnya. Pada 1804 beberapa kerajaan di Lombok jatuh ke tangannya, seperti Kediri dan Sengkongko. Lama kelamaan, Singasari berkeinginan melepaskan diri dari Karangasem dan berambisi menjadi satu-satunya penguasa atas Pulau Lombok. Tentunya niat ini tidak disukai oleh Karangasem.

Semasa pemerintahan penggantinya, yaitu Gusti Ngurah Made Karangasem II (Ratu Ngurah Panji atau Dewata Loji, ± 1800–1835), berlangsung pergolakan di Sakra dan baru dapat dipadamkan dalam kurun waktu empat tahun (1824–1828). I Gusti Ayu Agung (Dewa Cokorda Isteri), kakak raja, sangat ambisius dan ingin menempatkan dirinya di atas raja. Di samping itu, menurut cerita *babad*, I Gusti Ayu Agung diberitakan memiliki nafsu seksual yang menyimpang sehingga para penggawa, abdi, ataupun sentana dipaksa memuaskan hasratnya tersebut[28].

Sementara itu, menurut *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, disebutkan bahwa Raja Singasari ini memiliki empat orang anak[29]. Anak pertama seorang perempuan bernama Dewa Cokorda Isteri. Dua orang putranya masing-masing bernama Anak Agung Bagus Oka dan Anak Agung Bagus Karang. Anak bungsunya juga seorang perempuan bernama Anak Agung Ayu Putri yang menikah dengan Raja Mataram. Ketika Raja Singasari mangkat yang dinobatkan sebagai pengganti adalah putrinya, Dewa Cokorda Isteri, dengan didampingi oleh patihnya bernama Gusti Gede Dangin. Penguasa wanita ini melakukan hubungan yang terlarang dengan saudara-saudaranya sehingga menandakan adanya kemerosotan moral di istana Singasari. Dewa Cokorda Isteri diberitakan menikahi saudara tirinya, Ratu Ngurah Panji, dan kemudian memerintah bersama-sama dengannya[30].

Menurut sumber lainnya, pada 1720 Singasari diperintah oleh I Gusti Anglurah Made Karangasem, yang merupakan putra I Gusti Anglurah Made Karangasem (salah satu di antara tiga raja yang memerintah Karangasem). Semasa pemerintahannya dibangun sebuah pura bernama Pura Meru di Cakranegara. Dia digantikan oleh putranya bernama I Gusti Anglurah Made Karangasem. Dia menikahi sepupunya, seorang putri Raja Karangasem, dan memiliki putri bernama I Gusti Ayu Agung dan putra lain ibu bernama I Gusti Ngurah Panji. Sepeninggal I Gusti Anglurah Made

28. Lihat *Keris di Lombok*, halaman 109.
29. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 86.
30. Lihat *Bali Profile*, halaman 38.

Karangasem, singgasana Singasari beralih kepada I Gusti Ayu Agung. Ia memerintah dengan didampingi saudara tirinya, I Gusti Ngurah Panji atau Ratu Ngurah Panji[31].

Pada 1806, Raja Karangasem I Gusti Gede Ngurah Karangasem mangkat. Salah seorang putranya yang bernama I Gusti Lanang Paguyangan (I Gusti Gede Ngurah Lanang Karangasem) berhasil meraih kekuasaan. Oleh karena kekejamannya berupa kanibalisme dan hubungan terlarangnya dengan saudarinya sendiri[32], I Gusti Lanang Paguyangan terusir dari kerajaannya sendiri pada 1827 serta mencari perlindungan di Lombok. Ia meminta agar Dewa Cokorda Isteri menyerahkan singgasana Singasari kepadanya. Kendati demikian, permintaan ini ditolak dan I Gusti Lanang Paguyangan yang merasa sakit hati meminta bantuan Raja Mataram, Anak Agung Ketut Karangasem. Tetapi pihak Mataram masih belum bersedia menurunkan pasukannya menggempur Singasari. Berdasarkan sumber lainnya, I Gusti Lanang Paguyangan meminta bantuan I Gusti Ayu Agung merebut kembali kekuasaannya di Karangasem[33]. Ketika itu Kerajaan Singasari mengalami masa kejayaannya. I Gusti Ngurah Panji yang sebelumnya merupakan pendamping I Gusti Ayu Agung lantas menobatkan dirinya sebagai raja dengan gelar Ratu Ngurah Made Karangasem dan menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan Karangasem. Karena kebenciannya kepada Singasari, I Gusti Lanang Paguyangan membesar-besarkan bahwa Ratu Ngurah Made Karangasem telah melakukan pernikahan terlarang dengan saudarinya sendiri serta sebagai penguasa yang tidak sah. Selain itu, ia membujuk Raja Mataram agar bersedia menyerang Singasari.

Hubungan Singasari dengan Mataram dan kerajaan-kerajaan lainnya makin memburuk. Perbuatan rajanya yang dianggap tak senonoh mengakibatkan pamor kerajaan ini merosot. Selain itu, hujan mulai jarang turun sehingga rakyat terancam kelaparan. Singasari kerap memperkecil wilayah Mataram dengan membangun hutan-hutan perburuan sehingga rakyat kesulitan mencari kayu dan keperluan lainnya. Karena ketidakadilan ini, desa otonom seperti Kopang dan Praya mulai menjalin kedekatan dengan Mataram. Singasari menaklukkan Pagesangan lagi pada 1830 sehingga membangkitkan kebencian raja dan rakyat kerajaan itu kepada Singasari, apalagi hampir seluruh keluarga Kerajaan Pagesangan tewas dan hanya seorang saja yang berhasil meloloskan diri ke Seteluk (Sumbawa). Ketika Gusti Ngurah Made Karangasem II atau

31. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 57.
32. Lihat *Bali Profile*, halaman 38.
33. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 59.

Ratu Ngurah Panji atau I Gusti Ngurah Panji wafat pada 1835, putranya yang bernama Ratu Gusti Ngurah Panji (Gusti Ngurah Made Karangasem III atau Dewata Sweta, 1835–1838) dipilih sebagai penggantinya. Pada masanya terdapat seorang pedagang Inggris bernama George Peacock King yang menjalin relasi dengan Raja Singasari. Namun, karena berambisi menegakkan monopoli perdagangan di Lombok, ia terlibat perselisihan dengan syahbandar keturunan Tionghoa sehingga diusir dari Singasari oleh raja pada 1836 dan terpaksa melarikan diri ke Kuta, Bali. Tak lama kemudian King kembali ke Lombok, tetapi kali ini, ia beralih kepada Mataram yang rajanya sangat memercayai King hingga mengangkatnya sebagai penasihat.

I Gusti Lanang Paguyangan wafat di tahun 1837. Karena itu, kini giliran putranya bernama Ida Ratu yang menuntut tahta Singasari. Di tengah-tengah panasnya hubungan antara Singasari dan Mataram ini, hanya perlu pemantik kecil saja guna menyulut peperangan antara keduanya. Perselisihan masalah tapal batas dan pembagian air di desa perbatasan antara Singasari dan Mataram terbukti memicu perang besar antara kedua kerajaan tersebut. Ketika itu, terjadi perebutan wilayah antara desa Penujak milik Singasari dan desa Kateng milik Mataram. Kendati telah siap berperang, Mataram mencoba menyelesaikan hal ini dengan jalan damai. Sebagai bawahan Singasari, Mataram memohon keadilan kepada Raja Singasari agar menitahkan Penujak mengembalikan wilayah Kateng yang telah dirampasnya. Namun, Raja Singasari menolaknya dengan kasar. Setelah mengambil dua orang anaknya yang turut ibunya di Singasari, Raja Mataram memaklumkan perang terhadap Singasari pada 1838. Awalnya, Singasari tampak lebih unggul dibandingkan Mataram. Dengan populasi atau jumlah penduduknya yang 20 kali lebih besar dibanding Mataram, sebenarnya mudah saja bagi Singasari mengumpulkan prajurit hingga sejumlah 10.000. Tetapi dukungan yang rendah terhadap penguasanya mengakibatkan kemerosotan moral di kalangan pasukannya sehingga mudah dikalahkan.

King membantu Mataram mengangkut bala bantuan dengan kapalnya sebanyak kurang lebih 6.000 orang dari Bali. Tetapi tentu saja bantuan ini tidaklah gratis. Ia menyewakan kapal pribadinya bernama *Pleyades* dengan bayaran fl.125 per hari sebagai kapal perang yang memandu perahu-perahu kecil pengangkut para prajurit Bali. Tokoh oportunis berkebangsaan Inggris ini juga mengimpor senjata dari Singapura demi memperkuat pasukan Mataram. Selain itu, Gusti Bagus Karang, Raja Karangasem, turut serta membantu Mataram. Nakhoda Ismaila, seorang pedagang

Bugis yang merangkap pula sebagai bajak laut dan pedagang budak, berhasil ditarik agar memihak Raja Mataram. Dua ratus orang pengikutnya merupakan tambahan yang cukup berarti bagi kekuatan Mataram. Ini semua mengubah Mataram menjadi lawan yang tangguh bagi Singasari.

Belanda mendengar rumor mengenai apa yang terjadi di Lombok, tetapi belum memutuskan tindakan apapun dan cukup berpuas diri dengan mengirim misi investigasi ke sana. Sementara itu, Mads Lange turun membantu Singasari dan dengan kapal-kapalnya, *Falcon* dan *de Zuid,* berusaha memblokade pantai Lombok guna menghalangi datangnya pasukan bala bantuan yang diangkut King dari Bali, tetapi ia berhasil dihalau[34]. Pertempuran menentukan terjadi pada 1838. Saat itu, Singasari telah terkepung dari segala penjuru sehingga Dewa Cokorda Isteri dan Ratu Gusti Ngurah Panji memutuskan perang *puputan* (bunuh diri massal). Setelah membakar istananya sendiri, Dewa Cokorda Isteri menusukkan keris ke dada pasangannya, Ratu Gusti Ngurah Panji dan kemudian membunuh dirinya sendiri. Hampir seluruh keluarga Kerajaan Singasari tewas dalam pertempuran ini, kecuali dua orang anak (masing-masing seorang putra dan putri) yang berhasil diselamatkan ke Karangasem.

Yang patut dicatat, kekalahan Singasari ini juga dikarenakan ulah patihnya bernama Gusti Gede Dangin. Ia menyangka bahwa tersiarnya rumor mengenai hubungannya dengan Gusti Ayu Putri serta hubungan tak senonoh antara Dewa Cokorda Isteri dengan saudara-saudaranya berasal dari Dene Bini Ringgit, yakni salah seorang pemuka kaum Sasak yang ditawan semenjak Perang Sakra pada 1826[35]. Ia beranggapan bahwa Dene Bini Ringgit merupakan biang keladi panasnya situasi dan kemelut yang dialami Singasari. Karenanya, tanpa sepengetahuan raja beserta pemuka Singasari lainnya, ia membunuh Dene Bini Ringgit. Namun, terbunuhnya tokoh ini justru memicu amarah suku Sasak sehingga mereka berbalik memihak Mataram dan melawan Singasari. Hal ini tentu saja menambah jumlah musuh-musuh Singasari yang sudah sangat banyak.

Menurut cerita *babad*, sebelum dibunuh Dene Bini Ringgit pernah mengucapkan kutukannya, yakni bila memang benar kesialan Singasari itu karena dirinya, biarlah setelah kematiannya Singasari akan makin berjaya. Tetapi bila kemelut itu disebabkan oleh keluarga kerajaan sendiri maka Singasari akan hancur tak lama kemudian. Yang patut pula dicatat, selama Dene Bini Ringgit ditawan di Singasari, telah

34. Lihat *Bali Profile*, halaman 38.
35. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 87.

terjalin hubungan yang cukup akrab antara dirinya dengan ratu Singasari layaknya ibu dan anak. Eksekusi ini berlangsung tanpa sepengetahuan ratu sehingga begitu mendengarnya ia menjadi sangat marah terhadap Gusti Gede Dangin.

Mataram keluar sebagai pemenang, sehingga kini hubungan antara atasan dan bawahan menjadi terbalik. Kendati demikian, kemenangan ini harus dibayar mahal karena rajanya, Anak Agung Ketut Karangasem tewas dalam pertempuran tersebut. Pengganti Raja Mataram, Gusti Ngurah Ketut Karangasem (Anak Agung Ketut Ngurah Karangasem) menempatkan Ida Ratu, putra I Gusti Lanang Paguyangan sebagai Raja Singasari[36]. Raja Klungkung selaku pemimpin spiritual bagi raja-raja di Bali dan Lombok tidak senang dengan tindakan Mataram yang menghancurkan Singasari ini. Dia menyatakan dengan terang-terangan ketidakpuasannya itu. Gusti Ngurah Ketut Karangasem mengetahui hal ini dan tidak ingin membangkitkan permusuhan dengan Klungkung beserta raja-raja Bali lainnya. Karena itu, ia kemudian mengangkat salah seorang pangeran Singasari, Ngurah Made Karangasem, sebagai Raja Singasari yang baru dengan tujuan menyenangkan Raja Dewa Agung dari Klungkung.

Meskipun demikian, keputusan raja ini tidak memuaskan King. Ia menghasut Raja Gusti Ngurah Ketut Karangasem dengan menyatakan bahwa Ngurah Made Karangasem sedang mempersiapkan rakyatnya melawan Mataram. Akibat hasutan ini timbul ketegangan antara kedua belah pihak yang memicu kembali peperangan. Akhirnya, meletus lagi pertempuran antara Mataram dan Singasari sebagaimana yang dikehendaki King. Bersama dengan Gusti Gede Ngurah Karangasem (Anak Agung Gede Ngurah Karangasem), adik Gusti Ngurah Ketut Karangasem, King memimpin pasukan Mataram yang dengan mudah mengalahkan Singasari. Raja Ngurah Made Karangasem terpaksa melarikan diri ke Praya. King memengaruhi Raja Mataram agar membunuh Ngurah Made Karangasem. Dengan tewasnya Raja Singasari ini, Kerajaan Singasari boleh dikatakan tamat riwayatnya. Pada kesempatan kali ini, Mads Lange kembali membantu Singasari. Kendati demikian, dengan berakhirnya kerajaan tersebut, ia kehilangan segalanya dan sebagai seorang pelarian yang miskin terpaksa hengkang dari Lombok.

Sementara itu, berdasarkan sumber lainnya, I Gusti Ngurah Made Karangasem adalah gelar Ida Ratu yang diangkat sebagai Raja Singasari. Enam bulan setelah pengangkatannya sebagai raja, I Gusti Ngurah Ketut Karangasem (Raja Mataram)

36. Lihat *Bali Profile*, halaman 39.

yang ingin menjadi penguasa atas seluruh Lombok tidak lagi mengakui kedudukannya. Ia menitahkan King menyerang Singasari, yang dapat dikalahkan dalam waktu empat hari. Raja I Gusti Ngurah Made Karangasem melarikan diri ke Praya, namun tertangkap dan dibunuh pada Desember 1839[37].

B. PENATAAN LOMBOK OLEH PEMERINTAHAN KOLONIAL SETELAH KERUNTUHAN MATARAM

Pasca kekalahan Mataram, Lombok dikuasai oleh pasukan pendudukan yang dipimpin oleh K. Swart. Sementara itu, Vetter dengan didampingi oleh direktur urusan dalam negeri bernama G.A. Scheren ditugaskan menyusun administrasi pemerintahan baru di Lombok. Pulau tersebut ditempatkan di bawah pemerintahan Hindia Belanda, yakni berdasarkan Stb. no. 183/ 1895. Pada 31 Agustus 1895, Lombok dijadikan *afdeeling* bagian Karesiden Bali dan Lombok dengan Ampenan sebagai ibukotanya.

Afdeeling (distrik) Lombok dibagi dua *onderafdeeling* (sub-distrik), yakni Lombok Timur dan Lombok Barat. Lombok Timur beribukota di Labuhan Haji, tetapi dipindahkan ke Selong setelah pecahnya pemberontakan Gandor. Lombok timur masih terbagi menjadi distrik Pringgabaya, Masbagik, Rarang, Kopang, Sakra, Praya, dan Batukliang, sedangkan Lombok Barat beribukota di Mataram.

Pembagian administratif ini disempurnakan kembali pada 27 Agustus 1898, berdasarkan Stb. no. 248 dan Skp. gubernur jenderal no. 19. Jumlah *onderafdeeling* ditambah satu lagi, yakni Lombok Tengah. Pemisahan dilakukan antara orang Bali dan Sasak. Oleh karenanya terdapat kedistrikan Bali dan Sasak. Secara umum daerah kediaman orang-orang Bali dibatasi oleh Kali Meninting di sebelah utara, Narmada di Timur, Kali Babak di selatan, dan Selat Lombok di sebelah barat. Sebagai pemimpin mereka diangkat seorang patih. Tokoh pertama yang menjabat kedudukan ini adalah I Gusti Putu Geria dari Buleleng. Perincian distrik yang terdapat pada masing-masing *onderafdeeling* adalah sebagai berikut:

37. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 63-64.

	Onderafdeeling	Distrik	
1	Lombok Barat	Kedistrikan Bali	Kedistrikan Sasak
		· Cakranegara Utara · Cakranegara Timur Laut · Cakranegara Timur · Cakranegara Tenggara · Cakranegara Selatan · Cakranegara Barat Daya · Cakranegara Barat · Cakranegara Barat Laut · Pagutan · Pagesangan · Mataram · Pemenang	· Ampenan · Gerung · Tanjung · Bayan
2	Lombok Tengah	· Praya · Jonggat · Batukliang · Kopang	
3	Lombok Timur	· Rarang · Masbagik · Pringgabaya · Sakra	

Afdeeling Lombok dikepalai oleh seorang asisten residen yang berkedudukan di Mataram. Selanjutnya, pada masing-masing *onderafdeeling* ditempatkan seorang kontrolir. Kemudian setiap distrik dipimpin oleh kepala distrik.

C. AGAMA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI LOMBOK

Secara umum, mayoritas rakyat Lombok bersuku Sasak dan Bali. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Di Lombok terdapat golongan yang dinamakan Waktu Telu. Kendati mengaku sebagai penganut agama Islam, mereka tidak menjalankan ibadah sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam pada umumnya.

Selain beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya, penganut Waktu Telu meyakini adanya dewa dan roh-roh. Menurut keyakinan mereka, dewa tertinggi adalah Batara Guru[38]. Timbulnya keyakinan seperti ini disebabkan tidak adanya pembinaan agama yang berkesinambungan semenjak masuknya Islam ke Lombok.

Menurut kalangan Waktu Telu, ibadah menjadi tanggung jawab kyai atau pemuka mereka, sedangkan orang-orang yang bukan kyai tak melaksanakan sembahyang ataupun puasa. Pelajaran membaca Al-Qur'an hanya dilakukan oleh keturunan kyai. Golongan Waktu Telu yakin bahwa mereka akan masuk surga asalkan menjalankan apa yang diperintahkan oleh kyai. Terdapat pula keyakinan bahwa kyai yang akan menanggung dosa semua pengikutnya. Pelaksanaan ibadah antara masing-masing kyai juga tidak sama karena kalangan ini tak berpegang pada Al-Qur'an dan Hadist, melainkan catatan di atas daun lontar beraksara Jejawan yang diwariskan turun temurun. Sebagai contoh: pelaksanaan sembahyang para kyai penganut Waktu Telu tidaklah sama pada berbagai daerah, seperti yang dirangkum dalam tabel di bawah ini.[39]

Daerah	Sembahyang yang dijalankan
Bayan, Tanjung, dan daerah pengaruhnya	Sholat Jumat, Sholat Mayit, dan Sholat Ied. Puasa mulai dijalankan pada 2 Ramadhan.
Pujut dan lingkungan pengaruhnya	Kyai sembahyang lima kali sehari semalam. Puasa dimulai pada 1 Ramadhan. Selain sholat wajid dijalankan pula Sholat sunat, Sholat Ied, Sholat Mayit, dan sembahyang Jumat.
Rambitan, Sapit, dan lingkungan pengaruh-nya	Sholat Magrib, Sholat Isya selama Ramadhan, Sholat Subuh pada hari raya Ied, Sholat Jumat, Sholat Tarawih, dan Sholat Mayit
Sembalun dan daerah pengaruhnya	Sholat Ashar pada hari Kamis, Sholat Zohor pada hari Jumat, dan Sholat Subuh pada hari raya Ied. Sholat Mayit dan Sholat Sunat Tarawih dikenal pula. Puasa diawali pada 3 Ramadhan dan diakhir 3 Syawal.

38. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 28.
39. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 29–30.

Pengandangan (Lombok Timur) dan daerah pengaruhnya	Melaksanakan sembahyang lima kali sehari semalam hanya selama bertugas sebagai merbot (pengurus masjid) dalam waktu seminggu. Bila tidak bertugas hanya menjalankan Sholat Jumat, Sholat Mayit, dan Sholat Tarawih selama bulan Ramadhan. Puasa mulai dijalankan pada 2 Ramadhan. Waktu berbuka puasa agak berbeda: Hari ke-1–14: Setelah matahari terbenam. Hari ke-15-21: Setelah matahari condong ke barat. Hari ke-22-30: Setelah teja di ufuk barat tak tampak lagi.

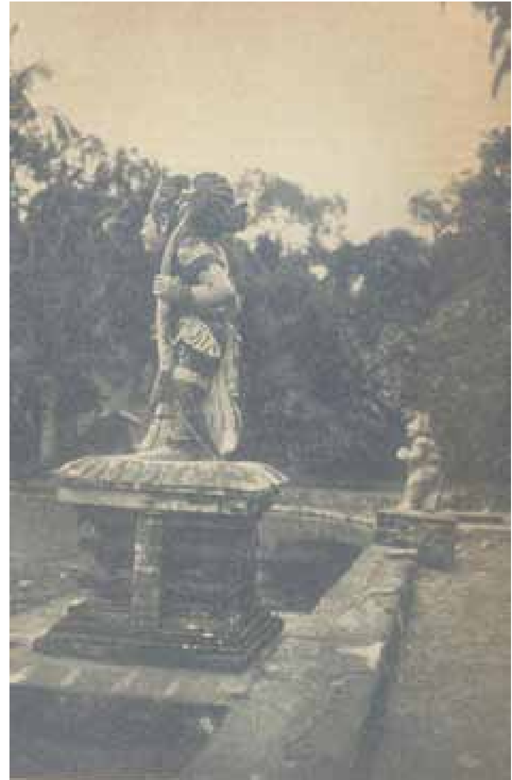
Beberapa orang kyai hanya puasa tiga hari semasa awal Ramadhan, pertengahan Ramadhan tiga hari, dan akhir Ramadhan tiga hari. Dengan demikian, secara total mereka berpuasa 9 hari saja selama Ramadhan. Al-Qur'an hanya dibacakan saat upacara-upacara tertentu, umpamanya semasa puasa atau selamatan orang meninggal. Selebihnya, ada yang menganggap Al-Qur'an sebagai barang keramat dan menempatkannya di bubungan atap rumah.

Selain Waktu Telu, di Lombok tentu saja terdapat pula umat Islam yang menjalankan keyakinannya sesuai Al-Qur'an dan Hadist, yang oleh masyarakat di sana disebut Waktu Lima. Karena perbedaan yang sangat mendasar, pada awal abad 20 timbul perselisihan antar keduanya. Oleh sebab itu, para penganut Waktu Telu membentuk persatuan yang disebut Gerakan Dewi Anjani. Menjelang 1920-an, mereka melakukan pembangkangan terhadap pemerintah kolonial Belanda berupa penolakan membayar pajak atau bekerja rodi. Golongan Waktu Telu dikenal pula dengan sebutan Sapuq Puteq karena mereka mengenakan ikat kepala (*sapuq*) berwarna putih (*puteq*) sebagai tanda identitas mereka.

Agama kedua yang terbanyak penganutnya adalah Hindu. Para penganutnya adalah orang-orang Bali yang bermigrasi ke Lombok semenjak abad 17. Mereka berdiam di kawasan Cakranegara, Mataram, Narmada, dan Tanjung (Lombok Utara). Beberapa pura utama adalah Pura Meru di Cakranegara, Pura Suranadi, Pura Lingsar Timur, Pura Lingsar Barat, dan Pura Narmada. Selain itu, masih ada sebagian kecil yang menganut kepercayaan bernama Budha Budhi. Para penganut kepercayaan ini pada umumnya berada di Tebango. Mereka meyakini Batara Guru sebagai dewa

tertingginya. Pemimpin kepercayaan Budha Budhi disebut *dukuh* dengan *Pelukatan* selaku kitab sucinya.





Pura Lingsar (kiri)
Sumber: *Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, halaman 777-778
Pura Narmada (kanan)
Sumber: *Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, halaman 779-780

D. KESUSASTRAAN DAN KEBUDAYAAN DI LOMBOK

Kesusastraan lama di Lombok ditulis dengan huruf Jejawan yang mirip aksara Jawa atau Bali. Beberapa *babad* yang lahir di Lombok antara lain *Babad Lombok, Babad Sakra, Babad Praya, Babad Petung Bayan, Babad Sangupati, Babad Doyan Nada, Rereq Kediri, Baloq Tui, Rereq Karangasem,* dan lain sebagainya. Tentu saja, karya *babad* ini merupakan sumber informasi berharga mengenai sejarah Lombok. Setelah masuknya agama Islam, mulai dikenal kisah Amir Hamzah (disebut *Amir Amsiyah* dalam bahasa Sasak). Hikayat ini dipecah menjadi beberapa bagian yang disebut *klampan*. Selain itu, terdapat pula karya sastra mengenai riwayat para nabi.

Bentuk kesusastraan lainnya adalah *suluk*, yakni ujaran-ujaran yang menguraikan mengenai ajaran sufi. Umumnya, karya seperti ini adalah saduran dari suluk Jawa

yang masuk bersamaan dengan agama Islam. Namun, di samping itu masih ada pula *suluk* karya para penulis lokal. Kitab-kitab *suluk* terpenting *umpamanya Jatiswara, Prembonan, Anak Jawak, Alim Sujiwa, Nursada, Asmaragama, Monyeh, Ladumi, Markum*, dan lain sebagainya.

Para sastrawan terkemuka Lombok adalah Jro Mihram yang menulis *Babad Sakra* dan menggubah *Monyeh Raden Barak*. Den Durat menulis *Babad Praya*. Sementara itu, Mamiq Mustiaji, Mamiq Nuradi, dan Raden Wiranom banyak menyadur berbagai *babad*, hikayat, ataupun *suluk* yang telah ada sebelumnya. *Babad Sakra* yang ditulis dalam bahasa Sasak berisi, antara lain, keluhan jatuhnya Lombok ke tangan Raja Bali[40]. Bait bernuansa kesedihan tersebut ditulis dalam bentuk tembang Pangkur, salah satu tembang *macapat* sebagaimana yang ada di Jawa.

Adanya karya sastra dalam bentuk tembang membuktikan bahwa seni tembang di Lombok berkembang pesat. Bahkan pada hampir setiap perayaan di Lombok dilagukan tembang-tembang semacam ini. Sudah menjadi tradisi bahwa teks-teks yang ditulis di atas daun lontar dibacakan dan dilagukan dalam bentuk tembang saat berlangsungnya pesta atau selamatan. Sebagai contoh, lontar *Puspakerma* dan *Jatiswara* dibacakan saat pembukaan upacara selamatan potong rumput atau potong gigi.

Cabang kesenian lain yang berkembang di Lombok adalah tari-tarian dan pewayangan. Wayang Lombok biasanya mengambil lakon kisah Amir Hamzah, sedangkan wayang Bali melakonkan kisah Mahabharata dan Ramayana. Seni ukir juga hidup di Lombok, dibuktikan dengan adanya ukir-ukiran pada berbagai makam.

Kerajaan Singasari dan Mataram meninggalkan pula bangunan taman beserta bangunan pura yang indah di Lombok hingga kini menjadi objek wisata yang tersohor. Taman Mayura atau Taman Kelepung dibangun oleh kerajaan Singasari pada 1744. Tetapi setelah Singasari dihancurkan Mataram, taman ini menjadi terlantar sebelum akhirnya dipugar kembali oleh Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. *Mayura* dalam bahasa Sansekerta berarti "merak." Taman Kalepung diubah namanya menjadi Taman Mayura karena pernah dijadikan tempat memelihara burung merak. Saat Taman Narmada dibangun, di lokasinya kerap dijumpai ular. Guna membunuh hewan berbisa tersebut didatangkanlah burung-burung merak yang berasal dari Palembang. Sementara Taman Narmada dibangun, burung-burung tersebut dipelihara di Taman Mayura. Selain itu, di Taman Mayura dapat dijumpai pula ruang penyimpan upeti,

40. Lihat *Keris di Lombok*, halaman 80.

perpustakaan tempat menyimpan naskah-naskah lontar, kolam besar, *bale kambang*, *bale pererenan*, dan rumah peristirahatan raja.

Taman Narmada dibangun pada abad 19 oleh Anak Agung Gede Karangasem. Namanya berasal dari nama sungai suci di India. Di sana terdapat pula kompleks pura yang ditujukan sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud Siwa. Pura tersebut dibangun sebagai perlambang bagi puncak Gunung Rinjani. Biasanya setahun sekali raja melakukan upacara *Pujawali* bagi manifestasi kekuasaan Tuhan yang bersemayam di puncak Gunung Rinjani. Selanjutnya, dilakukanlah upacara *Pekelen*, yakni melabuhkan benda-benda emas ke Danau Segara Anak. Karena usianya telah lanjut, raja tidak sanggup lagi datang ke Gunung Rinjani yang jauh letaknya. Oleh karenanya, sebagai perlambang bagi Gunung Rinjani, dibangunlah pura di Narmada itu. Setelah upacara pujawali di Narmada, barulah persembahan *pekelen* dibawa para pendeta ke Danau Segara Anak tanpa disertai oleh raja.

Keunikan Pura Lingsar Barat karena dipergunakan bersama oleh umat Hindu dan umat Waktu Telu. Pembangunannya diselesaikan pada 1878 oleh Anak Agung Made Karangasem. Pada hari-hari biasa, penganut kedua keyakinan tersebut menggunakannya sendiri-sendiri. Namun, sekali setahun, yakni sekitar bulan Oktober–November, mereka mengadakan perayaan yang disebut Perang Ketupat. Perayaan ini diadakan sebelum dimulainya penanaman padi di sawah, yakni saat memasuki musim penghujan. Sisa-sisa ketupat lalu dibawa pulang ke rumah masing-masing dan diyakini sanggup mendatangkan kesuburan bagi sawah mereka. Kemali Lingsar, yang terletak berdampingan dengan Pura Lingsar, diyakini sebagai lokasi hilangnya Raja Selaparang secara gaib. Biasanya, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal, dibacakan silsilah Raja Selaparang yang menghilang tersebut[41].

Pura lain yang patut pula disebutkan adalah Pura Suranadi. Pembangunannya beriringan dengan masuknya pengaruh Bali di Lombok. Saat itu, datanglah seorang pendeta Hindu bernama Empu Niratha atau Empu Sakti Wau Rawuh ke Lombok. Dia lalu mengajarkan umat Hindu di pulau tersebut membuat air suci bagi keperluan ritual keagamaan dan setelah itu bertolak kembali ke Bali. Sewaktu berada di Lombok, dia sempat menyucikan lima mata air yang berada di suatu tempat. Itulah sebabnya, lokasi kelima mata air tersebut lalu dinamakan Suranadi; *sura* berarti "air" dan *nadi* berarti "subur." Selain itu, Suranadi juga nama salah satu cabang Sungai Gangga di

41. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 132.

India yang dianggap suci. Upacara ritual yang dilakukan Empu Niratha dimaksudkan pula sebagai upaya "memindahkan" Sungai Gangga ke Lombok. Raja Karangasem memugar Pura Suranadi pada 1642 hingga 1720 dengan mengundang Pedanda Sakti Abah, cucu Empu Dwi Jendra. Semasa berkuasanya Kerajaan Mataram, pura ini dipugar lagi dan ditambahkan bangunan-bangunan lainnya.



Raja Ratu Agung Agung Gde Ngurah Karangasem
(foto dibuat sekitar tahun 1885
Sumber: arsip Institut KITLV, Leiden
(kitlv.nl)

E. PERDAGANGAN CANDU DI LOMBOK

Kita tidak mengetahui secara pasti kapan candu atau opium masuk ke Lombok. Hanya saja pada 1840 telah ada dua orang pedagang asing, yakni Mads Johansen Lange (pedagang keturunan Denmark) dan George Peacock King (Inggris) yang memasok opium beserta barang-barang lainnya dari Singapura. Mereka telah berdomisili di Lombok semenjak 1830-an. Oleh karenanya, boleh diperkirakan bahwa opium pada kurun waktu tersebut sudah masuk ke Lombok. Meskipun demikian, pada 1839, Raja Mataram di Lombok mengeluarkan larangan masuknya opium ke negerinya. Huskus Koopman menduga bahwa larangan itu disebabkan raja ingin memberikan monopoli kepada pedagang Inggris yang bernama G.P. King di atas.

Larangan ini berlaku hingga jatuhnya kekuasaan Raja Lombok. Meskipun demikian, penyelundupan opium tetap saja terjadi karena para pembesar kerajaan dan orang kaya masih menjadi konsumennya yang setia. Zollinger melaporkan bahwa sesudah ada larangan dari raja, masuknya opium memang berkurang, tetapi ada orang China, Bugis, Sasak, dan Bali mengisap candu secara sembunyi-sembunyi. Pada 1880-

an, semasa pemerintahan Raja Ratu Agung Agung Gde Ngurah Karangasem, masih disebutkan adanya larangan mengisap candu bagi warga Lombok dan kali ini aturan tersebut tampaknya lebih keras lagi. Para pelanggar dapat dihukum berat sehingga boleh dikatakan bahwa pada kurun waktu itu raja menerapkan aturan yang lebih keras di Lombok sehubungan dengan opium dibandingkan dengan di Bali. Namun, bagi wilayah kekuasaannya di luar Lombok, raja bersikap lain. Ia memberikan kelonggaran berupa izin perdagangan opium di wilayah pengaruhnya di Karangasem, Bali. E. Vanvugt melaporkan bahwa Raja Lombok memiliki pabrik opium di Bali, yang mengolah opium kasar dari Singapura menjadi rokok opium. Sementara itu, seorang pedagang China berperan sebagai agen atau bandar raja.

Timbulnya perdagangan opium di Lombok dimungkinkan karena kawasan itu merupakan pelabuhan bebas sehingga banyak pedagang asing yang berdatangan ke sana, terutama Singapura. Raja mendapatkan banyak keuntungan pula yang berasal dari perdagangan candunya di Bali. Meskipun demikian, perdagangan dan pengisapan candu tetap dilarang di Lombok. Alasan raja memberlakukan hal ini dapat dilihat dari makin menguatnya pengaruh Belanda saat itu sehingga untuk menghadapinya raja membutuhkan rakyat yang sehat. Selain itu, dengan kondisi kesehatan yang baik hasil panen akan meningkat pula. Laporan pada 1860 menyatakan bahwa dengan adanya larangan tersebut, rakyat Lombok lebih sehat ketimbang Bali.

Pada 1870-an, kebijakan Raja Lombok terhadap opium mulai berubah. Ia mencabut larangan impor opium, asalkan konsumennya adalah kalangan atas atau orang asing, sedangkan orang Bali dan Sasak sendiri tetap dilarang mengisapnya. Laporan pada 1884 menyebutkan bahwa perdagangan opium di sana dilakukan oleh pedagang asing karena penduduk asli dilarang melakukannya. Dalam kurun waktu tersebut, seorang pedagang China membayar 4000 Dollar Spanyol per tahunnya agar diizinkan berdagang opium. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelarangan opium tidak lagi berlaku sepenuhnya. Impor opium makin merosot pada akhir abad 19, akibat gentingnya situasi politik di sana (terutama karena adanya perang pada 1890–1894 serta bebagai pemberontakan). Baru setelah kekuasaan raja jatuh pada 1894, pemerintah Hindia Belanda melakukan perdagangan opium secara terbuka di Lombok.

Parlemen Belanda (*de Tweede Kamer der Staten-Generaal*) mengajukan rancangan undang-undang *Opium Regie* (pengendalian intensif oleh pemerintah terhadap

penjualan opium dengan menjualnya secara langsung kepada konsumen) di Jawa, Madura, dan Lombok pada 1897. Tujuannya didasari pertimbangan moral demi membatasi pecandu opium. Pemerintah juga menetapkan pajak impor untuk menguranginya, yakni senilai fl.450 per kilogramnya bagi opium kasar (mentah) dan fl.900 tiap kilogramnya bagi opium jadi (morfin).

F. KUNJUNGAN WALLACE KE LOMBOK

Alfred Russel Wallace mengunjungi Lombok pada bulan Juni–Juli 1856. Selain memaparkan mengenai kondisi flora dan fauna pulau tersebut, Wallace mencatat pula kondisi kemasyarakatan di sana. Suatu malam ia mendengar desas-desus mengenai perintah Raja Lombok agar penduduk mempersembahkan sejumlah kepala orang di pura demi keberhasilan panen[42]. Tiga orang Melayu, Bugis, dan Ambon yang menjadi tuan rumah Wallace membenarkan cerita itu. Timbul ketakutan hingga pelayan Wallace tidak berani mengambil air di sumur yang terletak beberapa *yard* (satuan ukuran panjang, 1 *yard* sama dengan 3 kaki atau 0,914 m) di belakang rumah tanpa membawa sebatang tombak besar. Meskipun demikian, Wallace menganggapnya sebagai kabar bohong belaka dan tidak yakin pernah ada perintah seperti itu.

Wallace sempat pula berjumpa dengan Raja Lombok. Tentu saja yang dimaksud adalah Raja Mataram karena saat itu Mataram telah menaklukkan Karangasem dan menjadi pemegang hegemoni atas seluruh Lombok. Perjumpaan itu berlangsung saat raja mengunjungi pesta yang diadakan oleh Gusti Gadioca[43], salah seorang pangeran Lombok. Wallace menggambarkan bahwa raja tatkala berlangsungnya pertemuan, duduk di atas tikar di bawah pohon rindang. Para pengikutnya berjumlah 300 hingga 400 orang duduk di tanah mengelilinginya membentuk lingkaran. Raja mengenakan sarung dan jaket hijau. Usianya kurang lebih 35 tahun dan penampilannya memperlihatkan kecerdasannya, hanya saja ia tampak tidak konsisten[44].

Raja sempat pula melihat koleksi awetan burung-burung beserta serangga yang berhasil dikumpulkan Wallace dan merasa terkejut bagaimana hewan-hewan itu dapat diawetkan dengan baik. Atas izin raja, Wallace mengunjungi peristirahatan raja di Gunungsari guna mengumpulkan spesimen burung-burung. Dalam bukunya, Wallace menggambarkan pula keadaan Gunungsari beserta rumah dan kolam-kolamnya. Ikan-

42. Lihat *Kepulauan Nusantara*, halaman 117.
43. Mungkin yang dimaksud adalah Gusti Gede Oka.
44. Lihat *Kepulauan Nusantara*, halaman 124.

ikan yang berada di kolam tersebut sangat indah dan akan keluar setiap paginya untuk diberi makan yang ditandai dengan bunyi gong. Bila gong dibunyikan, ikan-ikan yang berada di balik tumbuhan kolam akan segera keluar dengan harapan diberi makan. Taman peristirahatan Raja Mataram di Gunungsari ini dikelilingi oleh hutan-hutan tempat beberapa ekor rusa yang kerap diberi makan sehingga menjadi tak terlalu liar lagi.

Selama kunjungannya di Lombok, Wallace menyaksikan pula teknik pembuatan senapan yang dilakukan oleh penduduk lokal. Dengan teknologi yang relatif sederhana, mereka dapat mengebor laras senapan dengan ketepatan yang cukup baik. Wallace mengaguminya dan mencatat bahwa sulit diterima oleh akal bahwa senjata tersebut dikerjakan dari awal hingga akhir dengan perkakas yang sederhana. Bahkan peralatan tersebut masih belum memadai bagi seorang pandai besi di Inggris untuk membuat benda sesederhana tapal kuda sekalipun[45].

Penerapan hukum adat yang keras juga dipaparkan oleh Wallace. Tindakan pencurian dapat dijatuhi hukuman mati. Seorang wanita yang telah menikah tidak diperkenankan menerima cerutu atau sirih dari orang asing, jikalau hal ini dilanggar maka pelakunya berpeluang besar dijatuhi hukuman mati. Pasangan yang melakukan perzinaan akan diikat saling membelakangi dan dilemparkan ke laut atau sungai. Buaya-buaya yang hidup di sungai biasanya telah siap melahap mereka.

Wallace mengisahkan pula suatu cerita menarik mengenai Raja Lombok yang mengadakan cacah jiwa bagi penduduknya[46]. Alasan diadakannya sensus ini dikarenakan raja menengarai adanya korupsi dalam pengumpulan pajak oleh para pegawai dan kepala daerahnya. Saat itu, pajak yang dikumpulkan berwujud beras. Ketika panen tiba, rakyat akan menyerahkan sebagian berasnya kepada kepala desa sebagai pajak. Meskipun demikian, kepala desa akan mengambil sebagian dari hasil pengumpulan pajak tersebut guna mengisi lumbungnya sendiri. Para kepala desa menyetorkan pajak yang terkumpul dari rakyatnya kepada wedana. Ternyata para wedana juga melakukan hal yang sama, yakni mengambil sebagian pajak yang disetorkan demi menambah perbendaharaan lumbungnya sendiri. Korupsi semacam ini berlaku hingga para pangeran dan para pejabat tinggi kerajaan. Mereka yang kerap

45. Lihat *Kepulauan Nusantara*, halaman 124.
46. Lihat *Kepulauan Nusantara*, halaman 129–133.

dililit banyak hutang, merasa tak bersalah tatkala mengambil "sedikit" saja beras milik kerajaan.

Akibatnya, penerimaan upeti selalu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Wabah penyakit, gagal panen, dan bencana alam lainnya selalu dijadikan alasan demi menutupi kecurangan tersebut. Kendati demikian, saat beranjangsana mengelilingi kerajaannya, raja menyaksikan desa-desa yang berpenduduk padat dan makmur. Selain itu, bila diamati dengan seksama, keris-keris para pejabat makin bagus kualitasnya dari tahun ke tahun. Umpamanya bila tahun ini gagang keris mereka terbuat dari kayu maka tahun berikutnya akan berganti menjadi gading. Tahun selanjutnya akan berganti menjadi emas dan bahkan ada yang bertahtakan berlian. Raja merasa ada yang tidak beres dengan semua ini dan menyangsikan apakah penerimaan upeti sudah sesuai dengan jumlah penduduk yang ada.

Raja memikirkan dengan sungguh-sungguh cara yang tepat untuk mengetahui jumlah penduduknya. Mustahil baginya memasuki setiap rumah dan menghitung sendiri jumlah orang yang berdiam di dalamnya. Jikalau raja memerintahkan anak buahnya yang melakukan cacah jiwa, tentunya mereka akan mengetahui maksud raja dan memanipulasi data jumlah penduduk demi menutupi kesalahan mereka. Selama berhari-hari raja berpikir dengan keras. Akhirnya, ia mengajak para pengikutnya pergi ke Gunung Agung guna memohon petunjuk dewata.

Demikianlah, raja dan rombongannya lalu berangkat ke gunung tersebut. Ketika puncak gunung telah dekat, raja mendaki dengan hanya ditemani dua orang anak pembawa kotak sirih. Setelah tiba di puncak, raja memerintahkan keduanya menunggu di bawah batu, sedangkan ia sendiri duduk di bawah batu lainnya. Setelah cukup lama berada di puncaknya, raja turun gunung dan menjumpai para pengikutnya. Dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun, raja beserta rombongannya berjalan pulang ke istana. Selang tiga hari kemudian, raja mengumumkan bahwa dewa yang bersemayam di Gunung Agung memberitahukan akan berjangkit wabah penyakit dengan dashyatnya. Bencana ini katanya bakal melanda manusia dan hewan ternak. Sebagai penangkalnya, raja diwajibkan membuat 12 keris yang ditempa dari jarum-jarum. Adapun masing-masing jarum mewakili seorang penduduk kerajaan. Oleh karena itu, agar setiap penduduk luput dari bencana mengerikan ini, masing-masing desa diwajibkan mengirimkan sejumlah jarum sebanyak warga di desanya dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Kelak saat berjangkitnya wabah penyakit, sebilah

keris akan dikirimkan ke desa yang dilanda bencana tersebut. Apabila jumlah jarum yang dikirimkan sesuai dengan jumlah penduduknya, wabah penyakit akan sirna. Sebaliknya, bila tidak keris itu tak akan mendatangkan manfaat apa-apa.

Para penjabat tinggi dan pangeran segera meneruskan perintah raja ini kepada kepala-kepala desa. Mereka berupaya mengumpulkan jarum dengan jumlah setepat mungkin karena takut terhadap ancaman wabah penyakit dan bencana yang katanya akan menimpa mereka. Raja menerima sendiri ikatan jarum yang berada dari berbagai desa tersebut. Ia menulis catatan mengenai nama desa asal setiap ikatan jarum itu. Dengan demikian, raja dapat mengetahui jumlah warganya dengan pasti. Setelah semua jarum terkumpul, raja membagi seluruh jarum itu menjadi dua belas bagian yang kurang lebih sama dan memerintahkan pandai besi terbaik menempanya menjadi 12 bilah keris.

Ketika tiba masa penyerahan upeti berikutnya, bila jumlah yang seharusnya disetorkan kurang sedikit saja dibandingkan seharusnya, raja akan menoleransi hal itu. Namun, jikalau jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang semestinya, raja akan berkata bahwa jarum-jarum yang dahulunya dikirimkan jauh lebih banyak dibandingkan desa-desa lainnya dan memerintahkan pejabat bersangkutan kembali memeriksa siapa saja yang belum menyetorkan upetinya. Berkat kecerdikannya ini, kerajaan menjadi makmur dan kaya. Para pejabat menjadi takut dijatuhi hukuman mati oleh raja bila berani menggelapkan upeti lagi. Keris yang ditempa dari jarum ini juga sangat dihormati rakyat. Tatkala wabah berjangkit di suatu desa dikirimlah sebilah diantaranya ke sana. Jika wabah itu mereda, kepala desa akan memuji-muji tuahnya. Sebaliknya, apabila tidak berkurang sama sekali, kepala desa akan berpikir bahwa kegagalan ini pastilah disebabkan kesalahan dalam pengiriman jarum.

G. KERAJAAN-KERAJAAN DI PULAU SUMBAWA

Pada abad 19 terdapat enam kerajaan di Pulau Sumbawa. Menurut laporan Zollinger, jumlah penduduk masing-masing kerajaan itu sebelum meletusnya Gunung Tambora adalah sebagai berikut: Bima 90.000 jiwa; Sumbawa 60.000 jiwa, Dompo 10.000 jiwa; Tambora 6.000 jiwa; Sanggar 2.200 jiwa; dan Papekat 2.000 jiwa. Menurut Zollinger pula, jumlah penduduk itu berkurang separuh setelah letusan gunung berapi yang dashyat tersebut; 11.100 orang mati seketika, 37.825 orang mati karena kelaparan atau sakit, dan 36.275 orang mengungsi ke pulau-pulau sekitar.

I. BIMA

a. Awal Kerajaan Bima Menurut Hikayat

Lokasi kerajaan ini terletak di Kabupaten Bima sekarang, yakni di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerajaan ini berdiri kurang lebih lima atau enam abad sebelum lahirnya Republik Indonesia. Tidak banyak sumber mengenai sejarah awal Bima. Yang kita ketahui, sebelum kedatangan Islam para penguasanya masih memeluk tradisi leluhur. Terdapat beberapa karya sastra yang mengungkapkan tentang asal usul raja-raja Bima, seperti *Cerita Asal Bangsa Jin dan Segala Dewa-Dewa* (disingkat *Cerita Asal*) dan *Hikayat Sang Bima*[47]. Isinya mencerminkan paduan antara unsur-unsur agama Islam, Hindu, dan kepercayaan setempat. *Cerita Asal* dibuka dengan merunut silsilah raja-raja Bima mulai dari Jan Manjan yang berputrakan Sang Yang Tunggal, Sang Yang Winaya, dan Sang Yang Jaharanang, hingga Sang Bima. Masih ada pula sumber yang menyebutkan bahwa Sang Bima adalah putra Maharaja Pandu Dewanata. Sementara itu, Pandu Dewanata adalah putra Maharaja Tunggal Pandita. Lebih jauh lagi, Maharaja Tunggal Pandita memiliki seorang saudara bernama Maharaja Indra Ratu, yang merupakan leluhur raja-raja Luwu dan Sawerigading di Sulawesi Selatan[48].

Sang Bima mengadakan perjalanan ke timur dan begitu tiba di Pulau Satonda berjumpalah ia dengan seorang putri raja naga. Menurut kisah itu, hanya dengan bertatapan mata saja, putri raja naga tersebut hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Indra Tasi Naga. Sang Bima lalu meneruskan perjalanannya dan ketika tiba kembali di sana, ia menikahi Indra Tasi Naga, yang melahirkan baginya dua orang putra bernama Maharaja Indra Kemala dan Maharaja Indra Zamrut. Sang Bima memasukkan kedua anaknya ke dalam sebuah buluh yang ditutupnya dengan mutiara serta membuangnya ke laut. Buluh itu terapung hingga ke Dompu. Warga di sana menyaksikan sesuatu di laut yang "laksana pulau terbakar." Mereka menyambut kedua anak yang wajahnya dikatakan "seperti bulan dan matahari" tersebut dengan gembira.

Setelah dewasa, kedua anak itu mengadakan perjalanan ke Bima karena di sanalah mereka hendaknya tinggal sesuai perintah ayahnya. Sesudah berdiam beberapa

---

47. Terjemahan lengkap kedua karya sastra ini terdapat dalam buku *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah* karya Henri Chambert - Loir.
48. Lihat *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, halaman 34.

waktu di Gunung Parewa, mereka pergi ke Bukit Londa. Semua *ncuhi* (kepala desa) di kawasan itu, terutama Ncuhi Dara dan Ncuhi Padolo[49], menghendaki agar kedua saudara tersebut tinggal di sana dan menjadi raja bagi mereka karena hingga saat itu memang mereka belum mempunyai seorang raja. Para *ncuhi* di bagian timur juga menghendaki seorang raja. Oleh karena itu, disepakati bahwa Indra Zamrut akan menjadi penguasa mereka.

Setelah terjadi suatu insiden, Indra Kemala membuang dirinya dan selanjutnya tak pernah terdengar lagi kabar beritanya. Indra Zamrut akhirnya menjadi raja di Bima. Naskah itu mengisahkan bahwa raja-raja Jawa, Bali, Sumbawa, Ende, Sumba, Manggarai, hingga wilayah timur seluruhnya takluk kepadanya. Mereka mempersembahkan upeti ke Bima. Diriwayatkan pula, Indra Zamrut menikahi seorang peri dari kayangan dan dikaruniai seorang putri. Namun, peri itu harus pulang ke kayangan dan hanya turun ke bumi setiap malamnya guna menyusui anaknya. Indra Zamrut kemudian memperistri anaknya sendiri. Keturunan mereka merupakan raja-raja Bima, Dompu, dan kerajaan lainnya di Pulau Sumbawa. Indra Zamrut menjadi Raja Bima pertama dan semenjak saat itu mulailah era Kerajaan Bima.

Semasa pemerintahan Raja Manggampo Jawa, yang beristrikan putri Jawa, didatangkanlah Ajar Panuli, seorang cendekiawan asal Majapahit, guna mengajarkan baca dan tulis di Bima. Selain itu, ia membawa serta pengetahuan mengenai pembuatan batu bata dan candi. Dengan dikenalnya seni tulis menulis di Bima, penulisan catatan sejarah yang disebut *Bo* diawali[50]. Raja Manggampo Jawa digantikan oleh Mawaa Paju Longge[51]. Pada zamannya, Kerajaan Bima menjalin hubungan dengan Gowa. Dua adik raja, yang masing-masing bernama Mawaa Bilmana dan Manggampo Donggo dikirim ke Gowa guna mempelajari teknik pertanian. Kendati demikian, menurut buku *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara* halaman 39, disebutkan bahwa Raja Manggampo Jawa digantikan oleh Raja Indra Luka dan Maharaja Indra Seri. Pada

49. Buku *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 23, menyebutkan adanya 5 *ncuhi*, yakni *ncuhi* Dara di Bima Tengah; *ncuhi* Dorowani di Bima Timur; *ncuhi* Banggapura di Bima Utara; *ncuhi* Parewa di Bima Selatan; dan *ncuhi* Bolo di Bima Barat.
50. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 175.
51. Menurut silsilah dan urutan raja-raja Bima yang terdapat pada **melayuonline.com** (diunduh tanggal 23 September 2009) antara Manggampo Jawa (dalam *website* tersebut disebut Maharaja Nggampo Java) masih terdapat lagi raja-raja sebagai berikut: (1) Maharaja Indra Kumala, (2) Maharaja Batara Bima Indra Luka, dan (3) Maharaja Indra Sri, Maharaja of Bima. Dengan kata lain, terdapat sisipan tiga penguasa antara Manggampo Jawa dengan Mawaa Paju Longge.

zaman mereka berlangsung sumpah "persekutuan darah" yang sepakat menyatukan seluruh wilayah ke dalam payung kekuasaan Bima.

Mawaa Bilmana kelak menjadi Raja Bima[52], sedangkan saudaranya Manggampo Donggo menjadi perdana menteri (*turelinggampo* atau *raja bicara*). Belakangan, mereka bertukar jabatan sehingga Manggampo Donggo menjadi Raja Bima dan sebaliknya Mawaa Bilmana menjadi perdana menteri. Pertukaran jabatan antara Manggampo Donggo dan Mawaa Bilmana diikuti dengan suatu sumpah adat. Isinya menyatakan bahwa keturunan Manggampo Donggo akan menjadi Raja Bima, sedangkan keturunan Mawaa Bilmana akan memangku jabatan sebagai *raja bicara* (perdana menteri). Sejak saat itu, peranan *raja bicara* sangat besar dalam menentukan roda pemerintahan Bima. Keduanya saling bekerja sama demi menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Mereka berjuang keras memajukan Bima dalam berbagai bidang, seperti pertanian, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Sebagai hasilnya, tak lama kemudian Bima tampil sebagai penghasil beras utama setelah Lombok.

Bima sanggup membangun angkatan laut yang dipimpin oleh seorang *rato pabise* (laksamana). Setelah itu, dilakukan ekspedisi militer untuk meluaskan daerah kekuasaan Bima, seperti ke Pulau Sumba yang dipimpin oleh perdana menteri sendiri. Pasukan Bima mendarat di Sumba dan mendirikan benteng di kawasan pantai utara Sumba Barat. Hingga zaman VOC di abad 17, Bima tampaknya masih memiliki pengaruh di Sumba, sebagaimana yang tertuang dalam surat gubernur jenderal VOC, Maetsuyker, pada 1673. Bukti kekuasaan Bima atas Sumba diwujudkan dalam keharusan VOC membayar uang pembeli cendana yang dihasilkan pulau tersebut kepada Sultan Bima. Kerajaan Bima pernah pula menguasai Solor, hanya saja tidak jelas sampai kapan penguasaan ini berlangsung.

Raja Manggampo Dongo digantikan oleh Ma Wa'a Ndapa. Ia merupakan seorang raja yang sanggup mempertahankan prestasi Kerajaan Bima. Semasa pemerintahannya, para pelaut Bima berhasil mengarungi perairan Nusantara. La Mbila yang menggantikan Mawaa Bimana sebagai perdana menteri juga tak kecil peranannya. Mereka berdua tetap melanjutkan kebijaksanaan para pendahulunya. Meskipun demikian, kejayaan Kerajaan Bima tercoreng oleh tindakan Salisi Ma Ntau Asi Peka,

52. Menurut buku *Cendana & Dinamika Masyarakat Nusa Tenggara Timur*, halaman 55, disebut sebagai Raja Bima ketujuh.

putra Raja Ma Wa'a Ndapa. Menurut ketetapan adat, ia tak berhak menjadi raja karena ada ahli waris lain yang lebih berhak. Tetapi Salisi berniat merebut kekuasaan dengan jalan membunuh Raja Samara dan Sarise. Bahkan ia menghabisi pula nyawa putra mahkota secara licik di padang rumput perburuan Wera. Oleh karenanya, putra mahkota yang tewas tersebut digelari *Ma Mbora Di Mpori Wera* oleh rakyat. Demi memperoleh dukungan rakyat dan para *ncuhi*, Salisi rela menghalalkan segala cara. Di hadapan para *ncuhi*, Salisi menyatakan bahwa rakyat mendukungnya menggantikan Raja Ma Ntau Asi Sawo. Sebaliknya, di hadapan rakyat Salisi menyampaikan kabar bohong bahwa para *ncuhi* telah mendukungnya sebagai raja. Sepak terjang Salisi berlanjut dengan upayanya mengenyahkan putra lain yang berhak atas tahta, yakni La Kai. Pada mulanya, berkali-kali Salisi memperoleh kemenangan berkat bantuan Belanda. Kerajaan Gowa-Tallo tidak tinggal diam dan mengirimkan bala bantuannya membela La Kai. Meskipun demikian, baru pada pengiriman pasukan Gowa yang ketiga kalinya, Salisi berhasil dikalahkan dan terpaksa melarikan diri hingga akhir hayatnya. La Kai dinobatkan menjadi Sultan Bima pertama dan menjadi peletak dasar bagi kesultanan tersebut di masa-masa mendatang.

b. Perkembangan Kerajaan Bima Selanjutnya

Raja Bima pertama yang memeluk agama Islam adalah La Kai (digelari Ruma Ta Ma Bata Wadu). Dia adalah putra Raja Ma Ntau Asi Sawo. Menurut buku *Lintasan Bumi Cendana* halaman 175, ia disebut sebagai Raja Bima ketujuh belas. La Kai menikah dengan adik istri Sultan Alauddin dari Gowa (Makassar) yang bernama Daeng Sikontu. Setelah menganut agama Islam, ia digelari Sultan Abdul Kahir dan dianggap sebagai Sultan Bima pertama. Dengan kata lain, semenjak zamannya Bima berubah menjadi kesultanan. Semasa pemerintahannya, Sultan Abdul Kahir berhasil menahan serangan Kerajaan Gelgel dari Bali yang berniat menguasai Bima[53]. Oleh karena itu, Bima tetap menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang dari Semenanjung Melayu, Banten, Demak, Makassar, dan Ternate.

Ia digantikan oleh putranya yang bernama La Mbila (oleh orang Makassar disebut I Ambela) pada kurang lebih pertengahan 1600-an[54]. Gelarnya adalah Abdul Khair Sirajuddin (terkadang ada sumber yang mengejanya Abil Khair Saraj ad Din). Sultan ini

53. Lihat *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, halaman 68.
54. Daftar nama-nama raja pada buku *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, halaman 138 menyebutkan tahun 1640. Raja ini dikatakan memerintah 1640–1682.

menikah dengan saudari Sultan Hasanuddin dari Gowa yang bernama Karaeng Bonto Je'ne pada 13 September 1646 di Makassar. Menurut catatan sejarah *Bo*, sultan ini pada mulanya kurang memedulikan ajaran agama, tetapi mengubah sikapnya setelah dinasihati guru-gurunya. Bahkan sultan kemudian menjadi seorang sosok yang sangat mencintai para ulama. Sultan pernah memberikan hadiah sawah atau tanah kepada guru-gurunya itu. Namun, di luar dugaan mereka menolaknya karena hendak memperlihatkan bahwa motivasi mereka adalah semata-mata pengabdian kepada Tuhan dan bukannya demi memperoleh kemuliaan duniawi. Sawah yang ditolak kepada ulama tersebut, kini disebut Tolobali (dari kata *tolo* yang berarti sawah dan *bali* berarti mengembalikan). Kawasan itu selanjutnya menjadi areal pemakaman bagi para sultan beserta guru-gurunya. Upaya lain yang dilakukan sultan adalah mendirikan Lembaga Sara Hukum dengan tujuan mewujudkan lembaga peradilan dan pemerintahan yang bernafaskan Islam.

Pada 1659, Belanda menyerang Bima hingga menelan korban 400 laskar Bima. Serangan ini menggusarkan hati Sultan Abdul Khair Sirajuddin karena dianggapnya merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negerinya. Melalui iparnya, Sultan Hasanuddin dari Gowa, Sultan Abdul Khair Sirajuddin mengajukan tuntutan agar VOC membayar ganti rugi atas jatuhnya korban di pihak Bima tersebut. Tuntutan yang disampaikan Sultan Hasanuddin kepada Willem Bastingh (utusan Belanda) ini (lihat uraian tentang sejarah Kerajaan Gowa), ditolak oleh Belanda dengan dalih bahwa serangan tidak dilakukan terhadap Bima melainkan daerah yang berbatasan dengannya. Penolakan ini makin membangkitkan kebencian Sultan Bima terhadap Belanda. Karenanya, saat Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap Gowa yang dikenal sebagai Perang Makassar, Sultan Abdul Khair Sirajuddin turut serta membantu Sultan Hasanuddin. Bahkan pada 1666, kedua penguasa berkerabat ini bersama-sama menyerang Buton yang memihak Belanda. Sultan Bima memimpin sendiri pasukannya bersama *raja bicara* saat itu yang bernama Abdullah. Kendati demikian, dalam serangan ini Abdullah tertawan dan gugur di sebuah pulau sehingga menggelarinya Bicara Mambora di Buton.

Peranan Sultan Bima yang besar dalam perjuangan melawan kolonialisme menggusarkan hati Belanda sehingga ketika Kerajaan Gowa dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya, berdasarkan pasal 15 dan 28 mereka diminta menyerahkan Sultan Bima. Kendati demikian, sultan tidak sudi menyerah kepada Belanda dan segera meninggalkan Gowa. Bersama dengan Karaeng Bontomarannu, pejuang Gowa yang

anti-Belanda, dia meneruskan perlawanannya di laut dengan menangkap setiap kapal VOC yang hendak ke Maluku guna membeli rempah-rempah atau dalam perjalanan pulang dari sana. Guna mengokohkan kekuatannya, sultan menjalin hubungan pula dengan Kerajaan Balanipa yang dituangkan dalam perjanjian pada 1668. Sultan Abdul Khair Sirajuddin tercatat pernah membantu perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten dan Trunojoyo. Bertolak belakang dengan sikap sultan yang menentang Belanda, Abdul Rahim, wakil sultan yang berada di Bima justru bersedia menjalin kerjasama dengan Belanda. Bahkan pada 1669, ia mengutus Jeneli (setingkat camat) Monta Abdul Wahid dan Jeneli Parado La Ibu menandatangani perjanjian dengan Gubernur Jenderal Maetsuycker di Batavia.

Setelah Sultan Bima kedua ini wafat pada 1682, ia digantikan oleh putranya, Nuruddin Abubakar Ali (terkadang ditulis Nur ad Din Abubakr Ali, memerintah 1682–1687), yang digelari orang Makassar sebagai Mapparabung Nuruddin Daeng Matali Karaeng Panaragang. Ia menikah dengan Daeng Tamemang, putri Raja Tallo pada 7 Mei 1684. Setelah meninggal, ia diberi gelar Ruma Ma Wa'a Paju karena merupakan sultan pertama yang mengenakan payung kebesaran berwarna kuning (disebut Paju Moncal). Semenjak kecil, Sultan Nuruddin Abubakar Ali telah mengecap pahit getirnya perjuangan melawan Belanda bersama ayahnya. Pada masa pemerintahannya, sultan mengirimkan pejabat-pejabat kesultanan ke Manggarai dan Sumba guna menjadi wakil Sultan Bima di kawasan tersebut.

Sultan Nuruddin Abubakar Ali tak lama memerintah dan setelah dia mangkat pada 1687, putranya tampil sebagai Sultan Bima keempat dengan gelar Jamaluddin (1687–1696). Dia menikah dengan Siti Fatima Karaeng Tana-Tana, putri Karaeng Bisei. Pada masanya Kesultanan Bima memiliki hubungan yang kurang baik dengan Belanda apalagi setelah Perjanjian Bungaya. Kendati demikian, Belanda tidak berani menyerang Bima secara langsung dan berupaya memperbaiki relasinya dengan kesultanan tersebut. Meskipun demikian, sultan tetap berpegang teguh pada pendiriannya yang menentang monopoli perdagangan serta tidak mengakui perjanjian yang ditandatangani oleh Jeneli Monta Abdul Wahid dan Jeneli Parado La Ibu pada 1669. Ketika Belanda memaksakan monopoli dagang terhadap Bima, dengan tegas sultan menyatakan bahwa Kesultanan Bima adalah urusannya, bukan Belanda. Sikap tegas Sultan ini mengusik Belanda sehingga mereka merencanakan niat licik untuk menjatuhkannya. Pada 1693, Sultan Jamaluddin berkunjung ke Dompu. Belanda merancang pembunuhan terhadap

permaisuri Sultan Dompu, yang tak lain adalah bibi Sultan Jamaluddin sendiri[55]. Sultan Bima ini kemudian dituduh sebagai pembunuhnya dan diadili di Makassar. Dia ditahan selama dua tahun di Benteng Fort Rotterdam, Makassar, dan sesudah itu dipindahkan ke Batavia pada 30 Agustus 1695. Setelah kurang lebih setahun menjalani hukuman karena tuduhan yang tak jujur ini, Sultan Jamaluddin mangkat di penjara pada 1696. Jenazahnya dimakamkan di Tanjung Priok. Namun, tiga tahun kemudian (1699), jenazah Sultan Jamaluddin berhasil dibawa kembali ke Bima dan dimakamkan di Tolobali.

Hasanuddin (1696–1731) menggantikan ayahnya yang meninggal di Batavia sebagai Sultan Bima kelima. Ia tetap menolak monopoli perdagangan dan mempertahankan perniagaan bebas di Bima. Bangsa manapun bebas berniaga ke Bima, asalkan menghormati kedaulatan Bima. Agar sultan mengubah pendiriannya, Belanda mengirim utusan bernama Kopman Cornelius Sahularius tetapi menemui kegagalan. Menyadari ancaman yang berasal dari pihak Belanda, sultan memperbaiki tatanan pemerintahan di daerah-daerah yang dikuasai Bima seperti Manggarai. Hubungan dengan Kerajaan Gowa yang masih menjadi kerabat raja-raja Bima terus ditingkatkan. Sultan mengadakan kunjungan pada 1726 dalam rangka meningkatkan keakraban antara kedua kerajaan. Selanjutnya, guna memperkuat hubungan kekerabatan antara Bima dan Gowa, pernikahan dilangsungkan pada 1727 antara putra mahkota Alauddin Muhammad Syah dan Karaeng Tana Sanga Mamuncaragi, putri Sultan Sirajuddin dari Gowa.

Alauddin Muhammad Syah (1731–1742) diangkat sebagai Sultan Bima keenam sepeninggal ayahnya. Semasa pemerintahannya hubungan dengan Gowa terus dibina. Kendati demikian, Belanda makin besar kekuasaannya di Kepulauan Nusantara sehingga Kesultanan Bima tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi hal ini. Sultan Alauddin Muhammad Syah mangkat pada 1742 dan seharusnya tahta kesultanan beralih kepada putranya, Abdul Kadim. Tetapi putra mahkota ini masih berusia 13 tahun saat ayahnya wafat. Karena itu, pemerintahan dipegang oleh *raja bicara* bernama Abdul Ali selaku wali sultan yang juga merangkap sebagai *jeneli rasana'e*. Kesempatan ini dipergunakan oleh seorang wanita bernama Kumala Bumi Partiga untuk menobatkan dirinya sebagai penguasa Bima. Ia adalah istri Sultan Abdul Qudus (I Mappababasa, memerintah 1742–1753) dari Gowa.

55. Lihat *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, halaman 104.

Sebenarnya, Kumala Bumi Partiga tak berhak menjadi penguasa Bima berdasarkan adat dan undang-undang yang berlaku. Pertama-tama, berdasarkan aturan tersebut apabila seorang raja belum dewasa, yang memegang kekuasaan adalah seorang wali. Kedua, adat Bima tak mengizinkan seorang wanita menjadi sultan. Kendati demikian, naiknya Kumala Bumi Partiga ke tampuk pimpinan Bima sesungguhnya membawa berbagai keuntungan bagi Bima karena sultan wanita ini ingin menyelamatkan Bima dari ancaman Belanda. Kondisi Bima saat itu memang sungguh rentan. Abdul Kadim belum dewasa; sementara walinya terlalu banyak merangkap jabatan, yakni sebagai *raja bicara* dan *jeneli rasana'e*. Mengingat tugasnya yang banyak itu, sulit bagi Abdul Ali menjalankan perannya sebagai wali sultan secara efektif. Alasan lain adalah keinginannya menyelamatkan daerah Manggarai. Semasa berlangsungnya pernikahan antara Sultan Alauddin Muhammad Syah dengan Karaeng Tana Sanga Mamuncaragi, Manggarai telah dijadikan mahar sehingga secara hukum telah menjadi milik Gowa. Dengan demikian, Kumala Bumi Partiga merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan kawasan tersebut serta tak rela bila dikuasai oleh Belanda.

Setelah putra mahkota Abdul Kadim (1751–1773) dewasa, ia dinobatkan sebagai Sultan Bima kedelapan. Pada 1753, Sultan Abdul Qudus (kakak ipar Abdul Kadim) dari Gowa mangkat dan digantikan oleh Amas Madina, yang digelari Batara Gowa II. Belanda berupaya merenggangkan hubungan Bima dan Gowa, dengan mengungkit pengambilan wilayah Manggarai oleh Kumala Bumi Partiga pada 1759. Sultan Abdul Kadim termakan hasutan ini dan mengambil alih Manggarai dari Gowa pada 1762. Dengan demikian, untuk sementara waktu relasi antara Bima dengan Gowa menjadi retak.

Kondisi ini tak berlangsung selamanya. Sultan Amas Madina tidak disukai Belanda dan selain itu, ia banyak berkonflik dengan kaum kerabatnya. Itulah sebabnya, Sultan Gowa ini lantas meninggalkan kampung halamannya menuju Bima. *Bate salapanga* (Dewan adat Gowa) berupaya membujuknya kembali ke negerinya, tetapi ditolak oleh sultan. Belanda mencurigai Amas Madina hendak menjalin persekutuan dengan Inggris sehingga menangkapnya pada 1767 bersama ibunya, Kumala Bumi Partiga. Selanjutnya para bangsawan Gowa tersebut diasingkan ke Srilanka. Sultan Abdul Kadim yang merasa berhutang budi kepada Belanda karena pernah membantunya merebut Manggarai terpaksa menandatangani perjanjian mengenai monopoli dagang pada 9 Februari 1765. Naskah kontrak ini dahulu tersimpan di Arsip

Nasional Jakarta, namun sekarang tidak diketahui lagi rimbanya. Penanda-tanganan perjanjian ini menamatkan riwayat perdagangan bebas di Bima. Semenjak saat itu, Kesultanan Bima tak diizinkan lagi berdagang dengan bangsa asing selain Belanda. Dampaknya, sungguh melemahkan Bima dari segi perekonomian.

Gowa pada mulanya memegang kedaulatan atas raja-raja di Pulau Sumbawa termasuk Bima, namun setelah kekalahannya pada Perang Makassar di tahun 1667, secara resmi kerajaan-kerajaan di kawasan tersebut masuk ke dalam naungan kekuasaan Belanda. Raja-rajanya diharuskan menandatangani perjanjian atau kontrak politik dengan Belanda, setiap naik tahta. Abdul Kadim mangkat pada 1773 dan digantikan oleh Abdul Hamid (1773–1817). Kendati demikian, Sultan Bima kesembilan ini baru menandatangani perjanjian dengan Belanda 18 tahun setelah ia naik tahta, yakni pada 26 Mei 1792. Sultan berlayar sendiri ke Makassar dan mengangkat ikrar kesetiaan di hadapan Gubernur Willem Beth. Ada lagi naskah yang meriwayatkan pelayaran sultan ke Makassar itu. Karena orang Bima kurang menguasai teknik pelayaran, rombongan kapal sultan sempat terpencar-pencar; bahkan beberapa kapal sampai kandas. Meskipun demikian, sultan tiba juga dengan selamat di Makassar pada 29 April 1792. Gubernur menerimanya di sana dengan ramah dan dalam suasana persahabatan. Kontrak politik ini merupakan pembaharuan bagi kontrak tahun 1765, yang ditandatangani oleh sultan sebelumnya.

Pada 1790, saudara seayah sultan, Jeneli Sape, berupaya mengkudeta dirinya, tetapi gagal. Itulah sebabnya, Jeneli Sape terpaksa melarikan diri ke Manggarai dan setelah itu pindah ke Makassar. Ketika sultan berkunjung ke Makassar, Willem Beth, berupaya merukunkan kembali kedua bersaudara itu. Kendati Jeneli Sape telah meminta ampun dan mengakui kesalahannya, sultan tetap menolak menerimanya. Dia menganggap bahwa Jeneli Sape telah melanggar adat istiadat yang sangat dihormatinya[56].

Menjelang awal abad 19, Belanda merasa kedudukannya terancam oleh Inggris. Selain itu, Kesultanan Bima kerap tidak mematuhi kontrak dengan Belanda yang telah ditandatanganinya pada 1792. Oleh karenanya, Belanda kembali mengundang sultan beserta *raja bicara* ke Makassar guna menandatangani kontrak baru pada 1810. Tetapi kontrak ini juga tak besar pengaruhnya. Bahkan pada 1811, Belanda terpaksa menyerahkan kekuasaan atas Kepulauan Nusantara kepada pemerintah Inggris.

56. Lihat *Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima*, halaman 133.

Semasa kekuasaan Inggris ini, Bima kembali menjalankan politik perdagangan bebas. Hubungan dengan pihak Inggris terjalin pula dengan baik. Sultan Abdul Hamid kerap saling berkirim surat dengan Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles. Kebijakan baru ini seolah-olah merupakan angin segar bagi Bima sehingga perekonomian di kesultanan tersebut mengalami kemajuan kembali.

Meskipun demikian, tak ternyana terjadilah bencana alam dashyat yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat di Pulau Sumbawa, yakni letusan Gunung Tambora pada 1815. Kedahsyatan peristiwa ini dengan jelas dilukiskan dalam *Syair Kerajaan Bima* sehingga meluluhlantakkan Kerajaan Tambora dan Kerajaan Pekat. Rakyat kehilangan tempat kediamannya dan terancam bencana kelaparan. Musibah ini merupakan tantangan bagi sultan dan perdana menterinya dalam membantu rakyatnya yang menderita. Sultan beserta masyarakat berpunya menggalang dana demi meringankan kesengsaraan rakyat. Para pedagang, baik yang berasal dari Kepulauan Nusantara maupun luar negeri, seperti Makassar, Bugis, Maluku, Melayu, Banten, Arab, Inggris, China, dan Portugis, turut memberikan bantuannya. Oleh karena itu, tak mengherankan bila dalam waktu singkat permasalahan ini dapat diatasi.

Syair Kerajaan Bima mengisahkan pula mengenai sakit dan mangkatnya Sultan Abdul Hamid. Berdasarkan syair tersebut, sultan bertahun-tahun menderita sakit perut. Pengobatan yang diberikan oleh tabib China dan ilmu kedokteran Belanda juga tidak menolong. Begitu pula upaya penyembuhan yang dilakukan para dukun[57]. Sultan setelah menderita penyakit di bagian perut yang parah tersebut, mangkat pada 1817. Karya sastra di atas meriwayatkan pula pemakaman sultan dan penobatan penggantinya.

Serangan bajak laut tampaknya tetap menjadi masalah serius bagi Kerajaan Bima dan kerajaan lain di Pulau Sumbawa pada abad 19. Diriwayatkan dalam *Syair Kerajaan Bima* mengenai para bajak laut Tobelo yang "tubuhnya hitam memakai kancut." Mereka menimbulkan masalah bagi Kerajaan Sanggar yang sultannya lari ke hutan. Para perompak itu merampas harta, senjata, dan menawan penduduk yang kemungkinan dijadikan budak. Pelabuhan Kore dan Wera juga menjadi sasaran perompakan tersebut. Ketika mereka menuju Sape, pihak Bima yang diwakili oleh *raja bicara* menyiapkan perlawanan. Sepasukan tentara yang dipimpin oleh *Jeneli* Parado (saudara dan ipar sultan) dan anak syahbandar bernama Bumi Waworada

57. *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, halaman 275, syair bait 83–86.

dikirim ke Sape. Kaum perompak menembaki kota tersebut dengan meriam. Warga Melayu dan Bugis yang berdiam di Sape melakukan aksi perlawanan, namun kalah karena jumlah mereka lebih sedikit. Para perompak maju makin jauh dan menjarah harta benda yang ada di rumah-rumah kampung pelabuhan. Mereka bergerak menuju kota sambil menembak dan membakar. *Jeneli* Sado beserta pasukannya tiba di Sape untuk menghadapi musuh. Sementara itu, *raja bicara* memerintahkan pasukan lain untuk bergerak ke sana yang dipimpin oleh imam Bima. Imam mengatur pasukannya dengan suatu formasi yang disebut *garuda mengeram*, dengan bagian "kepala" terselip di bawah "sayap." Setiap anggota tubuh "burung" itu dipimpin oleh pembesar yang gagah berani. Para perompak melancarkan serangan pagi harinya, tetapi berhasil dipukul mundur, bahkan pemimpin mereka berhasil dibinasakan. Perompak lari tunggang langgang menyelamatkan dirinya. Selanjutnya, sepasukan kecil ditinggalkan di sana untuk berjaga-jaga.

Setelah Sultan Abdul Hamid mangkat, dia digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Ismail (1819–1824). Sebelumnya, kekuasaan atas Kepulauan Nusantara telah berbalik kembali kepada Belanda semenjak 1816. Meskipun demikian, Kesultanan Bima tetap menjalin hubungan yang baik dengan Inggris dan pedagang asing lainnya. Hal ini tentu saja menggelisahkan Belanda yang tak pernah jemu memaksakan politik monopoli perdagangannya. Dengan licik Belanda mengirim seorang utusan keturunan Arab bernama Khojah Ibrahim[58] untuk menemui Sultan Ismail pada 1820. Ia berhasil memengaruhi sultan sehingga bersedia menerima monopoli dagang Belanda. Sultan menyetujui tawaran Belanda ini karena menaruh hormat kepada utusan berlatar belakang agama sama dengan dirinya tersebut dan melupakan bahwa ia sesungguhnya mengemban misi Belanda. Penjajah telah memperhitungkan bahwa pemilihan utusan yang beragama Islam dalam membujuk sultan akan lebih dihargai[59] sehingga lebih besar pula peluang keberhasilannya. Sejarah membuktikan bahwa dugaan Belanda ini tak meleset, Sultan Ismail berhasil dibujuk menandatangani perjanjian yang berisikan:

- Armada laut Bima tak diperkenankan mengusik atau menyerang kapal-kapal Belanda.
- Armada laut Bima harus membantu Belanda menyerang kapal-kapal Makassar.

58. Lihat *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, halaman 128.
59. Lihat *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, halaman 128.

- Kesultanan Bima wajib menyerahkan upeti kepada Belanda berupa beras, ternak, dan hasil bumi lainnya.
- Pelabuhan Lawa Due diserahkan kepada Belanda untuk mendirikan benteng.
- Setiap pengangkatan Sultan Bima harus mendapatkan persetujuan dari gubernur Belanda di Makassar[60].

Demikianlah, berkat kelicikannya Belanda berhasil memaksakan perjanjian yang merusak kedaulatan Bima ini. Bila dicermati salah satu isinya bermaksud mengadu domba antara Bima dengan para pejuang Makassar, yang sebelumnya kompak dalam menentang imperialisme Belanda. Perjanjian ini menimbulkan dilema dalam diri Sultan Bima karena jika ditolak kerajaannya akan menjadi sasaran agresi militer Belanda. Di tengah-tengah situasi sulit ini, Raja Bicara Abdul Nabi wafat pada 1829 dan digantikan oleh putranya bernama Muhammad Yakub.

Pada akhirnya, sultan beserta *raja bicara* yang baru dengan berani membangkang isi perjanjian. Mereka tidak bersedia menyerang para pejuang Makassar dan upeti kepada Belanda juga tersendat-sendat. Selain itu, Bima tetap mempertahankan dirinya sebagai pelabuhan bebas. Kendati demikian, ketakutan terhadap agresi militer Belanda tidak terbukti karena pemerintah kolonial saat itu sedang disibukkan berbagai perlawanan besar di penjuru lain Kepulauan Nusantara, seperti Jawa (Perang Diponegoro), Minangkabau (Perang Paderi), Bali, Bone, Batak (Perang Sisingamangaraja), dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, Belanda memilih bersikap lunak terlebih dahulu terhadap Bima.

Menyadari bahwa lambat laun negerinya akan menjadi sasaran angkara murka Belanda, sultan dibantu perdana menterinya menggalakkan pembangunan di berbagai bidang. Ekonomi dan politik yang sempat terganggu akibat meletusnya Gunung Tambora dipulihkan kembali berkat kerja keras semua pihak. Pertanian beserta peternakan dimajukan. Perdagangan bebas digiatkan sehingga menambah pemasukan bagi Bima. Bidang pertahanan dan keamanan tak luput pula dari perhatian sultan. Persenjataan-persenjataan yang cukup mutakhir saat itu dibeli dari pedagang Inggris. Seluruh upaya keras di atas sanggup menjadikan Bima sebagai kerajaan yang kuat dan disegani oleh Belanda.

60. Lihat *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, halaman 129.

Menariknya, beberapa orang asing tercatat pernah mengunjungi istana Bima sehingga memberikan informasi berharga mengenai kondisi sultan dan istana saat itu. Selain itu, laporan mereka dapat menjadi pelengkap dan penyeimbang bagi sumber-sumber lokal. Salah seorang di antara mereka adalah Reinwardt, seorang ahli ilmu alam yang berkunjung ke Bima pada 1821. Ia beserta residen Belanda dan rombongannya sempat berjumpa dengan sultan pada sore harinya. Sultan dan *raja bicara* menyambutnya di tempat kediaman sultan. Mereka lalu menaiki tangga dan duduk di sebuah ruangan besar. Reinwardt melaporkan bahwa sultan dan *raja bicara* menjabat tangannya. Selanjutnya dengan diapit oleh sultan beserta residen, mereka menaiki tangga istana. Mereka kemudian duduk di sebuah ruangan besar, yakni di depan meja sebelah kiri Reinwardt. Para pejabat tinggi kedua belah pihak duduk seturut kedudukannya masing-masing. Adapun hidangan yang disajikan adalah anggur, kopi, teh, makanan kecil, tembakau, beserta pipa-pipa penghisap rokok. Kendati demikian, sultan dan *raja bicara* tidak merokok.[61].

Pada kesempatan itu, sultan tampak tidak banyak bicara dan menurut residen, ia hanya menghabiskan waktunya dengan tidur dan mengisap madat. Tampaknya sultan juga kurang fasih berbahasa Melayu. Yang lebih banyak berbicara adalah *raja bicara*, yang telah berumur 72 tahun. *Raja bicara* dikatakan merupakan seorang arif yang menjaga agar kontrak-kontrak dengan Belanda dipatuhi. Tampaknya kepatuhan kepada Belanda itu didasari oleh kepentingannya sendiri serta ketakutan diserbu perompak atau raja-raja sekitar.

H. Zollinger mengunjungi Bima pada 1847. Ia juga seorang ahli ilmu alam yang menerbitkan buku mengenai kawasan tersebut setelah kunjungannya selama 3 bulan. Selama perjalanannya, Zollinger mengalami banyak kesulitan dalam memperoleh bantuan dengan cepat yang diperlukannya dari sultan dan pembesar; misalnya dalam hal mengangkat barang-barangnya. Selain itu, izin bertemu sultan juga susah diperoleh. Zollinger menyampaikan terlebih dahulu surat pengantar dari gubernur jenderal. Surat dibawa oleh arak-arakan panjang dan disambut dentuman meriam sebanyak 42 kali. Setelah seminggu, ia memperoleh kesempatan berjumpa dengan sultan di istananya. Ia disambut oleh sultan yang berpakaian mewah di tangga istana dan selanjutnya dengan diiringi sultan, Zollinger memasuki berada istana. Istana Bima digambarkan Zollinger sebagai gelap dan kotor. Penerangannya tidak memadai dan ruangan-ruangan

61. Lihat *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, halaman 367.

dalam istana gelap serta rendah. Istana itu dijejali dengan beraneka barang dan perabot sehingga sangat panas di dalamnya. Kaca-kaca jendela juga tidak memberikan cukup penerangan, kemungkinan akibat tidak pernah dibersihkan semenjak pemasangannya[62].

Sultan saat itu dikabarkan telah berusia 54 tahun, dan berbeda dengan laporan Reinward, ia dikatakan sanggup berbahasa Melayu dengan baik, tetapi kerap melamun saat pembicaraan berlangsung. Rambut dan jenggot sultan sudah beruban. Wajahnya kuning kering, yang memperlihatkan bahwa ia merupakan pecandu madat. Zollinger menyatakan bahwa kedatangannya bermaksud mengumpulkan berbagai tumbuhan sebagai bahan obat. Sultan berjanji akan memberikan segenap bantuan semaksimal mungkin. Zollinger menambahkan bahwa ia tidak tahu apakah sultan memahami penjelasannya atau tidak, tetapi menurut penilaian Zollinger senyum sultan tampak tidak begitu cerdas serta tidak memperlihatkan pemahanan yang cepat.[63].Perjamuannya dikatakan sangat baik serta setengah bergaya Eropa dan setengah bergaya Bima. Pertemuan dengan sultan berlangsung sampai pukul 8 malam. Zollinger pada kesempatan itu bahkan diangkat sebagai saudara sultan. Keesokan harinya diadakan kunjungan ke rumah *raja bicara*. Laporan Zollinger menyebutkan bahwa rumah *raja bicara* dijejali sangat banyak barang sehingga lebih mirip sebuah toko[64].

Sultan Abdullah (1854–1868) menggantikan ayahnya sebagai Sultan Bima kesebelas. Perekonomian Bima pada zamannya cukup menggembirakan. Hanya saja yang menjadi ganjalan adalah makin kokohnya kedudukan Belanda setelah berhasil mematahkan berbagai perlawanan rakyat. Agar angkatan perangnya tidak dimanfaatkan oleh Belanda guna memerangi sesama rekan seperjuangan[65], Muhammad Yakub selaku *raja bicara* mengeluarkan suatu keputusan drastis dengan membubarkan angkatan laut Kesultanan Bima. Meskipun tindakan ini dimaksudkan sebagai perlawanan pasif terhadap Belanda, namun merugikan Bima sendiri dari segi pertahanan dan keamanan. Pembubaran angkatan laut ini diperingati dengan pendirian monumen berbentuk tiang bendera yang menjulang di depan istana Kesultanan Bima.

---

62. Lihat *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, halaman 370.
63. Lihat *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, halaman 370.
64. Dalam korespondensinya, Sultan Abdul Hamid tampaknya menggemari barang-barang modern buatan Eropa. Banyak hadiah benda-benda semacam itu yang diterimanya dari gubernur jenderal. Barangkali barang-barang inilah yang disaksikan oleh Zollinger. Berbagai hadiah itu dibiarkan bertumpuk-tumpuk dan dibiarkan tak terurus memenuhi ruang tamu istana Bima dan rumah dinas *raja bicara*. Lihat *Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima,* halaman 135.
65. Para pejuang Makassar, Bugis, Ternate, dan Tidore yang kerap mengganggu kapal Belanda, dianggap sebagai bajak laut oleh Belanda.

Sultan Abdul Azis (1868–1881) menjadi sultan Bima kedua belas menggantikan kakeknya. Dia merupakan Sultan Bima yang belum sempat menikah karena meninggal dalam usia muda. Pada 1874, Belanda menghapuskan keharusan Bima membayar upeti berupa kayu kuning. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang lebih baik dengan Kesultanan Bima. Kalangan istana sendiri terpecah menjadi dua golongan, yakni yang pro dan kontra terhadap Belanda. Raja Bicara Ahmad Daeng Manasa merupakan salah seorang penentang Belanda yang gigih sehingga mengundurkan diri dari jabatannya. Ia kemudian berdiam di tengah-tengah rakyat demi menyebarluaskan ilmu agama dan pertanian. Belanda lalu mengangkat seseorang yang memihak mereka bernama Abdul Azis bin Yunus sebagai *raja bicara* baru. Pengangkatan ini menimbulkan keresahan di kalangan dewan adat Bima dan rakyat karena ia bukanlah keturunan Ma Waa Bilmana yang berhak menjadi *raja bicara*. Di tengah-tengah kondisi ini, Sultan Abdul Azis mendadak mangkat tanpa menderita sakit sebelumnya.

Karena tidak mempunyai keturunan maka yang diangkat sebagai pengganti Sultan Abdul Azis adalah adiknya, Ibrahim (1881–1917). Belanda mengulur-ulur waktu pengesahan Sultan Bima yang baru ini. Kendati demikian, Sara Dana Mbojo selaku pemuka adat Bima tetap melangsungkan penobatan sultan, yang berlangsung lancar dan sesuai dengan tradisi. Belanda kembali menyodorkan perjanjian pada 1886, yang isinya memaksa Kesultanan Bima menyerahkan daerah-daerah taklukannya kepada pemerintah kolonial. Sultan beserta *raja bicara* enggan menerimanya. Kendati demikian, Belanda belum berani mengambil tindakan tegas terhadap Bima, hingga berakhirnya pemberontakan Aceh. Setelah berbagai pergolakan dipadamkan, barulah Belanda sanggup memusatkan perhatiannya terhadap Bima dan kawasan lainnya yang masih menentang kehadiran mereka. Pada 1905, sultan dipaksa menyerahkan daerah Manggarai dan setahun kemudian diharuskan menandatangani *Lange Kontrak*. Bahkan sultan dipanggil ke Batavia untuk menandatanganinya.

Belanda masih belum puas dengan perjanjian-perjanjian yang telah diadakannya dengan Sultan Bima. Pada 1908, gubernur jenderal kembali mengirimkan utusan kepada sultan dan mendesaknya menandatangani perjanjian yang isinya sebagai berikut[66]:

- Kesultanan Bima mengakui kedaulatan Belanda dan wajib mengibarkan bendera Belanda baik di darat maupun di laut.

66. Lihat *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, halaman 144.

- Kesultanan Bima dilarang menjalin kerja sama dengan bangsa kulit putih lainnya.
- Apabila pemerintah Belanda terlibat peperangan, Bima wajib mengirimkan bantuannya.
- Kesultanan Bima dilarang menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada bangsa Barat lain.

Gubernur jenderal di Batavia meratifikasikan perjanjian tersebut pada 6 Februari 1908. Belanda kerap campur tangan dalam tatanan pemerintahan Bima, salahsatunya dengan membubarkan Sara Hukum.

Belanda membebani rakyat dengan pajak yang berat. Oleh karenanya, kebencian di kalangan rakyat terhadap Belanda juga makin meluap. Selain itu, Belanda kerap melakukan penyalahgunaan hukum adat Bima. Tidak mengherankan bila berbagai perlawanan pecah di kalangan rakyat, seperti Perang Ngali (1908–1909), yang dipimpin Abbas Daeng Manasa, H. Yasin, H. Said, dan Salasa Ompu Kapa'a; Perang Rasa Nggaro (1910), yang dipimpin La Seo, Dae Sambu, La Usu, Hedo, Ompu Jungge, dan Ompu Kahoro, dan Perang Dena (1910), yang dipimpin H. Usman dan H. Abdul Azis. Sultan berada dalam posisi dilematis karena di satu pihak ia mendukung perlawanan ini, tetapi di lain pihak terikat perjanjian dengan Belanda. Sikap sultan yang memihak para penentang Belanda walau tidak terang-terangan ini tercium juga oleh pemerintah kolonial sehingga Gubernur Swart melayangkan ancaman kepadanya.

Perlawanan rakyat terhadap Belanda masih ditambah pula dengan pergolakan di desa Kala (1908) pimpinan La Ntehi, yang dipicu oleh masalah pungutan pajak. Kendati demikian, Belanda dengan licik mengalihkan kebencian rakyat kepada Sultan Bima. Belanda menghasut rakyat dengan menyatakan bahwa pungutan pajak yang berat itu sengaja dibebankan sultan kepada mereka. Pemerintah kolonial menghembuskan desas-desus bahwa rakyat Kala yang beragama Kristen akan dipaksa memeluk agama Islam oleh sultan. Fitnahan keji Belanda ini termakan oleh rakyat Kala. Mereka berbalik melawan sultan yang sebelumnya mereka cintai. Dengan kata lain, Belanda berhasil mengangkat isu agama dan mengadu domba rakyat. Perlawanan-perlawanan rakyat baru berhasil dipadamkan pada 1910, dan semenjak saat itu Kesultanan Bima wajib mematuhi segenap perjanjian dengan Belanda.

Sultan Bima keempat belas dan terakhir, Muhammad Salahuddin (1917–1951), adalah putra Sultan Ibrahim. Semenjak usia 9 tahun, dia telah mendapatkan pendidikan keagamaan dari para ulama terkenal, seperti H. Hasan Batawi dan Syech

Abdul Wahab. Pengetahuan agama yang luas ini dimanfaatkan sultan menulis buku agama bermutu tinggi dengan judul *Nurul Mubin*, yang dicetak oleh Percetakan Siti Syamsiah, Solo. Kitab ini telah dicetak sebanyak dua kali dan cetakan terakhirnya terbit pada 1942. *Raja bicara* saat itu, Abdul Hamid, juga mengarang sebuah buku agama berjudul *Mukaddimah Muktadim*, yang diterbitkan oleh Volks Drukrij, Makassar. Bidang pendidikan tak luput dari perhatian sultan, hal ini terbukti dari pendirian HIS (*Hollandsch-Inlandsche School*), sekolah Belanda untuk bumiputra, pada 1921 dan sekolah kejuruan bagi kaum wanita pada 1922. Sultan pula memerhatikan pembangunan bidang agama, antara lain dengan mendirikan Masjid Raya di Raba pada 1935; sekolah agama pertama di Bima, Madrasah Darul Tarbiyah, pada 1934; dan lain sebagainya. Permaisuri sultan beserta putri-putrinya ikut serta berjuang memajukan kaum wanita dengan mendirikan organisasi ketrampilan wanita bernama Rukun Wanita.

Angin pergerakan nasional berhembus hingga ke Bima. Organisasi Sarikat Islam (SI) cabang Bima didirikan pada 1920 dengan dipelopori ulama asal Banjarmasin bernama H.M. Tahir. Sultan Muhammad Salahuddin mendukung gerakan ini dengan mengizinkan para ulama di istana menjadi pengurus SI. Kendati demikian, kebijaksanaan ini terpaksa ditarik kembali oleh sultan karena diancam oleh Belanda. Organisasi Muhammadiyah cabang Bima berhasil didirikan pada 1927 atas usaha Raja Bicara Abdul Hamid, yang mendapat restu sultan. Sehubungan dengan perkembangan NU di Bima, sultan mendatangkan Syech Husain Syehab, tokoh NU dari Jakarta. Organisasi-organisasi lokal tidak ketinggalan bermunculan di Bima, seperti Persatuan Islam Bima pada 3 November 1938 dengan sultan sendiri sebagai pelindungnya. Di samping merintis berdirinya Muhammadiyah cabang Bima, Raja Bicara Abdul Hamid berkiprah sebagai pelindung bagi Partai Indonesia Raya (PIR). Seluruh keterlibatan sultan beserta *raja bicara* dalam organisasi-organisasi kebangsaan di atas merupakan wujud dukungan bagi semangat nasionalisme dalam diri mereka.

c. Kesultanan Bima Pada Zaman Jepang dan Era Kemerdekaan

Perang Dunia II pecah pada 1939. Bersamaan dengan itu, Jepang mulai melakukan ekspansinya dan menduduki negeri-negeri di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Indonesia yang saat itu berada di bawah kolonialisme Belanda tak luput pula menjadi sasaran penyerbuan Jepang. Pasukan Belanda yang bercokol di Kepulauan Nusantara terus terdesak dan menyerah pada Maret 1942. Banyak di antara mereka

yang kemudian mengungsi ke Australia. Kekalahan ini dimanfaatkan oleh para pemuda di Bima, seperti Mahmud Kashmir, Amin Daeng Emo, Muhammad Abdul Wahab, Abdul Azis Ruma Parenta, dan lain sebagainya, untuk membentuk aksi perlawanan terhadap sisa-sisa aparat pemerintah kolonial yang masih bercokol di sana.

Di tengah-tengah kekeruhan suasana saat itu, hadirlah dua orang pilot Belanda pada 30 Maret 1942 di Bima, yang hendak melarikan diri menuju Australia. Mereka menimbulkan kekisruhan dengan menembaki secara membabi buta perahu-perahu Jawa dan Madura yang menolak mengantarkan mereka ke Australia. Penguasa pemerintahan kolonial yang masih bercokol di Bima ternyata membiarkan saja tindakan semacam itu. Hal ini mengakibatkan kemarahan para pemuda sehingga pada 5 April 1942 mereka beserta anggota pasukan KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) dan kepolisian menyerang objek-objek vital Belanda. Tangsi polisi, pemancar radio, dan pusat operator telepon berhasil diduduki oleh gerakan perlawanan yang didukung seluruh rakyat ini. Aksi tersebut diikuti pula perlucutan dan penawanan orang-orang Belanda. Kendati demikian, rencana penyerangan sempat bocor ke telinga sebagian aparat pemerintahan dan tokoh-tokoh Belanda. Oleh karenanya, sebagian dari mereka ada yang melarikan diri ke Lombok Timur, yakni Asisten Residen H.E. Haak, Kontrolir M. Hachman, Direktur A.V.B. (Bank Rakyat) Pons, dan lain sebagainya[67]. Semenjak saat itu, Kesultanan Bima dapat dianggap berdaulat kembali.

Tokoh-tokoh Belanda yang telah melarikan diri ke Lombok berniat menyerang balik ke Bima dan menyusun kekuatan bersama sisa-sisa pasukan kolonial di Selong (Lombok Timur). Mereka kemudian menyeberang kembali ke Sumbawa, tetapi rencana ini bocor dan terdengar oleh dua orang kurir Bima yang saat itu berada di Sumbawa, yakni Hakim Hantabi dan Soewondo. Kedua orang ini segera menelepon M. Nor. Amin, seorang Jeneli Kempo yang mengabarkan niat Belanda menyerang Bima pada 12 April 1942. Sultan setelah mendengar informasi ini menggalang kekuatan yang beranggotakan para pemuda dan anggota pasukan KNIL beserta kepolisian yang berjiwa nasionalis di bawah pimpinan Aritonang. Bahkan sultan melepas sendiri kepergian para pejuang yang hendak mempertahankan tanah airnya itu dari istananya. Pertempuran pecah pada malam hari tanggal 30 April 1942 di desa Sori Utu, yang masuk wilayah Dompu. Ketika itu, iring-iringan pasukan Belanda yang hendak memasuki Bima disambut oleh para pejuang dengan perlawanan sengit.

---

67. Lihat *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, halaman 170.

Belanda dapat dikalahkan dan dipukul mundur ke Sumbawa. Seorang di antara mereka tewas dan satu orang lagi berhasil ditawan oleh para pejuang. Sementara itu, di pihak Bima gugur Idris Hakim dan Amin Daeng Emo.

Bala tentara Jepang baru mendarat di Bima pada 17 Juli 1942 di bawah pimpinan Kolonel Saito. Pada mulanya, Jepang yang mengaku sebagai "saudara tua" bangsa Indonesia memperlihatkan tampangnya yang simpatik sehingga sultan beserta rakyat menyambutnya dengan suka cita. Tak lama kemudian, kedok Jepang mulai terbuka. Mereka mengeksploitasi Bima sedemikian rupa sehingga menimbulkan penderitaan luar biasa di kalangan rakyat. Dengan didukung oleh polisi militernya yang bernama *kenpetai*, Jepang melakukan penindasan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap para penentangnya. Masih belum cukup dengan itu semua, Jepang berniat mengumpulkan para gadis guna dijadikan wanita penghibur. Sultan beserta tokoh Muhammadiyah dan para ulama menempuh strategi jitu dengan menganjurkan rakyat agar berbondong-bondong menikahkan anak gadisnya. Akibatnya, terjadi pernikahan masal demi menyelamatkan harkat dan martabat wanita Bima.

Setelah kedua kotanya, Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhi bom atom, Jepang menyerah kalah pada 14 Agustus 1945. Kesempatan ini dipergunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kendati demikian, kabar gembira tersebut baru tersiar di Bima pada 2 September 1945. Berita yang dibawa para putra Bima di Singaraja beserta utusan dari Jawa atas amanat I Gusti Ketut Puja, gubernur Sunda Kecil, disambut dengan suka cita oleh Sultan Muhammad Salahuddin. Pengibaran Sang Saka Merah Putih dilangsungkan di depan istana Bima pada 31 Oktober 1945. Bersamaan dengan itu, sultan memerintahkan pula pengibaran bendera kebangsaan kepada seluruh *jeneli* di seluruh penjuru Kesultanan Bima. Bendera yang dikibarkan di depan istana tersebut berasal dari Bung Karno sendiri yang mengunjungi Singaraja guna membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang menerimanya adalah utusan-utusan resmi Kesultanan Bima, yakni Jeneli Rasana'e Idris Jafar.

Sultan kemudian mengeluarkan maklumat pada 22 November 1945 yang menyatakan bahwa Kesultanan Bima merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Kami Sultan Kerajaan Bima, menyatakan dengan sepenuhnya bahwa:

1. Pemerintah Kerajaan Bima, suatu daerah Istimewa dari negara Republik Indonesia yang berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia.

2. Kami menyatakan bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah pemerintahan Kerajaan Bima terletak di tangan kami. Oleh karena itu, berhubung dengan suasana pada dewasa ini maka kekuasaan-kekuasaan sampai ini tidak di tangan kami maka dengan sendirinya kembali ke tangan kami.
3. Kami menyatakan dengan sepenuhnya bahwa berhubung pemerintahan lingkungan Kerajaan Bima bersifat langsung dengan pusat negara Republik Indonesia.
4. Kami memerintahkan dan percaya kepada sekalian penduduk dalam seluruh Kerajaan Bima, mereka akan bersifat sesuai dengan sabda kami yang ternyata di atas[68].

Maklumat di atas mencerminkan jiwa nasionalisme sultan yang mendukung semangat proklamasi kemerdekaan. Agar pemerintahan RI di daerah-daerah dapat berlangsung dengan baik, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID yang berkantor pusat di kediaman Raja Bicara Abdul Hamid.

Perjuangan menegakkan kemerdekaan belum usai karena ternyata Belanda masih enggan melepaskan Kepulauan Nusantara dari cengkeraman kolonialismenya. Mereka datang kembali di Bima dengan membonceng pasukan Sekutu. Sultan Muhammad Salahuddin dengan tegas menolak kehadiran pasukan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) dengan pernyataan yang dikeluarkannya pada 2 Januari 1946. Sebelumnya, kendati telah menerima peringatan keras dari Mayor Jenderal Tanaka, penguasa sementara Sumbawa Timur sebelum kedatangan pasukan Sekutu, sultan dengan berani tetap menyelenggarakan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan di depan istananya pada 17 Desember 1945. Kendati demikian, NICA memaksa mendarat juga sehingga menimbulkan ketegangan dengan rakyat dan pasukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) beserta API (Angkatan Pemuda Indonesia). Waktu itu, putra mahkota Bima, Abdul Kahir, turut menjabat sebagai komandan TKR. Pasukan NICA makin bertindak brutal sehingga TKR dan API terpaksa memindahkan markasnya.

Belanda berupaya memecah belah bangsa Indonesia dengan mendirikan berbagai negara boneka. Guna memuluskan tujuan tersebut, DR. H.J. van Mook mengadakan konferensi di Malino dan mengupayakan agar berbagai swapraja (daerah yang berpemerintahan sendiri) di luar Jawa memutuskan hubungannya dengan pemerintah RI. Sultan Muhammad Salahuddin turut pula menghadiri konferensi ini. Sebagai

68. *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, halaman 178. Naskah asli masih dalam ejaan van Ophuysen, yakni u ditulis oe, j ditulis dj, y ditulis j, dan lain sebagainya.

tindak lanjut Konferensi Malino, kembali digelar apa yang dinamakan Konferensi Denpasar. Hasilnya adalah pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT). Sebenarnya banyak tokoh nasionalis yang menganggapnya sebagai alat perjuangan meraih kemerdekaan sepenuhnya dari Belanda karena kondisi saat itu tidak menguntungkan bagi perlawanan frontal. Apabila dipaksakan melawan Belanda dengan kekuatan senjata maka perlawanan itu akan dengan mudah dipatahkan mereka.

Kendati wilayahnya masuk dalam NIT, Sultan Muhammad Salahuddin dalam hati sanubarinya tetap mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dari suratnya tertanggal 14 Desember 1949 kepada Sultan Sumbawa, selaku ketua parlemen NIT, yang menolak pengangkatan A. Verhoof, seorang Belanda, sebagai komisaris negara. Dia berpegang teguh bahwa yang menduduki jabatan semacam itu seharusnya adalah bangsa Indonesia. Sultan memelopori pertemuan dengan Sultan Sumbawa dan Dompu agar mengeluarkan pernyataan bersama pada 11 April 1950, yang isinya menuntut penggabungan ketiga kerajaan atau swapraja tersebut dengan RI. Akhirnya, NKRI berhasil dipulihkan pada 18 Agustus 1950, yang disambut gembira oleh sultan.

Karena usianya yang telah senja, yakni 64 tahun, sultan jatuh sakit pada 1951. Oleh sebab itu, diputuskan untuk berobat ke Jakarta. Kapal yang ditumpangi beserta keluarganya berangkat pada malam hari tanggal 11 Mei 1951. Setibanya di Jakarta pada 15 Mei 1951, Sultan Muhammad Salahuddin dirawat di Rumah Sakit Cikini selama kurang lebih 2 bulan. Kesehatannya dirasa membaik sehingga tanggal 1 Juli 1951 diizinkan meninggalkan rumah sakit dan menginap di Hotel Des Indes. Kendati demikian, penyakitnya kambuh kembali hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sultan berpulang pada 11 Juli 1951. Salah seorang pejuang kemerdekaan ini dimakamkan di Pemakaman Karet, Tanah Abang, Jakarta. Sebelum dia dikebumikan, atas permintaan pemerintah pusat, jenazahnya disemayamkan di gedung tempat berkumandangnya proklamasi kemerdekaan RI, yakni di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Putra mahkota Abdul Kahir tidak sempat dinobatkan sebagai Sultan Bima yang baru karena seiring dengan itu berlangsung penghapusan sistem pemerintahan swapraja di Indonesia. Kesultanan Bima yang telah eksis selama kurang lebih 300 tahun kini berubah menjadi kabupaten. Abdul Kahir selaku pewaris Kesultanan Bima mangkat pada 3 Mei 2001 di Jakarta dan dikebumikan pada 5 Mei 2001 di makam Dana Taraha. Meskipun upacara

pemakamannya telah usai, rakyat masih terus membanjiri tempat peristirahatan terakhirnya. Ini menandakan bahwa jiwa dan semangat Kesultanan Bima masih bertahan dalam sanubari rakyat Bima.

d. Kesusastraan

Terdapat beberapa karya sastra penting yang dihasilkan di Bima, seperti *Cerita Asal Bangsa Jin dan Segala Dewa-Dewa* (disingkat *Cerita Asal*) dan *Hikayat Sang Bima*. Seperti yang telah diungkapkan di atas, hikayat-hikayat itu memerikan mengenai asal usul raja-raja Bima. *Cerita Asal* tidak diketahui siapa pengarangnya atau masa dan tempat penulisannya. Selain itu, terdapat pula berbagai versi hikayat tersebut. Naskah cerita itu berbahasa Melayu dan kini terdapat empat teks, yang masing-masing berada di Berlin, Jakarta, Leiden, dan Sumbawa. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari rakyat Bima menggunakan bahasa Bima, tetapi bahasa Melayu (cikal bakal bahasa Indonesia) telah memperoleh keutamaan semenjak lama. Bahkan Sultan Bima kedua, Abdul Khair Sirajuddin, pada bulan Maret 1645 menitahkan agar seluruh dokumen kerajaan ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Arab Jawi. *Hikayat Sang Bima* mempunyai keterkaitan erat dengan *Cerita Asal*, hanya saja kisahnya terputus pada kisah putri naga yang hamil karena pandangan mata Sang Bima. Isi ceritanya boleh dikatakan merupakan saduran bebas *Cerita Asal* karena mempunyai kemiripan, walaupun terdapat pula perbedaan yang besar.

Berbeda dengan *Cerita Asal*, *Hikayat Sang Bima* mencantumkan nama pengarangnya sebagaimana yang diperkenalkan di bagian awal naskah, yakni seorang Melayu bernama Dalang Wisa Marta[69] yang datang ke Bima semasa pemerintahan Sultan Hasanuddin (1696–1731). Naskah ini juga ditulis dalam bahasa Melayu.

Karya sastra berikutnya adalah *Syair Kerajaan Bima*, yang mengisahkan berbagai peristiwa penting di Kerajaan Bima pada abad 19. Pengarang naskah berbahasa Melayu ini memperkenalkan dirinya sebagai Khatib Lukman[70]. Syair yang terdiri dari 487 baris berima a-a-a-a dan mengisahkan hal-hal berikut ini:

1. Letusan Gunung Tambora (bait 11–82)
2. Wafat dan pemakaman Sultan Abdul Hamid (bait 83–217)
3. Serangan bajak laut (bait 218–288)
4. Penobatan Sultan Ismail (bait 289–487)

---

69. *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, halaman 151.
70. *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah,* halaman 266, bait 9–10.

Masing-masing bait terdiri dari empat baris. Dari segi isi, pengarangnya tampak ingin menampilkan diri sebagai saksi masyarakat bagi zamannya. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang pegawai agama keturunan bangsawan Bima dan bukan orang luar, seperti Makassar. Karya ini dapat dianggap sebagai contoh bagi tradisi penulisan sejarah di Bima. Khatib Lukman mengesankan bahwa ia menulis bagi sesama orang Bima dan bukannya orang asing. Tidak pula, syair itu atas pesanan seorang penguasa, sebagaimana beberapa karya sastra lainnya, yang ditulis atas permintaan seorang raja. Ini terbukti dari berbagai peristiwa yang tercantum dalam karya tersebut. Karya pesanan biasanya hanya mengisahkan satu peristiwa saja, seperti yang diminta oleh pemesan. Selain itu, hal ini diperkuat dengan tiadanya tendensi memuji-muji seseorang atau tokoh. Pujian dan sanjungan dalam karya sastra pesanan tentunya ditujukan bagi pemesannya. Namun, hal semacam ini tidak tampak pada *Syair Kerajaan Bima*.

e. Sistem Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan

Sultan merupakan penyelenggara tertinggi pemerintahan di Bima. Berdasarkan tradisi Bima, sultan berfungsi sebagai *hawo ro ninu* (*hawo* = naungan; *ninu* = bayangan)[71]. Ini menandakan bahwa sultan merupakan tempat berlindung atau bernaung bagi rakyatnya. Meskipun demikian, kekuasaan sultan bukanlah tak terbatas. Dalam menjatuhkan keputusan sultan perlu memerhatikan saran *Sara Dana Mbojo* atau semacam dewan adat. Selain itu, sultan dibantu oleh seorang *raja bicara* (juga disebut *ruma bicara*), namun sultan berhak menerima atau menolak segenap keputusan yang berasal darinya. Masih menurut adat Bima, seorang sultan harus berasal dari keturunan lurus Raja Manggampo Donggo. Sebaliknya, *raja bicara* wajib berasal dari keturunan lurus Ma Wa'a Bilmana.

Seorang sultan dipilih oleh Sara Dana Mbojo dengan persetujuan kaum bangsawan. *Tuha ro lanti* (Upacara pelantikan) berlangsung di Amba Na'e (pasar besar) yang lokasinya berdekatan dengan istana. Sebelum sah menjadi sultan, tiga orang Gelarang Na'e yang mewakili rakyat menyampaikan kata-kata bernama protes dan ejekan kepada *jena teke* (putra mahkota) yang hendak dinobatkan tersebut. Setelah upacara pelantikan usai, sultan menyampaikan pidato kenegaraannya yang pertama kali di hadapan rakyat. Kemudian ia akan menerima pakaian kebesaran dan pusaka kerajaan, seperti payung kesultanan, keris Samparaja, mahkota, dan lain sebagainya. Upacara penyerahan pusaka ini berlangsung di sana. Salah satu keunikan Kesultanan

71. *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, halaman 76.

Bima adalah rajanya tidak memiliki singgasana atau kursi kebesaran. Sultan duduk di atas hamparan tikar terbuat dari daun lontar yang dianyam serta dihias dan biasa disebut *dipi umpu*.

Demi memperlancar tugasnya, beberapa pejabat diangkat membantu sultan di istana, seperti *rato parenta* dengan tugas mengatur urusan kedinasan dan *ompu to'i* selaku kepala urusan rumah tangga istana. Selain itu, masih ada lagi para pejabat lainnya, seperti *bumi nggeko* atau ajudan sultan, *bumi ncandi* dengan tugasnya mengatur ketentuan dan peraturan yang perlu dijalankan di istana, *bumi pareka* selaku pengatas kekayaan istana, *bumi roka* dengan tugasnya menjaga persenjataan di istana, bumi *ndakatau* yang mengatur masalah konsumsi, serta *bumi ndora* dan *bumi sari ntonggu* yang bertugas ketertiban dan keamanan di istana[72].

Raja bicara atau perdana menteri diangkat oleh sultan dan dipilih dari keturunan Ma Wa'a Bilmana. Ia diberi kehormatan menyerahkan perangkat kebesaran kerajaan kepada sultan baru setelah upacara pelantikan. Seorang *raja bicara* merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas lembaga Sara atau lembaga kehakiman dan juga Majelis Adat di Bima. Demi membantu kelancaran tugasnya, *raja bicara* dibantu oleh[73]:

- Menteri (*tureli*) yang berjumlah enam orang. Mereka membawa beberapa wilayah di Kesultanan Bima. Adapun keenam tureli tersebut adalah: Tureli Bolo, Tureli Woha, Tureli Sakuru, Tureli Belo, Tureli Donggo, dan Tureli Parado.
- *Jeneli* yang berjumlah enam orang dan terdiri dari: Jeneli Rasana'e, Jeneli Sape, Jeneli Monta, Jeneli Woha, dan Jeneli Parado. Kedudukan mereka berada di bawah tureli dan juga membawahi daerahnya masing-masing. Barangkali seorang *jeneli* dapat disejajarkan dengan camat sekarang.
- *Bumi Na'e* berjumlah dua belas dan terdiri dari: Bumi Luma Rasana'e, Bumi Luma Bolo, Bumi Luma Kae, Bumi Sari Mbojo, Bumi Nggampo, Bumi Nata, Bumi Cenggu, Bumi Waworada, Bumi Baralau, Bumi Punti, Bumi Tente, dan Bumi Lawi.

Para *tureli*, *jeneli*, dan *bumi* ini dipilih oleh kepala kampung, sedangkan kepala kampung dipilih oleh rakyat. Masalah pertahanan dan keamanan di Bima diserahkan kepada seorang pejabat bergelar *bumi renda*. Ia merupakan panglima perang dan

72. Lihat *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, halaman 80.
73. Lihat *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, halaman 83.

merangkap sebagai pimpinan bagi semacam lembaga kepolisian di Kesultanan Bima, dengan dibantu oleh para *anangguru* (panglima). Berdasarkan uraian di atas, dapat dikenali bahwa Kesultanan Bima telah mengenal tatanan pemerintahan yang teratur.

Terdapat dua jenis pengelompokan dalam masyarakat Bima, yakni secara vertikal dan horizonal. Masyarakat dalam Kerajaan Bima secara vertikal (atas ke bawah) dikelompokkan secara tegas dan beraneka ragam. Golongan pertama adalah kaum bangsawan, yang masih terbagi dua lagi, yakni *ruma* dan *rato*. Mereka merupakan penentu bagi nasib rakyat jelata yang bukan budak, selaku golongan kedua. Golongan budak tentunya tidak memiliki hak apa-apa. Yang termasuk kaum bangsawan adalah sultan, *raja bicara* (perdana menteri), enam *tureli* (wakil kepala marga atau suku yang dahulu bersatu membentuk kerajaan), dan enam *jeneli*, yang bertanggung jawab atas pemerintahan daerah masing-masing.

Pengelompokan berikutnya bersifat horizontal, yang membagi masyarakat menjadi berbagai *dari* (kelompok keahlian). Masing-masing *dari* ditentukan berdasarkan kewajibannya terhadap sultan. Perkawinan antara *dari* tidak diperbolehkan. Akibat langsung tradisi ini adalah terpeliharanya kemurnian suatu suku bangsa karena orang asing dikelompokkan dalam suatu *dari* tersendiri sehingga perkawinan campur kecil sekali kemungkinannya.

II. DOMPU

a. Cikal Bakal Kerajaan Dompu

Kerajaan ini terletak di Kabupaten Dompu sekarang. Menurut legenda, leluhur sultan-sultan Dompu adalah Sang Bima melalui anaknya yang bernama Indera Kemala atau Dewa Bitara (Batara) Dompu. Konon, Dompu belum mempunyai raja dan negeri tersebut terbagi menjadi beberapa wilayah kesukuan yang dipimpin para *ncuhi* (kepala desa), seperti Hu'u (sekarang Kecamatan Hu'u), Saneo (sekarang Kecamatan Woja Dompu), Nowa (sekarang Kecamatan Woja), dan Tonda (sekarang Kecamatan Woja Dompu). Yang paling terkemuka di antara mereka adalah *ncuhi* Hu'u.

Dewa Batara Dompu atau Indra Kemala dikatakan menumpang sebuah perahu dan mendarat di Teluk Cempi, Hu'u. Karena belum mempunyai seorang raja, para *ncuhi* kemudian bersatu dan sepakat mengangkatnya menjadi Raja Dompu yang pertama. Peristiwa ini merupakan awal terbentuknya Kerajaan Dompu yang merupakan penyatuan dari berbagai suku yang ada. Sementara itu, menurut cerita

rakyat lain di Woja terdapat seorang *ncuhi* bernama Sang Kula dengan putrinya, Komba Rame. Pada masa itu, putra Raja Tulangbawang yang sedang mengembara di kawasan timur Kepulauan Nusantara terdampar di sana. Sang Kula menikahkan putrinya dengan putra Raja Tulangbawang tersebut. Ia kemudian diangkat sebagai Raja Dompu pertama bergelar Dewa Batara Dompu dengan pusat pemerintahannya berada di Tonda.

Penggantinya adalah Dewa Indra Dompu yang lahir dari pernikahan Indra Komala dengan putra Dewa Batara Dompu. Ia digantikan lagi oleh adiknya, Dewa Mambara (Mbora) Bisu. Singgasana Dompu beralih kembali kepada adik Dewa Mambara Bisu bernama Dewa Mambara Belanda. Putranya bernama Dewa yang Punya Kuda menggantikan Dewa Mambara Belanda selaku Raja Dompu kelima. Penguasa Dompu berikutnya bernama Dewa yang Mati di Bima. Ia adalah seorang raja yang bertindak sewenang-wenang sehingga diturunkan oleh rakyatnya dan akhirnya bertolak ke Bima serta meninggal di sana.

Yang menggantikannya sebagai raja adalah Mawaa Lapatu. Raja Dompu ketujuh ini pindah ke Bima dan memerintah dari sana. Konon, pada masa pemerintahnnya berlangsung ekspedisi Majapahit yang dipimpin oleh panglima Nala pada 1344 dengan tujuan memasukkan Dompu ke dalam naungan Majahapit, namun gagal. Raja Mawaa Lapatu digantikan oleh Dewa Mawaa Tahoo yang terkenal sebagai penguasa dengan kedisiplinan tinggi. Sesudah zamannya, Dompu berubah menjadi kesultanan seiring dengan tersiarnya agama Islam ke kawasan tersebut.

b. Perkembangan Kerajaan Dompu

Pada kurang lebih abad 15–16, agama Islam mulai tersebar di Dompu. Mawaa Tunggu yang bergelar Sultan Syamsuddin (1545–)[74] merupakan penguasa pertama yang menyandang gelar sultan. Sama seperti di Bima, pengaruh Makassar juga boleh dikatakan kuat di kawasan ini. Namun, seiring dengan tunduknya Gowa (Makassar) kepada Belanda, kekuasaan di Dompu juga beralih kepada VOC. Semenjak saat itu, raja-raja Dompu harus menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Kepemimpinan Sultan Syamsuddin diteruskan oleh Sultan Jamaluddin, yang pada gilirannya digantikan Sultan Sirajuddin (1640–1682). Ia merupakan sultan pertama yang menandatangani kontrak dengan Belanda pada 1669 di Benteng Rotterdam,

74. Menurut buku *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, halaman 52, Sirajuddin baru menerima agama Islam pada 10 Rabiulawal 1030 H atau kurang lebih tahun 1619. Sebelum menganut agama Islam, namanya adalah Manuru Bata. Ibunya adalah putri Raja Ma Wa'a Ndapa dari Bima.

Makassar. Para sultan Dompu berikutnya juga diwajibkan menandatangani kontrak serupa, seperti Sultan Abdullah yang menandatanganinya pada 1886[75].

Sepeninggal Sultan Sirajuddin, yang menjadi raja di Dompu secara berturut-turut adalah Sultan Ahmad (Manuru Kilo, memerintah pada 1682–1686), Abdulrasyul I (Manuru Laju, memerintah pada 1686–1701), Usman (Mawaa Parabo, memerintah pada 1701–1702), dan Abdulkahar (Manuru Midi atau Manombong, memerintah pada 1702–1717). Semasa pemerintahan Sultan Abdulkahar kondisi Pulau Sumbawa kerap dilanda pergolakan, seperti pemberontakan Daeng Talolo yang baru dapat diakhiri pada 1727. Sultan Abdulkahar mangkat pada 1717[76] dan digantikan putranya, Syamsuddin (Mawaa Sampela, memerintah pada 1717–1727). Daeng Talolo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada 1728. Kekacauan mulai merebak di Dompu ketika Sultan Kamaluddin (1727–1737) yang menggantikan Syamsuddin melarikan diri ke Sumbawa karena lebih memilih cinta ketimbang tahta. Sebagai penggantinya secara berturut-turut diangkat Ahmad Syah (1737)[77]. Masa kekuasaan Ahmad Syah belum membawa angin perubahan bagi Dompu karena kerajaan masih kerap dilanda permasalahan internal.

Sultan Dompu berikutnya adalah Abdul Kadir (1737–1746) yang memerintah dengan penuh kebijaksanaan sehingga digelari Mawaa Alus. Dia digantikan oleh putranya, Abdul Rahman (1746–1748), yang pada saat itu berlangsung sengketa perbatasan dengan Tambora yang berujung pada pecahnya pertempuran antara dua kerajaan. Kendati Tambora akhirnya menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Dompu, Raja Abdul Rahman gugur dalam pertempuran di Kempo. Itulah sebabnya, ia digelari Manuru Kempo. Tahta Dompu lalu beralih kepada Abdul Wahab (Mawaa Cau, memerintah 1749–1792).

Sultan Abdul Wahab mangkat pada 1792. Para pembesar kerajaan memilih Daeng Maleongi yang sebelumnya sudah pernah tergeser. Namun, VOC lebih condong kepada tokoh lain bernama Daeng Han yang naik tahta dengan gelar Sultan Abdullah I (1793–1798). Dia wafat pada 4 Mei 1798 dan sebagai penggantinya diangkat Yakub (Daeng Pabeta). Raja ini hanya sempat memerintah setahun saja dan disingkirkan oleh Daeng Huu, yang mengangkat dirinya sebagai raja dengan

75. *Lihat Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 23.
76. Menurut buku *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 61, ia disebutkan meninggal pada 1727.
77. Buku *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 62, menyebutkan bahwa namanya adalah Abdul Kahar dan memerintah antara 1732–1746.

gelar Muhammad Zainal Abidin atau Muhammad Tajul Arifin I (1799–1801). Pada zamannya pecah peperangan dengan Tambora. VOC turun tangan menyelesaikannya dan mengingatkan Dompu agar mematuhi perjanjian tahun 1748 hingga akhirnya Dompu terpaksa mengembalikan sepertiga wilayah yang dipersengketakannya kepada Tambora.

Pengganti Sultan Muhammad Tajul Arifin I adalah adiknya yang bergelar Sultan Abdulrasyul II (1801–1857). Bencana besar yang terjadi semasa dengan pemerintahannya adalah meletusnya Gunung Tambora (1815). Sultan Abdulrasyul II memindahkan istananya dari Bata ke Bata Baru. Itulah sebabnya, ia juga digelari Bata Bou. Dia kemudian digantikan oleh putranya, Sultan Muhammad Salahuddin (1857–1870). Begitu menduduki jabatannya sebagai Sultan Dompu, dia memperbaiki sistem beserta hukum pemerintahan. Setelah melalui musyawarah dengan para ulama, ia menetapkan bahwa hukum adat dan hukum Islam berlaku di kerajaannya. Sultan Muhammad Tajul Arifin digantikan oleh Sultan Abdullah II (1871–1882). Berbeda dengan ayahnya, Sultan Dompu ini lebih banyak mementingkan dirinya sendiri. Pada masa pemerintahannya, Sultan Abdullah II menandatangani *Lange Verklaring* (kontrak panjang) dengan Belanda. Setelah era Sultan Abdullah II berakhir, singgasana Dompu beralih kepada Sultan Muhammad Sirajuddin (1882–1934)

Pada 1905 ditandatangani kontrak politik (*Lange Verklaring*) dengan Kesultanan Bima, Sumbawa, dan Dompu. Belanda mulai ikut campur dalam administrasi kerajaan dan membentuk *gekomiterden kas* antara Bima dan Dompu. Ini berarti bahwa pajak yang berasal dari Dompu harus disetor ke Bima. Kebijaksanaan ini ditolak oleh Sultan Dompu saat itu yang bernama Muhammad Sirajuddin. Ia telah menyampaikan keberatan ini kepada residen Kupang namun tidak digubris. Sultan mempunyai dua orang putra yang masing-masing bernama Abdul Wahab Sirajuddin dan Abdullah Sirajuddin.

Menurut tradisi dan hukum adat, seharusnya putra tertua yang kelak diangkat sebagai pengganti ayahnya. Dengan demikian, Abdul Wahab Sirajuddin selaku putra tertua diangkat sebagai raja muda (putra mahkota atau *ruma to'i*). Namun, hal ini ditentang oleh adiknya, Abdullah Sirajuddin, beserta pendukungnya. Akhirnya, terbentuklah dua fraksi yang saling bermusuhan sehingga menimbulkan kekacauan di Dompu. Kejadian itu terdengar oleh residen Belanda yang berkedudukan di Kupang. Namun, Belanda menduga bahwa kekacauan itu memang didalangi sultan karena

masalah perpajakan di atas. Residen lalu memanggil sultan menghadap kepadanya dan berpesan agar segera menertibkan keadaan di Dompu, yang menurutnya disebabkan oleh penentangan sultan terhadap *gekomiterdan kas*.

Sekembalinya ke Dompu, sultan yang telah berusia 90 tahun bingung hendak memilih pihak yang mana. Sementara itu, kericuhan makin menjadi-jadi. Karena itu, Belanda menghukum sultan dengan mengasingkannya ke Kupang beserta dengan dua orang putranya yang berselisih itu. Sultan wafat pada 1937 di Kupang. Selama pengasingan sultan itu, pemerintahan Bima dipegang oleh suatu *zelfbestuur komisi* (komisi swapraja), yang anggotanya terdiri dari: Muhammad Saleh A. Majid, Jeneli (camat) Dompu, dan H. Ahmad, Jeneli Kempo. Mereka inilah yang menjalankan roda pemerintahan di Dompu hingga masuknya bala tentara Jepang.

Ketika Jepang tiba di Sumbawa dan mendarat di Bima, pihak kesultanan di sana meminta kepada Jepang agar mengizinkan penggabungan Dompu, yang saat itu tidak mempunyai sultan, dengan Bima. Jepang menyetujuinya dan seorang utusan dikirim ke Dompu untuk memaklumkan penyatuan antara kedua kesultanan tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah Dompu ternyata tergabung dalam Negara Indonesia Timur (NIT) bentukan Belanda. Keturunan kesultanan Dompu yang bernama Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin[78] menuntut pemulihan Kesultanan Dompu melalui ketua parlemen NIT yang dijabat oleh Sultan Sumbawa, Muhammad Kaharuddin III.

Oleh karenanya, diadakan beberapa kali persidangan guna membahas persiapan penghidupan kembali Kesultanan Dompu. Salah satu pertemuan diadakan pada 17 November 1946, yang merupakan kelanjutan pembicaraan tanggal 10 November 1946 antara Sultan Sumbawa dengan asisten residen[79]. Sidang dipimpin oleh Kontrolir WFH. Plas dan dihadiri oleh 200 orang yang terdiri dari anggota adat beserta bangsawan Dompu. Sementara itu, kurang lebih 300 orang rakyat Dompu turut menyaksikan dari luar Rumah Sekolah Rakyat Dompu, tempat dilangsungkannya pertemuan. Pada kesempatan itu, dibahas mengenai untung dan ruginya memisahkan diri dari Bima. Hal terpenting yang patut dipertimbangkan adalah sedikitnya jumlah

78. Putra Sultan Muhammad Tajul Arifin pernah bersekolah di OSVIA Makassar, tetapi karena tak dapat mengikuti pelajaran di sana lantas pindah ke Bima. Lihat *Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial 1915–1950*, halaman 262.
79. Lihat *Riwayat Kesultanan Dompu Setelah Tahun 1934*, halaman 1.

penduduk dan rendahnya pemasukan Dompu. Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin menyampaikan aspirasi dan usulannya[80]:

- Penggabungan Dompu dan Bima semasa penjajahan Jepang agar dibatalkan.
- Dompu agar diakui sah sebagai salah satu daerah swapraja (*landschap*) yang bersifat kerajaan sebagaimana sebelum Perang Dunia II. Kerja sama dengan Bima demi kemajuan bersama disepakati.

Setelah melalui rapat berkali-kali akhirnya disetujui pemisahan kembali antara Bima dan Dompu. Pada 17 September 1947, Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin dikukuhkan sebagai *Warnemend Zelfbestuurder* (Pejabat Kepala Swapraja) Dompu. Bersamaan dengan itu, dikembalikanlah harta pusaka Dompu yang disimpan oleh Kesultanan Bima. Kendati demikian, perjalanan menata kembali aparat pemerintahan di Dompu masih panjang.

Sebagai seorang pemimpin yang memerhatikan dan berniat memajukan rakyatnya, Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin kerap mengamanatkan hal-hal penting kepada rakyatnya. Pada salah satu pidatonya, dipesankan agar rakyat memerhatikan kebersihan; makanan hendaknya dijaga agar jangan sampai dihinggapi lalat; air minum hendaknya dimasak terlebih dahulu agar bibit-bibit dan kuman penyakit mati. Selain itu, dia menasihati rakyatnya agar menyekolahkan anak-anak mereka sehingga kelak sanggup berpartisipasi mengharumkan negerinya.

Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin diangkat sebagai kepala swapraja atau Sultan Dompu pada 1950. Sebagaimana halnya sultan atau kepala swapraja di Kepulauan Nusantara lainnya, saat naik tahta ia harus menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Residen Kupang hadir di Dompu dengan disaksikan oleh kepala adat dan tokoh masyarakat setempat sebanyak kurang lebih 400 orang guna mengukuhkan kontrak tersebut. Tetapi saat penandatanganan kontrak hendak dilangsungkan, Sultan Dompu yang baru itu mengatakan bahwa negara Republik Indonesia telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 sehingga ia tidak dapat mengadakan perjanjian dengan negara asing manapun (dalam hal ini Belanda). Mendengar hal itu, residen tampak kesal dan ia mengemasi tasnya serta meningalkan tempat itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Peristiwa ini jelas sekali menunjukkan dukungan sultan kepada republik. Dengan demikian, sultan tidak pernah dilantik secara resmi

80. Lihat *Riwayat Kesultanan Dompu Setelah Tahun 1934*, halaman 7-8.

oleh residen Kupang sebagaimana halnya sultan-sultan sebelumnya. Kendati demikian, rakyat tetap menganggapnya sebagai raja mereka yang sah.

c. Sistem Pemerintahan

Kekuasaan pemerintahan tertinggi di Dompu berada di tangan seorang sultan. Wilayah Kesultanan Dompu dibagi menjadi empat wilayah yang dipimpin seorang *jeneli*, yakni Dompu, Kampo, Huku, dan Kilo. Masing-masing *jeneli* membawahi beberapa *galarang*. Dalam menjalankan pemerintahannya, sultan dibantu oleh Majelis Adat dan Majelis Agama. Majelis Adat sendiri-yang beranggotakan 4 orang, yakni *raja bicara, rato rasanae, rato parenta,* dan *rato renda*-berhak mengangkat dan memberhentikan sultan.

III. PEKAT (PAPEKAT)

Pekat merupakan kerajaan kecil tetangga Tambora yang sekarang terletak di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Pekat diakui sebagai kerajaan berdaulat dengan rajanya bernama *Intshied*[81] (Ince, ± 1675–1701) setelah Tambora terlibat perselisihan dengan Belanda akibat perampasan sebuah kapal VOC pada 1675. Ia digantikan oleh Abdul Cili Mandarsyah (Mandar Syah Janili, ± 1701–1707), Daeng Mangalla (1707–1719), Si Tangoli (1719–?), Abdul Said (?–1735), dan Abdul Burhan (Abdul Brahim, 1735–1739). Dia digantikan oleh istrinya, Daeng Sado (saudari Raja Tambora, 1739–?). Putra Abdul Burhan, dan Daeng Sado bernama Abdul Gafur (Abdul Rasul,–1755) yang tampil sebagai raja menggantikan orang tuanya. Raja Pekat berikutnya bernama Si Impa Abdurrahman (1755–1768), tercatat pernah menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Pada 1794, Raja Abdulhalim (1768–1794) digeser dan digantikan oleh Abdul Muhammad (1794–1815). Pekat ikut binasa saat letusan Gunung Tambora pada 1815. Raja Abdul Muhammad turut menjadi korban musibah tersebut. Peristiwa ini mengakhiri Kerajaan Pekat dan selanjutnya wilayah kerajaan ini digabungkan dengan Dompu.

IV. SANGGAR

Kerajaan Sanggar terletak di Kabupaten Bima. Pada 1704 Raja Sanggar bernama Hasanuddin (1701–1704) dibunuh oleh Daeng Panai (Daeng Ngaseng atau Daeng Samaling, 1704–1708) yang menobatkan dirinya menjadi raja dengan persetujuan

---

81. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 61.

VOC. Menurut manuskrip Hans Hägerdal, ia digantikan oleh putra Hasanuddin yang tak disebutkan namanya (1708–?)[82]. Raja-raja Sanggar berikutnya adalah Abdul Saleh (1724–1740), Abdul Muhammad Daeng Manaba (1740–± 1747), dan Muhammad Johan Syah (±1765–1781), tercatat pernah menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Menurut *Syair Kerajaan Bima*, negeri ini ikut menjadi korban para bajak laut yang terdiri dari orang-orang Tobelo; sebagaimana yang tercantum dalam bait 218–220:

seketika membuat dapur dan sangkar
musuh perompat datang melanggar
lalu berperang dengan Raja Sanggar
seraya diamuk seraya dibakar

raja pun alah tiada tertahan
musuh banyak tiada terlawan
mengambil dirinya perlahan-lahan
dengan anak istrinya masuk ke hutan

musuh pun masuk ke dalam kota
mengambil senjata dengan segala harta
setengahnya orang nasib yang leta
perempuan laki-laki tertawan semata[83]

Kata “*perompat*” di atas mengacu pada “perompak”, sedangkan “*leta*” mungkin berarti “malang.” Berdasarkan penuturan syair di atas kita mengetahui bahwa sultan Sanggar berhasil dikalahkan oleh perompak hingga harus melarikan diri ke hutan. Sementara itu, warga kota yang tertinggal dijadikan tawanan.

Sanggar merupakan kerajaan terkecil di Pulau Sumbawa. Jumlah penduduknya juga tidak banyak, yakni yang terluput dari letusan Gunung Tambora. Sebelum Tambora meletus, pada 1808 populasi Sanggar mencapai 2.000 jiwa. Penduduk

82. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 203.
83. *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah,* halaman 295.

Tambora banyak yang tewas saat terjadinya bencana mengerikan tersebut. Di antara mereka yang masih hidup berjumlah 200 orang, tetapi harus melarikan diri ke Bangu (Dompu) dan Gembe (Bima) karena serangan perompak. Pemerintah Hindia Belanda membantu kepulangan mereka pada 1830. Berdasarkan cacah jiwa tahun 1837, penduduk Tambora berjumlah 303 jiwa. Jumlah ini meningkat lagi pada 1847 menjadi 350 jiwa. Dikarenakan kecilnya wilayah dan jumlah penduduk yang sedikit, tatanan pemerintahan kerajaan ini boleh dikatakan sangat sederhana, meski menjadikan Bima sebagai acuannya. Pelaksana pemerintahan tertinggi berada di tangan seorang sultan dengan didampingi oleh oleh *jeneli* yang membawahi beberapa *galarang*.

Raja-raja Sanggar berikutnya secara berturut-turut adalah Datu Daeng Madenjung (1781–1783), Adam Safiullah (1783–1790), Muhammad Sulaiman (1790–1805), Ismail Ali Lot Dayang (Ismail Halilud Dayan atau Ismail Lujang, ± 1805), La Lira Daeng Jai (± 1827–1836), Daeng Malaba (1836–1845), Manga Daeng Manasse (1845–1869), La Kamea Daeng Nganjo Syamsuddin (1869–1900), dan Abdullah Daeng Manggalai (1900–1926), dan Abdullah Samsuddin (1926–1933). Pada kurang lebih awal abad 20, terjadi kekosongan sultan di Sanggar. Akibatnya, pemerintah Hindia Belanda menggabungkan wilayahnya dengan Bima. Raja Sanggar tidak digaji, tetapi tanah mereka digarap oleh rakyat. Terkadang mereka memberikan persembahan kepada raja. Kerajaan Sanggar boleh dikatakan miskin. Rajanya hanya mempunyai pusaka berupa sebilah keris bergagang emas, kotak sirih, dan kendi perak. Kendari rakyatnya miskin, tetapi mereka sangat senang menerima tamu[84].

V. SUMBAWA

a. Cikal bakal Kerajaan Sumbawa

Kerajaan Sumbawa kini terletak di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumbawa yang juga disebut "Tana Samawa" ini mempunyai sejarah yang panjang. Konon pada abad 13 berbagai kelompok masyarakat di sana telah bersatu membentuk beberapa kerajaan kecil yang bercorak Hindu. Kerajaan-kerajaan kecil itu antara lain:

1. Dewa Mas Kuning di Selesek, Ropang
2. Datu Naga di Petonang, Ropang
3. Ai Renung di Moyo Hulu, Batu Tering

84. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 123.

4. Dewa Awan Kuning di Sampar Semulan
5. Perumpak di dekat Pernek
6. Gunung Setia
7. Gunung Galesa di Moyo Hilir
8. Tangko di Empang
9. Kolong di Plampang
10. Seran di Seteluk
11. Taliwang di Taliwang
12. Alas di Alas
13. Jereweh di Jereweh[85]

Masing-masing kerajaan ini memiliki silsilah dan sejarahnya sendiri-sendiri[86]. Raja Dewa Maja Paruwa dari Dewa Awan Kuning ditaklukkan oleh Gowa di bawah pimpinan Karaeng Marowangiang pada 1618. Ia kemudian menandatangani perjanjian dengan Gowa yang isinya:

> adat dan *rapang* Tana Samawa (Sumbawa - penulis) tidak akan dirusak asalkan tidak lupa mengucapkan dua kalimat syahadat dan tetap dalam keadaan Islam[87].

Peristiwa ini menandai masuknya pengaruh Islam ke Sumbawa[88]. Semasa pemerintahan Sultan Alauddin dari Gowa, berbagai kerajaan di Sumbawa disatukan menjadi satu kerajaan. Dewa Maja Paruwa mangkat dan digantikan oleh Mas Goa (1633–1637). Namun, raja baru ini masih menjalankan tradisi keagamaan Sumbawa lama yang bernafaskan Hindu. Dia dianggap melanggar perjanjian dengan Gowa sehingga ia disingkirkan dan diturunkan dari tahtanya oleh Nene Ranga Nuangsi, Nene Kanu Kanamertah, dan Nene Jurupalasan.

Mas Cini (1637–1674) menggantikan Mas Goa yang dicopot dari kedudukannya. Ia menikah dengan Karaeng Panaikang dari Tallo pada 24 Desember 1650. Karena

---

85. Lihat *Fakta-Fakta Tentang Samawa*, halaman 30.
86. Konon menurut penuturan cerita rakyat, raja-raja di Sumbawa, Seran, dan Selaparang adalah tiga bersaudara, yang merupakan keturunan Sunan. Barangkali yang dimaksud sunan di sini adalah Sunan Giri. Raja yang di Sumbawa bernama Dewa Lengan Masmaling, yang di Seran bernama Dewa Lengan Maspakil, dan saudara mereka yang wanita bernama Dewa Lengan Masparang menjadi raja di Selaparang. Kisah meriwayatkan mengenai adanya kampung bernama Majapahit di daerah Empang. Konon pada zaman dahulu telah datang seorang bangsawan dari Majapahit dengan mengendarai pedati terbang - lihat *Sumbawa pada Masa Lalu*, halaman 26.
87. *Fakta-Fakta Tentang Samawa*, halaman 30.
88. Raja-raja lain yang memerintah pada masa ini adalah Dewa Lengit Ling Baremang di Kerajaan Utan, Dewa Lengit Ling Kartasari dari Kerajaan Taliwang, dan Dewa Lengit Ling Utan.

tidak dapat lagi mengandalkan bantuan Gowa yang telah dikalahkan oleh VOC dan dipaksa menandatangani Perjanjian Bungaya, Raja Selaparang (Lombok) yang bernama Dewa Mas Pakel menempatkan kerajaannya di bawah perlindungan Sumbawa. Semenjak saat itu, Selaparang dianggap sebagai daerah pengaruh Kesultanan Sumbawa. Semasa pemerintahan Mas Cini, Kerajaan Karangasem di Bali menyerbu Selaparang pada 1668, tetapi dapat diatasi dengan bantuan Sumbawa. Mas Cini digantikan oleh adiknya yang bernama Mas Bantan (1674–1702). Ia bergelar Sultan Harunurrasyid I dan tampaknya merupakan penguasa Sumbawa pertama yang bergelar sultan. Kendati demikian, di kalangan rakyat ia lebih dikenal nama Dewa Dalam Bawa. Ia menikah dengan Karaeng Tanisanga dari Gowa pada 29 Juni 1684.

b. Perkembangan Kerajaan Sumbawa

Sultan Harunurrasyid I sangat memerhatikan bidang pertanian sehingga kerajaan mencapai puncak kemakmurannya[89]. Selain itu, ia pernah membangun benteng pertahanan sepanjang 1288 depa yang membentang dari Tungkup Brang, Biji Lempeh, hingga Pasar Surya, kampung Pekat. Agar benteng tersebut tetap terjaga dengan baik, kampung-kampung yang berada dalam lingkungan benteng wajib turut serta memeliharanya. Menghadapi ancaman Belanda yang hendak mencaplok kerajaannya, sultan memperkuat pasukannya. Konon sultan memiliki pasukan yang kebal peluru dan senjata tajam. Peristiwa penting lain adalah dikalahkannya sebuah benteng Belanda yang bernama *Sukkelenburg*. Waktu itu, sultan yang tidak bersedia tunduk pada Kompeni Belanda dituduh kerap membajak kapal-kapal di perairan Sumbawa. Oleh karena itu, Belanda merencanakan agresi militer ke sana.

Ternyata, Belanda menghadapi perlawanan yang gigih dan persenjataan Sumbawa saat itu tidak kalah dengan Belanda. Sumbawa berhasil memperoleh persenjataan yang dibeli dari Inggris dengan ditukar sarang burung walet. Para pedagang sarang burung walet setelah menukarkan dagangannya dengan senjata lalu diam-diam menyelundupkannya ke Sumbawa. Dengan demikian, serangan Belanda dapat dipatahkan oleh pasukan Sumbawa untuk sementara waktu. Pada 1674, Sumbawa menandatangani perjanjian dengan VOC yang berisikan penyerahan Selaparang ke tangan Belanda[90]. Dengan demikian, Selaparang dianggap terlepas dari Sumbawa. Setahun kemudian, atau tepatnya 16 Maret 1675, pecah pemberontakan terhadap

89. Lihat *Sumbawa Pada Masa Lalu*, halaman 94.
90. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 44.

VOC di Selaparang. Pergolakan ini berhasil dipadamkan oleh pasukan VOC yang dipimpin oleh Kapten Holstejner. Selaparang diharuskan membayar ganti rugi selama tiga tahun. Namun, apabila Selaparang tak sanggup membayarnya, ganti rugi tersebut harus dipikul oleh Raja Sumbawa. Jika raja mangkat maka penggantinya tetap mewarisi hutang tersebut hingga lunas. Ini merupakan sesuatu yang aneh, mengingat pada 1674, Sumbawa telah melepaskan Selaparang sehingga seharusnya tak disangkutpautkan dengan peristiwa apapun yang terjadi di kawasan tersebut. Sultan Sumbawa berjanji dengan sungguh-sungguh memenuhi ketetapan ini dan mengadakan perjanjian dengan VOC yang diwakili oleh Jan France Holsteinj, Gerrit, Coster, dan Coenraat van Breijtenbach[91].

Pada 1702, Sultan Harunurrasyid I menyerahkan singgasana kepada putranya, Ammas (Mas) Madina (Amasa Samawa), yang selanjutnya memerintah dengan gelar Jalaluddin Muhammad Syah I (1702–1723). Dia juga dikenal sebagai Datu Bala Balong karena tinggal di istana yang indah dan megah. Selain itu, Sultan Sumbawa kedua ini disebut pula dengan Datu Apit Ai karena dimakamkan di Apit Ai, Lombok Timur. Amas Samawa menikah dengan Karaeng Agang Jene dari Sidenreng pada 30 November 1702. Konon ratu dari Kerajaan Sidenreng tersebut terkenal kecantikannya sehingga menarik keinginan raja-raja lain untuk melamarnya. Agar tidak terjadi pertikaian antara para raja tersebut, diadakanlah suatu lomba ketangkasan memainkan bola emas yang berat sekali. Ternyata Amasa Samawa atau Sultan Jalaluddin Muhammad Syah I yang saat itu masih berusia muda dapat memenangkan pertandingan itu berkat bantuan tiga orang pengikutnya. Dia kemudian menikah dengan ratu Sidenreng dan tinggal di Sulawesi selama dua tahun.

Saat sultan sedang berada di Sulawesi, keadaan Sumbawa menjadi kacau karena seolah-olah tidak ada lagi pemimpin di sana. Beberapa kaum bangsawan tidak bersedia mengakui sultan lagi sehingga memancing kegelisahan di kalangan rakyat. Sementara itu, rakyat Selaparang di Pulau Lombok mengalami permasalahan dengan Arya Banjar Getas dari Bali dan memohon bantuan Sumbawa. Karena keadaan yang kacau ini, para menteri sepakat mengirim berita kepada sultan agar segera kembali ke negerinya.

Sebulan setelah menerima berita dari para menterinya, sultan pulang ke Sumbawa. Kedatangannya segera dielu-elukan oleh rakyat. Sultan kembali melakukan

91. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 44.

penataan pemerintahan di negerinya dan suasana berangsur pulih seperti sedia kala. Pelabuhan-pelabuhan di Sumbawa menjadi ramai kembali. Konon suatu kali datanglah seorang syekh yang mengingatkan sultan agar membantu Selaparang yang terancam oleh Banjar Getas[92]. Genderang perang segera ditabuh dan sultan memimpin sendiri pasukannya ke Lombok pada 1723.

Armada Sumbawa yang juga diikuti oleh laskar-laskar Bugis itu menyusuri pantai Mamban dan dilanjutkan ke Wanasaba serta Pohgading. Begitu tiba di Presak, sultan memerintahkan mereka mendarat. Kubu pertahanan yang kuat dibangun dan sultan beserta para pengikutnya menyusun siasat. Kendati demikian, serbuan ini telah tercium oleh Arya Banjar Getas yang mengambil sikap menunggu. Pertempuran dashyat antara kedua belah pihak tak terelakkan lagi. Ternyata, selama dua tahun pihak Sumbawa belum berhasil juga mengalahkan Arya Banjar Getas, walaupun mereka dibantu oleh laskar-laskar setempat. Sultan Jalaluddin Muhammad Syah I akhirnya gugur dalam pertempuran ini karena lontaran tombak musuh[93]. Peristiwa ini terjadi pada 12 Februari 1725. Bersamaan dengan itu gugur pula Dewa Maja Jareweh, saudaranya. Jenazah sultan kemudian dimakamkan di Apit Ai, Lombok Timur.

Ketika Sultan Jalaluddin Muhammad Syah I berangkat berperang di Selaparang, urusan pemerintahan diserahkan kepada saudaranya bernama Datu Bala Sawo, selaku wakil raja. Sebelum mangkat, sultan pernah berpesan agar kemenakannya bernama Datu Dollah diangkat sebagai penggantinya. Kabar gugurnya sultan di medan laga segera disampaikan kepada Datu Bala Sawo dan sesuai dengan amanat sultan, Datu Dollah yang saat itu berada di Bima diundang ke Sumbawa untuk menjadi raja. Datu Dollah sangat terkejut mendengar kemangkatan pamannya dan berniat membalas dendam. Karena itu, ia menyatakan agar selekas mungkin berangkat ke Sumbawa dan setelah itu bertolak ke medan perang di Lombok.

Datu Dollah menyampaikan niat membalas dendam atas gugurnya sultan pada pamannya, Datu Bala Sawo. Tetapi karena belum berpengalaman dalam ilmu perang, ia minta dicarikan guru yang sanggup mengajarinya kemampuan tersebut. Datu Bala Sawo mengundang Rura Bonyo yang tersohor mahir dalam ilmu peperangan. Ternyata, Datu Dollah sudah tidak sabar lagi dan minta diajarkan ilmu-ilmu yang pokok saja. Karenanya,

92. Buku *Sumbawa pada Masa Lalu* menyebutkan bahwa tujuan pengiriman adalah merebut Selaparang dari tangan Karangasem, tetapi yang benar adalah membebaskannya dari ancaman Arya Banjar Getas. Waktu itu Karangasem belum banyak terlibat dalam percaturan politik di Lombok.

93. Lihat *Sumbawa pada Masa Lalu*, halaman 114, namun buku *Keris di Lombok*, halaman 24, menyebutkan bahwa sultan gugur karena dikhianati oleh saudaranya.

ia hanya diturunkan ilmu kebal dan cara-cara berkelahi dengan keris untuk menghadapi musuh. Kondisi laskar Sumbawa yang berada di Lombok terus terdesak sepeninggal sultan. Saat semangat mereka mulai mengendur, tibalah bala bantuan yang dipimpin Datu Dollah sehingga pasukan Selaparang yang menyaksikannya lari ketakutan.

Begitu mendengar berita bahwa Datu Dollah telah berangkat ke Lombok, Datu Taliwang dan Datu Jereweh berniat menyusulnya ke sana. Berkat pasukan bala bantuan yang besar ini, laskar Banjar Getas dapat didesak karena pertempuran yang berkepanjangan melemahkan semangat mereka. Selain itu, desa-desa yang hancur akibat peperangan menimbulkan masalah logistik bagi mereka. Akhirnya, pasukan Banjar Getas menyerah pada Sumbawa, namun Datu Dollah belum mau mengakhiri perang itu. Secara membabi buta ia terus menghancurkan desa-desa dan kawasan yang belum berada di bawah kekuasaan Sumbawa.

Sikap Datu Dollah ini menimbulkan ketidaksetujuan Datu Taliwang beserta pengikutnya yang bernama Dea Ran Kali Kuasa. Pasukan Sumbawa saat itu sudah lelah dan rindu kampung halamannya. Dea Ran Kali Kuasa mengusulkan agar Datu Dollah disingkirkan saja. Saran ini kemudian disetujui oleh Datu Taliwang. Ketika Datu Dollah sedang tidur nyenyak ia disergap dan diikat tangan dan kakinya. Sebelum dibunuh, Datu Dollah sempat mengutuk Datu Taliwang bahwa ia akan menemui ajalnya dalam lautan api. Tubuh Datu Dollah kemudian diikat pada sebongkah batu yang berat dan ditenggelamkan ke laut. Dengan cara demikian, berakhirlah hidup Datu Dollah. Mereka segera kembali ke Sumbawa dan Datu Taliwang diangkat sebagai Raja Sumbawa menggantikan Datu Bala Sawo, yang mangkat pada 1725. Datu Taliwang teringat terus pada kutukan Datu Dollah.

Alkisah, seorang bernama Kabat sedang duduk menyulam, karena diserang kantuk, tanpa sengaja ia tertidur dan menjatuhkan sebuah pelita hingga menimbulkan kebakaran. Si jago merah menjilat dengan dashyatnya dan menghanguskan istana beserta rumah-rumah yang berada di sekitarnya. Sesuai dengan kutukan Datu Dollah, Datu Taliwang menemui ajalnya dalam kebakaran tersebut (1732). Ia kemudian dimakamkan di Gunung Setia dan karenanya juga dikenal sebagai Dewa Ling Gunung Setia (Datu Gunung Setia). Kabat yang menjadi penyebab kebakaran dijatuhi hukuman mati walau musibah itu di luar kesengajaannya.

Pernikahan Sultan Jalaluddin Muhammad Syah I dengan Ratu Karaeng Agang Jene dikaruniai seorang putri bernama I Sugiratu Karaeng Bontoparang.

Ia menikah dengan Karaeng Bonto Langkasa (Karaeng Bontomasugi). Setelah suaminya meninggal, Karaeng Bontoparang menikah lagi dengan saudara sepupunya bernama Dewa Sesung, putra Dewa Maja Jareweh atau saudara Sultan Jalaluddin Muhammad Syah I. Dewa Sesung yang juga dikenal sebagai Datu Poro ini lantas diangkat sebagai Sultan Sumbawa berikutnya dengan gelar Muhammad Kaharuddin I (1733–1758). Semasa pemerintahannya, Taliwang hendak memisahkan diri dari Kesultanan Sumbawa. Mereka menolak membayar upeti lagi kepada Sumbawa. Sultan Sumbawa mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Ranga Mele Senap yang berhasil menaklukkan Taliwang. Seorang keturunan Banjar bernama Gusti Amin kemudian diangkat sebagai penguasa kawasan tersebut.

Ketika Sultan Muhammad Kaharuddin I mangkat, ia digantikan oleh permaisurinya, I Sugiratu Karaeng Bontoparang, yang naik tahta sebagai sultan wanita dengan gelar Sitti Aisyah (1759–1760). Gusti Amin, keturunan Banjar yang sebelumnya telah diangkat sebagai penguasa Taliwang, berdagang kayu sepang secara langsung dengan VOC. Hal ini merupakan pelanggaran karena yang diperkenankan menjalin perdagangan kayu semacam ini hanyalah sultan dan kerabatnya saja. Akibat pelanggaran yang dilakukannya, Gusti Amin diharuskan membayar denda dan persoalan ini dianggap selesai.

Sultanah (penguasa wanita Muslim) Sitti Aisyah diturunkan dari singgasananya karena terlibat perselisihan dengan para menteri. Alasan lain adalah merajalelanya para bajak laut dan ia dianggap kurang tegas memberantasnya. Sebagai penggantinya, para menteri berniat mendudukkan Lalu Mustanderman Datu Bajing ke atas tahta Kesultanan Sumbawa. Kendati demikian karena merasa sudah terlampau tua, Datu Bajing menyarankan agar adiknya yang bernama Datu Ungkap Sermin (1761–1762) dinobatkan sebagai sultan baru Sumbawa. Demikianlah, Datu Ungkap Sermin yang masih kemenakan *Sultanah* Sitti Aisyah diangkat sebagai penguasa Sumbawa berikutnya. Ia kemudian memperistri seorang wanita bernama Lala Kaca Uni, yang terkenal cantik jelita. Wanita ini sebelumnya adalah istri Lalu Anggawasita, seorang tokoh Sumbawa yang terkenal gagah berani dan pandai berperang. Karena jasa-jasanya pada VOC, Lalu Anggawasita diangkat sebagai kapitan Jepara. Sejak lama Lalu Anggawasita telah meninggalkan istri beserta mertuanya akibat suatu perselisihan. Karena lama tak terdengar kabar beritanya, mertua Lalu Anggawasita yang bernama Dea Ranga Lalu BanggaE mengizinkan putrinya menikah dengan Datu Ungkap Sermin.

Menyadari bahwa istrinya telah direbut orang lain, Lalu Anggawasita yang telah banyak mengharumkan nama Sumbawa merasa sangat tersinggung. Begitu tiba kembali di Sumbawa, ia berniat menyerbu istana, tetapi niat ini diurungkannya. Ia hanya meminta agar Sultan Datu Ungkap Sermin meninggalkan istananya guna menghindari pertumpahan darah yang tak diperlukan. Karena menyadari bahwa dirinya bukan tandingan Lalu Anggawasita, Datu Ungkap Sermin bersedia turun tahta pada 1763 dan setelah itu mengungsi ke Bima. Ia lalu bertolak ke Jawa dan tinggal di Imogiri. Selanjutnya, Datu Ungkap Sermin pindah lagi ke Besuki. Setelah tinggal beberapa lama di Jawa, Datu Ungkap Sermin kembali ke Bima dan menetap di sana hingga wafatnya.

Untuk menggantikan Datu Ungkap Sermin, Lalu Anggawasita berniat mengangkat sahabatnya, Gusti Mesir Abdurrahman, seorang keturunan Banjar yang memperistri cucu Sultan Jalaluddin Muhammad Syah I. Niat ini disetujui para petinggi Sumbawa lainnya. Dengan demikian, Gusti Mesir Abdurrahman menaiki singgasana Sumbawa dengan gelar Sultan Muhammad Jalaluddin II (1762–1765). Dia melakukan perombakan dalam bidang hukum, yakni dengan membuang aturan-aturan yang telah ketinggalan zaman. Menurut pendapatnya, adat bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dapat diubah sesuai tuntutan zaman. Bila ada yang tak bersedia menerimanya, para menteri wajib mengajarkan dengan cara lemah lembut dan bijaksana[94]. Namun, jika orang-orang itu masih membangkang barulah mereka dikenai sanksi.

Pada 1764, timbul niat membantu orang-orang Sasak di Lombok merebut wilayah mereka yang diduduki Kerajaan Singasari Karangasem. Oleh karenanya, Datu Taliwang menjalin kesepakatan dengan Datu Gunung bernama Selombong, Raja Selaparang, dan paman Datu Jereweh, mengirimkan pasukannya ke Lombok. Tetapi serangannya ini dapat digagalkan.

Ketika Sultan Muhammad Jalaluddin II mangkat, putra mahkotanya bernama Pangeran Mahmud masih belum dewasa sehingga perlu diangkat seorang *riwatang* (wali). Dewa Mapaconga Mustafa Datu Taliwang (1765–1776) terpilih oleh dewan adat Tana Samawa menduduki jabatan ini. Pengangkatan ini menimbulkan ketidakpuasan Datu Jereweh yang juga berniat menjadi Sultan Sumbawa. Ia meminta bantuan VOC untuk mengakuinya sebagai Raja Sumbawa dan menandatangani kontrak politik pada

94. Lihat *Sumbawa pada Masa Lalu*, halaman 138.

9 Februari 1765. Pihak kerajaan berupaya mengatasi pengkhianatan Datu Jereweh dan mengirimkan utusan guna memprotes tindakan VOC ini. Mereka menyampaikan bahwa VOC telah mencampuri urusan pemilihan Raja Sumbawa, padahal berdasarkan perjanjian yang telah disepakati pergantian raja cukup diberitahukan saja pada perserikatan dagang Belanda tersebut. Seorang tokoh yang terkenal kesaktiannya bernama Dea Tumuseng dikirim untuk mengemban tugas ini, tetapi ia gugur dalam menunaikan tugasnya.

VOC belakangan mengakui kesalahannya dan membatalkan kontrak yang telah disepakati dengan Datu Jereweh. Bahkan pada 18 Mei 1766, mereka menandatangani kontrak baru yang isinya meneguhkan Dewa Mapaconga Mustafa Datu Taliwang sebagai wali sultan. Selain itu, dinyatakan pula bila Pangeran Mahmud sudah dewasa, tahta hendaknya diserahkan padanya dan permusuhan antara Datu Taliwang dengan Datu Jereweh tak akan diperpanjang lagi. Dewa Mapaconga Mustafa jatuh sakit pada 1775 serta kembali ke Taliwang. Tugas sehari-harinya kemudian diemban oleh Lalu Komak Datu Busing.

Mengenai perselisihan antara Datu Jereweh dan Datu Taliwang ini, ada sumber lain menyebutkan bahwa pertikaian dipicu karena Datu Jereweh menghendaki Datu Badeh, putra Datu Jereweh yang diangkat sebagai sultan. Namun, pada pembesar kerajaan yang didukung VOC malah memilih Mapaconga Mustafa Datu Taliwang sebagai pemangku atau wali sultan[95]. Dewa Mapaconga Mapaconga Mustafa mangkat di Taliwang pada 1776. Kala itu, Pangeran Mahmud masih berusia 18 tahun sehingga Datu Seran diangkat sebagai sultan baru dengan gelar Harunurrasyid II (1777–1790). Sementara itu, Pangeran Mahmud sendiri wafat pada 1780 dalam usia 24 tahun sehingga tak sempat menduduki singgasana Kerajaan Sumbawa sama sekali.

Pada zaman Sultan Harunurrasyid II, Kerajaan Mento Lantung diserang dan dihancurkan karena mengangkat rajanya bukan dari keturunan yang sah serta menolak membayar upeti. Selain itu, meletus pemberontakan yang dipimpin Mele Bedola. Pemberontakan ini dipicu oleh diundangnya Daeng Iting, istri Mele Bedola, ke rumah Nene Adipati Mele Habira saat suaminya sedang berniaga ke Banjarmasin. Nene Adipati Mele Habira meminta Daeng Iting menyulam baju pakaian adatnya. Ketika Mele Bedola pulang dari berdagang, istrinya melaporkan hal itu kepadanya. Ia tak kuasa menolak undangan Mele Habira karena kekuasaannya yang besar. Mele

95. Lihat *Fakta-fakta Tentang Samawa*, halaman 42.

Bedola marah karena memandang Mele Habira telah merusak kehormatan rumah tangganya. Selain itu, Mele Habira dikenal sebagai pribadi yang menggemari wanita. Ia kemudian menyampaikan rasa dendamnya kepada Raja Gowa yang merupakan kerabat Daeng Iting. Belanda mendengar pula mengenai pertikaian ini dan turut memanas-manasi pihak yang berseteru. Raja Gowa mengirimkan bantuan persenjataan kepada Mele Bedola. Karenanya, pecahlah peristiwa yang disebut "Pemberontakan Kampung Bugis." Kendati demikian, Mele Habira berhasil mematahkan serangan yang dipimpin Mele Bedola tersebut.

Putri Sultan Harunurrasyid II diperistri oleh Sultan Abdul Hamid (1773–1817) dari Bima pada 1790. Ketika ayahnya wafat dua tahun kemudian, istri Sultan Bima itu diangkat sebagai sultan wanita Sumbawa dengan gelar Safiyatuddin (1791–1795) hingga ia wafat pada 1796 dan digantikan oleh Sultan Muhammad Kaharuddin II (1795–1816). Ketika mengikuti suaminya ke Bima, Safiyatuddin membawa serta benda-benda pusaka dan harta kekayaan Kesultanan Sumbawa, seperti payung kerajaan berpucuk emas, tombak bersarung emas serta bertatahkan berlian, perisai beserta tombaknya yang bersarung emas, keris Ai Awak dan si Kancil yang bersarung emas, pakaian kebesaran sultana, cincin intan, tempat meludah terbuat dari perak, payung bertatahkan perak, dan lain sebagainya. Dengan dalih Sumbawa masih berhutang pada mereka, Bima enggan mengembalikan harta-harta pusaka di atas. Akibatnya, residen Belanda turun tangan sehingga menimbulkan sengketa dengan Bima. Kendati demikian, alat-alat kerajaan itu harus dikembalikan juga. Karena insiden ini, dewan adat Kerajaan Sumbawa sepakat tidak menobatkan seorang wanita lagi menjadi sultan.

Teluk Saleh menjadi sarang bajak laut antara 1763–1790 sehingga meresahkan rakyat Sumbawa. Dea Kuasa Adipati Mele Habira (Dea Kuasa Untir Uwis) yang saat itu dijabat oleh Lalu Jamila memimpin pasukannya membersihkan kawasan tersebut dari cengkeraman kaum perompak. Kesempatan ini dipergunakan oleh Lalu Jamila merebut kawasan Punu (Empang) dari Kerajaan Dompu. Peperangan pecah antara dua kerajaan dan dimenangkan oleh Sumbawa. Berdasarkan perjanjian perdamaian yang ditetapkan pada 1788, Dompu mengakui kekuasaan Sumbawa atas Punu, yang dikukuhkan pula dalam *Lange Verklaring* antara Sumbawa dan Belanda. Sementara itu, daerah-daerah Huu, Adu, Kempo, dan Kowangko yang sebelumnya diduduki oleh Sumbawa dikembalikan kepada Dompu. Setelah masalah bajak laut dapat diatasi, berkobarlah pemberontakan yang didukung oleh orang-orang Bali. Dengan sokongan

VOC dan Dompu, Sumbawa berhasil memadamkan pergolakan ini dan orang-orang Bali mundur ke Lombok pada 1790.

Penguasa Sumbawa berikutnya adalah Sultan Muhammad Kaharuddin II, yang merupakan putra Pangeran Mahmud. Ketika sultan mangkat, penggantinya belum cukup dewasa sehingga diangkatlah *riwabatang* (wali sultan di Sumbawa) sebagai walinya. Pertama-tama yang diangkat menduduki jabatan ini adalah Nene Ranga Mele Manyurang (1816–1825). Setelah dia wafat kedudukannya digantikan oleh Mele Abdullah hingga tahun 1836. Pada zaman pemerintahannya, Gunung Tambora meletus dengan dashyatnya hingga menimbulkan korban jiwa yang besar di kalangan rakyat.

Sultan Sumbawa berikutnya, Amrullah (1836–1882), menaiki singgasana setelah masa perwalian berakhir. Tanah Seran selaku salah satu daerah taklukan Sumbawa membangkang sehingga angkatan perang Sumbawa dikirim ke sana guna memadamkan pemberontakan tersebut. Selama tiga tahun Tanah Seran tidak bersedia membayar upeti ke Sumbawa. Akhirnya, pemimpin pemberontakan yang bernama Naria Dewa Maswidi Seteluk (Jempe) menyerah dan ditawan oleh pihak Sumbawa. Bersama dengan dua orang lainnya, ia dijatuhi hukuman mati. Perdagangan maju pesat semasa pemerintahan Sultan Amrullah. Dia membeli kapal layar tipe sekunar (kapal layar bertiang dua terbuat dari kayu, bertutup digunakan untuk mengangkut orang, barang, atau menangkap ikan) bernama *Mastera* guna menyelenggarakan perniagaan ke luar negeri[96]. Hubungan dagang dengan Singapura terjalin baik. Demi meningkatkan kemajuan di bidang perkebunan, sultan memasukkan bibit kopi *arabica* yang ditanam di Pegunungan Batu Lanteh dan Ropang. Selain itu, sapi-sapi yang lebih baik kualitasnya didatangkan ke Sumbawa. Peristiwa penting lain adalah pengungsian orang-orang Sasak ke Sumbawa pada 1856 demi menghindari penindasan oleh Raja Mataram. Pada 1862, Nene Ranga Mele Unru membangun kembali tembok mengelilingi



Keris Kerajaan Sumbawa
Sumber: http://www.sumbawanews.com/berita/photo/perjalanan-ke-sumbawa-23-keris-pedang-kerajaan-sumbawa.html

96. Lihat *Fakta-fakta Tentang Samawa*, halaman 44.

istana tua. Kendati demikian, tembok ini runtuh semenjak zaman penjajahan Jepang.



Mahkota Kerajaan Sumbawa
Sumber: http://www.sumbawanews.com/berita/photo/perjalanan-ke-sumbawa-23-keris-pedang-kerajaan-sumbawa.html

Sultan Muhammad Jalaluddin III (1883–1931) menggantikan kakeknya, Sultan Amrullah, sebagai Raja Sumbawa yang baru. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan *Acte van Bevestiging* sebagai pengukuhan bagi kedudukannya. Kesultanan Sumbawa menjadi bagian wilayah Gubernemen Celebes dan kepulauannya. Belanda menerapkan berbagai jenis pajak yang memberatkan rakyat sehingga memicu berbagai pemberontakan, seperti *Inkomsten-belasting* (pajak penghasilan) yang menyulut Perang Ngali di bawah pimpinan Gelarang Ngali; dan pajak penyembelihan hewan, yang ditentang oleh Enti Desa Taliwang Dea Mas Unru Sapugara sehingga membangkitkan Perang Sapugara (1907–1908). Demi memadamkan perlawanan Unru Sapugara ini, Belanda terpaksa mendatangkan bala bantuan dari Makassar. Meskipun demikian, panglima bernama Lalu Magaparang tetap bertahan di Jereweh. Pasukan Belanda berhasil merebut kubu pertahanan ini dan Lalu Magaparang gugur dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Kepala Lalu Magaparang dibawa ke Taliwang, sementara tubuhnya diseret 9 kali mengelilingi desa-desa. Unru Sapugara sendiri diasingkan ke Cirebon dan wafat di sana. Putranya bernama Jane diizinkan pulang ke Sumbawa pada 1922. Ia mewarisi sikap anti-Belanda yang kuat dari ayahnya dan menolak memasuki sekolah-sekolah Belanda sehingga tetap buta huruf.

Insiden lain berkenaan dengan seorang pejabat kerajaan bernama Lalu Mepaiyo Dea Ngeru. Ia memiliki seekor kuda kesayangan berbulu belang merah bernama Payung Kobar. Karena terjangkit suatu penyakit, dokter hewan memutuskan akan menembaknya. Dea Ngeru menghadap sultan guna mengajukan permohonan agar hewan kesayangannya itu jangan ditembak mati. Tetapi baru setengah jalan dalam perjalanan pulang dari istana ke rumahnya, Dea Ngeru mendengar letusan senapan. Setelah ditengok oleh pengiringnya, ternyata Payung Kobar telah mati tergeletak di tempat karantina hewan. Dea Ngeru menjadi marah dan bara api dendam bergolak

dalam hatinya. Suatu kali pada 7 Juni 1913, delman yang mengangkut dokter hewan B. Eysenburger beserta istrinya dihadang oleh Manusung dan Napis, dua orang pengikut Dea Ngeru. Mereka segera menyarangkan tombaknya sehingga istri dokter tewas seketika, sedangkan suaminya menderita luka berat. Karena pembunuhan ini, Dea Ngeru beserta dua orang pengikutnya dijatuhi hukuman mati.

Masih dalam masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III, tepatnya pada 1885, istana kesultanan diubah menjadi bentuknya yang sekarang. Istana ini kemudian kerap dikunjungi para wisatawan. Tiruannya terdapat di Komplek Raksasa Miniatur Indonesia Indah yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sultan Muhammad Kaharuddin III (1931–1958) menggantikan ayahnya. Dia merupakan Sultan Sumbawa terakhir. Pada 1937, kedua orang menterinya, Datu Ranga Muhammad Saleh Daeng Manassa dan Datu Dipati Abdul Majid Daeng Mattutu mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh karenanya, hingga tahun 1942 ditiadakanlah jabatan menteri. Setelah itu, H. Abdullah Lalu Tunruang (Demung Empang) diangkat sebagai pembantu sultan dengan gelar *Ambtenar Terberschikking*[97]. Bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad Kaharuddin III, Perang Dunia II meletus. Kekuasaan Belanda di Asia Tenggara makin terdesak oleh gerak maju bala tentara Jepang. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda tamat kekuasaannya pada Maret 1942 dengan menyerahnya Gubernur Jenderal A.W.I. Tjarda Starkenbourgh Stachouwer di Kalijati.

Kendati demikian, pemerintah kolonial Belanda menutup-nutupi kekalahan ini dan tetap mengibarkan bendera merah - putih - biru. Sementara itu, pesawat terbang Jepang meraung-raung di angkasa Sumbawa sehingga menggelisahkan rakyat. Utusan ketiga organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad, datang menemui sultan beserta *ambtenar terberschikking* guna membicarakan hal itu. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa mereka akan menemui kontrolir guna meminta agar bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera putih agar Jepang tak menjatuhkan bomnya. Pada saat bersamaan, para pemuda beserta anggota pasukan dan polisi Belanda yang berasal dari kaum pribumi telah melucuti kekuatan militer Belanda di Bima sehingga memaksa para petinggi pemerintahan Belanda di Bima melarikan diri, seperti asisten residen, kontrolir, dan lain sebagainya. Peristiwa

97. Lihat *Fakta-fakta Tentang Samawa*, halaman 46.

yang merupakan akhir kekuasaan Belanda di Bima ini belum terdengar di Sumbawa karena Belanda memutuskan hubungan telepon.

Tidak lama kemudian, para petinggi pemerintah Hindia Belanda yang telah melarikan diri tersebut kembali lagi ke Sumbawa dan berniat melancarkan serangan ke Bima. Belanda bermaksud meminta dukungan Sultan Sumbawa, tetapi dia menolak karena telah mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di Bima. Kini giliran militer dan polisi Belanda yang dilucuti kekuasaanya di Sumbawa. Mereka semua diangkut ke penjara di Sumbawa Besar. Barulah setelah itu diadakan kontak dengan Sultan Bima beserta Komandan Aritonang untuk memberitahukan bahwa kekuasaan Hindia Belanda juga telah tamat di Kesultanan Sumbawa.

Melalui pembicaraan telepon diputuskan akan diadakan pertemuan di Empang, yang dihadiri oleh Sultan Bima, Sultan Sumbawa, Komandan Aritonang, dan H. Abdullah Lalu Tunruang. Menghadapi kondisi yang gawat dan tak menentu saat itu, dikeluarkanlah ketetapan sebagai berikut:[98]

- Seluruh rakyat Kesultanan Sumbawa dan Bima / Dompu agar senantiasa bersiap siaga dengan senjatanya masing-masing.
- Mengumpulkan persediaan makanan guna mencegah bahaya kelaparan.
- Mengadakan ronda malam dan senantiasa waspada menghadapi serangan musuh dalam selimut.
- Memaklumkan bahwa Kesultanan Sumbawa dan Bima melepaskan diri dari Kerajaan Belanda.
- Menunggu kedatangan bala tentara Jepang dengan tenang dan tenteram.

Bersamaan dikeluarkannya keputusan di atas, Kesultanan Sumbawa menjadi negeri yang berdaulat lagi.

Bala tentara Jepang baru tiba di Sumbawa pada Mei 1942 dengan 8 kapal perang di Labuan Mapin, Kademungan Alas. H. Abdullah Lalu Tunruang selaku wakil sultan beserta Demung Alas, Demung Seteluk, dan Kepala Desa Mapin Rea menyambut mereka. Setelah panglima armada Jepang mempersilakan mereka naik ke kapal, wakil-wakil Sumbawa melaporkan mengenai aparat-aparat Belanda yang telah mereka tawan di penjara. Pada kesempatan itu pula, Jepang meminta izin mendarat.

98. Lihat *Sumbawa pada Masa Lalu*, halaman 164.

Rakyat memberikan sambutan meriah kepada bala tentara Jepang yang disangkanya sebagai pembebas itu. Panglima armada ikut turun dan melihat-lihat kondisi kota Alas. Setelah itu, ia kembali ke kapal dan meneruskan pelayarannya ke Bima, Sumba, Flores, dan Kupang. Sebagian bala tentara Jepang di bawah pimpinan Kolonel Haraichi[99] menetap di Sumbawa dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Bima. Sultan sendiri turut serta menyambut kehadiran mereka. Sebelum melanjutkan perjalanannya ke Sumbawa, Kolonel Haraichi sempat memeriksa para tahanan dan berkeliling kota. Peristiwa ini secara resmi mengawali pendudukan Jepang di Sumbawa.

Jepang membentuk struktur pemerintahan yang tidak jauh berbeda dibandingkan semasa penjajahan Belanda. Pulau Sumbawa dibagi menjadi dua kawasan, yakni Sumbawa Bun Ken dan Bima Bun Ken. Keduanya dimasukkan dalam Karesiden Sunda Kecil (Sunda Kecil Syu). Para pejabat tinggi semuanya dipegang oleh orang Jepang dan hanya jabatan-jabatan rendah saja yang diserahkan pada kaum pribumi.

Rakyat dipaksa menyerahkan hasil pertanian demi kepentingan Jepang sehingga terjadilah bencana kelaparan. Kapas dimonopoli pula oleh Jepang sehingga rakyat kekurangan bahan pakaian. Belum lagi rakyat yang dipaksa bekerja paksa (*romusha*). Meskipun demikian, Jepang mulai terdesak pada 1943 dan menyerah kalah pada 14 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah, awal Oktober 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) di Sumbawa, yang dipimpin oleh dr. Ariotejo beserta Muhammad Zain Anwar sebagai sekretarisnya.

Meskipun kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan, Belanda tetap berkeinginan melanggengkan kekuasaannya. Itulah sebabnya, pada 31 Desember 1945 pasukan NICA didaratkan di Sumbawa. Sebagai upaya memecah belah persatuan bangsa Indonesia, Belanda membentuk berbagai negara bagian. Oleh karenanya, mereka mengadakan Konferensi Malino (15–25 Juli 1946) yang dihadiri oleh utusan dari berbagai penjuru Kepulauan Nusantara. Sultan Muhammad Kaharuddin III menghadiri konferensi yang memutuskan pendirian Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai wakil Sumbawa. Konferensi Malino dilanjutkan dengan Konferensi Denpasar yang diadakan pada 18–24 Desember 1946. Sultan Muhammad Kaharuddin III kembali hadir sebagai wakil Sumbawa. Hasil konferensi adalah pembentukan Negara

---

99. *Fakta-fakta Tentang Samawa*, halaman 50, menyebutnya demikian, tetapi buku *Sumbawa pada Masa Lalu*, halaman 165, mencantumkan nama Hari Ici.

Indonesia Timur (NIT). Kendati merupakan negara boneka hasil rekayasa Belanda, banyak tokoh-tokoh nasionalis yang menjadikan NIT sebagai alat perjuangan demi meraih kemerdekaan sepenuhnya dari tangan Belanda.

Sultan Muhammad Kaharuddin III pernah menjabat sebagai ketua parlemen NIT dan setelah bubarnya berbagai negara bagian tersebut, dia memegang kedudukan sebagai kepala Swapraja Sumbawa. Pada 14 Agustus 1958 dengan keluarnya UU no. 69 tahun 1958, Swapraja Sumbawa secara yuridis formal berubah menjadi Kabupaten Sumbawa. Namun, pelaksanaannya baru berlangsung pada 29 Oktober 1958 dengan pengangkatan Sultan Muhammad Kaharuddin sebagai pejabat sementara kepala daerah Kabupaten Sumbawa[100] berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Up. 7/14/34[101]. Dengan demikian, berakhirlah era swapraja di Sumbawa.

c. Sistem Pemerintahan

Sultan adalah penguasa tertinggi dan sekaligus tokoh pemersatu di Sumbawa. Raja dibantu oleh suatu dewan menteri yang disebut *Menteri Telu*, yakni *Ranga* (perdana menteri), *Kalibelah*, dan *Dipati*. Asal muasal jabatan *kalibelah* yang baru ada belakangan itu dimulai antara 1331–1364 saat masa pemerintahan Raja Dewa Awan Kuning. Ia memandang tatanan penyelenggaraan pemerintahan di kerajaannya masih belum teratur dengan baik. Ketika dia mendengar di Pulau Jawa terdapat kerajaan besar bernama Majapahit yang terkenal sangat baik pemerintahannya, Raja Dewa Awan Kuning berniat bertandang ke sana. Kebetulan raja juga merasa masih satu keturunan dengan raja-raja Majapahit. Ketika niat ini disampaikan pada para menteri mereka juga mendukungnya. Dengan demikian, setelah dilakukan berbagai persiapan seperlunya, Raja Dewa Awan Kuning berlayar ke Majapahit.

Setibanya di Majapahit, raja disambut oleh Raja Majapahit sendiri beserta para pembesarnya, seperti Gajah Mada, Aria Damar, dan lain sebagainya. Setelah Dewa Awan Kuning menyampaikan niatnya untuk mempelajari tata cara penyelenggaraan pemerintahan, dengan gembira Raja Majapahit menghadiahkan empat kitab sekaligus, yakni *Pala Kera*, *Cangkul Muda*, *Raja Niti*, dan *Raja Kutara*. Ternyata *Pala Kera* terlalu berat untuk diterapkan di Sumbawa sehingga hanya dua kitab saja yang dipakai sebagai pedoman memperbaiki tatanan ekonomi dan sosial. Agar isi kitab-kitab tersebut dapat dipahami dengan lebih baik oleh raja dan rakyat Sumbawa, Raja Majapahit

100. Dia memangku jabatan ini hingga tahun 1960.
101. Lihat *Fakta-fakta Tentang Samawa*, halaman 55.

mengirimkan seorang pangeran guna mengajarkan maknanya kepada mereka. Karena khawatir pangeran Majapahit ini berniat merebut kekuasaan, Raja Sumbawa lantas menciptakan jabatan baru baginya yang setingkat menteri. Pertama-tama ia mengambil sebagian kekuasaan *ranga* dan *dipati* dan menempatkannya di bawah jabatan menteri baru tersebut. Karena berasal dari pembelahan jabatan atau kekuasaan yang telah ada sebelumnya, kedudukan baru itu dinamakan *kiahi belah*. Namun, lidah Sumbawa akhirnya mengucapkannya sebagai *kalibelah*.

Selain *Menteri Telu*, masih ada lagi dua macam majelis perwakilan, yakni *Memanca Lima* dan *Lelurah Pitu*. *Memanca Lima* beranggotakan lima orang[102].

- Longan Samapuin sebagai ketuanya.
- Kadimungan
- Demung Langu
- Menteri Tuban
- Mekal Tana

Sementara itu, *lelurah pitu* terdiri dari[103]:

- Ngeru sebagai ketuanya.
- Demung Pulit
- Nyaka Samapuiin
- Nyaka Pemulung
- Nyaka Bangkong
- Nyaka Berare
- Nyaka Lamok

Kedua majelis di atas disebut *Pengantong Dua Olas* atau "Dua Belas Lingkungan Kekuasaan." Baik *ranga*, *kalibelah*, *adipati*, ataupun anggota *Pengantong Dua Olas* masih membawahi lagi jabatan-jabatan di bawahnya. Mereka juga memiliki daerah kekuasaannya masing-masing. Uraian terperinci mengenai berbagai jabatan ini dapat dilihat pada buku karya Lalu Manca berjudul *Sumbawa pada Masa Lalu*, halaman 77-82.

102. Lihat *Sumbawa pada Masa Lalu*, halaman 77.
103. *Ibid*. halaman 77.

Sumbawa masih memiliki tiga negeri vasal yang disebut *Kemutar Telu* dan terdiri dari Seran, Taliwang, dan Jereweh. Menurut aturan adat Sumbawa, daerah-daerah taklukan itu mempunyai delapan kewajiban[104], yaitu

1. Memberikan persembahan sejumlah uang kepada raja saat berlangsungnya peristiwa-peristiwa yang menyenangkan maupun tak menyenangkan.
2. Turut serta membuat benteng.
3. Mengumpulkan kain beserta tenaga kerja dan mendampingi Raja Sumbawa apabila berkunjung ke Makassar.
4. Membawa persembahan (*perisi* atau *tekan tonang*) saat berlangsungnya upacara kematian.
5. Membawa persembahan saat berlangsungnya upacara perkawinan, khitanan, dan lain sebagainya.
6. Turut membangun bendungan dan selokan.
7. Mengirimkan pasukan bala bantuan bila berlangsung peperangan.
8. Mempersembahkan upeti.

Taliwang diperintah oleh seorang raja bergelar Datu Taliwang. Ia dibantu oleh tiga orang menterinya, yaitu Enti Desa, Kanu, dan Pelasan. Lebih jauh lagi, di Taliwang juga ada *Memanca Lima* dan *Lelurah Pitu*. Seran diperintah oleh Datu Seran beserta tiga menterinya, yaitu Raja Desa, Mariah, dan Demang Garah. Jereweh diperintah oleh Datu Jereweh beserta tiga menterinya, yaitu Enti Desa, Jurupelasan, dan Mekal Tana. Sebelumnya, Selaparang termasuk pula daerah kekuasaan Sumbawa, tetapi kemudian direbut oleh Karangasem.

Apabila raja daerah-daerah taklukan di atas meninggal maka kekuasaan sementara dipegang oleh *ranga* untuk Taliwang, *kalibelah* untuk Seran, dan *dipati* untuk Jereweh. Selanjutnya diadakan musyawarah untuk menentukan penggantinya. Apabila terjadi suatu perkara maka masing-masing *kemutar* diizinkan memutuskan sendiri pemecahannya. Namun, jika keputusan belum dapat dicapai, perkara ini diajukan lebih lanjut kepada *menteri telu*. Bila masih belum sanggup dicapai suatu keputusan akhir, barulah persoalan ini diajukan kepada sultan. Dia kemudian mengundang *menteri telu*, *memanca lima*, dan *lelurah pitu* untuk bermusyawarah bersama, keputusan yang diambil bersifat mengikat serta tak dapat diganggu gugat lagi.

---

104. Lihat *Sumbawa pada Masa Lalu*, halaman 82.

d. Sosial Kemasyarakatan

Masyarakat Sumbawa terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni *dea datu* (bangsawan), *sanak* (rakyat yang bukan budak), dan *ulin abdi* (budak). Yang termasuk golongan bangsawan adalah raja beserta kerabat dan kaum keturunan mereka. Namun, ada juga orang-orang yang berjasa lalu diangkat sebagai bangsawan.

Kaum bangsawan sendiri juga masih terbagi beberapa tingkat, yang dapat dibedakan berdasarkan gelarnya. Mereka yang tergolong bangsawan tinggi bila belum menikah akan menyandang gelar *daeng*, sedangkan bila telah menikah akan bergelar *datu*. Pernikahan antar bangsawan tinggi akan memiliki anak yang juga bergelar *datu* atau *daeng*. Namun, bila seorang *datu* atau *daeng* menikah dengan wanita derajat di bawahnya maka anak mereka akan bergelar *lalu* (bagi pria) dan *lala* (bagi wanita). Selanjutnya, apabila seorang *lalu* menikah dengan *sanak*, anak mereka akan bergelar *dea*.

Golongan rakyat *sanak* (bukan budak) secara sosial sedikit banyak memiliki kedudukan sama dengan kaum bangsawan, dalam artian bebas menentukan mata pencaharian atau hak atas tanah, terkecuali yang termasuk dalam tanah-tanah *marisi* (ulayat). Termasuk pula dalam golongan ini adalah rakyat yang diberi izin oleh kerajaan untuk bermata pencaharian di tanah-tanah yang disediakan kerajaan bagi mereka, asalkan bersedia mengerjakan tugas-tugas tertentu bagi kerajaan atau istana.

Golongan ketiga adalah kaum budak. Mereka tak memiliki hak milik, baik berupa benda maupun anaknya sendiri, karena segala yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya. Sultan Muhammad Kaharuddin III pernah menghapuskan golongan ketiga ini dan memerintahkan agar semua orang yang memiliki budak agar memerdekakannya.

e. Kesusastraan dan Kebudayaan

Untuk menuliskan karya sastranya, rakyat Sumbawa menggunakan aksara yang disebut *satera jontal* (*satera* = huruf atau aksara, *jontal* = lontar atau daun lontar). Bentuk aksara ini mencerminkan pengaruh Bugis atau mirip dengan huruf *lontarak* (aksara tradisional masyarakat Bugis-Makassar). Ada berbagai jenis puisi dalam kesusastraan Sumbawa, seperti *lawas*, yang diperkenalkan seorang penyair dari Kota Lawas. Temanya beragam, mulai dari kepahlawanan, percintaan, dan lain sebagainya. Belakangan syair jenis ini mendapat pengaruh dari *elompugi* atau syair Bugis. *Lawas*

terdiri dari tiga baris dan masing-masing baris terbentuk dari 8 suku kata, contohnya adalah sebagai berikut:

La-min si-ya du-nung no-tang

So-we san-tek bo-nga' bin-tang

Ling' bu-lan ba-te-nung ma-ta[105]

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

Seandainya lintas kenangan kanda mendadak datang,

Kuaklah atap dan tataplah beribu bintang

Di bulan jumpa berpadu.

Selain itu, masih ada lagi syair empat dan enam baris yang disebut *sual*. Puisi jenis ini mementingkan persamaan bunyi atau rima di dalamnya. Kumpulan berbagai *lawas* ini ditulis di atas helaian daun lontar yang dirangkai menjadi satu dan disebut *bumung*. Cara menyimpannya dengan digantung pada dinding atau tiang rumah. Orang Sumbawa juga gemar *balawas*, yakni menyanyikan *lawas*. Cara melagukannya dapat dengan cara sendiri-sendiri atau berbalas-balasan.

Bentuk karya sastra lain yang tak kalah pentingnya adalah *buk*. Hasil kesusastraan yang ditulis dengan *satera jontal* atau huruf Jawi ini berisikan berbagai catatan peristiwa sejarah dan juga berbagai tugas yang perlu diemban masing-masing pejabat kerajaan. Karenanya, para pejabat kerajaan memiliki *buk*-nya sendiri-sendiri. Sementara itu, raja beserta menterinya menyimpan apa yang disebut *buk* induk. *Buk* ada pula yang berisikan silsilah serta daftar harta kekayaan yang dimilikinya. Beberapa *buk* telah disita oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan menghilangkan jejak kebesasaran Sumbawa di masa lampau. Namun, ada pula yang rusak dan musnah karena kelalaian pemiliknya, umpamanya akibat dimakan usia atau terbakar[106]. Hal ini sangat disayangkan karena *buk* merupakan informasi berharga mengenai sejarah Kesultanan Sumbawa.

Bertentangan dengan laporan Zollinger yang menyatakan bahwa orang Sumbawa tidak mempunyai musik ataupun nyanyian, ternyata di Sumbawa terdapat alat-alat musik seperti *rebana kebo*, *rebana ode* (kecil), *sarune*, dan lain sebagainya. Alat-alat

105. *Sumbawa pada Masa Lalu*, halaman 34
106. Lihat *Sumbawa pada Masa Lalu*, halaman 43.

musik ini dipergunakan untuk mengiringi *balawas*. Selain seni musik, seni tari juga dikenal di Sumbawa, seperti tari Keraci yang disebut pula sebagai tari perang. Tarian ini menggambarkan perjalanan sejarah Sumbawa masa lalu ketika masih terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Seni musik tradisional Sumbawa memperlihatkan pengaruh Bugis Makassar yang kental[107]. Hal ini tampak nyata pada seni *gong genang* (gong gendang) yang dipergunakan mengiringi upacara *nyorong* atau saat penyerahan segenap kebutuhan pernikahan kepada keluarga mempelai wanita.

Tari-tari tradisional Sumbawa yang terkenal antara lain *pego balaeng*, *pasaji*, *dadara melala*, dan *dadara pitu*[108]. Tari *dadara pitu* memiliki tema yang sama dengan kisah Jaka Tarub, yakni seorang pemuda yang mencuri selendang salah seorang di antara tujuh bidadari. Permainan yang digemari rakyat Sumbawa adalah *barapan kebo*. Terdapat kemiripan antara permainan ini dengan karapan sapi di Madura. Kebudayaan Sumbawa mendapat pula pengaruh kebudayaan Arab dan China. Kebudayaan Arab tampak pada seni kaligrafi, sedangkan contoh pengaruh kebudayaan China dapat disaksikan pada ukir-ukiran naga di tandu Raja Sumbawa.

VI. TAMBORA

a. Perkembangan Sejarah Kerajaan Tambora

Tambora merupakan kerajaan kecil yang kini terletak di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima Raba. Berdasarkan catatan sejarah, pada 1675 Tambora merampas sebuah kapal Belanda. Oleh sebab itu, VOC lalu menghukum Raja Tambora bernama Kalongkong dan para pembesar kerajaan terpaksa menyerahkan keris pusakanya. Sebagai langkah berikutnya menghadapi Tambora, Belanda mengakui Pekat sebagai kerajaan terpisah. Selanjutnya, Raja Jamaluddin yang memerintah di Tambora meninggal pada 1687 dan digantikan putranya yang bernama Nizamuddin (1687–1697). Peperangan pecah antara Tambora dan Bima pada 1695. Saat itu, Tambora didukung oleh Aru Teku, sedangkan Bima mendapat bantuan VOC.

Setelah perdamaian antara Tambora dan Bima dicapai, Aru Teku tetap tinggal di Tambora. Namun, ia merampok Manggarai pada 1699 sehingga VOC kembali turun tangan dan menyerbu Tambora. Di kalangan rakyat sendiri timbul ketidakpuasan terhadap Raja Tambora, demi alasan keamanan maka ia diturunkan

107. Lihat *Pilar-pilar Budaya Sumbawa*, halaman 60.
108. Lihat *Pilar-pilar Budaya Sumbawa*, halaman 61.

dari singgasananya pada 1701. Damala Daeng Mamangon, Raja Tambora yang baru diwajibkan menandatangani perjanjian pada 18 April 1701. Agar Sumbawa menjadi aman, VOC yang diwakili Bernink mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sana. Pada kesempatan tersebut, lima kerajaan mengirimkan wakil-wakilnya sebagai berikut: Bima diwakili oleh Raja Muda Mapa Tali, Dompu diwakili oleh Abdulrasul, Sanggar diwakili oleh Kalongkong Hasanuddin, Tambora diwakili Damala Daeng Mamangon, dan Pekat diwakili oleh Koreh[109]. Kendati demikian, setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 September 1701, keadaan tidak langsung aman. Beberapa pergolakan masih kerap terjadi di berbagai kerajaan. Abdul Azis (1716–1726), Raja Tambora pengganti Damala Daeng Mamangon meninggal pada 1726, dan digantikan oleh putranya, Abdurrahman (1726–1748), yang mengikrarkan kesetiaan kepada VOC pada 27 Desember 1726.

Ketika Abdurrahman meninggal, yang diangkat sebagai raja adalah putranya yang bernama Kadinding (1748). Akan tetapi, ia diusir oleh seorang pendatang bernama Ujungpandang Abdul Said yang mengangkat dirinya sebagai raja. Meskipun demikian, dewan adat yang berada di Sulawesi menyerahkan mahkota kepada Tureli Tambora, saudara ipar almarhum Raja Abdurrahman. Para penentangnya menjadi marah dan membunuhnya. Akhirnya, Ujungpandang Abdul Said naik tahta kembali pada 1749 dan dilantik oleh VOC pada 1 November 1752. Pemerintahan keduanya ini berlangsung hingga 1771. Kurang lebih dalam waktu bersamaan, terjadi peperangan dengan Pekat yang dipicu oleh permasalahan 64 orang budak asal Tambora pada 1750. Perselisihan masalah perbudakan ini pecah lagi pada 1757. Tambora merasa bahwa warga kerajaannya kerap menjadi korban perbudakan yang masih berlaku di Pekat. Kerajaan tersebut menjalankan perbudakan karena mendapatkan perlindungan VOC. Maskapai dagang Belanda itu menolak menghapuskan perbudakan di Pekat karena mendatangkan banyak keuntungan baginya. Raja-raja Tambora berikutnya adalah Tahmidullah Hidayatun Minalla (1771–1773), Abdurrasyid (1773–1800) dan Muhammad Tajul Masohor (1800–1801). Raja ini dibunuh dan digantikan oleh putra angkat Abdul Said bernama Abdulgafar (1801–1815).

Satu-satunya peristiwa mendunia yang berkaitan dengan kerajaan ini adalah letusan Gunung Tambora pada 5 April 1815. Mirip dengan Krakatau, kedashyatan letusan gunung ini sanggup memengaruhi iklim hingga Eropa dan Amerika. Pada

109. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 61.

bulan Juni 1816, Amerika dan Eropa mengalami musim dingin yang panjang dan tahun itu boleh dikatakan tanpa musim panas. Panen menjadi gagal dan kawasan Eropa dan Amerika mengalami bencana kelaparan. Para petani terpaksa memberi makan ternak mereka dengan jagung yang dapat mereka panen agar tidak mati. Petani-petani di New York menggali tanaman kentang yang baru saja mereka tanam dan memberikannya pada keluarga mereka agar tidak mati kelaparan. Di Swiss, orang-orang yang kelaparan bertahan hidup dengan memakan anjing serta kucing. Kelaparan dan penyakit tersebut secara tidak langsung menambah jumlah korban Tambora sebanyak kurang lebih 50.000 orang. Pada mulanya, para ilmuwan tidak mengetahui penyebab musim dingin berkepanjangan yang aneh tersebut. Baru pada 1920 mereka berhasil mengenali keterkaitan bencana itu dengan letusan Gunung Tambora. Abu yang dimuntahkan gunung itu ke atmosfer bumi sedemikian banyaknya sehingga menghalangi cahaya matahari. Inilah biang keladi turunnya temperatur bumi dan musim dingin berkepanjangan tersebut.

Jika jarak sejauh Eropa dan Amerika saja gunung ini dapat menimbulkan efek yang dashyat, bagaimana dengan Tambora sendiri?.

Saat meletus, suara ledakannya terdengar hingga ribuan kilometer. Selanjutnya selama lima hari, Tambora melontarkan abu dalam jumlah yang sanggup meruntuhkan seluruh rumah di Sumbawa karena bobotnya. Abu ini sedemikian pekatnya hingga tak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Para penduduk di kawasan itu boleh dikatakan hidup dalam kegelapan selama berhari-hari. Pada 10 April 1815, letusan mencapai puncaknya dengan mengeluarkan gumpalan api yang sangat besar. Kedashyatan panasnya menyebabkan perbedaan tekanan udara yang besar sehingga pada akhirnya menimbulkan badai topan. Angin panas ini menyapu serta mencabik-cabik manusia, ternak, rumah, dan pepohonan. Letusan Tambora telah membinasakan tanaman pangan sehingga bencana kelaparan menyusul tak lama kemudian. Jumlah korban jiwa di kawasan pulau itu mencapai 80.000 jiwa. Raja Tambora saat itu, Abdul Gafar, turut pula menjadi korban. Dengan demikian, berakhir pulalah Kerajaan Tambora dan selanjutnya digabungkan dengan Dompu. Setelah bencana besar ini, 35.000 penduduk Tambora harus mengungsi. Ketika Zollinger mengunjungi Sumbawa pada 1847, masih dijumpai timbunan abu hingga sedalam lutut kuda di berbagai tempat[110]. Tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tobias pada 1808, populasi kerajaan

110. Lihat *Sumbawa pada Masa Lalu*, halaman 152.

ini adalah 4.000 jiwa dan tahun 1815, menjelang meletusnya Gunung Tambora, menjadi 8.000 jiwa. Letusan Tambora mengakibatkan korban sejumlah 30 jiwa dan pada 1816 rakyatnya yang tersisa tewas disapu banjir lahar[111].

b. Kisah Meletusnya Gunung Tambora Dalam Karya Roorda van Eysinga

Roorda van Eysinga menulis suatu karya terdiri dari tiga jilid yang berjudul *Handboek der Land- en Volkenkunde, Geschied-, Taal-, Aardrijksen Staatkunde van Nederlandsch-Indie* (1851). Pada jilid II halaman 37-40 dimuat cerita mengenai asal muasal letusan Gunung Tambora[112]. Alkisah pada saat itu terdapat seorang pedagang keturunan Arab dari Bengkulu bernama Said Idrus. Ia datang untuk berniaga ke Tambora dengan menumpang sebuah kapal Bugis. Ketika tiba waktu zuhur, ia masuk ke masjid dengan tujuan hendak bersembahyang. Namun, di dalam masjid dijumpainya seekor anjing. Ia lalu memerintahkan mengusir dan memukul anjing itu. Orang yang ditugasi menjaga anjing menjadi marah dan mengatakan bahwa hewan tersebut milik Raja Tambora. Said Idrus mengatakan bahwa anjing diharamkan berada dalam masjid dan orang yang telah memasukkannya adalah kafir. Penjaga anjing melaporkan hal itu pada raja bahwa mereka telah dikatakan kafir karena adanya anjing dalam masjid mereka. Raja Tambora menjadi kesal dan berniat merencanakan pembalasan untuk mempermalukan Said Idrus. Ia lalu mengatur jamuan makan, namun menghidangkan dua macam daging di pesta itu. Daging anjing sengaja dihidangkan bagi Said Idrus, sedangkan kambing diperuntukkan bagi hadirin lainnya. Tentu saja, pedagang tersebut tidak menyadari bahwa yang dimakannya adalah daging anjing. Setelah makan, raja menanyakan padanya, apakah benar anjing itu haram. Said Idrus menjawab bahwa memang demikian halnya. Raja bertanya lagi, bila memang haram mengapa ia memakannya. Akhirnya, timbul perbantahan di antara mereka karena Said Idrus merasa bahwa yang dimakannya adalah daging kambing seperti hadirin lainnya. Pertengkaran makin memuncak dan raja menjadi murka sehingga memerintahkan pengikutnya membunuh pedagang Arab tersebut. Mereka menangkap dan membawanya ke puncak Gunung Tambora. Di sana kepala Idrus dihantam dengan batu dan benda-benda keras lainnya hingga tewas. Jenazahnya kemudian dimasukkan ke dalam gua. Pada saat yang bersamaan, Gunung Tambora meluapkan amarahnya dengan penuh kedahsyatan sehingga seluruh Tambora bagai terbakar:

111. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 123.
112. Kutipan lengkapnya tercantum pada *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, halaman 336–338.

> Tambora pun menyala. Sampai berapa-berapa hari menyala api di gunung, di negeri, di lautan, di bumi. Maka kelam kabut daripada hujan abu itu, suatu pun tiada lepas manusia isi Negeri Tambora, berapa-berapa ribu orang mati terbakar itu. Antara berapa hari api menyala, belum padam api di gunung, Negeri Tambora pun tenggelam, menjadi lautan, sampai sekarang ini kapal boleh berlabuh di bekas Negeri Tambora adanya.[113]

Diriwayatkan pula bahwa kelaparan merajalela di negeri tersebut hingga penduduknya harus mengungsi ke luar pulau. Bencana ini juga mengenai negeri-negeri di sekitar Tambora, seperti Papekat, Sanggara, Dompu, dan Bima.

c. Perdagangan Candu di Sumbawa

Di Kesultanan Bima, pembelian opium hanya berlaku atas nama sultan dan pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Ini memperlihatkan monopoli sultan terhadap perdagangan opium. Kemungkinan yang memasok opium di sana adalah pedagang-pedagang Belanda yang bermaksud membeli kuda Sumbawa. Beberapa tahun setelah meletusnya Gunung Tambora pada 1815, pernah diadakan larangan pengisapan candu. Tetapi larangan ini tidak berlangsung efektif karena opium masih dapat diselundupkan melalui Piju (Lombok Timur) oleh pedagang-pedagang Bugis. Ini terjadi karena kawasan-kawasan yang jauh dari pusat kekuasaan sultan agak sulit diawasi.

Larangan masuknya opium ke Sumbawa tidak berlangsung lama karena menurut laporan A. Ligtvoet, orang yang ingin memperjualbelikannya secara kecil-kecilan masih diizinkan asalkan membelinya dari pihak-pihak yang terkait dengan sultan. Para pedagang itu juga harus membayar sebesar 5 Dollar Spanyol agar diizinkan memperjualbelikan opium. Para pangeran memasukkan empat peti opium ke Sumbawa tiap tahunnya, dengan harga beli di Singapura sekitar fl.1.750. Bersama-sama dengan sultan mereka memperoleh keuntungan fl.1.250 setiap petinya.

Akibatnya, pada awal abad 20, 80% penduduk Sumbawa menjadi pemadat. Para pejabat kerajaan juga sebagian besar merupakan pencandu opium. Di Jereweh hampir seluruh warganya adalah pemadat. Sultan Sumbawa memasukkan kurang lebih 20 peti opium per tahunnya, dengan masing-masing peti berisi 40 bungkus yang dijual dengan harga fl.42,50. Kemudian seorang petinggi di pelabuhan Sumbawa akan membelinya dan menjual dengan harga fl.50 per bungkusnya. Karenanya, boleh dikatakan bahwa

113. *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, halaman 337. Dikutip dari naskah berbahasa Melayu dalam karya Roorda van Eysinga.

Sultan Sumbawa mendapat keuntungan sebesar fl.500 per petinya atau kurang lebih fl.10.000 setiap tahunnya. Di Sumbawa besar, sultan memiliki 8 pangkalan penjualan opium, selain tempat-tempat lainnya di pantai. Dari penjualan secara kecil-kecilan seseorang dapat melakukan transaksi sebesar fl.6.000 per bulannya.

Zollinger yang pernah mengunjungi Bima pada 1847 melaporkan bahwa dahulu opium dimasukkan dari Singapura, namun kini dari Makassar. Penggunaan atau konsumsi opium di Bima telah mencapai 4 peti per tahunnya. Selain itu, opium juga sudah masuk ke Dompu dan Manggarai walau jumlahnya tidak banyak. Sultan di kawasan tersebut memonopoli perdagangan opium. Ia membeli dalam jumlah besar dan menjualnya lagi pada para pembesar, bawahan, atau orang lain yang memerlukannya.

Oleh karena itu, berdasarkan catatan sejarah tersebut, dapat diketahui bahwa di Sumbawa dan Bima perdagangan opium dimonopoli oleh para sultan. Namun, di daerah yang masih berada di bawah pengaruh sultan, tetapi jauh letaknya, hak penjualan disewakan pada para pedagang lainnya. Zollinger melaporkan bahwa penjualan opium di Manggarai diserahkan sultan kepada seorang pedagang China yang berdomisili di sana. Ketika pemerintah Belanda menerapkan *opium regie*, aturan ini juga diberlakukan di Sumbawa. Pada 1907–1908, pemerintah Belanda berhasil menguasai Sumbawa dan mengambil alih perdagangan opium di sana dan memberlakukan *opium regie*. Namun, sultan mendapat ganti rugi dari pemerintah atas dasar pengambilalihan tersebut.

Bab 9

KERAJAAN-KERAJAAN DI KAWASAN NUSA TENGGARA TIMUR

Kawasan yang kini dikenal dengan Nusa Tenggara Timur ini terdiri dari berbagai pulau-pulau besar dan kecil, seperti Sumba, Flores, Timor, Alor, Pantar, Adonara, Lomblen, Solor, Rote, Sabu, dan lain sebagainya. Di masing-masing pulau tersebut pernah berdiri berbagai kerajaan yang saling bermusuhan satu sama lain. Pada abad 16, Kepulauan Nusantara menyaksikan kebangkitan berbagai kerajaan Islam di kawasan Indonesia Timur, seperti Gowa dan Ternate. Pengaruh kerajaan-kerajaan ini juga sampai di kepulauan Nusa Tenggara Timur, sebagai contoh adalah tersebarnya pengaruh kebudayaan Bugis dan Makassar di Belu Selatan, Pulau Timor, pada sekitar pertengahan abad 17.[114]

Pulau Flores bagian barat (Manggarai dan sekitarnya) pernah berada di bawah pengaruh Kesultanan Bima, sedangkan kawasan timur pulau tersebut berada di bawah payung kekuasaan Ternate. Kendati demikian, pengaruh dua kerajaan itu tidaklah begitu dirasakan karena masing-masing penguasa setempat masih bebas menjalankan kekuasaannya. Pada 1511, Portugis merebut Malaka dan berniat meluaskan pengaruhnya ke kawasan Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, mereka mengirimkan ekspedisinya dan membangun berbagai benteng, seperti di Lohayong, Solor, pada 1566; Ende pada 1596; dan Kupang pada 1640.

114. lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tengara Timur*, halaman 7.

Kendati demikian, ambisi Portugis ini tidak berjalan mulus setelah kedatangan saingannya sesama bangsa kulit putih, Belanda. Pada 1613, Belanda merebut benteng Portugis di Solor. Demi memperebutkan kekuasaan atas kepulauan ini, Belanda dan Portugis bersaing dalam menjalin persekutuan dengan raja-raja setempat. Akhirnya, Belanda berhasil mematahkan dominasi Portugis di Flores dan Timor bagian barat. Bahkan Belanda berhasil memaksakan monopoli dagangnya melalui perjanjian dengan raja-raja di Timor, Solor, dan Sumba pada 6 Juni 1735. Upaya mengikat para penguasa setempat ini terus berlangsung hingga awal abad 20. Hal ini terbukti dengan adanya 73 kontrak politik berupa *Korte Verklaring* yang diadakan dengan penguasa-penguasa setempat antara 1900 hingga 1927. Agar persaingan antara Portugis dan Belanda tidak makin berlarut-larut, kedua belah menyepakati Perjanjian Lisabon pada 10 Juni 1893 (ditandatangani pada 1 Oktober 1904), yang isinya merupakan pembagian wilayah kekuasaan kawasan sebelah timur Pulau Timor kepada Portugis.

Setelah pembagian kekuasaan di atas, Belanda melakukan penataan terhadap pemerintahan Timor, yakni dengan menerapkan undang-undang keswaprajaan (*zelfbestuur regelen*). Berdasarkan ketetapan 1916, dibentuk karesiden Timor yang terdiri dari 3 *afdeeling* dan 15 *onderafdeeling*. Masing-masing distrik masih dibagi-bagi lagi menjadi beberapa swapraja, yang merupakan kerajaan-kerajaan pada masa itu–sehingga secara keseluruhan terdapat 45 swapraja:

- *Afdeeling* Timor dengan Kupang sebagai ibukotanya, yang terbagi menjadi:
    1. *Onderafdeeling* Kupang (ibukota: Kupang), yang membawahi swaparaja Amarasi (1), Kupang (2), Fatuleu (3), dan Amfoang (4).
    2. *Onderafdeeling* Rote (ibukota: Baa), yang membawahi swapraja Rote (5) dan Sabu (6).
    3. *Onderafdeeling* Zuid Midden Timor atau Timor Tengah Selatan (ibukota: SoE), yang membawahi swapraja Mollo (7), Amanuban (8), dan Amanatun (9).
    4. *Onderafdeeling* Noord Midden Timor atau Timor Tengah Utara (ibukota Kefamenanu), yang membawahi swapraja-swapraja Biboki (10), Insana (11), dan Miomaffo (12).
    5. *Onderafdeeling* Belu (ibukota: Atambua), yang membawahi swapraja Belu (13).

6. *Onderafdeeling* Alor (ibukota: Kalabahi), yang membawahi swapraja Barnusa (14), Pantar Matahari Naik (15), Kui (16), Kelana (17), Batulolong (18), dan Pureman (19).

- *Afdeeling* Flores dengan Ende sebagai ibukotanya, yang terbagi menjadi:
  1. *Onderafdeeling* Ende (ibukota: Ende), yang membawahi swapraja Ende (20) dan Lio (21).
  2. *Onderafdeeling* Flores Timur dan Solor (ibukota: Larantuka), yang membawahi swapraja Larantuka (22) dan Adonara (23).
  3. *Onderafdeeling* Maumere (ibukota: Maumere), yang membawahi swapraja Sikka (24).
  4. *Onderafdeeling* Ngada (ibukota: Bajawa), yang membawahi swapraja Riung (24) dan Nage-Keo (26).
  5. *Onderafdeeling* Manggarai (ibukota: Ruteng), yang membawahi swapraja Manggarai.
- *Afdeeling* Sumbawa dan Sumba dengan Raba sebagai ibukotanya, yang terbagi menjadi:
  1. *Onderafdeeling* Bima (ibukota: Bima), yang membawahi swapraja Bima (27) dan Dompu (28).
  2. *Onderafdeeling* Sumbawa (ibukota: Sumbawa Besar), yang membawahi swapraja Sumbawa (29).
  3. *Onderafdeeling* Sumba Timur (ibukota: Waingapu), yang membawahi swapraja Kanatang (30), Lewa Kambera (31), Tabundung (32), Melolo (33), Rendi Mangeli (34), Waijelu (35), dan Mahu Karera (36).
  4. *Onderafdeeling* Sumba Barat (ibukota: Waikabulak), yang membawahi swapraja Lauli (37), Laura (38), Wawewa (39), Wanokaka (40), Mamboro (41), Kodi (42), Anakalang (43), Lamboya (44), dan Umbu Ratu Nggai (45).

Pada masa sebelumnya terdapat lebih banyak kerajaan lagi. Kerajaan-kerajaan yang dirasa kurang penting oleh Belanda lalu digabungkan dengan kerajaan yang lebih besar. Sebagai contoh, Kerajaan Nita dan KangaE digabungkan dengan Sikka membentuk Swapraja Sikka. Kerajaan Tananglia digabungkan dengan Mamboro dan Mbukambera dengan Kodi pada 1915. Kerajaan Rendi dan Mangili digabungkan menjadi Swaparaja Rendi-Mangili pada 1916. Kerajaan Sonbai Kecil, Funay,

TaEbenu, Amabi, Semau, dan Amabi OEfeto digabungkan menjadi Kerajaan atau Swapraja Kupang pada 1917. Sebagian wilayah Napu dimasukkan ke dalam wilayah Umbu Ratu Nggai dan Kerajaan Kapundung digabungkan dengan Kanatang pada 1932. Sementara itu, di wilayah Solor dan sekitarnya, Belanda menggabungkan Lohayong, Lamakera, Lamahala, Terong, dan Adonara menjadi Swapraja Adonara pada 1932. Wilayah-wilayah negeri yang takluk pada Larantuka (Demon Lewo Pulo) lalu disatukan menjadi Swapraja Larantuka pada 1931. Kerajaan-kerajaan di Solor dan sekitarnya yang digabungkan dengan Adonara dan Larantuka statusnya berubah menjadi *haminte*. Dengan demikian, Swapraja Larantuka membawahi 10 *haminte* dan Swapraja Adonara membawahi 5 *haminte*. Para raja di Solor yang wilayahnya digabungkan dengan Adonara menerima tunjangan 20–30 *Gulden* per bulannya, sedangkan Raja Adonara dan Larantuka menerima 200–300 *Gulden* per bulannya.



Tempat makanan dari Nusa Tenggara Timur
Foto koleksi pribadi, diambil dari Museum Nasional Indonesia, Jakarta



Topi yang berasal dari Nusa Tenggara Timur
Foto koleksi pribadi, diambil dari Museum Nasional Indonesia, Jakarta

A. KERAJAAN-KERAJAAN DI PULAU ADONARA

I. ADONARA

Penguasa Adonara pertama bernama Foramma yang memerintah sekitar tahun 1650. Selanjutnya di Adonara memerintah Raja Boli I (± 1681), Wuring (± 1710–1718), Boli II (±1720–1756), Lakabela Jo (± 1832), Begu Ama (± 1850), dan Pelang (1850–1857). Raja Adonara yang bernama Jouw (Jo, 1857–1868), pengganti Raja Pelang, menandatangani *Lange Verklaring* pada 28 Juni 1861 bersama dengan raja-raja lainnya, seperti Lohayong, Lamakera, Lamahala, Terong, dan Larantuka. Raja-raja

Adonara berikutnya adalah Kamba Begu (1868–1893), saudara Jouw. Ia digantikan oleh putranya bernama Bapa Tuan (1893), yang hanya berkuasa 6 bulan saja. Penguasa berikutnya adalah saudara Bapa Tuan yang bernama Raja Arakiang Kamba (1893–1930). Ia menandatangani *Timor Verklaring* pada 12 Juli 1894 dan *Verklaring Betreffende Belastingheffing* pada 21 Juli 1901. Rangkaian raja-raja yang berkuasa di Adonara berikutnya adalah Bapa Ama (1930–1936), Bapa Nuhur (1936–1940), Bapa Kaya (1936–1954), dan Muhammad Eke (1954–1962).

J.J. Hangelbroek yang pernah menjadi kontrolir di Larantuka antara 1937–1938 melaporkan bahwa kawasan Adonara mencakup beberapa daerah swapraja. Kawasan-kawasan tersebut dibangun oleh pelaut-pelaut asal Bugis-Makassar dan masih merdeka sewaktu Belanda menanamkan kekuasaannya, namun selanjutnya disatukan secara paksa dengan Swapraja Adonara. Hangelbroek menyebutkan bahwa Raja Adonara saat itu merupakan cucu penguasa yang menerima kekuasaan pemerintah kolonial dan dikenal dengan nama Jan van Sagoe. Ia merupakan penguasa yang dipercaya oleh pemerintah kolonial. Kendati demikian, tidak ada nama Jan van Sagoe dalam daftar urutan raja-raja Adonara[115]. Sebagai catatan, Sagoe atau Sagu merupakan nama kawasan di Pulau Adonara.

II. TERONG

Kerajaan Terong terletak di selatan Pulau Adonara dan menjadi bagian Kerajaan Solor Lima Pantai. Pada 1901, rajanya yang bernama Pating Belo mengadakan kontrak politik dengan Belanda.

B. KERAJAAN-KERAJAAN DI PULAU ALOR DAN PANTAR

Konon, di Pulau Jawa hiduplah dua orang bersaudara yang bernama Aki Ae dan Majapahit. Suatu kali mereka berdua memancing di laut. Kail Majapahit tersangkut sesuatu yang sangat berat dan mengira yang didapatnya adalah ikan besar. Ternyata setelah kailnya ditarik yang tersangkut adalah sebuah peti. Ketika peti itu dibuka, di dalamnya terdapat seorang putri yang cantik jelita. Karena yang mendapatkannya adalah Majapahit maka putri itu akan dinikahkan dengannya. Hal ini membangkitkan rasa cemburu dan iri hati dalam diri Aki Ae. Ia lantas mencari akal untuk menyingkirkan Majapahit. Kesempatan ini tiba sewaktu mereka berlayar ke arah

115. Lihat *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920–1942*, halaman 150.

timur untuk berdagang. Rombongan singgah di sebuah tempat bernama Waiwagang di Pulau Pantar. Majapahit diperintahkan oleh kakaknya untuk menjala ikan. Oleh karena terlalu asyik mencari ikan, Majapahit terpisah jauh dari rombongan lainnya. Hal ini memang telah dinantikan oleh Aki Ae. Ia segera meninggalkan Majapahit di sana.

Majapahit yang tak menyadari bahwa dirinya telah ditinggalkan lalu mencari-cari saudaranya dan anggota rombongan lainnya. Tetapi ia tak menjumpai siapapun di pulau terpencil tersebut. Untuk menyambung hidupnya, Majapahit terpaksa memakan mentah-mentah ikan hasil tangkapannya karena ia tak membawa alat pemantik api. Aki Ae yang telah kembali pulang ke kampung halamannya berbohong kepada calon istri Majapahit dengan mengatakan bahwa Majapahit telah mati tenggelam di laut. Ia juga membujuk calon istri Majapahit agar bersedia menikah dengannya. Tetapi calon istri Majapahit tetap setia dan menolaknya, hingga suatu kali ia hilang tanpa jejak. Sementara itu, Majapahit yang ditinggalkan di pulau terpencil, saat pulang kembali ke gubuknya dari mencari ikan, merasa sangat terkejut karena makanan lezat telah terhidang di dalamnya. Peristiwa ini terjadi setiap harinya. Lama kelamaan, Majapahit merasa penasaran dan ingin mengetahui siapa yang telah memasak atau mengirim makanan tersebut. Suatu hari, ia pura-pura hendak pergi mencari ikan dan bersembunyi untuk mengamati apa gerangan yang terjadi. Ternyata ia melihat seekor elang turun dari langit dan berubah menjadi calon istrinya.

Majapahit keluar dari tempat persembunyiannya dan menjumpai calon istrinya. Mereka kemudian menikah dan hidup bahagia sebagai suami istri. Majapahit menanyakan nama istrinya itu, tetapi ia menolak memberitahukannya dan berjanji akan setia menjadi istri Majapahit, asalkan Majapahit tak lagi menanyakan siapa namanya. Ketika istrinya hamil, ia minta dibuatkan sarang di atas pohon. Istri Majapahit kemudian bertelur tujuh butir yang menetas menjadi lima orang putra dan dua orang putri. Kelima putra itu masing-masing diberi nama Pang Mau Wolang, Gang Mau Wolang, Daeng Mau Wolang, Tuli Mau Wolang, dan Bara Mau Wolang, sedangkan yang putri diberi nama Money Key dan Ati Key. Mereka merupakan leluhur bagi penguasa dan suku-suku yang ada di Pulau Pantar.

Ati Key dan Money Key menikah dengan Raja Munaseli. Sementara itu, kelima putra Majapahit beserta istrinya mendirikan Kerajaan Kui, Bunga Bali, Belagar, Pandai, dan Barnusa. Kelima kerajaan ini membentuk persekutuan yang disebut Galiyao Watang Lema. Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa Pang Mau

Wolang mempunyai lima orang anak, yakni Tulimau Wolang (kelak menjadi raja di Alor), Lata Mau Wolang (kelak menjadi raja di Pandai), Bara Mau Wolang (kelak menjadi raja di Baranusa), El Mau Wolang (kelak menjadi raja di Belagar), dan Lau Mau Wolang (kelak menjadi raja di Kui). Demikianlah berbagai versi mengenai asal muasal raja-raja di Alor dan Pantar.

I. ABUI

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Abui

Cerita rakyat menuturkan bahwa leluhur kerajaan Abui adalah para pendatang dengan menggunakan perahu dari arah barat. Masih menurut legenda setempat, kaum pendatang itu menyinggahi Bakalang, Pura, Alor Kecil, dan Kenarilang. Mereka melakukan penanaman lontar dan bambu di kawasan-kawasan yang disinggahi tersebut. Kemudian, perjalanan dilanjutkan dengan mengelilingi Pulau Alor sebelum akhirnya mendarat di bagian selatan pulau itu. Rombongan pendatang ini dipimpin oleh empat bersaudara, yang masing-masing bernama Alokamani, Padamani, Abui Mani, dan Muna. Mereka adalah putra Manimoti dan Palakawati. Sebagai raja di kawasan yang baru mereka diami itu, diangkatlah Abui dan kerajaannya juga disebut seturut namanya, kata *abui* sendiri berarti "Yang Pertama". Diperkirakan Kerajaan Abui muncul sekitar abad 14[116].

Saudara Abui yang bernama Padamani diserahi jabatan sebagai pembantu raja dan panglima perang kerajaan. Ia bertanggung jawab pula mengawasi pembagian tanah di kalangan warga suku. Jabatan ini disebut *Sikimora* atau *Lamuli*. Abui beserta ketiga saudaranya menjadi rumpun suku-suku yang ada di Alor. Guna mempererat jalinan tali persatuan di antara mereka didirikanlah rumah adat yang disebut *Kanorwati*. Sayangnya, pendirian rumah adat ini justru memicu pertikaian di antara mereka. Perselisihan makin meruncing hingga saudara-saudara Abui memilih hengkang ke tempat lain. Muna pindah ke bagian utara Pulau Pantar dan mendirikan Kerajaan Munaseli. Kerajaan Abui akhirnya mengalami kemerosotan dan mengalami keruntuhan.

b. Susunan Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan

Kerajaan Abui diperintah oleh seorang raja bergelar *Leer*. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh seorang *sikimora* atau *lamuli*, yang bertanggung jawab

116. Lihat *Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupatan Alor*, halaman 32.

menjaga keamanan kerajaan serta mengawasi pembagian tanah. Di bawahnya terdapat *kaukal* yang berfungsi sebagai hakim adat. Jabatan lainnya adalah *adeng*, yang bertugas mengurusi upacara-upacara adat.

Masyarakat Abui terbagi menjadi dua golongan, yakni *nimang* (golongan masyarakat atas) dan *serang* (masyarakat bawah)[117]. Mereka terbagi menjadi empat suku, yang merupakan keturunan keempat bersaudara. Masing-masing suku tersebut dipimpin oleh kepala suku.

II. ALOR

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Alor

Pendiri kerajaan Alor adalah Tulimau Wolang. Sumber lain yang berasal dari Hagerdal mencatat bahwa leluhur pertama Kerajaan Alor bernama Mauput[118] yang menurunkan Holilomau. Sumber Portugis menyebutkan bahwa raja pertama adalah Kawiha Naha. Ia memiliki tiga orang putra yang masing-masing bernama Lau, Tulimau, dan Baulolong. Ketiganya secara berturut-turut memerintah sebagai sebagai raja-raja Alor berikutnya: Lau (± 1832), Tulimau I (± 1844), dan Baulolong (1844–1876). Kawiha Naha sendiri merupakan bangsawan dari Alor Besar. Sesudah itu, Alor Kecil, Alor Besar, dan Dulolong menggabungkan dirinya membentuk Kerajaan Alor.

Raja yang memerintah Alor selanjutnya adalah Panggo Aman (1877–1895). Raja Tulimau (Toelimau atau Tulimau II, memerintah 1895–1903), pengganti Panggo Aman, tercatat menandatangani *Contract Betreffende Mijnrechten* pada 22 Juli 1898. Selanjutnya, pada 22 Agustus 1901, Raja Tulimau kembali menandatangani *Verklaring Betreffende Belastingheffing* tentang penaikan pajak. Pengganti Tulimau II adalah Kawiha Tuli (1903–1908), yang menurut *Regeerings Almanak* disahkan kedudukannya pada 6 April 1904. Raja berikutnya adalah Nampira Bukan (1908–1915). Belanda kemudian mengangkat Balanampira (1915–1918) dari Dulolong sebagai Raja Alor pada 1915, yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 9 Mei 1916. Belanda memilih Balanampira karena ia merupakan tokoh yang berpendidikan serta fasih berbahasa Belanda. Pengangkatan ini tentu saja membangkitkan ketidakpuasan orang-orang yang merasa lebih berhak menduduki singgasana Alor.

117. Lihat *Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupatan Alor*, halaman 33.
118. Lihat *Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupatan Alor*, halaman 51.

Sebelumnya, Belanda telah mengantisipasi dengan mengangkat putra mahkota Tulimau sebagai kapitan. Kendati demikian, pihak-pihak yang tidak puas tetap melancarkan perlawanannya. Pada bulan Januari 1916, Lawono, salah seorang pewaris Kerajaan Alor, melancarkan pemberontakan di Jasirah Kabola. Tetapi kericuhan ini berhasil diatasi, dan Lawono ditangkap oleh Belanda. Namun, kericuhan masalah tahta Alor ini belum juga berakhir karena pewaris tahta lainnya bernama Bura, membangkitkan kericuhan pada Mei 1916. Mereka menyatakan kekecewaan atas pengangkatan Balanampira. Rakyat yang berasal dari desa Oa, Nihing, dan Ananibang turut memberikan dukungan. Rumah Kapitan Beleng menjadi sasaran amukan rakyat, kapitan sendiri terluka dan para pengikutnya dibunuh. Belanda berhasil memadamkan pemberontakan ini dan menangkap Bura serta menjatuhinya hukuman 10 tahun penjara.

Ketentraman belum berhasil dipulihkan sepenuhnya karena pergolakan kembali terjadi di Fungwati pada Juni 1918. Pemicunya adalah ketidaksediaan rakyat suku Abui (Berawahing atau Beni) membayar pajak kepada Belanda. Raja Balanampira yang mengunjungi Fungwati tewas dipenggal kepalanya pada 1919 oleh pasukan pemberontak pimpinan seorang wanita bernama Maleilehi. Kepala raja itu kemudian disembunyikan. Guna memadamkan pemberontakan ini, Belanda menerjunkan pasukan di bawah pimpinan Letnan Muller yang langsung menuju desa Kolwi, tempat kedudukan kaum pemberontak. Belanda membakar habis desa ini hingga banyak orang yang mati atau melarikan diri.

Sisa-sisa kaum pemberontak bergerak mundur dan bersembunyi di sebuah gua yang sulit dicapai. Dari sana mereka meneruskan perlawanannya terhadap Belanda secara gerilya. Pasukan Belanda mereka hadang secara tiba-tiba bersenjatakan kelewang, panah dan busurnya. Kaum pemberontak yang bertahan dalam gua itu telah menyediakan bahan makanan yang cukup untuk dua tahun. Belanda yang merasa direpotkan dengan perlawanan ini mencoba menyerbu gua pertahanan tersebut, tetapi gagal. Oleh karenanya, Belanda mencoba siasat lain dengan menggali lubang menembus gua. Kemudian, mereka menyiramkan 12 kaleng minyak tanah ke dalamnya dan membakarnya. Api berkobar di dalam gua hingga sebagian besar rakyat Fungwati, baik pria, wanita, maupun anak-anak, mati lemas karena tercekik. Saksi mata yang selamat, yakni seorang kakek yang kebetulan berada di ujung paling dalam gua pertahanan meriwayatkan peristiwa mengerikan

tersebut[119]. Pasukan Belanda lantas memasuki gua dan menjumpai mayat yang bergelimpangan. Mereka berhasil menemukan kembali kepala Raja Balanampira yang pernah dipenggal oleh kaum pemberontak. Kepala itu lalu dibawa dengan penuh kehormatan secara adat dan disatukan dengan jenazahnya yang telah dimakamkan di Dulolong, tempat pemakaman raja-raja Alor.

Maleilehi berhasil melarikan diri dan meneruskan perlawanannya di Manet. Belanda segera mengalihkan serangannya ke kawasan tersebut dan membakar kampung serta kubu pertahanan rakyat. Perlawanan ini akhirnya dapat dipatahkan dan Maleilehi tertangkap saat sedang berbaring di tengah-tengah mayat agar dikira sudah meninggal. Selanjutnya ia dipenjara di Kalabahi dan kemudian diasingkan ke Kupang. Setelah itu, pejuang wanita ini tak pernah terdengar lagi kabar beritanya. Raja Alor selanjutnya yang tercatat menandatangani *Korte Verklaring* pada 16 April 1919 adalah Umar Watang Nampira (1918–1945). Bersamaan dengan masa pemerintahannya, masuklah bala tentara Jepang ke Indonesia. Dia bersama tiga raja Alor lainnya mewakili serah terima kekuasaan pemerintahan ke tangan Jepang pada 16 Juli 1942. Pada 1945, Pemerintahannya diselingi oleh Ahmad Balanampira. Kemudian dia berkuasa kembali dan memerintah hingga 1952. Ahmad Balanampira memegang lagi tampuk kerajaan Alor sampai 1962.

b. Susunan Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan

Raja Alor digelari *Beng Balolo*, ia dibantu oleh seorang pejabat bergelar *Hamikeleng Dakekeng* yang bertugas sebagai panglima perang. Selain itu, masih ada hakim adat yang disebut *Hukung*. Jabatan lainnya adalah *Jou* yang menangani pendidikan serta agama; *Maleng* atau pejabat urusan pembangunan; dan *Laworung* yang bertanggung jawab atas masalah kesehatan. Suku-suku utama di Alor adalah Baorae, Lalang Kisu, Apulung, Uma Kakang, Uma Tukang, Uma Dopu, Kapitang, Lamaholo, Manglolong, Gelai, dan Modiluang.

III. BARNUSA (BARANUSA atau PANDAI BARNUSA)

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Barnusa

Kerajaan Barnusa terletak di Pulau Pantar. Konon, Barnusa didirikan oleh keturunan Majapahit yang menikah dengan seorang putri dari kayangan. Menurut data yang dikirimkan oleh Bapak Ridwan Paoh, putri tersebut bernama Waiwunongsere.

119. Lihat *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur*, halaman 59.

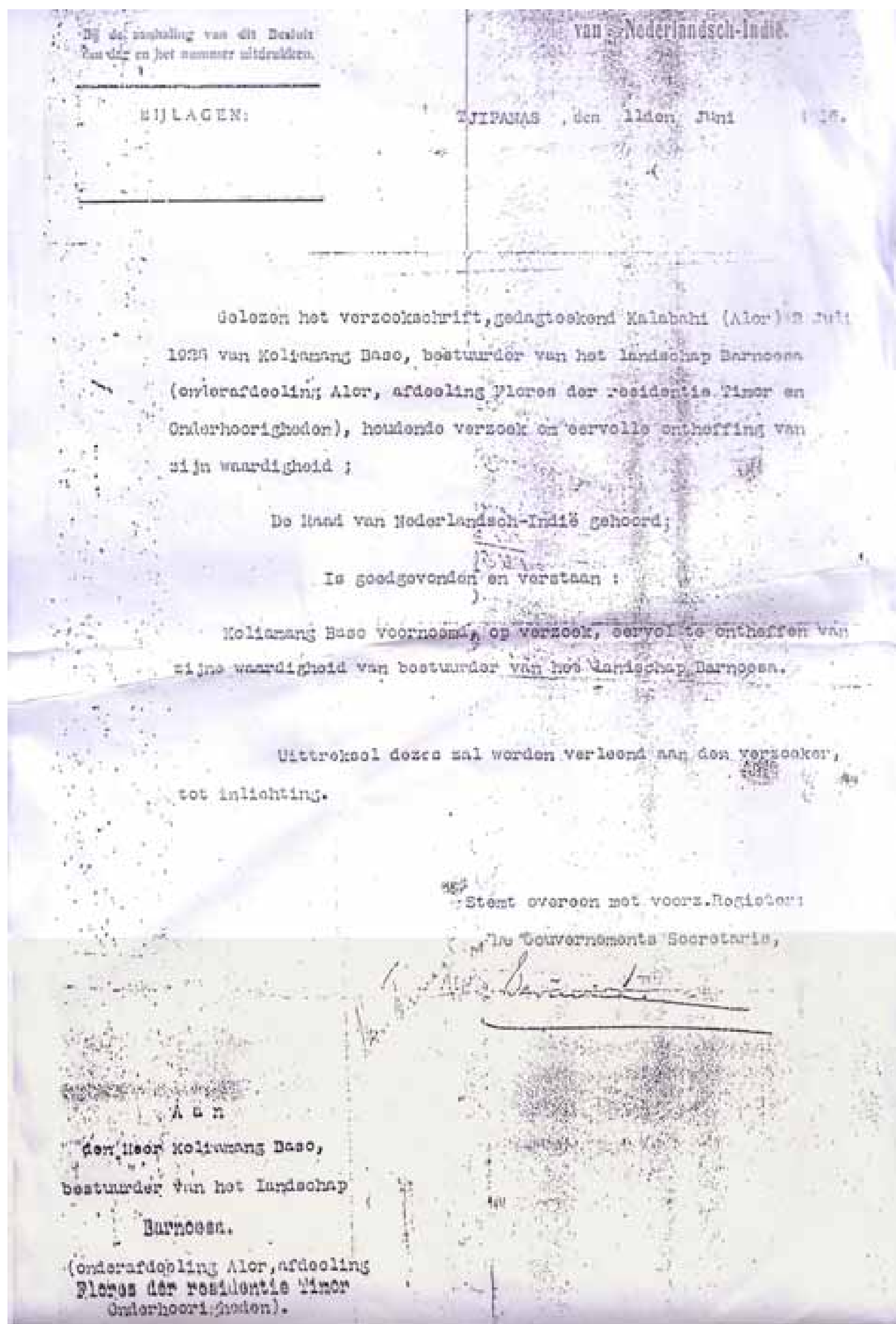
Pernikahan ini membuahkan lima orang putra yang bernama Pang Mau Wolang, Gang Mau Wolang, Daeng Mau Wolang, Tuli Mauwolang, dan Bara Mau Wolang; serta dua orang putri yang bernama Ati Key dan Money Key. Data yang dikirim Bapak Ridwan Paoh menyebutkan bahwa putra dan putri mereka masing-masing bernama Dai Mau Wolang, Baraumau Wolang, Tuli Mau Wolang, Gang Mau Wolang, Teu Mau Wolang, Monekei, dan Atikei. Kerajaan ini kemudian mengikat hubungan kekeluargaan dengan Kerajaan Munaseli karena Ati Key dan Money Key menikah dengan Raja Taliwara dari Munaseli. Sumber lain menuturkan bahwa Pang Mau Wolang mempunyai lima orang putra[120]:

- Tulimau Wolang, yang kelak menjadi raja di Alor.
- Lata Mau Wolang, yang kelak menjadi raja di Pandai.
- Bara Mau Wolang, yang kelak menjadi raja di Baranusa.
- El Mau Wolang, yang kelak menjadi raja di Belagar.
- Lau Mau Wolang, yang kelak menjadi raja di Kui.

Kelima kerajaan yang saling bersaudara satu sama lain ini lazim disebut *Galiyao Watang Lema* (Kerajaan Lima Pantai).

Ada lagi cerita rakyat yang mengisahkan bahwa Munaseli dan Barnusa terlibat permusuhan akibat pertandingan sepak bola. Konon, pihak Munaseli menggunakan bola yang dilapis emas, sedangkan Barnusa bolanya hanya dari rotan saja. Ketika tiba saatnya menggunakan bola berlapis emas itu, salah seorang pemain dari Munaseli luka kakinya. Insiden ini dianggap memalukan Munaseli sehingga mereka memaklumkan perang terhadap Barnusa demi membela harga diri. Dalam menghadapi peperangan ini, Raja Barnusa mengeluarkan sayembara, "Barangsiapa yang dapat membunuh panglima perang Munaseli akan dianugerahi hadiah berupa piring dan tempat minum terbuat dari emas". Salah seorang bernama Bari Lako menyatakan kesanggupannya dan memenangkan sayembara tersebut.

120. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 122–123.


Bij de aanhaling van dit Besluit hiervan dag en het nummer uitdrukken.

van Nederlandsch-Indië.

BIJLAGEN:

TJIPANAS , den 11den Juni 19[illegible].

Gelezen het verzoekschrift, gedagteekend Kalabahi (Alor) [illegible] Juli 1929 van Koliamang Baso, bestuurder van het landschap Barnoesa (onderafdeeling Alor, afdeeling Flores der residentie Timor en Onderhoorigheden), houdende verzoek om eervolle ontheffing van zijn waardigheid ;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan :

Koliamang Baso voornoemd, op verzoek, eervol te ontheffen van zijne waardigheid van bestuurder van het landschap Barnoesa.

Uittreksel dezes zal worden verleend aan den verzoeker, tot inlichting.

Stemt overeen met voorz. Register;
De Gouvernements Secretaris,

Aan
den Heer Koliamang Baso,
bestuurder van het landschap
Barnoesa.
(onderafdeeling Alor, afdeeling Flores der residentie Timor Onderhoorigheden).

Surat penetapan Raja Koliamang Baso
Sumber: Bapak Ridwan Paoh

Bara Mau Wolang menjadi raja pertama Barnusa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Ridwan Paoh, selanjutnya secara berturut-turut Bara Mau Wolang digantikan oleh Mau Bara, Boli Mau, Mau Boli, Bara Mau, Mau Bara, Tonda Boli, Boli Tonda, Mau Boli, Tonda Boli, Boli Tonda, Aku Boli, Baso Aku, dan Koliamang (Kuliaman) Baso. Raja Koliamang sendiri tercatat pernah menandatangani *Timor Verklaring* pada 3 Juni 1896, *Contract Betreffende Mijnrechten* pada 22 Juli 1898, dan *Verklaring Betreffende Belastingheffing* pada 22 Agustus 1901. Sumber lainnya menyebutkan bahwa urutan Raja Barnusa adalah sebagai berikut: Mau Bara, Bara Mau, Binggar Bara, Boli Binggar (wafat 1832), Aku Boli (1848–1877), dan Baso Aku (1878–1895)[121].

Pada 18 Juni 1913, pecah pemberontakan di 13 kampung wilayah Barnusa[122]. Pemicunya adalah kerja paksa dan vaksinasi. Tiga belas polisi bersenjata dikirimkan guna memadamkan pergolakan yang diikuti dengan tiga regu serdadu kolonial. Benteng Pubila milik kaum pemberontak dapat direbut, tetapi pergolakan baru dapat dipadamkan sepenuhnya pada akhir Agustus 1913.

b. Sistem Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan

Pemegang kekuasaan tertinggi di Barnusa adalah seorang raja. Selaku kerajaan pantai, Barnusa memiliki perahu kerajaan yang disebut Susundara. Pusat pemerintahannya semula berada di Waiwagang, tetapi setelah itu dipindahkan ke Barnusa. Ibukota Barnusa dijuluki *Piring Sina* karena tertata dengan rapi. Secara umum terdapat delapan suku di Barnusa, yakni Uma Kakang, Haloweka, Senjata (berperan sebagai panglima perang), Maloku (perintis penyebaran agama Islam di Barnusa dan berperan sebagai imam), Solor (kaum pendatang), Ilu, Wutung Wala, dan Hukung Uma Uma Aring[123]. Berdasarkan tradisi, Raja Barnusa biasanya dipilih dari suku Uma Kakang. Antara suku Uma Kakang dan Maloku terdapat hubungan khusus yang disebut “bumi dan langit”; "bumi" melambangkan pemerintahan atau raja, sedangkan "langit" mewakili hal-hal keagamaan. Selain itu, masyarakat Barnusa dikelompokkan pula atas empat kabilah (kaum-editor), yakni Kabilah Uma Kakang, Haliweka, Senjata, dan Wutung Wala.

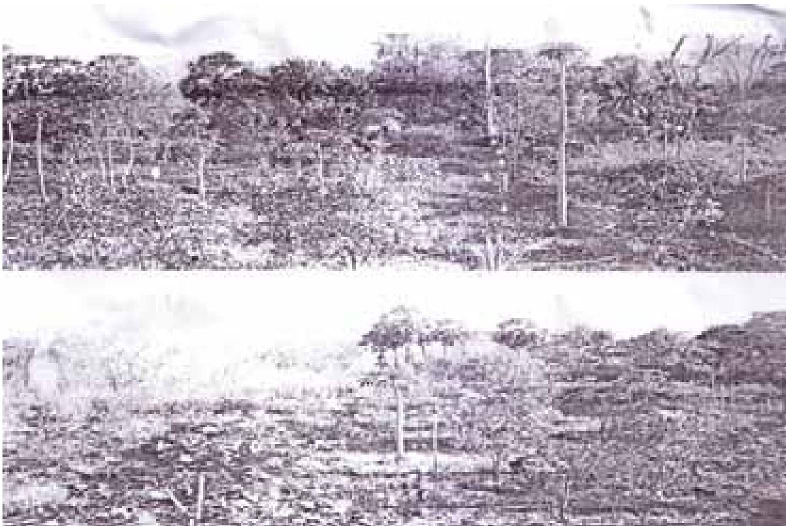
121. Lihat *Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupaten Alor*, halaman 50.
122. Lihat *Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial 1915–1950*, halaman 173.
123. Lihat *Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupaten Alor*, halaman 50–51.



Situs Ispera Bali Baku dan Besi Bercabang di Kampung Lama (Piring Sina) atau Gelu Bala (Peninggalan Kerajaan Barnusa)
Sumber: Yang Mulia Bapak Ridwan Paoh



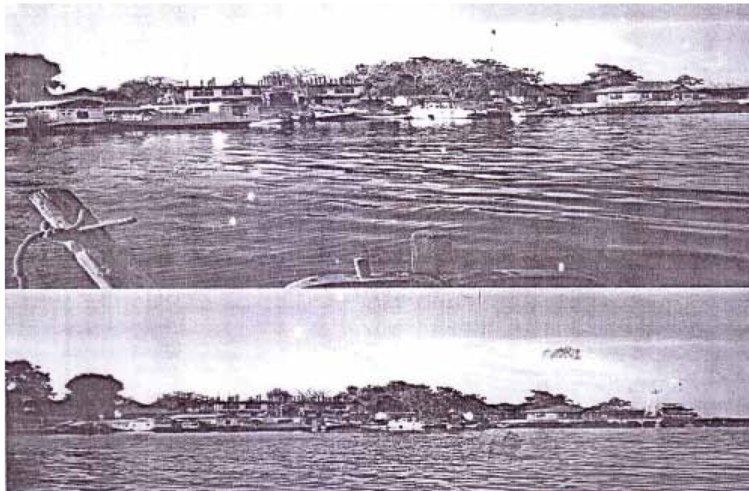
Lokasi Situs di Kampung Lama (Piring Sina) atau Gelu Bala
Sumber: Yang Mulia Bapak Ridwan Paoh



Lokasi pertama Kerajaan Barnusa di Kampung Lama (Piring Sina) Gelu Bala (1520–1783)
Sumber: Yang Mulia Bapak Ridwan Paoh



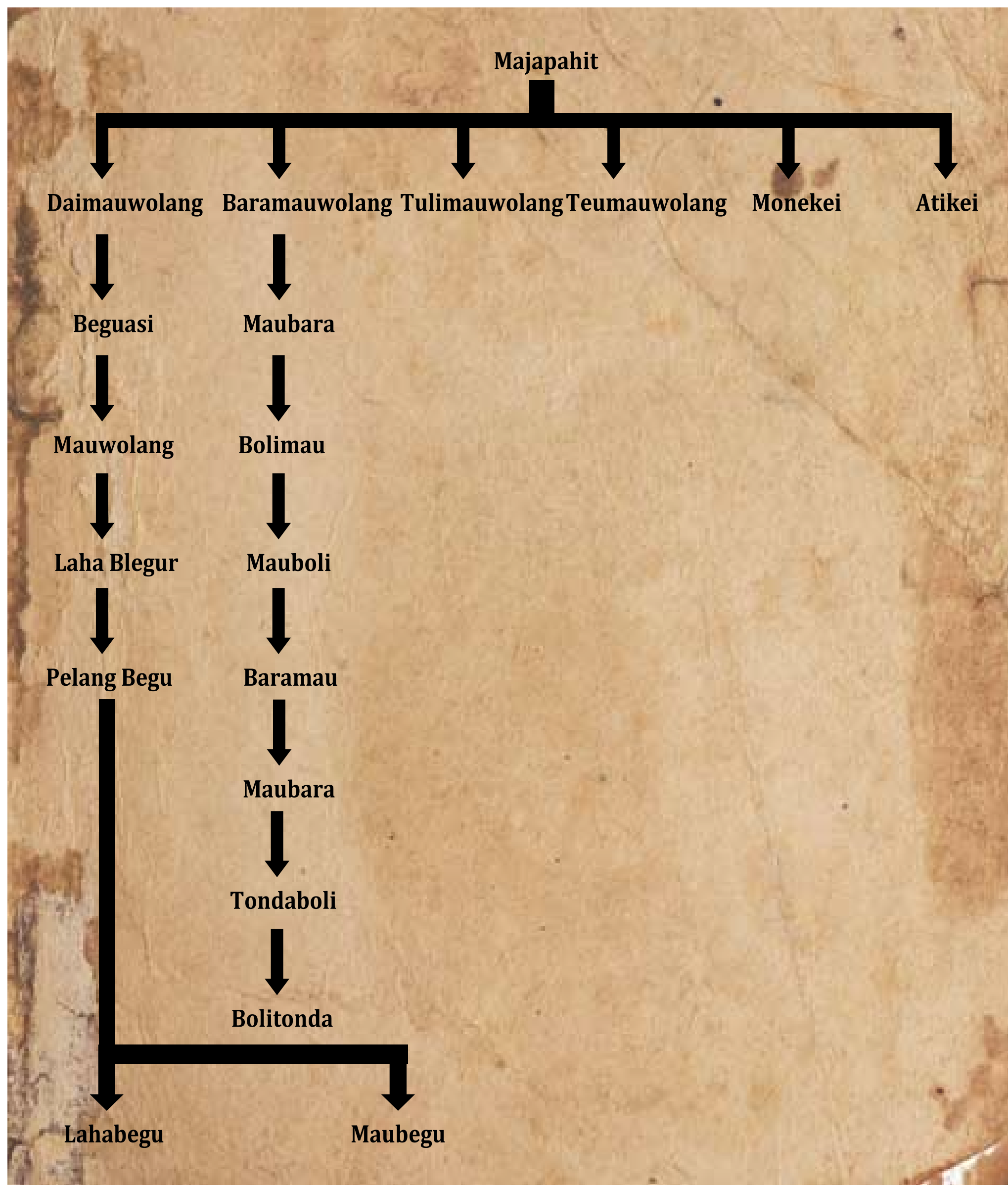
Pulau Kura (Desa Piring Sina) yaitu lokasi kedua Kerajaan Barnusa (1783–1908)
Sumber: Yang Mulia Bapak Ridwan Paoh



Lokasi ketiga kerajaan Barnusa di Tanah Blangmerang (Baranusa) dari tahun 1908–sekarang
Sumber: Yang Mulia Bapak Ridwan Paoh



Makam Raja-raja Barnusa (Aku Boli, Baso Aku, Maja Aku Baso) di Pulau Kura
Sumber: Yang Mulia Bapak Ridwan Pao



IV. BATULOLONG

Raja pertama Batulolong adalah Karlau Kep, yang diperkirakan memerintah pada abad 16. Selanjutnya yang memerintah di Batulolong secara berturutan adalah Maleikari I (± 1520–± 1550), Awenlo (± 1550–± 1570), Awengkari I (± 1570–± 1600), Losa (± 1600–± 1610), Asakarmen (± 1610–± 1640), Laubana (± 1640–± 1650), Maleikari II (± 1650–± 1670), Lauika (± 1670–± 1700), Karlau (± 1700–± 1720),

Laubaki (± 1720–± 1750), Kamusawen I (± 1750–± 1770), Karimalei (± 1770–± 1800), Sarata (± 1800–± 1810), Makunimau (± 1810–± 1830), Laukosi (± 1830–± 1850), dan Karimalei Gapada (± 1850–1897).

Raja Kamusi Kamusi Weng (Chasper, 1897–1914), pengganti Karimalei Gapada, beberapa kali menandatangani kontrak dengan Belanda, yakni *Timor Verklaring* pada 23 November 1897, *Contract Betreffende Mijnrechten* pada 22 Juli 1898, dan *Verklaring Betreffende Belastingheffing* pada 31 Agustus 1901. Raja Batulolong selanjutnya adalah Risi Bera (Alfonsus Frederik Karimalei, 1914–1937), yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 29 Agustus 1914. Menurut catatan *Regeerings Almanak,* pengesahannya baru keluar pada 27 Agustus 1915. Berikutnya, yang menjabat raja di Batulolong adalah Wilhelmus Awengkari (1937–1941). Dia disahkan kedudukannya pada 13 Juli 1938. Bersamaan dengan masa pendudukan Jepang, yang memerintah Batulolong adalah Raja Lourens (L.) Karimatei[124] (1941–1962) dengan didampingi walinya bernama Christoffel Laubela (Welem Basthian Lau Bela, 1941–1947). Ia bersama tiga raja Alor lainnya melakukan serah terima kekuasaan terhadap Jepang pada 16 Juli 1942 di Kalabahi.

V. BELAGAR

Raja-raja Belagar adalah Maka Pala Keibara (± 1855), dan Leing (Leen) Date (1856–1891). Menurut *Regeeringsalmanak*, Raja Leing Date menandatangani kontrak dengan Belanda pada 27 Februari 1854. Ia digantikan oleh Koli (1892–1895). Raja berikutnya, Salama (1896–1917), tercatat menandatangani kontrak pada 17 November 1896. Penggantinya adalah Raja Noke Salama (1917–1918). Sesudah itu Belagaar dan Pandai disatukan menjadi Kerajaan Pantar Matahari Naik. Tahir Noke, putra Noke Salama menjabat sebagai kapitan Pantar Matahari Naik antara 1946–1964.

VI. BUNGA BALI

Raja Bunga Bali pernah menerima 400 pengungsi dari Pulau Atauro (Pulau Kambing) di kerajaannya. Peristiwa ini berawal dari Perjanjian Lisabon pada 1859 yang membagi daerah kekuasaan Belanda dan Portugis di Pulau Timor. Penduduk pulau tersebut menolak kampung halamannya diserahkan pada Portugis. Mereka bersikeras bila pulau mereka hendak diserahkan pada Portugis, mereka lebih baik dipindahkan

124. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 29.

ke tempat lain. Panita Perjanjian Lisabon lalu mengadakan pertemuan dengan para raja di Alor, Pantar, dan Solor untuk membicarakan masalah tersebut. Ternyata para raja tidak dapat memberikan tanggapan atau pendapat apapun karena memindahkan begitu banyak orang bukanlah pekerjaan yang ringan. Akhirnya, Raja Bunga Bali bersedia menerima pengungsi dari Pulau Atauro. Raja memberikan perintah pada Syahbandar Imam Langko Panara untuk mengangkut mereka dan menempatkannya di Kampung Latakae, Alor Kecil.

VII. KOLANA

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Kolana

Konon leluhur Kerajaan Kolana adalah Tarusoma yang berasal dari negeri Batara. Sebelum tiba di Kolana, rombongan nenek moyang raja-raja Kolana sempat singgah di Pandai, Abui, Pancuran, Takalelang, Mademang, Maumang, dan Pureman. Di Pureman rombongan terpecah menjadi dua, kelompok utama menuju ke Tanjung Isomu dan akhirnya tiba di Kolana dan menyusun pemerintahan di sana. Raja pertama Kolana adalah Makunimau I, yang secara berturut-turut digantikan oleh Takalamakunimau, Makuingtakalamakaing, Mautuka I, Makunimau II, Mautuka II, Makunimau III, dan Mautuku III (Mau Tuku atau Maoetokoe, 1889–1914).

Raja Mautuku III menandatangani kontrak-kontrak politik sebagai berikut:

- *Timor Verklaring* pada 12 Mei 1889.
- *Contract Betreffende Mijnrechten* pada 22 Juli 1898.
- *Verklaring Betreffende Belastingheffing* pada 22 Agustus 1901.

Selanjutnya yang berkuasa di Kolana adalah Alexander Makunimau (1914–1933). Sementara itu, raja berikutnya yang bernama Christofel Makunimau (1933–1944) tercatat menandatangani *Korte Verklaring* pada 20 Juni 1914. Pada perkembangan selanjutnya, pada 1932 kerajaan ini digabungkan dengan Pureman dan Erana. Semasa pendudukan bala tentara Jepang, yang memerintah Kolana adalah Raja Markus Makunimau [125] (1944–1962). Pada 16 Juli 1942, Raja Markus Makunimau bersama tiga raja Alor lainnya mewakili penyerahan kekuasaan ke tangan bala tentara Jepang.

125. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur,* halaman 29.

b. Sistem Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan

Raja Kolana bergelar *Leri*. Ia dibantu oleh para pejabat keamanan atau panglima perang yang disebut *Kuwamumil*. Pejabat keamanan ini masih dibedakan menjadi empat golongan, yakni *Kuai Den* (pahlawan sulung), *Kwai Lik* (pahlawan adik atau penjaga dalam kerajaan), *Manokoa* (pahlawan penjaga keamanan dalam kampung), dan *Toa Koa* (penjaga keamanan luar kampung). Selain itu dikenal pula *Lomuin* yang bertugas sebagai juru bicara atau penghubung, *Gusui Aning* yang bertugas sebagai kurir, dan *Snukol Bag* dengan tanggung jawabnya dalam bidang logistik serta menerima persembahan. Rakyat Kolana dibedakan menjadi dua, yakni *Kaku Ol* (rakyat bebas) dan *Malai Kabol* (budak belian).

Suku-suku utama di Kolana adalah Kusou, Morou, Ulu Nou, Ale Rou, Seleng, Kailes dan Oi Leki[126]. Suku Kusou merupakan asal muasal raja atau penguasa Alor. Raja Alor tinggal di istana yang disebut *Barbaloing*. Perahu kerajaannya dinamakan Waiweka dan memilik layar berbentuk segitiga. Kapal ini didayung oleh 19 orang, 9 orang masing-masing di sisi kiri dan kanan serta seorang di bagian belakang.

VIII. KUI

Leluhur kerajaan Kui adalah dua orang bersaudara bernama Maleikil dan Karkil yang konon berasal dari Ende. Ketika tiba di Kui, mereka menyaksikan suku-suku di sana masih gemar berperang satu sama lain. Saat itu, suku Kuiwas dikalahkan oleh suku Murwas dan Wayang sehingga melarikan diri ke pantai dan membangun perkampungan Lerabahing. Maleikil dan Karkil kemudian berdiam di Lerabahing, tetapi berselisih dengan pemuka suku Murwas beserta Wayang. Mereka tidak bersedia menjadi bawahan kedua bersaudara tersebut. Pertikaian berhasil diatasi dan suku Murwas dan Wayang bersedia menerima status bawahan. Selanjutnya, mereka merencanakan serangan terhadap orang-orang Kuiwas. Mereka berhasil dikalahkan dan sepakat bergabung dengan Lerabahing. Gabungan suku ini lalu dikenal sebagai suku Kui Lelang Leiban. Belakangan, suku Magalwas dan Abelwas turut pula bergabung sehingga federasi mereka makin luas. Nama suku mereka berubah lagi menjadi Melangkabat. Urutan raja-raja Kui berikutnya adalah Maleilok, Gawamalei, Atamalei, Maleilok, Banla, Pasoma, Maleikili, Kinanggi, Maleilok, Pasoma, Atamalei, Maleikili,

126. Lihat *Sistem Pemerintahan Tradisional di Alor*, halaman 59.

Atamalei, Pasoma, Kinanggi, Atsom, Pasoma, Kinanggi, Banla, Gawamalei, Banla, Pasoma[127] (1855–1891), dan Tarusoma I (1891–1897).

Pengganti Tarusoma I, Raja Go Amakale (1897–1916), menandatangani kontrak politik *Verklaring Betreffende Berlastingheffing* pada 22 Agustus 1901. Sebelumnya, ia pernah pula menandatangani *Timor Verklaring* pada 23 November 1897 dan *Contract Betreffende Mijnrechten* pada 22 Juli 1898. Pada 1915, pecah perlawanan rakyat di Kui. Pasukan rakyat yang berasal dari suku Kamelelang sekonyong-konyong menyerang Larabahing, ibukota Kerajaan Kui, pada 4–5 Agustus 1915. Toko milik orang China dan istana raja turut dibakar hingga jatuh beberapa korban. Demi menumpas kerusuhan ini, Belanda terpaksa mendatangkan pasukan bala bantuan dari Kupang. Go Amakale digantikan oleh Tarusoma II (1916–1917). Raja Kui berikutnya yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 4 Juni 1918 adalah Dain Sona (Daeng Soma, memerintah 1918–1920). Selanjutnya, Raja Katang Koli (1921–1939) menandatangani *Korte Verklaring* pada 12 April 1922. Pada zaman pendudukan Jepang, yang menjabat sebagai Raja Kui adalah Banla Kinaggi[128] (1939–1946). Dia merupakan salah seorang di antara tiga Raja Alor yang mewakili penyerahan kekuasaan pemerintah Belanda kepada Jepang pada 16 Juli 1942.

IX. MUNASELI

Kerajaan Munaseli muncul karena perselisihan antara Abui, raja pertama Kerajaan Abui, dan saudara-saudaranya (lihat bagian pembahasan mengenai Kerajaan Abui pada halaman 137). Adik Abui yang bernama Muna pergi meninggalkan kakaknya dan menuju ke Pulau Pantar bagian utara, di sebuah tempat yang kemudian dinamai Tanjung Muna. Bersama para pendatang dari Jawa, didirikanlah Kerajaan Munaseli yang menjalin hubungan dengan Kerajaan Majapahit.

Kendati demikian, terdapat cerita lain mengenai seorang tokoh bernama Sultan Marku yang berasal dari Malaka. Ia beristri tujuh orang, tetapi belum dikaruniai anak. Suatu kali, Sultan Marku hendak berdagang ke Sina Pukong Jawa Pukong[129]. Oleh karena itu, dibuatnya sebuah kapal berukuran besar. Ketika pekerjaan membuat kapal dimulai, ditanamlah sebatang pohon pisang. Ternyata, saat kapal selesai dibangun, pohon pisangnya juga telah berbuah. Konon, buahnya ada tujuh. Sebelum berangkat

127. Lihat *Sistem Pemerintahan Tradisional di Alor*, halaman 55.
128. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur,* halaman 29.
129. Lihat *Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupaten Alor*, halaman 35.

berdagang, Sultan Marku berpesan agar buah pisang tersebut dibagikan kepada tujuh istrinya. Keenam istri Sultan Marku sepakat tidak membagi buah pisangnya dengan istri termuda. Mereka memakan habis seluruh pisang yang ada saat istri termuda sedang mencuci dan hanya menyisakan kulitnya saja.

Teringat pesan suaminya, istri termuda tetap memakan kulit pisang itu. Ajaibnya, ia hamil tak lama kemudian. Istri-istri lainnya menjadi iri dan berniat mencelakainya. Mereka meramu sebuah ramuan beracun yang diberikan padanya. Akibatnya, ia menjadi buta dan dibuang bersama anaknya yang disangka meninggal. Anak itu bertumbuh besar dan tatkala sedang bermain-main di sungai, ia menyaksikan benda bulat di dalamnya. Timbul keinginan mengambilnya, ia pun menyelam ke sungai, tapi benda bulat itu lenyap begitu saja. Sang anak melaporkan pada ibunya mengenai apa yang baru saja dialaminya. Ibunya mengatakan bahwa benda yang dilihatnya dalam sungai itu sebenarnya hanya bayangan saja serta menyarankan agar anak itu menengok ke atas dan di sanalah ia akan menjumpai benda yang sesungguhnya.

Ingin membuktikan perkataan ibunya, sang anak kembali ke sungai dan menengok ke atas. Benda bulat itu ternyata adalah buah kelapa. Guna memetik buahnya, sang anak memanjat pohon kelapa yang ternyata milik raja ular. Pemiliknya menjadi marah dan hendak menelan anak itu. Tanpa berpikir panjang, sang anak menancapkan panah yang dibawanya ke tubuh raja ular hingga tak berkutik lagi. Raja ular minta diampuni dan ia pun melepaskannya. Sebagai tanda terima kasih, anak itu dihadiahi ayam ajaib yang sanggup mengabulkan segala permintaan.

Ia meminta agar ibunya disembuhkan dari kebutaannya dan memang permohonan tersebut terkabul. Selanjutnya, ia minta harta kekayaan yang melimpah dan sebuah kota. Dengan demikian, kehidupannya beserta ibunya berubah drastis. Mereka tiap hari berpesta pora. Suatu ketika, Sultan Marku pulang berdagang dan menyaksikan serta mendengar keramaian di tempat tersebut. Tetapi sang anak tak mengenali ayahnya dan terjadilah perselisihan serta peperangan di antara mereka. Untungnya, Sultan Marku melihat istri termudanya yang menjelaskan duduk perkaranya. Sultan Marku menjadi marah dan hendak menghukum keenam istrinya yang jahat itu. Perahunya diseret ke darat dan tubuh keenam istrinya tersebut dijadikan alasnya sehingga hancur lebur. Putranya kemudian diberi nama Klepo Mahi, yang menjadi raja di Munaseli.

Letak Munaseli ini cukup strategis karena berada di jalur pelayaran ke Maluku atau pusat rempah-rempah di kawasan Indonesia timur. Konon, ibukota Kerajaan

Munaseli telah dilengkapi dengan istana dan benteng. Raja-raja Munaseli yang terkenal antara lain Sirang Babu, Pasombala, dan Taliwara. Ketiganya merupakan putra Klepo Mahi. Panglima perang kerajaan yang terkemuka di Munaseli bernama Mau Parra dan Pito Parra. Menurut legenda, mereka memiliki dua ekor anjing yang masing-masing dinamai Angkola dan Timur Rasung.

X. PANDAI

Menurut legeda, kerajaan Pandai didirikan oleh keturunan Majapahit bernama Lata Mauwolang. Selanjutnya, rangkaian raja-raja yang memerintah Pandai adalah Bapa Boka, Pela Boka, Salama Boka (1848–1877), dan Beng Hukung (Benhoekoe atau Benhuku, 1878–1901). Ia bersama fetor (kepala kampung) Pandai bernama Poeinarang (Puinarang) menandatangani kontrak politik dengan pemerintah kolonial pada 5 Februari 1878. Sepeninggal Beng Hukung, pemerintahan di Pandai diwakili oleh Sinoe (Sinu atau Sinung Maleng). Ia menandatangani kontrak pada 3 April 1902. Selanjutnya memerintah Raja Koliamang Wono (1911–1918), yang kelak menjadi Raja Pantar Matahari Naik. Pemerintahan di Pandai dipegang oleh seorang *rajang* (raja) dan dibantu wakil raja bergelar *tawaka*. Jabatan-jabatan lainnya adalah *marang tawaka* yang mengurusi pemerintahan keluar; *tabi tawaka* mengurusi kesenian; *diing tawaka* menangani masalah pertanian; *magang lamuli* bertanggung jawab atas urusan keamanan; *hukung* bertanggung jawab atas pengadilan; dan *beng* menangani masalah kesehatan. Pada 1918, Belagar dan Pandai disatukan menjadi Kerajaan Pantar Matahari Naik di bawah pemerintahan Koliamang Wono.

XI. PANTAR MATAHARI NAIK

Kerajaan Pantar Matahari Naik merupakan hasil penyatuan antara Kerajaan Belagar dan Pandai. Raja Koliamang Wono (1918–1926), yang sebelumnya menjabat sebagai Raja Pandai, tercatat pernah menandatangani *Korte Verklaring* pada 2 November 1918. Selanjutnya, pemerintahan Pantar Matahari Naik diwakili oleh Raja Alor, Umar Watang Nampira (1927–1956). Dengan demikian, administrasinya disatukan dengan Alor.

XII. PUREMAN

Raja-raja yang memerintah Pureman adalah sebagai berikut: Sini Mau I Laka (1480–1500), Tubul Sini Mau (1500–1530), Sini Mau II (1530–1550), Tubulau I (1550–1580), Sini Mau III (1580–1600), Tubulau II (1600–1620), Sini Mau IV (1620–1640), Tubulau III (1640–1660), Lapuimakuni (1660–1680), Tubulau IV (1680–1710), Painteri I (1710–1730), Resibera (1730–1750), Tubulau V (1750–1770), Painteri II (1770–1800), Malakari I (1800–1820), Tubulau VI (1820–1850), Molana (1850–1870), Tubulau VII (1870–1880), dan Alobana (1880–1890).

Pada 30 Oktober 1891, Raja Malakari II (Malaekarie, memerintah antara1890–1918), pengganti Alobana, menandatangani kontrak politik dengan Belanda berupa *Timor Verklaring*. Berikutnya pada 13 Juni 1900, raja menandatangani *Contract Betreffende Mijnrechten* dan *Verklaring Betreffende Belastingheffing* pada 31 Agustus 1901. Warga Maupui yang terletak di Pureman pernah berontak pada 1915 karena menolak membayar pajak dan bekerja rodi. Letnan Croo yang memimpin pasukan Belanda mencoba menyelesaikan masalah itu secara damai, tetapi gagal. Perlawanan yang dipimpin oleh Langsalimau tetap berlanjut karena ia mendapatkan dukungan para kepala kampung. Raja Pureman berikutnya adalah Besi Lakoe (1918–1927) yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 27 Desember 1918. Kerajaan Pureman kemudian digabungkan dengan Kolana.

C. KERAJAAN-KERAJAAN DI PULAU FLORES

I. ENDE

Kerajaan ini merupakan salah satu di antara lima negeri di kawasan Ende-Lio. Menurut salah satu legenda yang beredar di kalangan rakyat, leluhur penguasa Ende adalah seorang pria bernama Roru dan wanita bernama Modo yang turun dari langit. Mereka menikah dan dikaruniai tiga orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki. Anak-anak inilah yang selanjutnya melahirkan raja-raja di Ende. Selanjutnya, masih ada mitos lain mengenai Sanga Kula yang dianggap sebagai penduduk pertama Ende. Ia menikah dengan seorang putri dari seberang yang terapung-apung dalam daun lontar.[130] Negeri ini pernah diperintah oleh Raja Baba Pandi, yang menandatangani

130. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 137.

Korte Verklaring pada 16 April 1861. Raja-raja lain yang memerintah Ende adalah Baba Kamapo, Baba Kalaro Dando, dan Pera Ringgo[131].

Menurut silsilah yang termuat dalam manuskrip Hans Hägerdal, silsilah leluhur raja-raja Ende adalah sebagai berikut: Sanga Indernaga–Sangar Dewa–Jawa–Jari Jawa (raja Ende pertama). Rangkaian penguasa Ende berikutnya adalah Raki Nggera, Marhaba, Ngi-i Ramo, Muli, Arubusman (–1851), Inderdewa, Arubusman (1861–1895), dan La Usuf Pua Natek (La Usif, La Yusu, atau Pua Notek, 1896–1908). Selanjutnya, pada 1900, Raja La Usuf Pua Natek[132] tercatat pernah menandatangani beberapa kontrak politik dengan Belanda, yaitu

- *Timor Verklaring* pada 30 Agustus 1896
- *Contract Betreffende Mijnrechten* pada 10 Agustus 1900
- *Verklaring Betreffende Belastingheffen* pada 3 September 1901

Kerajaan Ende pernah diserang secara mendadak oleh Tanarea pada 3 Juli 1907. Dalam serangan tersebut, sekitar 1.000 rumah habis terbakar. Sementara itu, yang tersisa hanya 2 bangunan masjid serta tempat kediaman raja dan raja muda. Korban jiwa yang jatuh sebanyak 50 orang. Sekitar 14.000 orang berlarian mencari tempat perlindungan. Para pedagang asing yang terdiri dari orang China dan Melayu dengan jumlah keseluruhan 90 orang mengungsi ke Waingapu. Akibat serangan itu, toko-toko milik para pedagang China mengalami kerugian sebesar fl.300.000,-. *Posthouder* (Wakil pemerintah) Belanda yang bernama Rozet selamat dalam serangan itu, demikian pula dengan agen kapal Belanda, Charon. Akibatnya, Belanda memutuskan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kapten H. Christoffel guna mengamankan Flores. Setelah Raja Pua Notek, yang berkuasa di Ende adalah Harun (1908–1909), Pua Meno Arubusman (1909–1923) yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 31 Mei 1917, Busman Abdurrahman (1925–1947), dan Haji Hasan Arubusman (1949–1962).

II. KANGAE

Leluhur para penguasa Kangae konon berasal dari Siam Umalaya, yang kemudian berkelana ke Buju Boja Bara Laka, dan Wolon Mapar Gahar[133]. Ketika itu, terjadi bencana yang menyebabkan Rae Raja mengungsi dari Bangguala ke Bangladesh timur.

131. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 72.
132. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 273.
133. Lihat *Sistem Kemasyarakatan/ Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupaten Sikka*, halaman 33.

Rombongan berlayar melalui Kamboja dan Malaka hingga akhirnya tiba di tempat terang benderang, yang ternyata adalah *Wolon Mapar Gahar*, Pulau Sumatera. Mereka kemudian menetap di sana. Sementara itu, Raja Kangae pertama, Moan Bemu Aja dipercaya sebagai anggota pasukan Raja Balaputradewa dari Sriwijaya yang berniat meluaskan wilayah kerajaannya ke kawasan Indonesia timur.

Rombongan yang terdiri dari 70-80 orang itu berlayar ke Binaya Tena Tana Gorang Serang. Namun, mereka mengalami bencana alam di Binaya sehingga harus meninggalkan kawasan tersebut. Bemu Raja dan pengikutnya tiba di Soda Otang Watu Milok. Di sana ia berjumpa dengan Moan Puan Tana Puan Tawa Tana Moan Bogar beserta istrinya, Dua Pale Plapeng. Pasangan penguasa setempat itu memiliki putri tunggal bernama Dua Leha Ganu Ledan, yang dinikahkan dengan Bemu Aja. Selanjutnya, Bemu Aja diangkat sebagai Raja Kangae pertama. Semasa pemerintahannya, dibentuklah 11 wilayah *hoak hewer* (komunitas adat) yang masing-masing dipimpin oleh *Tana Puang Gete*, yakni Kringa, Weran, Wigete, Doreng, Hewakloang, Wolokoli, Ili, Wetakura, Nele, Kotin, dan Nita[134]. *Tana Puang Gete* merupakan pejabat pemerintahan setempat yang bertanggung jawab mengatur serta menyelesaikan permasalahan adat dan kemasyarakatan. Semenjak zaman Bemu Aja, Kerajaan Kangae telah memiliki pusaka kerajaan, antara lain terdiri dari *gajak ahang* (geraham gajah), *deot* (arca Buddha), *piring sina tawu laka* (piring, mangkuk, dan cangkir buatan China), serta tongkat lambang kekuasaan bernama Gai Koeng Ata Riwun Enak Legen Ata Ngasun.

Urutan Raja Kangae berikutnya adalah Godo Eng Gawe, Ria Ian Bangu Tara Bogar, Sira Ria Rapa, Sia Sawu Nata Raga, Dea Manu Moan Lesu, Keu Lalan, Dara Bogar Jeu Jenga, Sasa Lai Gasang, Desa Mau Bago, Leti Gusi Bara Laka, Ehak Wuli Laka, Gesang Pari Neang, Lai Puan Garang Igor, Sugi Sao Bata Warat, Toing Tala, Padu Laju, Koro Kelan Mada Lelo, Pule Plaju Loreng Bala, Nago Raga Iga, Sia Naga, Laju Lodan Gada Goleng, Karung Koda Goleng, Sawu Beo Bapa Goleng, Sia Sona Kakun Goleng, Sua Sia Daru Mada, Sareng Balik, Bewat Bete Baring Bala, Hing Hila Hitong, Keu Iku, Leing Lusi, Rang Bata Sanggolo, Koro Watu Kelan, Mitan Koro, Bapa Li Nutur, Goleng Bapa, Keu Nago (1862–1902), dan Nai (Na'e) Juje (1902–1925). Raja Kangae terakhir, Nai Juje, tercatat menandatangani *Korte Verklaring* masing-masing

---

134. Lihat *Sistem Kemasyarakatan/ Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupaten Sikka,* halaman 37.

pada 9 Desember 1902 dan 8 Agustus 1907. Sewaktu Raja Nai Juje memasuki usia pensiunnya, Kerajaan Kangae dihapuskan pada 1925 dan digabungkan dengan Sikka.

III. KEO

Keo pernah diperintah oleh Raja Moewa Tanga (1913–1920) yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 2 Maret 1918. Ia digantikan secara berturutan oleh Goa Tunga (1920–1930) dan Dato Bali (1930–1931). Kerajaan Keo kemudian disatukan dengan Nage dan membentuk kerajaan gabungan Nage-Keo.

IV. LARANTUKA

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Larantuka

Cikal bakal Kerajaan Larantuka adalah Paji Golo Arakiang yang menikah dengan Watuwele. Menurut salah satu versi cerita, pada zaman dahulu di Gunung Ilemandiri hiduplah dua orang kakak beradik, yakni Lenurat dan saudarinya bernama Watuwele. Anehnya, sekujur tubuh mereka ditumbuhi bulu dan memiliki kuku yang panjang. Konon, Lenurat dilahirkan di Gunung Ilemandiri dan pada rambut di sekujur tubuhnya bersarang ular beserta kadal. Mereka menyambung hidupnya dengan berburu binatang di hutan. Suatu kali, Watuwele pergi ke arah timur dan menetap di Woto, sedangkan saudaranya Lenurat berdiam di Likat Lamaboting Awo Lama Bunung.

Pada masa itu, belum ada manusia di kawasan tersebut. Namun, belakangan di daerah pantai muncul dan menetap kaum pendatang yang berasal dari suku Paji. Mereka mulanya belum mengetahui keberadaan Lenurat dan Watuwele. Suatu malam, salah seorang gadis dari suku Paji bernama Hadu Boleng Toniba Duli melihat api di puncak gunung. Ia mengutus saudaranya bernama Paji Golo Arakiang untuk menyelidikinya. Ternyata di sana ia menjumpai tungku api yang telah padam beserta onggokan abu dan arang. Untuk menghindari bahaya, Paji Golo Arakiang memanjat sebatang pohon. Tidak berapa lama kemudian, Watuwele pulang dari berburu. Segera ia menyadari kehadiran orang asing dan melihat Paji Golo Arakiang yang sedang berada di atas pohon. Watuwele berjanji tidak akan menyakiti Paji Golo Arakiang sehingga ia bersedia turun dari pohon itu. Mereka kemudian menyalakan api dan memanggang binatang buruan yang diperoleh Watuwele. Paji Golo Arakiang menyajikan arak yang dibawanya. Karena minum terlalu banyak, Watuwele menjadi mabuk dan tertidur

lelap. Kesempatan ini dipergunakan oleh Paji Golo Arakiang untuk mencukur rambut di sekujur tubuh Watuwele sehingga ketahuan bahwa ia adalah seorang wanita. Mereka akhirnya menikah dan menjadi leluhur raja-raja Larantuka. Sementara itu, Lenurat menikah dengan seorang gadis Paji bernama Hadu Boleng Toniba Duli dan menurunkan penduduk Larantuka. Meskipun demikian, masih ada versi cerita lain yang meriwayatkan bahwa nenek moyang raja-raja Larantuka adalah burung garuda[135] dari Gunung Ilemandiri.

Paji Golo Arakiang memiliki anak bernama Padu Ile Pook Wolo, Watowele Dole, Kudi Lelenbalu, dan Lopapan Doro Duli. Padu Ile Pook Wolo berputra Sira Demon, yang merupakan Raja Larantuka pertama. Selanjutnya, raja-raja yang memerintah Larantuka adalah Patigolo Lobalu, Mauboli, Sirapain, dan Siranapan. Siranapan memiliki dua orang putra yang bernama Igo dan Enga. Igo menjadi Raja Larantuka keenam. Ia digantikan secara berturut-turut oleh Adowurin dan Adobala[136].

Raja Larantuka kesembilan yang menggantikan Adobala, Ola Ado Bala, merupakan Raja Larantuka pertama yang menganut agama Katolik dan dibaptis dengan nama Don Fransisco Ola Ado Bala Diaz Vieira de Godinho (1645–1680) pada 1665[137]. Ia merupakan penguasa Larantuka yang mengawali upacara prosesi peletakan tongkat kerajaan berkepala emas pada patung Bunda Maria Reinha Rosari saat hari Jumat Agung. Upacara ini melambangkan bahwa penguasa Larantuka yang sebenarnya adalah Bunda Maria Reinha Rosari, sedangkan para raja Larantuka hanyalah wakilnya di muka bumi. Meskipun demikian, menurut sumber lainnya, penguasa Larantuka yang pertama dibaptis adalah Constantino Payao (wafat 1661), yang menjadi wakil raja selama Ola Ado Bala belum dewasa. Tongkat kerajaan berkepala emas itu diterima dari Constantino pada 1661. Masih menurut sumber yang sama, Ola Ado Bala dibaptis pada 1635[138].

Tatkala Raja Usi Nenno mewarisi singgasana dengan gelar Don Lorenzo II (1882–1910) pada 1882, ia memulai lagi upacara yang telah ditetapkan leluhurnya itu sehingga Larantuka secara resmi dikenal sebagai "Kota Reinha Rosari" dan menyatakan Bunda Maria sebagai Ratu Kerajaan Larantuka pada 8 September 1886. Rangkaian raja-raja Larantuka setelah Raja Don Fransisco Ola Ado Bala Diaz Vieira de

135. Garuda merupakan burung mitologis yang penting dalam agama Hindu. Oleh karenanya, cerita rakyat ini mencerminkan pengaruh Hindu yang dalam hal ini kemungkinan diwakili oleh Kerajaan Majapahit.
136. Lihat *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor*, halaman 205-206.
137. Menurut buku *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 127, raja dibaptis pada 1645 dengan nama baptis Don Constantino.
138. Lihat *"Be my Witness to the Ends of the Earth!"*, halaman 155.

Godinho hingga Don Lorenzo II adalah sebagai berikut: Don Gaspar I (1680–1750), Don Manuel (1750–1812), Don Andre I (± 1812), Ratu Dona Lorenza Gonsalvi (± 1820), Don Lorenzo I (± 1830–1849), Don Andre II (1849–1861), Don Gaspar II (1861–1877), Don Domingo (1877–1882), dan Don Lorenzo II (Lorenzo Usi, memerintah 1882–1910). Sebagai catatan, Don Gaspar II merupakan Raja Larantuka yang menandatangani *Lange Verklaring* dan *Akte van Bevestiging en Verklaring* bersama raja-raja lainnya pada 28 Juni 1861.

Raja Don Lorenzo II melakukan perlawanan terhadap Belanda pada 1901. Namun, Belanda berhasil mengalahkannya dan menawan raja serta mengasingkannya ke Yogyakarta, tempat ia wafat pada 1910. Sebagai penggantinya, diangkat kerabat raja yang bernama Don Luis Blantaran de Rozari (1910–1912). Semasa pemerintahannya, Belanda menyodori kontrak politik berupa *Contract Betreffende Mijnrechten* yang ditandatangani raja pada 16 Desember 1912. Namun, raja ini hanya sempat berkuasa dua tahun saja dan setelah itu meninggal. Oleh karenanya, putra Raja Don Lorenzo yang bernama Don Ohannus Servus Diaz Vieira de Godinho (1912–1919) diangkat sebagai penguasa Larantuka yang baru pada 1912. Ia diwajibkan menandatangani *Korte Verklaring* pada 17 Januari 1912. Raja-raja Larantuka berikutnya hingga masa era kemerdekaan adalah Don Antonio Blantaran de Rozari (1919–1941) dan Don Lorenzo III (1941–1962).

J.J. Hangelbroek yang pernah menjadi kontrolir di Larantuka mencatat bahwa Don Antonio Blantaran de Rozari merupakan pejabat pengganti raja sebelumnya, yang dipaksa turun tahta. Waktu itu, dua orang putra raja masih di bawah umur sehingga Don Antonio yang mengambil alih tampuk pemerintahan. Meskipun demikian, pada 1937–1938 mereka telah dewasa dan Don Antonio bermaksud menyerahkan singgasana pada Don Lorenzo Diaz Vieira de Godinho (Don Lorenzo III), putra tertua raja sebelumnya. Dia mulai memerintah pada 1938. Di tahun yang sama, Don Lorenzo menikahi seorang putri Sikka. Masih berdasarkan catatan Hangelbroek, raja berusia muda itu tidak mempunyai tempat kediaman bagi dirinya dan istrinya. Oleh karenanya, dihimbau agar rakyat dan para penguasa bawahan menyumbangkan tenaga ataupun bahan bangunan[139].

139. Lihat *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920–1942*, halaman 150–151.

b. Pengungsian Orang-orang Portugis ke Larantuka

Ketika Kerajaan Gowa Tallo mengalami kekalahan dan dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada 1667, Para pedagang Portugis yang beragama Katolik dipaksa meninggalkan Makassar. Mereka memilih Larantuka sebagai tujuan utama pengungsian mereka. Dengan segera terjadilah arus pengungsian besar-besaran ke kawasan tersebut. Di antaranya terdapat seorang pedagang kaya dan berpengaruh bernama Fransisco Vieira de Figueiredo. Ia menjalin persahabatan yang erat dengan Sultan Hasanuddin dari Makassar dan bahkan menikah dengan saudara perempuan sultan yang telah menganut agama Katolik bernama Dona Jasinta da Costa. Setelah istri pertamanya meninggal, ia menikah lagi dengan saudari sultan lainnya yang bernama Dona Catarina de Noronha.

Kaum pengungsi keturunan Portugis ini kemudian menikah dengan penduduk asli Larantuka dan membentuk salah satu elemen penting masyarakat di sana. Salah satu jejak bagi pengaruh Portugis di kawasan tersebut adalah dapat dijumpainya nama-nama keluarga Portugis, seperti da Costa, da Hornay, da Silva, da Cunha, da Rosari, Parera, de Santo, da Crus, dan lain sebagainya. Kedatangan kaum pengungsi Portugis ini juga berpengaruh terhadap perkembangan gereja Katolik di Larantuka.

c. Sistem Pemerintahan Kerajaan Larantuka

Kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja dengan dibantu oleh wakilnya yang disebut *raja bantu*. Selain itu, ia masih dibantu pula pejabat bidang kemiliteran yang terdiri dari kepala perang (bertanggung jawab atas angkatan darat) dan kepala laut (bertanggung jawab atas angkatan laut). Ada pula dua pejabat bergelar kapitan, yang berasal dari keluarga dekat raja, dan dua pejabat lagi bergelar *kapitein*, yang berasal dari keluarga Fernandes. Raja, *raja bantu*, dua kapitan, dan dua *kapitein*, ini membentuk suatu dewan kerajaan. Mereka mengambil keputusan setelah mendengarkan masukan dari 5 kepala suku (*paoe suku lema*).

Wilayah Kerajaan Larantuka dibagi atas 10 daerah yang disebut *kakang*. Sebutannya adalah Demon Lewo Pulo atau Kakang Lewo Pulo, dan terdiri dari:

1. Pamakayo (Lewolein)
2. Lewoingu (Lewolaga)
3. Mudakaputu
4. Lewo Leba
5. Tana Boleng

6. Horowura
7. Lama Lera
8. Wolo
9. Lewo Tobi
10. Lewo Tala

Raja Larantuka sendiri bergelar Raja Koten Demon Lewo Pulo. Sementara itu, wakilnya atau *raja bantu* bergelar Raja Kelen Demon Lewo Pulo.

V. LIO dan LISE

Merupakan salah satu negeri di kawasan Ende Lio. Di negeri ini, pemerintahan dibagi dalam berbagai tanah persekutuan dengan para *mosalaki* atau *ria bewa* sebagai pemimpin tertingginya. Orang-orang Lio hidup di kampung-kampung yang merupakan kelompok kesatuan adat dan kekerabatan serta menjadi inti suatu tanah persekutuan. *Mosalaki* merupakan para pemimpin yang mengemban kekuasaan dalam bidang politik, sosial, dan keagamaan.

Di Lise terdapat lima persekutuan adat, yang disebut *Lise Detu*, *Lise Bora*, *Lise Gonde*, *Lise Kura*, dan *Lise Lande*. Lebih jauh lagi, di *Lise Detu* sendiri masih dibagi pula menjadi lima *kunu* (persekutuan) yang disebut *Lise Kunu Lima*, yakni *Kunu Lise*, *Kunu Mbuli* (*Mbuli Wara Lau* dan *Mbuli Wara Gela*), *Kunu Moni*, *Kunu Wolojita*, dan *Kunu Nggela*[140]. Pada 1924, Lise Kunu Lima, Ndona, dan Boafeo disatukan di bawah Swapraja Lio yang dipimpin oleh Raja Pius Rasi Wangge. Dia menandatangani *Korte Verklaring* masing-masing pada 21 Mei 1917 dan 26 Desember 1925. Raja Pius Rasi Wangge pernah dituduh terlibat dalam suatu pembunuhan. Oleh karenanya, ia dijatuhi 10 tahun hukuman pengasingan ke Kupang, namun diam-diam berhasil kembali ke Lio.

Perlawanan terhadap Belanda kemudian dilancarkannya dengan dukungan penduduk Kampung Wonolele. Belanda terpaksa mengerahkan beberapa ratus pasukannya guna memadamkan pergolakan ini. Bahkan kepala Pius Rasi Wangge saat itu dihargai fl.100,-. Kampung Wonolele lalu dibakar dan diluluhlantakkan oleh Belanda. Namun, Pius Rasi Wangge dapat meloloskan diri. Dengan licik Belanda menyandera keluarga raja dan melontarkan ancaman bila Pius Rasi Wangge tidak

140. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 138.

bersedia menyerahkan dirinya, mereka semua akan ditembak mati. Ternyata, tidak lama kemudian Jepang menduduki Lio sehingga Belanda tidak sempat menangkap mantan Raja Lio ini. Setelah Jepang menyerah kalah dan Belanda menduduki Lio kembali dengan membonceng tentara Sekutu, barulah Pius Rasi Wangge dapat ditangkap serta dijatuhi hukuman mati di Kupang. Sepeninggal Raja Pius Rasi Wangge, yang berkuasa di Lio adalah Johan Christiaan Rambing (1940–1942) dan Markus Kunu Nduri (1947–1956).

VI. MANGGARAI

a. Cikal Bakal Berbagai Kerajaan di Manggarai

Kerajaan di kawasan Manggarai, Nusa Tenggara Barat, sebenarnya terdiri dari beberapa kerajaan kecil yang juga disebut *adak*, seperti Todo, Cibal, Pongkor, Bajo, dan lain sebagainya. Cerita hikayat menghubungkan cikal bakal Kerajaan Todo dengan seorang tokoh dari Minangkabau bernama Dato Mashur (terkadang juga disebut Empo atau Karaeng Mashur). Tokoh ini meninggalkan kampung halamannya di Pagarruyung karena terlibat perselisihan dengan saudara-saudaranya mengenai siapa yang pantas menjadi raja di sana. Akhirnya, saudara mereka yang bungsu dinobatkan menjadi raja sehingga Dato Mashur beserta pengikutnya memutuskan untuk pergi mengembara. Ia disertai oleh saudara lelakinya bernama Mohametali, saudara perempuannya bernama Kembang Emas, juragan perahu bernama Perkita Jermia, dan awak kapal lainnya.

Pada mulanya, mereka merantau ke arah timur, menuju ke Kerajaan Majampait (Majapahit) karena Dato Mashur masih kerabat penguasa kerajaan tersebut. Oleh penguasa Majapahit, Dato Mashur diwarisi berbagai pusaka, seperti panji segiempat berwarna kuning dengan gambar kapal layar mengarungi samudera, panji kuning segitiga bergambar bulan bintang, serta dua bilah pedang. Makna penganugerahan pusaka-pusaka itu adalah pemberian restu bagi Dato Mashur untuk menguasai dan mengarungi lautan di timur Majapahit. Rombongan akhirnya mendarat di Wareloka, namun terpaksa mengungsi ke daerah pendalaman karena berjangkitnya wabah penyakit di sana.

Belakangan, rombongan ini terpecah menjadi tiga, rombongan pertama pindah ke pemukiman Manong, rombongan Perkita Jermina pindah ke Kilor, dan rombongan Dato Mashur berpindah ke Poco Weri Ata. Rombongan Dato Mashur dengan giat membuka hutan di daerah itu guna dijadikan tempat pemukiman dan areal pertanian.

Dato Mashur jatuh cinta dan menikah dengan gadis setempat bernama Rewung Ngoel. Oleh mertuanya, Mashur diajak pindah dari tempat tersebut, namun dia tolak karena ingin mendirikan tempat pemukimannya sendiri. Pada perkembangan selanjutnya, Mashur menemukan kawasan yang cocok dengan keinginan hatinya dan menamakannya Todo Koe. Tempat pemukiman ini lalu agak bergeser letaknya ke arah barat dan disebut Todo saja. Inilah asal muasal Kerajaan (*Adak*) Todo.

Mashur mempunyai empat orang putra bernama Kraeng Ra Ratung Masa, Kraeng Wakelaut (Wakelau), Kraeng Hormat, dan Kraeng Selatan. Kraeng Ra Ratung Masa kemudian menjadi raja pertama Todo dengan gelar Kraeng Lolo Bali. Sementara itu, putra-putra Mashur lainnya melakukan ekspansi perluasan wilayah dan berhasil menaklukkan beberapa kerajaan-kerajaan lainnya. Untuk memperkuat pertahanan Todo, dibangunlah berbagai benteng, seperti di Pau Wae, Pa'ang Raci, Wae Kukur, Golo Nawang, dan Pongkor. Kerajaan Todo lalu mengadakan persekutuan dengan Pongkor sehingga terbentuklah kerajaan kembar Todo Pongkor (seperti Kerajaan Gowa Tallo di Sulawesi Selatan). Raja Todo lebih banyak memegang urusan spiritual (magis), sedangkan Raja Pongkor mengurusi masalah pemerintahan kerajaan.

Kraeng Ra Ratung Masa digantikan oleh Ilang, putra Kraeng Wakelaut. Ia digantikan oleh Ilang Randut, cucu Kraeng Hormat. Penggantinya adalah Tuluk, putra Ilang Randut. Raja-raja Todo selanjutnya adalah Mbohong (putra Tuluk), Paku (saudara Mbohong), Bale (Pahu, putra Mbohong), Taluk (putra Paku, 1901–1909), dan Tamur (1909–1921). Putra Raja Tamur bernama Aleksander Baruk yang kelak menjadi kepala Swapraja Manggarai tercatat menuntut ilmu di *Schakelschoo*l, Endeh[141]. Pada masa pemerintahan Raja Ilang Randut, tepatnya pada 1729, terjadi pertempuran antara Todo dan Cibal. Ketika itu pasukan Cibal hendak menghancurkan Mbaru Niang Dangka Todo (istana Kerajaan Todo), yang ketika itu masih berbentuk seperti rumah gadang Minangkabau. Raja Ilang Randut melarikan diri dengan tergesa-gesa tanpa sempat membawa serta istrinya, yang ketika itu bersembunyi di bawah palungan babi. Pasukan Cibal hendak membakar Niang Dangka tetapi gagal. Mereka lantas membujuk istri Raja Ilang Randut memberitahukan rahasia bagaimana membakar Niang Dangka dengan janji bahwa dirinya akan dibebaskan. Ternyata cara membakar Niang Dangka adalah dengan membungkusnya menggunakan kain putih. Setelah istana terbakar, istri Raja Ilang Randut malah dilemparkan ke dalam api yang berkobar-

141. Lihat *Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial 1915–1950*, halaman 261.

kobar. Ia lantas mengutuk pasukan Cibal dan mengatakan bahwa mereka kelak juga akan dikalahkan oleh kerajaan lain. Kutukan ini terpenuhi tiga puluh tahun kemudian, atau tepatnya tahun 1760, Cibal dikalahkan oleh Papu dengan bantuan Bima[142].

Leluhur Kerajaan Cibal adalah seorang pendatang dari Turki bernama Tamelo. Ia konon mendarat di Nanga Rawa. Setelah beberapa kali berpindah tempat kediaman, ia menetap di Mando Sawu. Tamelo menikah dengan seorang putri setempat bernama Jelmone dan dikaruniai dua orang anak bernama Tekele dan Tekelau. Tekele menurunkan seorang tokoh bernama Rendong Mataleso, yang menjadi leluhur raja-raja Cibal. Rendong Mataleso memiliki putra-putra bernama Mubla, Ingkal, Paju, Longko, Wucur, Poca, Kamping, dan Maja. Paju menjadi *dalu* (raja) Cibal berikutnya. Selanjutnya Cibal diperintah oleh empat putra Paju, yakni Paja, Pangge Tande, Gande Ame Rambe, dan Pasat. Kemudian, Cibal diperintah bersama oleh Dapang Lando Kakor Nalo Holes dan Touk Ame Tara. Rangkaian para *dalu* yang memerintah Cibal selanjutnya adalah Ponjung Ame Gater, Ugal Ame Sumpak, Ngampot, Bako, dan Lambe (±1915).

Silsilah Kerajaan Lambaleda merunut kepada seorang tokoh bernama Mbula. Kerajaan Riwu merunut kepada tokoh bernama Ingkal. Longko merupakan cikal bakal Kerajaan Carep. Wucur dianggap sebagai leluhur Kerajaan Ngkaer. Poca merupakan nenek moyang Kerajaan Desu. Kerajaan Sita memiliki leluhur bernama Kamping. Sementara itu, seorang tokoh bernama Maja dianggap sebagai cikal bakal Kerajaan Kolang atau Torok. Demikianlah nama-nama leluhur atau cikal bakal berbagai kerajaan di kawasan Manggarai. Masih ada lagi Kerajaan Bajo yang didirikan oleh para pendatang dari Mamboro, Sumba. Sumber pertama, menyebutkan bahwa Raja Bajo pertama adalah Mesa (Ama Keka), yang digantikan secara berturut-turut oleh Lali, Kota, Bagung, Rappang, Jamaha, Mage (–1926), dan Hasa (1926–1930). Selain itu, masih ada daftar raja-raja Bajo yang agak berbeda, yaitu Raru (pendatang dari Sumbawa), Benda, Keka, Nggesu, Bagung, Gelak, Rapang Jumahan Mage, dan Hassan.

b. Perkembangan Kerajaan Manggarai

Pada 1626, Kerajaan Gowa Tallo melakukan ekspedisi militer ke kawasan Nusa Tenggara. Dengan kekuatan 400 kapal perang bersenjatakan meriam, Raja Gowa keempat belas, I Mangngarangngi Daeng Manra'bia yang bergelar Sultan Alaudin

---

142. Lihat *Ben Mboi: Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja,* halaman 23.

(1593–1639) beserta perdana menterinya, Karaeng Matoaya (merangkap sebagai Raja Tallo), berhasil menanamkan hegemoninya di kawasan Manggarai. Ekspedisi ini juga disertai dengan penyebaran agama Islam di bawah pimpinan ulama terkenal bernama Dato ri Bandang asal Minangkabau. Peristiwa ini merupakan awal mula pengaruh Makassar di Manggarai. Kerajaan Gowa menempatkan wakilnya di Reo, sedangkan Raja Tallo yang menjadi perdana menteri Raja Gowa mengendalikan langsung pemerintahan yang berada di bawah pimpinan para *dalu* di Manggarai. Bukti lain pengaruh Makassar ini adalah pendirian Kerajaan Sepang oleh seorang pangeran dari Gowa. Kerajaan ini berpusat di desa tua Jemali dan Langke Ngandong. Seorang saudagar keturunan Makassar bernama Ankoda Salee berhasil memonopoli perdagangan budak di Manggarai. Bahkan, ia mengharuskan penduduk asli menyerahkan budak kepadanya.

Setelah pudarnya pamor Kerajaan Gowa Tallo akibat kekalahannya terhadap VOC pada 1667, Kerajaan Bima dari Sumbawa Timur bangkit menguasai Manggarai utara dan menempatkan beberapa pejabat sebagai wakil sultan di Reo. Para pejabat Bima yang ditempatkan di Reo, pusat kekuasaan Bima di kawasan Manggarai, mencatat mengenai wilayah kekuasaan Bima di pulau tersebut dalam bahasa Melayu. Berdasarkan laporan itu, diketahui keberadaan suatu kerajaan pribumi Manggarai yang beribu kota di Cibal, Flores Barat bagian tengah. Mereka melaporkan pula bahwa pada kurang lebih pada 1666, Makassar mencoba menguasai bagian selatan Flores Barat. Penduduk di sana dikatakan telah banyak menganut agama Islam berkat kehadiran pada pendatang Minangkabau.

Pada 1762, Kerajaan Bima berhasil mengusir orang Makassar dari Bima bagian selatan dan menaklukkan pula Kerajaan Manggarai asli yang berpusat di Cibal. Saat itu, Sultan Abdul Kadim (1751–1773) dari Bima memimpin sendiri ekspedisi militer yang dilancarkan pada 26 Oktober 1762 guna menegakkan hegemoni Bima di sana. Pada kesempatan itu, berhasil ditaklukkan beberapa pembesar dan petinggi Manggarai, seperti Kraeng Baloe, Daeng Makuli, Daeng Memorul, Papu Daeng Mangimbang, dan Daeng Melajar. Kendati demikian, Bima tidak pernah menjadikan Manggarai sebagai jajahannya secara langsung. Setelah penaklukan usai, sultan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan aturan adat. Sebagai tindak lanjut, pada 1783 diadakan perjanjian antara Bima dengan para *dalu* di Manggarai, yakni Todo, Cibal,

Lelak, Leda, Riwu, Ranggatui, Rangga Kuta, Sita, Ruteng, Danggia, Ragu, Bajo, Munti, Wuntu, Longgo, dan Kampu.

Agar kekuasaan Bima makin kokoh di Manggarai, Sultan Abdul Hamid dari Bima menetapkan aturan-aturan sebagai berikut pada 17 April 1789:

- *Dalu* Cibal dan Leda dilarang melakukan hubungan perniagaan dengan pihak manapun selain Bima.
- Seluruh pemimpin *dalu* di Manggarai tak diperkenankan menjatuhkan hukuman tanpa sepengetahuan wakil Sultan Bima di Reo.
- Seluruh *dalu* tak boleh mengistimewakan orang-orang Bugis dan Makassar.
- Rakyat Manggarai dilarang membuat senjata berat.
- Rakyat Manggarai tidak diperkenankan berlaku tidak hormat atau menghina putra Sultan Bima ataupun pejabat Bima yang ditempatkan di sana.
- Orang Bima, Bugis, dan Makassar yang telah menikah dengan penduduk asli tidak diperkenankan tinggal di pedalaman, melainkan diwajibkan pindah ke daerah pesisir, seperti Reo, Pota, Bari, dan lain sebagainya.

Semenjak permulaan abad 19, kekuasaan Bima di Flores mulai mengalami kemunduran, terutama akibat letusan Gunung Tambora pada 1815. Kekuasaan Bima atas Manggarai tidak sepenuhnya diterima dengan tangan terbuka oleh para pemimpin Manggarai. Kerap terjadi perlawanan terhadap Bima yang dilakukan para *dalu*, seperti Todo, Bajo, dan Leda. Bahkan dalam salah satu perlawanan, seorang pejabat Bima terbunuh dan dimakamkan di Riung. Akhirnya dengan bantuan Belanda, Manggarai berhasil menghalau seluruh orang-orang Bima dari negerinya. Tentu saja, bantuan yang diberikan terhadap Manggarai itu tidaklah cuma-cuma dan harus dibayar dengan penandatanganan kontrak politik antara raja-rajanya dengan Belanda yang berarti pengakuan kedaulatan Belanda atas negeri mereka. Demikianlah, mulai tahun 1907, Manggarai menjadi bagian Hindia Belanda.

c. Perlawanan Terhadap Belanda di Manggarai

Bersamaan dengan masuknya pengaruh Belanda itu, timbul perlawanan yang dipimpin oleh Kraeng Motang Rua. Untuk memadamkan pemberontakan, pada 18 Oktober 1907 pemerintah kolonial mengutus Kapten H Christoffel dan Letnan G.D. Spander dengan dibantu oleh Letnan Saragouw serta Saymina memimpin pasukan yang berjumlah kurang lebih 50 orang. Mereka berangkat dari markas pasukan Belanda

di Ende. Pasukan mendarat di Mborong dan pada 19 Oktober 1907 dan melanjutkan perjalanannya ke Ruteng, ibukota Manggarai. Tujuan ekspedisi militer adalah menangkap Kraeng Beo Ame Enggong dan Kraeng Wanggur yang dianggap sebagai tokoh pemberontakan. Karena serangan Belanda yang mendadak ini, Kraeng Beo Ame Enggong berhasil ditangkap oleh Belanda. Namun, karena terbukti tidak bersalah, tokoh ini dilepaskan kembali. Pasukan Belanda yang sudah dikirimkan ke Manggarai kemudian melanjutkan tugasnya menangkap Kraeng Motang Rua yang masih melakukan perlawanan. Kendati demikian, pasukan Belanda yang dipimpin Manafe Tallo mengalami kekalahan. Karenanya, Belanda mengirimkan ekspedisi kedua pada 15 Juni 1908 dengan kekuatan 120 orang yang didukung oleh 60 orang tahanan. Pada pertempuran yang terjadi di Copu, pasukan Kraeng Motang Rua giliran mengalami kekalahan. Kendati demikian, Kraeng Motang Rua masih tidak sudi menyerah kepada Belanda dan meneruskan perlawanan. Karena itu, Belanda menggunakan akal licik dan berhasil menangkapnya. Kraeng Motang Rua lalu diasingkan ke Kupang pada 1908, dan selanjutnya dipindahkan ke Bima dan Nusakambangan. Ia dipindahkan lagi secara berturut-turut ke penjara Cipinang–Jakarta (1912), Palembang (1919), dan Aceh (1923).

d. Pembentukan Kerajaan atau Swapraja Manggarai

Agar tatanan pemerintahan di Manggarai berjalan lebih efektif, Belanda mengeluarkan keputusan berupa *besluit* no.19 tertanggal 2 Mei 1924, yang isinya terkait pembentukan suatu swapraja di kawasan Manggarai dengan Karaeng Bagung, putra sulung *adak* Pongkor Karaeng Wanggur Laki Tekek Laki Mangir, sebagai rajanya yang pertama (1924–1930). Karaeng Bagung kemudian menandatangani *Korte Verklaring* pada 20 Desember 1928[143]. Berdirinya Swapraja Manggarai tak terlepas pula dari aspirasi rakyat Manggarai yang ingin memiliki rajanya sendiri. Kerajaan yang baru dibentuk ini membawahi 38 *dalu*, yakni[144] Bajo, Matawae, Lo'ok, Mboerak, Kempo, Nggerang, Boleng, Pacar, Bar, Rembong, Todo, Pongkor, Wontong, Welak, Lelak, Kolang, Ndesse, Rahong, Rego, Nggalak, Pasat, Roeis, Reo, Cibal, Lambaleda, Pota, Congkar, Biting, Roeteng, Ndehes, Pocoleok, Torok Golo, Sita, Riwu, Manoes, Ronggakoe, Kepo, dan Rajong. Raja Bagung berjasa memajukan perkembunan kopi arabika di Manggarai. Berkatnya, kopi Manggarai mendapatkan tempat di pasaran

---

143. Lihat *Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial 1915–1950*, halaman 166.
144. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 316–317.

dunia dan dikenal sebagai *Flores coffee*[145]. Berikutnya, semasa Jepang menduduki Manggarai, yang menjadi raja di swapraja ini adalah Aleksander Baruk[146] (1930–1949). Jasa Raja Aleksander Baruk adalah meningkatkan pertanian di Manggarai sehingga teknologinya tidak lagi kalah dengan Bali dan Jawa. Dia membawa dan memimpin para *dalu* mengunjungi serta mempelajari teknik pertanian di Bima, Lombok, dan Bali[147]. Ia kemudian digantikan oleh Konstantinus Ngambut (1949–1960).

e. Struktur Pemerintahan

Dalam menjalankan pemerintahannya, para penguasa Kerajaan Todo Pongkor dibantu oleh dewan kerajaan yang disebut Kraeng Niang Adak Panga Alo dan beranggotakan Niang Nowang, Niang Lodok, Niang Keka, Niang Rato, Niang Asi, Niang Mongko, Niang Toto Bicar, serta Niang Dopo. Selain itu masih ada lagi Niang Supe yang mengurusi rumah tangga kerajaan dan Niang Teruk dengan tugasnya menangani koordinasi antara satuan wilayah kerajaan yang disebut *dalu* dan *glarang*. Wilayah Kerajaan Todo Pongkor dibagi menjadi 13 *dalu* dan 11 *glarang*. Pembagian ini dikenal dengan istilah *dalu campulu telu gelarang campulu ca*. Raja Todo lebih menitikberatkan pemerintahan 6 *dalu* di sebelah barat Manggarai, yakni Lelak, Wontong, Welak, Kolang, Ndoso, serta Rahong, dan demikian pula dengan tujuh *glarang*, yakni Popo, Kole, Gulung, Renda, Muku Tee, Denge, dan Kende. Sedangkan Raja Pongkor memusatkan perhatiannya pada 7 *dalu* di sebelah timur Manggarai, yaitu Pocoleok, Torok Golo, Riwu, Ndehes, Manus, Sita, dan Ruteng beserta empat *glarang*, yakni Nao, Papang, Wewo, dan Nggorop. Sebagai tambahan, *dalu* Manus masih dibagi menjadi empat *dalu* lagi, yakni Kepo, Rajong, Rongga, dan Koe.

Kerajaan Manggarai yang berpusat di Cibal masih terbagi menjadi dua bagian, yakni Reo dan Patta. Selain itu, masih ada pembagian lagi menjadi 39 daerah kecil yang disebut *dalu*. Lima *dalu* besar dan tujuh *dalu* kecil tergabung dalam Reo; sementara itu, tiga *dalu* besar dan tujuh *dalu* kecil bergabung dengan Patta. Sisanya tidak tergabung dengan keduanya. Masing-masing *dalu* dibagi menjadi beberapa *glarang* yang terbagi kembali menjadi sejumlah desa atau *beo*. Tiap *dalu* dikuasai oleh suatu klan atau keluarga tertentu yang disebut *wau*, dimana mereka menganggap dirinya sebagai bangsawan. Klan-klan yang berkuasa tersebut mengadakan perkawinan dengan klan di *dalu* lainnya. Oleh karena itu, mereka memandang satu sama lain sebagai kawan

145. Lihat *Ben Mboi: Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja,* halaman 26.
146. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 29.
147. Lihat *Ben Mboi: Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja,* halaman 27.

atau saudara menurut adat. Seperti *dalu*, *glarang* juga diperintah oleh suatu klan yang berkuasa. Kendati berada di bawah kekuasaan *dalu*, namun dalam hal pertanahan *glarang* bersifat otonom. Dengan kata lain, *dalu* tidak berhak mencampuri masalah pertanahan *glarang*. Klan bangsawan penguasa *glarang* tidak mempunyai hubungan dengan penguasa *dalu*. Meskipun demikian, terkadang ada juga hubungan kekerabatan melalui pernikahan. Semasa Bima masih menguasai Manggarai, ada beberapa *dalu* yang tunduk pada Kerajaan Bima. Namun, setelah Belanda berkuasa di sana, salah seorang kepala *dalu*, yakni penguasa *dalu* Todo, diangkat sebagai raja bagi seluruh Manggarai.

Kepala *dalu* digelari *kraeng* atau *kraeng adak*. Sementara itu, penguasa *dalu* yang terpenting, seperti kepala *dalu* Todo, digelari *sangaji* atau raja. Pejabat-pejabat kerajaan yang terpenting antara lain *tu'a tana* (arti harfiah: tuan tanah). Ia adalah ahli mengenai tanah secara adat sehingga harus memiliki pengetahuan luas mengenai bidang-bidang tanah masing-masing klan. Kendati demikian, jabatan ini diwariskan turun temurun sehingga akhirnya ada *tu'a tana* yang hanya menyadang gelar saja tanpa mempunyai pengetahuan memadai. Pejabat penting lainnya adalah *raja bicara.* Ia bertugas sebagai juru bicara atau ahli diplomasi. Tugasnya menjadi perantara antara masing-masing klan; umpamanya dalam merundingkan mas kawin (*paca wina*) bila hendak dilangsungkan perkawinan di antara mereka. Kedua pejabat kerajaan ini ada pada tingkatan kerajaan, *dalu*, maupun *glarang*.

f. Sosial Kemasyarakatan

Masyarakat Manggarai dibagi menjadi tiga golongan, yakni bangsawan (*kraeng*), rakyat kebanyakan (*ata lehe*), dan budak. Kaum bangsawan adalah penguasa *dalu* dan *glarang*. Mereka adalah kaum atau klan yang dianggap telah menguasai suatu tanah atau kawasan semenjak zaman dahulu berdasarkan catatan sejarah, mitologi, atau legenda sehingga dianggap lebih tua. Rakyat kebanyakan adalah mereka yang bukan keturunan klan bangsawan dan biasanya bermata pencaharian sebagai petani, pekerja, dan pedagang. Meskipun demikian, ada pula keturunan bangsawan yang dalam kehidupan sehari-harinya bekerja sebagai petani. Golongan budak adalah mereka yang ditangkap dalam peperangan, baik berasal *dalu*-nya sendiri atau *dalu* dan pulau lain. Orang yang terjerat hutang dan tak sanggup membayar juga dapat terjerumus ke dalam perbudakan. Mereka yang dianggap melanggar adat mungkin pula dijatuhi hukuman dengan menjadi budak. Tentu saja pada zaman sekarang, golongan budak sudah tidak ada lagi. Perbedaan gaya hidup antara ketiga golongan itu boleh dikatakan

tidak ada dan hanya berlaku dalam tata cara atau sopan santun dalam pergaulan. Kaum bangsawan mempunyai hak-hak istimewa dalam upacara-upacara adat saja.

g. Kepercayaan

Warga Manggarai ada yang telah menganut agama Islam, terutama di kawasan utara, barat, dan selatan. Sementara itu, di kawasan sebelah timur banyak yang memeluk agama Katolik, seperti penduduk Flores umumnya. Kendati demikian, masih ada penduduk di *dalu-dalu* besar, seperti Todo, Cibal, dan Pongkor yang mempertahankan kepercayaan leluhurnya. Warga yang menganut agama Katolik sekalipun ada juga yang tetap mempertahankan religi dan adat istiadat leluhurnya.

Agama asli Manggarai percaya pada roh-roh nenek moyang, yang disebut *empo* atau *andung*, sedangkan roh orang-orang yang telah meninggal pada umumnya disebut *poti'*. Mereka meyakini bahwa roh-roh ini berdiam dan menempati lingkungan di sekitar kediaman manusia. Ada roh yang menempati tiang rumah, perigi, persimpangan jalan, pohon besar, dan lain sebagainya. Selain roh orang-orang yang telah meninggal, mereka meyakini pula keberadaan makhluk-makhluk halus lainnya selaku penjaga rumah, pekarangan, *naga tana* (tanah pertanian), atau *naga golo* (desa). Golongan makhluk halus ini disebut *ata pelesina* (makhluk-makhluk yang ada di dunia lain). Kelompok makhluk halus berikutnya yang menguasai hutan, sungai, sumber-sumber mata air, dan lain sebagainya, secara keseluruhan disebut *darat*. Baik *ata pelesina* maupun *darat* ini diundang dalam upacara-upacara adat guna memohon kesuburan atau mencegah mara bahaya. Menurut agama asli Manggarai, mereka tidak hanya mendatangkan kebaikan, tetapi juga keburukan, terutama bila diabadikan saat upacara-upacara persembahan.

Orang Manggarai memercayai adanya dewa tertinggi yang disebut Mori Karaeng. Ia dikatakan telah menciptakan bumi, manusia, dunia roh, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seisi bumi lainnya. Ada pula mitologi yang mengisahkan mengapa ia menciptakan angin, menyebabkan gempa bumi, menghukum bulan dengan gerhana, menggunakan petir untuk menghukum para makhluk halus jahat, serta menolong mereka yang melanggar adat atau melakukan dosa. Mori Karaeng dianggap telah mengajarkan manusia seni bertenun, adat istiadat, dan membuat tuak.

Upacara adat Manggarai dipimpin oleh seorang yang disebut *ata mbeko*. Jabatan sebagai pemimpin upacara itu tidak didapat berdasarkan keturunan, melainkan dengan belajar pada seorang *mbeko* yang sudah ahli. Pria atau wanita sama-sama memiliki

kesempatan menjadi *mbeko*. Seorang *mbeko* dibutuhkan jasanya dalam memimpin rangkaian upacara yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia, seperti saat *jambat* (hamil lima bulan) dan upacara *wega mio* (masa ketika pasangan pengantin baru tinggal lima hari di rumah orang tua mempelai wanita). Upacara lain yang penting adalah peresmian balai desa, memohon kesuburan, dan perkabungan. Orang Manggarai percaya bahwa setelah meninggal, almarhum menjadi roh yang selama beberapa hari masih berkeliaran di sekeliling rumahnya, terutama di tempat ia biasa tidur. Lima hari setelah kematian, biasanya diadakan upacara *kelas*, dimana saat itu roh orang yang telah meninggal berubah menjadi *poti*. Ia telah siap meninggalkan dunia dan pergi ke alam baka guna menyatu dengan Mori Karaeng. Pada kesempatan ini, dipotonglah seekor hewan korban. *Mbeko* juga berfungsi sebagai dukun tatkala diminta menyembuhkan orang sakit, meramalkan nasib, memberikan jimat, atau mengguna-guna orang yang dibenci.

VII. NAGE & NAGE KEO

Silsilah raja-raja Nage adalah sebagai berikut: Dhosa Deu (Dhosa Wea)–Righe Bata–Roga Doa–Mite Dede–Dapa Gu. Raja Roga Ngole (1917–1928), putra Dapa Gu, pernah menandatangani *Korte Verklaring* pada 2 Maret 1918 dan 14 Januari 1927. Belakangan Kerajaan Keo disatukan dengan Nage, membentuk kerajaan gabungan Nage Keo. Rajanya adalah Joseph Juwa Dobe Ngole (1928–1962).

VIII. NDONA

Kerajaan Ndona merupakan salah satu di antara lima kerajaan di kawasan Ende Lio. Silsilah awal para penguasa Ndona adalah sebagai berikut: Mbani–Baro–Rangga–Jau–Ndosi–Mbani–Bara–Ara–Nggau–Mbani–Waru–Titu–Raja–Tuga–Manggu–Mbani. Raja Baki Bani (1909–1922), putra Mbani, kemudian memerintah di kerajaan ini[148]. Selanjutnya, Raja Pius Rasi Wangge diangkat sebagai penguasa bagi Ndona antara 1922–1924.

148. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 72.

IX. NGADA

Leluhur suku Ngada adalah seorang tokoh bernama Ata Gai. Rakyat Ngada yang tinggal di Rowa, Sara, Mengulewa. Rakalaba, Langa, dan kawasan lainnya pernah bangkit melawan Belanda pada sekitar tahun 1907. Dua tahun kemudian (1909), rakyat Soa giliran melakukan perlawanan, tetapi dapat dipatahkan oleh pemerintah kolonial. Meskipun demikian, api perlawanan tidak juga padam karena pada 1909 pecah lagi pemberontakan di Raja. Pergolakan rakyat Ngada mencapai puncaknya pada 1910 akibat beratnya pajak yang dibebankan kepada mereka. Sebagai contoh di Lejo pecah pemberontakan yang dipimpin Lewa Wula. Perlawanan ini berlangsung hingga tahun 1913. Setelah Belanda berhasil memadamkannya, pada 1916–1917 berkobar kembali pemberontakan di Watuapi yang dipimpin oleh Nipa Do. Sama seperti pemberontakan-pemberontakan lain sezamannya, perlawanan ini pada akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Raja-raja yang pernah berkuasa di Ngada adalah Jawa Tai (1915–1918), Pajo Eso (1918–1920), dan Pea Mole (1920–1951). Raja Pea Mole tercatat pernah menandatangani *Korte Verklaring* pada 12 Januari 1921.

X. NITA

Leluhur raja-raja Nita konon berasal dari sebuah kampung bernama Uma Lili[149]. Rakyatnya hidup sejahtera dan makmur. Mata pencaharian mereka adalah bertani, berkebun, menyadap tuak, dan berburu. Di antara orang-orang terkaya di Uma Lili, terdapatlah dua orang kakak beradik bernama Sisa Mitan dan Hila Bura[150]. Kekayaan rakyat Uma Lili ini membangkitkan rasa iri dalam hati Raja Sikka. Ia berniat mengirimkan angkatan perangnya menaklukkan Uma Lili. Rakyat Uma Lili mencium niat Raja Sikka ini dan mengutus Hila Bura memohon bala bantuan dari Solor. Orang-orang Solor menyetujuinya dan mengirimkan sepasukan tentara di bawah pimpinan Jawa Palang Ama. Kendati demikian, Raja Sikka mengetahui hal ini dan menyuap Jawa Palang Ama agar tidak menolong Uma Lili.

Akibatnya, Uma Lili mengalami kekalahan dan penduduknya tercerai berai. Bahkan sebagian di antara mereka ditawan oleh Raja Sikka. Hila Bura dan Sisa

149. Lihat *Pengaruh Majapahit atas Kebudayaan Nusa Tenggara Timur*, halaman 24.
150. Menurut silsilah dalam manuskrip *Kerajaan2 Indonesia* karya Hans Hägerdal, halaman 179, disebutkan bahwa kakek Sisa Mitan dan Hila Bura bernama Moang Raga, sedangkan ayah mereka Desa Nita.

Mitan berhasil melarikan diri ke kampung Guru, sebelah utara Ledalero sekarang. Mereka terus bekerja keras dan berhasil mengumpulkan kekayaannya lagi. Hila Bura kemudian pindah ke kampung Romanduru, sedangkan Sisa Mitan tetap berdiam di Guru. Suatu kali Sisa Mitan beserta anaknya, Lolo Jong, berburu babi hutan dengan disertai anjing-anjing mereka. Ketika melihat seekor babi hutan, mereka melepaskan anak panahnya dan menurut penglihatan mereka telah mengenai jantung hewan tersebut. Babi hutan tergeletak di tanah dan mereka berlari menangkapnya. Ternyata setelah didekati, bukan babi hutan yang mereka jumpai, melainkan sebongkah batu berbentuk babi.

Sisa Mitan beserta Lolo Jong pulang ke rumahnya tanpa membawa seekor hasil buruan pun. Kendati demikian, Lolo Jong merasa bahwa peristiwa aneh itu merupakan pertanda bahwa dirinya harus menetap dekat sebongkah batu ajaib yang terletak di desa Nita tersebut. Di dekat batu berbentuk babi itu tumbuh pohon beringin dan Lolo Jong lantas pindah ke sana. Ia mendirikan rumahnya dekat pohon nan rindang itu. Lolo Jong menjadi raja setempat dan kemudian menamai keluarganya Orin Bao, yang berarti "Rumah Beringin." Marga Orin Bao ini merupakan cikal bakal raja-raja Nita. Setelah kedatangan Portugis barulah mereka mengganti marga mereka dengan da Silva. Raja-raja yang berkuasa di Nita setelah Sisa Mitan dan Hila Bura adalah Lolojong, Maujong, Manuel, dan Moang Noko.

Nita pada abad 19 dan 20 diperintah oleh Raja Don Fransisco da Silva (Don Frans Digung da Silva atau Moang Digung, memerintah 1885–1891), Don Salipi da Silva[151] (Moang Nong, 1893–1909), dan Don Juan (Johan) da Silva (1909–1926). Raja Don Frans Digung da Silva mangkat pada 5 November 1891. Menurut tradisi yang berlaku, seseorang tak boleh dimakamkan sebelum kedatangan anggota keluarganya. Jenazah almarhum baru dapat dikebumikan pada 25 November 1891. Waktu itu yang menghadiri acara pemakaman adalah Raja Andreas Jati da Silva dari Sikka, Commandanti Johanes Iking da Cunha dari Maumere, Mo'ang Pulu dari Sikka Maumere, beserta para pemuka dan masyarakat Nita. Karena tak memiliki keturunan, ia digantikan oleh kemenakannya, Don Salipi da Silva atau Philipus da Silva. Dia mangkat pada 1909 tatkala sedang berobat di Makassar dan sebagai pewarisnya diangkat putranya bernama Don Johan da Silva (Yuan da Silva). Pada 1926, Raja Don Johan da Silva dipensiunkan oleh pemerintah kolonial dan kerajaannya digabungkan

151. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 72.

dengan Sikka. Dengan demikian, berakhirlah Nita sebagai suatu kerajaan. Pada mulanya, Raja Don Johan da Silva merasa berkeberatan dengan penyatuan tersebut. Namun, akhirnya penandatanganan penyatuan antara Sikka, Nita, dan Kangae dilangsungkan pada 14 November 1925 dalam upacara penuh persaudaraan. Turut menyaksikan peristiwa tersebut adalah residen Kupang, asisten residen Flores, dan kontrolir Maumere, H. M. Mennes[152].

XI. RIUNG

Raja Riung yang bernama Dondo Poea Ringgo menandatangani kontrak politik dengan Belanda berupa *Akte van Bevestiging* pada 17 November 1890. Raja berikutnya, Sila Poe Petor menandatangani *Timor Verklaring* pada 8 Juli 1894 dan *Verklaring Betreffende Belastingheffing* pada 17 Agustus 1901. Selanjutnya, Raja Pua Mamek (Poe Mimak), menandatangani *Korte Verklaring* dengan Belanda pada 2 Maret 1918.

XII. SIKKA

a. Cikal Bakal Kerajaan Sikka

Menurut legenda, cikal bakal Kerajaan Sikka adalah pasangan suami istri bernama Sao dan Sika yang berdiam di puncak Gunung Bekor. Konon, Sao terlahir dari tanah. Ajaibnya, bersamaan dengan kelahirannya itu muncul tujuh buah piring besar dan kecil. Selain itu, keluar pula enam orang lelaki; Lesu dan Leso dengan membawa tempurung berisi nasi dan daging; Koli dan Engan dengan membawa kapak dan parang; serta dua orang pemberani bernama Ria dan Raga. Sao sendiri tidak perlu melakukan apa-apa karena semua urusan telah ditangani oleh enam orang pelayannya itu. Keperluan makan dan minum diurus oleh Lesu dan Leso. Sementara itu, Kolin dan Engan mengerjakan ladang demi kepentingan Sao. Demi keamanan Sao, Ria dan Raga dengan setia menjadi pengawalnya.

Sao menjadi *tana puang* (penguasa) Sikka yang pertama. Selanjutnya terdapat 11 generasi hingga *tana puang* bernama Bago. Ia mempunyai seorang putra bernama Don Alesu. Suatu kali, ia merenungkan mengenai betapa banyak rakyatnya yang meninggal dan berniat mengembara mencari keabadian. Pengembaraan ini konon membawanya ke Malaka dan di sanalah ia berjumpa dengan Raja Malaka bernama Worilla beserta putranya Jogo Worilla. Mereka memperkenalkan Don Alesu pada agama Katolik.

152. Lihat *Don Thomas Peletak Dasar Sikka Membangun*, halaman 12.

Hikayat lain mengisahkan mengenai seorang tokoh bernama Rae Raja bersama istrinya, Rubang Sina, dan putra mereka Sugit Zund atau Sugi Sao, yang berlayar dari Siam[153]. Perahu mereka terdampar di Wutung Ni'i dekat kampung Sikka. Bersama mereka turut pula 20 orang laki-laki dan perempuan. Karena perahu mereka mengalami kerusakan parah dan tak dapat diperbaiki lagi, diputuskanlah mencari tempat kediaman yang baik di kawasan tersebut. Setelah berdiam beberapa lama, mereka mengalami kekurangan air minum. Rae Raja yang merupakan nakhoda kapal memerintahkan anak buahnya pergi mencari air minum. Akhirnya, rombongan yang diperintahkan mencari air menemukan sebuah mata air yang mereka namai Wair Topo Poret Loba.

Penemuan mata air itu dilaporkan pada Rae Raja, yang segera memerintahkan para pengikutnya berkemas-kemas dan pindah ke dekat mata air itu. Pondok-pondok didirikan di tempat kediaman baru mereka. Sugi Sao (Mo'ang Sugi) diperintahkan ayahnya naik ke puncak gunung guna mengetahui apakah ada kapal yang lalu lalang di perairan dekat kawasan itu. Ternyata Sugi Sao tak menjumpai satu kapal pun, malahan dia bertemu dengan wanita penduduk asli yang masih mengenakan kulit kayu[154]. Rombongan kemudian pindah ke Gunung Ili Gai, tempat mereka berjumpa dengan penduduk setempat tersebut.

Sugi Sao menikah dengan gadis penduduk asli bernama Du'a Sikka yang merupakan asal muasal nama Sikka. Setahun kemudian istrinya melahirkan seorang putra bernama La'i Sao (Mo'ang Sao). Sugi Sao beserta anaknya mengembara menyusuri tempat itu dan menamai berbagai kawasan. Sebagai contoh, sewaktu tiba di tempat yang curam di kaki Gunung Newa, agar tak tersesat mereka menggantungkan sehelai daun putih. Karena itu, tempat tersebut lantas dinamai Lela Bura (Gantungan Putih). Beberapa waktu berjalan, tiba-tiba tercium oleh mereka bau manis sehingga dinamakanlah tempat itu Uma Huré yang berarti Kebun Manis. Mereka juga menjumpai tempat yang lebat ditumbuhi alang-alang, mereka menamainya Klo'ang Rotat (Kampung Alang-alang).

Akhirnya, tibalah mereka di Natar Gahar, yang menurut hemat Sugi Sao merupakan lokasi kediaman ideal baginya serta keluarganya. Niat ini disampaikan pada Du'a Sikka, namun istrinya itu menentang rencana kepindahannya ke Natar Gahar

---

153. Lihat *Hikayat Kerajaan Sikka*, halaman 10.
154. Lihat *Hikayat Kerajaan Sikka*, halaman 14.

dan menyarankan lebih baik mereka pindah dulu Ke Léla Bura. Apabila mengalami kesulitan barulah berpindah lagi ke Natar Gahar. Demikianlah, Sugi Sao menuruti usul istrinya dan pindah ke Léla Bura. Di sana mereka menetapkan upacara pemujaan bagi rembulan, matahari, para dewa, dan arwah leluhur.

Mo'ang Sao bertambah dewasa dan sudah saatnya menikah. Oleh karena itu, ayahnya meminang seorang gadis bernama Du'a Go'it dan menikahkannya dengan Mo'ang Sao. Kampung tempat kediaman mereka makin bertambah ramai dan warga menganggap Mo'ang Sao sebagai pemuka mereka. Setiap kali ada permasalahan, penduduk akan menyampaikannya kepada Mo'ang Sao guna meminta nasihat atau saran. Pernikahan Mo'ang Sao dikaruniai seorang putra bernama Mo'ang Saru. Selanjutnya keturunan-keturunan mereka secara berturut-turut adalah Mo'ang Weling, Mo'ang Mada, Mo'ang Pedong, Mo'ang Herong, Mo'ang Mage, Mo'ang Béwat, dan Mo'ang Bata Jati Jawa.

Pada zaman Mo'ang Bata Jati Jawa, dikarenakan penduduk makin bertambah banyak, sebagian penduduk pindah ke Hubing Tarung Gawang dan Puho Wutik Tak. Pada saat bersamaan, gunung berapi di Hokor mengamuk dengan dashyat hingga mengakibatkan korban jiwa yang tak sedikit jumlahnya. Mo'ang Bata Jati Jawa gemar berlayar ke sana kemari dan membeli piring-piring besar, yang dibagikannya kepada segenap wilayah jajahannya. Ia memerintahkan agar piring-piring tersebut dipergunakan sebagai tempat persembahan saat melakukan pemujaan terhadap makhluk-makhluk suci. Dari bidang pemerintahan, ia menetapkan pengangkatan para *tana pu'ang* (kepala wilayah setempat).

Kurang lebih pada 1571, datanglah orang-orang Bugis serta Makassar ke pelabuhan Wuring dan Kewa Pantai guna membeli rempah-rempah. Karena itulah mereka mencari pemuka masyarakat yang disegani, yakni Mo'ang Bata Jati Jawa sendiri. Para pedagang Sulawesi Selatan itu ingin membeli kayu manis, kayu kuning, lada, dan kulit soga sehingga semenjak itu Mo'ang Bata Jati Jawa kerap mengumpulkan komoditas-komoditas tersebut. Menurut silsilah raja-raja Sikka, Mo'ang Bata Jati Jawa menikah dengan Supung Sipi Laju Bati[155]. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Mo'ang Igor. Ia menikah dengan Du'a Plu'e dari Wolomotong dan menurunkan Mo'ang Baga Ngang.

155. Lihat *Hikayat Kerajaan Sikka*, halaman xix.

Ia merupakan pemuka masyarakat yang terkenal pandai berperang sehingga dijuluki Baga Ngang (Baga Perkasa). Wilayah kekuasaan Sikka diperluasnya, hingga ke arah barat dan timur. Semenjak saat itu, daerah yang dikuasai Mo'ang Baga Ngang meluas hingga Manggarai di sebelah baratnya dan Larantuka di timurnya. Manggarai sendiri merupakan daerah pengaruh Gowa serta Bima.

b. Perkembangan Kerajaan Sikka

Sepeninggal Mo'ang Baga Ngang, putranya bernama Alésu Mo'ang Kéu menggantikannya sebagai pemuka masyarakat. Ketika itu, para pemimpin masyarakat Sikka belum bergelar raja. Alésu mengupayakan agar negerinya menjadi aman sentosa dan makmur dengan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang bersalah. Suatu ketika bangkitlah pemikiran dalam benak Mo'ang Alésu mengenai ketidakkekalan hidup manusia. Ia merasa gelisah menyaksikan kematian yang dialami umat manusia. Oleh karenanya, timbul keinginan mencari suatu negeri yang terbebas dari kematian.

Tatkala sedang mengunjungi Wuring, Alésu melihat sebuah kapal yang dinakhodai oleh Jogo Parera. Konon ia merupakan putra Raja Worilla dari Malaka. Pada kurun waktu ini, Malaka telah jatuh ke tangan Portugis sehingga Raja Worilla tentunya merupakan wakil pemerintah Portugis di Malaka. Demikianlah, Mo'ang Alésu bersama-sama dengan Jogo Parera berlayar ke Malaka. Setibanya di sana, Alésu menjumpai Raja Worilla dan menyampaikan niatnya mencari negeri yang terbebas dari kematian. Raja Worilla menjawab bahwa di dunia tidak mungkin dijumpai tempat seperti itu. Namun, terdapat negeri bernama Surga, tempat umat manusia tak akan mengalami kematian lagi. Alésu sangat gembira mendengarnya dan bersedia menghadiahkan emas dalam jumlah besar bagi siapa saja yang sanggup mengantarnya ke sana.

Raja Worilla mengatakan bahwa Surga itu tak dapat dijumpai sekarang, tetapi ia tidak keberatan mengajarkan bagaimana jalan menuju tempat tersebut. Pertama-tama, Alésu hendaknya dibaptis menjadi seorang Katolik. Lantas ia harus mendirikan[156]:

- Gereja
- *Irimida* (tempat-tempat perhentian saat jalan salib)
- Salib Kristus
- *Popa meninu* (patung Yesus saat masih kanak-kanak dan lain sebagainya)
- Bendera terbelah dua yang bergambar orang-orang suci (santo dan santa)

156. *Hikayat Kerajaan Sikka*, halaman 109.

Berdasarkan penuturan Raja Worilla, dengan melakukan semua itu barulah seseorang dapat beroleh keselamatan di Surga. Alésu menjawab bahwa ia dan rakyatnya masih bodoh dan belum mengerti dengan baik bagaimana menjalankan semua yang diajarkan Raja Worilla. Penguasa Malaka itu menyanggupi bahwa ia akan mengutus putranya yang lain bernama Augustina da Gama menyertai Alésu pulang ke kampung halamannya. Setelah itu, ia akan menjelaskan perihal agama Katolik pada rakyat Alésu.

Raja Worilla menanyakan apakah Alésu merupakan raja di negerinya. Dijawab oleh Alésu bahwa di Sikka belum ada raja, yang ada hanyalah seorang *mo'ang gete* (kepala besar). Dahulu yang menjabat sebagai *mo'ang gete* adalah ayahnya. Tetapi sepeninggal ayahnya kedudukan itu diwariskan padanya. Mendengar jawaban itu, Raja Worilla sangat senang dan mengatakan bahwa Alésu sesungguhnya adalah raja di negerinya. Sebagai tanda persahabatan, Alésu menghadiahkan Raja Worilla berbagai barang berharga yang dibawanya dari Sikka. Tiga tahun lamanya, ia belajar di Malaka. Sementara itu, Agustina da Gama diutus berlayar ke Sikka terlebih dahulu dengan dibekali tanda pengenal oleh Alésu guna menyebarkan agama Katolik di sana.

Setelah menyelesaikan pelajarannya, Alésu kembali ke Sikka dengan membawa tanda-tanda kebesaran seorang raja pemberian Raja Worilla. Semenjak itu, tersebarlah agama Katolik di Sikka. Alésu merupakan penguasa Sikka pertama yang bergelar raja. Negerinya makin bertambah maju. Dia kemudian digantikan putranya bernama Kapitang atau Mo'ang Pitang. Sepeninggal Mo''ang Pitang, yang menggantikannya adalah saudarinya yang bernama Dona Maria. Ratu Sikka ini menetapkan tata cara pelamaran seorang gadis demi menghindarkan perilaku sewenang-wenang kepada kaum wanita. Dia mangkat tanpa suami dan digantikan oleh kemenakannya yang bernama Mo''ang Samao (Samadu) atau Oriwis da Silva.

Pada 1563, para perompak menyerang masyarakat Katolik yang berada di Solor (Lamahala dan Lamakera). Sikka mengirimkan bantuannya guna menghalau mereka. Sepeninggal Raja Oriwis da Silva, singgasana Sikka beralih pada saudarinya, Ratu Dona Ines (Agnes) da Silva. Ratu Dona Ines da Silva dikenal sebagai penguasa yang adil dan tegas. Perilakunya halus, tetapi tajam bicaranya. Jikalau timbul persoalan dan perselisihan di kalangan rakyatnya, Dia tidak segan-segan turun tangan mendamaikannya. Dia menerapkan peraturan mengenai mahar yang lebih tegas lagi. Warga Sikka masa itu telah mengenal teknik pelayaran yang cukup maju hingga sanggup berlayar ke Jawa dan Singapura. Mereka berjumpa dengan berbagai

bangsa, seperti China dan lain sebagainya. Sepulangnya dari pengembaraan, mereka menggunakan adat istiadat yang lebih halus. Karena itu, orang-orang yang berdiam di daerah pegunungan tertarik meniru dan mengadopsi adat istiadat tersebut.

Kepemimpinan Ratu Dona Ines da Silva dilanjutkan oleh Raja Jujé Juaniku da Silva. Penggantinya adalah Raja Mbako I Kikir Hiwa. Saat itu, Sikka memiliki angkatan perang yang disegani. Pada zamannya, timbul perselisihan antara rakyat Sikka dan Wolo Koli. Pemicunya adalah pembunuhan orang-orang Sikka oleh warga Wolo Koli saat mereka sedang membeli periuk. Sikka mengirimkan pasukannya dan mengundang warga kampung setempat yang berada dalam daerah kekuasannya turut serta memerangi Wolo Koli. Kendati demikian, mereka menolak apabila Raja Sikka tidak hadir sendiri. Raja Mbako I Kikir Hiwa akhirnya datang sendiri dengan disertai sejumlah pengikutnya. Ia memerintahkan agar pengikutnya mengepung kampung Wolo Koli keesokan harinya saat fajar menyingsing. Bersama dengan raja, ikut pula dua orang pasukan dari Timor membawa perisai yang ditempeli tujuh cermin serta berhiaskan bulu ayam dan kambing. Esoknya, raja dengan pasukannya berangkat mengepung Wolo Koli. Sementara itu, perisai dengan tujuh cerminnya dihadapkan ke matahari dan sinarnya diarahkan pada rakyat Wolo Koli. Menyaksikan hal itu, rakyat Wolo Koli menjadi ketakutan dan mundur tercerai berai. Meskipun demikian, perselisihan ini pada akhirnya dapat diselesaikan secara damai.

Pulau Flores diserahkan oleh Portugis kepada Belanda pada 20 April 1859 sehingga kerajaan-kerajaan di sana, termasuk Sikka, berada di bawah payung kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Ketika penyerahan itu berlangsung, Raja Mbako I Kikir Hiwa sedang berada di Dili guna menghadap wakil pemerintah Portugis. Ketika dia kembali ke negerinya, kekuasaan telah mengalami peralihan. Pemerintah Belanda yang kini menguasai Flores mengeluarkan larangan berdagang candu, budak, senjata, dan mesiu. Seluruh ketetapan ini dilaksanakan oleh Raja Mbako I Kikir Hiwa.

Suatu kali, Raja Mbako I Kikir Hiwa berada dalam perjalanan pulang dari pelayarannya mengunjungi Tana Ai. Tatkala dia sedang singgah di Kewa Pantai, datanglah tiga orang nakhoda Bugis yang menawarkan segumpal candu sebesar buah kelapa pada raja. Dijawab oleh raja bahwa ia baru pulang dari perjalanannya dan tidak membawa uang. Pedagang-pedagang Bugis yang terdiri dari Daeng Magesing, Daeng Mangawi, serta Daeng Jea mengatakan bahwa tidak apa-apa raja membawa barangnya terlebih dulu dan baru membayarnya belakangan. Raja menanyakan berapa harganya

yang dijawab oleh mereka 400 Rupiah[157]. Akhirnya, dijanjikan bahwa candu itu akan dibayar setibanya raja di Maumere, ibukota Kerajaan Sikka.

Dalam perjalanan pulang, raja menjelaskan pada anak buahnya bahwa ia sebenarnya tak hendak membeli candu itu. Tetapi pemerintah Hindia Belanda telah melarang perdagangan candu sehingga ia wajib merampasnya. Akan tetapi, jika dia terang-terangan mengatakan hendak merampasnya, tentu akan diserang oleh para pedagang Bugis bersenjata lengkap tersebut. Oleh karena itu, ia mengatakan tak akan membayar harga candu tersebut. Tiga orang pedagang Bugis datang menagih candu mereka, namun tak berhasil menjumpai raja karena ia lebih banyak berdiam di selatan Sikka. Demikianlah selama bertahun-tahun hingga wafatnya Raja Mbako I Kikir Hiwa, mereka tidak berjumpa dengannya.

Raja Mbako I Kikir Hiwa digantikan oleh Prispin da Cunha (Mo’ang Prispin). Para pedagang Bugis menagih lagi candunya, tetapi Mo’ang Prispin menjawab bahwa ia tak mengetahui ujung pangkal persoalan tersebut dan menolak membayarnya. Orang-orang Bugis menjadi marah dan berniat menyerang Maumere. Raja Prispin meminta bantuan Larantuka menghadapi serangan para pedagang Bugis itu. Utusan dikirim menghadap Raja Larantuka sambil membawa hadiah berupa gading dan menyampaikan bahwa Larantuka diperbolehkan memungut cukai di Pelabuhan Kewa Pantai selama tiga tahun. Angkatan perang Larantuka bergabung dengan pasukan Sikka di Geliting. Namun, alih-alih berperang, pihak-pihak yang bertikai malah mengadakan perundingan saja. Raja Larantuka menjelaskan bahwa almarhum Raja Mbako I Kikir Hiwa sebenarnya berniat menyita candu itu karena merupakan barang larangan menurut aturan pemerintah Hindia Belanda. Apabila masih bersikeras menagihnya lebih baik mereka meminta keputusan pemerintah kolonial. Akhirnya, perdamaian dicapai antara kedua belah pihak. Kendati pertempuran tidak terjadi, Larantuka tetap diizinkan memungut bea di Kewa Pantai.

Sepeninggal Raja Prispin da Cunha, singgasana Sikka diwarisi oleh Don Luis da Silva (Mo''ang Bia). Sesudah dia mangkat yang menggantikannya adalah Raja Thomas Mo''ang Bo da Silva. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, almarhum Raja Prispin da Cunha pernah berjanji menyerahkan Kewa Pantai selama tiga tahun kepada Larantuka. Meskipun demikian, setelah lewat masa tiga tahun, Larantuka tak bersedia mengembalikan Pelabuhan Kewa Pantai dan bahkan menancapkan benderanya di sana

157. Lihat *Hikayat Kerajaan Sikka*, halaman 167.

sebagai tanda bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah jajahan Larantuka. Mo'ang Jujé, pemuka Habi Gahar, melaporkan persoalan itu pada Raja Thomas Mo'ang Bo yang memerintahkan agar bendera Larantuka dicabut saja. Peristiwa ini mengakibatkan kemarahan Larantuka yang mengirim pasukannya. Pertempuran terjadi antara kedua belah pihak, tetapi Larantuka berhasil dikalahkan.

Pada zaman Raja Andreas Jati da Silva yang menggantikan Thomas Mo'ang Bo da Silva, *Posthouder* van Siek selaku wakil pemerintah Belanda mengadakan sensus penduduk di Sikka dan Nitta. Ketika itu terjadi beberapa perselisihan dan pergolakan di kalangan rakyat. Salah satu pergolakan dipicu oleh tidak turunnya hujan. Orang-orang yang masih percaya takhayul meyakini bahwa atap seng gereja merupakan penyebabnya. Mereka menduga hujan yang jatuh akan mengeluarkan suara keras sehingga hujan takut datang lagi. Oleh karenanya, mereka bermaksud merusak gereja. Selain itu, masih banyak pula rakyat yang beristri lebih dari satu, dimana hal ini ditentang oleh gereja. Dengan demikian, timbul kebencian terhadap gereja Katolik. Ketika seorang pastur bernama Yseldyk ditugaskan di Koting, terjadi serangan hama tikus, ulat, belalang dan lain sebagainya. Selain itu, berlaku pula musim kering berkepanjangan. Karena itu, rakyat berniat mengusirnya. Pergolakan lain pecah di Tana Ai dan Bola, yang dipicu oleh pertikaian dan pembunuhan di tengah masyarakat. Raja Andreas Jati da Silva berhasil mengakhiri semua permasalahan di atas dengan cara damai.

Kejahatan terhadap kaum pendatang masih marak di Sikka menjelang akhir abad 19. Pada 16 Juli 1895, raja mendengar perihal pembunuhan dan perampokan yang menimpa seorang keturunan China bernama Tan Lao. Pagi harinya, istri dan anaknya menjumpai Tan Lao tewas dengan kepala hampir terpotong. Barang-barang berharga telah raib. Ketika berita ini sampai ke telinga Raja Sikka, dia memutuskan mencari dan menangkap pelakunya. Untuk itulah dia bersama Raja Nita, Don Salipi, merancang suatu siasat dengan mengadakan acara sabung ayam pada 22 Agustus. Barangsiapa yang berani bertaruh dalam jumlah besar, patutlah ia dicurigai. Ternyata pada kesempatan tersebut, seseorang bernama Hobang asal Rané, bertaruh dengan Raja Sikka dalam jumlah besar selama beberapa kali. Hobang akhirnya ditangkap dan mengakui perbuatannya. Berdasarkan penuturannya, anggota gerombolan lainnya berhasil dijebloskan dalam penjara. Di antara mereka ada yang dijatuhi hukuman pengasingan 10 dan 20 tahun.

Larantuka masih menganggap masalah Kewa Pantai di Tana Ai belum selesai. Oleh sebab itu, Raja Don Lorenzo II (Lorenzo Usi) mengirimkan 500 pasukannya ke Kewa Pantai pada 30 September 1894. Masalah ini dapat didamaikan dan mereka mengikat suatu perjanjian guna menetapkan batas daerah masing-masing. Bahkan kedua orang raja bertukar hadiah. Raja Andreas Jati da Silva menghadiahkan cincin bermata emas, sedangkan Raja Lorenzo Usi menyerahkan sebuah arloji beserta rantainya. Menyadari bahwa permainan sabung ayam lebih banyak mendatangkan keburukan ketimbang kebaikan, Raja Andreas Jati da Silva beserta *posthouder* sepakat melarangnya terhitung mulai 2 Januari 1896. Kekalahan satu pihak dapat memicu kericuhan sehingga kondisi kerajaan tak pernah tenteram.

Andreas Jati da Silva wafat pada 7 Mei 1898. Karena menunggu kehadiran para kerabatnya, jenazahnya baru dapat dimakamkan pada 23 Mei 1898. Sebagai penggantinya ditetapkanlah Raja Don Josephus Ximenes da Silva (Don Joseph Mo'ang Mbako da Silva). Dia tercatat pernah menandatangani beberapa kontrak dengan Belanda seperti:

- *Contract Betreffende Mijnrechten* pada 6 Desember 1898.
- *Verklaring Betreffende Belastingheffing* pada 17 Maret 1902.
- *Korte Verklaring* pada 16 Mei 1908.
- *Korte Verklaring* pada 19 Oktober 1916.

Pemberontakan pecah lagi di Sikka pada masa pemerintahan Raja Don Josephus Ximenes da Silva, dimana Raja Larantuka ikut terlibat. Keadaan Sikka pada masa itu boleh dikatakan kacau. Raja Don Josephus Ximenes da Silva jatuh sakit dan meninggal pada 29 November 1902 karena penyakit kolera.

Pemuka masyarakat Sikka berniat mengangkat putra sepupu almarhum Raja Sikka bernama Alésu sebagai raja mereka yang baru. Tetapi *posthouder* Belanda menyarankan bahwa Alésu yang baru berusia 16 tahun kurang cocok memangku jabatan tersebut, tanggung jawab yang dipikulnya terlalu berat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil rapat pada 26 Februari 1903, Nong Méak atau Josef da Silva terpilih sebagai Raja Sikka. Kondisi Sikka bertambah kacau dengan meletusnya pergolakan yang dipicu oleh Mo'ang Teka. Berkat bantuan Belanda, huru-hara ini dapat diatasi. Pembangunan jalan-jalan mulai dilaksanakan di Sikka. Pada 1913 dibuka perkebunan kapas di Maumere. Perombakan pemerintahan dilakukan pada 1910 dengan menggabungkan beberapa tanah-tanah persekutuan pimpinan para *mo'ang* (kepala adat) menjadi satu

distrik yang diperintah seorang kapitan. Hukum diterapkan dengan tegas di Sikka, rakyat dilarang keras berjudi atau menyabung ayam.

Perjuangan Thomas da Silva, yang kelak menjadi Raja Sikka berikutnya, tidaklah ringan. Sebenarnya, Raja Josef da Silva telah menyiapkan putranya yang bernama Don P.P. Dindus da Silva sebagai penggantinya. Oleh karenanya, ia lantas disekolahkan di *kweekschool* (sekolah pendidikan guru) Muntilan, Jawa Tengah. Kendati demikian, ia kembali sebelum menyelesaikan pendidikannya. Sementara itu, Thomas da Silva, yang berhak atas singgasana Sikka, berupaya memperjuangkan haknya. Dengan dukungan D. D. Kondi Pareira dan keluarga lainnya, Thomas da Silva mengirim surat pada residen Kupang. Berkat bantuan keuangan mertuanya, Mo'ang Subu Sadipun, serta perantaraan dua orang pastor Yesuit yang pernah bekerja di Lela bernama P. J. Engbers dan P. P. Muller, Don Thomas sempat berjumpa dengan gubernur jenderal guna menghadang pengangkatan Don P.P. Dindus da Silva sebagai Raja Sikka. Kontrolir A. Oranye, *Posthouder* Maumere (1920–1922), melaporkan bahwa Don Thomas layak diangkat sebagai Raja Sikka[158].

Raja Josef da Silva (Yoseph Nong Meak da Silva) dipensiunkan oleh pemerintah Belanda pada 1920. Karena kecakapannya dalam menunaikan tugas, berdasarkan *besluit* residen Timor nomor 494 tanggal 6 September 1921, Don Thomas diangkat sebagai pejabat atau wakil Raja Sikka. Akhirnya diangkatlah Mo'ang Mbo II Thomas da Silva sebagai Raja Sikka berikutnya. Dia menandatangani *Korte Verklaring* pada 17 Februari 1922. Upacara penobatannya menurut adat Sikka baru dilaksanakan tahun 1923. Arak-arakannya berangkat dengan penuh kehormatan dari Maumere ke Sikka pada 19 November 1923. Raja Thomas da Silva sendiri pernah bersekolah di *Standaard School*, Lela. Tatkala usianya menginjak 15 tahun, diangkatlah ia sebagai guru bantu di sekolah tersebut. Dia berkarier sebagai juru tulis di kantor *Gezaghebber* pada 1912 dan kemudian diserahi jabatan Menteri *Belasting* (Perpajakan) Sikka.

Tanpa jemu dia mengusahakan kemajuan Sikka. Demi melancarkan arus transportasi di daerahnya, Raja Thomas da Silva mendesak pemerintah Belanda membangun jembatan besi di Naga Géte, yang pembangunannya diawali pada 1925. Tatkala menyaksikan warganya kekurangan air minum, Thomas da Silva mengupayakan pembangunan sumur-sumur di Geliting (Kewa Pantai), Wair Wetak, Wai Oti, Wair Hubing, Kampung Beru, dan Maumere. Karena jembatan yang berada

158. Lihat *Don Thomas: Peletak Dasar Sikka Membangun*, halaman 6.

di Kali Wajo kerap rusak akibat banjir, dia memprakarsai penggantiannya dengan jembatan besi hingga perhubungan antara Maumere dan Ende makin lancar. Dalam bidang kesehatan, Raja Thomas da Silva mengadakan pembicaraan dengan misi Katolik guna membangun rumah sakit yang megah di Lela pada 1930. Pembangunnya selesai pada 1934. Rumah sakit ini kemudian dinamai St. Elizabeth[159]. Dia juga memerhatikan bidang pendidikan dengan didirikannya Yayasan Pendidikan Thomas (Yapenthom) pada 1 Mei 1947[160].

Dia dipercaya oleh pemerintah kolonial merangkap jabatan sebagai *Hoofd van Plaatselijke Bestuur* (HPB/Kepala Daerah) yang sebelumnya diduduki orang Belanda. Berkat pengabdiannya yang luar biasa bagi kemajuan negerinya, gubernur jenderal Hindia Belanda menganugerahinya bintang penghargaan *Trouw en Verdienste* (Kesetiaan dan Pengabdian)pada 27 Desember 1934. Demi memajukan perkebunan di daerahnya, dia memerintahkan para kapitan agar mendorong warga meningkatkan penanaman kelapa, bambu, kopi, pisang, dan lain sebagainya.

Sewaktu Bung Karno diasingkan ke Ende, Raja Thomas da Silva turut pula menjumpai calon proklamator tersebut dan kerap berunding mengenai kepentingan masyarakat serta bagaimana memajukan Sikka. Ketika berobat di Surabaya pada 1937, dia bertemu dengan tokoh pergerakan nasional tersohor, Dr. Sutomo, dan membicarakan banyak hal mengenai perbaikan nasib rakyat. Sekembalinya dari Surabaya, dia mendirikan lembaga pendidikan guna memajukan pengetahuan kaum wanita. Gurunya dia datangkan dan gaji sendiri.

Setelah kemerdekaan, Raja Thomas da Silva dipilih sebagai kepala daerah Flores pada 1948 karena kapasitasnya. Oleh sebab itu, dia lantas pindah ke Ende, sedangkan pemerintahan Sikka diwakilkan kepada saudarinya, Ratu Centis da Silva. Kesehatan Raja Sikka ini mulai terganggu pada 1952 sehingga dia terpaksa meletakkan jabatannya. Kendati kondisinya belum memungkinkan, tatkala mendengar kedatangan Bung Karno ke Ende pada 1953, dia memutuskan segera berangkat ke sana guna menyambut tokoh yang dikaguminya itu. Dengan mengemudikan sendiri mobilnya, dia berangkat ke Ende. Setelah berjabat tangan dengan Bung Karno, dia mengunjungi beberapa kenalannya di Ende serta beristirahat di Hotel Endeh. Namun, takdir menentukan bahwa dia harus berpulang sore harinya. Jenazah Raja

159. Lihat *Don Thomas: Peletak Dasar Sikka Membangun*, halaman 27.
160. Lihat *Don Thomas: Peletak Dasar Sikka Membangun*, halaman 43.

Sikka yang banyak berjuang demi kemajuan rakyatnya ini dibawa ke Maumere pada 19 Mei 1953 dan dikebumikan di sana.

Semasa hidupnya, Raja Thomas da Silva dikenal memiliki perangai yang ramah dan tidak senang bermusuhan dengan orang lain. Dia pandai mengambil hati orang dan tidak segan pula mengisahkan hal-hal yang lucu. Dalam pergaulan, dia tidak membeda-bedakan antara tinggi dan rendah. Pendapat orang lain selalu dia perhatikan dan tak jarang pula ia membantu mereka yang dilanda kesusahan. Sebagai seorang tokoh yang tidak acuh terhadap masalah pendidikan, dia menyekolahkan anaknya di *Europeesche Lagere School* (sekolah dasar untuk anak pribumi dan timur asing) di Makassar[161].

c. Sistem Pemerintahan Kerajaan Sikka

Kerajaan Sikka dibagi menjadi 10 *hoak hewer* (wilayah) yang diperintah oleh *mo'ang pulu* (tua-tua). Mereka harus menyelesaikan segenap pertikaian yang telah ditangani oleh *tana puang*, tetapi hasilnya belum diterima atau disepakati semua pihak. Sepuluh orang *mo'ang pulu* itu tinggal di ibukota Sikka dan hanya sesekali saja mengunjungi wilayah kekuasaan mereka. Raja masih mempunyai lima kapitan yang disebut *mor*, *sala*, *guarda*, *alaperis* (*alvares*), dan *pontera*. Tugas-tugas mereka adalah sebagai berikut.

- *Mor* bertugas menerima keluhan-keluhan dari rakyat yang perlu diteruskan pada raja.
- *Sala* berlaku sebagai penerima upeti dan pajak.
- *Guarda* bertugas mengawal raja.
- *Alparis* mengurusi masalah peperangan dan pertahanan kerajaan.
- *Pontera* menangani masalah perbekalan.

Di samping itu, masih ada lagi jabatan *moang tukeng* selaku wakil raja. Ia menggantikan raja selaku wakil yang berkuasa penuh bila raja berhalangan. Sebagai pembawa pesan atau perintah raja terdapat para *gai* (harfiah: rotan). Mereka merupakan petugas yang membawa tongkat rotan dalam menyampaikan berita bagi rakyat. Seorang *gai* tidak perlu mengucapkan sepatah katapun dalam mengemban tugasnya. Ia cukup mengangkat tongkat rotannya saja dan pesan yang hendak disampaikan dapat dibaca pada secarik kain atau benda yang tertempel pada tongkat tersebut. Sebagai

161. Lihat *Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial 1915–1960*, halaman 261.

contoh, bila yang tertempel adalah kain merah maka hal itu dapat diartikan sebagai adanya perang, sedangkan kain putih berarti akan diadakan perdamaian. Kain hitam berarti raja meninggal. Wilayah tugas seorang *gai* ini meliputi beberapa kampung, dimana ia juga berfungsi seperti polisi pada zaman sekarang.



Pembuatan tenun ikat Sikka
Sumber: http://www.inimaumere.com/2009/12/lebih-dekat-dengan-tenun-ikat-sikka.html



Tarian adat Sikka
Sumber: http://www.inimaumere.com/search/label/BuDaYa.

XIII. TANAREA (TANAJEA)

Tanarea merupakan salah satu di antara lima kerajaan di kawasan Ende-Lio. Cerita rakyat menuturkan bahwa nama Tanarea (Tanajea) berasal dari nama leluhur mereka: Rea atau Jea. Rea atau Jea merupakan pemimpin suku pengembara yang berasal dari India Muka dan sebelumnya pernah singgah di Tanah Malaka. Mereka lalu mengarungi lautan dan akhirnya tiba di Flores. Lama kelamaan terbentuklah persekutuan adat Tanarea (Tanajea), yang belakangan berkembang menjadi suatu

kerajaan atau swapraja pada 1907. Sebagai rajanya, Belanda mengangkat Kakadupa atau Uwa Dambo (1907–1915).

Pada 3 Juli 1907, sekonyong-konyong Tanarea menyerang Ende yang menimbulkan korban jiwa serta kerugian besar. Akibatnya, Belanda menurunkan pasukan yang dipimpin Kapten H. Christoffel untuk mengamankan kawasan tersebut. Pada 9 Agustus 1907, pasukan Belanda tiba di Ende, yang tinggal puing-puing belaka, dan melanjutkan ekspedisi militernya memasuki Tanarea serta menaklukkan daerah-daerah lain yang masih memusuhi Belanda.

Raja Kakadupa digantikan oleh Iju Uwa (1915–1917). Pada masa pemerintahannya, Belanda memaksa rakyat bekerja paksa membangun jalan dan jembatan. Akibatnya, perlawanan terhadap Belanda pecah pada Agustus 1916–Februari 1917, yang dipimpin oleh Nipa Do. Pada mulanya, tokoh ini mendapat perintah Raja Tanarea memimpin rakyatnya bekerja rodi membuat jalan raya Ende–Bajawa. Namun, medan yang terjal sungguh memberatkan rakyat. Selain itu, para mandor yang ditunjuk Belanda kerap bertindak kejam. Belanda berhasil mematahkan perlawanan ini dan Nipa Do dijatuhi hukum tembak. Sementara itu, pembantunya yang bernama Rae Sape menyerahkan diri dan diasingkan ke Kupang. Singgasana Tanarea kemudian beralih pada Josef Ute (1917–1923). Belakangan, Tanarea disatukan dengan Kerajaan Ende oleh pemerintah kolonial Belanda.

D. SISTEM PEMERINTAHAN DI PULAU FLORES SECARA UMUM

Sebelum kedatangan Belanda, masyarakat Flores hidup dalam kesatuan adat yang dipimpin oleh seorang *mosalaki*. Ia bertanggung jawab sebagai pelaksana upacara-upacara adat di tengah masyarakat negeri tersebut. Selain itu, masih dikenal pula jabatan *ria bewa* selaku hakim adat. *Mosalaki* tertinggi disebut *mosalaki puu ine ame*, yang masih dibantu oleh para *mosalaki* dengan tingkatan lebih rendah, seperti *mosalaki tu tego taga mido.* Setelah Belanda memasuki kawasan ini, para *mosalaki* yang menandatangani kontrak politik dengan Belanda diberi gelar raja. Para *mosalaki* yang lebih rendah tingkatannya berganti sebutannya menjadi kapitan dan penggawa. Sementara itu, di bawah mereka terdapat para kepala kampung yang langsung berhubungan dengan rakyat.

E. KERAJAAN-KERAJAAN DI PULAU ROTE DAN NDAO

Di Pulau Rote terdapat 15 kerajaan (*nusak*) dan pada abad 18–19 bertambah jumlahnya menjadi 18. Sistem pemerintahan yang umum di masing-masing *nusak* adalah membagi kekuasaan menjadi dua, yakni yang bersifat mistik atau spiritual dan duniawi. *Mane* atau *manek* (raja) merupakan penguasa yang memegang kekuasaan spiritual dan dianggap lebih tinggi kedudukannya. Sementara itu, *feto* atau fetor yang juga berlaku sebagai wakil raja mengurusi urusan pemerintahan dan dianggap mengemban kekuasaan bersifat duniawi. Selain itu, masih terdapat lagi suatu dewan pemerintahan yang beranggotakan sembilan orang dan disebut *mane sio* (bangsawan sembilan). Nama lainnya adalah *sio ai* (sembilan pohon) dan *manelutu* (sembilan bangsawan batu halus). Pejabat kerajaan lain yang disebut *manedope* atau *mandombe* bertugas membawa pedang beserta keris raja dan tempat sirihnya. Ia juga memberikan saran dan pertimbangan bagi kebijaksanaan yang hendak ditetapkan raja. *Manesongo* adalah pejabat yang berkaitan dengan upacara kerajaan.

Ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Portugis dan Belanda, kerajaan-kerajaan di Pulau Rote juga terbagi menjadi dua kubu. Kerajaan-kerajaan yang berada di sebelah timur dan tenggara memihak Belanda, sedangkan Kerajaan Dengka, Baa, Loleh, dan Bo Dale (Pau Dale) berpihak kepada Portugis. Belanda kemudian menyerang kerajaan-kerajaan yang berpihak pada musuhnya tersebut hingga akhirnya seluruh Pulau Rote jatuh ke tangan Belanda.

Pemerintah kolonial Belanda melakukan penataan administrasi pemerintahan di Rote. Pada 1892, Loleh, Keka, Talae, dan Bokai disatukan membentuk Kerajaan Empat[162]. Delha dan Oenale disatukan menjadi Swapraja Bolahulu (Dipersatukan Secara Paksa) pada 1919. Lebih jauh lagi, Dengka dan Lelain disatukan menjadi Swapraja Loaholu (Dipersatukan Secara Suka Rela). Belanda menggabungkan pula Ringgou dan Oepao menjadi Swapraja Nusa Lai. Termanu dan Baa digabungkan menjadi Lamakoli. Diu dan Landu bergabung menjadi Daedulu. Lamakoli, Kerajaan Empat, dan Korbafo disatukan membentuk Swapraja Rote Talada. Pada 1919, Lelenuk bergabung dengan swapraja ini. Akhirnya, seluruh kerajaan yang ada digabungkan menjadi satu swapraja pada 1928, yakni Swapraja Rote di bawah pimpinan Y.S. Kedoh.

162. Lihat *Perlawanan Ndaumanu Sinlae Terhadak Kekuasaan Kolonial Belanda di Termanu*, halaman 46.

I. BAA

Para raja yang pernah memerintah Baa adalah Lilo Dutamma (± abad 17) dan Tou Dengga Hua (± 1700–± 1734). Penggantinya adalah Tou Donggalilo (Teuw Denka Lilo), yang menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756. Rangkaian penguasa Baa berikutnya adalah Izak Kuamain, Muskanan, Muskanan Pane (–1854), Johannes Muskanan (1854–1862), Alexander (1862–1873), Dun Muskanan (1873–1883), Lusi Detaq (1883–1887), Jesaja Dae Pane (1887–1895), Paulus Dae Pane (1895–1905), Sadrach Mandala (1905), Arnoldus Tule, Muskanan Tule, Dae Pane (–1938), Solemon Stephanus Detaq (1938–1951), Izak Dae Pane (1951–1960), dan Tobias Mandala (1960–1963).

II. BILBA

Manek Bilba yang pertama adalah Mangarai (± 1660–1662)[163]. Rangkaian raja-raja selanjutnya adalah Reti (± 1673–1677), Lase Reti (1677–± 1680), Theon Mangarai (± 1691–1698), Balok Theon (± 1712–1749), dan Solu Tupa (± 1727). Raja Daniel Jeuw (Iyu Solu, 1749–1768) tercatat pernah menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756. Sebelumnya, kerajaan ini merupakan salah satu di antara empat *nusak* (kerajaan) di Rote yang menyatakan kesetiaannya kepada Belanda (diwakili oleh Ter Horst) pada 1653. Para penerus Daniel Jeuw adalah David Solu Tupa (1768–1783), Theon Balok (± 1800–± 1801), Lenggu Saba (1830–1868), Pieter Lenggu (1868–1870, pemerintahan pertama), David Lenggu (1870–1874), Pieter Lenggu (1874–1884, pemerintahan kedua), Alexander Nero Lenggu (Manafe Ao, 1884–1886, pemerintahan pertama), Pedama Mangalai Saba (1886–1895), Alexander Nero Lenggu (1895–1908, pemerintahan kedua), Soleman Pedama Mangalai Saba (1908–1925), Yusuf Saba (1925–1926), Abraham S. Therik (1926–1936), dan Mathias Alexander Lenggu (1937–1945).

III. BOKAI

Pelo Ey, kepala orang Mardeyker di Bokai, pernah menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756. Rangkaian *manek* yang berkuasa selanjutnya di Bokai adalah

163. Menurut manuskrip karya Hans Hägerdal berjudul *Kerajaan-kerajaan Indonesia*, halaman 47; silsilah Mangarai adalah sebagai berikut Fefido Ne–Poy Fefido–Lay Poy–Ngala Lay–Misa Ngela–Dane Mesa–Hay Dane–Alo Hay–Memo Alo–I Memo–Idu I–Nelu Idu–Mangalia–Nelu–Mangarai.

Geo Sude (± 1832), Dupe Geo (–1851), Dule Dupe (1851–1868), Sima Sude Kappa (1868–1873), Salomon Dule (1873–1877), Marcus Daluh Dupe (1877–1887), Paoh Ndolu Dupe (1887–1892), Tazi Fodik (1892), Tae Taka (Mika Taka), dan Messak Dupe (1931–1969).

IV. DELHA

Delha merupakan salah satu di antara ketiga *nusak* yang berdiri belakangan atau merupakan tambahan bagi 15 kerajaan yang telah ada sebelumnya di Pulau Rote. Delha memisahkan diri dari Oenale pada 1800–1840. Menurut catatan *Regeerings Almanak*, Raja Delha, Daniel Ndun, menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial pada 4 Desember 1886.

V. DENGKA

Raja Dengka pertama adalah Tullia (± 1662–± 1676). Selanjutnya pemerintahan dijalankan oleh fetor-fetor bernama Luse Tullia dan Moni Lusi. Dengka kemudian diperintah oleh Raja Henuk Kane (± 1691–1727) yang digantikan oleh Manafe Henoek (Manafe Henuk, 1727–1779). Ia menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756. Sepeninggal Manafe Henuk, Dengka secara berurutan diperintah oleh Andries Henuk Pah Manafe (1779–± 1800), Doki Pah Manafe (± 1803), Bauk (± 1832), Tungga Koten (1854–1858), Adu Tungga (1859–1890), Paulus Adu Tungga (Kote Adu, 1891–1903), Alexander Adu Tungga (1904–1906), dan Alexander Paulus Tungga (1907–1911).

VI. DIU

Raja-raja yang memerintah Diu secara berturut-turut adalah Noi Bessu (± abad 17), Manafe Boleh (± abad 18), dan Duri Teti (Doeri Tety). Ia tercatat menandatangani Kontrak Paravicini pada 1756. Para penggantinya yang duduk di atas singgasana Diu adalah Jacobus Manafe (± 1832–1851), Detan Manafe (1851–1879), Poli Lio (1879–1884), Jacobus Paulus Manafe (1884–1887), Soleman Manafe (1887–± 1900), Paulus David Manafe (± 1905), S. Ch. Manafe (1937–1938), David Paulus Manafe, dan Albertus Paulus Manafe.

VII. KEKA

Keka merupakan *nusak* tambahan kelima belas *nusak* yang sebelumnya telah ada. Berdiri pada 1770 setelah memisahkan diri dari Termanu. Raja Josef Malelakh dikukuhkan kedudukannya tanggal 9 Desember 1876. Penguasa berikutnya, Laazar Malelakh menandatangani kontrak pada 8 Juli 1888.

VIII. KORBAFO

Kerajaan ini pernah diserang oleh Belanda pada 1654 dalam suatu ekspedisi militer yang dipimpin oleh Ter Horst karena memihak Portugis, musuh bebuyutan Belanda. Para *manek* yang pernah memerintah Korbafo adalah Pelau (± 1660), Ndun (± 1662), Sadok (±1690–± 1694), Pikatik (± 1692–± 1740/43), Leuana Leuana (± 1740/43–1781), Lodong Dozain (1781–± 1800), Pelo Lodong (± 1800), Leuana (± 1832), Koliaman Bibikate (±1841–1852), Lukas Pakuleu (1853–1859), Jessak Manubulu (1860–1873), Soleman Izaak Manubulu (1876–1922), Cornelis Izaak (1922–1926), dan Christiaan Paulus (1926–1989).

IX. LANDU

Kerajaan Landu merupakan salah satu di antara empat *nusak* di Pulau Rote yang menyatakan dukungannya terhadap Belanda pada 1653. Raja-raja yang pernah berkuasa di Landu adalah: Meno Balo (± 1673–1703/ 05), Belkamo (1703/ 05–1725/ 27), Dale Meno (1725/ 27–1732) dan Angi Meno (1732–1736/ 39). Baik Dale Meno maupun Angi Meno merupakan putra Meno Balo. Semasa Raja Geolima Belkamo (Geo Lima Balakama, 1736/ 39–1756) yang menggantikan Angi Meno, hubungan dengan Belanda makin diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Paravicini pada 1756. Para penguasa Landu berikutnya adalah Bane Dale (1757–1775), Bane Dailafa (1775–?), Nai Lasa Bane (± 1784), Ba Bane (± 1790), Suzas Bane (± 1792), Adi Bane (± 1803), Ndun Adi (± 1832), Bane Suza, Dai Lafa Ba, Bane Dai Lafa, Yusuf Willem Johannis (Dale Bane, 1883–1905), Daud Willem Johannis (1906–1908), Lasarus Yusuf Willem Johannis (1908–1916), Matheos Yusuf Willem Johannis (1916–1960), dan Marthen Matheos Johannis (1960–1966).

X. LELUNUK

Lelunuk adalah salah satu *nusak* yang berdiri belakangan, dan merupakan pemisahan dari Kerajaan Bokai. Raja Hendrik Toka menandatangani Perjanjian Paravicini pada 7 September 1877. Pada perkembangan selanjutnya, ia digantikan oleh Soleman Daik yang menerima pengukuhan kedudukan pada 4 Desember 1886.

XI. LOLEH

Raja Loleh bernama Daniel Ndaomanu pernah menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756. Raja-raja yang pernah berkuasa di Loleh adalah Jacobus Zakarias (disahkan 16 Oktober 1860) dan Daniel Petrus Zakarias (menerima pengukuhan kedudukan tanggal 27 Juni 1884).

XII. NDAO

Raja-raja yang memerintah di Ndao adalah Bungga Bauw (± 1753), Dulli Tetti (± 1755/6), Ledekke (± 1832), Lollei Kotten (1851–1870), Abraham Mingga (1870–1876), Hendrik Kotten (1876–1905), Zadrack Kotten (1905–1925), Frans Kotten (1925–1940), dan Ferdinand Baun (1940–1968).

XIII. OENALE

Leluhur *nusak* Oenale konon berasal dari Maluku selatan. Raja-raja yang pernah memerintah Oenale adalah Limbe Longga (± abad 16), M'Boro Mesa (abad 17), Fanggi M'Boro (± 1691–± 1720), dan Nafi Fanggi (± 1720–± 1756). Ia digantikan oleh Raja Sande Naie (Sande Nafi, ± 1756–± 1832) yang menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756. Para penguasa berikutnya adalah Daon Delthan (± 1832), Dethan Messa (–± 1843), Messah Giri (1844–1868), Jacob Messah Giri (1868–1895), Soleman Messah Giri (1895–1900), Tobias Messah Giri (1900–1918), Hanok Lenggu (1918–1927), Simon Messah Giri (1927–1939), dan Hendrik Hanok Lenggu (1939–1961).

XIV. OEPAO (OESIPOLA atau OSSIPOKO)

Awalnya, Oepao terdiri dari delapan wilayah disebut *leo* yang berdiri sendiri-sendiri. Belakangan, atas anjuran Portugis diangkat seorang raja bagi kedelapan *leo* tersebut, yakni Lere Mera yang berasal dari Leo Ina Ai. Pemimpin baru tersebut diangkat dari *leo* terkuat saat itu dan selanjutnya ia diberi gelar *manek*, sedangkan

pemimpin *leo* lainnya yang lebih lemah bergelar fetor. Pada perkembangan selanjutnya, Raja Oepao pada 1653 berbalik menyatakan dukungannya kepada Belanda yang diwakili oleh Ter Horst. Raja Wolterus Namo dari Oepao pernah menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756. *Manek-manek* selanjutnya yang pernah berkuasa di Oepao adalah: Kurus (± 1832), Markus Meoh (–1855), Sangu Resi (1855–1868), Tomas Marek Dungun (1868–1877), Tesa Dungun (1877–1879), Besi Sangu (1879–1889), Tobias Martinus Dungun (1889–1895), Dunggu Tesa Aek (1898–1905), Simon Besi, Amos Besi, dan Junus Besi.

XV. RINGGOU

Christian Bacoma merupakan Raja Ringgou yang tercatat pernah menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756. Sebelumnya, pada 1653, Raja Ringgou merupakan salah satu di antara empat penguasa Pulau Rote yang menyatakan sumpah setianya kepada Belanda. Saat itu, Belanda diwakili oleh Ter Horst. Dengan demikian, Ringgou menjadi musuh Portugis. Raja-raja lain yang berkuasa di Ringgou adalah Talima Daud (disahkan kedudukannya pada 5 Februari 1878) dan Petrus Nahum Lelie (disahkan kedudukannya pada 10 Juli 1889).

XVI. TERMANU

Leluhur Kerajaan Termanu adalah Ma Bulan. Urutan para penggantinya adalah sebagai berikut: Muskanan Mak, Kila Muskanan, Kelu Kila, Leki Kelu, Amalo Leki, Tola Manu Amalo, Seni Tola, Kila Seni (1660–1678), Pelo Kila (1678–1699), Sinlae Kila (1699–1717), dan Ndaumanu Sinlae (1717–1745). Semasa pemerintahan Raja Kila Seni mulai berlangsung hubungan politik dan militer dengan Belanda[164]. Hubungan dengan Belanda mulai memburuk sejak seorang bangsawan bernama Baa Mai dituduh melakukan kejahatan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan adat di Termanu. Tetapi Baa Mai ingin menyelamatkan dirinya dan mencari perlindungan pada VOC. Kendati Ndaumanu Sinlae melakukan protes, VOC tak bersedia menyerahkan kembali Baa Mai.

Belanda kembali ikut campur dalam urusan internal Termanu pada 1724, yakni ketika Ingufao dan Hoi Ledo ingin melepaskan dirinya dari Termanu. Keinginan kedua kawasan tersebut mendapatkan dukungan VOC. Oleh karenanya,

164. Lihat *Perlawanan Ndaumanu Sinlae Terhadap Kekuasaan Kolonial Belanda di Termanu*, halaman 55.

kekecewaan Ndaumanu Sinlae terhadap VOC makin besar. Kondisi makin memanas karena salah seorang adik raja bernama Fola Sinlae mengincar tahta. Ia diam-diam menghasut kakaknya melakukan perlawanan terhadap Belanda. Apabila Termanu kalah, Ndaumanu Sinlae sudah pasti akan disingkirkan dan Fola Sinlae mengharap dirinya diangkat sebagai penggantinya.

Raja Ndaumanu Sinlae akhirnya melakukan perlawanan terhadap VOC yang menewaskan Opperhofd J.A. Meulenbeek beserta hampir seluruh anggota rombongannya pada 1746. Di antara mereka hanya seorang saja yang selamat. Sedianya, Ndaumanu Sinlae berencana mengundang dan membunuh raja-raja Baa, Loleh, dan Thie. Kendati demikian, hanya Raja Baa yang lolos dari mara bahaya. Raja Thie, Benyamin Messakh Foembura, dan Raja Loleh, Ndii Hua, bernasib sial. Mereka terbunuh oleh laksar Termanu yang diperintahkan mengejar mereka.

Pembunuhan yang dilakukan oleh Ndaumanu Sinlae ini tidak dibiarkan oleh Belanda. Bala bantuan didatangkan guna menghukum Termanu. Raja Ndaumana Sinlae yang terdesak melarikan diri, tetapi dapat ditangkap setelah ditipu dengan ajakan berunding oleh Belanda; memberi kebebasan kepada Ndaumanu Sinlae. Namun, begitu tiba di tempat perundingan, ia ditangkap dan diasingkan ke Kupang. Sumber lain menyebutkan bahwa Ndaumanu Sinlae diceburkan ke laut dalam perjalanannya ke tempat pengasingan, sedangkan sumber yang lainnya lagi mencatat bahwa Raja Termanu ini diasingkan ke Tanjung Harapan.

Sebagaimana yang diharapkannya, Fola Sinlae (1745–1771) ditunjuk oleh Belanda menggantikan kakaknya dan ia tercatat menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756. Belakangan, pada 1770, Keka memisahkan diri dari Termanu dan membentuk *nusak* sendiri. Para raja Termanu yang menggantikan Fola Sinlae hingga era kemerdekaan adalah Sadok Ndaomanu (1776–1786), Amalo Muda (1786–1817), Mauk Amalo (1817–1832), Kiuk Pelo (1832–1851), Fangidae Kiuk (1851–1859), Pelo Keluanan (1860–1875), Stepanus Paulus Amalo (1876–1887), Salmon Pela (1888–1892), Johannis Jeremias Michel Amalo (1894–1912), Christoffel Jeremias Michel Amalo (1912–1942), Chr. J. M. Amalo (1942–1943), Albert Chr. J. M. Amalo (1944–1946), dan Ernest Johanis Jeremias Michel Amalo (1947–1966)[165]. Putra Raja Ch. Amalo bernama Jacob Amalo yang kelak menggantikan ayahnya

165. Lihat *Perlawanan Ndaumanu Sinlae Terhadap Kekuasaan Kolonial Belanda di Termanu*, halaman 55-57.

pernah menuntut ilmu di MULO (*eer Uitgebreid Lager Onderwijs*) Weltevreden (Kota baru), Batavia[166].

XVII. THIE

Raja pertama Thie adalah seorang tokoh bernama Pande yang memerintah kurang lebih pada abad 17, yang selanjutnya digantikan oleh Messakh Mbura (± 1678–1694), Moy Messsakh (± 1697), Nale Messakh (1697–1717), Mbura Messakh (1718–1728), dan Benyamin Messakh Foembura (1728–1746). Foembura pernah mengunjungi Batavia dan mempelajari perihal agama Kristen. Dalam kunjungannya itu, ia datang bersama tiga orang raja Rote lainnya, yakni Ndii Hua dari Loleh, Ndara Naong dari Lelain, dan Tou Donggalilo dari Baa. Setelah dibaptis dengan nama Benyamin pada 1732[167], ia berniat kembali ke Rote dan mendirikan sekolah di sana. Oleh gubernur jenderal VOC, ia dihadiahi sebatang tongkat berkepala emas berukirkan namanya, beberapa jilid Alkitab, dan lain sebagainya. Pada 1734, sekolah yang pertama didirikan di Fiulain. Setiap orang diperkenankan memasuki sekolah ini, termasuk anak raja-raja dari Baa, Lelain, Oenale, Korbafo, Oepao, Bilba, Talae, dan Loleh. Benyamin Messakh Foembura sendiri bertindak sebagai raja, guru, dan sekaligus pendeta. Adapun mata pelajaran yang diberikan di sekolah itu adalah menulis, membaca, berhitung, serta agama Kristen. Setamatnya mengikuti pelajaran, para siswa diwajibkan membuka sekolah semacam itu di daerahnya masing-masing.

Pengganti Foembura adalah Daniel Foukay Pah (1746–1749) dan Alexander Messakh Pah (Yohanes Mesa, 1749–1771). Raja Yohanes Mesa dari Thie tercatat menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756. Raja-raja Thie berikutnya adalah Bastian Mbura Messakh (1771–1783), Paulus Pah Mbesialu (1783–1811), Kobi Pah (1811–1816), Gandi For (1816), Baba Henu (1816–1841), Ndu Kobi (1841–1861), Paulus Messakh (Urai Ndu, 1861–1882), Jonas Nicolaas Messakh (Helo Ndu, 1882–1907), Salmon Messakh (Modo Helo, 1907–1918), David Jacobis Messakh (Lani Helo, 1918–1921), Foe Moy (1921–1927), Tobias Arnoldus Messakh (Ndu Helu, 1927–1931), Jeremias Wilhelmus Messakh (1931–1948, pemerintahan pertama), Wilhelmus Moy (1948), Saudale (1948–1949), Jusuf Messakh (1949–1951), Jeremias Wilhelmus Messakh (1951–1953, pemerintahan kedua), Hermanus Haning

166. Lihat *Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial 1915–1950*, halaman 260.
167. Ada sumber lain yang menyebutkan bahwa sebelum berlayar ke Batavia, Foembura telah menganut agama Kristen. Lihat *Perlawanan Ndaumanu Sinlae Terhadap Kekuasaan Kolonial Belanda di Termanu*, halaman 65.

(1953–1956), Jeremias Arnoldus Messakh (Kobi Pah, 1956–1962), Thobias Arnoldus Messakh (1962–1970).

F. KERAJAAN-KERAJAAN DI PULAU SABU (SAWU)

Orang Sabu meyakini bahwa nenek moyang mereka bernama Kika Ga, yang konon datang dari Hurat (Surat) di pantai utara Bombay, India, dengan mengendarai seekor kuda betina abu-abu hitam[168]. Pada mulanya, ia singgah di Pulau Jawa dan setelah itu melanjutkan perjalanannya ke Pulau Raijua (Jawa Wawa). Di sana, ia menikahi seorang wanita bernama Muji Rau dan dikaruniai seorang anak bernama Hu Kika. Mereka kemudian pindah ke Teriwu. Sumber lain meriwayatkan bahwa Kika Ga yang berasal dari tempat yang jauh pada mulanya tinggal di Wadu Mea, yakni sebuah batu di tengah laut. Waktu itu Pulau Sabu belum ada dan masih berupa tonjolan dua gunung saja yang disebut Merabu dan Kebubu. Suatu kali, seorang dewa bernama Luji Liru sedang memancing. Kika Ga terkait oleh pancing itu dan dibawa pada Liru Bala, ayah Luji Liru. Kika Ga diangkat anak oleh Liru Bala dan dinikahkan dengan Lia Ra. Luji Liru menempatkan Kika Ga beserta istrinya ke puncak Merabu. Selanjutnya, Luji Liru pergi ke Ketita, tempat kediaman dewa bernama Mone Weo beserta istrinya, Bei Weo guna mengambil segumpal tanah di bawah rumah kedua dewa tersebut. Tanah itu ditaburkan di sekeliling gunung tadi dan berubah menjadi daratan. Dengan demikian, terbentuklah Pulau Sabu. Kika Ga selanjutnya menjadi leluhur orang-orang Sabu beserta rajanya masing-masing. Belakangan terbentuklah kerajaan-kerajaan Seba, Timu, Mesara, Liae, Teriwu (Raijua), dan Menia. Kerajaan-kerajaan ini disatukan menjadi Swapraja Sabu di bawah pemerintahan Raja Samuel Thomas Jawa pada 1918.

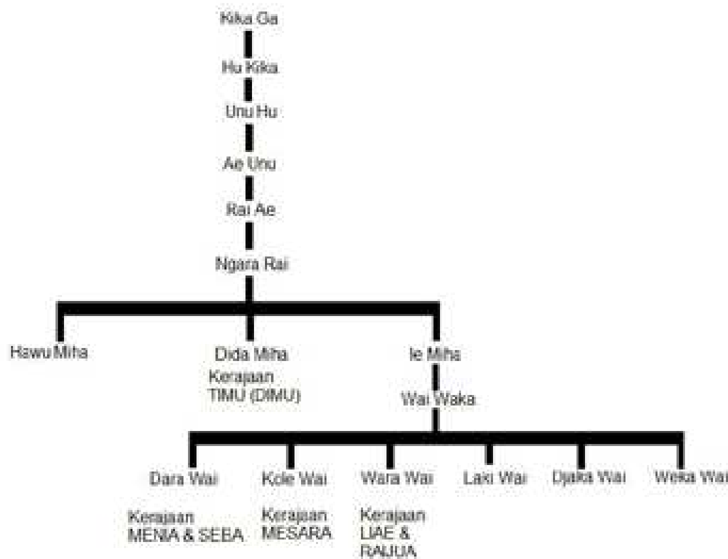
Masing-masing kerajaan di Sawu dan Raijua terdapat suatu dewan adat yang disebut Mone Ama. Dewan adat tersebut beranggotakan[169]:

1. *Pulodo* yang bertugas mengurusi bidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan.
2. *Deo rai* yang bertugas mengurusi bidang ekonomi dan upacara adat.
3. *Dohe Leo* selaku wakil Deo Rai.

168. Lihat *Memperkenalkan Kebudayaan Suku Bangsa Sawu*, halaman 7.
169. Lihat *Memperkenalkan Kebudayaan Suku Bangsa Sawu*, halaman 19.

4. *Maukia* yang bertugas menangani masalah pertahanan dan peperangan (di Timu disebut Tenaba).
5. *RuE* bertugas menangani upacara-upacara adat guna menyucikan sesuatu yang telah tercemar.

Dengan demikian, di kawasan ini telah terdapat sistem pemerintahan yang teratur.



Dibuat berdasarkan *Memperkenalkan Kebudayaan Suku Bangsa Sawu*.

Catatan: Pada halaman lain, Unu Hu disebut Ungu Hu; Ae Unu disebut Ge Ungu; dan Rai Ae disebut Rai Ge.

I. LIAE

Raja Liae pertama yang diakui oleh VOC adalah Kale Lodo. Rangkaian para pengganti Kale Lodo adalah Riwu Manu, Jami Riwu Manu (± 1721), Mone Bengu (± 1726), Mone Bengu (± 1740), Kore Rohi (1752–1756), Kore Lone (1758–1760), Manu Kore (± 1767–± 1794), Ama Moye Keloa (± 1832), Ama Iye Yote (± 1852–1859), dan Ama Baki Bela (1859–1868), yang pada masa pemerintahannya wabah cacar mengganas di Sawu dan dia merupakan salah seorang korbannya. Raja Liae selanjutnya adalah Hendrik Ratu Manu (Ama Amu), dia merupakan Raja Liae terakhir sebelum kerajaannya digabungkan dengan Seba membentuk Swapraja

Sawu. Sementara itu menurut sumber lainnya terdapat silsilah sebagai berikut: Riwu Manu-Rohi Riwu-Kore Rohi-Manu Kore-Riwu Manu-Manu Riwu-Ratu Manu-Riwu Ratu[170].

II. MENIA

Tero Weo adalah reja Menia pertama yang diakui oleh VOC. Para penggantinya adalah Ama Gaja Bengu Tagi (± 1760–± 1790), Gaja Bengu (–± 1794), Rehi Bengu (± 1794–), Ama Piga Tagi (± 1832), Tagi Rehi Ama Gaya (1842–1868), dan Ama Lena Rihi (1868–1873). Pada 1874, Menia digabungkan dengan Seba.

III. MESARA

Leluhur raja-raja Mesara adalah Kika Ga, Hu Kika, Ungu Hu, Ge Ungu, Rai Ge, Ngara Rai, Miha Ngara, Ie Miha, Mona Ie, Aba Mone, Kebo Aba, Huba Kebo, Waka Huba, Wai Waka, Kole Wai, Horo Kole, Wila Horo, Lele Wila, Tana Lele, Rai Tana, Lobo Rai, Hau Lobo, Titu Hau, Lulu Titu, Riwu Lulu, Jami Riwu, Weo Jami, Weo Jami, Lay Wei, Haba Lay, Mone Haba, Riwu Mone, dan Jami Riwu. Sementara itu, pada sumber lainnya terdapat silsilah sebagai berikut: Wele Djami-Kore Wele-Dimu Kore-Buki Dimu-Uli Buki-Dju Uli-Kore Dju-Bore Kole atau Benjamin Buki[171].

Raja-raja yang pernah memerintah Mesara secara berturut-turut adalah Wele Jami (± 1717–1721, raja pertama), Kore Wele (± 1752), Ama Loni Dimu Kore (± 1756–1760), Rugi Dimu (1760–) dan Jaga Biwu (1761–1781), Buki Dimu (1781–± 1794), Ama Bisi Ulu Buku (1832–1868), Ama Lebe Ju Uli (1868–1893), dan Ama Tengo Doko Ju (Domingoes Buki, 1893–1914).

IV. SEBA & SWAPRAJA SAWU

Seba merupakan kerajaan yang paling berpengaruh di Pulau Sawu. Leluhur raja-raja Seba adalah sebagai berikut: Kika Ga (pendatang pertama di Sabu), Hu Kika, Ungu Hu, Ge Ungu, Rai Ge, Ngara Rai, Miha Ngara, Ie Miha, Mona Ie, Aba Mone, Kebo Aba, Huba Kebo, Waka Huba, Wai Waka, Dara Wai, dan Hila Dara. Setelah tujuh belas generasi, lahirlah Kore Rohi yang merupakan Raja Seba pertama.

---

170. Lihat *Memperkenalkan Kebudayaan Suku Bangsa Sawu*, halaman 58, bagian silsilah Liae.
171. Lihat *Memperkenalkan Kebudayaan Suku Bangsa Sawu*, halaman 57, bagian silsilah Mesara.

Keturunan Kore Rohi yang menduduki singgasana Seba adalah Ojami Kore, Haba Ojaba[172] (Haba Jami), Lay Haba, Bire Lay, Riwu Bire, Lomi Riwu, dan Jara Lomi. Lomi Jara, Raja Sabu yang selanjutnya, tercatat pernah menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756.

Penggantinya adalah Wadu Lay, Jara Wadu, Ama Doko Lomi Jara, Doko Lomi (± 1790–1794), Ama Lomi Jara (1830–1859), dan Ama Dima Talo (1859–1863). Raja Ama Nia Jawa (1863–1868) pernah mengusulkan kepada residen pada 1862 agar 400 orang Sabu dipindahkan ke Kadumbulu supaya mereka memperoleh penghidupan yang lebih baik serta dapat menjadi pengawas atau memata-matai gerak-gerik orang Ende di Sumba. Residen menyetujui gagasan tersebut walaupun mendapat tentangan dari orang Ende. Pengganti Raja Ama Nia Jawa adalah Ama Doko Kaho (1868–1881), Lazarus Rosi Jawa (1882–1889), Aleksandar Rihi Jawa (1890–1901), Elias Luji Raja Pono (1901–1906), dan Samuel Thomas Jawa (1907–1935).

Pada perkembangan selanjutnya, Belanda membentuk Swapraja Sawu yang merupakan penggabungan kerajaan-kerajaan kecil lainnya di Pulau Sawu (Seba, Timu, Mesara, Liae, Teriwu (Raijua), dan Menia). Raja Samuel Thomas Jawa diangkat sebagai kepala swapraja tersebut semenjak 1915. Dia kemudian digantikan oleh saudaranya, Paulus Charles Jawa, yang memerintah hingga 1963.

V. TERIWU (RAIJUA)

Raja-raja yang memerintah Teriwu adalah Lomi Tulu (wafat 1794), Raja Tulu (1794–?), B'aku Ruha-raja pertama yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda-, Messe Tari (Ama Mehe Tarie. 1830–1868), Ama Loni Kuji (1868–1915), dan Ama Meda Lay (1915–1918), raja pertama yang memeluk agama Kristen dan dibaptis dengan nama Paulus. Setelah itu Raijua digabungkan dengan Seba membentuk Swapraja Sawu. Para raja Raijua lalu diturunkan tingkatannya menjadi fetor. Sumber lainnya mencantumkan silsilah sebagai berikut: Baku Ruha, Haba Baku, Njebbe Haba, Laij Njebbe, Kore Laij, Dima Kore, Laij Dima, Kudji Laij, Laij Kudji, dan Pia Laij[173].

172. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 53.
173. Lihat *Memperkenalkan Kebudayaan Suku Bangsa Sawu*, halaman 62-63, bagian silsilah Raijua.

VI. TIMU (DIMU)

Raja-raja yang pernah memerintah Timu adalah Talo (± 1672), Ama Rohi (Ama Rosi, ± 1676), Luji (± 1696), dan Rohi Rano (Rasi Rano, 1710–1731), yang semasa pemerintahannya, pecah pemberontakan dua orang temukung (kepala desa) bernama Ama Rati dan Leba. Pergolakan ini dipicu oleh niat Rohi Rano yang mewariskan singgasananya kepada cucunya bernama Hili (Sili) Haba. Ama Rati sendiri merasa berhak atas tahta Dimu sehingga dengan dukungan Seba beserta Liau mengadakan perlawanan terhadap Rohi Rano. Pada 11 Maret 173, Hili Haba dilarikan ke Kupang. Belanda turun tangan dan mendukung Hili Haba (1731–1798) sebagai Raja Timu. Para penggantinya adalah Elias Jara Hili (Sili) (1798–± 1805), Rewa Daga (± 1832), Ama Hili Haba (± 1851–?), Ama Lai Daga (±1858–?), Eduard Jara Luji, dan Ama Piga Jara (1868–1911). Selanjutnya, pemerintahan Timu diambil alih oleh garis keturunan fetor-nya, yakni Saul We Tanya (1911–1918). Semenjak 1918, Timu digabungkan dengan kerajaan-kerajaan lainnya membentuk Swapraja Sawu.

Sumber lainnya memberikan keterangan bahwa Hili Haba merupakan cucu Djami Dai dan putra Haba Djami. Sementara itu silsilah Jara Luji (Djara Ludji) berisikan nama-nama yang berbeda dengan sumber di atas, yaitu Dida Miha, Hue Miha, Dake Hue, Hama Dole, Paha Hama, Laij Paha, Muri Laij, Kebi Muri, Dowu Kebi, Uli Dowu, Kore Uli, Koli Kore, Dai Koli, Paha Dai, Nuka Paha, Rohi Nuka, Tuka Rohi, Lobo Tuka, Djami Lobo, Haba Djami, Talo Haba, Maru Talo, Lobo Maru, Ludji Lobo, dan Djara Ludji. Sedangkan sisilah Hili Haba adalah Dida Miha, Hue Miha, Dake Hue, Hama Dole, Paha Hama, Laij Paha, Muri Laij, Kebi Muri, Dowu Kebi, Uli Dowu, Kore Uli, Koli Kore, Dai Koli, Djami Dai, Haba Djami, dan Hili Haba[174].

G. KERAJAAN-KERAJAAN DI PULAU SUMBA

Salah satu legenda yang tersebar di kalangan masyarakat Sumba menyatakan bahwa leluhur mereka berasal dari suatu tempat yang disebut Malaka Tanabara (diidentikkan dengan Semenanjung Malaka), dan sampai ke Sumba setelah menyinggahi berbagai tempat seperti Kapa Riu, Ndua Riu, Kapa Njawa, Ndua Njawa, Pikuku Mbali, Ndima, Makaharu, Ende, Amurai, Ndau, Haba, Rau Jua, dan akhirnya tiba di Pulau Sumba. Nama-nama tempat yang baru saja disebutkan itu tampaknya mengacu pada kawasan-

174. Lihat *Memperkenalkan Kebudayaan Suku Bangsa Sawu*, halaman 60-61, bagian silsilah Timu.

kawasan di Sumatera, Jawa (Kapa Njawa dan Ndua Jawa), Bali (Pikuku Mbali), dan pulau-pulau lainnya. Mereka datang secara berkelompok dengan menggunakan perahu sebelum akhirnya mendarat di Haharu Lendewatu, yang sekarang dikenal sebagai Tanjung Sasar di sebelah utara Pulau Sumba bagian barat. Haharu Lendewatu sendiri dalam legenda Sumba berarti "Jembatan Batu" yang menghubungkan Sumba, Bima (di Pulau Sumbawa), dan Manggarai (di Pulau Flores). Karena kekuatan alam, jembatan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut kemudian hancur sehingga ketiga wilayah tersebut terpisah.

Kelompok yang berdiam di Pulau Sumba makin bertambah banyak. Oleh karenanya, para leluhur bermusyawarah untuk menentukan nama kelompok masing-masing. Masing-masing kelompok itu merupakan kesatuan adat secara genealogis yang berasal dari keturunan leluhur tertentu dan dinamakan *kabisu*. Istilah ini dapat disetarakan dengan marga, suku atau klan. Setelah berikrar untuk tetap bersatu dalam persekutuan atau persaudaraan adat masing-masing, berpisahlah berbagai kelompok tersebut untuk menemukan tempat kediaman baru. Mereka adalah cikal bakal kerajaan-kerajaan di Pulau Sumba.

Sumba merupakan kawasan yang banyak ditumbuhi cendana. Karenanya, salah seorang wakil VOC di Kupang bernama Engelbert melaporkan pada gubernur jenderal bahwa Belanda akan memperoleh keuntungan besar apabila berdagang di sana. Namun, laporan ini kurang ditidak lanjuti Belanda karena musuh besarnya, Portugis, masih bercokol di sana. Pada 1749, D.J. van den Burg, wakil Belanda di Kupang, melaporkan bahwa Umbu Yoka Awangu, Raja Mbatakapidu, meminta bantuan Belanda. Karena tak ingin melewatkan kesempatan ini, Belanda mngirimkan utusannya pada 1750 guna mengadakan perjanjian atau kontrak politik dengan para raja Sumba. Secara keseluruhan terdapat delapan kerajaan di Sumba yang bersedia menandatangani kontrak, yakni Mbatakapidu, Mangili, Patawangu, Kanatang, Kapunduk, Napu, Napa, dan Lewa. Kedelapan kerajaan tersebut mengakui kedaulatan VOC dan berjanji tak akan menjual hasil bumi di daerahnya pada pihak lain terkecuali Belanda. VOC mengirim surat ucapan terima kasih pada raja-raja tersebut disertai hadiah berupa senapan, perkakas, tempat arak, hiasan, dan lain sebagainya. Sebagai hadiah balasannya, raja-raja Sumba menghadiahkan sepasang budak pada VOC.

Pada 1756, J. A. Paravicini memperbaharui lagi perjanjian dengan para raja di Timor, Sumba, Rote, Sabu, dan Solor, yang kali ini dilakukan secara tertulis. Saat

penandatanganan dilangsungkan di Kupang, kebetulan Raja Mangili sedang berada di sana sehingga ia diminta mewakilli ketujuh raja Pulau Sumba lainnya. Raja-raja Sumba pada abad 18 masih kerap terlibat perselisihan satu sama lain. Sebagai contoh, pada 1773 Raja Mangili dilaporkan berseteru dengan Raja Umalulu, yang bersekutu dengan orang-orang Portugis di Larantuka.

I. ANAKALANG atau ANAKALANGU

Menurut legenda, leluhur warga Anakalang turun langsung dari langit ke suatu tempat bernama Fahi di bagian utara Anakalang[175]. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Raja Umbu Dongu Ubini Mesa. Dia digantikan oleh putranya bernama Raja Umbu Ngailu Dedi (Oemboe Ngailu Diddoe, 1913–1927) yang berkedudukan di Makatakiri. *Raja bantu*-nya bernama Umbu Babu Marambanjara (Martambajara) yang berkedudukan di Parawatana (Parewatana). Raja Umbu Ngailu Dedi menandatangani *Korte Verklaring* pada 30 Juni 1913.

Raja Umbu Ngailu Dede mangkat pada 1927 dan digantikan oleh Umbu Sapi Pateduku[176] (1927–1953), yang menjadi raja hingga era kemerdekaan. Dia digantikan oleh putranya, Umbu Remu Samapati (1953–1962). Ia kemudian terpilih sebagai anggota Majelis Pemerintahan Harian Daerah Kabupaten Sumba Barat. Sementara itu, tugas-tugasnya sebagai Raja Anakalang diemban oleh iparnya, Umbu Sulkungi Ibilona. Ketika Lende Kalumbang, Raja Laura, yang menjabat sebagai bupati pertama Sumba Barat meninggal dunia, dia dipilih sebagai bupati kedua kabupaten tersebut hingga 1973.

II.KADUMBULU

Umbu Hiwa, Raja Kadumbulu, pernah menandatangani perjanjian yang diperbaharui dengan Belanda (diwakili Residen WLH Brocx) pada 20 Juni 1860. Ketika terjadi serangan orang-orang Ende, Raja Umbu Hiwa Kambuku terpaksa melarikan diri ke pegunungan, peristiwa ini menandai akhir Kerajaan Kadumbulu. Kekosongan ini dimanfaatkan oleh Raja Taralandu dari Lewa Kambera untuk

175. Lihat *Sejarah Kerajaan-kerajaan di Sumba Barat*, halaman 65.
176. Lihat Lintasan Sejarah Bumi Cendana, halaman 321; tetapi buku *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 29, mencantumkan namanya sebagai Umbu Sapi Pakduka.

menguasai Kadumbulu. Pada 1862, ia memindahkan rakyatnya ke Kadumbulu yang telah ditinggalkan tersebut.

III.KAMBERA

Raja-raja yang berkuasa di Kambera adalah Salay Patar (± 1726), Umbu Hina Hanguwali, dan Umbu Gaba Hingu. Ketika Residen WLH (Willem Leendert Hendrik) Brocx memperbaharui kembali perjanjian dengan para raja Sumba pada 20 Juni 1860, penguasa Kambera yang tercatat menandatanganinya adalah Raja Umbu Tunggu Jama Kareminjawa atau Umbu Pingi Ai (± 1845–1861) yang mangkat pada 1861. Sebenarnya yang berhak menggantikannya adalah Umbu Yiwa Makabunggulu, putra saudaranya. Namun, Taralandu dari Lewa merebut kedudukannya dan semenjak itu Kerajaan Kambera disatukan dengan Lewa menjadi Lewa Kambera.

IV. KANATANG

Rangkaian penguasa yang memerintah Kanatang adalah Umbu Nggala Lili (–1848), Umbu Nggaba Hambangu Bani (1848–1891), dan Umbu Maramba Kambaru Windu Maru Mata (1892–1897). Raja Umbu Lai Sumbu (1898–1913) atau Umbu Gala Lili menandatangani *Verklaring Betreffende Belastingheffing* (Kontrak Mengenai Penaikan Pajak) pada 14 Oktober 1901. Kontrak berupa *Korte Veklaring* kembali disodorkan kepada raja yang sama dan ditandatanganinya pada 28 Januari 1908. Raja berikutnya, Umbu Hai Retanggu Hadambiwa (Umbu Nai Haru, 1919–1946) menandatangani *Korte Verklaring* pada 23 Juni 1914. *Raja bantu*-nya adalah Umbu Hunga Hama atau Umbuna i Ndawa yang berkedudukan di Rakawatu. Belakangan karena para rajanya menentang Belanda, Kerajaan Kapunduk dan Napu digabungkan dengan kerajaan Kanatang.

Umbu Hai Retanggu Hadambiwa mangkat pada 1946[177] dan digantikan oleh Umbu Tunggu Mbili Nggamunahu atau Umbu Janggatera (1946–1959), yakni putra Umbu Nggaba Mekengukonda (Mehangukonda), Raja Kapunduk yang dicopot kedudukannya oleh Belanda. Sebelumnya, Umbu Janggatera pernah menjabat sebagai *raja bantu* bagi wilayah Kapunduk Napu. Setelah menjadi Raja Kanatang,

177. Buku *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur* menyebutkan bahwa Raja Kanatang ini (Umbu Haru) memerintah dari 1914–1946. Sementara itu, buku *Lintasan Sejarah Bumi Cendana* memberikan keterangan bahwa raja mangkat di tahun 1934.

kedudukannya sebagai *raja bantu* diisi oleh adiknya, Umbu Kambangu Hamara (Umbu Kadambungu Nggedingu atau Umbuina I Wulangu, 1959–1962). Umbu Janggatera mangkat pada 1959 dan digantikan oleh adiknya, Umbu Kambangu Hamara (Umbu Kadambungu Nggedingu), yang memerintah hingga dihapuskannya berbagai swapraja pada 1960-an.

V. KAPUNDUK

Raja-raja yang memerintah Kapunduk adalah Juku Awang (± 1749–1756), Umbu Kambang (± 1845), dan Umbu Panda Huki Landu Jama (± 1870–1901). Pada 13 Oktober 1901, Raja Umbu Janggatara (Umbu Lai Dundu atau Umbu Tunggu Mbili Nggamunahu atau Umbu Tunggu Namu Praing, 1901–1904) dari Kapunduk menandatangani dua kontrak, yakni *Timor Verklaring* dan *Verklaring Betreffende Belastingheffing* dengan Belanda. Raja lainnya yang pernah berkuasa di Kapunduk adalah Umbu Delu Jara Belu (1906–1914) dan Umbu Nggaba Mekengukonda (Mehangukonda, 1914–1927) atau Umbuna i Taku ((Oemboe Nai Takoe), lihat Lintasan Sejarah Bumi Cendana, halaman 291). Ia menandatangani *Korte Verklaring* pada 24 Juni 1914, dan akibat menentang Belanda, kerajaannya dihapuskan dan digabung dengan Kanatang. Raja berikutnya adalah Umbu Nai Haru (1926–1946).

VI. KARERA

Kerajaan Karera digabungkan dengan Mahu (Masu) pada 1909 dan semenjak saat itu, rajanya yang bernama Umbu Haru Halamatu atau Parawangu turun kedudukannya menjadi *raja bantu* bagi Raja Mahu. Ia kemudian digantikan oleh putranya, Umbu Bal Nggiku atau Umbuna I Kambaru, yang berkuasa hingga 1946. Sebagai penggantinya, diangkat putranya yang bernama Umbu Manja Nggaharu (Umbu Hungameha atau Umbuna I Nggaba).

VII. KODI

Leluhur raja-raja Kodi adalah Rato Pohe. Kodi dan Mbangedo mulanya merupakan dua kerajaan yang terpisah. Belakangan kedua kerajaan ini disatukan menjadi Kodi Mbangedo. Belanda ingin meluaskan kekuasaannya ke Kodi dan memaksa para rajanya menandatangani *Korte Verklaring*. Raja Loghe Kandua (1901–1911) dari Kodi Besar tercatat menandatangani *Korte Verklaring* pada 25

September 1907 dan Raja Dera Wula dari Kodi Bokolo menandatanganinya pada 14 Juni 1908. Dengan demikian, pada permulaan abad 20, seluruh Kodi telah jatuh ke tangan Belanda.

Setelah Kodi mengakui pertuanan pemerintah kolonial, Belanda mengutus Sersan Abenk mengeluarkan perintah kepada rakyat untuk melarang perang suku, melakukan perdagangan budak, dan mencuri ternak. Meskipun demikian, para penguasa tradisional di Kodi merasa tersinggung dengan adanya perintah ini. Bukan isi perintah yang membuat mereka terhina, melainkan sikap penguasa asing yang secara langsung memberikan perintah kepada rakyat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan para penguasa lokal tersebut. Dengan kata lain, Belanda telah melangkahi para raja selaku pemimpin tradisional di kawasan itu. Akibatnya, kelak meletus beberapa perlawanan di Kodi, apalagi setelah Belanda memaksakan kerja rodi dan pembayaran pajak yang membebani rakyat.

Perlawanan terhadap Belanda berlangsung pada 1911 di bawah pimpinan Rato Loghe Kandua, Raja Kodi Besar yang pernah menandatangani *Korte Verklaring* dengan Belanda[178]. Pemantik pemberontakan rakyat adalah masalah pajak serta kerja rodi yang dirasa sangat memberatkan. Rakyat dipaksa membangun prasarana berupa jalan, jembatan dan yang lainnya demi kepentingan pemerintah Belanda. Waktu itu, rakyat diperintahkan bekerja paksa membangun jembatan di Sungai Bondo Kodi. Pembersihan saluran dan pemasangan batang-batang kayu sungguh menyengsarakan rakyat. Para pekerja harus berenang dan menyelam di dasar sungai untuk menyusun batu-batu karang sebagai dasar jembatan. Barangsiapa yang bekerja lambat atau kurang gesit akan dikenai hukuman pukulan. Bahkan Pati Manakaho dan Rando Kanda Katupu, dua orang bangsawan Kodi tak luput pula dari hukuman.

Menyaksikan begitu dashyatnya penderitaan rakyat, Raja Loghe Kandua menolak menyerahkan rakyatnya bekerja paksa. Tindakan raja ini dianggap pembangkangan oleh Belanda sehingga ia diperlakukan dengan kasar. Tentunya sikap Belanda ini merupakan penghinaan terhadap martabat seorang raja. Kebiadaban Belanda ini masih ditambah lagi dengan pelecehan seksual terhadap wanita setempat, terutama ibu-ibu yang membawakan makanan beserta sirih pinang pada suaminya yang sedang bekerja rodi. Salah seorang korban adalah Tiala Ghela yang hendak menghantar bekal makanan serta air minum pada suaminya. Komandan pasukan Belanda yang bernama

178. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 33.

Kapten Dijk mengundangnya masuk ke kemah. Tanpa curiga ajakan ini diterimanya. Ternyata di dalam kemah wanita malang tersebut diperkosa dan setelah itu diberi uang satu Ringgit agar tak menceritakan hal itu kepada seorangpun. Kendati demikian, ia melaporkan juga peristiwa itu pada suaminya. Nasib serupa menimpa seorang wanita bernama Kailo Kadondo, yang diperkosa hingga mengalami pendarahan.

Karena tindakan-tindakannya yang biadab dan kurang terpuji itu, rakyat makin membenci kehadiran Belanda. Pati Manakaho yang merupakan saudara Tiala Ghela menjadi sangat berang dan meninggalkan tempatnya bekerja rodi. Setelah mengumpulkan orang-orang, mereka bertekad melawan Belanda. Namun, sebelumnya mereka menyampaikan niat tersebut pada Raja Loghe Kandua. Ternyata raja menyetujuinya sehingga dilakukan persiapan lebih jauh, seperti pengumpulan senjata beserta perlengkapan perang lainnya. Mereka sepakat membunuh siapa saja anggota pasukan Belanda yang dijumpai. Rombongan yang terdiri dari Pati Manakaho, Tiala Gheda, Mali Gheda, dan Radu Tiala berjalan menyusuri sungai guna mencari anggota pasukan Belanda yang sedang berpatroli. Keesokan harinya mereka menjumpai seorang prajurit Belanda yang ditemani seorang prajurit pribumi dari Ende. Mereka berdua sedang mencari rumput dan tak menyadari bahaya yang mengancam. Kedua orang prajurit Belanda itu menjadi sasaran empuk parang rombongan pengintai. Kepala mereka dengan segera terpisah dari tubuhnya. Pati Manakaho kemudian memungut senjata prajurit yang tewas tersebut. Guna memperlihatkan betapa dalamnya kebencian mereka, para pejuang meminum darah kedua prajurit pemerintah kolonial Belanda yang telah terpisah kepala dan tubuhnya itu.

Raja Loghe Kandua menyadari bahwa perlawanan telah disulut dengan adanya pembunuhan di atas. Karena itu, raja bermaksud mengadakan suatu musyawarah perang dan mencari orang yang sanggup menggunakan senjata api. Berdasarkan informasi Pati Manakaho, terdapat seorang tokoh bernama Wonakaka yang piawai menggunakan senjata api sehingga raja mengundangnya. Raja menjelaskan kejahatan-kejahatan Belanda, mulai dari menindas rakyat, memperkosa kaum wanita, serta merendahkan martabat raja dan bangsawan. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila rakyat Kodi bangkit melawan penjajah. Sepucuk senapan diberikan pada Wonokaka oleh Raja Loghe Kandua. Mulanya Wonokaka merasa ragu karena senapan yang mereka miliki hanya sebuah saja, hal ini jelas bukan tandingan pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Tetapi raja mengingatkan tentang kewajibannya melawan

penindasan dan membela rakyat yang teraniaya. Bagi raja, lebih baik hancur ketimbang menerima penghinaan. Bahkan raja tidak segan-segan menawarkan separuh kekayaan Kerajaan Kodi demi membiayai perang. Akhirnya Wonakaka bersedia menerima tanggung jawabnya membela kebenaran dan memimpin pasukan bersama Raja Loghe Kandua.

Genderang perang segera ditabuh dan seluruh peserta musyarawarah meneriakkan pekik peperangan. Selanjutnya dilakukan upacara persembahan dengan mengorbankan delapan ekor kerbau dan sepuluh ekor babi. Para peserta musyawarah pulang ke rumah masing-masing guna mengambil senjata seadanya; tombak, pedang, dan perisai; ikat kepala dari kulit kayu berwarna merah putih; ikat pinggang berisi benda-benda magis; dan lain sebagainya. Mereka merapal mantra-mantra dewa perang. Keesokan harinya mereka berkumpul lagi dan Raja Loghe Kandua memberkati mereka dengan memercikkan air suci.

Saat itu, terkumpul prajurit rakyat berjumlah 100 orang di bawah pimpinan Raja Loghe Kandua, Pati Manakaho, Tiala Gheda, dan Mali Gheda. Mereka kemudian mendatangi markas pasukan Belanda dan menyebar di sekeliling tempat itu. Pertempuran tidak terelakkan lagi dan pasukan Belanda melarikan diri ke hutan di sekitar Parona Baroro. Kendati demikan, Wonakaka harus menghemat peluru karena persediaannya yang terbatas. Sebutir peluru yang ditembakkannya ternyata salah mengenai anak buahnya sendiri hingga tewas. Karena mendapatkan perlindungan dari Raja Hemba Dondo, komandan pasukan Belanda terselamatkan. Pertempuran ini menewaskan banyak serdadu Belanda, dan bila tidak mendapatkan perlindungan dari Raja Mbangedo, pasukan Belanda tentu menderita kerugian yang lebih besar. Setelah terjadinya insiden pada hari itu, pasukan rakyat kemudian ditarik ke Parona Tohikyo tempat pertahanan Raja Loghe Kandua karena hari telah malam.

Guna memadamkan pergolakan di Kodi ini, Belanda mengirimkan pasukan di bawah komando Dijkman. Seperti biasanya, Belanda menggunakan *devide et impera* (taktik pecah belah). Mereka mendekati dan membujuk Raja Hemba Dondo dari Kerajaan Mbangedo, para bangsawan Mbangedo, dan pemuka masyarakat Ende untuk bersama-sama menyerang Raja Loghe Kandua. Keesokan harinya, serangan dilancarkan oleh Belanda dan sekutu-sekutunya ke Parona Tohikyo. Namun, seseorang bernama Bero Pokal sudah membocorkan terlebih dahulu kepada raja dan pengikutnya tentang rencana kedatangan musuh. Oleh karena itu, raja beserta rakyat segera mengungsi ke

Natara Koki. Di tempat baru tersebut, mereka membangun benteng dari batu dan tempat kediaman sementara.

Pasukan Belanda yang dipimpin Kolonel Dijkman mencari-cari tempat persembunyian Raja Loghe Kandua beserta pengikutnya. Pada akhirnya, tempat persembunyian di Natara Koki itu terendus oleh penjajah. Belanda memberangkatkan angkatan perangnya ke sana dan peperangan antara kedua pihak tak terelakkan lagi. Korban berjatuhan di kedua belah pihak, tetapi pasukan Kodi terus melawan dengan gigih, hingga Belanda harus mundur. Menghadapi kekalahan itu, pemerintah kolonial Belanda mengirimkan pasukan bala bantuan yang dipimpin Letnan Barendsen. Selain itu, dengan licik Belanda meminta bantuan Raja Ama mBiri Kalumbang dari Laura untuk membujuk Raja Loghe Kandua agar menyerah. Raja Laura membujuk Loghe Kandua agar menyerah saja, tentunya dengan disertai janji-janji manis.

Raja Loghe Kandua termakan tipuan ini. Ia pergi ke Parona Baroro untuk berunding dengan mengenakan pakaian kebesarannya serta membawa emas sebagai tanda berdamai. Namun, begitu tiba di tempat perundingan raja langsung ditangkap. Lehernya diikat dengan tali kuda. Bersama dengan kemenakannya, Ndera Wulu, raja digiring sejauh 80 km dan mengalami siksaan-siksaan yang keji. Akibat siksaan ini raja meninggal dunia di Memboro.

Meskipun demikian, penangkapan dan mangkatnya Raja Loghe Kandua ini tidak menyurutkan perlawanan. Pemberontakan terhadap penjajah dilanjutkan oleh Wonakaka. Perlawanan ini menjalar pula hingga Waimangura, daerah asal istri Wonakaka. Hingga Desember 1912, perlawanan ini telah menelah banyak korban di pihak Belanda. Meskipun demikian, Barendsen sendiri lolos dari maut berkat pertolongan Raja Waimangura bernama Rato Ndimu serta seorang kepala sekolah bernama Enos Wadu. Rato Ndimu sendiri sebenarnya adalah mertua Wonakaka. Kendati demikian, Wini Mbolu, istri Wanokaka dan putri Rato Ndimu, kemudian meninggalkan Wonakaka dan menikah dengan Letnan Barendsen. Peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi Wonakaka karena istrinya yang pertama tewas dalam pertempuran, sedangkan istrinya yang kedua kini diperistri oleh musuh. Akibatnya, perlawanan Wonakaka mengalami kemunduran. Akhirnya, dengan perantaraan Raja Laura, Ama Mbiri Kalumbang, Wanokaka menyerah dan dijatuhi hukuman pengasingan ke Surabaya. Ia kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan dan Sawahlunto. Wonakaka menemui ajalnya dalam sebuah kecelakaan tambang di

Sawahlunto. Selanjutnya yang berkuasa di Kodi adalah Raja Nderaa Wula (Dera Woela atau Dera Wula, 1912–1945) yang berkedudukan di Tahikyo. Ia menandatangani *Korte Verklaring* pada 14 Juni 1912.

Pada 1931, Kerajaan Mbangedo digabungkan dengan Kodi dan selanjutnya kawasan tersebut diperintah oleh seorang *raja bantu* bernama Tari Loghe. Setelah ia mangkat, Hermanus Rangga Horo diangkat sebagai penggantinya. Ketika Raja Nderaa Wula mangkat, ia digantikan oleh Hermanus Rangga Horo (H.R. Horo, 1945–1962) sebagai Raja Kodi. Dia memegang jabatan ini hingga dihapuskannya daerah-daerah swapraja di Indonesia, lalu diangkat sebagai camat Lokotari (gabungan wilayah Kerajaan Laura, Kodi dan Tana Righu). Hermanus Rangga Horo pernah pula menjabat sebagai wakil ketua Dewan Raja-raja Sumba.

VIII. LAMBOYA

Kerajaan Lamboya pernah diperintah oleh Raja Kedu Mato (Kedoe Moto), yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 8 September 1912. Tidak berbeda dengan rakyat di kerajaan-kerajaan Sumba lainnya, penduduk Lamboya pernah menderita di bawah penindasan pemerintah kolonial Belanda. Rakyat dipaksa membayar pajak yang berat, padahal mereka saat itu belum begitu mengenal sistem pertukaran dengan uang. Oleh karenanya, seorang tokoh masyarakat bernama Tadu Moli bangkit memimpin rakyat melawan penindasan di Watulede. Belanda tidak tinggal diam dan menurunkan pasukan di bawah pimpinan Letnan Neeve untuk menuntaskan masalah pajak ini. Ternyata, pimpinan pasukan Belanda itu menemui ajalnya saat memungut pajak dari rakyat dengan paksa. Tewasnya Letnan Neeve ini merupakan pukulan yang berat bagi Belanda. Letnan Barendsen kemudian diangkat sebagai pengganti Neeve, ia pun berhasil memadamkan perlawanan rakyat Lamboya ini. Ketika Jepang menduduki Pulau Sumba, Raja Lamboya adalah Eda Bora[179].

IX. LAULI

Menurut syair adat *Walu Dani Owang Pitu Dani Lauru*, leluhur Lauli berasal dari Hindia Belakang (daratan Asia Tenggara). Setelah mengarungi tujuh perairan (Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bali, Selat Lombok, Selat Sape, dan Laut Sawu) dan delapan daratan (Malaka, Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, Flores, dan Sumba),

179. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur,* halaman 29.

tibalah mereka di tanah kediaman yang sekarang. Pada mulanya, mereka mendarat dan menetap di Tanjang Sasar dengan mendirikan perkampungan bernama Kampung Wunga[180]. Di sinilah mereka mengembangkan pertanian serta menciptakan berbagai peraturan adat. Diakibatkan jumlah penduduk yang makin banyak, mereka mulai menyebar ke berbagai penjuru Pulau Sumba.

Salah satu kelompok kemudian pindah ke kawasan Lauli (Loli) yang subur dan strategis. Mereka membangun perkampungan baru bernama Weekabubaka (*we'e* berarti "air", sedangkan *kabubaka* berarti "memancar keluar"). Istilah ini akhirnya berubah menjadi Waikabubak. Lambat laun, perkampungan ini makin berkembang dan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Lauli. Ketika itu, di Lauli banyak terdapat suku yang disebut *kabisu*, antara lain: Kabisu Taba, Kabisu Toku Yango, Kabisu We'e Loko, Kabisu Natara Watu, Kabisu Waibangga, dan lain sebagainya. Semasa pemerintahan Raja Boni Lero, Lauli dibagi menjadi dua wilayah kesatuan adat, yakni Lauli Bodo (Lauli Atas) di sebelah timur dan Lauli Bawa (Lauli Bawah) di penjuru timurnya. Belakangan, Lauli Bawah dibagi dua lagi menjadi Lauli Bawah dan Waibangga. Sebelum kedatangan Belanda, telah terdapat tiga kesatuan adat di Lauli, yakni Lauli Bodo (Lauli Atas), Lauli Bawa (Lauli Bawah), dan Waibangga, yang masing-masing dipimpin oleh kepala sukunya. Kendati demikian, ketiga kesatuan adat ini merasa sebagai satu kesatuan dan hidup rukun satu sama lain karena merasakan adanya kesamaan nenek moyang, bahasa, adat istiadat, serta lokasi tempat kediaman mereka.

Kerajaan Lauli pernah diperintah oleh Raja Umbu Ngailu Beku, yang berkedudukan di Para Rami. Kerajaan Lauli terbagi atas tiga wilayah, yakni Lauli Bodo (Atas), Lauli Bawa (Bawah), dan Waibangga, masing-masing daerah ini diangkat seorang *raja bantu*. Semasa pemerintahan Raja Umbu Ngailu Beku, yang menjabat *raja bantu* adalah Dangi Lade dari Lauli Bawa yang berkedudukan di Weetabara, dan Umbu Giku Wolika di Waibangga. Ketika Raja Umbu Ngailu Beku wafat pada 1912, ia digantikan oleh Dangi Lade, yang memerintah hingga tahun 1920. Pada 8 September 1912, Raja Dangi Lade tercatat menandatangani *Korte Verklaring*. Pemerintah kolonial memindahkan pusat pemerintahan administratifnya dari Mamboru ke Waikabubak. Pemindahan ini terjadi berkat perjuangan Raja Dangi Lade yang berkeyakinan bahwa

180. Lihat *Sejarah Kerajaan-kerajaan di Sumba Barat*, halaman 17.

bila pusat pemerintahan dipindahkan ke Waikabubak, tentunya kota tersebut akan mengalami perkembangan pesat.

Setelah Dange Lade mangkat pada 1920, pemerintahan dipegang oleh suatu dewan pemerintahan yang terdiri dari tiga *raja bantu*, yakni Toda Leru dari Lauli Bodo, Keba Buningani dari Lauli Bawa, dan Giku Umbu Wolika dari Waibangga. Kendati demikian, Raja Keba Buningani mangkat pada 1927 dan digantikan oleh Koki Umbu Daka, sedangkan Giku Umbu Wolika digantikan oleh Lede Mude. Raja Koki Umbu Daka, Lede Mude, dan Todi Lero kembali disodori *Korte Verklaring* oleh Belanda, yang ditandatangani mereka pada 17 Agustus 1922.

Dewan pemerintahan dihapuskan pada 1932 dan semenjak saat itu Koki Umbu Daka menjadi raja untuk seluruh Lauli. Meskipun demikian, Dato Goro tetap menjadi *raja bantu* di Waibangga menggantikan Lede Mude di Waibangga. Raja Koki Umbu Daka meninggal karena kecelakaan pada 1940 dan setahun kemudian Saba Ora dipilih sebagai penggantinya. Ia memegang jabatan ini hingga dihapuskanya berbagai swapraja pada 1960-an.

X. LAURA

Kerajaan Laura pernah dipimpin oleh Raja Umbu Lele Kondi (1862–1901) dan Umbu Tangga Amabulu (Ama Boeloe atau Rato Lende Nggolughola I, 1901–1911) yang diwajibkan menandatangani kontrak politik oleh Belanda berupa *Verklaring Betreffende Belastingheffing* pada 12 Desember 1901. Raja Umbu Tangga Amabulu diperintahkan lagi menandatangani pembaharuan *Korte Verklaring* sebelumnya pada 26 September 1907. Selanjutnya, Raja Ama Mbiri Kalumbang atau Mbulu Kalumbang Danggangara (1911–1928) naik ke pucuk pimpinan Kerajaan Laura dengan *raja bantu*-nya, Mboyo Taka, yang berkedudukan di Tanariwu. Raja Laura yang baru ini menandatangani *Korte Verklaring* pada 9 September 1912. Ia mengundurkan diri pada 1928 karena usia lanjut dan digantikan oleh kemenakannya yang bernama Timoteus Tako Geli (1928–1932).

Ternyata pada 1932, Timoteus Tako Geli diasingkan ke Sumbawa Besar karena dituduh terlibat dalam suatu perkara. Guna mengisi kekosongan pemerintahan di Laura, Raja Rua Kaka (1932–1947)[181] ditunjuk sebagai penguasa sementara sambil

181. Buku *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 320, menyebutkan namanya sebagai Rua Kaka; sementara itu buku *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur* mencantumkannya sebagai Lua Kaka.

menanti putra raja yang bernama Lende Nggolughola II atau Lende Kalumbang dewasa. Setelah menginjak dewasa, barulah tahta kerajaan Laura diserahkan kepadanya pada 1947. Semasa era kemerdekaan, Raja Lende Kalumbang diangkat sebagai kepala pemerintahan sementara wilayah Sumba Barat (1953) yang berkedudukan di Waikabubak. Dia juga pernah menjabat sebagai ketua Dewan Sumba. Sementara itu, jabatannya sebagai Raja Laura diwakili oleh Timoteus Tako Geli. Raja Lende Kalumbang kemudian dipercaya menduduki jabatan sebagai bupati pertama Kabupaten Sumba Barat, yakni semenjak 1958 hingga dia wafat pada 3 April 1961.

XI. LAWANDA (LAWONDA) atau UMBU RATU NGGAI

Kerajaan Lawanda pernah diperintah oleh Raja Umbu Bili (± 1850) dan Raja Umbu Siwa (Oemboe Sewa) Sambawali I (1913–1932) yang berkedudukan di Parai Malowi. Ia menandatangani *Korte Verklaring* pada 28 Juni 1913. Pada 1915, kawasan Mbolubokutu milik Mamboro digabungkan dengan Kerajaan Lawanda. Karena rajanya menentang Belanda, Kerajaan Napu dihapuskan pada 1927 dan digabungkan dengan Kanatang. Sebagian wilayahnya yang terdiri dari Lenangu, Soru, dan Lakoka digabungkan dengan Lawanda. Kerajaan Lawanda beserta daerah-daerah tambahannya itu lalu diberi nama baru pada 1930, yakni Umbu Ratu Nggai. Sebagai rajanya diangkat Umbu Siwa Sambawali I dari Lawanda.

Umbu Siwa Sambawali I mangkat pada 1932 dan digantikan oleh putra sulungnya, Umbu Mbili Nggemunasu. Kendati demikian, baru tiga tahun memerintah ia diturunkan dari jabatannya oleh pemerintah kolonial (1935). Adik raja yang bernama Umbu Sakala Maramba Jawa (1935–1949) dipilih sebagai penggantinya. Sementara itu, putra Raja Umbu Mbili Nggemunasu bernama Umbu Siwa Sambawali II atau Umbu Tipuk Marisi menyelesaikan pendidikannya di akademi pemerintahan Jakarta dan lulus pada 1949. Setelah itu, barulah ia dilantik sebagai Raja Umbu Ratu Nggai yang baru. Jabatan lain yang pernah diembannya adalah bupati dan ketua Dewan Raja-raja Sumba (semenjak Desembar 1949). Sementara dia bertugas, urusan pemerintahan di Kerajaan Umbu Ratu Nggai diwakili oleh Habil Hudang, yang berlangsung hingga 1962.

XII. LEWA KAMBERA

Lewa dan Kambera dahulunya merupakan dua kerajaan terpisah. Penuturan cerita rakyat mengisahkan mengenai nenek moyang orang Lewa yang turun dari langit lapis pertama atau tertinggi di antara delapan lapis langit. Konon, di sana terlahir delapan pasang leluhur yang disebut *Maramba* dan *Ata*. Mereka terus turun pada lapis-lapis langit di bawahnya dan akhirnya tiba di muka bumi. Salah seorang di antara para leluhur itu, Oe Huti, mencari tempat yang cocok untuk berdiam dan bertani. Setelah melakukan pengembaraan, ia akhirnya menjumpai tanah lapang yang luas (*kalewa*) dan menjadi cikal bakal negeri Lewa. Raja-raja negeri Lewa sendiri dikatakan berasal dari lima orang putra Umbu Kani Paraing, yakni Umbu Diki Kamapira Ndawa, Umbu Tunggu Maramba Nambu Paraingu, Umbu Nggau Ndai Liti Ata, Umbu Bala Panda Nggangga, dan Umbu Hina Hungguwali. Merekalah yang kemudian menurunkan raja-raja Lewa.

Urutan raja-raja Lewa adalah sebagai berikut: Pura (± 1750–1756), Umbu Hina Hanggu Walu, Umbu Nggala Lili Kani Paraingu, dan Umbu Diki Kama Pira Ndawa (± 1860). Raja bernama Taralandu (Umbu Tunggu Mbili Maramba Namu Paraingu atau I Taralandu I Jangga Mbulu, ±1860–1891) menggantikan Umbu Diki Kama Pira Ndawa dan tercatat menandatangani *Korte Verklaring* pada 15 September 1877 sebagai tanda mengakui pertuanan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena selalu mengenakan mahkota (*tubuku*), ia juga disebut Umbu Tubuku. Kerajaan Lewa Kambera bermusuhan dengan Mbatakapidu. Setelah Mbatakapidu ditaklukkan oleh Belanda pata tahun 1874, Lewa Kambera berniat menguasai kerajaan musuhnya tersebut. Karenanya, kakak Taralandu yang bernama Umbu Diki Hama Parandawa membuka sawah dan peternakan secara diam-diam di Mbatakapidu. Raja Taralandu juga melancarkan siasat serupa dengan membuka perkebunan tak jauh dari Mbatakapidu.

Taralandu memancing permasalahan dengan Belanda ketika ia menuntut agar Lahia, seorang tokoh Bugis yang pernah mengancam Taralandu dan telah diasingkan ke Kupang pada 1878, diserahkan padanya. Raja Taralandu menyampaikan tuntutannya pada 1880 dengan membawa serombongan pasukan bersenjata. Meskipun demikian, ketegangan ini dapat diredakan oleh kontrolir Belanda. Tetapi persoalan ini tidak berhenti sampai di situ saja. Sebulan kemudian atau tepatnya November 1880, Umbu Biditau, kemenakan Taralandu, mengepung rumah kontrolir dan menanyakan kembali

masalah Lahia. Persoalan ini akhirnya dapat diselesaikan secara adat oleh orang-orang Bugis dengan menyerahkan hadiah kepada raja. Semenjak saat itu, Taralandu dan Umbu Biditau dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Hindia Belanda. Mencegah agar peristiwa semacam itu tak terulang lagi, residen memohon izin kepada gubernur jenderal di Batavia untuk menangkap Taralandu beserta kemenakannya dengan bantuan pasukan Rote yang akan dipindahkan ke Sumba. Pucuk pimpinan pemerintah kolonial Belanda memberikan izinnya. Dengan licik Belanda mengumumkan suatu sayembara, yakni barangsiapa yang dapat menangkap kedua orang itu akan dihadiahi 500 Ringgit. Tetapi usaha ini tidak membuahkan hasil sedikitpun hingga Taralandu wafat pada 1892.

Umbu Biditau atau Umbu Tunggu Yama Kareminjawa (1892–1917) menjadi raja menggantikan pamannya. *Raja bantu*-nya masing-masing adalah Umbu Nggaba Landuparaingu atau Umbu Haumara di Kawangu dan Umbu Ndai Litiata atau Umbu Tanahomba di Lewa Paku. Peristiwa penting yang berkaitan dengan kerajaan ini adalah Perang Lambanapu yang terjadi pada 27 Agustus 1901. Peristiwa tersebut dipicu oleh tuntutan Belanda kepada Raja Lewa Kambera agar membayar ganti rugi atas perampokan kapal-kapal yang kandas di perairan kerajaan itu. Residen Esser mengutus Bakker menemui Raja Umbu Biditau dan menuntut pembayaran denda atas perampokan kapal-kapal asing tersebut. Raja menjelaskan bahwa kapal-kapal asing yang kandas bukan karena dirampok, melainkan ditolong hingga dapat diberangkatkan ke Jawa. Belanda juga pernah menuntut Kerajaan Lewa Kambera agar menghapuskan pemungutan bea di pelabuhan. Tuntutan ini ditentang oleh raja karena dianggap sebagai wujud campur tangan Belanda terhadap urusan pemerintahan di negerinya. Raja menganggap Belanda telah melanggar kedaulatan kerajaannya. Meskipun demikian, hingga saat itu Belanda belum melakukan tindakan apa-apa karena kekuatan mereka di kawasan tersebut masih lemah. Bersama dengan putranya, Umbu Nggaba Landupraingu atau Umbu Hau Mara dan Umbu Diki Puradawa atau Umbu Parameha, ia meneruskan penentangannya terhadap pemerintah kolonial.

Pada Agustus 1901, terbetik berita bahwa Raja Umbu Biditau akan menyerang Waingapu. Wakil pemerintah Belanda di Waingapu segera mengirim telegram meminta bala bantuan dari residen Kupang dan gubernur Makassar. Akhirnya, pada 25 Agustus 1901 Belanda mengirimkan kapal perang *Jawa* dan *Pelikaan* untuk menyerang Lewa Kambera. Serangan dilancarkan ke Lambanapu, ibukota Lewa Kambera pada

27 Agustus 1901 di bawah pimpinan Kapten Dijk dengan dibantu oleh serdadu suku Sabu, Ende, dan Bugis. Karena persenjataan yang tidak seimbang, raja terpaksa melarikan diri ke pedalaman. Pasukan Belanda membakar istana dan merampas harta rakyat. Meskipun demikian, raja beserta dua orang putranya baru menyerah pada 1907 dan selanjutnya diasingkan ke Padang. Menyerahnya raja ini atas bujukan Raja Umbu Nggala Lili dari Kanatang, yang masih kerabat Raja Biditau. Setelah memperoleh pengampunan, raja dikembalikan ke kampung halamannya pada 1912. Sebagai pengganti Umbu Biditau, diangkatlah Raja Tabundung bernama Umbu Tungu Namu Paraingu yang merangkap sebagai Raja Lewa Kambera. Begitu kembali ke negerinya, Raja Biditau diharuskan menandatangani *Korte Verklaring* pada 27 September 1912. Setelah itu, ia digantikan oleh Raja Umbu Ngaba Haumara (1917–1924), yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 12 November 1917. Singgasana Lewa Kambera beralih lagi pada Umbu Rarameha (Umbu Diki Kama Pira Ndawa II, 1924–1940). Selanjutnya, semasa pendudukan Jepang yang berkuasa di Lewa Kambera adalah Raja Umbu Nggaka (Nggaba) Hunga (Hungu) Rihieti[182] (1940–1962).

XIII. MAHU (MASU) KARERA

Leluhur Raja Masu adalah pasangan Umbu Domu Pedi dan Rambu Bangu Kahi. Perang Kananggar merupakan peristiwa penting yang berkenaan dengan kerajaan ini. Pergolakan tersebut dipicu oleh beratnya pembayaran pajak dan keharusan bekerja rodi. Pemimpin pemberontakan pada 1908 ini adalah Umbuna I Laki (I Landuwulangu Janggamemangu atau Umbu Ndawa Hawula) dan Umbu Nai Keba atau Umbu Marahongu. Kendati demikian, pemberontakan ini tidak berlangsung lama karena ekspedisi militer Belanda yang dipimpin oleh Letnan Steiff berhasil membujuk Umbu Ndawa Hawula (1909–1932) berdamai dengan pemerintah kolonial dan selanjutnya diangkat sebagai raja. Pada 1909, Kerajaan Karera digabungkan dengan Masu menjadi Kerajaan Masu Karera. Dengan demikian, Umbu Ndawa Hawula menjadi raja bagi kerajaan gabungan tersebut, yang berkedudukan di Kanonggaru (Kananggar). Ia tercatat menandatangani *Korte Verklaring* pada 23 Maret 1913. Sebagai *raja bantu*-nya diangkat Umbu Haru Halamatu atau Parawangu yang berkedudukan di Tanarangu, Karera dan Umbu Katanga (Ktang) Takanjanji atau Taranggaba (Taranggaha), yang berkedudukan di Lai Ronja, Mahu Barat.

182. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 28.

Umbu Ndawa Hawula mangkat pada 1932 dan digantikan oleh putranya, Umbu Nengi Landumeha atau Umbuna I Hamba. Suksesi kepemimpinan kembali terjadi pada 1954, ketika Umbuna I Hamba digantikan oleh putranya, Umbu Hina Pekambani atau Umbu Maramba (1954–1962).

XIV. MANGILI

Rangkaian raja-raja yang pernah memerintah Mangili adalah Mandi (± 1696–1699), Umbu Tanga Ndemalulu (Kiuka Kajuko, ± 1725), Ama Gega (?–1734), Nggala (± 1738), Manyuka (± 1739), Umbu Lakaru Taraandungu (± 1750–1775), dan Umbu Dena Lakunara (± 1845). Penguasa berikutnya, Umbu Mangu (± 1845–± 1860) pernah menandatangani perjanjian yang diperbaharui dengan Belanda (diwakili Residen WLH Brocx) pada 1845 dan 20 Juni 1860. Selanjutnya, Mangili diperintah oleh Umbu Ngabi Raja Muda (1872–1893), yang digantikan oleh Umbu Hina Hungguwali (1894–1911). Dia wafat pada 1911 dan digantikan oleh Umbu Tunggu Eta (1911–1912). Semenjak saat itu, berlaku pemerintahan militer Belanda di bawah Letnan Rijnders. Ia membagi dua wilayah Mangili pada 1912, yakni Mangili Utara dan Mangili Selatan. Wilayah selatan hingga Sungai Kalingga dan Wula disatukan dengan Kerajaan Waijelu. Sementara itu, Mangili Utara mulai dari Sungai Kalingga hingga Sungai Aumarapu digabungkan dengan Rindi. Pemerintahan militer kemudian digantikan oleh pemerintahan sipil di bawah A.J.L. Covreur, yang menyatukan keseluruhan Mangili dengan Kerajaan Rindi sehingga untuk seterusnya kerajaan gabungan itu disebut Rindi Mangili. Sebagai rajanya adalah Umbu Hina Marumata dari Rindi.

XV. MBANGEDO

Persinggungan pertama dengan pemerintah kolonial Belanda terjadi ketika Raja Hemba Dondo (Simba Dondong) dari Kodi Mbangedo (Kodi Belagar) menandatangani kontrak penaikan pajak pada 13 Desember 1901. Raja juga kembali diwajibkan menandatangani *Korte Verklaring* pada 25 September 1907.

Kerajaan Mbangedo kemudian diperintah oleh Rija Kanda (Riedja Konda) dengan *raja bantu*-nya, Rato Kuri yang berkedudukan di Rara, Rato Pakerengo di Ende, dan Rato Kalinga di Nggaura. Raja Rija Kanda menandatangani *Korte Verklaring* pada 25 Mei 1914. Rija Kanda mangkat pada 1919 dan digantikan

oleh Rangga Kura (1919–1929), yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 13 November 1920. Raja Mbangedo berikutnya adalah Rya Bokolo atau David Bulen (1929–1931). Setelah ia wafat pada 1931, Mbangedo disatukan dengan Kodi.

XVI. MBATAKAPIDU

Salah seorang raja yang pernah berkuasa di Mbatakapidu adalah Umbu Joka Awangu, yang menurut sumber Belanda pernah meminta bantuan VOC di Kupang pada 1749. Kekuasaan Belanda masuk ke kerajaan ini pada sekitar abad 19. Raja Umbu Nggau Ndai Lili Ata merupakan Raja Mbatakapidu yang anti-Belanda. Ia ingin mengusir kontrolir Belanda serta orang-orang Sabu di Kambaniru yang dipandang membahayakan kedudukannya. Oleh karenanya, sebagai langkah perlawanan, raja menyabot peternakan kuda untuk keperluan militer yang telah dikembangkan Belanda di Sumba. Belanda meminjam tangan seorang tokoh Sabu bernama Ama Kuji Bire (adik Raja Seba) untuk menyerang Mbatakapidu. Meskipun demikian, ia tertembak dalam peperangan tersebut. Raja Seba yang bernama Ama Doko melaporkan pada residen Belanda di Kupang pada 20 Juli 1874 mengenai jalannya peperangan di Mbatakapidu.

Demi melemahkan kekuatan Mbatakapidu, Belanda menerapkan politik pecah belah. Mereka membujuk Raja Umbu Tahuku dari Lewa Kambera yang bermusuhan dengan Mbatakapidu agar ikut serta dalam agresi militer tersebut. Ternyata, Kerajaan Lewa Kambera bersedia membantu Belanda sehingga rajanya yang telah menandatangani *Korte Verklaring* diberi hadiah tongkat emas beserta bendera sebagai lambing kekuasaan. Pengepungan terhadap Mbatakapidu dilancarkan pada 26 Agustus 1874 selama 7 hari. Raja Umbu Nggau Ndai Lili Ata terdesak dan kehilangan 50 orang prajuritnya. Akibatnya, raja terpaksa mengungsi. Hingga wafatnya pada 1875, tidak sedikitpun dia sudi menyerah pada Belanda.

Semasa pemerintahan Raja Umbu Nggau Ndai Lili Ata, datanglah seorang keturunan Arab kelahiran Pontianak bernama Syarif Abdurrahman bin Abubakar Algadrie (Alkadrie) yang merupakan perintis pendirian kota Waingapu[183]. Sebelumnya, Waingapu merupakan hutan yang tumbuh dekat pantai. Dengan bantuan raja, hutan dibuka dan tempat pemukiman didirikan. Setelah selesai, diadakan upacara selamatan yang dihadiri pula oleh Raja Kanatang dan Kambera. Raja Mbatakapidu

183. Lihat *Syarif Abdurahman bin Abubakar Algadrie Pendiri Kota Waingapu*, halaman 11

lantas memberikan nama Kambata Waingapu Kiku Nguara Wara dan menetapkan batas-batas tanah yang diberikan kepada Syarif Abdurrahman. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian pertahanan bersama dan sepakat memajukan perdagangan kuda. Demikianlah, Waingapu lambat laun tumbuh menjadi kota pelabuhan penting di Sumba.

Karena tidak mempunyai seorang putra, Raja Umbu Nggai Ndai Lili Ata digantikan oleh Umbu Manja Mehangu dari Tabundung yang menikah dengan putri Lewa bernama Rambu Demhi Tamaru. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Umbu Tunggu Namu Paraingu, yang menjadi Raja Mbatakapidu berikutnya.

XVII. MELOLO

Raja yang pernah memerintah Melolo adalah Umbu Siwa Tanangunju (± 1750), Gallang (± 1750–± 1775), Umbu Hia (Hina) Hamatake I, Umbu Nggala Lili, dan Umbu Nggaba Haumara I (± 1863). Kerajaan Melolo pernah terlibat permasalahan dengan Belanda karena keharusan membayar denda berupa kuda. Denda ini dikenakan karena rakyat Melolo dituduh merampok kapal-kapal yang kandas di pantai. Ternyata laporan-laporan ini tak terbukti kebenarannya dan Raja Lewa Kambera malah memerintahkan rakyatnya memberikan pertolongan pada kapal-kapal tersebut. Barang-barang yang diambil penduduk sebenarnya adalah berbagai benda yang telah hanyut dan terdampar di pantai. Mereka memperolehnya bukan melalui perampokan. Meskipun tuduhan tersebut tidak berdasar, raja tetap diharuskan membayar denda. Pada 1867, kontrolir Belanda mengutus H. van Heuckelum melakukan penagihan. Karena merasa tidak bersalah, Raja Umbu Nggaharu Tanggurami (± 1867–1892) menolak membayarnya. Dia lalu digantikan oleh Ama Luji Dimu (± 1890).

Raja Melolo berikutnya bernama Umbu Hina Hamasoko (Oemboe Hina Hamatake II/ Umbu Hina Hamataki II/ Umbu Maramba, 1893–1930) pernah menandanangani kontrak politik dengan Belanda pada awal abad 20, yakni pada 23 Oktober 1901 (*Verklaring Betreffende Belastingheffing*–tentang penaikan pajak) dan 17 maret 1913 (*Korte Verklaring*). Raja Umbu Hina Hamataki berkedudukan di Pau, sedangkan nama-nama *raja bantu*-nya adalah Umbu Tai Tanggurami atau Umbu Kudu di Ngiangandi dan Umbu Tai Rawambaku atau Umbuna I Kora di Paraingu. Semasa pendudukan Jepang, yang menjadi raja di Melolo adalah Umbu H. Jangga Kadu

(1930–1946)[184]. Dia digantikan secara berturut-turut oleh Umbu Nggaba Haumara II (1946–1959) dan Umbu Windi Tanangunju (1959–1962).

XVIII. MOMBORO (MEMBORO atau MAMBORO)

Leluhur raja-raja Momboro adalah Umbu Mbulunga, Umbu Makara, Umbu Kura Mesang Bewa, Umbu Paru Ndeta Longgu, Umbu Kura Mesang Bewa, Umbu Pembu Karemu, Njakala, dan Umbu Sombangu Bisa. Ia memiliki dua orang anak, yakni Umbu Ndala Sombangu dan Umbu Para Ndeta Longgu. Buyut Umbu Para Ndeta Longgu bernama Umbu Nombu (± 1845) menjadi Raja Momboro. Ia digantikan oleh Umbu Ndala Sombangu (± 1863–1869). Penggantinya adalah Umbu Laki Mbali (± 1880–1890 an).

Raja bernama Umbu Pombu Saramoni (Oemboe Poemboe Saramanie, 1898–1915)), putra Umbu Laki Mbali, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Momboro dengan *raja bantu* bernama Umbu Mbeju yang berkedudukan di Mbolubokatu. Ia tercatat menandatangani kontrak mengenai penaikan pajak (*Verklaring Betreffende Belastingheffing*) pada 11 Desember 1901. Dia selanjutnya beberapa kali diminta menandatangani *Korte Verklaring*, yakni masing-masing pada 26 September 1907 dan 24 Mei 1914. Pada 1915, wilayah Mbolubokatu diambil dari Kerajaan Momboro dan diserahkan pada Lawonda. Kendati demikian, sebagai gantinya wilayah Tana Righu dilepaskan dari Laura dan diberikan pada Momboro.

Raja Umbu Pombu Saramoni mangkat pada 1915. Karena putranya yang bernama Umbu Mbatu Pakadeta (Umbu Tuaranjani atau Umbu Mahama) masih kecil, putra saudara sepupu almarhum raja, Umbu Karai (1915–1929), diangkat sebagai walinya. Umbu Karai kemudian menandatangani *Korte Verklaring* pada 19 Maret 1916. Ketika Umbu Karai wafat pada 1929, Umbu Mbatu Pakadeta (1929–1932) menjadi penerus singgasana Momboro berikutnya hingga ia diberhentikan oleh pemerintahan kolonial Belanda di tahun 1932. Raja Umbu Dondu Rawambaku (1932–1934) kemudian menduduki singgasana kerajaan ini. Namun, ia kembali mengalami nasib sama dengan pendahulunya, yakni dicopot kedudukannya, pada 1934. Sebagai penggantinya, diangkatlah Timotius Umbu Tunggu Mbili (1934–1962) sebagai Raja Momboro berikutnya. Ia memangku jabatan ini hingga dihapuskannya berbagai daerah swapraja di Kepulauan Nusantara.

---

184. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 28.

XIX. NAPU

Napu sebelum dihapuskan oleh Belanda pernah memiliki raja-raja bernama Umbu Kambaru Windi, Umbi Dai Kudu beserta Umbu Renggi Taai, dan Umbu Timba Nduka Laki Mora atau Umbu Tunibang (Oemboe Timbang, 1892–1910), yang menandatangani kontrak politik mengenai penaikan pajak (*Verklaring Betreffende Belastingheffing*) pada 13 Oktober 1901 dan *Korte Verklaring* pada 28 Januari 1908. Selanjutnya yang berkuasa di Napu adalah Umbu Rawa (1910–1914). Dia digantikan oleh Umbu Landukura (Oemboe Landukura, 1914–1927) yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 8 Maret 1915, dengan *raja bantu* bernama Umbu Humbu Horungu Tanggukonda atau Umbuna I Kaliangu yang berkedudukan di Ndakurangu. Raja Napu berikutnya adalah Umbu Ndilu Danguramba (Umbu Rada, 1927–1928). Pada 1925, pecah pemberontakan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Reku Landurang. Raja Umbu Ndilu Danguramba dari Napu dan Raja Umbu Nai Tahu dari Kapunduk ikut mendukung pemberontakan ini. Akibatnya, kedua raja itu diturunkan dari tahtanya dan wilayah mereka digabungkan dengan Kanatang. Dengan demikian, berakhirlah Napu sebagai suatu kerajaan yang merdeka.

XX. RINDI (RENDI) atau RINDI (RENDI) MANGILI

Leluhur atau pendiri kerajaan ini adalah Umbu Lutungu (Eti Ndamungu). Raja selanjutnya adalah Umbu Nggala Kani Paraing, Umbu Kahumbu Njurumana, dan Umbu Nggala Kani Paraingu. Belakangan, Belanda menggabungkan Mangili dengan Rindi sehingga menjadi Kerajaan Rindi Mangili pada 1916. Raja Rindi Mangili setelah penyatuan kedua kerajaan ini adalah Umbu Hina Marumata, yang pernah menandatangani kontrak politik mengenai penaikan pajak (*Verklaring Betreffende Belastingheffing*) dengan Belanda pada 7 November 1901. Raja ini adalah keturunan kesepuluh Umbu Lutunggu. Karena persoalan ternak, Raja Umbu Hina Marumata pernah menyerang Kerajaan Karera pada 1899. Pecah Perang Mangili yang diakibatkan oleh masalah pajak dan kerja rodi *p*ada 1908. Pemimpin gerakan rakyat di kerajaan ini adalah Umbu Tunggu Wuku. Dengan tipu muslihat, Belanda berhasil menawan Umbu Tunggu Wuku dan mengasingkannya.

Setelah penataan kembali pemerintahan di Sumba pada 1916, raja yang memerintah di Rindi Mangili adalah Umbu Hina Marumata di Parai Yamanggu dengan *raja bantu* Umbu Lumu Rihiamoku (Umbu Limu Rihiamahu) di Parai

Yawangu atau Umbuna i Pura di Kapa (Mangili). Raja Umbu Hina Marumata pernah pula beberapa kali menandatangani *Korte Verklaring*, yakni masing-masing pada 16 Januari 1908, 17 Maret 1913, dan 1 Maret 1916. Dia mangkat pada 1919 dan digantikan oleh putranya bernama Umbu Nggala Lili Kaniparaingu atau Umbu Rara Lunggi. Pada 23 Januari 1919 ia tercatat menandatangani *Korte Verklaring*. Pada 1935, Umbu Rara Lunggi digantikan oleh putranya, Umbu Hapu Hambandima (1935–1960)[185].

XXI. TABUNDUNG

Negeri ini pernah memiliki raja bernama Umbu Tunggu Wamapasain. Menurut manuskrip karya Hans Hägerdal, raja-raja Tabundung adalah Umbu Kaputing, Umbu Hunga, dan Umbu Mehang[186]. Raja selanjutnya yang berkuasa di Tabundung adalah Umbu Tunggu Namu Paraingu (Oemboe Toenggoe Namoe Paraing, 1900–1918) atau Pindingara. Mulanya ia berkedudukan di Tanundangu dan setelah itu di Lambanapu. *Raja bantu*-nya adalah Umbu Kandubu Hawula atau Umbuna i Luta, yang berkedudukan di Parai Kareha. Ia menandatangani kontrak-kontrak politik berupa:

- *Veklaring Betreffende Afstand van Grond* pada 16 Desember 1901.
- *Verklaring Betreffende Belastingheffing* pada 5 Juli 1902.
- *Korte Verklaring* pada 28 Januari 1908.
- *Korte Verklaring* pada 8 Maret 1915.

Rakyat Tabundung pernah bangkit melawan Belanda pada 1917. Penyebabnya juga masih berkisar pada masalah kerja rodi dan pajak, yang dirasa sangat memberatkan rakyat. Oleh karena itu, seorang tokoh bernama Hina Andumara bangkit memimpin rakyat dalam menentang kekejaman pemerintah kolonial. Tentu saja Belanda tidak tinggal diam dan mengirimkan pasukannya guna memadamkan pergolakan ini hingga berhasil menumpasnya dalam waktu singkat. Ketika Umbu Biditau dari Lewa Kambera kalah dan diasingkan ke Padang, Raja Umbu Tunggu Namu Paraingu merangkap pula sebagai Raja Lewa Kambera. Penguasa Tabundung berikutnya adalah Raja Umbu Ndai Lili Ata (1918–1931), yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 7 September

185. Dalam buku *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 28, disebutkan bahwa namanya adalah Umbu Hapu Hambakanduna dan memerintah dari 1932–1960.
186. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 247.

1918. Pada zaman pendudukan Jepang, yang memerintah di Tabundung adalah Raja Umbu Mbangba (Umbu Hunga Wohangara, 1931–1956)[187]. Dia digantikan oleh Umbu Manja Mehangu (1956–1962), yang memerintah hingga dihapuskannya sistem swapraja di Indonesia.

XXII. TAIMANU

Raja Taimanu bernama Umbu Nggaba[188] tercatat pernah menandatangani perjanjian yang diperbaharui dengan Belanda (diwakili Residen WLH Brocx) pada 20 Juni 1860.

XXIII. UMALULU

Umalulu merupakan penggabungan tiga kerajaan, yakni Palaimalamba, Patawangu, dan Watu Pelitu, yang berlangsung pada 1912. Raja Watu Pelitu yang bernama Umbu Hia Hamataki atau Umbu Maramba diangkat sebagai penguasa kerajaan gabungan ini. Pada 1930, pucuk pimpinan Umalulu diteruskan oleh Umbu Hina Janggakadu (1930–1946) karena Raja Umbu Maramba telah lanjut usia. Roda pemerintahan Umalulu kembali beralih pada Umbu Nggaba Haumara, putra Umbu Hia Hamataki, pada 1946.

XXIV. WAIJELU

Kerajaan Waijelu pernah memiliki raja bernama Umbu Nggaba Kalai (1892–1898), yang digantikan oleh Umbu Teulu Atakawau (Oemboe Tangga Teol Attakawawo, 1899–1927), yang menandatangani *Verklaring Betreffende Belastingheffing* pada 8 November 1901. Berikutnya, raja menandatangani *Korte Verklaring* pada 16 Januari 1908 dan 17 Maret 1913. Semasa pemerintahannya, yang menjadi *raja bantu* adalah Umbu Kalambaru Parahi di Kabanda. Raja Umbu Teulu Atakawau mangkat pada 1927. Saat itu, putra raja yang bernama Umbu Kambaru Windi masih kecil sehingga yang diangkat sebagai pengganti adalah Umbu Teulu Jawapangu (1927–1931) dan Umbu Yiwa Ngganja (1931–1942), yakni putra salah seorang saudara Umbu Teulu Atakawau. Raja ini mangkat pada 1942 dan digantikan oleh Umbu Kambaru Windi (1942–1962).

187. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 28–29.
188. Lihat *Lintasan Sejaran Bumi Cendana*, halaman 243.

XXV. WANOKAKA

Kerajaan Wanokaka pernah dipimpin oleh Raja Mawu Padoli (± akhir abad 19), Luju Meramba Dangu (–1912), Kiring Semara (1912–1914), dan Baju Padedangu (Bajoe Padeda, 1914–1928), yang berkedudukan di Waihura. Ia menandatangani *Korte Verklaring* pada 10 Desember 1914. Raja Baju Padedangu wafat pada 1928 dan digantikan oleh Raja Guling Manyoba (1928–1956)[189]. Selanjutnya, raja ini digantikan oleh adiknya, Lau Mau (1956–1962), yang berkuasa hingga berakhirnya sistem swapraja di Indonesia pada 1960-an.

XXVI. WAWEWA (WAIJEWA)

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan

Kerajaan Wawena terletak di Kecamatan Wawewa Barat dan Wawewa Timur, Kabupatan Sumba Barat kini. Sama seperti Lauli, leluhur Wawewa dipercaya berasal dari Hindia Belakang, yang juga mengarungi delapan daratan dan tujuh lautan. Mereka kemudian menetap di Tanjung Sasar dan mendirikan pemukiman bernama Kampung Wunga. Akibat makin bertambahnya jumlah penduduk, lahan pertanian makin sempit hingga sebagian kelompok masyarakat lantas berniat mencari tempat pemukiman baru. Menurut legenda, setelah masing-masing kelompok *kabisu* berpisah guna mencari tempat kediamannya masing-masing, leluhur warga kerajaan ini konon menetap di Tanggaba dalam pengembaraannya. Kata *wawewa* sendiri dapat diartikan sebagai "mencari-cari", yang mengacu pada pencarian tempat kediaman, bertani, dan beternak tersebut.

Dalam pengembaraannya, mereka menemukan dua mata air yang disebut Wee Nurata dan Wee Paboba. Tempat pemukiman baru ini kemudian dinamakan Nuralele Wee Paboba, yang merupakan penggabungan nama kedua mata air di atas. Itulah sebabnya, kerajaan yang berkembang di sana dinamai Nura Lele Mada We'e Paboba Yarra, Loda Mindara Kapamanu, Pada Eweta Le'e (Padang yang Subur, Landasan Kemakmuran dan Kejayaan)[190].

Sebelum kedatangan Belanda, di Wawewa terdapat delapan kesatuan adat yang otonom, yakni Lewata Mangutana, Baliloko, Palla, Waimangura, Taworara, Rara,

189. Buku *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 29, mencantumkan namanya sebagai Gulung Manyofa.
190. *Sejarah Kerajaan-kerajaan di Sumba Barat*, halaman 43.

Ede, dan Tanamaringi. Penguasa di Lewa Mangutana adalah Rato Tanembolo, yang kemudian digantikan oleh Wadambogo. Di Baliloko, yang berhak menjadi raja adalah Rato Kali Munda. Namun, dia menolak sehingga yang diangkat sebagai raja adalah saudaranya yang bernama Rato Melang. Ia lalu digantikan oleh Bulu Tanggela. Tatkala Bulu Tanggela diangkat sebagai Raja Wawewa, kedudukan *raja bantu* di Baliloko mengalami kekosongan. Oleh karena itu, posisi yang sebelumnya diduduki Bulu Tanggela di Baliloko diisi oleh David Dena Bobo. Penguasa di Palla (Pola) adalah Yakob Ina Nggele (Jakub Ingangele). Waimangura (Weemangura) diperintah oleh Gideon (Gidion) Bulu. Raja Malo Wola memerintah Taworara, yang selanjutnya digantikan oleh Yohanis Ngongo Mbani. Sementara itu, di Rara memerintah Yosep Malo, yang kedudukannya digantikan oleh A.R. Moto. Kawasan Ede diperintah oleh Godorina.

Sewaktu pemerintah kolonial mengirim wakilnya, Letnan J.J. Barendsen ke Wawewa, ia disambut oleh para pemuka adat (*rato*). Saat ditanya siapakah pemimpin tertinggi para rato (*ina ama*) di Wawewa, mereka serempak menjawab bahwa pemuka mereka adalah Rato Tenambolo dari Lewa Mangutana. Itulah sebabnya, Belanda lantas mengangkat Rato Tenambolo sebagai Raja Wawewa pertama. Kendati demikian, ia menolak karena banyak membunuh musuh semasa berkecamuknya perang suku. Rato Tenambolo melimpahkan jabatan tersebut pada saudaranya, Rato Kambeko atau Londong Ndamu. Setelah beberapa lama memangku kedudukan selaku Raja Wawewa, dia digantikan oleh putranya, Mete Umbu Pati.

Bersamaan dengan kurun waktu pemerintahan Raja Mete Umbu Pati, yang menjadi *raja bantu* di Wawewa masing-masing bernama Rato Dimu di Lenggara, dan Rato Dighala Atu yang berkedudukan di Manola. Raja Umbu Pati tercatat menandatangani *Korte Verklaring* pada 10 September 1912. Ketika raja mangkat, dia digantikan oleh putranya, Mbulu Engge; yang berkuasa hingga 1934. Raja Mbulu Engge kemudian dicopot dari kedudukannya dan diasingkan ke Sumbawa Besar karena dituduh menggelapkan pajak. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Wawewa, dibentuklah suatu dewan atau komisi pemerintahan yang terdiri dari Wada Mbombo, Raja Bantu Mangutana; Gidion Mbulu, Raja Bantu Weemangura; dan Jakub Ingangele, Raja Bantu Pola.

Sementara itu, yang menduduki singgasana Wawewa selaku pengganti Raja Mbulu Engge adalah Raja Bulu Tanggela atau Ama Ngilu Dendo (1934–1936). Dia merupakan Raja Wawewa pertama yang menganut agama Kristen. Raja Bulu Tanggela

berselisih dengan Raja Koki Daka dari Kerajaan Lauli[191] dikarenakan keinginan Raja Koki Daka menikahi saudara perempuan Raja Mbulu Engge untuk menyatukan Kerajaan Wawewa di bawah pemerintahannya. Tentu saja, Raja Bulu Tanggela menentang keras keinginan tersebut sehingga hubungan mereka memburuk.

Pemerntah kolonial segera turun tangan mendamaikan keduanya sebelum keadaan bertambah buruk. Raja Bulu Tanggela tetap menolak keras tuntutan Raja Koki Daka. Sebagai wujud penolakannya, Raja Bulu Tanggela lantas melepaskan kedudukannya pada 1936. Demi mengatasi masalah ini, Belanda berencana memulangkan Raja Mbulu Engge dari pengasingannya di Sumbawa. Dua calon raja Wawewa diajukan, yakni Manase Lede Louro dan Mbulu Engge yang baru dipulangkan ke kampung halamannya. Meskipun demikian, Manase Lede Louro menolak pencalonannya sebagai Raja Wawewa dan memilih memusatkan perhatian pada dunia pendidikan demi mencerdaskan rakyat Wawewa. Dia merupakan perintis pendidikan di Sumba Barat. Mbulu Engge terpilih kembali sebagai Raja Wawewa dan berkuasa hingga tahun 1962.

b. Perlawanan Terhadap Belanda di Wawewa

Perlawanan terhadap Belanda meletus pada 1909 di desa Watulade, yang dipimpin oleh Tadu Moli. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Belanda. Meskipun demikian, salah seorang perwira Belanda bernama Letnan de Neeve menderita luka parah. Sementara itu, perlawanan lain meletus di Wawewa Timur yang dipimpin oleh Rato Kali. Pemicunya adalah masalah kerja paksa dan pembayaran pajak. Rato Kali membangun pertahanan di puncak gunung yang tinggi dan setelah itu menggulingkan batu-batu besar sebagai senjatanya. Sistem pertahanan semacam ini benar-benar menyulitkan Belanda. Oleh karenanya, Belanda menerapkan siasat licik. Belanda mengetahui bahwa istri Rato Kali masih berdiam di kampungnya. Dengan segera, istri dan keluarga Rato Kali ditangkap serta disandera oleh Belanda. Rato Kali menerima ancaman bahwa bila tidak sudi menyerah, istri beserta keluarganya akan dibunuh oleh Belanda, Rato Kali akhirnya menyerah kepada Belanda.

c. Sistem Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan

Secara umum, masyarakat Wawewa dibagi menjadi lima *kabisu* (kesatuan adat) besar[192], yakni Lewata, Mangutana, Mabaliloko, Pola, dan Weemangura. Kelima

191. *Sejarah Kerajaan-kerajaan di Sumba Barat*, halaman 53.
192. Ada sumber yang menyebutkan empat *kabisu* saja, yakni Lewata, Mangutana, Beindelo, dan Wee lewo

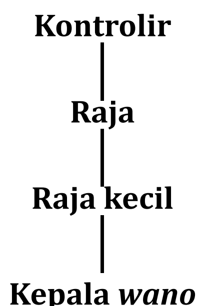
kelompok besar ini masih terbagi dalam tujuh kelompok yang lebih kecil (sub-*kabisu*). Lima *kabisu* besar itu merupakan kelompok inti bagi rakyat Wawewa dan saat ini di Nuralele Wee Paboba masih dapat disaksikan lima perkampungan induk tradisional bagi kelima marga tersebut, yang disebut *wano kalada*. Lebih jauh lagi, dalam setiap *wano kalana* terdapat *uma* (rumah) bagi masing-masing *kabisu* kecil (sub-*kabisu*), yang warganya berasal dari satu nenek moyang. Terdapat rumah induk bagi masing-masing *kabisu*, yang dihuni oleh kepala *kabisu* bergelar *rato*. Panggilan kehormatan bagi kepala *kabisu* tersebut adalah *Pa Ina Pa Ama* (Ibu Bapak yang Dijunjung Tinggi). Rumah-rumah induk juga berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang yang dimuliakan oleh mereka (*marapu*). Selain itu, masih ada suatu dewan adat lagi yang disebut *mori ata* atau *mori tana*. Dewan ini terdiri dari beberapa anggota marga yang merupakan inti warga masyarakat di *wano kalada*. Mereka merupakan keturunan para leluhur atau pemuka yang dahulu menjadi cikal bakal *wano kalada* tersebut. Dengan demikian, dewan ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan upacara adat dan juga membagi tanah persawahan serta menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

Ketika penduduk yang tinggal di *wano kalada* (desa inti atau induk) telah makin padat, mereka keluar dan menyebar dari kampung induknya guna mencari tempat kediaman yang baru serta membuka lahan untuk pertanian atau peternakan. Tempat-tempat pemukiman baru ini disebut *wana nggolu* dan biasanya dihuni oleh sekelompok warga yang berasal dari satu atau beberapa sub-*kabisu*. Sebagai pemimpin adat tempat pemukiman baru itu, diangkat seorang *rato*[193] yang berasal dari keturunan *kabisu* pendiri kampung tersebut. Seorang *rato* bertugas memimpin berbagai upacara adat. Ia dipilih secara aklamasi melalui musyawarah yang dihadiri oleh para anggota marga. Di samping *rato*, masih ada lagi kepala kampung atau kepala *wano*.

Kepemimpinan di Wawewa berlangsung secara hierarkis. Kepala kampung (*rato*) bertanggung jawab pada kepala *kabisu* yang disebut *raja kecil*. Selanjutnya *raja kecil* kembali bertanggung jawab kepada *tokko* (raja). Pada zaman Hindia Belanda, raja ini

193. Menurut buku *Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Nusa Tenggara Timur* halaman 70, disebutkan bahwa fungsi *rato* ada dua, yakni sebagai kepala marga dan pemimpin upacara adat. Sebagai kepala marga, hak dan kewajibannya adalah:
- Mendapat salah satu bagian warisan/ pusaka marga berupa tanah, sawah, dan ladang.
- Berkewajiban memimpin upacara adat atau menunjuk orang yang sanggup melaksanakannya.
- Melindungi hak-hak tanah warganya.
- Menjaga barang pusaka yang disimpan di rumah pusat marga.
- Mewakili anggota marganya dalam rapat yang diselenggarakan oleh dewan *rato*.
- Mewakili anggota marganya dalam rapat yang diselenggarakan pada tingkat dewan rato.
- Mewakili anggota marganya dalam upacara-upacara adat yang melibatkan seluruh marga.

berada di bawah pengawasan seorang kontrolir sebagai kepala *onderafdeeling* (distrik). Skema susunan pemerintahan di Wawewa dapat digambarkan sebagai berikut:



Semasa penjajahan Jepang susunan ini tetap dipertahankan, hanya saja peran seorang kontrolir digantikan oleh *bunkenkarikan*. Sementara itu, raja selaku kepala swapraja digelari *suco*, sedangkan *raja kecil* diberi gelar *kuco* oleh Jepang.

H. KERAJAAN-KERAJAAN DI PULAU SOLOR DAN LOMBLEM

Pulau Solor semenjak dahulu telah banyak mendapatkan pengaruh Jawa. Kitab *Negarakertagama* (pupuh ke-14/ 5) yang ditulis Mpu Prapanca dari Kerajaan Majapahit di abad 14 telah menyebutkan mengenai Solor. Jejak-jejak pengaruh Hindu Jawa ini masih tampak dalam cerita-cerita rakyat Solor, seperti di Tanjung Bunga dan Lembata. Beberapa suku di sana menyatakan bahwa lelulur mereka adalah Patih Gajah Mada. Unsur-unsur Hindu dapat dikenali pula dari mitos ular naga berkepala tujuh (*naga koten pito*), dimana naga sendiri adalah hewan mitos yang sangat terkenal dalam agama Hindu. Beberapa kata dalam bahasa setempat menunjukkan asal muasal Sansekerta, seperti *ile* atau *ili* (gunung) yang berasal dari bahasa Sansekerta *giri*. Kata *muhan* atau *nuha* berasal dari *nusa* yang berarti "pulau." Di samping itu, masih dikenal pula sebutan Jawa Muhan bagi Solor, yang berarti "Pulau yang Terkena Pengaruh Jawa."

Penduduk Pulau Solor dikelompokkan menjadi dua kaum, yakni Paji (Beda) dan Demong (Pagong). Menurut salah satu cerita rakyat, pada zaman dahulu hidup dua orang bersaudara bernama Igo (kakak) dan Enga (adik). Kedua saudara ini semenjak kecil kerap terlibat pertikaian. Suatu kali, pecahlah pertempuran antara

---

Hak dan kewajiban *rato* selaku pemimpin upacara:
- Memimpin dan menyelenggarakan upacara sesuai dengan tradisi.
- Menentukan jumlah hewan yang akan dikorbankan para dewata ataupun leluhur (marapu).
- Mendapat jatah pembagian daging hewan korban.

kedua kampung, yakni Wetan dan Kulon. Bila dicermati nama Wetan dan Kulon ini juga mencerminkan pengaruh bahasa Jawa, dimana *wetan* berarti "timur" dan *kulon* berarti "barat". Di tengah-tengah pertikaian antara kedua kampung tersebut, Igo memihak Kulon, Enga memihak Wetan. Ternyata, Wetan berhasil dikalahkan oleh Kulon sehingga Enga harus melarikan diri ke Larantuka. Di sana, ia menipu istri Igo dan menyatakan bahwa kakaknya yang menderita kekalahan. Oleh karenanya, ia mendesak mengawini istri Igo. Pada mulanya, istri Igo menolak, tetapi akhirnya setuju menikah dengan Enga. Beberapa bulan kemudian, Igo dengan armada perangnya datang dari arah laut sehingga Enga ketakutan dan melarikan diri ke orang-orang Paji.

Igo mengirimkan utusan bernama Riang Tuka yang menyatakan bahwa ia bersedia berdamai asalkan Enga membayar tebusan. Enga menyetujui hal ini, tetapi utusan yang dikirim itu memutarbalikkan jawabannya dengan menyatakan Enga menghendaki perang. Igo mengirim utusan lainnya, yang juga memutarbalikkan perkataan adiknya. Demikianlah, Igo secara keseluruhan mengutus empat orang pada adiknya, tetapi seluruhnya memutarbalikkan jawaban Enga. Akibatnya, meletus peperangan antara kedua saudara itu, dimana Enga kembali mengalami kekalahan dan terpaksa melarikan diri. Wilayah Igo makin luas sehingga ia kemudian membaginya menjadi 10 daerah yang disebut *kakang*, yakni Pamakayo (Lewolein), Lewoingu (Lewolaga), Mudakaputu, Lewo Leba, Tana Boleng, Horowura, Lama Lera, Wolo, Lewo Tobi, dan Lewo Tala. Sepuluh wilayah ini pada kenyataannya merupakan wilayah Raja Larantuka yang disebut *demon lewo pulau*. Meskipun demikian, masih terdapat versi lain mengenai asal muasalnya, sebagaimana yang diulas dalam bagian mengenai Kerajaan Larantuka.

Satuan pemerintahan di Solor dibagi menjadi dua, yakni bagian Kerajaan Larantuka (Pamakayo dan Lewolein, dua di antara 10 *kakang* dalam Kerajaan Larantuka) dan 5 kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Solor Lima Pantai, yang didiami oleh orang-orang Paji. Kerajaan Solor Lima Pantai (Solor Watan Lema) pada mulanya terdiri dari 6 kerajaan, yakni Lamakera, Lohayong, Adonara, Serbiti, Terong, dan Lamahala (Lewonama). Namun, dalam perkembangan selanjutnya Serbiti lenyap dari panggung sejarah. Pada kenyataannya, tidak semua kerajaan-kerajaan tersebut terletak di Pulau Solor.

I. LABALA

Labala merupakan kerajaan yang terletak di Pulau Lomblem. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Raja Baha yang menandatangani kontrak politik berupa *Timor Verklaring* dan *Verklaring Betreffende Belastingheffing* pada 18 Maret 1902 serta *Contract Betreffende Mijnrechten* pada 17 Desember 1905.

II. LAMAHALA

Pehang, Raja Lamahala, tercatat menandatangani *Lange Verklaring* pada 28 Juni 1861. Lebih jauh lagi, pada 26 Desember 1861, Raja Adi menandatangani *Akte van Bevestiging*. Raja yang sama menandatangani *Timor Verklaring* pada 2 November 1891 dan *Verklaring Betreffende Belastingheffing* (Perjanjian tentang Penaikan Pajak) pada 21 Juli 1901.

III. LAMAKERA

Lamakera terdiri dari suku Lewoklodo, Lawerang, Tanah Werang, Ema Onang, Kukung Onang, Lamakera, Kiko Onang, dan Hari Onang. Raja Lamakera pernah menentang kehadiran Portugis yang membangun gereja dan sumur di Wai Padar. Oleh karena itu, Portugis lantas memindahkan kedudukannya ke Lohayong. Untuk mempertahankan dirinya, Portugis mendirikan benteng pada 1566 yang disebut Fort Henricus. Keneng Raja Hala merupakan nama penguasa Lamakera yang menandatangani kontrak politik berupa *Lange Verklaring* pada 28 Juni 1861 bersama dengan raja-raja lainnya. Ia menandatangani *Akte van Bevestiging en Verklaring van 14 Artikelen* pada 29 Juni 1861. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Raja Liwu yang menandatangani *Timor Verklaring* pada 2 November 1891. Selain itu, raja menandatangani *Verklaring Betreffende Belastingheffing* (Perjanjian tentang Penaikan Pajak) pada 20 Juli 1901.

IV. LOHAYONG

a. Cikal Bakal Kerajaan Lohayong

Konon, nama Lohayong berasal dari kata *lewo* yang berarti "kampung" dan *hayon* yang merupakan nama seseorang[194]. Jadi Lohayong dapat diartikan sebagai

194. Lihat *Lohayong Solor: Refleksi Menuju Masa Depan*, halaman 10.

kampung atau tanah milik seseorang bernama Hayon. Sementara itu, ada istilah lain yang berbunyi *Lewo Kota Sarabiti Tana Biti Kai Hali* dan *Lewo Kota Atu Matan Tanah Samon Purunama*. Kalimat tersebut mengacu para cerita rakyat setempat bahwa pemilik Lohayong adalah seseorang bernama Samon Purunama Kai Hali. Masih belum dapat ditentukan secara pasti apakah Hayon merupakan nama lain Samon Purunama Kai Hali atau keduanya merupakan dua orang yang saling berkerabat (sebagai saudara, ayah, anak, atau lainnya).

Kisah mengenai asal muasal penduduk Lohayong juga masih diliputi berbagai versi. Ada versi yang mengatakan bahwa leluhur Lohayong berasal dari *Tanah Jadi* di Gunung Napo. Sementara itu, ada pula kaum pendatang yang berasal dari Seram dan Gorang di Maluku Tengah serta Gunung Ile Mandiri (Larantuka) di Watowiti. Nama *Tanah Jadi* berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti "melahirkan", "menciptakan", atau "menimbulkan." Oleh karena itu, orang yang menyatakan dirinya sebagai keturunan asal Tanah Jadi dapat diartikan sebagai pernyataan bahwa mereka terlahir atau muncul dari tanah. Dengan demikian, mereka hendak dianggap sebagai penduduk pribumi atau tuan tanah daerah itu.[195]

Kerajaan Lohayong mencakup wilayah yang terdiri dari tujuh suku (Lamarobak, Kaliha, Kapitan Belan, Seran Gorang, Ambon Wandan, Wotan, dan Atanuhan) di daerah pantai dan 12 kampung di pedalaman (Wulublolong, Amakebo, Lewohedo, Lewograran, Bubu, Atagamu, Lewu'ung, Lebao, Leworotok, Waiwe'ek, Tala, dan Lewogeka). Hingga saat ini, masih belum dapat dipastikan kapan Kerajaan Lohayong berdiri. Siapa rajanya yang pertama juga tidak diketahui. Menurut dokumen yang ditulis Hagerdhal, pada 1598 memerintah seorang raja bernama Dom Diogo[196]. Nama asli raja tersebut tidak diketahui tetapi berdasarkan namanya jelas sekali bahwa ia merupakan penguasa yang telah menganut agama Katolik. Dokumen Portugis menyebutkan bahwa ia pribadi yang sangat pintar dan ulet. Dikarenakan mengadakan hubungan dengan para penganut agama Islam, Dom Diogo dipenjarakan oleh Portugis selama 10 bulan oleh Antonio Andria, panglima benteng Portugis di Lohayong.

Pada masa itu, Portugis telah bertindak sewenang-wenang dengan merampas barang dagangan penduduk di pasar, memaksa penduduk menjadi anak buah kapal tanpa dibayar, mengerahkan rakyat membangun benteng di Serbiti memberi mereka

195. Lihat *Lohayong Solor: Refleksi Menuju Masa Depan*, halaman 10.
196. Lihat *Lohayong Solor: Refleksi Menuju Masa Depan*, halaman 39.

makan, merampas hasil tangkapan nelayan Solor, dan lain sebagainya. Orang Portugis tidak pula menghormati adat istiadat setempat sehingga membangkitkan perlawanan rakyat. Pergolakan melawan Portugis ini juag melibatkan Dom Goncalvo, pangeran dari Lamakera dan tokoh-tokoh lain kerajaan tersebut.

b. Perkembangan Kerajaan Lohayong

Raja Lohayong berikutnya yang tercatat adalah Kaicili Pertawi yang memerintah pada 1613–1645. Berdasarkan gelar *kaicili* yang disandangnya, raja ini tampaknya mempunyai hubungan dengan Kesultanan Ternate karena para putra raja selalu diberi gelar *kaicili* dan putri raja digelari *nyaicili*. Dokumen masa itu menyebutkan bahwa raja ini merupakan yang terpenting dan tertinggi kekuasaannya di antara para raja di Solor. Dalam surat dari Solor yang dikirim pada 1636, disebutkan bahwa raja ini merupakan abdi Raja Ternate dan Raja Belanda, yang dianggapnya laksana ayah dan ibu. Masa pemerintahan Kaicili Pertawi diwarnai pertikaian antara Belanda dan Portugis, dua kekuatan asing yang berebut pengaruh di kawasan tersebut. Sebagai contoh, benteng Portugis di Lohayong direbut oleh Belanda. Guna mengokohkan kekuasaannya, Belanda mengadakan pakta pertahanan bersama dengan enam raja di Solor dan sekitarnya. Selain itu, Belanda menjanjikan perlindungan pada Lohayong pada 1613. Meskipun demikian, ketika kapal Belanda merapat di Lohayong pada 1618, mereka mendapati perkampungan penduduk yang telah dibakar oleh Portugis. Itulah sebabnya, Raja Lohayong mengeluhkan hal ini dan menagih janji Belanda dalam melindungi negerinya. Sebagai tanggapan atas keluhan raja ini, Belanda menempatkan garnisunnya di Lohayong sehingga serangan Portugis pada 1619 dapat dipukul mundur.

Setelah itu, masih timbul berbagai konflik. Pada 1627 terjadi perselisihan antara Kerajaan Terong dan Lamahala. Pihak Lamahala berniat memperoleh kekuasaan yang lebih besar di kawasan Flores timur laut melalui perkawinan politis. Sebelumnya, Kaicili Pertawi dianggap sebagai raja yang terpenting di antara raja-raja Solor Lima Pantai atau penguasa atas seluruh Solor. Lamahala ingin merebut kedudukan dan menerbitkan perlawanan terhadapnya, hal itu juga berakar dari hasutan Portugis. Kaicili Pertawi mengirimkan pasukan di bawah pimpinan putranya untuk memadamkan pemberontakan tersebut dan berhasil menangkap Raja Lamahala serta Terong. Namun, permasalahan belum selesai karena penduduk Adonara masih menyandera perahu milik Kerajaan Lamakera dan Lohayong. VOC ingin turun tangan

dalam hal ini dengan mengadakan perjanjian terpisah dengan Larantuka, bukannya Portugis, tetapi gubernur jenderal di Batavia tidak menyetujuinya.

Karena konflik yang berkepanjangan itu, Kaicili Pertawi pada 1629 mengirim putranya yang berangkat bersama putra Sangaji (Raja) Lamakera ke Batavia guna mengajukan permohonan agar VOC menyediakan lebih banyak pasukan untuk melindungi Lohayong dari tangan musuh-musuhnya, sesuai dengan perjanjian tahun 1613. Pasukan Belanda saat itu banyak yang jatuh sakit. Akibatnya, bila terjadi serangan, Raja Lohayong akan kewalahan menghadapinya dan hanya mampu mengungsi ke gunung-gunung saja. Raja Lohayong menyatakan lebih baik baginya tinggal di Batavia saja jikalau tak sanggung melindungi rakyatnya. Meskipun demikian, Belanda mengharapkan agar raja tidak meninggalkan Solor sambil menjanjikan lebih banyak bantuan untuk melindungi Lohayong. Pada saat yang sama, raja menyatakan keinginannya untuk berlindung ke Ternate, tetapi Belanda tetap menyarankan agar raja jangan meninggalkan Solor agar situasi tidak makin memburuk.

Lohayong terlibat konflik dengan Larantuka pada 1630, tetapi Belanda malah meninggalkan bentengnya di Solor. Kepergian Belanda ini dimanfaatkan oleh Portugis untuk mengambil alih benteng. Akibatnya, Kaicili Pertawi beserta rakyatnya terpaksa mengungsi ke Lamakera dan daerah pegunungan. Benteng itu kemudian diperbaiki oleh pihak Portugis di bawah pimpinan Miguel Rangel yang mendapat bantuan Larantuka. Meskipun demikian, pada 1636 sepasukan besar Belanda yang dipimpin oleh Jan Tombergen mendarat di Lohayong dan merebut kembali benteng yang saat itu hanya dipertahankan oleh 25 orang *mestiso* dan seorang padri. Belanda menembaki benteng tersebut dan merusak menaranya. Oleh karenanya, Portugis lantas lari menyelamatkan diri dan Belanda menduduki lagi Benteng Lohayong. Kaicili Pertawi mangkat pada 1646. Karena putranya telah wafat, yang menggantikannya adalah jandanya yang bernama Nyai Cili.

Menurut penuturan cerita rakyat, Nyai Cili (juga disebut Injay Cili, memerintah pada 1646–1664) dilahirkan di Keeda dan datang dengan perahu ke Solor. Semasa pemerintahannya, Belanda kembali menduduki benteng Lohayong di Solor. Saat berlangsungnya pertemuan pada 22 Februari 1646 dengan pihak Belanda, para raja meminta agar mereka diizinkan tinggal dalam benteng karena alasan keamanan. Para raja sepakat untuk membantu menyediakan bahan-bahan demi memperbaiki

benteng tersebut, yang kini dikomandoi oleh Letnan Hendrick van Olldenburgh. Namun, dua tahun kemudian atau tepatnya pada 1648, terjadi dua kali gempa bumi dashyat yang merusakkan benteng Fort Hendricus tersebut. Bersamaan dengan itu, Belanda mulai kehilangan minatnya untuk tetap berdiam di Lohayong. Karena itu, 44 garnisun Belanda yang semula berada di Lohayong meninggalkan benteng tersebut di bawah pimpinan Hendrik ter Horst. Belanda kemudian mengalihkan pertahanannya ke Kupang.

Selanjutnya, terdapat laporan dari Wouter Schouten, seorang pelayan VOC, mengenai ratu Lohayong ini. Ia menyatakan bahwa ratu yang berkulit sawo matang tersebut dengan diiringi para pengikutnya datang menyambut armada mereka dan mengucapkan selamat datang secara pribadi dengan nyanyian beserta alat musiknya. Ratu beserta para bangsawan meminta agar persahabatan dengan Belanda tetap dilanjutkan guna bersama-sama melawan Portugis yang kerap menebarkan permusuhan. Ketika Nyai Cili mangkat pada 1664, ia digantikan oleh putrinya yang bernama Nyai Cili Muda (1664–1686). Penguasa baru Lohayong ini masih kanak-kanak sehingga belum memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan yang memadai. Ia tinggal dalam benteng Lohayong yang diperkuat oleh 14 prajurit dan 18 pucuk meriam sebagai pelindungnya. Belanda pernah mengirimkan 4 meriam ringan dan dua orang prajurit beserta pegawai-pegawai lainnya atas permintaan ratu.

Ketika Nyai Cili Muda wafat pada 1686, ia digantikan oleh seorang bernama Poro (1686–1687), yang bukan keturunan raja, melainkan budak ratu sebelumnya sehingga pengangkatannya tidak sesuai dengan adat. Oleh karenanya, ia hanya dapat berkuasa dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, yang dipilih sebagai raja adalah putra saudara perempuan Nyai Cili Muda bernama Sangaji Cili (1687–1700). Ia berasal dari keluarga Raja Lamahala. Ayahnya adalah Sangaji Bole yang tercatat dalam dokumen VOC bertahun 1684–1692[197]. Bole menikah dengan saudari Nyai Cili Muda, yang juga saudara perempuan Raja Lamahala sebelumnya. Sangaji Cili merencanakan untuk mengunjungi benteng VOC di Kupang, tetapi Belanda berupaya mencegah kunjungannya secara halus. VOC menganggapnya sebagai "petani yang setiap tahun datang dan pergi ke Kupang tanpa keperluan dan kepergiannya selalu menjadi tanggungan VOC."[198] Sangaji Cili, seperti paman dan pendahulunya, berniat

197. Lihat *Lohayong Solor: Refleksi Menuju Masa Depan*, halaman 43.
198. *Lohayong Solor: Refleksi Menuju Masa Depan*, halaman 43.

menaklukkan Alor. Oleh karena itu, saat kedatangan perwakilan VOC datang ke Lohayong pada Mei 1699, raja sedang tidak berada di tempat karena mengadakan ekspedisi militer ke Solor. Ketika berjangkit wabah di Solor pada 1700, raja ikut menjadi korban. Dengan wafatnya Sangaji Cili, berakhirlah garis keturunan *nyaicili* dan setelah saat itu raja-raja Lohayong tidak lagi dianggap sebagai penguasa seluruh Solor, walaupun kehormatan kerajaan tersebut tetap terjaga.

Sepeninggal Sangaji Cili, Poro, bekas budak yang dahulu pernah menjadi Raja Lohayong dalam waktu singkat kembali berkuasa antara tahun 1700–1703. Meskipun demikian, di Lohayong masih terdapat tokoh bernama Damam Baoama dari garis keturunan raja-raja sebelumnya yang merasa lebih berhak atas tahta. Oleh karena itu, pada 7 Agustus 1700, ia bersama-sama dengan Kapitan Pura, Tupang Aman, Sangaji Adonara, Sangaji Lamahala, dan Sangaji Terong, mengajukan surat gugatannya pada VOC. Klaim atas tahta ini tidak ditanggapi sepenuhnya oleh Belanda. Sebagai jalan keluarnya, Damam Baoama diangkat sebagai wakil raja atau raja kedua. Damam Baoama sebenarnya kurang puas dengan hal ini, tetapi ia wafat pada 1702. Putranya yang bernama Samong ditetapkan sebagai Sangaji Lohayong pada 1703. Sementara itu, putra Poro bernama Persiko diangkat sebagai wakil raja.

Semasa pemerintahannya, kondisi benteng Belanda di Lohayong makin memprihatinkan. Laporan pada 1713 menyebutkan bahwa tinggal tersisa 6 pucuk meriam di sana dan 3 di antaranya telah rusak. Samong habis kesabarannya dan mengikat kaki kiri seorang penerjemah Eropa yang telah lama tinggal di Solor selama 11 hari. Samong menyatakan bahwa penerjemah itu telah menipunya dan berniat membelot kepada pihak Portugis. Wakil Belanda yang berkedudukan di Kupang tidak memercayai laporan ini dan menangkap Samong pada 1715. Persiko, putra Poro, yang saat itu menjabat sebagai wakil raja didudukkan sebagai penggantinya. Semasa pemerintahan Persiko jarang terjadi kedamaian di Lohayong.

Belanda mengangkat kembali Samong sebagai Raja Lohayong pada 1718 hingga wafat pada 1728. Sebelumnya, ia dibawa ke Batavia dan setelah itu diasingkan ke Pulau Edam selama dua tahun. Pengembalian itu dimaksudkan untuk mengimbangi Sangaji Baker selaku wakil raja atau raja kedua Lohayong yang kerap menimbulkan masalah bagi Belanda. Semasa pemerintahannya, VOC meminta agar orang-orang Makassar tidak diizinkan berdagang di Solor. Samong mangkat pada 1728, hal ini menimbulkan permasalahan mengenai penggantinya karena Samong mempunyai beberapa orang

putra dan seorang saudara laki-laki bernama Gasi Engel (Gasi Ngal atau Goes Ange-La). Kendati demikian, yang diangkat sebagai raja adalah Kabe (1728–1729). Raja Lohayong yang baru ini juga merupakan seorang pendeta. Dokumen-dokumen Belanda menyebutkan bahwa Kabe merupakan salah seorang saudara Samong, sedangkan dokumen lain menyebutkan bahwa ia adalah seorang tokoh yang masih kerabat Samong. Pengangkatan ini menimbulkan ketidakpuasan warga. Karena itu, ketika Gesi Engel (1729–1736) kembali dari tempat kediamannya di Flores ia diangkat sebagai raja, sedangkan Kabe dijadikan wakilnya merangkap sekretaris karena sebagai pendeta ia mempunyai kemampuan tulis-menulis. Namun, tidak lama setelah Gesi Engel naik tahta pada 25 Agustus 1730, Kabe meninggal dunia.

Pada masa Gasi Engel, terjadi perselisihan dengan Pamakayo, salah satu *kakang* (wilayah) Kerajaan Larantuka yang ada di Pulau Solor. Pamakayo yang berasal dari suku Demong pro-Portugis bermusuhan dengan Lohayong yang keturunan Paji serta pro-Belanda. Perselisihan dengan Raja Olle dari Pamakayo itu telah berlangsung selama 10 bulan dan belum berhasil didamaikan. Oleh karenanya, wakil Belanda bernama Gerardus Bernardus Visser pada 5 Juni 1732 berlayar ke Pamakayo dalam suatu misi perdamaian. Lalu dikirimnya seorang penerjemah bernama Jan van Setter kepada Raja Olle guna mengajaknya bertemu. Raja bersedia berjumpa dengan Visser yang menanyakan mengapa negerinya berperang dengan Lohayong. Sebagai jawabannya, Raja Olle sendiri tidak mengetahui mengapa terjadi perselisihan dengan Lohayong, tetapi ia sepakat untuk mengadakan perdamaian. Misi ini berhasil dan pada akhirnya dicapai perdamaian sementara antara Lohayong dan Pamakayo. Peristiwa lainnya adalah pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis dan orang asing lainnya di Alor yang secara tradisional berada di bawah kekuasaan Lohayong dan VOC pada 1730–1731. Belanda memerintahkan penangkapan mereka, tetapi orang-orang Bugis telah meninggalkan kawasan tersebut ketika pasukan Raja Lohayong tiba. Bersama-sama dengan VOC, Lohayong pernah menjadi juru damai antara dua kerajaan yang bermusuhan, yakni Adonara dan Lummantauw.

Gasi Engel wafat pada 1736 dan digantikan oleh putranya yang bernama Talleway (1736–1739). Raja ini wafat saat hendak mendamaikan peperangan antara Lamahala, Lamakera, dan Terong. Ia tewas tertembak saat hendak menancapkan bendera tanda perdamaian seturut adat Solor. Sebagai penggantinya, diangkat Wayang atau Waluyang (1739–1743), yang merupakan saudara Samong. Raja Wayang wafat pada 1743 karena

usianya yang telah lanjut. Untuk menggantikannya, diangkat Lakaya Sambu yang memerintah dari 1744 hingga 1748.

Raja Lohayong berikutnya adalah Jou (1748–1758). Ia merupakan putra Samong dan saudara lelaki Jumat, Raja Lohayong berikutnya. Pada zamannya terjadi perang besar antara Belanda dengan Portugis Hitam di Kupang yang disebut Perang Penfui. Solor juga mengirimkan pasukannya membantu Belanda, dimana salah seorang pemimpin pasukan Solor bernama Atulaganama berhasil menewaskan komandan pasukan Portugis Hitam di kemahnya serta memotong lidahnya sebagai bukti kemenangannya. Menjelang masa akhir pemerintahan raja ini, yakni pada 1756, berlangsung Perjanjian Paravicini yang dipelopori oleh Johanes Andreas Paravicini dengan berbagai raja di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Isinya antara lain mengharuskan para raja tersebut menyediakan bantuan pasukan bila VOC membutuhkannya.

Jumat (1760–1765) menjadi penguasa Lohayong berikutnya. Semasa pemerintahannya, masih terjadi perselisihan dengan Larantuka, tetapi kerajaan tersebut berhasil dikalahkan sehingga kaum Portugis Hitam tidak lagi memiliki pengaruh di Solor. Pada 1761, wakil Belanda, von Pluskow, mendengar mengenai adanya pabrik senjata di Lohayong. Karenanya, pihak VOC memerintahkan agar pabrik tersebut ditutup dan operasionalisasinya dihentikan. Sebelumnya, memang telah ada keluarga China yang menetap di Solor dan mengetahui cara-cara membuat mesiu, tetapi pada 1761 keluarga ini telah wafat. Bahan baku mesiu, seperti salpeter dan belerang memang dapat diperoleh di Adonara, namun belakangan orang Solor kekurangan bahan baku berupa besi yang diperlukan dalam produksi peluru dan senapan. Itulah sebabnya, tidak banyak lagi senjata yang dapat dihasilkan oleh penduduk setempat. Menjelang masa akhir pemerintahannya, Sangaji (Raja) Jumat merasakan dirinya telah lanjut usia. Oleh karenanya, ia lalu mengajukan saudaranya bernama Rama Geokama sebagai penggantinya pada VOC. Disamping itu, pemuka Lohayong lain seperti Taru Ama dan Kapitan Mangal menyetujui penggantian ini. Dengan demikian, Rama Geokama (1765–1795) diangkat sebagai penguasa Lohayong berikutnya. Semasa pemerintahannya, terjadi perselisihan dengan Lamahala dan Terong yang dibantu oleh Menanga beserta kaum Portugis Hitam. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan tersebut memutuskan hubungannya dengan VOC dan secara otomatis menjadi seteru Lohayong. Adonara menyusul menghapuskan hubungannya dengan VOC.

Dengan demikian, hanya tinggal dua kerajaan yang menjalin persahabatan dengan VOC, yakni Lohayong dan Lamakera. Sewaktu Belanda datang di Lohayong guna meminta warga menjadi anak buah kapal, datanglah orang-orang Menanga beserta Lamahala memaklumkan perang dan membunuhi orang-orang Belanda pada 1773. Belanda mengirimkan pasukan dari Kupang untuk menangkap pembunuh dan menghancurkan Menanga. Meskipun demikian, pada 1792, Raja Menanga memohon agar diizinkan menjadi sahabat VOC lagi.

Rama Geokama juga dikenal sebagai Gaik Komang. Ia digantikan oleh Rote Geokama Baoama (1795–1803). Meskipun demikian, sumber yang berasal dari Rouffaer (1905)[199] menyebutkan bahwa Rama Geokama digantikan terlebih dahulu oleh Lahiang dan setelah itu baru Rote Geokama Baoama. Tetapi sumber VOC tidak menyebutkan mengenai Lahiang. Wakil Raja Rote Geokama Beoama pernah mengirimkan surat diplomatik pada 1800 yang ditandatangani atas nama raja. Sementara itu, penjelajah Perancis menyebutkan mengenai Raja Solor yang bernama Naha Leba, yang tinggal di Kupang serta meninggal antara 1801–1803, namun sumber Belanda tidak mencatatnya.

Selanjutnya yang memerintah di Lohayong adalah Kraeng Geokama (1832), Kelas Raja (1840), dan Seneng (1840–1859). Pada kurun waktu itu, Raja Lohayong setiap tahun mengunjungi wakil Belanda di Kupang untuk menghaturkan penghormatan. Raja berikutnya, Kidin Siko (1860–1869) juga dikenal sebagai Kraeng Siku atau Kiun Siku. Laporan Belanda bertahun 1862 menyebutkan bahwa raja ini merupakan seorang pemabuk. Oleh karena itu, rakyat Lohayong mengajukan permohonan kepada Belanda agar putranya dapat dijadikan raja menggantikannya. Raja ini dikatakan meninggal karena kecanduan alkohol. Sebelumnya, Raja Kidin Siko pernah menandatangani perjanjian *Akte van Bevisteging en Verklaring van 14 Artikelen* pada 21 November 1860 dan *Lange Verklaring* pada 28 Juni 1861.

Amang Kalake (1870–1896) menjadi penguasa Lohayong berikutnya. Menurut catatan Belanda karya Rouffaer, ia juga disebut Amang Klas Raja dan merupakan putra Raja Kelas Raja. Menurut laporan lainnya oleh J.M. Kluppel, Raja Lohayong hidup sangat sederhana dan bahkan ia harus pergi sendiri ke pasar untuk berbelanja.[200] Penghasilannya sangat kecil dan boleh dikatakan tidak ada. Semasa pemerintahan

199. Lihat *Lohayong Solor: Refleksi Menuju Masa Depan*, halaman 51.
200. Lihat *Lohayong Solor: Refleksi Menuju Masa Depan*, halaman 58.

Amang Kalake kembali pecah perang pada 1888 dengan Menanga, Lamakera, dan Lamahala. Belanda menurunkan pasukannya untuk menghancurkan Lamakera dan Lamahala serta melawan Menanga. Ketika kapal perang Belanda tiba di Menanga pada 9 November 1888, negeri itu telah ditinggalkan penduduknya. Belanda membakar kampung tersebut dan melarang untuk dibangun kembali.

Amang Kalake digantikan oleh putranya dengan Ema Rebbu yang bernama Kalake Amang (1896–1925). Menurut sumber Belanda, penduduk Lohayong saat itu (1916) berjumlah 3.409 jiwa. Selama pemerintahannya, Amang Kalake menandatangani perjanjian-perjanjian atau kontrak sebegai berikut dengan Belanda:

- *Timor Verklaring (VI)* pada 13 November 1896.
- *Verklaring Betreffende Belasting Heffing* pada 20 Juli 1901 yang isinya mengenai penaikan pajak.
- *Contract Betreffende Mijnrechten* pada 15 Desember 1905.

Peristiwa penting lain yang terjadi semasa pemerintahan Amang Kalake adalah serangan dari penduduk pegunungan di Wulibelolong. Raja Amang Kalake lantas balas menyerang Wulibelolong, ia membakar perkampungan mereka hingga banyak warga yang menjadi korban. Raja pernah pula terlibat peperangan dengan Larantuka. Selain itu, pada 1905, warga Lekluo menyerang penduduk yang pro-Belanda di distrik Wolu. Belanda tidak tinggal diam menyaksikan hal itu dan menyerang Lekluo pada 22 Juli 1905 sehingga banyak korban jiwa berjatuhan. Kawasan tersebut akhirnya bersedia berdamai dan diharuskan membayar denda berupa gading.

Setelah Kalake Amang tutup usia, yang menjadi Raja Lohayong adalah Banu Kapitan (1925–1928). Ia sebenarnya hanya penguasa sementara, hingga putra raja bernama Amang Kalake dewasa. Amang Kalake kemudian memerintah dari 1930 hingga 1956. Semasa kekuasaan Amang Kalake, pada 1932, Kerajaan Lohayong digabungkan dengan Adonara guna membentuk Swapraja Adonara dan untuk selanjutnya raja menerima tunjangan 20 -30 Gulden per bulannya. Pada 1939, raja pernah jatuh dari kuda dan terluka sehingga harus beristirahat. Itulah sebabnya, Ali Lewung, ditunjuk sebagai wakil selama raja tidak dapat menjalankan tugasnya. Ketika Raja Kalake Amang memerintah, Jepang datang menduduki negerinya. Masa pendudukan Jepang tersebut merupakan saat-saat yang sulit, bahkan tongkat kerajaan berkepala emas yang merupakan simbol kekuasaan raja dirampas oleh Jepang. Raja Kalake Amang digantikan oleh kemenakannya, Ali Kraeng, yang memerintah dari 1956 hingga 1966.

V. SERBITI (LEWONAMA)

Kerajaan ini pada mulanya merupakan salah satu di antara enam kerajaan (Adonara, Terong, Lamahala, Lohayong, Lamakera, dan Serbiti atau Lewonana) yang membentuk persekutuan bersama. Namun, kerajaan ini dihapuskan pada abad 18.

I. EKONOMI DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI PULAU SOLOR

Masyarakat Solor terbagi menjadi dua golongan tradisional, yakni Paji dan Demong, yang kerap terlibat perselisihan satu sama lain. Hal ini tampak pada cerita rakyat mengenai Igo dan Enga. Rakyat Paji mendiami lima kerajaan yang disebut Solor Lima Pantai. Sementara itu, orang Demong mendiami negeri-negeri yang menjadi bawahan (*kakang*) Kerajaan Larantuka. Belakangan, pembagian ini didasari pula keterpihakan mereka terhadap Portugis (Larantuka) dan VOC–Belanda (Solor Lima Pantai). Karenanya, tidak jarang peperangan antara dua kelompok masyarakat ini dipicu oleh persaingan antara dua bangsa asing tersebut.

Salah satu mata pencaharian utama rakyat Solor adalah nelayan dengan keahlian mereka menangkap ikan paus, sebagaimana yang tampak pada laporan bertahun 1834. Daging ikan paus ini kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan selanjutnya dipertukarkan dengan hasil dari daerah pedalaman, seperti jagung dan lain sebagainya. Apabila mereka membutuhkan hasil dari daerah pedalaman, kaum wanitanya akan bangun pagi-pagi sekali dan berjalan masuk jauh ke daerah pedalaman dengan membawa daging ikan paus mereka guna ditukar dengan jagung atau ubi kayu. Dengan demikian, hubungan dagang antara daerah pantai dan pendalaman menjadi hidup. Komoditas penting lain di Solor adalah karet, teripang, dan sarang burung.

Solor pernah pula menjadi pelabuhan perantara perdagangan yang penting. Sebelumnya pedagang Jawa dan Melayu banyak singgah di sini sebelumnya melanjutkan perjalanannya untuk membeli kayu cendana di Timor. Tetapi belakangan yang mendominasi adalah pedagang Bugis, Makassar, dan Bajau. Mereka datang ke Solor dengan membawa barang dagangan berupa kain lena, kain dari Buton atau Ende, benang sutera, gading gajah, kawat tembaga untuk memancing, dan lain sebagainya. Sebagian barang-barang ini ada yang diperdagangkan lagi dengan penduduk pedalaman.

J. KERAJAAN-KERAJAAN TERTUA DI PULAU TIMOR

Pulau Timor dihuni oleh berbagai suku bangsa, seperti Dawan (Atoni), Tetun (Belu), Helong, Buna, dan lain sebagainya. Terdapat sebutan yang berbeda-beda bagi suku Dawan. Orang Belu menyebutnya sebagai Dawan. Sementara itu, orang-orang asing menyebut mereka sebagai Atoni atau Antoni. Orang Rote dan Sabu menyebutnya dengan istilah Sonnaba'i atau "rakyat Sonbai." Kendati demikian, suku Dawan menyebut diri mereka sendiri sebagai "orang Timor" atau Antoni Meto, yang secara harfiah berarti "orang daratan." Wilayah yang didiami suku Dawan adalah Amarasi, pantai selatan Pulau Timor, *enclave* (wilayah kantung) Oekusi milik Portugis, sebagian kecil kawasan Belu Selatan, serta kabupaten-kabupaten Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara. Dari segi fisik, suku bangsa Dawan memperlihatkan unsur-unsur Negrovid dan Melanesia[201].

Suku Belu dan bahasa Belu sesungguhnya tidak dikenal sebelumnya. Mereka lebih lazim disebut sebagai suku dan bahasa Tetun. Sebutan *Belu* tersebut berasal dari orang-orang Belanda yang memerhatikan bahwa mereka menyapa orang tak dikenal dengan "Hoi Belu" atau "Hai Sahabat." Di wilayah Timor Portugis (kini menjadi Republik Demokratik Timor Leste), bahasa Tetun dipergunakan di pantai utara, sedangkan di kawasan pantai selatan, banyak diucapkan di Suai Kamanasa hingga Viqueque. Masih di kawasan Timor Portugis, bahasa ini dijadikan bahasa resmi di samping bahasa Portugis. Para ahli antropologi menjumpai adanya unsur-unsur proto-Melayu dan Melanesia dalam diri suku Tetun. Kendati demikian, dalam cerita rakyat Tetun dapat dijumpai cerita bahwa leluhur mereka berasal dari Sina Mutin Malaka. Mengenai hal ini akan diulas kembali pada uraian berikut mengenai raja-raja di bumi Timor.

Berikutnya, akan diulas mengenai suku Helong, yang mendiami Pulau Semau dan sebelah tenggara kota Kupang. Konon, dahulu mereka mendiami daerah yang lebih luas, tetapi kemudian terdesak oleh para pengungsi dari kawasan Belu. Salah seorang Raja Helong bernama Nai Kopan, namanya merupakan asal muasal bagi nama kerajaan dan kota Kupang. Sebutan bagi suku Buna baru diperkenalkan pada 1950 oleh A.A. Bere Tallo, kepala Swapraja atau Raja Lamakmen. Namun, nama yang lebih dikenal semenjak dahulu adalah MaraE. Suku Buna ini banyak mendiami wilayah-wilayah yang dihuni suku Tetun dan berbagai kawasan di Timor Portugis.

---

201. Lihat *Timor Pulau Gunung Fatuleu "Batu Keramat"*, halaman 99.

Cikal bakal raja-raja di Timor memiliki banyak versi yang berasal dari berbagai sumber pula. Terdapat kisah yang beragam dan berbeda-beda mengenai cikal bakal kerajaan-kerajaan di Pulau Timor, yang barangkali tampak sangat membingungkan. Kendati demikian, masing-masing versi dan cerita rakyat tersebut merupakan kekayaan sejarah yang perlu dilestarikan.

Konon pada akhir abad 12 dan awal abad 13, tiba seorang bangsawan beserta keluarganya di Noe Fanu, pelabuhan yang terkemuka di Timor[202]. Bangsawan ini bernama Lak Neno dan terkenal ahli dalam berbagai ilmu yang dibutuhkan umat manusia saat itu, seperti perbintangan, astrologi, bercocok tanam, pemerintahan, dan lain sebagainya. Setelah mendarat di Noe Fanu, Lak Neno menjelajahi pula tempat-tempat lainnya di Pulau Timor, seperti Laynu atau Laynu di Belu, Raymea atau Laymea di Belu, NoE Fanu, dan Tun Am. Ia kemudian mulai membangun tempat pemukiman, membuka lahan bercocok tanam, dan mengajarkan berbagai pengetahuan kepada masyarakat. Karena kebijaksanaan dan tingginya pengetahuan yang dimilikinya, rakyat yang masih sederhana tingkat peradabannya berbondong-bondong meminta nasihatnya. Selain itu, Lak Neno juga mengajarkan adat istiadat pada masyarakat setempat. Konon sebelum kedatangannya, rakyat memakan makanan mentah-mentah. Dia kemudian mengajarkan kepada mereka agar memasak terlebih dahulu bahan makanan yang hendak dikonsumsi. Lama kelamaan, rakyat di tempat itu menjadi makin maju dan Lak Neno diangkat sebagai raja mereka. Rakyat berlomba-lomba menghaturkan persembahan agar kekayaan dan kemakmuran mereka meningkat.

Supaya pemerintahan menjadi lebih teratur, wilayah kekuasaan dibagi menjadi berbagai daerah yang lebih kecil, mulai dari *temukung*. Di atasnya terdapat fetor atau kepala ke-fetor-an (*usif noE*) yang berada di bawah raja. Lak Neno mempunyai tiga orang putra. Ia berpesan pada putra-putranya bahwa bila ia dan istrinya meninggal, jenazah mereka hendaknya dijadikan persembahan kepada bumi. Sementara itu, putranya yang bungsu bernama Luku Neno, hendaknya dijadikan sebagai pengganti ayahnya dan mewarisi nama keluarga Banunaek. Ia merupakan cikal bakal para raja Amanatun. Sementara itu, kedua putranya yang lebih tua, yakni Mean dan Boynoni diperintahkan untuk mencari daerah kekuasaannya sendiri-sendiri. Apabila mereka telah memperolehnya, ketiga bersaudara itu diharuskan bersumpah agar senantiasa seia sekata.

---

202. Lihat *Sejarah Raja-raja Timor dan Pulau-pulaunya*, halaman 8.

Memenuhi wasiat ayahnya, saudaranya yang pertama berangkat bersama pengikutnya menuju ke tanah Belu dan membangun kekuasaannya di Betun atau Petu. Rakyat di sana yang berasal dari Tahuk Baria, bi Lili bi Lumalo, Siu Bes, Lok Bes, Teut Pala, Tetumnanu, Oenunuh, Oebiko, Oehale, Bas Hain, Ba Hael, dan lain-lain bersama-sama mengangkatnya sebagai raja. Untuk selanjutnya putra sulung dikenal sebagai *maromak oan*, *liu lai*, *riyu ray*, *liu rai*, atau *liurai*. Wilayah kekuasaannya sangat luas hingga sampai ke ujung Pulau Timor. Saudaranya yang kedua bernama Baynoni menyusuri suatu pegunungan kecil, yakni dari Belu hingga ke Gunung Mutis. Dengan tanpa menyeberangi sungai, tibalah ia di sebuah tempat bernama Netnoni. Di sini, dia berjumpa dengan calon istrinya yang bernama Bi Lili Kune, putri ketiga Kune Uf, yakni orang pertama yang menduduki Gunung Mutis. Keduanya membangun pemerintahan di Batu Oenam (arti harfiah: batu basah). Untuk selanjutnya ia dikenal sebagai Sonbay atau Sonbai, dengan wilayah kekuasaannya meliputi Insana, Oekusi, Amfoan, Miomaffo, Mollo, Fatuleu, Maluku, Alor, Pantar, Sabu, dan Rote. Dengan demikian, wilayah Baynoni atau Sonbai ini meliputi kawasan Pulau Timor bagian utara. Setelah membangun kerajaannya, Sonbai berniat mengukur kerajaannya. Oleh karenanya, ia memanggil seekor garuda dari Istana Garuda untuk melakukan pekerjaan ini. Setelah tugas mengukur ini usai, Sonbai menempatkan berbagai penduduk di wilayah kekuasaannya itu.

Selanjutnya, terdapat legenda lain mengenai asal muasal kerajaan-kerajaan di Pulau Rote. Konon di sekitar Gunung Mutis terdapat suatu keluarga yang memakai nama Rote. Anggota keluarga itu masing-masing bernama Bi Nut Lote, Rote Bi Nai Lote, Rote Lote Mateb, dan Matau. Bi Nut Lote dan Bi Nai Lote merupakan wanita yang amat kuat tenaganya. Apabila mereka menumbuk padi yang berada dalam lesung maka ayunan alu mereka akan menembus lesungnya hingga ke tanah. Akibatnya, semua lesung yang berada di tempat itu rusak. Akhirnya, keluarga ini diutus ke sebuah pulau yang kemudian dinamai Rote seturut nama keluarga mereka. Keluarga lain diutus lagi dari Batu Oenam ke Rote. Mereka menjadi cikal bakal bagi Kerajaan Oenale di Rote yang berasal dari nama Oenam, tempat kampung halaman mereka. Keluarga Amalo atau AmaAlo juga diutus ke Rote dan menjadi cikal bakal Kerajaan Termanu. Sementara itu, keluarga lain yang bernama Bilba atau Belluba diutus ke Rote dan merupakan pendiri Kerajaan Bilba.

Setelah Sonbai mendirikan kerajaannya, ia berniat memberitahukan hal itu pada kakaknya, agar mereka semua dapat mengadakan ikrar bersama demi menciptakan persatuan dan kerukunan di antara mereka. Untuk itulah, ia menghanyutkan sepotong bambu yang telah diukir cap kerajaannya di Sungai Noebesi. Potongan bambu itu akhirnya sampai juga kepada liurai, kakaknya. Begitu menyaksikan cap kerajaan adiknya, ia mengetahui bahwa adiknya telah berhasil menjadi raja besar ketiga di Pulau Timor. Bambu tersebut kemudian ditanam dan tumbuh menjadi serumpun besar bambu di Besikama, Belu. Dengan demikian, kini ketiga saudara itu semuanya telah menjadi raja sehingga wasiat ayahnya untuk mengadakan upacara perjanjian bersama dapat dilaksanakan. Adapun isi perjanjian itu adalah sebagai berikut[203]:

- Menjaga kelestarian air dan tanah (*ka musik pah ma nifu pah ma nifu*), baik yang mencakup kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan.
- Menjaga hubungan atau fungsi sosial antar umat manusia (*ka musik pah ma nifu to ma tafa*).
- Menjaga keharmonisan hubungan antara bumi dan alam.
- Memerhatikan pengumpulan hasil alam demi kepentingan bersama.
- Bertanggung jawab ke dalam dan luar kerajaannya.
- Tidak boleh berperang satu sama lain.
- Menjaga perdamaian dalam segala hal.
- Senantiasa bersatu-padu.
- Menjaga hubungan antara bumi dan langit.

Sesudah upacara yang dilangsungkan di Usapi Mak ini usai, mereka pulang ke negerinya masing-masing.

Menurut salah satu sumber lain, pada zaman kuno ada tiga bersaudara di Pulau Timor[204] yang konon datang dari seberang lautan. Nama mereka adalah Tei Liu Lai, Kaes Sonbai, dan Tnai Pah Banunaek. Mereka diperkirakan datang dari Hindia Belakang dan mendarat di Wehali (Belu). Ajaibnya, di tempat baru yang mereka tempati tersebut tumbuh sebatang padi yang menghijau sepanjang zaman. Setelah orang tua mereka meninggal, ketiga bersaudara ini berniat menjelajahi Pulau Timor.

203. Lihat *Sejarah Raja-raja Timor dan Pulau-pulaunya*, halaman 20.
204. Lihat *Raja-raja Amanatun yang Berkuasa*, halaman 1–6.

Mereka lalu menyusuri pantai selatan Timur dengan melewati Besikama, Oeua, Kolo Oto, Baus, Boking, dan tiba di sebuah gunung yang bernama Gunung Tun Am. Ketiga saudara itu lalu menempati gunung tersebut. Nama Tun Am sendiri terbentuk dari dua kata, yakni *tunaf* dan *am*. *Tunaf* berarti tungku terdiri dari tiga batu, yang melambangkan ketiga saudara tersebut, sedangkan *am* berasal dari kata Am yang berarti "bapak." Kemudian diadakan kesepakatan di antara mereka; saudaranya yang sulung, Tei Liu Rai akan menjelajah bagian timur Pulau Timor; saudaranya yang kedua, Kaes Sonbai menjelah bagian barat Pulau Timor; sementara itu, saudaranya yang bungsu, Tnai Pah Banunaek tetap berdiam di kampung halaman mereka di Tun Am.

Menurut legenda tersebut, tubuh saudaranya yang bungsu terbuat dari emas dan perlengkapan-perlengkapannya juga terbuat dari emas (*mnatu*). Karena ia yang menjaga tempat kediaman mula-mula mereka di Tun Am, diberilah ia gelar *Am* oleh kakak-kakaknya, meskipun usianya lebih muda dibandingkan dua orang saudaranya tersebut. Itulah sebabnya kerajaannya disebut Amanatun, yang berasal dari kata *am* dan *mnatu* atau "bapak emas." Untuk selanjutnya, Tnai Pah Banunaek menjadi leluhur raja-raja Kerajaan Amanatun. Selanjutnya, Tei Liurai tiba di sebuah gunung yang dinamainya Lai Mea dan mendirikan Kerajaan Belu. Saudara tengah mereka, Kaes Sonbai tiba di Gunung Mutis dan menjadi cikal bakal Kerajaan Mollo (Oenam). Mereka sepakat menetapkan daerah kekuasaan masing-masing[205],

Tei Liurai dengan wilayah kekuasaan dari Maubesi hingga Winyi (laut sebelah utara Timor). Dari Maubesi ditarik ke sebelah selatan hingga laut selatan Timor. Lalu ke sebelah Timur hingga mencakup wilayah Timor Leste.

Kaes Sonbai wilayah kekuasaannya ditarik dari Maubesi dengan melalui Gunung Mutis hingga mencapai sungai Noemina, lalu menyusuri Sungai Noemina, hingga laut selatan. Selanjutnya dari Gunung Mutis ditarik garis lurus hingga ke Teno.

Tnai Pah Banunaek wilayahnya mulai dari Maubesi bagian utara dan berbatasan dengan wilayah Kaes Sonbai. Sementara itu, sebelah timurnya berbatasan dengan Tei Liurai. Bagian selatan berbatasan dengan laut, yaitu mulai dari Maubesi. Bagian Baratnya ditarik dari Gunung Mutis hingga Sungai Noemina, lalu menyusuri sungai tersebut hingga laut selatan.

Berdasarkan sumber lokal tersebut, mereka bertiga adalah leluhur tiga kerajaan besar di Pulau Timor. Setelah penetapan mereka sebagai raja di Timor, ketiganya

205. Lihat *Raja-raja Amanatun yang Berkuasa*, halaman 3.

mengunjungi makam ayah mereka di Wehali dan mengadakan ikrar di bawah pohon beringin yang terletak di Gua Bitaunu. Mereka berjanji untuk hidup rukun dan damai, tidak berperang satu sama lain, serta menghormati batas wilayah kedaulatan masing-masing. Apabila hendak mengubah tapal batas yang telah disetujui sebelumnya, mereka bertiga sepakat mengadakan pertemuan lagi, sebagaimana yang terjadi ketika Kaes Sonbai dan Tnai Pah Banunaek memindahkan tapal batas mereka dari Mutis ke Nasimetan. Pada pertemuan ini, mereka menyembelih seekor kerbau dan dagingnya dibagikan kepada ketiga bersaudara tersebut. Dengan demikian, masalah perubahan tapal batas tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

I. WEWIKU WEHALI atau WESEI WEHALI

Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang muncul pada awal sejarah Timor dan terletak di kawasan Belu sekarang. Terdapat beragam versi yang menjelaskan awal mula kerajaan ini. Salah satu versi menyatakan bahwa nama Wewiku Wehali berasal dari nama tiga pohon yang ditanam kaum pendatang pendiri kerajaan ini, yakni pohon Ai Biku, Ai Timuk, dan Ai Hali. Sementara itu, ada pula yang mengatakan bahwa *wehali* berasal dari *we* (air) dan *hale* (beringin) sehingga *wehale* artinya, "air beringin." Tampaknya, pohon yang ditanam oleh kaum pendatang itu adalah pohon beringin sehingga untuk memperingati pohon bersejarah tersebut, Kerajaan Wehali menggunakan pohon beringin sebagai lambangnya. Versi lain menyebutkan bahwa nama itu berasal dari *wai* (memang) dan *halik* (mengelilingi), jadi arti keseluruhannya adalah "kerajaan yang memang mengelilingi kerajaan lainnya." Masih ada sumber yang mengatakan bahwa nama lengkap kerajaan ini adalah Wesei Wehali Wetoh Mubesi. *Wesei* terbentuk dari dua kata, yakni *we* yang berarti "air" dan *sei* yang berarti "menadah, menyaring, atau pancuran." Jadi *wesei* boleh diartikan "air yang disaring" atau "air pancuran." *Wetoh* berarti getah damar dan Maubesi adalah nama teluk.

Berbagai sumber menyepakati bahwa Kerajaan Wesei Wehali didirikan oleh para pendatang tetapi riwayat kaum pendatang ini juga berbeda-beda menurut beberapa versi yang ada[206].A.D.M. Parera (sebagaimana yang dimuat pula oleh Munandjar Widiyatmika dalam karyanya berjudul *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 38), menyatakan bahwa pendiri Kerajaan Wehali adalah empat suku yang para leluhurnya berasal dari sebuah tempat bernama Sina Mutin Malaka. Mereka konon berlayar

206. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 38–40.

meninggalkan negeri leluhurnya dengan menggunakan perahu layar dari bambu. Dalam perjalanannya itu, mereka tiba terlebih dahulu di Rai Henek (Makassar). Namun, karena mengalami angin sakal, perahu mereka pecah. Untungnya, mereka semua dapat mencapai daratan dengan selamat kendati sebagian barang bawaan mereka hilang ditelan keganasan lautan. Potongan bambu, yang berasal dari rakit mereka yang pecah, ditanam dan tumbuh menjadi rumpun-rumpun bambu yang subur. Rombongan diterima dengan baik oleh penduduk Makassar.

Selama berdiam di Makassar, anggota rombongan yang dipimpin oleh Dato Makerek dan Dato Badaen membuat perahu kembali. Agar lebih kuat, kali ini mereka membuatnya dari kayu. Setelah perahunya siap, mereka melanjutkan perjalanan dan singgah di Pulau-pulau Kusu, Kae, Api, Loe, dan Larantuka Bouboin. Sebagian anggota rombongan ada yang berdiam menetap di Larantuka, sedangkan yang lainnya melanjutkan pelayaran dan tiba di Pulau Timor. Mereka mengitari pulau tersebut dan tiba di pantai selatan Amanatun yang curam. Mereka mendarat di sana guna mengamati keadaan dan menjumpai daratan yang luas menghijau tidak jauh dari tempat tersebut. Rombongan itu kemudian menetap di sana, yakni kawasan Besikama.

Masih ada riwayat lain, yang diungkapkan oleh van Wouden (1985) dan juga dimuat dalam karya Munandjar Widiyatmika(*Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 39). Menurutnya, empat suku pendatang dari Sinan Mutin Malaka itu lalu sepakat mencari daerah baru dan berpencar. Kelompok pertama menempati kawasan di tengah dataran dan di depan tempat kediamannya menanam pohon beringin atau *ai hali*. Inilah yang menjadi asal muasal nama Wehali. Kelompok yang kedua berdiam di sebelah barat dan menanam pohon *ai biku* sehingga negerinya disebut Wewiku. Kelompok ketiga berdiam di sebelah utara dataran dan menanam pohon *ai timuk* di depan rumahnya. Itulah sebabnya negerinya disebut Haitimuk. Sementara itu, suku yang keempat menetap di pegunungan sebelah utara Wehali. Belakangan, putra dari Wehali mendirikan kerajaan Fatuaruin (Wehali). Versi cerita rakyat lainnya menyebutkan bahwa pohon beringin yang mereka tanam mulanya hanya satu saja, tetapi kemudian bercabang tiga. Mereka memilih pusat pemerintahan mereka pada sebuah delta sungai yang bercabang tiga pula (disebut *mota sorun tolu*). Tentu saja kisah pohon beringin bercabang tiga dan pemilihan delta sungai *mota sorun tolu* tersebut hanya simbolis saja sifatnya. Para pendatang itu membawa serta dengan

mereka benda-benda berupa tanah, meriam, kelewang, gading, perhiasan, dan gong yang selanjutnya menjadi barang pusaka kerajaan.

Terdapat pula penuturan yang menyatakan bahwa kaum pendatang itu terlibat pertempuran dengan penduduk asli kawasan tersebut (*ema melus*). Penduduk asli terdesak karena kalah dalam persenjataan dan teknologi. Mereka lalu mengungsi ke kawasan pegunungan. Dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Wesei Wehali ini menurut cerita rakyat menjadi suatu kerajaan kembar yang diperintah oleh para raja bergelar *maromak oan*. Tetapi ia tidak terlibat dalam pemerintahan secara langsung dan lebih aktif dalam kegiatan kerohanian atau upacara-upacara ritual. Sementara itu, pemerintahan dijalankan oleh liurai. Munandjar Widiyatmika mengaitkan kedatangan para pendatang dari Sina Mutin Malaka ini dengan kejatuhan Malaka pada 1511 ke tangan Portugis. Saat itu, bangsa Portugis menerapkan monopoli perdagangan dengan tujuan mematikan kaum pedagang Asia. Oleh karenanya, para pedagang Asia yang berasal dari Gujarat (India), China, Melayu, Jawa, dan lain sebagainya, berbondong-bondong meninggalkan tempat itu dan mencari kawasan lain yang strategis, termasuk di Indonesia Timur[207].

Kerajaan Wesei Wehali yang berada di Belu Selatan diperkirakan berkembang mulai dari 1511 hingga dikalahkan oleh pasukan Fransisco Fernandez dari Portugis pada 1642. Sementara itu, Hagerdhal (2005) memperkirakan bahwa kerajaan ini berkembang dari 1515 hingga 1650. Seiring dengan berjalannya waktu, para penguasa Wesei Wehali mengadakan perkawinan politis dengan putri penguasa-penguasa setempat demi melancarkan usaha perdagangan cendana dan lilin mereka.

a. Kisah Maromak Oan di Kerajaan Wesei Wehali

Kisah *maromak oan*, penguasa Kerajaan Wesei Wehali, terdapat berbagai versi yang menarik.A.D.M. Parera[208] mengungkapkan bahwa *maromak oan* pertama adalah keturunan bidadari dari langit. Konon, tujuh putri kayangan[209] (*liurai feto hitu*) turun untuk mandi di sebuah danau dekat Wehali. Putri bungsu ditangkap dan dinikahi oleh Raja Wehali. Mereka berputra *maromak oan* pertama. Setelah ibunya meninggal, sayapnya ditaruh di bawah perapian. Kisah ini mengingatkan pada cerita Jaka Tarub dari Jawa dan juga hikayat serupa lainnya di berbagai belahan dunia.

---

207. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 41–43.
208. Juga dimuat dalam *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 49.
209. Disebut juga tujuh putri kakaktua.

Ada pula kisah mengenai dua orang bersaudara pria dan wanita, yang masing-masing bernama Mau Kiak dan Bu Kiak. Seorang pria misterius lalu menikahi Bu Kiak dan melahirkan seorang wanita bernama Hoar Nai Daholek. Seorang pendatang dari Malaka bernama Rai Taek Malaka menikahi Hoar Nai Daholek. Keturunan mereka menjadi raja-raja di Timor. Dua putranya memerintah di arah matahari terbit (timur) dan putra-putra lainnya memerintah di arah matahari terbenam (barat). Dua putra lainnya tetap tinggal di Wehali dan menjadi pelindung bagi saudarinya yang bungsu.

Kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja yang bergelar *maromak oan*. Namun, ia bukanlah pemegang kekuasaan pemerintahan secara nyata dan lebih merupakan lambang atau simbol keagamaan di kerajaannya. Ia tidak boleh melakukan pekerjaan apapun dan hanya makan, minum, dan tidur. Karena itu, sebagai pelaksana pemerintahan terdapat tiga orang liurai, yakni Liurai Wehali (Liurai Fatuaruin), Liurai Likusaen (Suai Kamanasa), dan Liurai Sonbai. Liurai Likusaen menguasai daerah Timor Timur atau Timor Leste sekarang (Liurai Loro Sa'e). Sementara itu, Liurai Sonbai wilayah kekuasaannya meliputi Miomaffo hingga Kupang sekarang dan dikenal pula sebagai Liurai Loro Toba.

Liurai Fatuaruin di atas adalah turunan langsung *maromak oan*. Karena itu, setelah *Maromak Oan* memegang kedudukan atau menjadi lambang keagamaan yang tinggi, ia diangkat sebagai pembantu umum *maromak oan* di Wehale dan sekaligus merangkap sebagai Liurai Wehale. Dengan demikian, Liurai Fatuaruin mempunyai kedudukan yang terpenting karena ia mempunyai dua tugas; *pertama,* sebagai pembantu *maromak oan* dalam seluruh urusan pemerintahan dan berkedudukan di Wehali, dan *kedua*, bertanggung jawab sebagai Liurai Fatuaruin atau pemimpin pemerintahan di bagian selatan Wehale[210].

Liurai Fatuaruin juga dianggap sebagai pemuka di antara kedua liurai lainnya. Kendati demikian, mereka bertiga tunduk kepada *maromak oan*. Sejarah mencatat bahwa pernah terjadi perang saudara antara Liurai Likuasaen dan Wehali sehingga Wehali dapat sepenuhnya dikuasai oleh Likusaen. Meskipun demikian, kekuasaan Wehali ini pada akhirnya berhasil dipulihkan kembali.

Berdasarkan dokumen yang dihimpun J.S. Kedoh (1928)[211], seorang asisten *bestuur* di Belu, tercatat silsilah dan urutan *maromak oan* sebagai berikut:

210. Lihat *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur*, halaman 37.
211. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 50.

- Maromak Oan I bernama Baria Korat.
- Maromak Oan II bernama Bere Klau.
- Maromak Oan III bernama Seran Barek
- Maromak Oan IV bernama Baria Tahuk.
- Maromak Oan V bernama Bere Raek.
- Maromak Oan VI bernama Baria Nahak.
- Maromak Oan VII bernama Seran Nahak.

Silsilah selengkapnya dapat dilihat di buku *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 51. Kisah lain mengenai *maromak oan* bersumber dari Herman Seran Laran, yang menyatakan bahwa Kerajaan Wesei Wehali senantiasa diperintah oleh *maromak oan* dan suaminya, yang bergelar *Liurai*. Kerajaan Wesei Wehali atau Wewiku Wehali didirikan oleh seorang pria bernama Bria Bauk dan istrinya yang bernama Hoar Diak Maklakan (Hoar Maromak). Bria Bauk kemudian menyandang gelar Liurai, sedangkan istrinya menjadi Maromak Oan I. Ia mempunyai empat orang putra dan seorang putri; Bara Mataus yang diangkat sebagai Liurai Wehali; Sako Mataus yang kelak pindah ke Mollo dan menjadi Raja Sonbai; Ura Mataus yang kelak menjadi Usi Nenomnanu serta Raja Maubes Insana; Neke Mataus yang menjadi Raja Larantuka; dan seorang putri bernama Bui Ikun yang tetap berdiam di Wehali serta menjadi Maromak Oan II. Kemudian memerintahlah Maromak Oan III dan IV. Tetapi Maromak Oan IV tidak mempunyai keturunan. Karenanya, atas kesepakatan bersama diangkatlah seorang putri dari Maubes Insana bernama Bee Pala Finit (Pala Finit Neno) sebagai *maromak oan* berikutnya. Sebelumnya, putri ini konon telah diuji kesaktiannya dengan diperintahkan meniti sehelai benang yang direntangkan dan melewati lubang sempit. Ternyata ia lulus dari semua ujian ini. Namun, liurai menjadi takut menikahinya. Oleh karena itu, dikirimlah seorang putri lain bernama Bee Bona Finit atau Bona Fona.

Ketika terjadi serangan dari Kerajaan Wewiku, Bee Pala Finit tewas terbakar dalam istananya, sedangkan liurai melarikan diri ke Maubes Insana. Dengan wafatnya Bee Pala Finit selaku Maromak Oan V, berakhirlah garis silsilah *maromak oan*. Sebagai penggantinya, Portugis mengangkat Pala Finit Neno sebagai penguasa Wehali dengan gelar Keiser dari Hatimuk. Belakangan, ia mengangkat dirinya sebagai *maromak oan*, tetapi tidak diakui oleh raja-raja lainnya sehingga terpaksa melarikan diri. Bila dicermati, terdapat perbedaan nama-nama urutan *maromak oan* dengan sumber

sebelumnya. Selain itu, sumber ini patut diragukan kebenarannya karena tidak ada nama Neke Mataus dalam silsilah raja-raja Larantuka.

b. Kemunduran Kerajaan Wesei Wehali

Pada 1640, Raja Tallo merangkap perdana menteri Gowa yang bernama Karaeng Patingaloang melancarkan ekspedisi militer ke Flores yang dilanjutkan ke Timor. Serangan yang dibantu oleh Raja Mina ini berhasil mengalahkan kerajaan Wesei Wehali di Belu. Raja Wehali menganut agama Islam dan mewajibkan pula bawahannya memeluk kepercayaan yang sama. Meskipun demikian, dua tahun kemudian (1642), pasukan Gowa dan Wehali mengalami kekalahan terhadap Portugis yang dipimpin oleh Fransisco Fernandes. Dengan pasukan berkekuatan 90 orang dan didukung oleh Raja Batimao dan Sorbian, Portugis berhasil mematahkan pertahanan Gowa beserta Wehali. Akibat kekalahan ini, Raja Wehali berganti menganut agama Katolik. Peristiwa ini juga merupakan akhir kekuasaan pemimpin tertinggi Wesei Wehali yang bergelar *maromak oan*. Ia kehilangan kekuasaan sakralnya dan semenjak saat itu para *raja usif* (bawahan) tidak lagi tunduk pada Wesei Wehali.

Pada 1719, para liurai melakukan pertemuan rahasia dan mengadakan aliansi yang disebut Kamanasa. Mereka bersumpah darah untuk terus melakukan perlawanan hingga Portugis terusir dari Timor. Para tahun 1756, Raja Besar Wesei Wehali yang bernama Hyacinto Correa menandatangani Perjanjian Paravicini dengan VOC selaku saingan Portugis. Meskipun demikian, wilayah-wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan Wesei Wehali secara hukum tetap berada di tangan Portugis hingga ditandatanganinya Perjanjian Lisabon (21 April 1859) yang isinya menyerahkan daerah-daerah itu kepada Belanda. Menurut dokumen Portugis, daerah kekuasaan Wesei Wehali saat itu meliputi 52 kerajaan. Empat puluh enam di antaranya kemudian menjadi bagian Portugis, yakni (1) Sarau, (2) Mattarufa, (3) Faturo, (4) Bibiluto, (5) Vimasse, (6) Viqueque, (7) Laga, (8) Manatutto, (9) Lacluca, (10) Luca, (11) Laclo, (12) Locury, (13) Ayfoam, (14) Samoro, (15) Calacodo, (16) Lacloddot, (17) Alay, (18) Barcola, (19) Titulur, (20) Mouves, (21) Mutael, (22) Liquisa, (23) Manufahi, (24) Sanir, (25) Lityluli, (25) Codaco, (26) Maubara, (27) Laquero, (28) Fatuboro, (29) Boibau, (30) Nassudilly, (31) Girivat, (32) Cutubaba, (33) Balibo, (34) Lamacana, (35) Moguery, (36) Boraramia, (37) Aratssava, (39) Lamiao, (40) Ficlara, (41) Cova, (42) Suaikamanasa, (43) Tulufar, (44) Tamiao, (45) Doculo, dan (46) Laqueo. Wilayah-wilayah di atas masuk kedalam negara Timor Leste.

Aksi perlawanan terhadap Belanda juga melanda Kerajaan Wehali atau Wewiku Wehali di Belu. Kebencian terhadap penjajah tampak dari upaya perlawanan rakyat terhadap rombongan kontrolir yang berkunjung ke Belu Selatan pada 1900. Tetapi rombongan kontrolir tidak meladeni tantangan rakyat ini. Insiden semacam itu terulang saat kontrolir mengunjungi kembali Belu Selatan pada 1903. Karena jumlah pengawalnya yang hanya 30 orang, kontrolir tidak mempedulikan tantangan rakyat tersebut dan pulang kembali ke Atapupu. Pergolakan besar-besaran pecah pada 1906 di bawah pimpinan Nahak Moroe Rai, yang dalam sumber Belanda disebut Raja Rabasa. Belanda terpaksa mengerahkan pasukan besar untuk memadamkannya. Pertempuran sengit terjadi pada 11–12 November 1906 yang menewaskan Nahak Meroe Rai beserta beberapa pembantu setianya. Guna mengamankan daerah itu, Belanda kemudian membangun sebuah militer di Besikama, Belu Selatan.

II. SONBAI

a. Cikal Bakal Kerajaan Sonbai

Kerajaan Sonbai merupakan cikal bakal bagi Kerajaan atau Swapraja Mollo, Sonbai Kecil, Miomaffo, Insana, Biboki, Kupang, Semau, dan Fatuleu yang berkembang belakangan. Kerajan-kerajaan tersebut memang dahulunya merupakan wilayah Sonbai. Menurut salah satu legenda, liurai (raja) pertama Sonbai adalah Nai Laban yang merupakan adik *maromak oan*, Raja Wehali. Ada pula yang menyatakan bahwa ia adalah adik Liurai Wehali[212]. Sumber lain menyebutkan bahwa pendiri Kerajaan Sonbai merupakan salah satu di antara tiga bersaudara, yakni Tei Liu Lai, Kaes Sonbai, dan Tnai Pah Banunaek. Putra sulung, Tei Liu Lai, merupakan pendiri kerajaan Wehali yang terletak di Belu. Putra kedua, Kaes Sonbai, mendirikan Kerajaan Mollo (Sonbai), sedangkan putra yang bungsu merupakan cikal bakal Kerajaan Amanatun.

Ada pula hikayat yang menyebutkan bahwa Nai Laban yang telah diangkat menjadi liurai pergi ke bagian barat Pulau Timor karena kawasan pemukiman mereka di Belu Selatan telah terlampau padat. Oleh karenanya, Nai Laban merasa perlu mencari tempat kediaman baru yang lebih baik. Dengan diiringi para pengikutnya, Nai Laban berjalan menuju ke arah matahari terbenam. Rombongan akhirnya tiba di sebelah timur Gunung Timau. Setelah bersemadi semalam suntuk memohon petunjuk dewata, Nai Laban memerintahkan para pengikutnya berpencar. Sementara itu, Nai

212. Lihat *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur*, halaman 38.

Laban sendiri meneruskan pengembaraannya seorang diri hingga terpisah jauh dari para pengiringnya dan tiba di sebuah hutan. Karena saat itu mengenakan perhiasaan dan pakaian kebesarannya yang bersulamkan emas, Nai Laban takut dirampok sehingga menghitamkan semuanya itu dengan arang, termasuk sekujur tubuhnya.

Selama berhari-hari Nai Laban menyusuri hutan hingga kehabisan makanan dan minuman. Namun, Nai Laban menjumpai tiga orang gadis putri Kune Uf (Nai Kune), seorang raja atau pemuka masyarakat setempat. Mereka bertiga sedang menimba air dan Nai Laban yang kehausan meminta minum kepada mereka. Kendati demikian, mereka menjadi ketakutan karena tak memahami bahasa Nai Laban dan juga melihat tubuhnya yang hitam kena arang itu. Nai Laban terus meminta air, baik dengan perkataan maupun bahasa isyarat. Kedua orang putri yang lebih tua bernama Bi Funu dan Bi Jasa tetap tidak mau memberinya minum karena takut mencemari ember suci penimba air yang terbuat dari emas. Hanya putri bungsu bernama Bi Jili Kune saja yang merasa kasihan dengan Nai Laban. Ia lalu memetik sehelai daun yang dilipatnya menjadi semacam tempat minum, mengisinya dengan air, dan memberikannya pada Nai Laban. Air itu diminumnya dan sisanya dipergunakan untuk membasuh muka serta tubuhnya. Dengan demikian, tampaklah wajah, pakaian kebesaran, dan perhiasan emasnya yang berkilauan.

Nai Laban sangat berterima kasih pada Bi Jili Kune dan berniat melamarnya sebagai istri. Menyaksikan hal itu, kedua kakaknya menjadi menyesal dan menyatakan bahwa menurut adat istiadat kakak harus menikah terlebih dahulu dibandingkan adiknya. Untuk menyelesaikan masalah itu, Nai Laban diajak menghadap ayah mereka, Kune Uf, di istananya. Nai Laban menyetujuinya, tetapi meminta waktu terlebih dahulu memohon petunjuk dewata, mengenai siapakah di antara ketiga gadis itu yang sesungguhnya paling layak dinikahinya. Berdasarkan petunjuk yang diterimanya, Nai Laban menancapkan kelewangnya pada sebatang pohon dan menyatakan bahwa barangsiapa di antara ketiga putri tersebut yang sanggup mencabutnya, dialah yang paling layak menjadi istrinya. Ternyata yang mampu melakukannya hanyalah Bi Jili Kune. Dengan demikian, telah jelas bahwa dewata sendiri telah memilihkan Bi Jili Kune sebagai istri Nai Laban.

Kune Uf sendiri tidak mempunyai anak lelaki dan berikrar bahwa siapapun yang pertama kali menikahi salah seorang putrinya akan diangkat sebagai penggantinya. Ketika Nai Laban tiba di istananya, Kune Uf turun dari singgasananya dan datang

menyambutnya. Ia bahkan sangat setuju apabila Nai Laban menikah dengan Bi Jili Kune. Demikianlah, Nai Laban menjadi pewaris singgasana Kune Uf. Setelah itu, ia mengirimkan berita pada kakaknya yang menjadi Raja Wehali bahwa tempat kediaman baru telah didapatinya. Dengan senang hati, kakaknya mengirimkan sebagian penduduk mereka untuk bermukim di sana. Sebenarnya, masih banyak lagi mitos-mitos mengenai Sonbai; namun secara garis besar terdapat persamaan di antaranya, antara lain: (1) leluhur Sonbai berasal dari Belu Selatan (Wehali); (2) ia merupakan adik Liurai (raja) Wehali; (3) dalam pengembaraannya ia berjumpa dan menikahi putri bungsu Kune. Menariknya, Schulte Nordholt mengaitkan pula kata Sonbai dengan istilah *sombaya* (yang disembah), yang umum di Gowa–Tallo[213]. Dengan demikian, jika argumen ini benar, ada keterkaitan antara Timor dan Gowa. Menurut catatan sejarah, pada 1640, Karaeng Patingaloang, Raja Tallo yang merangkat sebagai perdana menteri Gowa, pernah mengadakan ekspedisi ke Timor. Pada kesempatan tersebut ia sempat menjalin persahabatan dengan Raja Wehali dan menghadiahkan sebuah kopiah.

b. Perkembangan Kerajaan Sonbai dan Perlawanannya Terhadap Kolonialisme

Nai Laban selaku leluhur Kerajaan Sonbai digantikan oleh Nai Nati. Pada masa tersebut datang pula tokoh-tokoh bernama Oematan dan Kono dari Belu Selatan. Setelah itu, ia digantikan kembali oleh Nai Faluk dan kemudian Nai Lele (Lele Sonbai, 1570–1630). Raja bernama Nai Lele inilah yang mengajarkan tata cara bercocok tanam padi. Dia dikenal sebagai raja yang memiliki pengetahuan luas, berjiwa kepahlawanan, serta gagah berani. Namanya tidak berani disebutkan secara sembarangan oleh rakyat[214]. Raja kelima adalah Tuklua Sonbai (1630–1680). Ia konon adalah tokoh pertama yang menggunakan nama Sonbai. Sumber Belanda sendiri yang pertama menyebutkan nama Sonbai berasal dari 1649. Tuklua Sonbai menurut penuturan cerita rakyat pernah mendirikan istana di Fatun Leolfui dan dikenal sebagai tokoh sakti yang sanggup mengubah dirinya menjadi sebatang ranting pohon sehingga sangat dihormati serta ditakuti rakyat.

Tuklua Sonbai merupakan pemimpin yang menetapkan kawasan perlindungan satwa, walau tujuan sebenarnya demi kepentingan raja. Meskipun demikian, di balik aturan tersebut, tampak bahwa Tuklua Sonbai telah memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup. Pada masa Tuklua Sonbai, Kerajaan Sonbai berpusat di

213. Lihat *Sejarah Bumi Cendana*, halaman 74.
214. Lihat *Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan*, halaman 56.

Bisunimasi[215], tetapi putra dan penggantinya yang bernama Manas Sonbai (1680–1704) memindahkan pusat pemerintahan ke Peke. Tatanan pemerintahan Kerajaan Sonbai makin disempurnakan olehnya.

Raja Sonbai berikutnya, Talus Sonbai (1704–1726), memindahkan kembali pusat pemerintahan ke Bijela. Ia membangun pagar batu di sekeliling istananya agar tak mudah diserang oleh Portugis. Talus Sonbai terkenal sebagai raja yang kejam. Saat penyerahan upeti berupa hasil panen, rakyat wajib menyerahkan pula korban berupa manusia sebagai peringatan atas dibunuhnya saudara perempuan Lele Sonbai bernama Bi Sobe Sonbai. Selain itu, mereka masih dibebani keharusan menyerahkan gadis-gadis guna dijadikan pelayan di istana. Kekejaman ini mendorong para bangsawan dan pemuka masyarakat yang dahulu memihak Sonbai mulai melepaskan dirinya, seperti Insana beserta Biboki. Yang masih setia pada Sonbai tinggal Kono-Oematan serta Taiboko Ebnoni.

Kendati demikian, lambat laun setelah lima tahun menyaksikan kekejaman Talus Sonbai, kesetiaan Kono-Oematan mulai hilang. Mereka merencanakan menyingkirkan raja lalim tersebut. Di tahun berikutnya, tiba giliran Kono-Oematan menyerahkan upetinya dengan seorang bernama Nai Nenosaban yang hendak dijadikan korban. Tatkala memasuki gerbang istana, Talus Sonbai telah siap menombak calon korbannya. Tetapi Nai Nenosaban sanggup mengelak tikaman tombak Talus Sonbai dan balik menombak penyerangnya itu. Tewaslah Talus Sonbai di atas singgasananya sehingga berakhir sudah kekejaman di Kerajaan Sonbai. Kono-Oematan lantas berupaya mengenyahkan sisa-sisa keluarga Sonbai. Oleh karenanya, tiga orang istri Talus Sonbai melarikan putra mahkota bernama Baob Sonbai yang masih balita ke Gunung Laob agar diasuh oleh Bahan Manbait. Setelah tiga tahun dilanda musim kering, Kono-Oematan akhirnya mengakui Baob Sonbai (1749–1752) yang telah dewasa sebagai raja baru Sonbai.

Sebelumnya, Portugis di bawah pimpinan Kapten Mayor Ambrosio Dias mengalahkan Sonbai pada 1641 dan semenjak saat itu, Raja Sonbai dibaptis ke dalam agama Katolik. Kendati demikian, pecah pula permasalahan yang berkepanjangan dengan orang-orang Portugis yang ingin menanamkan kekuasaannya di bumi Timor. Akibatnya, Raja Sonbai terpaksa beberapa kali memindahkan pusat kekuasaannya

215. Lihat *Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan*, halaman 62.

ke Peke, Bejela, dan setelah itu Bijeli[216]. Setelah Portugis, datanglah bangsa Belanda yang juga ingin menguasai perdagangan di Pulau Timor. Akibatnya, Belanda harus berhadapan dengan Raja Baob Sonbai yang melancarkan perlawanannya dari Bijeli. Meskipun demikian, perlawanan ini dapat dipatahkan, dan Raja Boab Sonbai diasingkan ke Kupang dan setelah itu dipindahkan ke Batavia, hingga wafat pada 1783. Meskipun demikian, pada 1756 yang tercatat menandatangani perjanjian dengan Belanda adalah Daniel Taffin[217].

Sesudah Baob Sonbai diasingkan oleh Belanda, putranya yang bernama Sobe Sonbai I (1752–1760) lebih memilih berkompromi dengan Belanda. Agar tidak melakukan perlawanan, Belanda memberikannya perlengkapan militer berupa topi, tongkat berkepala singa, dan pedang. Oleh karenanya, perlawanan terhadap Belanda terhenti sementara. Menghadapi situasi seperti ini, para raja di Timor di bawah pimpinan Raja da Costa melancarkan perlawanan terhadap Belanda yang dikenal sebagai Perang Penfui (1749–1752). Kendati demikian, perlawanan ini berhasil dipatahkan oleh Belanda. Raja berikutnya adalah putra Sobe Sonbai bernama Tafin Sonbai (1760–1768). Ketika itu, daerah kekuasaan Kerajaan Sonbai mulai terpecah belah karena politik *devide et impera* penjajah. Tafin Sonbai digantikan oleh Kau Sonbai (1768–1819). Atas permintaan Kono dan Oematan, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kauniki yang lebih strategis.

Dalam rangka meluaskan pengaruhnya ke pedalaman Timor, Belanda kembali bermusuhan dengan Sonbai, yang kali ini dipimpin oleh Raja Sobe Sonbai II (1819–1867), pengganti Kau Sonbai. Salah satu strategi yang diterapkan Belanda dalam melemahkan kedudukan Sonbai adalah menghasut Kono dan Oematan–dua fetor atau pembantu utama Sonbai–agar bangkit melawan tuannya. Dengan bantuan Belanda, mereka melancarkan serangan terhadap kedudukan Sonbai di Kauniki. Selain itu, Belanda juga mengadakan blokade dari arah laut dan berhasil menduduki daerah pantai. Wilayah yang telah diduduki ini lalu disebut daerah *zes palen gebied*. Raja-raja yang semula takluk pada Sonbai dihasut oleh Belanda agar melepaskan diri. Sebagai contoh adalah Amfoan, yang menyatakan diri lepas dari Sonbai dan setelah itu segera diakui Belanda sebagai kerajaan merdeka. Sementara itu, dua wilayah lain,

216. Lihat *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur*, halaman 51.
217. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 52.

yakni Pitai dan Takaip[218] juga menyatakan diri merdeka, hanya saja Belanda beserta Sonbai sama-sama tidak bersedia mengakuinya[219].

Karena tak kunjung berhasil menundukkan Sonbai, Belanda yang diwakili oleh residen J.A. Hazaart berniat mengadakan pertemuan dengan Raja Sobe Sonbai II pada 30-31 Agustus 1828. Menurut catatan, misi Hazaart ini disertai oleh 2.000 prajurit dan rakyat jelata. Meskipun demikian, Raja Sobe Sonbai menolak menemuinya sehingga misi ini boleh dikatakan gagal total. Upaya Belanda menghasut raja-raja Timor lain agar melawan Sonbai tidak selamanya berhasil. Bahkan raja-raja yang telah memahami niat Belanda sesungguhnya mulai bangkit melawan penjajah. Raja Sonbai, Amanuban, Amfoan, dan Manbait menerbitkan perlawanan pada 1836 demi mengembalikan kekuasaan Sonbai atas Kupang. Kendati upaya ini gagal, pada 1847 Raja Amanuban dan Manbait melancarkan serangannya atas kedudukan Belanda di Kupang. Pasukan Manbait membakar desa Babau di sekitar Kupang, selaku desa penyangga bagi kedudukan Belanda di kawasan tersebut. Demi memadamkan perlawanan ini, Belanda terpaksa menerjunkan pasukan berkekuatan 2.000–3.000 orang di bawah pimpinan Kapten de Rooy. Namun, Belanda dapat dipukul mundur oleh Manbait dan pada 30 November 1847, satu desa lagi di Nunkurus berhasil mereka bumi hanguskan.

Guna menutupi kegagalannya, Belanda yang diwakili Residen Baron van Lynden mengajak Raja Sonbai berunding pada 1849. Namun, ajakan ini ditampik oleh raja. Akibatnya, Belanda mengirimkan kembali pasukan berkekuatan 3.000–4.000 orang yang dilengkapi 2 pucuk meriam. Kali ini Belanda berhasil menangkap 80 orang laskar Sonbai. Kendati demikian, Belanda tetap gagal menaklukkan Sonbai dan terus berkecamuk hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Baru pada 1905, Belanda berhasil mengalahkan dan menawan Raja Sobe Sonbai III (1885–1905) dengan siasat licik. Raja Sobe Sonbai III kemudian diasingkan ke Kupang dan setelah itu dibuang ke Sumba. Belakangan, dia dipindahkan lagi ke Kupang dan wafat di sana pada 1922. Agar makamnya tidak dikeramatkan orang, dia dimakamkan di sekitar benteng Concordia.

c. Sistem Pemerintahan Kerajaan Sonbai

Sebelum masuknya pengaruh Barat, ruang lingkup kekuasaan Sonbai mencakup Insana, Fatuleu, Biboki, Kupang, Semau, dan Miomaffo. Bahkan barangkali daerah

---

218. Takaip yang dahulunya merupakan salah satu ke-fetor-an dalam Kerajaan Sonbai merupakan cikal bakal bagi Swapraja Fatuleu yang berkembang kemudian.
219. Lihat *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia d Nusa Tenggara Timur*, halaman 51.

pengaruhnya mencakup pula Pulau Rote dan Sawu. Kendati demikian, berbagai kawasan tersebut diperlakukan sebagai negeri-negeri yang mandiri; dimana kawasan Insana disebut *nakaf* dan Biboki dinamakan *klune*. Para pembantu Liurai Sonbai disebut *am uf* dalam bahasa Dawan yang membawahi para amaf. Sementara itu, Kerajaan-kerajaan Amanatun, Amauban, Amarasi, Amfoan, dan Ambenu adalah daerah pengungsian suku-suku, baik yang berasal dari Wehali maupun Sonbai[220]. Mulanya mereka tunduk di bawah Kerajaan Sonbai, namun kelak menjadi kerajaan-kerajan yang berdiri sendiri.

d. Pulau Timor Menurut Berita China

Berita China merupakan salah satu sumber sejarah awal kerajaan-kerajaan di Pulau Timor. Menurut catatan *Xingcha Shenglan* pada 1436 dari Dinasti Ming[221], Timor disebut dengan istilah *jílǐdìmèn* (吉里地悶). Istilah *dìmèn* sendiri masih dipergunakan untuk menyebut Timor hingga saat ini. Menurut catatan tersebut, Timor dikatakan berada di sebelah timur Tiong-ka-lo (Madura) dan merupakan penghasil cendana utama. Tanah pertaniannya subur dan makmur dengan cuaca yang hangat saat siang hari tetapi dingin pada malamnya. Namun, ketika tidur mereka tidak menggunakan selimut. Kaum pria dan wanitanya memotong pendek rambut mereka serta mengenakan rok pendek. Di Timor terdapat 12 pelabuhan atau pemukiman kaum pedagang yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua. Ketika kapal dagang merapat, kaum wanita akan naik ke kapal untuk berdagang. Disebabkan kondisi yang kurang sehat, banyak kaum pria yang menderita sakit. Negeri Timor ini mengimpor emas, perak, dan perlengkapan makan yang terbuat dari besi atau tembikar.

Berita *Dongxi Yangkao* pada 1618, buku keempat, juga memberitakan mengenai Timor[222]. Menurut berita tersebut, pegunungan di Timor banyak ditumbuhi oleh cendana dan kayunya sering ditebang untuk dijadikan kayu bakar. Kendati demikian, bau asapnya sangat tajam sehingga membuat orang menjadi sakit.

Menurut adat Timor, berdiri di hadapan orang lain merupakan suatu kehormatan. Oleh karenanya, saat menghadap raja rakyat akan duduk di tanah sambil menyilangkan tangannya. Penduduk Timor pada masa itu belum mengenal baca tulis. Apabila ingin mencatat suatu peristiwa, rakyat menggunakan batu-batu pipih. Selanjutnya, seribu batu pipih setara dengan seutas tali. Barangkali metode ini mirip dengan

220. Lihat *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur*, halaman 38.
221. Liha*t Nusantara dalam Catatan Tionghua*, halaman 163–164.
222. lihat *Nusantara dalam Catatan Tionghua*, halaman 164.

yang dilakukan bangsa Indian di Amerika. Uniknya disebutkan pula bahwa metode Tionghoa lama yang menggunakan simpul tali serta gulungan anak panah pernah dilestarikan di tempat ini. Untuk menyelesaikan pertikaian, kedua pihak yang berselisih akan membawa seekor kambing. Kemudian seorang pemimpin masyarakat akan memutuskan siapa yang bersalah. Bagi mereka yang diputuskan bersalah akan kehilangan kambingnya. Pasar di kawasan ini terletak cukup jauh dari kota. Apabila kapal dagang berlabuh di Timor, raja akan hadir pula dengan ditemani oleh permaisuri beserta anak-anaknya, selir, dan para pengikutnya. Rombongan raja ini dapat dikatakan cukup besar. Pajak harus dibayarkan tiap hari, namun jumlahnya tidak begitu besar. Biasanya penduduk Timor akan membawa cendana guna dipertukarkan dengan barang bawaan kaum pedagang. Kendati demikian, penduduk tidak akan datang sebelum kehadiran raja guna menghindari pertikaian. Karenanya, raja biasanya dimohon hadir terlebih dahulu.

K. KERAJAAN-KERAJAAN YANG BERKEMBANG KEMUDIAN DI PULAU TIMOR

I. AMABI dan AMABI OEFETO

Warga Amabi dahulu berasal dari distrik Ermera yang kini terletak di wilayah Timor Leste. Raja Amabi pertama adalah Fini Amabi yang digantikan oleh Banao dan Aiputu (Funan Aiputu). Semasa pemerintahan Raja Aiputu, orang-orang Portugis kerap bertindak amoral terhadap selir-selir raja. Raja Aiputu mengadukan hal itu pada wakil pemerintah Portugis di Lifao dan Dilli, tetapi tak memperoleh tanggapan memuaskan. Bahkan orang-orang Portugis malah mengancam hendak menyerang mereka. Akibatnya, Aiputu terpaksa melarikan diri ke Mollo. Pasukan gabungan Portugis, Sonbai, Ambenu, dan Amfoan mengejar dan mengepung Aiputu di Pegunungan Mollo.

Menghadapi situasi sulit di atas, Aiputu memohon bantuan pada kemenakannya bernama Rais Jam, Raja Amarasi. Sang kemenakan tak keberatan membantu pamannya, hanya saja ia tidak mau merusak hubungan baiknya dengan Portugis. Oleh karenanya, ia secara diam-diam membantu pamannya meloloskan diri. Pada malam hari, ia memerintahkan dua orang *temukung* (kepala desa atau kepala adat)j-nya menyusup dan mendaki lereng berbatu Pegunungan Mollo guna menyelundupkan Aiputu yang kala itu telah berusia 60 tahun. Ketika dua orang temukung itu tengah

menggendong Aiputu di tengah kegelapan malam, tergelincirlah mereka ke dalam jurang. Raja Amabi itu langsung menemui ajalnya.

Putra mahkota Amabi bernama Saroro yang masih kecil dilarikan ke Amarasi dan dipelihara hingga besar guna dipersiapkan merebut kembali singgasananya. Pagi harinya, orang-orang Portugis beserta sekutunya menjumpai jenazah Raja Aiputu dan memenggal kepalanya. Kepala tersebut kemudian dibawa ke Sonbai. Raja Amanuban yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Amabi menawarkan sejumlah besar uang kepada Liurai Sonbai agar diperkenankan membawa pulang kepala Aiputu. Sonbai bersedia menyerahkan kepala itu, tetapi sebagai ganti uang emasnya ia meminta wilayah Kaniti Binafu dari Amanuban. Alih-alih dimakamkan, setibanya di Amanuban kepala itu ditancapkan pada sebatang pohon. Akibatnya, selama dua tahun terjadilah musim kemarau sehingga kepala Raja Aiputu akhirnya dikebumikan.

Sebagai ganti wilayah Kaniti Binafu yang dipergunakan menebus kepala Raja Aiputu, Amanuban menuntut kawasan Muna-Hane dari Amabi. Selain itu, Amarasi meminta balas jasa karena Raja Rais Jam pernah berupaya membantu menyelundupkan Aiputu dan membesarkan putra mahkotanya. Karena itu, wilayah Boko-Boko Markao dan Panmuti beserta Seki Suanu yang kaya cendana dan lilin diserahkan pada Amarasi. Kendati demikian, Seki Suanu dikembalikan pada Amabi. Wilayah itu mulanya milik Kupang (Helong) dan diserahkan sebagai mahar kepada Amabi karena putri Kupang bernama Manu Bessie menikah dengan Raja Amabi. Belakangan, Raja Amabi menikah lagi dengan Bi Sulat, saudara perempuan Raja Sonbai. Bi Sulat kemudian mengikuti Baki Nisnoni pindah ke Kupang. Pernikahan dilangsungkan pula dengan putri Raja Amarasi sehingga pertalian antara Amabi, Amarasi, Kupang, dan Sonbai makin kuat. A.D.M. Parera memberikan catatan mengenai beberapa ketidak-sesuaian riwayat di atas dengan kronologi sejarah[223].

Ketika Portugis menaklukkan Amabi di atas Loemnanu, putra Raja Aiputu yang lainnya beserta sebagian warga Amabi melarikan diri ke suatu kawasan di dekat Kupang. Mereka lalu mendirikan Amabi Oefeto (kini garis silsilahnya telah terputus). Dengan demikian, setelah itu terdapat dua kerajaan, yakni Amabi dan Amabi Oefeto. Saroro kemudian menjadi Raja Amabi. Ia digantikan oleh secara berturut-turut oleh Ama Kefi I (1675–1704), Ama Kefi II (1704–1726), Loti (1726–1732), Nai Balas (1732–1755), danBalthazar Loti (1755–1790). Pada 1756, Raja Balthazar Loti

223. Lihat *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor*, halaman 191–192.

menandatangani kontrak dengan Belanda. Raja-raja berikutnya yang memerintah Amabi adalah Osu Loti (Osu I, 1791–1795), Afu Balthazar (1795–1830), Osu II (1830–1860), Mano (1860–1883), Lelo (1884–1894), Kusa (wakil raja, 1896), Arnoldus (Slolo, 1901), Junus Amtarm (wakil raja, 1901–1903), Kase Kome (Kas Komi, 1903–1912), Jacob Ch. Kome (Jacob Ch. Amabi, 1915–1917)[224].

Sementara itu, Amabi Oefeto diperintah oleh Nowe Leo (Loe) Ammanu (Mananoek) (1896–1917). Wilayah Amabi Oefeto lebih besar dan berfungsi sebagai penahan serangan dari sebelah timur. Pada 1917, Amabi bergabung dengan federasi Kupang dan semenjak itu menjadi salah satu ke-fetor-an dalam federasi tersebut.

Sebagai pelengkap dan penutup pembahasan mengenai Amabi, akan diriwayatkan kisah mengenai kerajaan tersebut yang diperoleh dari sumber Amanuban. Konon, Raja Amabi bernama Emnus Djabu (tampaknya dapat disamakan dengan Raja Aiputu) yang istrinya sedang menderita sakit, ditipu oleh seorang dukun asal Amanuban. Akibatnya, istri raja itu meninggal dunia. Raja Emnus Djabu sangat mendendam dan sebagai pembalasannya, ia mencuri kerbau Amanuban sebanyak 99 ekor. Orang Amanuban berhasil menangkap salah seorang pencuri yang diutus raja. Pencuri yang malang itu dijatuhi hukuman kebiri di tepi sungai dekat kampung Falas hingga meninggal. Amabi minta ganti rugi dari Amanuban terhadap orang yang meninggal itu, namun Amanuban balik menuntut kerugian berupa 101 kerbaunya. Dengan demikian, di antara kedua raja tidak ada kesepakatan dan meletuslah peperangan antara Amabi dan Amanuban.

Rakyat Amabi dihalau oleh orang-orang Amanuban dari tempat kediaman mereka. Raja Emus Djabi terpaksa melarikan diri ke Gunung Mollo yang terletak di perbatasan Mollo–Amabi. Raja Tuklua Sonbai dari Sonbai mulai memancing perselisihan dengan Emus Djabi dengan dalih bahwa salah seekor anjing kesayangannya dicuri atau dibunuh oleh Emus Djabi. Menghadapi ancaman tersebut, putra mahkokta yang bernama Neno Djabi bersama pengikutnya melarikan diri ke Kupang. Tetapi Emus Djabi yang sudah lanjut usia menolak ikut. Ia memanjat puncak Gunung Mollo dan menjatuhkan diri hingga tewas. Ketika Neno Djabi hendak memakamkan jenazah ayahnya, ternyata kepalanya telah dipenggal oleh pasukan Raja Sonbai. Oleh karena itu, Neno Djabi menghadap Raja Sonbai sambil membawa persembahan penebus

224. Sebagian besar nama raja-raja Amabi diambil dari buku *Kupang dalam Kancah Persaingan Hegemoni Kolonial Tahun 1653–1917*, halaman 186, dan juga *Historical Notes Timor Kingdoms* karya Hans Hagerdal

kepala ayahnya. Namun, Raja Sonbai hanya menghendaki sebagian wilayah Amabi. Neno Djabi lalu memberikan apa yang dikehendaki Tuklua Sonbai dan membawa pulang kepala ayahnya.

II. AMANATUN

a. Cikal Bakal Kerajaan Amanatun

Amanatun merupakan negeri suku Atoni di Pulau Timor. Negeri Amanatun kini terletak di Kecamatan Amanatun, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Negeri ini terbagi menjadi empat ke-usif-an atau ke-fetor-an (daerah yang dipimpin wakil raja), yakni NoE Bokong (Anas[225] atau Totanas[226]), NoE Bana (Santean), NoE Bone, dan NoE Nunumuti[227] (Putain). Sebagaimana yang telah dituturkan di bagian tentang cikal bakal raja-raja Timor, leluhur Kerajaan Amanatun adalah Tnah Pah Banunaek, atau saudara bungsu di antara tiga bersaudara raja besar di Pulau Timor. Ia menikahi dua orang istri, yakni Bi Koe Natun (Bi Nia Bana) dari suku Bana dan Bi Puta Nitibani dari suku Nitibani. Bi Koe Natun melahirkan Tsu Pah Banunaek, yang menjadi Raja Amanatun kedua, sedangkan Bi Puta Nitibani melahirkan Fetnai bi Taek Banunaek[228].

Raja kedua dari keturunan Banunaek adalah Tsu Pah Banunaek, yang menikah dengan Kato bi Bnao Natun. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Naimnuke Nopu Banunaek, yang kelak menjadi raja ketiga Amanatun. Raja Tsu Pah Banunaek terkenal pernah memindahkan pusat pemerintahan Amanatun ke Nunkolo. Setelah itu, Raja Naimnuke Nopu Banunaek mewarisi singgasana Amanatun sebagai penguasanya yang ketiga. Ia menikah dengan Kato bi Misa Nitbani dan dikaruniai seorang putra bernama Suti Banunaek, yang kelak menjadi Raja Amanatun berikutnya. Setelah naik tahta sebagai Raja Amanatun keempat, Raja Suti Banunaek juga dikenal sebagai Raja Bnao Nak Suti atau Raja Bnao I. Ia menikah dengan Kato bi Nino Tunlio

225. Menurut http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Amanatun (diunduh tanggal 6 Agustus 2009).
226. Menurut peta yang tercantum di *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor*, halaman 311.
227. Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Amanatun (diunduh tanggal 6 Agustus 2009) disebut Noemanumuti, dan demikian pula dengan buku Raja-raja Amanatun yang Berkuasa, halaman 37 (dieja Noe Manu Muti).
228. Buku *Lintasan Sejarah Bumi Cendana* halaman 106 meriwayatkan versi lain mengenai leluhur raja-raja Amanatun. Sumber lain menyebutkan bahwa leluhur keluarga penguasa Amanatun adalah Banunaek Neno Senan atau Leu Banunaek, yang berasal dari Seram. Tokoh penyerang ini kapalnya pecah dekat batu karang Tun Am. Saat mendarat di sana, ia mengenakan perhiasan emas dan manik-manik. Leu Banunaek dikatakan menikah dengan putri Nitbani bernama Enau Tae. Masih ada versi lain yang menyebutkan bahwa Kerajaan Amanatun didirikan oleh pendatang dari Belu Selatan bernama Sana Taek. Ia masih memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Wesei Wehali di Belu Selatan.

dan dikaruniai tiga orang putra, yakni Usif Nifu Banunaek, Usif Muke Banunaek, dan Usif Kili Banunaek.

Usif Nifu Banunaek menggantikan ayahnya sebagai Raja Amanatun kelima. Ia mempunyai dua orang putra, yakni Naimnuke Tua Banunaek dan Naimnuke Osi Banunaek. Semasa pemerintahannya, ia telah mengadakan hubungan dagang dengan bangsa China. Hal ini dikarenakan letak pusat pemerintahan Amanatun yang strategis, yakni dekat pelabuhan Sulaen, tempat kapal-kapal dagang mancanegara biasa berlabuh. Pada waktu itu, terdapat pedagang-pedagang China yang menetap di Timor dan menikah dengan putri bangsawan Amanatun. Raja memperoleh kuali kuningan dari kaum pedagang Tionghoa tersebut. Waktu itu harganya setengah pikul kayu cendana. Kuali yang dinamakan Boni Onam itu tingginya 80 cm, sedangkan lebarnya 90 cm, serta mempunyai dua pegangan. Boni Onam umumnya digunakan untuk menanak jagung atau nasi, tetapi tak boleh dipakai memasak daging. Selain itu, penggunaannya hanya pada perayaan-perayaan adat besar saja, seperti saat bertemunya empat fetor di *sonaf* (istana) dengan disertai rakyat masing-masing yang jumlahnya sangat banyak. Konon, makanan yang dimasak dengan Boni Onam ini tidak cepat habis, kendati jumlah pengunjung banyak sekali dan terus menerus diambil oleh rakyat Amanatun yang berasal dari keempat ke-fetor-an.

Raja Nifu Banunaek digantikan oleh saudaranya, Raja Killi Banunaek, sebagai Raja Amanatun keenam. Ia menikah dengan permaisurinya yang bernama Kato bi Siuk Liunokas dan dikaruniai seorang putra bernama Naimnuke Bnao Banunaek yang juga bernama Usif Bnao Naktunmollo. Ia selanjutnya menjadi Raja Amanatun berikutnya (raja ketujuh) dan dikenal pula dengan gelarnya Raja Bnao Banunaek II. Permaisurinya bernama Kato bi Bene Hanek, yang kemudian melahirkan dua orang putra, yakni Usif Nono Luan Banunaek dan Usif Nono Luis Banunaek. Karena dilahirkan pada saat siang hari, Usif Nono Luan Banunaek juga disebut Usif Banunaek Neno, dimana kata *neno* sendiri berarti "matahari." Usif Banunaek Neno selanjutnya berkedudukan di Nunkolo dan keturunannya ditetapkan sebagai pewaris Kerajaan Amanatun. Sementara itu, Usif Nono Luis Banunaek dilahirkan pada waktu malam dan dikenal sebagai Usif Banunaek Funan atau Usif Funan. Ia dan kaum keturunannya menetap di Menu. Usif Banunaek Funan tidak mempunyai hak menduduki tahta Kerajaan Amanatun, namun dia bersama-sama dengan para amaf (pemuka adat) mengurusi masalah kemakmuran negerinya.

b. Perkembangan Kerajaan Amanatun

Raja Amanatun berikutnya atau yang kedelapan adalah Nono Luan Banunaek yang juga dikenal sebagai Banunaek Neno. Pada zamannya terjadi berbagai gejolak yang menerpa Amanatun baik di dalam maupun luar keraajan. Meskipun demikian, kerajaan ini tidak mengalami kehancuran berkat kepemimpinannya. Ia menikah dengan Kato bi Tau Haki dan memperoleh tiga orang anak. Anak pertama adalah seorang *naimnuke* (putra) bernama Usif Bnao Banunaek yang juga terkenal dengan nama Raja Bnao Nifusafe. Anak kedua juga seorang putra yang dinamai Usif Sobe Banunaek, sedangkan anak ketiganya adalah seorang *fetnai* (putri) yang bernama Fetnai bi Mao Banunaek.

Raja Bnao Nifusafe naik tahta sebagai Raja Amanatun kesembilan menggantikan ayahnya dan juga dikenal sebagai Raja Bnai Banunaek III. Permaisurinya bernama Kato bi Nino Tunliu, yang melahirkan seorang putra bernama Usif Bnao Muti. Setelah naik tahta sebagai Raja Amanatun kesepuluh, Bnao Muti juga dikenal sebagai Raja Bnao Banunaek IV. Dengan permaisurinya, Kato bi Anin Nenabu, dia mempunyai seorang putra bernama Usif Bab'I Banunaek. Raja Bnao Muti memerintah pada 1766 berdasarkan catatan Belanda karya J Venema berjudul *Algeimeine Memorie Betre Hende de Onderafdeeling Zuid Midden Timor* (1916)[229]. Berdasarkan arsip tersebut, Raja Bnao Muti disebut Raja Don Joan Benao (Bnao) Banunaek, sedangkan ayahnya bernama Raja Don Luis Banunaek. Kerajaan Amanatun pada waktu itu merupakan sekutu Portugis.

Usif Bab'I Banunaek diangkat sebagai Raja Amanatun kesebelas. Ia juga disebut Besimnasi dan diperkirakan memerintah dari 1769 hingga 1808. Permaisurinya, Kato bi Noni Nenabu, melahirkan dua orang putra, yakni Usif Bnao Nunkolo dan Usif Natu Banunaek. Putranya yang pertama, Bnao Nunkolo, kelak menjadi Raja Amanatun berikutnya, sedangkan putranya yang kedua ditetapkan kediamannya di Nenoat. Berdasarkan tradisi saat itu, memang para putra raja diupayakan agar tinggal terpisah, guna mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Usif Natu Banunaek selaku putra kedua kelak menjadi leluhur bagi wakil Raja Amanatun, yakni Usif Kusa Banunaek (1916–1919), yang memerintah saat Raja Muti Banunaek II diasingkan oleh Belanda ke Ende, Flores. Pada 1782, Raja Tubani dari Amanuban melancarkan serangan ke Amanatun. Serangan itu dipicu oleh sikap Raja Tubani yang anti-VOC, sedangkan

229. Lihat *Raja-raja Amanatun yang Berkuasa*, halaman 21.

Kerajaan Amanatun merupakan sekutu perserikatan dagang Belanda tersebut. Serangan ini mengakibatkan Kerajaan Amanatun kehilangan banyak wilayahnya. Meskipun peperangan ini dapat diselesaikan, tetapi semenjak saat itu kerap timbul pertikaian dan perselisihan berkepanjangan antara kedua kerajaan, terutama di daerah perbatasan. Amanuban saat itu telah memiliki persenjataan yang baik karena hubungannya dengan bangsa Portugis. Mereka banyak membantu Amanuban memperluas wilayahnya.

Usif Bnao Nunkolo diangkat sebagai Raja Amanatun berikutnya (raja keduabelas) dengan gelar Bnao Banunaek V. Ia menikah dengan Kato bi Esa Natun dan dikaruniai 5 orang *naimnuke*, yakni Usif Muti Banunaek, Usif Laka Banunaek, Usif Tsu Banunaek, Usif Fai Banunaek, beserta Usif Tae Banunaek, dan seorang *fetnai* bernama bi Kolo Banunaek. Raja Bnao Nunkolo kemudian digantikan oleh putra sulungnya, Muti Banunaek sebagai Raja Amanatun ketigabelas yang juga dikenal sebagai Muti Banunaek I (Raja Kusat Muti). Menurut catatan karya Venema berjudul *Algemeine Memorie betrehende de Onderafdeeling Zuid Midden Timor* (1916) KIT 1276 ARA, raja ini diperkirakan memerintah sekitar tahun 1832[230]. Permaisurinya bernama Kato bi Kolo Tobe Misa yang melahirkan seorang putra dan dua orang putri. Putra bernama Usif Loit Banunaek, sedangkan putri bernama Fetnai bi Babi Banunaek dan *Fetnai* bi Tae Banunaek.

Selanjutnya, Usif Loit Banunek menggantikan ayahnya sebagai Raja Amanatun keempatbelas dan memerintah pada 1899. Istrinya yang pertama, Kato bi Kae Liu, tidak dikaruniai seorang anakpun. Sementara itu, istri keduanya, Kato Bi Neno Tobe Misa, yang kemudian menjadi permaisurinya, melahirkan dua orang putra, yakni Usif Muti Banunaek dan Usif Follo Banunaek (kelak tinggal di Taenoa), serta seorang putri bernama Fetnai bi Tuka Banunek. Raja Loit Banunaek menikah lagi dengan istri ketiganya yang bernama Kato bi Nasi Tobe yang melahirkan seorang putra bernama Usif Kusa Banunaek, sedangkan istri keempatnya, Kato bi Muti Kase melahirkan dua orang putri, yakni Fetnai bi Babi Banunaek, Fetnai bi Muti Banunaek, serta seorang putra bernama Usif Toko Banunaek. Semasa pemerintahannya, Belanda tetap mengakui hak-hak para raja di Timor dalam menjalankan pemerintahannya. Sebaliknya, masing-masing kerajaan juga mengakui Belanda sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang diwujudkan dalam pembagian bendera Belanda pada para

230. Lihat *Raja-raja Amanatun yang Berkuasa*, halaman 29.

raja, termasuk Raja Loit Banunaek. Dengan demikian, hubungan antara keduanya dapat dianggap sebagai dua kekuasaan yang berdaulat.

Usif Muti Banunaek mewarisi singgasana Amanatun sebagai raja yang kelima belas. Dia juga dikenal sebagai Raja Muti Banunaek II dan memerintah dari 1900 hingga 1915. Pada 1910, Swapraja atau Kerajaan Anas dibubarkan dan wilayahnya disatukan dengan Amanatun, sebagai salah satu ke-fetor-an dalam kerajaan tersebut, yang juga disebut NoE Bokong. Dengan demikian, dalam lingkungan Kerajaan Amanatun bertambah lagi satu ke-fetor-an. Semenjak tahun 1912, Amanatun dan Amanuban sama-sama membangun kantor pemerintahan di Niki-niki, Amanuban, karena sarana jalan ke Nunkolo, ibukota Kerajaan Amanatun belum ada sehingga menyulitkan Belanda dalam menjalin hubungan dengan kepala swapraja. Raja Amanatun ini menikah dengan Kato Bi Sopo Lasa dan memperoleh tiga orang putra yang bernama Usif Kolo Banunaek, Usif Tnais Banunaek, dan Usif Bose Banunaek. Raja Muti Banunaek belakangan diasingkan oleh Belanda ke Ende, Flores karena tidak mau tunduk para pemerintah kolonial Belanda. Hingga wafat pada 1918, dia tetap tinggal di Ende. Meskipun demikian, barang-barangnya baru diserahterimakan kepada putra-putranya, Usif Kolo Banunaek dan Usif Tnais Banunaek, di Niki-niki, Amanuban, pada 1920. Semasa raja diasingkan ke Flores, Belanda mengangkat Usif Kusa Banunaek sebagai wakil raja yang berkuasa dari 1916–1919. Wakil raja ini pernah diundang ke suatu acara penting di Niki-Niki oleh *gezaghebber* kawasan *Zuid Midden Timor* (Timor Tengah Selatan) bernama W.G. Menema. Pada zaman Raja Muti Banunaek, yang memerintah sebagai fetor di keempat ke-fetor-an kerajaan Amanatun adalah[231]:

Nama ke-fetor-an	Fetor
NoE Bana	Usif Seki Nokas
NoE Bone	Usif Ae Kobi Niti Bani
NoE Bokong	Usif Kolo Nenometan
NoE Manu Muti	Usif Seo Fai

Sedangkan daftar para temukung (amaf) adalah sebagai berikut[232]:

231. Sumber: *Raja-raja Amanatun yang Berkuasa*, halaman 38.
232. Sumber: *Raja-raja Amanatun yang Berkuasa*, halaman 38.

Nama ke-temukung-an (ke-amaf-an)	Temukung (amaf)
Toi	Naka Beti None
Nenotes	Benau Lese
Santian	Usif Seki Nokas
Manufui	Seki Benu
Menu	Usif Esa Banunaek
Sunu	Hitu Baun Sele
Sabun	Kolo Beti
Mano	Koa Finimeta
Oi Lette	Noni Neno Mataus
Hoi Neno	Lau Toh
Kua Leu	Si Nenabu
Nenoat	Sebo Nenabu
Lette	Laha Olu
Kokoi	Nau Missa
Fai	Hini Na Atonis
Fenun	Seo Missa Aat
Toin	Usif Kolo Neno Metan
Putain	Usif Seo Fai

Data lain mengenai Kerajaan Amanatun diperoleh dari arsip KITLV bertajuk *Nota van Toelichting Betreffende de Zelfbesturende Landschappen en Rijken van Midden Timor* yang ditulis oleh B.H. Franssen Herderschee (1909). Catatan ini menyebutkan bahwa luas Kerajaan Amanatun masa itu adalah 917 km^2 dengan populasi penduduk 4.909 pria, 3.482 wanita, 3.633 anak laki-laki, dan 3.374 anak perempuan. Nunkolo selaku ibu kota kerajaan Amanatun merupakan daerah pribadi Raja Muti Banunaek, raja berhak memungut seluruh hasil ladang di kawasan tersebut.

Rakyat Timor diharuskan bekerja rodi membangun jalan dari Noelmina ke Camplong pada 1914. Pekerjaan ini sangat berat dan mengakibatkan banyak pekerjanya meninggal serta dikuburkan di sepanjang jalan tersebut. Ternyata pada 1915, rakyat Amanatun, Amanuban, dan Mollo diwajibkan melakukan kerja rodi lagi. Bersamaan dengan itu, Belanda merancang siasat dalam rangka mengasingkan Raja Muti Banunaek II. Pemerintah kolonial menipu raja dengan mengundangnya ke Niki-niki guna menerima kembali kekuasaan dari tangan Belanda. Setibanya di

sana, raja dipanggil lagi ke Kapan, ibu kota Kerajaan Mollo dan seterusnya ke Kupang. Saat hendak meneruskan perjalanannya dan tiba di Takain, rakyat berkumpul dan mengikrarkan tekad mereka mengenyahkan Belanda dari bumi Timor di hadapan Raja Muti Banunaek II.

Namun, raja mencegahnya dengan alasan bahwa ia memegang janji pemerintah kolonial yang akan menyerahkan lagi kekuasaan pada dirinya. Dengan demikian, pergolakan rakyat dapat dicegah. Kendati demikian, begitu tiba di Kupang, pemerintah menyatakan bahwa ia harus berangkat ke Batavia. Raja sepakat bertolak ke Batavia, tetapi begitu tiba di Ende, Flores, raja ditinggal di sana. Ketika Raja Muti Banunaek sudah diasingkan, Belanda melakukan perubahan batas Kerajaan Amanatun pada 20 Juni 1917 dengan tujuan memperkecil wilayah negeri tersebut.

Raja Amanatun keenambelas adalah Kolo Banunaek, yang dikenal pula sebagai Raja Abraham Zacharias Banunaek (1920–1945). Dia dilahirkan pada 1867 dan dinobatkan sebagai raja pada 27 April 1920. Bersama dengan Raja Amanuban, Pae Nope, ia menandantatangani kontrak politik berupa *Korte Verklaring* pada 24 Februari 1923 di Niki-niki. Raja menikah dengan Kato bi Teni Misa/ Tobe, yang melahirkan seorang putri bernama Fetnai bi Loit Banunaek. Secara keseluruhan, Raja Kolo Banunaek mempunyai lima orang istri. Pada 1927, Raja Kolo Banunaek menghadiri pertemuan dengan raja-raja lainnya di Kupang dengan wakil pemerintah Belanda, Residen Schulz.

Pada zaman Kolo Banunaek, raja-raja Amanuban, Mollo, beserta Amanatun, berupaya menetapkan ibu kota bagi *Onderafdeeling Zuid Midden Timor*. Terdapat dua pilihan, yakni Niki-niki dan SoE. Raja Amanuban, Pae Nope, menghendaki agar Niki-niki yang dipilih, sedangkan Raja Lay Akun Oematan dari Mollo ingin menjadikan SoE sebagai ibukota *onderafdeeling* tersebut. Dalam kompromi pemilihan itu, Raja Kolo Banunaek bersedia mendukung Raja Lay Akun Oematan dari Mollo dalam memilih SoE, dengan syarat Raja Mollo memberikan kampung Amanatun SoE sebagai *sonaf* (tempat kediaman raja) dan juga menyediakan tempat tinggal bagi para fetor beserta amaf dari Amanatun saat mereka datang ke SoE. Raja Mollo menerima syarat Raja Amanatun sehingga kota SoE yang dipilih sebagai ibukota pada 1920. Upacara adat serah terima kampung Amanatun SoE dari Raja Mollo kepada Raja Amanatun disaksikan pula oleh kontrolir Z.M.T.S.D. Pelt dari Belanda dan Raja Petrus Pae Nope dari Amanuban. Seluruh perlengkapan untuk mengadakan upacara

ini, seperti 22 kaleng beras, 50 kaleng beras jagung, 15 kaleng kacang hijau, 1 ekor kerbau putih, 22 ekor babi, 22 ekor kambing, 100 ekor ayam, dan lain sebagainya, ditanggung oleh Raja Kolo Banunaek.



Sumber: *VCD Situs-Situs Tiga Kerajaan Besar Yang Berkuasa di Kab. Timor Tengah Selatan* Dari Yang Mulia Bapak Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek. S.T., M.T.

Raja Kolo Banunaek memiliki seorang sekretaris bernama Cristian B. Tallo yang kemudian menetap di kampung Amanatun. Semasa penjajahan Jepang, masyarakat Nunkolo tidak diwajibkan menyerahkan anak perempuannya sebagai pemuas nafsu serdadu Jepang; dimana ini merupakan keistimewaan dibandingkan daerah lainnya. Kejadian penting lain pada zaman Raja Kolo Banunaek adalah Peristiwa Kegerakan Roh Kudus I yang berlangsung pada 27 Agustus 1943 hingga Oktober 1943. Saat itu, banyak orang di Nunkolo mengalami curahan Roh Kudus dan bersaksi serta memberitakan Injil. Para tokoh yang mengalami gerakan kerohanian ini antara lain Penatua Nikolas Banunaek dan putrinya, Maria Banunaek; Nyora Manao, putri fetor Santian beserta suaminya, T Tanaim; Lot Hauoni; Set Banunaek; dan Bose Banunaek. Raja Kolo Banunaek sendiri menganut agama Kristen Protestan dan pernah beralih ke Katolik Roma, sebelum akhirnya kembali pada gereja Protestan.

Raja Kolo Banunaek telah berusia lanjut dan karenanya tidak lagi sanggup menunaikan tugas sebagai Raja Amanatun. Oleh sebab itu, dia berniat memanggil pulang Usif Lodewyk Lourens Don Louis Banunaek, yang kala itu masih berusia 19 tahun, yang sedang menuntut ilmu di Bandung. Namun, karena berkecamuknya Perang Pasifik pada 1942, terjadi kendala dalam hal komunikasi. Raja Kolo Banunaek

melalui sekretarisnya, Cristian Tallo, meminta bantuan residen Timor dan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenbogh Stachouwer di Batavia, mengurus kepulangan Raja Muda Lodoweyk Lourens Don Louis Banunaek guna dinobatkan sebagai Raja Amanatun berikutnya. Meskipun demikian, ia baru tiba kembali di Amanatun pada 1946.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, wakil presiden pertama, Moh. Hatta, mengadakan kunjungan ke Timor dan menggelar pertemuan dengan para raja di sana. Kendati kondisi kesehatannya lemah, Raja Kolo Banunaek masih menyempatkan diri menghadiri pertemuan penting ini. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, para raja di Timor bersedia mendukung negara Republik Indonesia yang masih sangat muda itu. Dengan demikian, Raja Kolo Banunaek dapat dianggap sebagai salah satu Bapak Bangsa. Raja Kolo Banunaek mangkat pada 23 Agustus 1969 dalam usia 102 tahun. Jenazahnya dibaringkan dan diasapi dengan cendana selama 6 bulan di *sonaf* (istana) Nunkolo, sebelum dikebumikan pada 7 Januari 1970.

c. Kerajaan Amanatun Pada Era Kemerdekaan

Usif Lodoweyk Lourens Don Louis Banunaek diangkat sebagai Raja Amanatun ketujuhbelas pada 1946, menggantikan Raja Kolo Banunaek yang telah lanjut usia. Dia dilahirkan pada 18 Agustus 1925 di Nunkolo dan pernah menuntut ilmu di Bandung (VVS, MULO, dan AMS). Selain itu, dalam bidang kemiliteran, ia menjadi anggota PETA di Purworejo, Karesidenan Banyumas, pada 1942. Pada 1946, ketika Raja Muda Lodoweyk Loures Don Louis Banunaek baru tiba kembali dari Bandung, ia langsung dinobatkan sebagai Raja Amanatun, sedangkan prosesi penobatannya diselenggarakan pada 1 April 1947. Upacara penobatan tersebut juga dihadiri oleh para pemuka masyarakat, seperti para fetor dan amaf (temukung besar). Susunan pemerintahan semasa dia naik tahta adalah sebagai berikut:

	Ke-fetor-an	Fetor	Ke-temukung-an (Ke-amaf-an)	Temukung Besar (Amaf)
1	NoE Bana	Usif Noe Semuael Nokas (Usif Kefi Nokas)	Toi	Nabu Mone
			Nifuleo	Bose Banunaek
			Sunu	Suli Benu
			Noebana	Sole Liunokas
			Manufui	Seki Benu
			Nenotes	Leu Tloim
			Santian	Abi Bia
			Poli	Leu Afi
			Nano	Seki Finmeta
			Boking	Nasi Banunaek
			Lanu	Sole Tefi
			Sabun	Konis Beti
2	NoE Bone	Usif Noe Seo Kobi Niti Bani	Kokoi	Suti Misa
			Nunleu	Keba Misa
			Putun	Koen Misa
			Kua Leu	Seo Misa
			Hoineno	Simon Toh
			Nunkolo	Luan Banunaek
			Sahan	Ibrahim Kobi
			Nenoat	Agus Nenabu
			Fenun	Loit Misa
			Op	Leu Banunaek
3	NoE Manu Muti	Usif Noe M. E. Fay (Usif Muke Fay)	Ukbui (Fotilo)	Bill Tafuly
			Bimanus	Kilo Timo
			Tumu	Lasarus Benu
			Sono	Tiumlafu
			Sapnala	Tefa Manu
			Lotas	Tefi Fatin
			Tauanas	J. Kabu
			Snok	Fay
			Nasi	Liunome

4	NoE Bokong	Usif Noe Tutu Nenometa	Toianas	Ote Kalau
			Skinu	L.Sae
			Bokong	A Sae
			Sambet	Knauf Mone

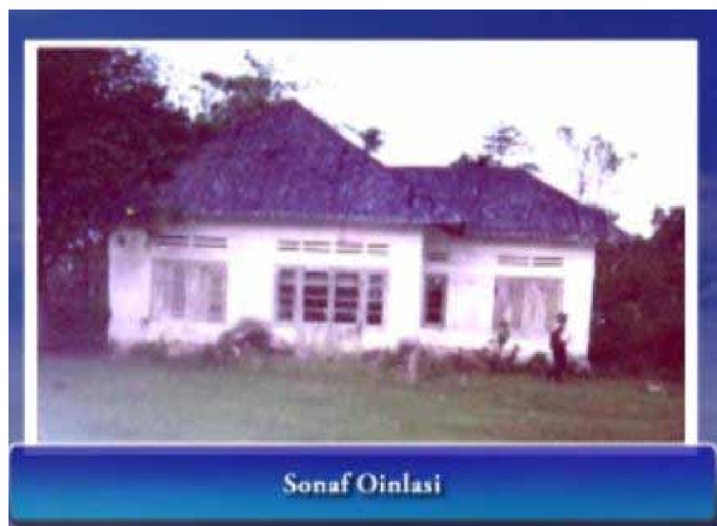
Masih pada masa pemerintahan Raja Lodewijk, terjadi perombakan tatanan pemerintahan, seperti pengangkatan status kampung Oinlasi dan Anin menjadi ke-temukung-an. Sebelumnya, kampung Oinlasi merupakan wilayah *temukung* kecil Oetoli dan temukung besar Kokoi. Sementara itu, kampung Anin merupakan bekas wilayah ke-temukung-an besar Nifuleo.

Semasa era kemerdekaan, Raja Lodoweyk Lourens Don Louis Banunaek menjadi kepala daerah swapraja Amanatun merangkap ketua Dewan Pemerintahan Swapraja dari 1955 hingga 1962. Raja Amanatun ketujuhbelas ini banyak berjasa dalam memajukan daerahnya melalui keberanian, disiplin, rasa percaya diri yang tinggi, dan kesederhanaan yang dimilikinya. Dengan didukung oleh 10.000 rakyatnya dari empat ke-fetor-an, dia berhasil membangun jalan utama menuju ke wilayah Amanatun dari Supul di Amanuban dengan peralatan yang sangat sederhana pada 1 April hingga 5 April 1949. Awalnya, rencana pembangunan jalan sepanjang 27 km itu ditentang oleh Kontrolir van Dongen dengan alasan medannya yang sulit (banyak jurang, gunung, dan batu-batuan besar) serta faktor-faktor lainnya, seperti wilayahnya yang miskin hasil bumi, penduduknya yang bertubuh kecil, dan lain sebagainya. Kontrolir bahkan mengatakan: "...sampai seratus tahun juga tidak ada mobil / oto yang masuk wilayah Amanatun.." Nmaun, dengan keteguhan hati dan keberanian, pembangunan jalan tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu lima hari saja. Pada 15 Oktober 1949, raja mengundang rakyat dan para pemuka masyarakat untuk menghadiri sidang raya saat dia menyerukan agar mereka bersama-sama membangun Amanatun secara bahu membahu. Bidang pendidikan tidak luput dari perhatian raja. Pada 1952–1954, raja membangun lagi lima sekolah karena semenjak zaman kolonial hanya ada empat *volkschool* (sekolah rakyat) di Amanatun. Pembangunan bidang pendidikan ini masih berlanjut pada 1960 dengan pendirian beberapa sekolah Katolik. Untuk meningkatkan kesehatan di wilayahnya, dibangun pula klinik kesehatan di Oinlasi di bawah pimpinan suster Finelda dari Jerman.

Prasarana lain yang dibangun oleh raja adalah kantor swapraja Amanatun di Oinlasi (1953). Pada 1 Januari 1951 ibukota Kerajaan Amanatun yang saat itu

berstatus daerah swapraja dipindahkan ke Oinlasi karena pertimbangan politik, ekonomi, kemudahan akses, dan keamanan. Guna memajukan perdagangan di daerahnya, raja membuka dan meresmikan pelabuhan Boking pada 1963–1964, yang diawali dengan merapatnya kapal Sabunda guna mengangkut seribu ton kayu cendana ke Surabaya. Raja tidak mengabaikan pula pembangunan bidang olah raga, yang terbukti dengan pendirian lapangan olah raga di Oinlasi, yang selanjutnya diberi nama Lapangan Moinfeu.

Kemiskinan daerah Amanatun membangkitkan keprihatinan raja. Oleh karena itu, dia mendatangkan berbagai bibit tanaman dari luar, seperti kopi, jeruk, asam, apel, kemiri, lamtoro, alpukat, kelapa, cengkeh dan lain sebagainya, guna dibudidayakan di Amanatun. Raja mengeluarkan kebijaksanaan wajib tanam bagi rakyatnya, masing-masing orang diwajibkan menanam 50 bibit tumbuhan yang bermanfaat. Kebijaksanaan ini membuahkan hasil pada 1957 saat Amanatun telah menjadi daerah penghasil. Seluruh rakyat dapat menikmati hasilnya, dan karena daerah pedalaman telah menghasilkan, raja membangun jalan masuk ke seluruh daerah Amanatun pada 22 Juli 1957.



Sumber: *VCD Situs-Situs Tiga Kerajaan Besar Yang Berkuasa di Kab. Timor Tengah Selatan* Dari Yang Mulia Bapak Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek. S.T., M.T.



Sonaf Amanatun di Oinlasi

Sumber: Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek. S.T., M.T.

Pada 1957, berdasarkan Undang-Undang no.1 tahun 1957, status daerah-daerah swapraja dihapuskan dan diganti dengan daerah swatantra (otonom) biasa[233]. Oleh karenanya, status Amanatun diubah menjadi kecamatan dengan Raja Lodoweyk Lourens Don Louis Banunaek menjadi camatnya yang pertama dari tahun 1962–1964. Selanjutnya, Kecamatan Amanatun dimekarkan menjadi dua pada 1964, yakni Amanatun Utara dan Amanatun Selatan. Setelah pembentukan Kecamatan Amanatun Selatan tersebut, raja menjadi camatnya dari tahun 1964–1973. Dia dipindahkan ke SoE sebagai pegawai negeri sipil pusat pada 1973 hingga pensiun. Raja Lodoweyk Lourens Don Louis Banunaek merupakan Raja Amanatun terakhir. Dia mangkat pada 26 April 1990 di Sonaf Niki-niki (Sonaf Amanuban) dan dimakamkan pada 1 Mei 1990 di Oinlasi.

Raja Lodoweyk Lourens Don Louis Banunaek menikah dengan Ratu Kato Fransina Afliana Nope (Kato Funan Nope), putri pertama Raja Johan Paulus Nope (Leu Nope) dari Kerajaan Amanuban pada 1964. Pernikahan ini mengakhiri perseteruan panjang antara Amanatun dan Amanuban, yang diawali pada 1782 dengan serangan Raja Tubani dari Amanuban. Pesta pernikahan antara kedua keluarga bangsawan Timor ini berlangsung selama satu bulan di Sonaf Niki-niki. Setelah pesta tersebut, tidak ada lagi perayaan pernikahan adat antara raja-raja Timor yang sebesar itu. Sebagai walinya adalah Raja Kusa Nope dari Amanuban yang saat itu menjabat sebagai bupati karena ayah kandung Ratu Kato Fransina Afliana Nope, Raja Johan Paulus Nope, telah wafat pada 6 Juni 1959.

233. Kerajaan Amanuban (Banam), Amanatun (Onam), dan Mollo (Oenam) disatukan ke dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada 20 Desember 1958 - lihat *Raja-raja Amanatun yang Berkuasa*, halaman 107.



Semua rakyat Amanatun gembira mendengar perintah Rajanya,
Usif Lodoweyk Lourens Don Louis Banunaek untuk membangun pah ma nifu Onam
(Koleksi Usif Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek dari Amanatun)



Raja Lodoweyk Lourens Don Louis Banunaek ketika mengunuriungi
rakyatnya di pedalamanpedalaman Amanatun dan disambut dengan
penuh hormat oleh rakyatnya. (Koleksi Usif Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek).

Sumber: *VCD Situs-Situs Tiga Kerajaan Besar Yang Berkuasa di Kab. Timor Tengah Selatan*
Dari Yang Mulia Bapak Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek. S.T., M.T.



Yang Mulia Bapak Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek. S.T., M.T.
Sumber: Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek. S.T., M.T.

Pernikahan ini membuahkan seorang putra tunggal bernama Usif Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek yang dilahirkan pada 31 Juli 1965. Dia pernah mengikuti pendidikan di Institut Teknologi Malang dan berhasil meraih gelar sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan pada 1995. Selanjutnya, dia mengikuti program pascasarjana di Universitas Gajah Mada serta memperoleh gelar Magister Teknik (M.T.) pada 2003. Kemudian, ia menjabat sebagai Kasubid Industri Pertambangan dan Energi

pada Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur semenjak tahun 2003. Jabatan-jabatan lainnya yang pernah dipangkunya adalah Kasie Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Subdin Tata Ruang Bina Program dan Pengendalian Dinas PJPP Kabupaten Timor Tengah Selatan (2005) dan Kasie Perencanaan Teknik pada Subdin Prasarana Jalan, Dinas Prasarana Jalan Pengembangan Pengairan (PJPP) Kabupaten Timor Tengah Selatan (2007). Hingga ditulisnya buku ini, dia berdomisili di kota SoE.



Raja Bil Nope
Sumber: Yang Mulia Bapak Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek. S.T., M.T.

III. AMANUBAN

a. Cikal bakal Kerajaan Amanuban

Kerajaan Amanuban terletak di Kecamatan Amanuban (terbagi menjadi Tengah, Barat, dan Timur), Kabupaten Timor Tengah Selatan. Amanuban terbagi menjadi tujuh ke-fetor-an (daerah yang dipimpin oleh wakil raja), yakni NoE Benu, NoE Sambet, NoE Liu, NoE Beba, NoE Muke, NoE Siu, dan NoE Meto[234]. Ke-fetor-an NoE Sambet, NoE Muke, NoE Siu, dan NoE Meto baru ditambahkan belakangan saat zaman penjajahan Jepang. Terdapat berbagai mitos mengenai leluhur Raja Amanuban. Salah satu sumber menyatakan bahwa nenek moyang mereka bernama Sopo Bilas atau Olak Mai. Ia konon datang dari Kupang menuju ke Amarasi dan mengabdi pada seorang bangsawan bernama Abineno dari Oekabiti. Saat itu, ada seekor ular koko yang gemar mencuri ternak bangsawan tersebut. Ternyata ular itu mempunyai mustika di kepalanya. Olak Mai berniat melakukan pengintaian untuk menangkap ular itu dan meminta selaras senapan. Pada malam harinya, sang ular muncul dan memasuki kandang ternak, tetapi mustika di kepalanya ditinggal di luar. Olak Mai mencuri mustikanya dan memasukannya ke tempat yang telah disediakan.

234. Menurut *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 105, nama-nama ke-fetor-an itu adalah Noebunu, Noeliu, Noebeba, Noemuke, Noesiu, Noehonbet, dan Noemeto.

Majikannya mengetahui peristiwa tersebut dan ingin pula memiliki mustikanya. Karena itu, Olak Mai melarikan diri melalui pantai selatan Pulau Timor menuju ke penjuru timur. Pada akhirnya, ia tiba di Tun Am yang merupakan wilayah Kerajaan Amanatun dan bersembunyi di sana. Olak Mai ditemukan oleh Nitbani dan Nomleni, yang membawanya kepada Raja Banunaek dari Amanatun. Ia dinikahkan dengan putri Raja Amanatun dan semenjak saat itu wajib mempersembahkan upeti setiap tahunnya kepada Raja Amanatun. Meskipun demikian, upeti yang dibawa Olak Mai ditolak oleh raja karena yang pertama belum masak, sedangkan yang kedua sudah terlalu masak. Akibatnya, Olak Mak diusir dan meninggalkan tempat itu menuju ke Amanuban.

Olak Mai diundang oleh Nuban, penguasa Kerajaan Amanuban. Pada masa itu, kegiatan perniagaan cendana dan lilin selaku komoditas Pulau Timor dengan Portugis sedang marak-maraknya. Karena kurang pandai berdagang dan tidak mengetahui perihal timbangan dan anak timbangan, Nuban kerap ditipu oleh orang-orang Portugis. Barang-barang dagangannya dibarter oleh orang Portugis dengan harga sangat murah. Akhirnya, Nuban terjerumus hutang yang cukup besar kepada Portugis. Sebaliknya, Olak Mai merupakan orang yang pandai berdagang. Ia mengumpulkan sisa-sisa kayu cendana yang terbuang dan menjualnya kepada Portugis. Karenanya, tidak mengherankan bila Olak Mai menjadi kaya raya serta berpengaruh. Nuban meminta bantuan Olak Mai melunasi hutang-hutangnya dengan imbalan menyerahkan kekuasaannya atas Kerajaan Amanuban kepada Olak Mai. Pada mulanya Olak Mai menolak, tetapi setelah diadakan serah terima secara resmi yang dihadiri para amaf berserta Nuban sendiri, ia bersedia menerimanya dan menjadi penguasa baru yang digelari Noen Messe atau Nai Seo.

Olak Mai segera melunasi hutang-hutang Nuban kepada Portugis. Namun, berkuasanya Olak Mai ini mengesalkan hati tiga serangkai penguasa lama, yakni Nubatonis, Tenis, dan Asbanu. Mereka berupaya mendapatkan kembali kekuasaannya. Guna memecahkan permasalahan ini, diadakanlah tiga pertandingan. Pertandingan pertama adalah memilih bagian-bagian pohon pisang untuk ditanam. Barangsiapa yang bagian pilihannya terus hidup dan tumbuh berhak menjadi penguasa Amanuban. Pada kesempatan ini, sebatang pohon pisang dipotong menjadi dua. Nubatonis memilih bagian atasnya, sedangkan Olak Mai memilih bonggolnya. Tentu saja bagian yang dipilih Nubatonis mati ketika ditanam, sedangkan bagian pohon pisang yang dipilih Olak Mai tetap hidup.

Pertandingan kedua adalah memilih potongan tebu. Kali ini, Nubatonis memilih bonggolnya, sedangkan Olak Mai memilih puncaknya. Ternyata bagian tumbuhan tebu yang ditanam Nubatonis mati, sebaliknya bagian yang ditanam Olak Mai tetap tumbuh. Pertandingan ketiga adalah memanggil *uis pah* (dewa tanah). Barangsiapa yang panggilannya dijawab dewa tanah maka dialah pemenangnya. Ketika Nubatonis memanggil dewa tersebut, ia tidak mendapat jawaban sama sekali. Saat tiba giliran Olak Mai, ia mendapatkan jawaban yang diharapkan. Ternyata, sebelum berlangsungnya pertandingan, Olak Mai telah memerintahkan salah seorang pengikutnya bersembunyi di semak-semak dan berpura-pura menjadi dewa tanah.

Berkat kecerdikannya, Olak Mai berhasil memenangkan ketiga pertandingan di atas. Kendati demikian, Nubatonis, Asbanu, serta Tenis belum bersedia menerima kekalahan sehingga mereka ditangkap dan hendak dibakar dalam sebuah ijuk. Tetapi ketiganya berhasil melarikan diri. Nubatonis lari ke Oekolo, Asbanu ke Oesala, dan Tenis ke Nepa. Namun, belakangan dicapai perdamaian antara mereka dan Olak Mai diakui secara resmi sebagai Raja Amanuban dengan penyerahan tanda kekuasaan berupa plakat perak bercap nama keluarga Amanuban.

Ada pula sumber yang menyebutkan bahwa Olak Mai datang dari Pulau Rote sebelum mengabdi pada bangsawan Abineno.[235] Menurut versi cerita ini, yang diambil oleh Olak Mai bukannya mustika di kepala ular koko, melainkan batangan-batangan emas. Ia kemudian melarikan diri dan batangan-batangan emas tersebut yang kemudian menjadi harta pusaka kerajaan. Olak Mai diriwayatkan pernah pula menjadi perantara perdagangan cendana dan lilin dengan Portugis. Karena kepiawaiannya dalam berniaga itulah, ia berhasil menjadi tokoh yang kaya serta berpengaruh sehingga dinikahkan dengan putri Nuban. Olak Mai kemudian merebut kekuasaan dan menjadi Raja Amanuban yang berpusat di Tunbes. Raja yang baru ini berupaya menangkap Nuban dan berniat membakarnya, tetapi yang bersangkutan berhasil melarikan diri ke Oemofa.

Masa kehidupan Olak Mai yang merebut kekuasaan di Amanuban ini oleh Munandjar Widyatmika diperkirakan pada kurang lebih tahun 1710.[236] Bukti ini diperkuat oleh maraknya perdagangan lilin dan cendana dengan Portugis pada kurun waktu tersebut. Tahun tersebut merupakan awal berkuasanya Dinasti Nope di Amanuban. Meskipun demikian, sebelum berkuasanya Olak Mai, Kerajaan Amanuban telah berdiri cukup lama yang dibuktikan dengan:

---

235. Lihat *Cendana & Dinamika Masyarakat Nusa Tenggara Timur*, halaman 58.
236. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 105.

Kerajaan Amanuban (I)



Kiri: Paduka Yang Mulia Usif Louis Nope bersama Paduka Yang Mulia Usif Theodorus L. Taolin (Insana –TTU) pada pelaksanaan SILATNAS II di Bandung, Jawa Barat (Sumber: Istana Raja Amanuban; Paduka Yang Mulia Usif Louis Nope).
Kanan: Paduka Yang Mulia Usif Louis Nope (putra mahkota) sedang melakukan pembakaran lilin perdana/pertama dalam proses agung syukuran Natal keluarga besar Nope tanggal 18 Desember 2009 di Sonaf Noemeto Niki-Niki. Tampak dalam gambar Paduka Yang Mulia Usif Willem Nope, SH (Bupati Timor Tengah Selatan, periode 1998-2003, dan sekaligus putra sulung Paduka Yang Mulia Usif Karel Kela Nope yang adalah fettor Noemeto Muni). Sumber: Istana Raja Amanuban; Paduka Yang Mulia Usif Louis Nope.



Kiri: Paduka Yang Mulia Usif Drs. Nino Matheos Nope (putra mahkota) sedang membakar lilin pada prosesi agung syukuran Natal keluarga besar Nope pada 18 Desember 2009 di Sonaf Noemeto, Niki-niki. (Sumber: Istana Raja Amanuban; Paduka Yang Mulia Usif Louis Nope).
Kanan: Paduka Yang Mulia Usif Louis Nope (putra mahkota) sedang mengikuti pidato pembukaan kegiatan SILATNAS II Raja-Sultan yang disampaikan oleh wakil presiden Republik Indonesia Prof. Boediono. (Sumber: Panitia SILATNAS II, tahun 2011)

Kerajaan Amanuban (II)



Kiri: Foto bersama Paduka Yang Mulia Raja/ Usif P. P. Nope (raja/*kesel* Amanuban XVI) dan Paduka Yang Mulia raja/ Usif Jhon Paul Le'u Nope (raja/ kesel Amanuban XVII) sesaat setelah prosesi agung penobatan raja/ kesel Amanuban XVII di depan Istana Agung/ Son Le'u Sona Naek Niki-Niki (sumber: Arsip Nasional Belanda).
Kanan: Foto Paduka Yang Mulia Permaisuri/ Ena Kato Maria Nino Nope-Selan yakni Permaisuri/ Kato dari Paduka Yang Mulia Raja/ Usif Jhon Paul Le'U Nope (raja/ kesel Amanuban XVII). Sumber: Istana Raja Amanuban, Paduka Yang Mulia Usif Louis Nope.



Kiri: Foto Paduka Yang Mulia Raja/ Usif Jhon Paul Le'u Nope sesaat setelah prosesi agung penobatan Beliau menjadi raja/ *kesel* Amanuban XVII di kota SoE yang naik tahta tahun 1946-1949 (Sumber: Istana Raja Amanuban-dari pendeta Midlekop, Paduka YM. Usif Louis Nope).
Kanan: Foto Paduka Yang Mulia Permaisuri/ Ena Kato Adolphina Petronella Nope-Tjung Banamtuan yang merupakan ibu kandung Paduka Yang Mulia Usif Louis Nope (putra mahkota). Sumber: Istana Raja Amanuban, Paduka YM. Usif Louis Nope.

Kerajaan Amanuban (III)





Kiri: Foto Paduka Yang Mulia Raja/ Usif J. P. L. Nope (raja/ *kesel* Amanuban XVII) dan seluruh raja Karesidenan Timor dengan latar kantor Timor Eiland Federatie yang merupakan pusat pemerintahan Nord Midden Timor (Kabupaten Timor Tengah Utara pada masa sekarang). Sumber: Kantor Arsip Prop. NTT.
Kanan: Foto bersama Paduka Yang Mulia Permaisuri/ Ena Kato Maria Nino Nope-Selan bersama putri sulung/ putri tunggal yakni Paduka Yang Mulia Tuan Putri/ Veotnai Fransina Afliana Banunaek-Nope/ Bidan Nope (Bidan Nope merupakan permaisuri/ kato Paduka Yang Mulia Raja/ Usif Lodoweyk Lourens Don Louis Banunaek-raja/ *usif pah* Kerajaan Amanatun (Sumber: Istana Raja Amanuban, Paduka Yang Mulia Louis Nope.





Kiri: Foto pakaian adat kebesaran putri-putri raja (*veotnai*) Amanuban di dalam istana agung/ Son Le'u Sona Naek Niki-Niki (Sumber: Data Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia).
Kanan: Foto bersama Paduka Yang Mulia Permaisuri (Ena Kato Beatrix da Costa-Nope, Yang Mulia Usif Mikael Taolin, Yang Mulia Veotnai Genoveva Taolin-Nope, Paduka Yang Mulia Usif L. L. Taolin dengan latar kain tenun motif Batak Sumatera Utara, yang merupakan persembahan Yang Terhormat Drs. A. M. Tambunan dan Yang Terhormat Ibu Tambunan dalam kunjungan khusus ke Istana Agung/ Son Le'u Sona Naek Niki-Niki pada bulan Juli 1969 (Sumber: Istana Raja Amanuban, Paduka Yang Mulia Usif Louis Nope).

- VOC pernah mengadakan perjanjian dengan Amanuban pada 1616.
- Berita China, *Dongxi Yangkao* menulis adanya kerajaan bernama Yamaluban atau Amanuban.

Sehubungan dengan leluhur keluarga penguasa Amanuban, masih ada sumber lain yang mengisahkan para pelayar dari Delhi, India, yang mengunjungi Kepulauan Nusantara guna mencari barang-barang komoditas yang dapat diperdagangkan[237], terutama sarang burung. Mereka kemudian menjadi cikal bakal raja-raja Amanuban. Versi cerita rakyat dari Wehali meriwayatkan bahwa pendiri Amanuban adalah Nuban Taek yang berasal dari Belu Selatan.

b. Perkembangan Kerajaan Amanuban

Urutan raja-raja Amanuban terdapat perbedaan dari sumber yang satu ke yang lain. Sebagai contoh, Venema dalam karyanya *Algemeine Memorie* (1916) menyebutkan bahwa raja-raja Amanuban adalah Bil Banu (Nope), Olo Banu, Seo Bil, Taha Mamat, Pinis Bil, Tu Bani, Tu Mespah, Sanu Nope, dan Bil Nope. Sumber lain menyebutkan bahwa penggunaan nama Nope selaku nama dinasti penguasa Amanuban baru berlangsung semenjak pemerintahan raja keempat[238]. Usi Tu Nope, raja kelima Amanuban memindahkan ibukota dari Tunbes ke Niki-Niki. Pemindahan ini terjadi setelah Perang Penfuy dan diperkirakan sekitar 1750, atau kurang lebih setelah Perang Penfuy yang berkecamuk pada 1749. Saat berlangsungnya Perjanjian Paravicini pada 1756, pihak Portugis mencatat bahwa Raja Amanuban saat itu adalah Don Luis. Sementara itu, Hagerdal merekonstruksi urutan raja-raja Amanuban sebagai berikut: Don Michel (Seo Bil Nope?–sebelum 1749–1751), Don Luis (1751–1770), Don Jacobus Albertus (1770–1786/ 1806), Tubani (1786–sebelum 1808), Luis Nope (sebelum 1808 -± 1830), Bil Nope (1883–1910),[239] dan seterusnya.

Raja Amanuban yang terkenal akan perlawanannya terhadap Belanda adalah Bil Nope atau Sufa Leu (1883–1910). Kisahnya diawali pada 1904, ketika Aut Sae dan Toin Taneo membunuh anak seorang pedagang China yang datang ke Babuin guna berniaga cendana dan lilin. Pembunuhan ini memancing reaksi dua orang tokoh masyarakat keturunan China, yakni Lie Bun Sui dan Tjung Sun Fat. Mereka meminta bantuan Belanda di Kupang menyerang Babuin. Peristiwa ini membuka peluang bagi

237. Lihat *Sejarah Raja-raja Timor dan Pulau-pulaunya*, halaman 42.

٢٣٨. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 105.

٢٣٩. Lihat *Historical Notes Timor Kingdoms*, halaman 41.

Belanda meluaskan pengaruhnya di pedalaman Timor. Karena itu, Belanda segera menyatakan kesediaannya membantu, tetapi dengan suatu syarat, yakni Amanuban harus turut menurunkan pasukannya. Apabila Amanuban tidak bersedia dilibatkan, Belanda juga tak akan memberikan bantuannya.

Setelah mendengar jawaban Belanda ini, Lie Bun Sui dan Tjung Sun Fat lantas menghadap Raja Bil Nope. Kebetulan saat itu terjadi permusuhan antara Amanuban dan Babuin. Belanda memang piawai memainkan politik pecah belahnya dengan mengipas bara perseteruan antar kerajaan tersebut demi kepentingannya sendiri. Raja Bil Nope bersedia membantu mereka memerangi Babuin. Oleh karenanya, ia mengutus putranya yang bernama Koko Nope pergi menemui wakil pemerintah Belanda di Kupang guna menyampaikan jawabannya itu. Pada 1905, serangan dilancarkan dan Babuin berhasil ditaklukkan, setelah mendapatkan perlawanan gigih dari Kau Fobia dan Boi Kaunan. Dengan demikian, kedudukan Belanda di Timor Tengah Selatan menjadi makin kokoh.

Kendati pernah membantu Belanda, belakangan Bil Nope terlibat pertikaian yang serius dengan Belanda. Pemicunya adalah pembagian wilayah antara Amanatun dan Amanuban yang diakhiri dengan penjanjian yang disebut *Surat Iqrar*. Meskipun demikian, hal ini menyinggung perasaan Bil Nope karena pembagian atau penetapan batas wilayah itu tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengannya. Tindakan ini dianggapnya sebagai arogansi Belanda. Raja Bil Nope berniat mengusir Belanda dari negerinya. Itulah sebabnya, pada 1910 pecah Perang Niki-Niki, saat itu raja dibantu oleh *meo* (panglima perang) yang bernama Tof Bali, Tuno Tse, Mol Tube, Molo Telnoni, dan Timo Banamtuan.

Karena tidak sudi menyerah kepada Belanda, Bil Nope bertahan di istananya. Dia memilih mati dalam lubang perlindungan yang dibakar Belanda. Sebagai penggantinya, diangkat adiknya yang bernama Noni Nope (1911–1920). Raja baru Amanuban ini dibantu oleh Fetor Boi Isu dan Sanu Nakamnanu. Noni Nope tercatat menandatangani *Korte Verklaring* pada 8 Maret 1912. Selain itu, Noni Nope beserta para fetor-nya, yakni Boi Isu, Noe Bunu, Sanu Nakamnanu, dan Noe Liu, pernah pula menandatangani *Surat Iqrar*. Amanuban selanjutnya diperintah oleh Pae Nope (Petrus Pae Nope, memerintah 1920–1946), yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 27 April 1921.



Sumber: Yang Mulia Bapak Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek. S.T., M.T.

Pae Nope menurut cerita adalah raja yang terkaya di Pulau Timor[240]. Selain *sonaf* (istana) yang besar, dia memiliki pula sebuah *lopo* (tempat penyimpanan padi dan jagung). Tiang-tiang, balok, dan lotengnya dihiasi ukiran-ukiran nan indah. Berdasarkan penuturan rakyat setempat, saat Raja Pae Nope masih hidup, uang emas dan peraknya berpeti-peti. Bahkan jumlah ternaknya yang berupa sapi, kerbau, dan kuda dikatakan lebih banyak dibandingkan rakyatnya. Raja Pae Nope digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Paul Nope (Jhon Paulus Nope atau Leu Nope, memerintah 1946–1949).

Paulus Nope digantikan oleh saudara lain ibunya, Kusa Nope (1950–1965), selaku pejabat Raja Amanuban karena putranya, Luis Nope dan Nino Matheos Nope, masih kanak-kanak. Pada masa itu, kekayaan Kerajaan Amanuban makin berkurang. Kusa Nope pernah mengenyam pendidikan di *Middelbare Bestuurschool*, Makassar, dan setelah dihapuskannya berbagai swapraja, dia diangkat sebagai bupati Timor Tengah Selatan yang membawahi tiga bekas swapraja, yakni Amanuban, Amanatun, dan Mollo.

240. Lihat *Timor Pulau Gunung Fatuleu "Batu Keramat"*, halaman 79.



Dari kiri ke kanan: Yang Mulia Bapak Luis Nope dan Yang Mulia
Bapak Don Yesriel Kusa Banunaek
Sumber: Yang Mulia Bapak Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek. S.T., M.T.



Foto bersama Yang Mulia Raja Luis Nope saat berlangsungnya Silatnas Raja/ Sultan Nusantara di Bandung tanggal 25-26 Juni 2011
(foto koleksi pribadi)



Paduka Yang Mulia Usif Louis Nope bersama Paduka Yang Mulia Liurai Paul Muti Pareira (Liurai Belu) pada pelaksanaan Silatnas II di Bandung-Jawa Barat. Pada penghujung tahun 2011, Paduka Yang Mulia Liurai Paul Muti Pareira menjalani prosesi agung penobatan menjadi Liurai Belu, pengganti liurai sebelumnya yakni Paduka Yang Mulia Liurai L. S. Teiseran, dimana pada kesempatan tersebut berkenan hadir dari Istana/ Sonaf Niki-Niki Paduka Yang Mulia Usif Louis Nope, Yang Mulia Usif Daud B. Nope, dan Yang Mulia Usif S. W. Nope, SH., bersama Yang Mulia Permaisuri.
Sumber: Istana Raja Amanuban-Paduka Y.M. Usif Louis Nope
Catatan: Menurut informasi dari Yang Mulia Bapak Dr. Aleksander Usfinit, namaadalah Liurai Piet (Petrus) Muti Pareira.

IV. AMARASI

Kerajaan Amarasi kini terletak di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, dan memiliki tiga ke-fetor-an, yakni Baun, Oekabiti, dan Buraen. Nenek moyang raja-raja Kerajaan Amarasi datang dari Belu Selatan, yakni dari Kerajaan Wesei Wehali. Leluhur mereka memiliki 7 orang putra dan seorang putri. Ketika ia meninggal, dibagikanlah harta pusaka keluarga yang dimilikinya kepada anak-anaknya. Putrinya memperoleh warisan berupa tempat makanan dari kulit buah kudur yang sangat disayanginya. Tetapi suatu ketika, saudara laki-lakinya bernama Nafi Rasi memberi makan anjing-anjingnya menggunakan tempat makanan warisan tersebut. Akibatnya,

pecahlah tempat makanan dari buah kudur tersebut dan terjadilah pertengkaran antara keduanya. Nafi Rasi bersedia mengganti benda tersebut tetapi ditolaknya karena bagaimanapun juga itu tetap bukan tempat makanan dari buah kudur warisan ayahnya. Setelah dimaki-maki oleh saudara perempuannya, Nafi Rasi lantas meninggalkan Kerajaan Wesei Wehali dengan diikuti beberapa temukung dan panglima perangnya. Mula-mula ia menuju ke Insana dan Biboki, lalu pindah ke Tunrain Bunrain. Di sana, ia menaklukkan penduduk setempat dan mendirikan Kerajaan Amarasi. Belakangan bergabunglah kemenakannya bernama Pangeran Tirman sehingga makin memperkuat negeri baru ini. Sumber lain menyebutkan bahwa leluhur Kerajaan Amarasi adalah seorang putra yang ditemukan oleh Usif Maubesi, seorang pendatang dari Belu Selatan. Konon Usif Maubesi tidak mempunyai putra, tetapi suatu kali ia menemukan seorang anak sedang menangis di bawah pohon *rassi*. Anak itu diangkat sebagai anaknya dan kelak menggantikannya sebagai raja dengan gelar *Nafi Rasi*, sedangkan kerajaannya disebut Amarasi.

Kerajaan Amarasi pernah terlibat permusuhan dengan Kerajaan Helong dan juga Belanda. Permusuhan ini terjadi setelah Belanda tiba di Kupang pada 1613. Untuk menghadapi Belanda, Amarasi menjalin persahabatan dengan Portugis. Menurut legenda Nafi Ras, saat leluhur Kerajaan Amarasi itu singgah di Insana dan Biboki, telah ada pengaruh bangsa Portugis. Dengan demikian, pendirian Amarasi diperkirakan setelah 1514. Kepergian Nafi Rasi dari Wewiku Wehali itu kemungkinan besar bukan karena perselisihan dengan saudara perempuannya, melainkan karena ambisi memperluas pengaruh Wewiku Wehali hingga ke belahan barat Pulau Timor. Menurut cerita, ia pergi bersama para temukung dan panglima perangnya. Kemungkinan lain, pada masa itu terjadi kekacauan di Wewiku Wehali sehingga mendorong beberapa bangsawan dan penjabat tinggi meninggalkan negeri tersebut.

Permusuhan dengan Belanda ini makin memuncak tatkala Amarasi dengan bantuan Portugis Hitam menyerang kedudukan Belanda di Kupang. Pasukan Amarasi membakar desa-desa hingga sejauh 3/4 mil (1,2 km) dari benteng Concordia milik Belanda di Kupang. Pada kesempatan kali ini, Belanda kehilangan 13 prajuritnya. Penduduk Kupang yang selamat dari serangan Amarasi mengungsi ke Pulau Semau. Untuk mengantisipasi kekalahan ini, Belanda berniat memperkuat kembali bentengnya yang berada di Kupang tersebut. Mereka mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Arnold de Vlaming van Oudhoorn ke Kupang pada 1656 dengan tujuan membangun

lagi kekuatan serta membalas dendam terhadap Amarasi. Setelah semuanya dirasa siap, serangan dilancarkan terhadap Amarasi yang dibantu oleh pasukan-pasukan Portugis Hitam di bawah pimpinan Antonio de Ornay dan Matheus da Costa. Kendati demikian, Belanda menelan kekalahan dalam operasi militernya ini. Serangan berikutnya dilancarkan lagi di bawah pimpinan Kapten Keller, tetapi masih juga belum membuahkan hasil sehingga Belanda terpaksa mundur ke Kupang.



Raja Rasi Koroh dari Amarasi
Sumber: *Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie. 4th ed.*

Pada 1749, Raja Amarasi bernama Don Alfonso melakukan perlawanan lagi terhadap Belanda dan bersekutu dengan Amfoan, Amanuban, serta Gaspar da Costa (salah seorang pemimpin Portugis Hitam). Dengan demikian, pecahlah Perang Penfui. VOC dengan dibantu orang-orang Rote, Solor, dan beberapa orang Timor sendiri yang berhasil dipikat membantu Belanda terjun memadamkan pergolakan ini. Pasukan Belanda yang dipimpin Christofel Lipp berhasil mengalahkan Amarasi beserta sekutu-sekutunya. Raja Don Alfonso ditangkap dan dipenjarakan, tetapi dibebaskan lagi setelah berjanji menganut agama Kristen Protestan. Tetapi Raja Amarasi yang terkenal gigih dalam melawan Belanda belum mengakhiri perlawanannya sehingga Belanda pada 1752 terpaksa menyerang dan menundukkan Amarasi kembali. Wilayah Amarasi yang diperoleh dari Raja Kupang Helong lantas dibagi-bagikan kepada raja-

raja kecil. Kemudian, Raja Amarasi terpaksa menandatangani Perjanjian Paravicini dengan Belanda pada 1756.

Para penguasa kerajaan ini mempunyai hubungan kekerabatan dengan penguasa Pulau Sawu yang terletak di barat daya Pulau Timor. Ketika Raja Rasi Koroh (1871–1887/ 1891–1914)[241] tidak mempunyai keturunan sebagai pewaris tahta, ia mengangkat cucunya yang berasal dari Sawu sebagai putra mahkota. Ibu pangeran itu merupakan putri kerajaan Amarasi yang menikah dengan bangsawan Sawu. Belakangan raja mengganti nama keluarga mereka dengan Koroh. Raja Rasi Koroh pernah menandatangani kontrak-kontrak sebagai berikut:

- *Contract Betrefende Mijnrechten* pada 21 Juni 1899.
- *Verklaring Betreffende Belastingheffing* (tentang penaikan pajak) pada 5 Oktober 1901.
- *Korte Verklaring* pada 9 November 1907.

Raja-raja setelah Rasi Koroh adalah Ishak Koroh (1910–1917), Alexander Koroh (1917–1926), dan setelah itu Hendrik Koroh (H.A Koroh, memerintah 1926–1951), yang terkenal sebagai tokoh pemerintahan Timor. Dia merupakan seorang penguasa yang sangat gigih menentang kolonialisme dan giat memperjuangkan kemerdekaan daerahnya. Raja H.A. Koroh pernah mengenyam pendidikan di AMS B, Yogya. Namun, baru setahun menuntut ilmu di sana, dia dipanggil pulang oleh residen Timor dan diangkat menjadi penguasa Amarasi menggantikan kakaknya (Alexander Koroh) yang diberhentikan oleh Belanda. Pada 1 September 1926, ia diangkat sebagai *tijdelijk waarnemend* (pejabat sementara) Raja Amarasi. Karena jiwa nasionalismenya, dia baru dinobatkan secara resmi sebagai Raja Amarasi 14 tahun kemudian, pada 7 November 1940.

Raja Hendrik Koroh (H.A. Koroh) yang berjiwa nasionalisme tinggi memiliki sumbangsih besar terhadap pergerakan kemerdekaan Timor. *Timor Verbond* (Perserikatan Timor) merupakan organisasi pergerakan pertama yang didirikan di Makassar oleh D.S. Pella pada 1922. Kongres keduanya diselenggarakan di Kupang pada 18–22 Juni 1932 dan mendapatkan dukungan penuh Raja H.A. Koroh. Tema yang dibahas dalam kongres adalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Karena

241. Menurut *buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 16, Raja Rasi Koroh memerintah dari 1888–1910. Buku yang sama menyebutkan bahwa raja ini menandatangani kontrak politik dengan Belanda di tahun 1901 (halaman 33).

sikapnya yang radikal ini, *Timor Verbond* mendapatkan tekanan pemerintah kolonial Belanda sehingga kegiatannya praktis mengalami kelumpuhan. Selain itu, timbul pula perpecahan internal di kalangan anggota organisasi sendiri. Oleh karenanya, perjuangan *Timor Verbond* akhirnya diteruskan oleh organisasi baru, yakni Perserikatan Kebangsaan Timor (PKT), yang berdiri pada 1937.

Karena memiliki pandangan dan wawasan kebangsaan yang luas, Raja H.A. Koroh diusulkan sebagai calon anggota *volksraad*. Meskipun demikian, pemerintah kolonial menganggapnya sebagai penentang mereka yang berkepala batu. Raja Amarasi ini merupakan pemuka masyarakat yang berpandangan jauh ke depan sehingga sanggup mengubah Amarasi yang dahulunya miskin menjadi makmur. Pada 1932, dia dengan berani menghapuskan dan merombak adat istiadat kuno yang tak sesuai lagi dengan zamannya serta menghalang-halangi kemajuan rakyat. Peraturan mengenai mas kawin yang memberatkan rakyat dirombaknya pula. Kerajaan Amarasi melakukan reformasi pemilikan tanah pada 1939; tanah-tanah milik kaum bangsawan dijadikan milik pemerintah dan dibagi-bagikan pada petani dengan hak pakai setiap tahunnya, seluas kemampuan dan tenaga masing-masing. Pembangunan fasilitas transportasi meski dihalang-halangi oleh pemerintah kolonial, Raja H.A. Koroh membuka jalan raya dari Oesao ke Buraen dan Baun ke Buraen pada 1932–1933, raja sendiri saat itu menjadi perencananya. Bidang pendidikan tidak ketinggalan menjadi perhatian raja. Dia mengeluarkan peraturan mengenai wajib bersekolah dan bagi yang melanggarnya akan dikenai sanksi. Raja memperbaiki cara rakyat bercocok tanam dengan contoh-contoh yang diberikannya sendiri. Mau tidak mau Belanda mengakui jasa-jasanya dan menganugerahkan bintang jasa *de kleine gouden ster* (bintang emas kecil) serta mengangkatnya sebagai Raja Amarasi pada 7 November 1940, dia sebelumnya hanya menjabat sebagai *tijdelijk waarnemend*. Semasa penjajahan Jepang, raja dengan bijaksana menghindarkan rakyatnya dari kekejaman bala tentara Jepang. Pada perkembangan selanjutnya, bala tantera Jepang makin terdesak oleh gerak maju pasukan Sekutu. Karenanya, mereka mulai berupaya menarik simpati bangsa Indonesia, antara lain dengan diizinkannya pengibaran Sang Saka Merah Putih di samping bendera Hinomaru miliki Jepang. Pada 29 April saat perayaan ulang tahun kaisar Jepang, pembesar angkatan laut Jepang menyerahkan bendera merah putih pada Raja H.A Koroh untuk dikibarkan di lapangan Airnona.

Setelah Jepang menyerah kalah, perjuangan PKT diteruskan oleh partai baru bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang didirikan pada 1946. Susunannya adalah sebagai berikut:

Ketua	: I.H. Doko
Wakil ketua	: Tom Pello
Penasihat	: Raja H.A. Koroh

PDI sangat giat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terutama saat masuknya kembali pasukan Belanda (NICA) yang membonceng kedatangan Sekutu setelah bala tentara dari Negeri Matahari Terbit bertekuk lutut. Mereka dengan gigih mengupayakan agar Timor menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bukannya negara-negara boneka bentukan Belanda. Untuk mengimbangi jiwa nasionalisme PDI, Belanda melakukan politik pecah belahnya dengan membentuk lima organisasi sebagai pesaing PDI[242]:

- Partai Persatuan Timur Besar, yang berkedudukan di Ambon.
- Indo-Europees Verbond, yang berkedudukan di Jakarta.
- Democratische Bond van Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta.
- Persatuan Kaum Maluku, yang beranggotakan orang-orang Ambon di Kupang.
- Persatuan Selatan Daya, yang beranggotakan orang-orang Kisar serta pulau-pulau lain di selatan Daya.

Kelima organisasi pro-Belanda ini kemudian disebut Lima Serangkai. Namun, dengan adanya organisasi-organisasi tersebut, PDI justru makin bebas bergerak. Dengan dukungan para raja, mereka makin kuat menyuarakan kehendak rakyat yang ingin merdeka bersama Republik Indonesia. Akibatnya, aktivitas para anggota PDI justru tambah memusingkan Belanda.

Belanda yang sebelumnya menuduh para pemimpin PDI sebagai antek-antek Jepang, kini melabeli mereka sebagai "kaum ekstremis." Para pemuda nasionalis merasa tersinggung dengan hal ini dan berniat melakukan serangan serta pembakaran markas NICA. Namun, I.H. Doko selaku pimpinan PDI mencegahnya karena menurut hematnya hal itu justru merugikan perjuangan. Kendati demikian, para pemuda merasa kurang puas dengan penjelasan tersebut. Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk menjemput Raja H.A. Koroh selaku penasihat PDI dan meminta sarannya.

242. Lihat *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur*, halaman 117.

Tengah malam itu juga, Raja Amarasi dijemput dari tempat kediamannya. Dua jam kemudian, dia hadir di pertemuan. Pembicaraan dilangsungkan hingga dini hari dan sebagai hasilnya raja berhasil meyakinkan para pemuda yang dipimpin Tom Pello untuk mengurungkan niatnya. Dia menyatakan bahwa perjuangan akan hancur berantakan bila semata-mata hanya dilandasi oleh emosi belaka dan bukannya perhitungan yang matang.

Demi melanggengkan kekuasaannya di bumi persada Nusantara, Belanda berusaha membentuk berbagai negara boneka dengan mengadakan Konferensi Malino pada 15–25 Juli 1946. Di kalangan PDI sendiri timbul perbedaan pendapat, apakah hendak mengirimkan wakilnya ke konferensi itu ada tidak. Golongan pertama yang diwakili Tom Pello tidak menghendaki perundingan apapun dengan Belanda sehingga menolak mengirimkan wakilnya ke konferensi tersebut. Kendati demikian, I.H. Doko memiliki pendapat lain. Ia berpandangan bahwa Konferensi Malino sengaja diadakan oleh penjajah untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Oleh karenanya, penting sekali mengirimkan wakil Timor untuk menyatakan kepada bangsa Indonesia di tempat-tempat lain bahwa rakyat Timor tetap menghendaki persatuan dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya disepakati bahwa PDI mengirimkan wakil-wakilnya, yakni Raja H.A Koroh dengan didiampingi oleh I.H. Doko dan Th. Oematan. Mereka menghadiri konferensi dengan tujuan memperjuangkan agar Timor menjadi bagian Republik Indonesia.

Belanda yang menyadari hal ini berupaya menjegal utusan-utusan tersebut, yakni melalui jalinan kerja sama dengan anggota-anggota Lima Serangkai, terutama orang-orang Maluku, Daya, dan Belanda Indo. Mereka menghasut tokoh-tokoh Lima Serangkai agar mengirimkan telegram yang ditujukan pada Letnan Jenderal van Mook dan Dr. Hoven. Isinya menyatakan bahwa ketiga orang itu bukanlah wakil rakyat Timor sehingga suara mereka yang mendukung Republik tidak dapat diterima.[243] Begitu menerima telegram tersebut, kedua orang petinggi pemerintah pendudukan Belanda di atas, langsung menyerang utusan PDI dengan kata-kata bahwa mereka hanya mengaku-aku saja sebagai utusan rakyat Timor. Segera setelah itu ditunjukkanlah telegram dari tokoh-tokoh Lima Serangkai yang baru saja diterima. Tetapi dengan cerdik, H.A. Koroh dan I.H. Doko menjawab bahwa memang benar bahwa mereka tidak mewakili orang-orang Maluku, Daya, atau Belanda Indo, - yang

243. Lihat *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur*, halaman 125.

merupakan penandatangan telegram di atas - melainkan suara rakyat Timorlah yang mereka bawa.

Petinggi pemerintah Belanda bungkam seribu basa mendengar jawaban jitu tersebut. Dr. van Mook hanya berdiam diri saja, sedangkan Dr. Hoven dengan marah mengatakan: "*Jullie lijken wel op echte kwajongens!* (Kalian tampak seperti anak-anak nakal saja). *En Koroh, denk er om, je bent een Zelfbestuurder, die nog steeds gebonden is met een eed van trouw aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden* (Dan Koroh, ingatlah bahwa engkau adalah seorang raja atau kepala swapraja yang masih terikat sumpah kesetiaan dengan ratu Belanda)!"[244] Ternyata di sini Belanda mengungkit kembali masalah *Korte Verklaring* yang pernah ditandatangani para raja di Kepulauan Nusantara, padahal kekuasaan pemerintah kolonial sudah tamat ketika mereka menyerahkan begitu saja bangsa Indonesia pada kebrutalan bala tentara Jepang.

Meskipun utusan-utusan PDI telah menyuarakan pendapatnya dengan baik pada Konferensi Malino, Belanda tidak menghormati hak bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri. Berbagai negara boneka tetap dibentuk. Akibatnya, Tom Pello yang saat itu sedang sakit merasa kecewa dan bertambah parahnya penyakitnya hingga meninggal dunia. Belanda masih belum berputus-asa dan terus memengaruhi raja-raja lainnya agar memihak mereka. Raja Alfonsus Nisnoni dari Kupang selaku ketua PDI cabang Kupang dibujuk oleh Belanda agar menentang pernyataan wakil PDI di Konferensi Malino. Tetapi dengan halus dia menolaknya.

Sebagai langkah mendiskreditkan pidato utusan PDI di Malino, Belanda mengumpulkan para raja di SoE. Alasan pemilihan SoE dikarenakan letaknya yang jauh (111 km) dari pusat PDI. Raja Amarasi, H.A. Koroh, diwajibkan mempertanggung jawabkan pidatonya di Konferensi Malino. Bahkan demi menurunkan moral H.A. Koroh, sebelum berangkat ke sana, ia telah diancam bahwa raja-raja lain akan menentangnya mati-matian dan tidak mustahil jiwanya terancam. Karena itu, H.A. Koroh membawa sepucuk pistol dan telah siap menghadapi segala kemungkinan. Sebelum berlangsungnya rapat, para raja itu telah dijemput dari tempat kediamannya masing-masing dengan kendaraan yang dipersiapkan oleh pemerintah Belanda.

Rapat dibuka oleh Residen Timor dan dihadiri oleh asisten residen dan para kontrolir. Selanjutnya Raja Amarasi diminta menyampaikan pertanggungjawabannya terhadap apa yang diperjuangkannya dalam Konferensi Malino. Setelah itu, raja-

244. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur*, halaman 126.

raja lain diminta memberikan tanggapannya. Belanda memberikan kesempatan pertama kepada Raja Mollo, Tua Sonbai, yang buta huruf. Raja keturunan Dinasti Sonbai, yang leluhurnya pernah gigih menentang Belanda ini, selama berhari-hari telah dihasut oleh kontrolirnya agar jangan memihak Raja Amarasi. Namun, setelah mendengarkan pidato Raja. H.A. Koroh dengan seksama, ternyata dia malah menyatakan kesepakatannya dengan Raja Amarasi tersebut. Di luar dugaan Belanda, raja-raja lain malah mendukung perjuangan PDI. Wakil-wakil pemerintah kolonial Belanda menjadi sangat berang dan meninggalkan para raja begitu saja di SoE. Karena waktu itu tidak ada sarana transportasi yang membawa mereka kembali ke tempat kediamannya masing-masing, para raja mengutus orang-orangnya mengambil kuda tunggangan mereka yang dapat dipergunakan sebagai kendaraan pulang. Dengan demikian, niat Belanda menarik para raja ke pihaknya boleh dikatakan gagal total.

Setelah kurang lebih memerintah rakyatnya selama 25 tahun, Raja H.A. Koroh berpulang pada 1951. Saat upacara pemakamannya, rakyat berbondong-bondong mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir. Putra tertua Raja H.A. Koroh, Viktor Koroh, menjadi camat Amarasi.[245] Dia berjasa memajukan peternakan sapi di daerahnya, yang dijalankan dengan sistem *paron*; pemerintah membeli sapi-sapi berumur 4-5 tahun yang belum memenuhi syarat ekspor dengan berat rata-rata hanya 200 atau 250 kg., dan membagikannya kepada rakyat. Dengan diberi makanan yang bernilai gizi tinggi (kurang lebih 30 atau 40 kg sehari) dalam waktu 5 hingga 6 bulan, sapi-sapi tersebut telah bernilai ekspor dan siap dijual. Dengan demikian, penghasilan rakyat mengalami peningkatan yang nyata. Demi menggeliatkan peternakan rakyat ini, diadakan pula lomba sapi-sapi terbaik. Syarat-syarat bagi suatu desa agar dapat mengikuti sistem ini adalah tersedianya makanan ternak berupa rumput, lamtoro, atau turi, dan mudah dicapai oleh kendaraan sehingga pengawasan tak sulit dijalankan. Dinas Petenakan sendiri turut andil dalam menjaga mutu-mutu sapi yang dipelihara oleh rakyat. Almarhum Raja. H.A. Koroh besar pula jasanya dalam menyukseskan peternakan rakyat ini karena dahulu dia pernah menggalakkan penanaman lamtoro sebagai sumber pakan ternak.

245. Lihat *Timor Pulau Gunung Fatuleu "Batu Keramat"*, halaman 51.

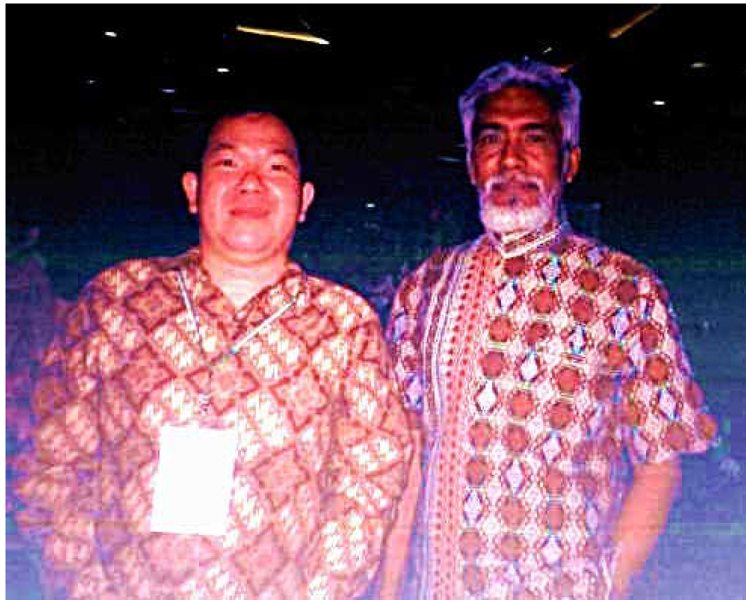


Foto bersama Raja Robert Koroh dari Amarasi saat berlangsungnya Silatnas Raja/Sultan Nusantara di Bandung tanggal 25-26 Juni 2011 (foto koleksi pribadi)

V. AMFOAN

Amfoan kini terletak di Kecamatan Amfoan Utara, Kabupatan Kupang. Pada abad 16–17, kawasan itu diperintah oleh raja-raja TaEbenu. Pada 1756, Raja Amfoan yang tercatat menandatangani Perjanjian Paravicini bernama Bartholomeus. Selanjutnya, raja-raja yang memerintah Amfoan tercatat bernama Moloh Manoch dan Sanu Manoch[246]. Kemudian kerajaan itu terpecah menjadi dua, yakni Amfoan Naikliu dan Amfoan Timau. Kerajaan Amfoan Naikliu (Sorbian) hanya berkuasa di kota Naikliu dan desa-desa sekitarnya. Sementara itu, Amfoan Timau menguasai daerah pegunungan dan pedalamannya. Perpecahan ini didorong oleh Belanda dan terjadi setelah pemerintahan Raja Afoan Leu. Putranya bernama Nai Aunoni menurunkan raja-raja Amfoan Naikliu, sedangkan Nai Benao (Mano) menurunkan raja-raja Amfoan Timau.

Raja-raja selanjutnya yang memerintah Amfoan Naikliu adalah Fini Mano, Willem Aunoni (Sana Aunoni, 1858–1880), dan Ratu Anna Elisabeth Aunoni (cucu Willem Aunoni, 1880–1902) Pada 1901, ratu dari Kerajaan Amfoan Naikliu ini beserta Baki Manoch dari Amfoan Timau menandatangani kontrak *Verklaring*

246. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 72.

Betreffende Belastingheffing dengan Belanda.[247] Anna Elisabeth Aunoni kemudian digantikan oleh Raja Willem Tafin Talnoni (1902–1915) sebagai Raja Amfoan Naikliu berikutnya. Rangkaian raja-raja yang memerintah Amfoan Timau secara berturut-turut adalah Maobai Maol, Muti Foan, Ani Foan, Nisnoni Foan, dan Nai Baki Mano (1901–1910).

Raja Willem Tafin Talnoni menandatangani *Korte Verklaring* pada 30 Juli 1908, bersama dengan Nai Oil Amaniet, Raja Hanoe; Nai Ampoepoe Po Oe Baki, Fetor Lelogama; Nai Abies Mata Kaoena, Fetor Bioba; Nai Nonok Amaniet, Fetor Leloboko; dan Otoe Neno Tonfanoes, Fetor Tonfanoes. Melalui penandatanganan *Korte Verklaring* oleh Raja Nai Baki Mano dari Amfoan Timau dan Willem Tafin Talnoni dari Amfoan Naikliu pada 1909, kedua kerajaan tersebut disatukan kembali. Meskipun demikian, pada 1910 Raja Baki Mano meninggal dunia sehingga Willem Tafin Talnoni dijadikan raja atas seluruh Amfoan. Ia menandatangani *Korte Verklaring* pada 21 Desember 1914. Selain itu fetor-fetor berikut ini turut serta menandatangani kontrak politik tersebut: Oetoe Neno, Fetor Tonfanoes; Nai Oil Amaniet, Raja Hanoe; Nai Nimak Amaniet, Fetor Leloboko; Nobe Noa Hagi, Raja Mosoe Talib; Nobo Na, Raja Kolabe; Nai Abies Kaoena, Fetor Bioba; dan Nai Anpoepoe Po Oe Baki, Fetor Lelogama.

Willem Tafin Talnoni digantikan oleh Soleman Willem Talnoni (1915–1921) dan Adreanus Talnoni (1922). Setelah itu yang menggantikannya sebagai raja adalah Mutis Oil Amanit (1923–1930) dari garis keturunan Amfoan Timau yang tercatat menandatangani *Korte Verklaring* pada 19 Oktober 1924. Dia digantikan oleh Semuel Amanit (pemerintahan pertama 1930–1943/44). Pada 1943/44, dia digantikan oleh Willem Oil Amanit (1943/44–1948). Setelah itu, Raja Semuel Amanit memangku jabatannya lagi (1948–1962). Bersamaan dengan pemerintahan Raja Willem Oil Amanit, masuklah bala tentara pendudukan Jepang.

VI. BANIBANI

Raja Don Louis Piniero dari Banibani tercatat menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756.

247. Ratu Anna Elisabeth Aunoni menandatangani pda tanggal 3 September 1901, sedangkan Raja Baki Manoch pada 8 September 1901.

VII. BELU

a. Swapraja Belu Tasifeto (Belu Utara)

Swapraja Belu Tasifeto (Belu Utara) sepakat dibentuk pada 19 Januari 1916 dalam suatu musyawarah yang dihadiri oleh para raja Kakuluk Mesak (gabungan Jenilu, Lidak, dan Naitimu), Fialaran, Lamaknen, Silawan, Makir, dan Lamaksenulu. Pemerintah kolonial Belanda sepakat dengan pembentukan swapraja baru ini dan mengeluarkan keputusan berupa *Besluit Gubernemen no.22 Stlb. 1916* tertanggal 10 Mei 1916, yang isinya mengangkat Don Josef da Costa, Raja Jenilu atau Kakuluk Mesak (Tiang Agung Tunggal), sebagai raja atau kepala swapraja Belu Tasifeto. Ia lalu diperintahkan menandatangani *Korte Verklaring*. Kondisi ini berlangsung hingga 1 April 1920, ketika Raja Don Josef da Costa mengajukan permohonan berhenti sebagai kepala swapraja karena alasan kesehatan. Karena itu, dalam menjalankan tugas sehari-harinya ia diwakili oleh Josef Parera, fetor Jenilu. Raja Don Josef da Costa mangkat pada 10 September 1920 dan Josef Parera diangkat sebagai wakil Raja Belu Tasifeto.

Josef Parera meninggal dunia pada 1923 dan Loro Bauho (Fialaran) yang bernama Atok Samara diangkat sebagai kepala Swaparaja Belu Tasifeto dengan surat keputusan residen no. 414 tertanggal 26 Juni 1923. Belakangan, kontrolir von Rasfeld mengajukan usul penghapusan Swapraja Belu Tasifeto beserta Malaka dan menyatukannya menjadi Swapraja Belu pada 20 September 1923. Saran ini diterima oleh gubernur jenderal Hindia Belanda yang mengeluarkan *Besluit Gubernemen no. 39* tertanggal 28 November 1924 mengenai penghapusan kedua swapraja tersebut dan menggabungkannya menjadi Swapraja Belu.

b. Swapraja Belu

Swapraja atau kerajaan ini merupakan penyatuan Belu Tasifeto dan Malaka pada 1924. Swapraja Belu terdiri dari distrik-distrik sebagai berikut: Wehali, Wewiku, Umalor, Rabasa, Wederok, Lakekun, Alas, Litamali, Dirma, Mandeu, Kusa, Fatuaruin, Bani-Bani, Manlea, Hatimuk, Naitumu, Lidak, Jenilu, Silawan, Bauho, Takirin, Lasiolat, Umaklaran, Manleten, Asumanu, Maumutin, Tohe, Tohen Tohe, Makir, Lamaksanulu, Lakmaras, Nualain, Leowalu, Dirun, dan Loonuna[248]. Sebagai rajanya diangkat Maromak Oan Baria Nahak (pewaris pemimpin tertinggi Kerajaan Wewiku Wehali) dan Liurai Seran Asit Fatin. Namun, tak lama kemudian, pada 9 Oktober 1924, Maromak Oan Baria Nahak

248. Lihat *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor*, halaman 294–295. Dalam daftar di buku tersebut Umaklaran disebut dua kali, yakni sebagai nomor 23 dan 25.

wafat. Para *loro* dan *nai* selaku penguasa-penguasa tradisional di kawasan Belu pada 8 Januari 1925 sepakat memilih Henricus Seran Nahak, kemenakan Baria Nahak, sebagai *maromak oan* baru. Namun, keputusan ini ditentang oleh Loro Atok Samara dari Bauho (yang sebelumnya menjabat sebagai Raja Belu Tasifeto) dan Loro Bauliku dari Lamaknen.

Gubernur jenderal kemudian mengeluarkan *Besluit Gubernemen no.17* tertanggal 6 Maret 1926 mengenai pengangkatan Seran Nahak sebagai *maromak oan* baru. Meskipun demikian, pelantikannya baru dilangsungkan pada 10 Mei 1926 dan sama seperti para pendahulunya, ia diwajibkan menandatangani *Korte Verklaring*. Kendati demikian, Atok Samara yang tidak setuju dengan pengangkatan ini, menolak hadir dalam acara pelantikan tersebut. Tindakan pembangkangan Atok Samara ini dilaporkan oleh kontrolir pada 19 Mei 1926. Akibatnya, ia diberhentikan dari kedudukannya terhitung 12 Juni 1926 dan sebagai pengisi kekosongan jabatannya ditunjuk Hendricus Besin Siri. Tetapi karena masih kecil, ia diwakili oleh Fetor Kasa Taek dari Takirin. Kedudukan Seran Nahak disahkan oleh residen melalui keluarnya surat keputusan no. 445 pada 25 September 1925 berupa pengakuan terhadap Maromak Oan Seran Nahak beserta Liurai Seran Asit Fatin selaku wakil raja. Kedua pucuk pimpinan tersebut merupakan dwi tunggal penguasa di Swapraja Belu sebagaimana halnya ketika Kerajaan Wewiku Wehali –pendahulu Swapraja Belu– masih berjaya.

Maromak oan yang baru ini diperkenalkan pada rakyat di bulan Agustus 1926. Dengan diantar oleh pejabat-pejabat kolonial Belanda (*gezaghebber* dan kontrolir Belu), ia berkeliling daerah kekuasaannya. Namun, dalam kunjungan kehormatan di Kewar, Raja Lamakmen, Bau Liku, tidak bersedia memerintahkan rakyatnya memikul *maromak oan* sebagai tanda penghormatan sebagaimana yang berlaku di tempat lainnya. Hal ini dipandang sebagai suatu penghinaan yang luar biasa. Dengan demikian, ada dua orang *loro* (penguasa setempat) yang tak tak setuju dengan pengangkatan *maromak oan* baru ini, yaitu Loro Atok Samara (dari Fialaran) dan Loro Bau Liku. Menurut buku karya A.D.M. Parera[249], ketidaksediaan Loro Atok Samara dan Bau Liku mengakui *maromak oan* ini disebabkan karena, pada zaman dahulu, *maromak oan* dianggap sebagai pemimpin tertinggi dan penasihat bagi tiga liurai di Timor. Namun, pada zaman itu, sudah tidak ada liurai lagi yang benar-benar berkuasa. Liurai Fatuaruin masih ada, tetapi hanya gelar belaka. Pedang kekuasaan sebagai tanda kekuasaannya sudah lama tak ada lagi. Liurai Sonbai terakhir telah

249. Lihat *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor*, halaman 297–298.

ditangkap oleh Belanda. Liurai Likuasaen (Suai Kamanasa) sudah tidak jelas lagi keberadaannya dan wilayahnya kini berada di Timor Portugis. Oleh karenanya, Atok Samara dan Bau Liku menganggap munculnya *maromak oan* baru dukungan Belanda yang menandatangani *Korte Verklaring* ini tidak sesuai lagi dengan fungsinya menurut adat lama. Alasan lainnya, *maromak oan* adalah raja tertinggi yang tak boleh dilihat oleh rakyatnya. Itulah sebabnya, mereka tak setuju *maromak oan* diajak berkeliling dan diusung oleh rakyat.

A.D.M. Parera, penulis buku *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor*, menyebutkan pula bahwa Maromak Oan Seran Nahak ini kebetulan merupakan kawan sekolahnya di Halilulik[250]. Setelah diangkat sebagai *maromak oan*, Henricus Seran Nahak disekolahkan oleh pemerintah kolonial Belanda di *volkschool* (sekolah dasar tingkat pertama) Tubaki. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya pada *standaardschool* (sekolah dasar tingkat atas) di Halilulik semenjak tahun 1928. Awalnya, *maromak oan* ini bersekolah bersama siswa-siswa lainnya dan mendapatkan pelajaran dari guru-guru yang sama. Apabila bersalah, ia juga mendapatkan hukuman yang tak berbeda dengan siswa-siswa lainnya. Hal ini dipandang tidak sesuai dengan martabatnya sebagai *maromak oan* yang seharusnya diistimewakan. Sebagai contoh, saat sedang mengikuti kebaktian di gereja, ia mendapatkan tempat tersendiri. Karena itu, akhirnya didatangkan seorang guru khusus bernama N.M. Ote guna mengajarnya.

Maromak Oan Seran Nahak mengajukan permohonan berhenti pada 8 Januari 1929 yang disetujui oleh pemerintah kolonial dengan dikeluarkannya *Besluit Gubernemen no. 39* tertanggal 8 April 1930. Selanjutnya, Liurai Seran Asit Fatin menjadi kepala swapraja Belu seorang diri hingga wafat pada 9 November 1931. Semenjak saat itu, Kerajaan Belu tidak lagi diperintah oleh seorang raja, melainkan suatu dewan yang terdiri dari 3 orang anggota, yakni Loro Fialaran (Atok Samara)[251], Loro Lakekun (Benedictus Leki), dan Loro Wewiku (Bere Nahak). Bersamaan dengan itu, dilakukan penelitian mengenai struktur pemerintahan Swapraja Belu. Semenjak meletakkan jabatannya, Henricus Seran Nahak kembali ke Laran. Kendati demikian, orang-orang di sekitarnya masih menghormatinya sebagai *maromak oan*. Pemerintah Daerah Belu memberikan sedikit tunjangan kepadanya hingga mangkat pada 6 Juni 1970.

---

250. Lihat *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor*, halaman 298.
251. Diangkat kembali setelah sebelumnya diberhentikan karena membangkang kepada *maromak oan*.

c. Pembubaran Swapraja Belu

Pada perkembangan selanjutnya, *Bestuur Asistent* J.S. Kedoh (Raja Rote terakhir) melaporkan bahwa pembentukan Swapraja Belu tidak efektif sehingga harus dibentuk kembali tiga swapraja, yakni Malaka, Belu Tasifeto, dan Lamaknen. Setelah melalui berbagai proses, Swapraja Belu resmi dibubarkan berdasarkan surat keputusan no.8/ XIII/1.R tertanggal 13 Februari 1941. Dengan demikian, wilayahnya dipecah menjadi tiga swapraja, yakni Malaka, Belu Tasifeto, dan Lamakmen. Semasa penjajahan Jepang, di wilayah Belu diakui dua kerajaan, yakni Tasifeto dan Tasimane. Tasifeto berada di bawah Loro Fialaran dan dipimpin oleh Nikolas Manek. Ketika ia meninggal pada 1944, Besin Siri da Costa, Loro Fialaran diangkat sebagai penggantinya. Sementara itu, Tasimane berada di bawah Loro Wewiku dan Nai Fatuaruin.

VIII. BIBOKI

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Biboki

Kerajaan Biboki terbagi menjadi lima ke-usif-an atau ke-fetor-an (daerah yang diperintah wakil raja), yakni Oetasi, Bukifan, Usletu, Harneno, dan Taito. Menurut salah satu legenda, leluhur kerajaan ini adalah Taek Neno dan Malafu Neno yang menurunkan putra-putra sebagai leluhur raja-raja di Timor[252], yakni

- Boki Taek, pendiri Kerajaan Biboki, yang selanjutnya digelari Neon Biboki-Funan Biboki.
- Sana Taek, yang merupakan pendiri Kerajaan Insana.
- Mafo Taek, yang merupakan pendiri Kerajaan Miomaffo.
- Natun Taek, yang merupakan pendiri Kerajaan Amanatun.
- Bete Ana, yang merupakan leluhur suku Belu Mau, Ti Mau, dan Sabu Mau.
- Buik Ikun Us Feotsala.

Cerita lainnya menyebutkan mengenai turunnya 10 *mane sanulu* (orang lelaki) dari matahari, ketika Pulau Timor sudah kering. Konon, Timor masih digenangi air laut. Empat orang di antara mereka menetap di Wehali dan menyebar ke Wewiku, Haitimuk, Dirma, dan Lakekun, sedangkan sisanya meninggalkan kawasan Wehali dan pindah ke Likusaen Baboen, Biboki, Insana, Amanuban, Amanatun, dan Amarasi.

252. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 93.

Saat para raja mengadakan Perjanjian Paravacini dengan Portugis pada 1756, nama Kerajaan Biboki tidak ikut disebutkan karena saat itu masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Wesei Wehali di Belu dengan wilayahnya yang kala itu masih cukup luas. Yang tercatat menandatangani perjanjian tersebut adalah Raja Hiacijntoe Corea dari Wesei Wehali yang disebut juga Raja Besar Belu. Biboki yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Wesei Wehali disebut dengan nama Sakoenaba Baybohie.



Loro (Raja) Atok Samara
Sumber: Mr. Donald Pietro Tick

Daftar silsilah raja yang memerintah Biboki dicantumkan oleh W. Silab (2002) dan juga dimuat dalam buku *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 94. Menurut silsilah tersebut terdapat 27 orang raja yang pernah memerintah Biboki, yaitu

1. Mneka Kuluan
2. Taeke Kuluan
3. Ane Kuluan
4. Neno Uskuluan
5. Tabesi Uskenant
6. Nila Tusala
7. Tabes Tusala
8. Tahoni Iba
9. Tnesi Tautpah
10. Tnesi Finit
11. Poni Aumus
12. Poni Sespah
13. Beli Matnoni
14. So Boko
15. Abatan Boko
16. Tabesi Boko

17. Tnesi Boko
18. Te'l Iba
19. Oenunu Tabesi
20. Taek Tautpah
21. Te'l Taek
22. Tnesi Neon Mese (Sanam Mnasi–Sonaf Makono)
23. Kono Usboko
24. Te'i Usboko
25. Tnesi Usboko
26. Iba Ane
27. Tnesi Iba

Kendati demikian, karena tidak adanya tahun yang disebutkan, menjadi sulit menentukan periodisasi masing-masing penguasa Biboki di atas. Menurut sumber Belanda, kerajaan ini pernah diperintah oleh Raja Tambesi Manlean (1878–1911). Namun, tampaknya sulit pula menempatkan raja ini pada urutan raja-raja Biboki di atas. Usif Amapaha dari Biboki Timur tercatat pernah menandatangani beberapa kontrak politik dengan Belanda, yakni

- *Timor Verklaring* (VI) pada 20 Agustus 1900.
- *Verklaring Betreffende Belastingheffing* (tentang kenaikan pajak) pada 12 September 1901

Raja Tambesi Manlean selajutnya digantikan oleh Raja Kaubauk (Kau Mauk, (1915–1940), dalam buku *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 288, disebut Kaoe Moek). Pada masa pemerintahannya, yakni pada 1916, Kerajaan Biboki dikukuhkan dengan surat *besluit* gubernur jenderal tertanggal 1 Agustus 1916 no.34. Raja ini tercatat pernah pula menandatangani *Korte Verklaring* pada 10 Mei 1926. Ketika Jepang menduduki Pulau Timor, yang menjadi Raja Biboki adalah Leonardus Manlean[253] (Leonardus Taek Kau, 1942–1962), pengganti Kau Mauk.

b. Sistem Pemerintahan Kerajaan Biboki

Terdapat dua orang raja di Biboki, yakni raja tertinggi bergelar *atupas* yang tidak terlibat aktif dalam pemerintahan, dan raja pelaksana bergelar *us bala*. *Atupas* dianggap mewakili kekuatan feminim menurut tradisi dan kosmologi yang dianut di Biboki,

253. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 29.

walaupun ia tidak harus seorang wanita. Raja yang dianggap sakral ini berkedudukan di bagian barat pusat pemerintahan Biboki. Sementara itu, *us bala* selaku raja pelaksana eksekutif berkedudukan di sebelah timur.

Dualisme kekuatan antara feminim dan maskulin dalam kosmologi rakyat Biboki ini dilambangkan dengan dua buah gunung di kerajaan tersebut. Kedua gunung di atas masing-masing terdapat di sebelah barat dan timur kerajaan, dengan wilayah Oetasi terletak di tengah-tengahnya. Gunung di bagian barat bernama Oe Puah (mata air dekat pohon pinang), sedangkan yang di bagian timur disebut Tapen Pah. Sebenarnya, Oe Puah adalah nama mata air dekat bukit itu dan nama gunungnya sendiri adalah Tubu Soanmuhole. Gunung Tapen Pah merupakan tempat pemujaan paling keramat di Biboki. Biasanya saat terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa, seperti wabah penyakit, diadakan upacara pengorbanan di sana.

Para usif dan amaf setiap tahunnya wajib mempersembahkan upeti dari daerahnya pada *atupas*, dimana upeti yang dinamakan *mausufa* tersebut pada umumnya berupa padi dan cendana. Pada perkembangan selanjutnya, yakni semenjak akhir abad 17, jagung juga menjadi salah satu upeti yang dipersembahkan. Masuknya jagung sebagai bagian upeti terkait dengan upaya VOC pada 1672 yang memperkenalkan budi daya jagung ke Timor dalam rangka memperbaiki kondisi pangan di sana.

IX. FATULEU

Sebelumnya, kerajaan Fateleu merupakan bagian atau salah satu ke-fetor-an dalam lingkungan Kerajaan Sonbai, yakni Ke-fetor-an Takaip. Para fetor yang memerintah di Takaip sebelum Fatuleu diubah statusnya menjadi kerajaan adalah Kai Thaiboko, Lelo Thaiboko, Nuwe Thaiboko, Baki Kooi (pemangku, 1874–1880), dan Baki Tuha (1880–1900). Semasa Sobe Sonbai III berkuasa, fetor di sana dijabat oleh Fai Thaiboko (1900–1912), pengganti Baki Tuha, yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 7 Mei 1913. Kerajaan Fatuleu sendiri baru berdiri sebagai kerajaan terpisah pada 1912, dengan rajanya Kooi Thaiboko atau Christoffel Thaiboko (1912–1930) dari ke-fetor-an Takaip. Pada 1913, Belanda melakukan reorganisasi pemerintahan sehingga Kerajaan Benu, Manbait, Tefnai, Kauniki, dan Takaip disatukan dengan Fatuleu. Selanjutnya, penguasa kelima kerajaan di atas diturunkan kedudukannya dari raja menjadi fetor. Raja Christoffel Thaiboko kemudian digantikan oleh Raja Nicolaas Isu Nisnoni dari Sonbai Kecil, yang memerintah Fatuleu dari 1930 hingga

1942. Ketika dia mangkat, digantikan oleh Alfons (Alfonsus) Nisnoni (1942–1945), yang juga merangkap sebagai raja Kupang. Setelah itu, Raja Alfons Nisnoni digantikan oleh adiknya, Hans Nisnoni (1945–1955) sebagai Raja Fatuleu. Raja Hans Nisnoni yang pernah menuntut ilmu di *Europeesche Lager School* Kupang[254] merupakan anggota PDI yang gigih memperjuangkan kemerdekaan negerinya.

X. FIALARAN (FEHALARAN)

Fialaran merupakan salah satu kerajaan yang berada di kawasan Belu. Menurut salah satu cerita rakyat, dikisahkan bahwa dahulu Pulau Timor masih digenangi air laut. Saat itu, hanya Gunung Lakaan saja yang tak terendam air. Suatu ketika, turunlah seorang putri dewata dari kayangan bernama Laka Lorok ke puncak gunung tersebut. Karena kesaktiannya, putri dewata itu dapat melahirkan anak tanpa suami. Ia kemudian diriwayatkan memiliki 2 anak lelaki bernama Atok Lakaan serta Taek Lakaan dan 2 anak perempuan, yang masing-masing bernama Elok Loa Lorok beserta Balok Loa Lorok. Karena tidak ada orang lain lagi, mereka saling menikah antar sesama saudaranya. Atok Lakaan menikah dengan Elok Loa Lorok dan pindah ke bukit Nanae Dubesi serta menjadi pendiri Kerajaan Naitimu. Taek Lakaan menikah dengan Baok Loa Lorok dan memiliki 10 orang anak, yang kelak menjadi pendiri berbagai kerajaan di Timor, antara lain Dasi Tuka Mauk yang berlayar hingga ke Floresp; Dasi Boki Mauk yang mendirikan Kerajaan Biboki; Dasi Sana Mauk yang mendirikan Kerajaan Insana; Dasi Lida Mauk yang mendirikan Kerajaan Lidak; Dasi Leku Mauk yang mendirikan Kerajaan Lakekun; empat putra yang menjadi pendiri Kerajaan Maukatar; dan putra bungsunya yang menjadi pendiri Kerajaan Fialaran. Kisah lainnya adalah mengenai Raja Bauho yang tinggal di puncak Gunung Lakaan.

Menurut manuskrip Hans Hägerdal, leluhur raja-raja Fialaran adalah pasangan Lakan Oan dan Letten Oan[255]. Mereka memiliki seorang putra bernama Dassi Loro Mauk dan putri bernama Dassi Bui Lulun. Dassi Loro Mauk menikah dengan Dasso Bui Lulun dan dikaruniai 6 putra (Bau Lorok, Tabei Lorok, Suri Lorok, Keku Lorok, Laka Lorok, serta Sina Lorek) dan 4 putri (Teli Lorok, Balo Lorok, Abu Lorok, dan Ello Lorok). Sina Lorek menikah dengan saudarinya sendiri, Teli Lorok, dan berputra Taek Lakan, yang merupakan Raja Fialaran pertama. Taek Lakan memiliki 10 orang putra,

254. Lihat *Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial 1915–1950*, halaman 261.
255. Lihat *Kerajaan2 Indonesia: an Alpabetic Enumeration of the Former Princely States of Indonesia, from the Earliest Time to the Modern Period, with Simplified Genealogies and Order of Succession*, halaman 79.

yakni Batu Bauk, Mone Bauk, Aha Bauk, Essa Bauk, Laha Bauk, Tei Bauk, Lerea Bauk, Lulu Bauk, Naha Bauk dan Mau Bauk. Sebagai pengganti Taek Lakan, diangkatlah Mau Bauk. Rangkaian raja-raja Fialaran selanjutnya adalah Suri Lulun, Ato Surik, Mau Aton, Mau Bauk, Atok Mauk, Mau Aton, Bessi Aton, Mau Bessin, Ato Lulin, Mau Aton, Ato Mauk (1858–1903), dan Atok Samara (Atok Bessin, 1904–1927).

Dari segi pemerintahan, Fialaran masih terbagi menjadi sepuluh kerajaan atau kesatuan adat yang lebih kecil yang disebut sebagai *Fialaran dasi sanulu* (kesepuluh *dasi* Fialaran). Kesepuluh kesatuan adat tersebut itu digolongkan menjadi dua, yakni Fialaran Barat dan Timur. Fialaran Barat terdiri dari Bauho, Klusin, Dafala, Manuk Leten, Umaklaran, dan Sorbau, sedangkan Fialaran Timur terdiri dari Lasiolat, Asumanu, Tohe, Manumtuin, dan Aitoh. Karena jumlah penduduknya terbanyak, Lasiolat menjadi yang terkuat di antara kesatuan adat lainnya. Oleh karenanya, Raja Lasiolat diserahi tugas mempertahankan kerajaan dan mengurusi masalah kemiliteran. Sebelumnya, ada kerajaan bernama Lasaka, tetapi karena rajanya yang lalim, ia kemudian dibunuh dan wilayahnya disatukan dengan Bauho. Meskipun demikian, yang dipandang sebagai *astanara* (raja tertinggi) adalah Raja Bauho. Ia dipandang terlalu tinggi untuk mengurusi pemerintahan secara langsung. Oleh karena itu, sebagai pelaksana diangkat Raja Klusin, yang juga berfungsi sebagai perantara antara rakyat dengan raja tertinggi.

XI. FUNAY

Pada mulanya, Funay merupakan satu kerajaan tersendiri di Pulau Timor. Leluhur raja-raja Funay adalah seorang tokoh yang juga bernama Funay dan konon berasal dari Pitai[256], Belu. Ia merupakan seorang *meo* (panglima perang) yang datang berserta para pengikutnya. Putra Funay bernama Bo'e menikah dengan putri Raja Kupang. Ia memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama Suna dan Bui. Suna menurunkan seorang anak perempuan bernama Bi Lafu yang menikah dengan Pon Pitais. Putra mereka adalah Lafu I (± 1760–1762)–Raja Funay pertama. Raja-raja Funay selanjutnya adalah Lelo (± 1832), Kolan I, Lafu II (1840–1873), To (± 1874), dan Kolan II (1888–1906), dan Kolan Laurens Funay (1907–1917)[257]. Meskipun

256. Lihat *Memperkenalkan Kota Kupang*, halaman 26.
257. Lihat *Kerajaan2 Indonesia* (manuskrip Hans Hägerdal), halaman 81. Menurut catatan kaki no.3, terdapat urutan raja-raja Funai yang berbeda sebagaimana yang tercantum dalam Spillett (1999): Lafu Funai, Kolan Funai, Lorens Funai, Lasi Funai, Pong Funai, Lorens Funai I, Lorens Funai II, dan Kolan [Laurens Funai].

demikian, pada 1917 Funay membentuk suatu federasi kerajaan Kupang yang lebih besar bersama dengan Amabi, Oefetto, Helong, Sonbai Kecil, dan TaEbenu.

XII. HELONG (KUPANG HELONG) & SEMAU

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Helong

Kerajaan ini juga disebut Kupang Helong. Dahulu, Kerajaan Helong pernah meliputi wilayah yang lebih luas, yakni Kecamatan Kupang Barat, Kupang Tengah, dan Kotamadya Kupang sekarang. Bahkan mencakup pula sebagian Amarasi. Meskipun demikian, kerajaan ini akhirnya terdesak dan tinggal meliputi Pulau Semau saja. Konon, nama suku ini berarti "berani berkorban" atau "berani mati[258]." Menurut cerita rakyat Helong, leluhur mereka berasal dari Seram yang bernama Lai Bissi [259]. Ia mempunyai anak bernama Lisin Lai Bisi. Putra Lisin Lai Bisi ada empat orang, yakni Bissi Lai Bissi, Poto Lai Bissi, Pai Lai Bissi, dan Leo Lai Bissi. Bissi Lai Bissi memiliki dua orang anak lelaki, Lasi Lai Bissi dan Snae Lai Bissi, serta seorang anak perempuan, Lelo Lai Bissi. Lasi Lai Bissi mempunyai dua orang putra, yakni Lisin Lai Bissi dan Susang Lai Bissi. Lisi Lai Bissi mempunyai lima orang putra, yakni Ko'en Lai Bissi, Lisin Lai Bissi, Hitu Lai Bissi, Lelo Lai Bissi, dan Topa Lai Bissi.

Ko'en Lai Bissi dan Lisin Lai Bissi merupakan anak kembar. Pada zaman mereka, terjadi perpindahan penduduk besar-besaran. Oleh karenanya, dua orang bersaudara kembar itu menghimpun kaum kerabatnya dan mengajak mereka meninggalkan Pulau Seram. Rombongan singgah di Pulau Aru, mereka membuat rakit dari batang-batang pohon berukuran besar. Di tengah jalan, sewaktu rombongan singgah di Amboka, Ko'en Lai Bissi berubah menjadi buaya. Ia berpesan pada saudara kembarnya agar terus memimpin rombongan. Sementara itu, ia sendiri tak dapat menyertai mereka lagi karena telah berubah menjadi buaya. Ko'en Lai Bissi berpesan apabila mereka menjumpai kesulitan agar memanggil namanya.

Karena masih berduka akibat peristiwa yang menimpa saudaranya, Lisin Lai Bissi sementara waktu belum bersedia meneruskan perjalanannya dan tetap berdiam di Amboka. Ia berpesan pada Lai Topan dan Lai Tabun–dua orang pemuka utama rombongan–agar meneruskan perjalanan dan ia kelak akan menyusul mereka. Lai Topan ditugaskannya menyelidiki keadaan penduduk, kondisi keamanan, dan

258. Lihat *Memperkenalkan Kota Kupang*, halaman 5.
259. Lihat *Cendana & Dinamika Masyarakat Nusa Tenggara Timur*, halaman 57.

seluk pemerintahan di bakal tempat kediaman baru mereka, sedangkan Lai Tabun diperintahkan meneliti perihal kesuburan tanah, kemakmuran, dan lain sebagainya.

Lisin Lai Bissi memiliki dua orang anak, seorang putra bernama Bissi Lisin (Bissi Lai Bissi) dan seorang putri bernama Susan Lai Bissi. Bissi Lissin memperoleh tiga orang anak, seorang putra bernama Lai Bissi serta dua orang putri yang masing-masing bernama Sna'e Bissi dan Le Lai Bissi. Lai Bissi berputra dua orang, yakni Lisin Bissi (Lisin Lai Bissi) dan Leo Bissi (Leo Lai Bissi). Leo Lai Bissi belakangan menetap di Belu dan mengubah namanya menjadi Liu Lai Bissi. Waktu itu, kaum keturunan Lisin Lai Bissi telah berpindah dari Amboka ke Atapupu. Mereka lalu berpindah lagi ke Atapupu pada zaman Lisin Bissi (Lisin Lai Bissi). Bersama dengannya turut serta 35 kepala keluarga dengan pengikutnya masing-masing, yaitu (1) Nuh Natun, (2) Lai Kait, (3) Lai Paat, (4) Lai Lopo, (5) Siki Timu, (6) Lisi Lena, (7) Lisi Lai Hulu, (8) Kla Peka, (9) Lai Biti, (10) Lasi Kono, (11) Lai Nusa, (12) Solini, (13) Helena Sabu, (14) Putis Lulug, (15) Bilis Mau, (16) Is Mau, (17) Lai Silap, (18) Bait Lena, (19) Lasi Kodat, (20) Tiu Muli, (21) Helena Muli, (22) Lai Bahar, (23) Bui Gena, (24) Neno Bissi, (25) Lai Kingis, (26) Lai Nali, (27) Lai Kuni, (28) Buit Bissi, (29) Bis Tole, (30) Ko'e Slulat, (31) Bilis Tolen, (32) Bimusu, (33) Bal Ma'e, (34) Bal Somang, dan (35) Mes Tuna.

Rombongan tiba di Camplong dan meneruskan perjalanan ke Lili. Di sana rombongan dibagi dua guna mencari rombongan Lai Tabun dan Lai Topan yang telah terlebih dahulu tiba di Timor. Kelompok pertama terdiri dari kepala keluarga pertama hingga kesebelas dalam urutan di atas beserta para pengikutnya masing-masing, sedangkan sisanya merupakan kelompok kedua. Rombongan pertama menyusuri dataran rendah. Sementara itu, kelompok kedua di bawah pimpinan Lisin Bissi berjalan melalui dataran tinggi dan daerah perbukitan. Kelompok Lisi Bissi tiba di O'ekabiti dan mendapati bahwa Lai Tabun sudah meninggal serta dikuburkan di sana. Perjalanan dilanjutkan ke Baun, Bieto, Marena (Malena), O'ebali (tak jauh dari Bone), Batulesa, O'ebatu, Tapai–O'etalu, O'enesu, dan Naioni. Di tengah perjalanan, mereka menjumpai keturunan pengikut Lai Tabun.

Dari Naioni pengembaraan dilanjutkan ke Petu dan Fatukoa. Di sini rombongan berjumpa dengan keturunan Lai Topan yang menyatakan keinginan mereka menetap di Fatukoa. Selanjutnya, mereka berjalan lagi ke Liliba dan berjumpa dengan rombongan

pertama. Lisin Bissi membagi-bagi tempat kediaman bagi para pengikutnya dan ia sendiri memilih tinggal di daerah Buni Baun, dekat pantai.

Lisin Lai Bissi lalu menjadi Raja Helong yang pertama. Semasa pemerintahannya, ia mengadakan kunjungan ke Pulau Rote dalam suatu misi perdamaian. Selama kepergiannya, saudaranya bernama Lai Topan (Nai Kopan) menjadi wakil raja menggantikan dirinya dan menerima kedatangan utusan Portugis pada 1514. Lai Topan memperkenalkan dirinya sebagai Nai Kopan atau raja kawasan itu di hadapan orang-orang Portugis. Ketika ia pulang dari Rote, rakyat menyambut Lisin Lai Bissi dengan penuh kemeriahan sehingga akhirnya orang Portugis tahu bahwa ia adalah raja sebenarnya.

Lisin Lai Bissi kemudian digantikan oleh putranya bernama Koen Lai Bissi (Manas Bissi I) sebagai Raja Helong kedua. Sebagai catatan, kepergian para leluhur Helong dari Seram (Maluku) kemungkinan dikarenakan kekacauan yang terjadi di kampung halaman mereka akibat persaingan antara Portugis dan VOC memperebutkan monopoli rempah-rempah. Penduduk yang kecewa merasa keamanannya terancam dan tidak mau tunduk di bawah dominasi asing, lantas meninggalkan kawasan tersebut guna mencari tempat kehidupan baru. Koen Lai Bissi memerintahkan pengikutnya membangun tembok mengelilingi istananya, yang kelak menjadi cikal bakal kota Kupang.

Saat bangsa Barat menjejakkan kakinya di bawah pimpinan Apollonius Scotte, mereka mendapat izin mendarat di Kupang pada 1613 oleh Raja Helong. Bahkan, Raja Helong juga menawari mereka sebidang tanah untuk mendirikan benteng. Tercatat 15 Raja Helong yang dikenal namanya, namun sulit menentukan perioda pemerintahan mereka[260]. Tetapi yang pasti pada 1650 di Helong memerintah Raja Susang Bissi. Ia adalah Raja Helong ketiga dan pernah dibaptis dengan nama Salomo. Pada 1655, Belanda yang berniat mengamankan pusat kekuasaannya di Kupang mengadakan perjanjian dengan lima raja di Timor termasuk Kupang. Perjanjian tujuh pasal itu berisikan berbagai hal seperti penghentian permusuhan antara Belanda dengan raja-raja Timor, pemberian tanah untuk kepentingan Belanda, serta kesediaan para raja untuk mendukung Belanda. Raja Susang Bissi digantikan oleh Manas Bissi II.

Selanjutnya yang menggantikan Manas Bissi II adalah Poto Bissi. Adiknya bernama Sna'e Bissi menikah dengan Karel Buni yang pada 1756 menandatangani

260. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 50.

perjanjian yang disebut Perjanjian Paravicini. Karel Buni sendiri berasal dari keturunan Ternate[261]. Rangkaian Raja Helong berikutnya adalah Manas Bissi III (adik lelaki Poto), Tepa Bissi, Lasi Tepa, Tepa Pai (Tepa Bissi), Manas Tepa, Manas Klomang, Kolan Tepa (Tepa Manas), Neon Manas, Bani Neon (Hilla Neon), Manas Bissi IV (1816–1826), Tepa Manas (1826–1846), Susan Manas, dan Lasi Lasi.

Raja Manas Dean (1858–1872) yang menggantikan Lasi Lasi pada 13 November 1858 ditandatangani *Akte van Bevesteging en Verklaring.* Penggantinya adalah Manas Klomang (1872–1881), Leo Manas (1882–1885), Dean manas (1885–1908). Raja Dean Manas menandatangani berbagai kontrak, seperti *Timor Verklaring (VI)* pada 1 Juli 1896, dan *Contract Betrefende Mijnrechten* pada 18 Oktober 1901. Ia digantikan secara berturut-turut oleh Soleman Pallo (1908–1911) dan Samun Pallo (1911–1917)

b. Pemerintahan di Pulau Semau

Kerajaan Helong lalu berpindah ke Pulau Semau. Pada 1917, Helong bergabung dalam federasi Kupang dan selanjutnya menjadi salah satu ke-fetor-an dalam swapraja tersebut. Fetor-fetor yang pernah memerintah di Semau setelah penggabungan dengan Swapraja Kupang adalah Snait Dean (1917–1922), Martinus Pallo (1922–1938), Bui Dean (Benyamin Bissilisin, 1 Juli 1938–30 Juni 1950), dan Christian Dean Bissilisin (1 Juli 1950–30 Juni 1962). Semenjak bulan Juli 1962, dia diangkat sebagai camat Kupang Barat.[262]

XIII. INSANA

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Insana

Kerajaan ini kini terletak di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dan memiliki 5 ke-fetor-an, yakni Sukun, Meubesi (Maubes), Oelolok, Ainan, dan Tafiniman[263]. Berdasarkan catatan Pigafetta, penjelajah Portugis, Insana selaku salah satu dari empat kerajaan penting di Timor telah ada semenjak kurang lebih tahun 1522. Mena sebagai pelabuhan perdagangan cendana dan lilin telah dikenal semenjak lama oleh bangsa China dan Portugis, sebagaimana yang diinformasikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Aleksander Usfinit. Menurut penuturan cerita rakyat, *atupas* (raja)

261. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 177.
262. Lihat *Memperkenalkan Kota Kupang* halaman 40.
263. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 16. Menurut informasi dari Yang Mulia Bapak Dr. Aleksander Usfinit, ke-fetor-an di Insana adalah Subun, Maubesi, Oelolok, Ainan, dan Fafinesu.

pertama Insana adalah Usi Nenomnanu yang tinggal di puncak bukit Maubes. Konon, ketika raja mengadakan perjalanan mengelilingi Pulau Timor guna mencari pusat pulau tersebut, ia meninggalkan adiknya bernama Luni Mnasi di Gunung Maubes. Namun, pada saat itulah negerinya ditaklukkan oleh Sonbai. Karenanya, Luni Mnasi melarikan diri dan bersembunyi di sebuah lubang batu Bukit Maubes (Kubat Maubes). Raja Sonbai ternyata bertindak kejam dan sewenang-sewenang. Setiap tahun, tatkala orang mempersembahkan upeti kepadanya, ia mengorbankan manusia. Raja Insana tidak tinggal diam menyaksikan hal ini. Ia memerintahkan para *meo* (panglima perang) dan amaf pengikutnya mengusir Raja Sonbai. Perlawanan ini berhasil dan Raja Sonbai terbunuh serta dimakamkan di Keun (Baki Sonbai).

Menurut cerita rakyat, dalam perjalanannya mencari pusat Pulau Timor, Usi Nenomnanu di setiap daerah yang disinggahinya membuat apa yang disebut "timbangan wilayah."[264] Ternyata timbangan ini baru seimbang di Maubes, yakni antara poros utara, selatan, barat, dan timur. Oleh karenanya, Maubes ditetapkan sebagai pusat seluruh Pulau Timor (disebut *Paha Usan* atau *Paha Tnanan*). Secara simbolis lalu didirikan istana (*sonaf*) di Maubes dengan dua buah tiang di sebelah timur dan baratnya, yang masing-masing mewakili liurai beserta *sonbai*. Kemudian di atas kedua tiang tersebut didirikan semacam atap sebagai penghubung antar keduanya. Pencarian pusat Pulau Timor ini erat kaitannya dengan kosmologi yang diyakini rakyat bahwa raja dianggap sebagai penjelmaan atau keturunan dewa yang bertahta di pusat Pulau Timor.

264. Lihat *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 80.



Berfoto bersama Yang Mulia Bapak Dr. Aleksander Usfinit
Foto koleksi pribadi.

Raja Usi Nenomnanu mempunyai tiga orang putra dan seorang putri, yang masing-masing bernama Maklafu Nenobahlasi (Malafu Neno), Atolan Neno, Pou Neno, dan Bee Pala Finit. Bila dicermati, terdapat cerita rakyat atau legenda seputar tokoh Usi Nenomnanu ini, sebagaimana yang telah diulas di bagian "Kisah Maromak Oan di Kerajaan Wesei Wehali". Menurut salah satu legenda rakyat, Usi Menomnanu ini adalah putra Bria Bauk dengan Hoar Diak Maklakan (Hoar Maromak). Ibunya merupakan *maromak oan* pertama, sedangkan putrinya, Bee Pala Finit, kelak diangkat sebagai Maromak Oan V. Meskipun demikian, bila menilik masa pemerintahan putranya, Maklafu Nenobahlasi, yakni antara 1858 hingga 1908, Usi Nenomnanu diperkirakan hidup pada awal hingga pertengahan abad 19 sehingga legenda di atas diragukan kebenarannya. Selain itu, menurut berita Portugis, Insana telah ada semenjak 1522. Karenanya, Usi Nenomnanu tentunya bukan rajanya yang pertama. Meskipun demikian, barangkali pada masa Raja Usi Nenomnanu itu Insana berkembang kembali setelah Raja Sonbai yang kejam dibunuh, dimana menurut sumber-sumber Barat peristiwa ini terjadi pada 1781.

b. Para *Atupas* di Insana

Maklafu[265] Nenobahlasi (1858–1908) menggantikan ayahnya memerintah negeri ini sebagai *atupas* kedua. Ia tercatat menandatangani kontrak politik pada 22 September 1879. Sebagai penggantinya, diangkat Atolan Baaf (Tuamoko), putra Atolan Neno sebagai *atupas* ketiga. Pada masanya, pemerintahan eksekutif dipegang oleh Us Taolin. *Atupas* keempat adalah Malafu Tasaeb, putra Malafu Neno dengan Bee Sani Kono. Dia digantikan oleh putranya bernama Tasaeb Malafu (1934–1936) selaku *atupas* kelima. Tongkat pewarisan berikutnya jatuh pada Atolan Malafu atau Ial Uala (1936–1938), putra Malafu Tasaeb, selaku *atupas* keenam. *Atupas* berikutnya atau yang ketujuh adalah Malafu Atolan atau Hae Koto (1938–1940). Dia adalah putra Atolan Baaf (Tuamoko). Jabatan sebagai *atupas* beralih kembali pada Afu Tasaeb (1940–1942), putra Tasaeb Malafu, selaku atupas kedelapan. Pada zamannya Jepang masuk ke Pulau Timor. *Atupas* kesembilan adalah Haki Atolan (1942–1958), putra Atolan Malafu. Kedudukannya sebagai *atupas* dilanjutkan oleh Atolan Malafu, putra Malafu Atolan (Hae Koto), selaku *atupas* kesepuluh. Seterusnya yang menjadi *atupas* kesebelas adalah Atolan Tasaeb (1982–1999).



Mahkota-mahkota Kerajaan Insana
Sumber: Yang Mulia Bapak Dr. Alexander Usfinit

c. Para Penguasa Eksekutif di Insana

Para *atupas* berdasarkan tradisi tidak pernah terlibat aktif dalam pemerintahan. Oleh karenanya, pelaksanaan pemerintahan sehari-hari Insana diserahkan pada *kolne bala* yang berasal dari salah satu suku besar dalam (Kolne, Abainpah, Manikin, dan Maun Naijuf). Dengan kata lain, *kolne bala* adalah pemegang kekuasaan eksekutif di Insana. Kendati demikian, pemangku kekuasaan eksekutif ini pernah berganti

265. Dalam buku *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 288, namanya dieja Malavoe.

beberapa kali. Antara tahun 1907–1913, yang menjabat sebagai *kolne bala* adalah Tanesib Ela Taiboko. Ketika Us Taolin saat itu yang bernama Fatin Taolin bersama *kolne bala* diutus menemui wakil pemerintah kolonial Belanda di Atapupu pada 1912, Taolin mengaku bahwa dirinya adalah Raja Insana. Oleh karenanya, kontrolir Belanda kemudian mengukuhkan dirinya sebagai Raja Insana, yang memerintah antara tahun 1913–1915[266]. Semenjak saat itu, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Us Taolin.

Ia kemudian digantikan oleh Raja Kahlasi Taolin (1915–1933), yang dikukuhkan kedudukannya dengan *Besluit* no. 34, tertanggal 21 Agustus 1916. *Buku Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 288, mengeja namanya sebagai Uis Kaha Lasi Taolin dan dia tercatat menandatangani kontrak politik pada 24 Desember 1916. Setelah itu, selama setahun (1933–1934), kekuasaan eksekutif Insana dijalankan oleh suatu komisi bersama (*Commisie Zeflfbestuurde*) antara Miomafo dan Biboki. Kekuasaan eksekutif kemudian dikembalikan pada *kolne bala* semasa pemerintahan *Atupas* Tasaeb Malafu (1934–1936) dan Afu Tasaeb (1936–1938).



Yang Mulia Raja Theodorus Lorenzo Taolin (kanan) dari Kerajaan Insana
bersama Yang Mulia Sultan Indera Rahimsyah dari Kesultanan Indrapura
saat berlangsungnya Silatnas Raja/ Sultan Nusantara di Bandung tanggal 25-26 Juni 2011
Foto koleksi pribadi

Dominikus Taolin diberi gelar *kolne* dan menjadi pemegang kekuasaan eksekutif antara 1938–1940. Semasa *Atupas* Nicolas Malafu Atolan (1940–1942), *kolne bala* kembali memegang kekuasaan eksekutif. Setelah itu, L.A.N. Taolin (Lorencius Taolin) menduduki jabatan sebagai *kolne* (1942–1970). Pada 1946, dia meminta dukungan adat agar diangkat sebagai kepala adat. L.A.N. Taolin kemudian menjadi raja bagi

266. Lihat buku *Maubes Insana*, halaman 49.

Swapraja Insana semasa era kemerdekaan hingga berakhirnya status swapraja di tahun 1962. Sejak saat itu, Insana berubah menjadi kecamatan. Raja Lorencius berjasa memajukan pertanian di daerahnya dengan membentuk Perserikatan Kemakmuran Insana[267].

d. Struktur Pemerintahan Kerajaan Insana

Raja tertinggi Kerajaan Insana yang bergelar *atupas*, tidak aktif memerintah dan biasanya hanya hadir saat upacara-upacara ritual saja. Ia juga dikenal sebagai Usif Us Finit. Selain itu, seorang *atupas* tidak banyak berbicara dan hanya memberikan petuah saat diminta saja. Sementara itu, pelaksana pemerintahan (jalur pemerintahan eksekutif) dijalankan oleh empat raja suku Besar Dalam (usif Besar Dalam), yakni Kolne, Abainpah, Manikin, dan Maun Naijuf. Tugas usif besar dalam ini adalah mengatur para amaf (tetua suku atau kepala desa) serta menjadi penghubung dengan para usif besar luar, yang terdiri dari Us Fal, Us Taolin, Us Pupu, dan Us Tonbes. Mereka merupakan penguasa empat penjuru Kerajaan Insana, yakni:

- Kawasan utara di bawah Us Pupu.
- Kawasan selatan di bawah Us Taolin.
- Kawasan barat di bawah Us Fai
- Kawasan timur di bawah Us Taolin.

Pada mulanya, Us Pupu berkuasa di sebelah selatan, tetapi belakangan ia pindah ke utara dan bergabung dengan Us Tonbes. Kawasan selatan kemudian berada langsung di bawah pengawasan *atupas*. Menurut informasi dari Yang Mulia Bapak Dr. Aleksander Usfinit, yang benar adalah Us Fal dan bukannya Us Fai. Belakangan Us Fal meninggalkan kawasan barat sehingga *atupas* kemudian berpindah ke barat. Kawasan selatan yang sebelumnya berada di bawah pengawasan *atupas* lalu diserahkan kepada Anapah. Pada perkembangan selanjutnya kawasan setalan ini beralih lagi kepada Us Taolin.

Para usif memerintah daerah mereka secara otonom. Setelah Belanda masuk ke Pulau Timor, dibentuklah berbagai distrik yang diubah kembali menjadi ke-fetor-an. Masing-masing ke-fetor-an ini dipimpin oleh seorang usif yang bergelar fetor. Dalam menjalankan tugasnya, usif besar luar dibantu oleh empat suku besar, yakni

- Banusu Luar bagi kawasan utara.

267. Lihat *Timor Pulau Gunung Fatuleu "Batu Keramat"*, halaman 85.

- Saijao bagi kawasan barat.
- Taboy bagi kawasan selatan.
- Hitu bagi kawasan timur.

Selain itu, masih dikenal pula jenis-jenis usif (raja muda) lainnya, seperti usif menetap (*usif pah bal ina*), yakni usif yang berdiam lebih dahulu di kerajaan Insana (terdiri dari Balnai, Honnai, Teufnia, Kisnai, dan Teunnai), dimana peran mereka tidak begitu besar; usif tengah atau *usif tnana* (terdiri dari Ataupah, Anapah, Afanpah, dan Abainpah), yang menjadi perantara antara usif besar dalam dan usif besar luar; usif kecil (*uis a paltina*, terdiri dari Us Subun di utara, Laemfatun di Maubes, Tneklau di barat, dan Noe Tnana di timur), yakni keturunan raja-raja yang berdiam di lingkungan amaf, di mana mereka mendirikan tempat kediamannya sendiri karena pindah dari tempat lain; usif pendatang (*uis amnemat*), yang berasal dari luar Kerajaan Insana; usif penerang (*uis pauk pinfina*), yang bertugas membawa obor dan penunjuk jalan sewaktu para usif mengadakan perjalanan mengunjungi wilayah-wilayah kerajaan; dan usif sehari (*Uis nenon mese*), yang salah satu tugasnya adalah membawa pesan dari *atupas* kepada para usif dan amaf, umpamanya agar mereka semua berkumpul karena hendak diadakan upacara adat.

Berikut ini masih ada sumber lain yang memerinci tugas para usif dan amaf di Insana[268]. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, *atupas* dibantu oleh usif besar luar dan usif besar dalam. Berikut ini adalah perincian tugas-tugas mereka:

- *Usif mone* (usif besar luar) yakni kaum bangsawan yang mengurusi masalah pemerintahan di luar istana, yakni membantu raja dalam mengurus kepentingan umum serta menjadi penghubung antara raja dengan amaf dan *toana*. Ia juga berwenang mengangkat atau memberhentikan petugas pertanahan (*tobe*).
- *Usif nanan* (usif besar dalam) adalah kaum bangsawan yang menangani masalah-masalah yang berkaitan di dalam istana. Tugasnya adalah menyampaikan perintah raja kepada *usif mone* dan sebaliknya menyampaikan laporan *usif mone* kepada raja. *Usif nanan* juga bertugas menyampaikan undangan pada para *usif mone* bila ada pertemuan di istana.

Di bawahnya masih terdapat pejabat yang disebut amaf, yakni para kepala suku; sebagaimana halnya usif, pejabat ini juga terbagi dua:

268. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 14–15.

- *Amaf mone*, yang merupakan pembantu *usif none*, umpamanya dalam pengumpulan hasil bumi sebagai pajak bagi raja, yang disebut *mausufa*, dari rakyat. Untuk selanjutnya hasil bumi itu akan diserahkan kepada raja melalui *usif nanan*. Ia bertugas pula menerima serta melaksanakan perintah raja yang diberikan melalui *usif nanan* dan *amaf nanan*. Selanjutnya ia melaporkan hasilnya kepada raja melalui *amaf nanan* dan *usif nanan*.
- *Amaf nanan* adalah kepala suku yang bertugas membantu *usif nanan* dalam menerima laporan dari *amaf mone* kepada raja melalui *usif nanan*. Ia juga menerima dan menyampaikan perintah raja melalui *usif nanan* kepada rakyat. Selain itu, *amaf nanan* bertugas sebagai pembawa undangan pada *amaf mone* bila ada pertemuan atau pesta di istana.

Meskipun terdapat perbedaan, jabatan *usif mone* dan *usif nanan* dipegang oleh satu orang, dan begitu pula dengan *amaf nanan* beserta *amaf mone*. Di samping jabatan-jabatan di atas, masih dikenal pula jabatan panglima perang atau hulubalang yang disebut *meo* dan juru pertanahan yang juga disebut *tobe*. Ia diangkat dan diberhentikan oleh *usif mone*. Berdasarkan informasi tambahan yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Aleksander Usfinit, *meo* dan *tobe* merupakan suku-suku tersendiri sehingga yang menggantikan adalah keturunan berasal dari kalangan mereka sendiri juga. *Usif mone* hanya menyaksikan pengukuhannya saja dan bukan mengangkat atau memberhentikan.

XIV. JENILU

Jenilu merupakan salah satu kerajaan di kawasan Belu yang terletak di pantai utara. Semua negeri ini terdiri dari dua bagian yang berdiri sendiri-sendiri, yakni yang berada di daerah pantai dan pegunungan. Negeri-negeri yang berada di kawasan pegunungan disebut *Datu Hat* (Keempat Datu), sedangkan yang berada di kawasan pantai terdiri dari tujuh negeri kecil dan dinamakan *Datu Hitu* (Ketujuh Datu). Masing-masing kawasan tersebut memiliki penguasanya sendiri. Terdapat berbagai sumber mengenai asal muasal raja-raja Jenilu. Ada yang menyebutkan bahwa mereka berasal dari Malaka atau penduduk pegunungan yang kemudian turun ke pantai. Jenilu pernah diperintah oleh raja wanita bernama Petronella da Costa (1879–1899)[269] yang menikah dengan Raja Rinoe Misek atau Alexander da Costa (1880–1900) dari

269. Lihat http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1870.htm (diunduh 24 September 2009).

Lidak. Putri mereka juga dinamai Petronella da Costa dan menjadi ratu di Lidak menggantikan ayahnya. Raja Jenilu berikutnya adalah Don Josef da Costa yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 31 Juli 1913. Setahun kemudian, atau tepatnya tanggal 7 Oktober 1914, Belanda mengeluarkan ketetapan yang menggabungkan Naitimu dan Lidak dengan Jenilu sebagai suatu kerajaan baru yang diberi nama Kakuluk Mesak di bawah Raja Don Josef da Costa dari Jenilu.



Ratu Maria da Costa
Sumber: Mr. Donald Pietro Tick

XV. KUPANG

Kerajaan atau Swapraja Kupang berdiri pada 1917 dan terbentuk dari penyatuan beberapa kerajaan kecil seperti Amabi, Funay, Sonbai Kecil, dan TaEbenu. Sebagai rajanya yang pertama, diangkat Raja TaEbenu bernama Daud Hanoch Obed Tanof. Ia hanya sempat memerintah setahun saja, yakni dari 1917–1918. Setelah mangkat, dia digantikan oleh Nicolaas Isu Nisnoni, yang sebelumnya telah menjabat sebagai Raja Sonbai Kecil semenjak 1911. Dia merupakan raja yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Hal ini terbukti dengan kedudukannya sebagai ketua Badan Pengoeroes Djoema'at Masehi Timor Selatan. Adapun susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut[270]:

Ketua : Nicolaas Isu Nisnoni

270. Lihat *Kupang dari Masa ke Masa*, halaman 81.

Wakil ketua	: J.J. Arnoldus (pendeta jemaat Kota Kupang)
Sekretaris	: E.F. Tokoh (pendeta jemaat Oepura)
Komisi I	: H. Oematan (penatua Kuanino)
Komisi II	: A.A. Caffin (penatua Oeba)
Komisi III	: J.A. Romate (penatua Oeba)
Komisi IV	: S. Saubaki
Komisi V	: J. Padja
Komisi VI	: Ch. Leonal (penatua Oebufu)

Bersamaan dengan masa pemerintahannya, masuklah bala tentara Jepang ke Timor yang mengakibatkan penderitaan di kalangan rakyat. Oleh karena itu, pendeta J.J. Arnoldus menyebut tahun 1944 sebagai "Tahun Air Mata."[271]



Foto bersama Yang Mulia Raja Don Leopold Nisnoni saat berlangsungnya Silatnas Raja/Sultan Nusantara II tanggal 25-26 Juni 2011 di Bandung (foto koleksi pribadi Ivan Taniputra)

Raja Nicolaas Isu Nisnoni mangkat pada 1945 dan digantikan oleh putranya, Alfonsus Nisnoni (1945–1955). Istrinya, Ibu A. Nisnoni Amalo Jawa, merupakan tokoh kesenian dan kebudayaan Timor yang terpilih sebagai ibu teladan tingkat nasional pada 1975[272]. Semasa perjuangan kemerdekaan, raja yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah OSVIA (*Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren*) Makassar

271. Lihat Kupang dari Masa ke Masa, halaman 81.
272. Lihat *Timor Pulau Gunung Fatuleu "Batu Keramat"*, halaman 96.

ini terkenal dengan sikap nasionalisme yang diwujudkan dengan menjadi anggota PDI. Bahkan dia diangkat sebagai ketua PDI cabang Kupang, dengan Titus Uly sebagai wakilnya. Partai ini memang dengan gigih mengusung cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pewaris Kerajaan Kupang dewasa ini adalah Bapak Don Leopold Nisnoni, yakni semenjak ayanya, Alfonsus Nisnoni, wafat pada 1992. Selain itu, dia juga menjadi Liurai Sonbai Kecil. Raja yang dilahirkan pada 1936 ini pernah menempuh pendidikan di Negeri Belanda sejak berusia 12 tahun sehingga memiliki wawasan yang maju.

XVI. LAKEKUN

Lakenun merupakan kepangeranan kecil di Timor yang pernah diperintah oleh Putri Banu Lorok[273]. Ia menikah dengan Tan Seran dan setelah itu menikah lagi dengan Raja Besin dari Dirma. Banu Lorok digantikan oleh putrinya bernama Balok Lorok. Raja Lakekun berikutnya, Hoar Teti, adalah juga seorang wanita. Dia menikah dengan Lebo, keponakan Teti Lorok, ayahnya. Dengan demikian, secara berturut-turut Lakekun diperintah oleh tiga orang wanita. Penggantinya adalah Moru Lebok. Cucu Hoar Teti yang bernama Tahu Leki lalu memerintah Lakekun hingga 1916.

XVII. LAMAKNEN

Kesatuan adat Lamaknen dengan para penguasanya bergelar *loro* ini kini terletak di Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Lamaknen merupakan federasi beberapa kepangeranan yang lebih kecil, yakni Makir, Lamaksanoeloe, Kewar, Leowaloe, Loonoena, Noealain, Lakmaras dan Dirun. Para penguasa tertinggi Lamakmen pernah dipegang oleh Raja Kewar dan Lakmaras. Secara tradisional, raja-raja Lakmaras merupakan tokoh pemersatu dan bersifat simbolis, sementara itu kekuasaan pemerintahan secara aktif dipegang oleh raja-raja Kewar. Setelah terbentuknya kerajaan ini, para anggota keluarga terkemuka memilih salah seorang di antara mereka yang paling layak memimpin. Akhirnya, Loro Luan Lesu terpilih sebagai raja yang pertama.

Menurut legenda, leluhur para penguasa Lamakmen adalah delapan orang yang turun dari kayangan, yakni Lutarato Jopata, Ikun Ro Bulan, Tonbaq Tonwai, Lakuloq Samoro, Oburo Marobo, Sibiri Kailau, Siataq Mauhalea, dan Lakan Oan Roman.

273. Lihat http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1800.htm (diunduh tanggal 24 September 2009).

Kedelapan orang ini (*Esen Hitu As Hitu*) turun di daerah Siawa Mugiwa (*Jigil Hitu Mua Hitu*). Mereka kemudian membuka perkebunan dan beranak pinak di sana. Selanjutnya, dikisahkan bahwa mereka melanjutkan perjalanannya ke Pan Lubu Muk Lubu, Lubu Rato Salower, dan Rai Lubu Rai Loha. Para leluhur ini berkenalan dengan penduduk asli kawasan tersebut dan tinggal untuk sementara waktu di sana. Ketika melihat sebuah kapal yang disebut *biduk ro*, para leluhur memutuskan mengadakan pelayaran. Ternyata perahu mereka itu hancur dan kandas karena diterjang oleh badai bernama Tatu Luruq Maubesi. Mereka lalu pergi ke Sinawa Batola dan mengajak beberapa penduduk setempat membuat perahu yang baru. Setelah pembuatan kapal dapat diselesaikan, pelayaran dilanjutkan hingga ke kawasan Sina Mutin Malaka dan tempat-tempat lainnya, sebelum akhirnya mereka kembali ke Timor serta menetap di Lamakmen.

XVIII. LIDAK

Lidak merupakan salah satu kerajaan yang berada di kawasan Belu. Berdasarkan legenda dan cerita rakyat, cikal bakal Kerajaan Lidak adalah seseorang bernama Dasi Halek, yang berasal dari Wesei Wehali. Saat ia pertama kali tiba di Lidak, kawasan tersebut telah didiami oleh penduduk asli dibawah kepemimpinan seorang kepala suku bernama Neno Bot. Ternyata penduduk asli Lidak kurang menyukai kehadiran mereka. Oleh karenanya, Neno Bot menantang Dasi Halek mengadu kesaktian dan kepandaiannya dalam melempar batu. Konon, warga asli Lidak memiliki keterampilan dalam menggunakan batu sebagai senjata mematikan. Lontaran batu mereka selalu tepat sasaran dan tak jarang membawa maut bagi lawannya. Akhirnya, terjadi perang tanding antara pengikut Dasi Halek dengan penduduk asli kawasan tersebut. Kaum pendatang dari Wesei Wehali yang dipimpin oleh Dasi Halek sanggup memenangkan peperangan itu dan mendesak penduduk asli ke arah barat. Kendati demikian, menurut sumber lain, pendiri Kerajaan Lidak adalah Lidak Mauk, putra Taek Lakaan dan Balok Loa Lorok, yang meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke Lidak.

Tokoh penentang kolonialisme yang berasal dari Lidak adalah seorang *meo* (panglima perang) bernama Moruk Pah Sunan. Ia menerbitkan pemberontakan pada 1857. Belanda menurunkan pasukan untuk memadamkannya dan berhasil menewaskan Moruk Pah Sunan sehingga berakhir pulalah pergolakan ini. Bara kebencian terhadap penjajahan ternyata tidak kunjung padam hingga abad 20. Lidak

kemudian diperintah oleh Raja Rinoe Misek atau Alexander da Costa (1880–1900). Pada 1913, raja wanita Lidak yang bernama Petronela da Costa da Ornay (1900–1913) mengobarkan perlawanan kembali terhadap Belanda dengan dukungan para panglima perangnya, yakni Lau Siberu, Bauk Afena, dan Kehi Banani. Perlawanan ini dapat ditumpas oleh Belanda dan Ratu Petronela da Costa da Ornay meminta berhenti sebagai penguasa Lidak pada 25 Maret 1913. Kerajaan Lidak lalu dihapuskan dan digabungkan dengan Jenilu guna membentuk kerajaan baru yang bernama Kakuluk Mesak.

XIX. LIFAU

Raja Lifau bernama Litelnoni tercatat menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756.[274]

XX. MALAKA

Malaka adalah kerajaan atau swapraja yang baru terbentuk pada 1916. Cikal bakalnya adalah Kerajaan Wesei Wehali. Rencana pembentukannya telah diawali setahun sebelumnya, yakni ketika Asisten Residen Cramberg mengadakan rapat di Besikama pada 29 Mei 1915, yang dihadiri oleh Baria Nahak, raja tertinggi atau *maromak oan* Wehali dan Liurai Tei Seran dari Fatuaruin serta para kepala Swapraja Wehali, Wewiku, Haitimuk, Fatuaruin, Lakekun, Dirma, dan Mandeu. Berdasarkan kesepakatan tersebut, mereka sepakat menyatukan diri dalam suatu swapraja baru yang disebut Malaka. Pada 7 Januari 1916, residen Timor mengajukan surat usulan pembentukan Swapraja Malaka.

Usulan ini disetujui dengan keluarnya *Beslit Gubernermen No. 22 Stbl. 1916 no. 372*. Tei Seran, Liurai Fatuaruin, diangkat sebagai raja atau kepala swapraja Malaka pertama. Belanda melakukan reorganisasi wilayah Timor dan memasukkan distrik Tamiru Ailala ke dalam wilayah Malaka. Secara keseluruhan terdapat 6 distrik dan 9 *onderdistrik* di Malaka, yakni (1) Wehali; (2) Wewiku, yang terdiri dari onderdistrik Umalor, Rabasa, dan Wederok; (3) Hatimuk; (4) Lakekun, yang terbagi menjadi onderdistrik Alas dan Litamali; (5) Dirma; (6) Fatuaruin, yang terdiri dari onderdistrik Mandeu dan Kusa.

274. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 53.

Karena Liurai Tei Seran telah lanjut usianya, Seran Asit Fatin diangkat sebagai pembantu Raja Malaka pada 1 Agustus 1920. Raja Malaka pertama ini wafat pada 3 September 1922 dan digantikan oleh putranya, Antonius Tefa Tei Seran. Sementara itu, Liurai Seran Asit Fatin menjadi wakil Raja Malaka. Dua tahun kemudian, atau tepatnya tahun 1924, Belanda menghapuskan Swapraja Malaka dan menggabungkannya dengan Swaparaja Belu Tasifeto membentuk Swapraja Belu.

XXI. MIOMAFFO (AMAKONO)

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Miomaffo

Kini terletak di Kecamatan Miomaffo, Kabupaten Timor Tengah Utara. Miomaffo terbagi atas tujuh ke-usif-an atau ke-fetor-an (daerah yang dipimpin oleh wakil raja), yakni NoE Toko, Aplal, Naktimu, Bekomi, Tunbaba, Neumuti, dan Minulak[275]. Sesudah pemberontakan Bijeli pada 1823, Belanda menamai wilayah ini Amakono[276]. Leluhur Kerajaan Miomaffo berasal dari Belu Selatan atau Kerajaan Wehali. A. Haga dalam tulisannya menyebutkan mengenai Raja Amakono bernama Don Bastiano, yang digelari Keizer van Amacono. Ia tewas bersama Letnan Jenderal Gaspar da Costa saat meletusnya Perang Penfui. Putranya bernama Don Bernardo ditawan oleh Belanda di Kupang hingga tahun 1756[277]. Don Bernardo lalu diangkat sebagai Raja Amokono dan tercatat menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756.

Menurut legenda, Kono, raja pertama Miomaffo merupakan salah satu adik Sonbai. Sebelumnya, Kono bersama Oematan merupakan dua orang fetor yang membantu Sonbai. Setelah Sonbai terusir dari Bijeli, Kono yang dianggap lebih tua dibanding Oematan menghadap Belanda di Kupang dan kembali dengan membawa bendera Belanda beserta sebatang tongkat berkepala perak. Kono dan Oematan lalu menghimpun semua amaf dan temukung serta menjelaskan perkembangan yang terjadi. Sumber lain menyebutkan mengenai raja-raja Miomaffo yang bernama Don Fransisco de Taynube (± 1702–1704), Atopa (± 1722), dan Oenunu Amakono (± 1767).

Kerajaan ini seterusnya diperintah Manubait Lemon, yang digantikan oleh Raja Tokono (1873–1904, atau sumber lain menyebutkan pada 1832–1879) dan Ui Nono

275. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 16.
276. Lihat *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor*, halaman 52.
277. Lihat Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor, halaman 53, karya A. Haga itu berjudul *De Mardijkers van Timor* (1882).

Kono I (1879–1902). Raja Miomaffo berikutnya yang bernama Ui Nono Kono II (1902–1920) tercatat menandatangani *Korte Verklaring*, yakni masing-masing pada 1 Juli 1908 dan 10 Oktober 1917. Selanjutnya, pada 7 Maret 1920 ditandatangani *Korte Verklaring* oleh Raja Kefi Lelan (1920–1934). Semasa pendudukan Jepang yang berkuasa di Miomaffo adalah Raja Sobe Senok[278] (1934–1947). Dia digantikan oleh Raja Kasper Afoan Kono (1947–1962) yang memerintah hingga berakhirnya masa swapraja di Indonesia.



Raja Don Basenti da Costa (1894–1914)
Sumber: Mr. Donald Pietro Tick

b. Sistem Pemerintahan Kerajaan Miomaffo

Terdapat dua orang raja di pusat kerajaan, yakni raja tertinggi yang dianggap sakral bergelar *atupas* dan tinggal di bagian barat dan raja pelaksana pemerintahan bergelar *us bala* yang tinggal di sebelah timur. Pada istana kerajaan ini, yang disebut Sonaf Kono terdapat dua pintu, yang satu diperuntukkan sebagai tempat keluar masuknya kaum pria dan disebut *eno atoni nesu atoni*, sedangkan yang lainnya dipergunakan sebagai tempat keluar masuknya kaum wanita dan disebut *eno bifel nesu bifel*. Pintu bagi kaum pria itu terletak di dinding sebelah tenggara dan dijaga seorang petugas bernama *sonlai mone*, sedangkan pintu bagi kaum wanita terletak di dekat bagian utara dinding istana dan dijaga petugas bernama *sonlai feto*. Tugas *sonlai mone* dan *sonlai feto* adalah menerima upeti yang hendak dipersembahkan pada *atupas* serta mempersilakan masuk para tamu. Selama upeti para tamu atau amaf (kepala suku atau kepala desa) belum diperiksa, benda-benda yang belum dipersembahkan tersebut tidak akan dibawa masuk.

Masih ada pejabat penting kerajaan lainnya, yang berfungsi sebagai juru bicara dengan gelar *malefa*. Biasanya mereka masing-masing berasal dari suku Hakase dan Faimnasi. Apabila upeti tidak dipersembahkan, salah seorang dari mereka akan pergi menyelidiki, sedangkan yang lainnya tetap tinggal menjaga istana serta menerima

278. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 29.

tamu yang datang. Selain tugas-tugas tersebut, para *malefa* ini juga berfungsi sebagai penasihat raja. Sebagai penjaga pertahanan kerajaan, terdapat *us thaal* yang berkedudukan di pintu gerbang utara dengan didukung empat suku (Natun, Tamelak, Naki, dan Nali) dan *us ulin* di pintu selatan yang didukung oleh empat suku pula (Tati, Taek, Luin, dan Tindja'as).

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, menurut buku *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 16, ke-fetor-an di Miomaffo adalah NoE Toko, Aplal, Naktimu, Bekomi, Tunbaba, Neumuti, dan Minulak. Sementara itu, buku *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, halaman 91 menyebutkan bahwa di Miomaffo terdapat ke-fetor-an Ablal, Naktimun, Bikomi, Tunbaba, Nilulat, Manamas, dan Noemuti. Setelah membandingkan keduanya, Aplal tampaknya merupakan variasi penulisan bagi Ablal, Naktimu bagi Naktimun, Bekomi bagi Bikomi, Neumuti bagi Noemuti, dan Minulak bagi Nilulat. Dengan demikian, NoE Toko kemungkinan dapat disamakan dengan Manamas. Ke-fetor-an Manamas sendiri baru dibentuk tahun 1911. Noemuti baru masuk ke dalam Miomaffo pada 1916.

XXII. MOLO (MOLLO)

Kerajaan Mollo terbagi menjadi lima ke-fetor-an, yakni Mutis, Nunbena, Netpala, Bijeli I, dan Bijeli II. Cikal bakal kerajaan ini adalah Kerajaan Sonbai (Sonbai Besar). Kerajaan Mollo diperintah oleh keluarga Oematan yang berasal dari Belu (Loro Haitimuk). Leluhur mereka bernama Bere Mau, mempunyai tiga orang anak, yakni Serang Bere, Fahik Bere, dan Tahuk Bere. Putranya bernama Tahuk Bere inilah yang menurunkan keluarga Oematan[279]. Konon, Fahik Bere dan Tahuk Bere tiba di daerah kekuasaan Kune. Mereka diuji kemampuannya oleh penguasa kawasan tersebut untuk mencari sumber air. Fahik Bere ternyata gagal dalam ujian tersebut karena melewati begitu saja sumber air yang dimaksud. Itulah sebabnya, ia lantas dijuluki Kono. Sementara itu, Tahuk Bere, adiknya berhasil menemukan *oematan* (sumber air) tersebut, namanya diganti menjadi Ifo Oematan oleh Kune. Selanjutnya silsilah keluarga penguasa Oematan adalah Ifo Oematan, To Oematan, Sani Oematan, Nisnoni Oematan, Neno Oematan, Kono Oematan, Tau Pah Oematan, To Oematan, To Oematan (To Tunbesi), Tabelak Oematan, To Oematan, dan Tahukemtasi atau To Lukemtasa (To Lukomtasa).

279. Lihat *Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan*, halaman 49.

Setelah Belanda mengalahkan Raja Sobe Sonbai III, mereka menduduki Kapan yang menjadi bagian ke-fetor-an Netpala. Pada 2 Juli 1908, ditandatanganilah *Korte Verklaring* oleh para pemuka dari kawasan ini, yakni To Lukemtasa, fetor Netpala; Hoekoe Oematan, fetor Besiang; Bai Oematan, fetor Nunbena; Tasi Bait, temukung Baki Bait; En Toto, temukung Bossen; dan Oni Boko, temukung Nunbena. Belanda juga menyebut swaparaja ini sebagai Swapraja Oematan[280]. Kendati demikian keluarga Oematan yang menjadi fetor Netpala sesungguhnya adalah pembantu utama raja-raja Sonbai dalam mengkoordinasi para amaf di sebelah barat kerajaannya. Ia tidak pernah bertindak atas namanya sendiri seperti raja-raja di Amanuban, Amarasi, atau Amanatun.

Fetor Netpala, yakni Tahukemtasi atao To Lukemtasa diangkat oleh Belanda menjadi Raja Mollo pertama (1907–1915). Karena tak mempunyai keturunan, ia mengangkat Lay Kun Seong atau Lay Akun, putra seorang pedagang keturunan China bernama Lay Djing Seong dengan wanita Timor bernama Bi Eko Pat sebagai anaknya. Pada 1915, Belanda mengangkat putra angkat fetor Netpala tersebut sebagai penguasa kerajaan atau swaparaja baru yang disebut Mollo dengan gelar Raja Tabelak Oematan atau Willem Frederik Hendrik (W.F.H.) Oematan (1915–1930)[281]. Raja baru ini berkedudukan di Kapan Ajubaki. Ia adalah ayah Bupati W.C.H. Oematan, yang menjabat sebagai bupati kepala DATI II Kupang di Kupang. Raja Tabelak Oematan pernah menandatangani *Korte Verklaring* pada 14 Mei 1915. Pada 1918, Pendeta Loef membentuk sinode di Kapan. Selanjutnya, Raja Tabelak Oematan dibaptis ke dalam agama Kristen pada 1921[282].

280. Lihat *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor*, halaman 277.

281. Menurut buku *Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan*, halaman 60, para raja yang pernah memerntah Mollo adalah To Lukemtasa (To Oematan, 1907–1915), Tabelak Oematan atau Willem Frederik Hendrik (W.F.H.) Oematan (1915–1930), Kono Oematan (1929–1933), dan Tua Sonbai (1933–1958).

282. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 105.



***Sonaf* Mollo Raja Tabelak OEmatan**
Sumber: Yang Mulia Bapak Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek.S.T., M.T.

Raja W.F.H. Oematan kemudian digantikan oleh Tua Sonbai (1930–1959). Menurut A.D.M. Parera, leluhur tua Sonbai berasal dari salah satu cabang keturunan Sonbai di Kauniki[283]. Karena bertengkar dengan saudaranya, ia menyingkir ke Keon di perbatasan Insana Biboki. Rakyat kemudian mempersembahkan hasil panen mereka kepadanya. Namun, disebabkan kekejamannya, ia diusir oleh rakyat. Ia lantas pindah ke Miomaffo dan setelah itu berdiam di Mollo, yakni di Fatumnutu.

Dalam pertemuan para raja di SoE yang diadakan Belanda untuk mendiskreditkan Raja H.A. Koroh dari Amarasi, wakil rakyat Timor dalam Konferensi Malino yang menghendaki penyatuan dengan NKRI, Raja Tua Sonbai menyatakan dukungannya terhadap perjuangan H.A. Koroh beserta I.H. Doko. Sebelumnya, selama berhari-hari kontrolir Belanda di Mollo menghasut Raja Tua Sonbai ini agar turut mengecam H.A. Koroh dan I.H. Doko. Namun, setelah mendengarkan dengan seksama uraian Raja Amarasi tersebut, raja keturunan Dinasti Sonbai ini malah memberikan dukungannya, padahal Belanda mengharapkan raja yang buta huruf ini mendukung pembentukan NIT sebagai ajang melanggengkan penjajahan.

283. Lihat *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor*, halaman 255.

XXIII. NAITIMU

Naitimu merupakan salah satu kerajaan di Belu. Menurut cerita rakyat, kerajaan ini dibentuk oleh empat temukung, yakni

- Leki Fahik Katuas yang menjabat sebagai temukung Seo.
- Ek Fatu Tabene selaku temukung Maktaen.
- Kadus Nanaenoe selaku temukung Halilulik.
- Balau selaku temukung Haliserin.

Konon, nama Naitimu berasal dari nama tokoh yang pertama kali mendirikan kerajaan ini. Sementara itu, ada versi lain yang mengatakan bahwa nama kerajaan ini berasal dari seorang tokoh bernama Timu Mau dan Nae, anaknya.

Kerajaan Naitimu sendiri merupakan salah satu di antara empat serangkai kerajaan di Belu yang terdiri dari Lidak (Lida Mauk), Naitimu (Timu Mauk), Mandeu (Reu Mauk), dan Jenilu (Lilu Mauk). Keempat serangkai kerajaan ini bagaikan empat saudara yang hidup saling berdampingan satu sama lain. Secara pemerintahan, keempat kerajaan kecil ini tunduk pada Kerajaan Fialaran dan menganggapnya sebagai cikal bakal atau asal usul mereka. Salah satu legenda rakyat yang terdapat di Fialaran meriwayatkan bahwa pendiri Naitimu adalah Atok Lakaan. Ia menikah dengan Elok Loa Lorok lalu pindah ke bukit Nanaet Dunbesi dan mendirikan Kerajaan Naitimu.

Raja Kau Besin (Don Basenti da Costa, 1894–1914) berkuasa di Naitimu pada awal abad 20. Dia merupakan penguasa Naitimu yang menentang kolonialisme dan membangkitkan perlawanan terhadap penjajah pada 1913, dengan didukung para *meo* atau panglima perangnya yang masing-masing yang bernama Laboi, Fatukiik, Lao Siberu, Taek Labeo, Buk Afena, Bauk Natesa, Hoar Lauk, Frans Manek, dan Kehi Seran. Benteng pertahanan utama mereka terletak di Nanaet. Belanda menurunkan pasukannya dan menyerang Nanaet dalam dua gelombang, yakni pada 30 Januari 1913 dan 1 Februari 1913. Karena pengepungan yang berlarut-larut oleh pasukan Belanda, terjadi kekurangan air minum dan bahan makanan sehingga raja beserta panglima-panglima perangnya terpaksa menyerah pada Belanda. Beberapa orang *meo* diasingkan ke Jawa, sedangkan raja dipaksa menandatangani *Korte Verklaring*. Meskipun demikian, untuk mencegah agar tidak timbul pemberontakan lagi, Belanda

menghapuskan Kerajaan Naitimu dan menggabungkannya dengan Jenilu pada 1914 serta membentuk kerajaan baru bernama Kakuluk Mesak (Tiang Agung Tunggal).

XXIV. NOEMUTI

Noemuti merupakan suatu kepangeranan yang didirikan oleh kaum Portugis Hitam (campuran antara bangsa Portugis dan penduduk setempat). Pendirinya adalah Dominggus da Costa yang memindahkan pusat kekuasaanya ke Noemuti pada akhir abad 17. Dominggus da Costa sendiri adalah putra Mattheus da Costa, pemimpin pasukan Portugis yang berhasil mengalahkan VOC. Noemuti letaknya sangat strategis sehingga berkembang menjadi pusat perdagangan lilin dan cendana. Raja da Costa kemudian membangun istananya dekat sebuah gereja yang dinamakan *gre* (dari *igreja*– bahasa Portugis yang berarti gereja). Wilayah Noemuti dibagi menjadi dua distrik, yakni Noenakan, yang terletak di daerah hulu dan Noehain, yang terletak di daerah hilir. Sebagai kepala bagi masing-masing wilayah diangkatlah seorang *serjintomor* atau *sarentu* (dari bahasa Portugis *sargento-mor*). Selanjutnya, masing-masing distrik terbagi menjadi 8 desa yang dikepalai seorang kepala desa bergelar *mastre campo* atau *mastre posto*.

Pemerintah Portugis pernah melaporkan bahwa mereka tidak mempunyai kekuasaan di Noemuti dan daerah tersebut dikatakan kacau serta tidak ada hukum yang berlaku. Bahkan ada pula yang melaporkan bahwa Noemuti merupakan sarang penyamun. Di sana kerap terjadi pembunuhan, peperangan, dan kematian mendadak. Kekuasaan atas Noemuti juga kerap berpindah tangan. Pangeran Richard Luis Sonbai yang merupakan saudara Baob Sonbai dari Kerajaan Sonbai pernah ditempatkan sebagai penguasa Noemuti. Selanjutnya, sumber VOC menyebutkan bahwa antara 1749–1752, Noemuti diperintah oleh seseorang bernama Alfonso Salema. Setelah kematiannya, kekuasaan kembali pada keluarga da Costa. Selama beberapa tahun kemudian, Noemuti berada di bawah kekuasaan Amarasi. Antonio da Costa tampil sebagai penguasa Noemuti dari tahun 1761–1769. Ia merupakan saudara Dominggus da Costa II dan saudara Gaspar da Costa III.

XXV. SONBAI KECIL

Sonbai Kecil merupakan pecahan dari Kerajaan Sonbai. Konon Raja (Liurai) Sonbai berlaku sangat kejam kepada rakyatnya. Ia memiliki seorang adik bergelar Baki

(Pagar Pelindung bagi Raja) yang sangat dicintai oleh rakyat. Karena memiliki gigi emas, ia juga dinamai Nisnoni. Oleh karenanya, adik raja ini kemudian dikenal sebagai Baki Nisnoni. Ia mengetahui bahwa kakaknya, Liurai Sonbai, hendak mencelakai dirinya. Itulah sebabnya, Baki Nisnoni melarikan diri ke Mollo (Oematan). Oleh Raja Oematan yang bernama Saubaiki, ia disembunyikan dalam sebuah lubang batu. Selama dalam persembunyiannya itu, Baki Nisnoni hanya makan daun pepaya dan sayuran hutan lainnya sehingga dijuluki Nai Utan Nai Ut'menu. Karena khawatir persembunyian ini diketahui oleh Sonbai dan Portugis, Raja Oematan mengutus dua orang temukungnya bernama Nai Lasa dan Nai Bani mencari tempat di Kupang.

Mereka mendengar bahwa Raja Kupang kerap mengalami permasalahan dengan Portugis yang kejam dan membunuh banyak orang. Nai Lasa dan Nai Bani menawarkan bantuannya yang diterima baik oleh Raja Kupang. Dengan pengawalan Nai Lasa dan Nai Bani, berangkatlah Baki Nisnoni ke Kupang. Turut serta pula dua orang saudara perempuan Baki Nisnoni, yaitu Bi Sulat dan Bi Aulais. Raja Kupang menyambut rombongan Baki Nisnoni dan memberikan tempat kediaman bagi mereka di sebuah bukit sebelah barat bekas benteng Portugis. Raja Kupang sendiri yang saat itu bernama Epa bersiap memindahkan pusat pemerintahannya ke Pulau Semau. Baki Nisnoni beserta saudaranya kemudian dianugerahi tempat kedudukan di Bakunase dan Oepura. A.D.M. Parera mencatat bahwa kisah di atas mengandung berbagai kesalahan kronologis[284].

Rangkaian para penguasa yang memerintah di Sonbai Kecil selanjutnya adalah Ama Babo (1672–1699), Ama Baki (1699–1708), Noni (Bi) Sonbai (1682–1717), Bawa Leu (Bernardus, 1717–1727), Korneo Leu (1728–1748), Daniel Taffy (Taffij) Leu (1748–1760), Jakobus Albertus Taffy (Nube Tafin, 1760–1776), Baki Bena Sonbai (Bernardus Nisnoni, 1776–1794), Derk Hendrik Aulasi (1795–1797), Nube Bena Sonbai (Pieter Nisnoni, 1798–1820), Gerek Baki Sonbai (1810–1820), Isu Baki Nisnoni (1820–1830), Ote Nuben Nisnoni (1832), Babkas Nube Nisnoni (1842), Meis Babkas Nisnoni (1842–1860), Isu Meis Nisnoni (Pieter Messi Nisnoni, 1860–1874), Bastian Isu Nisnoni (1875–1890), Said Meis Nisnoni (1890–1902), dan Saubaki (1902–1904).

Kerajaan ini kemudian diperintah oleh Raja Baki Bastian Meis Nisnoni (1905–1911) dan setelah itu digantikan oleh saudaranya, Nicolaas Isu Nisnoni, yang menjabat

284. Lihat *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor*, halaman 188–189.

sebagai Raja Sonbai Kecil hingga 1917. Semenjak tahun 1917, Sonbai Kecil bergabung dengan federasi Kupang untuk membentuk kerajaan yang lebih besar. Sebagai Raja Kupang diangkat Nicolaas Isu Nisnoni, yang memegang jabatan tersebut hingga 1945.

XXVI. SORBIA

Raja Sorbia bernama Sousaly tercatat pernah menandatangani Perjanjian Paravicini pada 1756[285].

XVII. TAEBENU

Raja-raja yang pernah memerintah Taebenu adalah Tanof I (Amatabenu, ± 1688–1700), Tanof II Lasi (1700–1737), dan Eki Tanof (1737–± 1756). Raja Taebenu bernama Nai Kobe (Kobe Tanof, ± 1756–1803) tercatat pernah menandatangani Perjanian Paravicini pada 1756. Ia secara berturut-turut digantikan oleh Enus Kobe (± 1832), Salolo Kobe, Kobe Tus, Nobe Salolo (Hanoch Tanof, 1850–1873), Hanoch Tanof II (1874–1895), dan Jacob Tanof (1896–1901). Kerajaan ini lalu diperintah oleh Raja Daud Hanoch Obed Tanof (1901–1917). Tetapi semenjak 1917 bergabung dengan federasi Kupang dan D.H.O Tanof diangkat sebagai rajanya.

Perselisihan Perbatasan Antara Portugis dan Belanda di Timor

Setelah berakhirnya dominasi Portugis di Timor maka pulau tersebut kini terbagi antara dua penguasa kolonial, yakni Portugis dan Belanda. Oleh karena itu, lambat laun terjadilah sengketa perbatasan antara mereka berdua. Upaya paling awal dalam menetapkan tapal batas antara wilayah kekuasaan Portugis dan Belanda di Timor berlangsung pada 1816[286]. Pada saat itu terjadi saling menuntut wilayah kekuasaan. Portugis menuntut sebagian besar wilayah yang kini menjadi Timor Barat. Sementara itu, Belanda balas menuntut kawasan pantai utara dan selatan yang kini menjadi wilayah Timor Leste. Belanda lebih jauh lagi menginginkan kawasan Maubara dan Maucatar, suatu *enclave* (kawasan yang wilayahnya sepenuhnya dikitari oleh wilayah negara lain) di Suai, sedangkan Portugis menginginkan Noimuti dan Oecussi, yakni *enclave* yang berada di Timor Barat.

285. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 52.
286. Lihat *Crossing the border: Historical and linguistic divides among the Bunaq in central Timor*, karya Antoinette Schapper, halaman 32, dalam *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Budaya*, vol. 13 no.1 (April, 2011).

Sebagai langkah menentukan tapal batas yang lebih pasti, pemerintah kolonial Belanda mengajukan tawaran hendak membeli kawasan-kawasan yang diinginkan Portugis pada 1851. Kendati Portugis menolak tawaran ini, namun mereka sepakat mengadakan perundingan. Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan ini, pada 1854 disahkan perjanjian perbatasan serta pertukaran wilayah, yang kemudian disahkan pada 1859. Berdasarkan perjanjian tersebut, Portugis memperoleh Maubara, Oecussi, dan Noimuti, sedangkan Belanda mendapatkan Maucatar. Proses penentuan tapal batas ini masih belum berhasil dan serangkaian perjanjian lainnya dilangsungkan antara kedua negara, yakni masing-masing pada 1893, 1904, dan 1913. Berdasarkan perjanjian tahun 1904, *enclave* akan dihilangkan dan digabungkan dengan wilayah yang mengelilinginya. Dengan kata lain, *enclave* Portugis yang berada dalam wilayah Belanda akan menjadi milik Belanda, dan begitu pula sebaliknya.

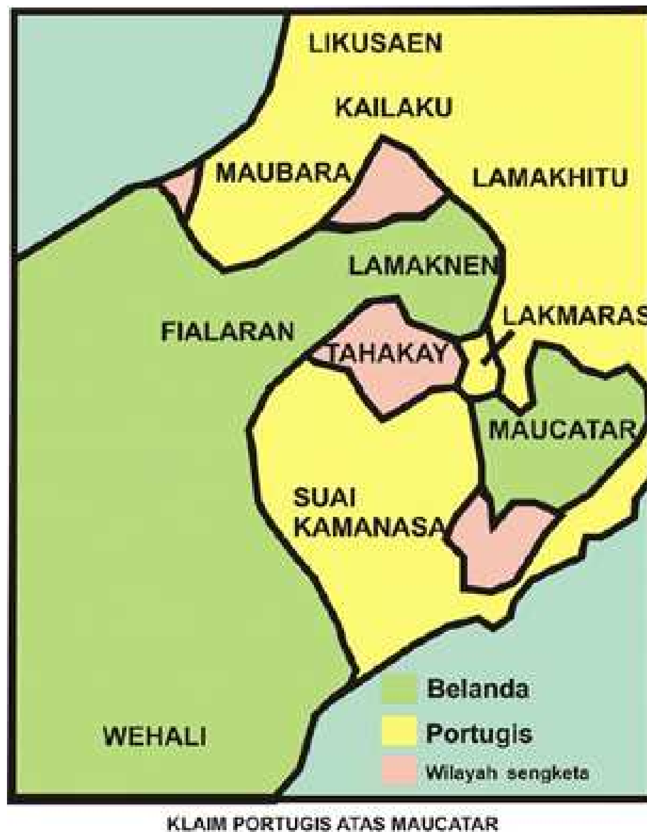
Pada kawasan perbatasan ini terdapat kerajaan-kerajaan Bunaq, yakni Lamaknen, Lamakhitu, Tahakay, Maucatar, dan Lakmaras[287]. Menurut perjanjian yang disahkan pada 1859, kerajaan-kerajaan di kawasan perbatasan yang mengadakan perserikatan dengan Wehali akan menjadi wilayah Belanda. Kerajaan-kerajaan yang berserikat dengan Likusaen dianggap sebagai wilayah Portugis. Akibat perselisihan antara kedua kekuatan kolonial ini, kawasan Bunaq kerap menjadi ajang pertempuran antara Belanda dan Portugis.

Perubahan wilayah berulang kali terjadi akibat perubahan perserikatan antar kerajaan. Tahakay menurut perjanjian tahun 1859 adalah wilayah Portugis. Namun, Tahakay belakangan menjadi wilayah Lamaknen, yakni kerajaan terletak di wilayah Belanda. Oleh karena itu, Tahakay kini dianggap sebagai wilayah Belanda berdasarkan perjanjian tahun 1904. Sebagai pembalasan atas kehilangan wilayah tersebut, Portugis lantas balik menuntut sebagian besar daerah kekuasaan Belanda yang menjorok ke wilayah Timor Portugis. Meskipun demikian, para raja dan penguasa di kawasan itu menolak kekuasaan Portugis.

Maucatar sebelumnya merupakan *enclave* daerah kekuasaan Belanda yang dikelilingi oleh wilayah Portugis. Oleh karenanya, berdasarkan perjanjian tahun 1904, harus digabungkan dengan Portugis. Tetapi Belanda menyatakan bahwa Maucatar bukanlah *enclave* karena tergabung dengan wilayah Belanda melalui Lakmaras, yang

287. Lihat *Crossing the border: Historical and linguistic divides among the Bunaq in central Timor*, karya Antoinette Schapper, halaman 33, dalam *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Budaya*, vol. 13 no.1 (April, 2011).

merupakan bagian Kerajaan Lamaknen. Portugis memaklumkan bahwa Lakmaras telah diserahkan pada Kerajaan Lamakhitu, yang merupakan wilayah Portugis. Oleh karenanya, Maucatar tetap merupakan *enclave* sehingga harus tetap diserahkan pada Portugal[288].



KLAIM PORTUGIS ATAS MAUCATAR

Dibuat berdasarkan: *Crossing the Border* dalam Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Budaya, vol 13 No 1 (April 2011), halaman 34.

Perselisihan antara Belanda dan Portugis terus berkecamuk di kawasan-kawasan yang dipersengketakan. Sebagai contoh, pada 1897 terjadi pertempuran-pertempuran di Lakmaras yang membunuh beberapa serdadu. Portugis mengirimkan pasukannya menduduki Maucatar dan persengketaan ini terus berlangsung hingga tahun 1911, Belanda akhirnya setuju menyerahkan Maucatar sesuai isi perjanjian 1904.

288. Lihat *Crossing the border: Historical and linguistic divides among the Bunaq in central Timor*, karya Antoinette Schapper, halaman 34, dalam *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Budaya*, vol. 13 no.1 (April, 2011).

Bab 10

KERAJAAN-KERAJAAN SEMASA AWAL BERDIRINYA REPUBLIK INDONESIA HINGGA PULIHNYA NEGARA KESATUAN

A. KERAJAAN-KERAJAAN ATAU DAERAH SWAPRAJA SEMASA AWAL KEMERDEKAAN

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, sikap para raja beraneka ragam, ada yang mendukung secara langsung, seperti Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta, menolak mengakui RI, atau menunggu. Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda mendukung pembentukan beberapa negara boneka yang tidak lepas dari peranan kaum elite istana. Oleh karena itu, sikap para penguasa kerajaan atau daerah swapraja tersebut dapat dijelaskan bila mencermati latar belakang pembentukan masing-masing negara bagian yang kelak bergabung dalam Republik Indonesia Serikat (RIS). Meski disebut negara boneka, tidak berarti bahwa semua yang berperan serta dalam pendiriannya memihak Belanda. Banyak di antara mereka merupakan nasionalis sejati, keikutsertaan mereka membentuk negara-negara boneka itu semata-mata sebagai alat perjuangan.

B. KEDUDUKAN DAERAH-DAERAH SWAPRAJA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (UUD 45)

Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, pada 11 Juli 1945 dibentuklah Panitia Perancang Undang-undang Dasar guna merumuskan konstitusi bagi negara Republik Indonesia kelak yang diketuai oleh IR. Soekarno dan beranggotakan 18 orang. Di dalam kepanitiaan tersebut duduk pula wakil-wakil daerah swapraja. Pada 13 Juli dilakukan pembicaraan mengenai rancangan undang-undang dasar sebagai hasil kerja panitia. Kedudukan berbagai daerah swapraja tercakup dalam Rancangan Undang-Undang Dasar bab IV pasal 37 tentang pemerintahan daerah, yang berbunyi:

> "Pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dari pada sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dari daerah-daerah yang bersifat istimewa."

Berdasarkan pasal di atas, negara Republik Indonesia akan dibagi menjadi berbagai daerah, baik besar maupun kecil, dengan memerhatikan "hak-hak asal usul dari daerah-daerah yang bersifat istimewa." Yang dimaksud dengan "daerah-daerah yang bersifat istimewa" itu adalah berbagai kerajaan dan swapraja yang masih eksis hingga saat itu. Dengan kata lain, pemerintahan negara yang baru akan tetap memerhatikan dan menghormati eksistensi berbagai kerajaan dan swapraja tersebut dsistem pemerintahan mereka harus mengedepankan azas permusyawaratan atau demokrasi.

Hal ini ditegaskan pula oleh Prof. Dr. Soepomo dalam penjelasannya saat berlangsung sidang Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar yang akan segera diresmikan menjadi Undang-Undang Dasar. Ia menyatakan bahwa daerah-daerah yang bersifat istimewa akan tetap diindahkan dan dihormati oleh pemerintah pusat, termasuk para raja beserta susunan pemerintahannya yang asli. Akan tetapi, kedudukannya adalah sebagai daerah dalam negara Republik Indonesia dan bukannya "negara di dalam negara." Dengan kata lain, masing-masing kerajaan itu adalah daerah yang bersifat istimewa dan memiliki susunannya yang asli, tetapi tidak dianggap sebagai negara yang berdaulat.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) disahkan pada 18 Agustus 1945 dan berlaku di seluruh wilayah RI. Aturan mengenai pemerintahan daerah yang berkaitan

dengan daerah swapraja tercakup dalam bab IV pasal 18. Sementara itu, di bagian penjelasannya berbunyi (ejaan telah diganti dengan Ejaan Yang Disempurnakan):

1. Oleh karena Negara Indonesia itu "*eenheidstaat*" maka Indonesia tak mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat "*staat"* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Provinsi, dan daerah Provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat autonoom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Daerah-daerah yang bersifat autonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
2. Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat lebih dari 250 "*zelfsbesturende–landschappen*" dan "*volksgemeenschappen*", seperti desa di Jawa dan Bali, negeri Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan aseli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah tersebut itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

Kalimat "*zelfsbesturende–landschappen*" dan "*volksgemeenschappen*" dengan jelas mengacu pada daerah-daerah kerajaan atau swapraja yang eksis di Kepulauan Nusantara wilayah Hindia Belanda saat itu. Dengan demikian, UUD 45 tidak berniat menghapuskan daerah-daerah swapraja. Meskipun demikian, daerah swapraja itu bukan merupakan satuan kenegaraan (*staat*) yang berdiri sendiri.

Lebih jauh lagi, menurut pasal 1 UU no. 22 tahun 1948 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, disebutkan:

> "Daerah-daerah yang mempunyai hak asal usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang "bersifat istimewa" dengan undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat 3 dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat denagn Provinsi, Kabupaten, atau Desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kerajaan–kerajaan / swapraja ini mempunyai hak–hak asal usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia lahir telah mempunyai pemerintahan sendiri yang "bersifat istimewa"."

Adanya kata *dapat* di sini menunjukkan bahwa berbagai swapraja itu tidak harus ditetapkan sebagai daerah istimewa, tetapi terdapat kemungkinan statusnya dianggap sebagai daerah istimewa. Pengangkatan kepala daerah istimewa dilakukan oleh presiden

Republik Indonesia dan berasal dari kalangan keluarga penguasa daerah itu di zaman sebelum berdirinya RI.

C. PEMBENTUKAN DEWAN RAJA-RAJA

Para raja di Pulau Sumba mengadakan rapat di Waingapu pada 25 November 1945 yang dihadiri pula oleh Residen Schuuller, Asisten Residen Dr. Koerts, Asisten Residen Harstein, Kontrolir Woudstra, dengan disertai para pemuka masyarakat lainnya[289]. Berdasarkan pertemuan itu dibentuklah *Sumba Eiland Federatie* atau Federasi Pulau Sumba, yang beranggotakan 16 kerajaan di Sumba. Penguasa tertinggi federasi tersebut adalah dewan raja-raja dengan suatu dewan harian beranggotakan 5 orang yang selanjutnya berubah menjadi 3 orang sebagai pelaksananya. Dewan Raja-raja Sumba sendiri memiliki susunan sebagai berikut[290]

Ketua	: Umbu Tunggu Mbili, Raja Swapraja Mamboro
Wakil Ketua	: Hermanus Rangga Horo, Raja Swapraja Kodi
Anggota	: Saba Ora, Raja Swapraja Lauli; Umbu Hapu Hambandima, Raja Swapraja Rindi Mangili; dan Umbu Hunga Wokangara.

Selanjutnya, tiga pelaksana harian sebagaimana yang telah disebutkan di atas dipilih dari keanggotaan Dewan Raja-raja Sumba dengan susunan sebagai berikut: yakni Umbu Tunggu Mbili (Raja Mamboro), Lende Kalumbang (Raja Laura), dan Umbu Tipuk Marisi (Raja Umbu Ratu Nggai).

Bersamaan dengan pembentukan Dewan Raja-raja Sumba, dibentuk pula Badan Perwakilan Rakyat yang dinamakan Dewan Sumba (*Sumba Raad*), dengan susunan

Ketua	: Lende Kalumbang, Raja Swapraja Laura
Wakil Ketua	: K.W. Palekahelu
Penasihat	: asisten residen Belanda di Waingapu

Lembaga ini terdiri dari 23 anggota, dengan 16 di antaranya diangkat dari wakil-wakil rakyat Sumba, 3 orang anggota merupakan wakil penduduk keturunan asing (Belanda, China, dan Arab), dan 4 orang wakil partai-partai politik.

Di Flores pada 26 November 1946, para raja membentuk pula *Flores Eiland Federatie* yang beranggotakan Swapraja Manggarai, Swapraja Ngada, Swapraja Nage-Keo, Swapraja Riung, Swapraja Ende, Swapraja Lio, Swapraja Sikka, Swapraja

---

289. Lihat *Lohayong Solor: Refleksi Menuju Masa Depan*, halaman 63.
290. Sejarah *Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 54.

Larantuka, dan Swapraja Adonara. Disamping dewan raja-raja tersebut, di Flores dikenal pula apa yang disebut *Flores Raad*, yakni semacam dewan perwakilan rakyat. Para raja di Pulau Timor membentuk *Timor Eiland Federatie* pada 21 Oktober 1946. Sebagai ketua dewan raja-raja dipilih H.A. Koroh dari Kerajaan Amarasi. Sementara itu, Raja Alfonsus Nisnoni dari Kerajaan Kupang diangkat sebagai ketua yang membawahi 20 swapraja lainnya, seperti Kupang, Amarasi, Fatuleu, Amfoan, Amanuban, Amanatun, Mollo, Miomaffo, Insana, Biboki, Belu, Alor, Pantar Matahari Naik, Kei, Batulolong, Kolana, Pureman, Rote, dan Sabu.

Pembentukan dewan raja-raja ini secara teoretis memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada para raja, sedangkan pejabat pemerintahan Belanda, baik itu residen, asisten residen, maupun kontrolir, hanya berfungsi sebagai pendamping atau penasihat. Kendati demikian, pada praktiknya pejabat-pejabat semacam itu masih besar pengaruhnya dalam roda pemerintahan di daerah-daerah.

Di daerah Sangihe-Talaud terbentuk Dewan Raja-raja, yang diketuai oleh W. A. Sarapil, Raja Tabukan. Adapun lima anggotanya adalah: Raja F. Adriaan dari Kendahe-Tahuna, Raja Ambon Darondo dari Manganitu, Raja Paul A. Tindas dari Tagulandang, Raja Ch. David dari Siau, dan Raja Th. Binilang dari Talaud. Di samping dewan raja-raja, Belanda menempatkan seorang kontrolir di Tahuna sebagai kepala *Onderafdeeling* Sangihe-Talaud, seorang kontrolir di Ulu Siau sebagai *Hoofd van Platselijk Bestuur* (HPB), dan seorang *adspirant controleur* di Beo (Talaud) juga sebagai HPB. Kondisi ini berlangsung hingga terbentuknya NIT. Sebagai ketua Dewan Raja-raja Sangihe-Talaud, W.A. Sarapil dianggap sebagai kepala daerah Sangihe-Talaud yang pertama. Tetapi ketika ia terpilih sebagai anggota senat NIT, kedudukannya selaku kepala daerah digantikan oleh B.J. Medellu[291].

Belakangan, daerah Sangihe-Talaud ini menjadi bagian NIT dan dianggap setingkat dengan *onderafdeeling* pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Keenam kerajaan atau swapraja yang ada dalam kawasan Sangihe-Talaud (Tabukan, Kendahe Tahuna, Manganitu, Tagulandang, Siau, dan Talaud) wajib menandatangani perjanjian *Acte van Verbond* dengan pemerintah NIT. Namun, yang terlaksana hanya dengan Raja Th. Binilang dari Talaud. Selain Dewan Raja-raja Sangihe-Talaud masih terdapat pula suatu lembaga yang disebut Dewan Sangihe-Talaud. Anggotanya dipilih berdasarkan enam distrik pemilihan sesuai dengan jumlah swapraja yang ada. Dewan Raja-raja

291. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara*, halaman 167.

berhak mengeluarkan peraturan yang disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri NIT, sedangkan Dewan Sangihe-Talaud terbatas sekali wewenangnya, yaitu menyusun anggaran belanja daerah (*medebegrotend*) saja.

Para raja di kawasan Boolang Mongondow yang saat itu terdiri dari empat kerajaan atau swapraja (Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna, dan Kaidipang Besar) membentuk Dewan Raja-raja Boolang Mongondow pada 1948. Ketuanya adalah Raja H.J.C. Manoppo dari Boolang Mongondow, sedangkan para anggotanya adalah Raja Arie Hasan Gobol dari Boolang Uki, Raja M.T. Datunsolang dari Bintauna, dan Raja R.S. Ponto dari Kaidipang Besar. Di samping itu, masih ada pula Dewan Gabungan Bolaang Mongondow dengan A. C. Manoppo sebagai ketuanya. Tetapi dewan ini tak besar peranannya dan hanya berfungsi sebagai penyusun anggaran belanja daerah dan memberi masukan kepada ketua Dewan Raja-raja Bolaang Mongondow.

D. MASA PEMBENTUKAN BERBAGAI NEGARA BAGIAN DALAM REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS)

I. Konferensi Malino

Belanda berniat membentuk berbagai negara bagian dalam lingkungan bekas daerah kekuasaannya di Hindia Belanda. Oleh karenanya, DR. H.J. Van Mook, wakil gubernur jenderal pemerintahan Hindia Belanda memprakarsai diadakannya Konferensi Malino pada 15 Juli hingga 25 Juli 1946. Konferensi ini dihadiri oleh wakil 15 daerah di Kepulauan Nusantara, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bangka-Belitung, Riau, Sulawesi Selatan, Minahasa, Menado, Bali, Lombok, Timor, Sangihe-Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, dan Papua.

Dari Pulau Timor diutus Raja H.A. Koroh dari Kerajaan Amarasi, I.H. Doko, dan Th. Oematan. Mereka diberi kepercayan menyampaikan suara rakyat Timor yang menghendaki persatuan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan penuh keberanian, H.A. Koroh dalam pidatonya menekankan tekad rakyat Timor untuk memperoleh hak menentukan nasib sendiri. Pidato ini menggusarkan pihak Belanda yang berusaha mementahkan pernyataan tersebut. Mereka menghasut tokoh-tokoh Lima Serangkai, yakni lima partai politik pro-Belanda beranggotakan orang-orang Maluku, Daya, dan Belanda Indo agar mengirimkan telegram yang ditujukan kepada Letnan Jenderal van Mook dan Dr. Hoven. Isi telegram pada hakikatnya menyatakan

bahwa ketiga orang itu tidak mewakili rakyat Timor sehingga pidato mereka yang mendukung Republik tidak dapat diterima. Telegram itu dipergunakan sebagai bekal menyerang wakil-wakil Timor anggota PDI tersebut. Van Mook dan Dr. Hoven menuduh mereka hanya mengaku-aku saja sebagai utusan rakyat Timor. Meskipun demikian, dengan cerdik, H.A. Koroh dan I.H. Doko menjawab bahwa memang benar bahwa mereka tidak mewakili orang-orang Maluku, Daya, atau Belanda Indo – yang merupakan pengirim telegram tersebut–, melainkan suara rakyat Timor. Jawaban yang jitu itu membungkam Dr. van Mook. Sementara itu, Dr. Hoven dengan marah hanya dapat mengancam dan memaki mereka saja.

II. Negara Indonesia Timur (NIT)

a. Konferensi Denpasar

Sebagai langkah awal pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), Belanda menyelenggarakan Konferensi Denpasar pada 18–24 Desember 1946 di Denpasar. Sebagai utusan daerah Timor, dikirimlah tiga orang, yakni I.H. Doko selaku ketua PDI, Ds. Rotti yang ditunjuk oleh Dewan Raja-raja Timor, dan Pastor D. Manek dari Belu. Adapun utusan ini diberi mandat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Mendukung Perjanjian Linggarjati yang disepakati antara PM. Sutan Syahrir dengan Komisaris Jenderal Belanda, Prof. Schemerhorn.
- Timor menjadi bagian tak terpisahkan Republik Indonesia.
- Menuntut agar kontrak politik berupa *Korte Verklaring* yang dahulunya mengikat raja-raja Timor sebagai bagian Hindia Belanda kini tidak berlaku lagi. Dengan demikian raja-raja tidak perlu lagi mengakui kedaulatan Ratu Belanda.

Sementara itu, Pulau Sumba mengirimkan Umbu Tunggu Mbili, Lede Kalumbang, dan Umbu Tipuk Marisi. Wakil-wakil Sulawesi Selatan yang menghadiri konferensi Denpasar adalah La Pabbenteng Petta Lawa dari Bone; La Ode Falihi, Sultan Buton; La Cibu (*adattuang* Sidenreng), Najamuddin Daeng Mallewa, dan Sonda Daeng Mattayang. Mereka didampingi para pensihat yang terdiri dari Abdullah Daeng Mappuji, Abdul Rajab, Andi Roda, Aru Macege, dan Monoarfah. Seluruh wakil resmi ini dibentuk atas persetujuan NICA dan merupakan anggota Dewan Penasihat Sulawesi Selatan yang dibentuk tanggal 25 Februari 1946[292]. Konferensi ini berhasil

292. Lihat Lihat *Andi Pangerang Petta Rani: Profil Pemimpin yang Manunggal dengan Rakyat*, halaman 68.

mewujudkan dibentuknya NIT yang beribukota di Makassar dengan Cokorda Gede Raka Sukawati sebagai presiden dan Najamudin Daeng Malewa sebagai perdana menteri.

b. Perkembangan NIT Hingga Pembubarannya

Segera setelah berdirinya NIT, Najamuddin Daeng Malewa selaku perdana menteri mulai membentuk kabinetnya. Ia segera bertolak ke Jakarta guna menyusun dewan menterinya. Kabinet pertama NIT terbentuk pada 13 Januari 1947 dengan susunan sebagai berikut[293]:

Perdana Menteri merangkap Menteri Perekonomian	: Najamuddin Daeng Malewa
Menteri Dalam Negeri	: Ide Anak Agung Gde Agung
Menteri Kehakiman	: Mr. Tjia Kok Tjiang
Menteri Keuangan	: Mr. Hamelink
Menteri Pendidikan	: E. Katoppo
Menteri Penerangan	: G. R. Pantouw
Menteri Kesehatan	: Dr. S.J. Warrouw
Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan	: E.D. Dengah
Menteri Urusan Sosial	: J. Tahija

Presiden Sukawati melantik kabinet baru pada 13 Januari 1947 yang juga dihadiri oleh Letnan Gubernur Jenderal Dr. H. J. van Mook beserta wakil pemerintah Belanda lainnya. Pada kesempatan tersebut presiden NIT menyampaikan kata sambutannya dan mendorong agar para menteri mengerahkan segenap tenaganya demi kemajuan NIT. Terdapat pertanyaan kritis dari sebagian kalangan mengapa kebinet ini harus dilantik di Jakarta dan bukannya Makassar, ibukota NIT. Selain itu, kehadiran wakil-wakil Belanda menuai pula protes berbagai pihak. Tampaknya ini merupakan kesalahan politis yang dilakukan Perdana Menteri Najamuddin Daeng Malewa.

Kendati kabinet telah dilantik, kekuasaan sesungguhnya dalam NIT berada di tangan pemerintah kolonial Belanda. Pos-pos penting masih diduduki oleh pejabat-pejabat Belanda dan orang-orang Indonesia hanya diserahi jabatan sebagai wakil atau bawahan saja. Itulah sebabnya kabinet Najamuddin Daeng Malewa tak dapat berjalan dengan maksimal. Hampir 75 persen wilayah NIT terdiri dari swapraja atau daerah otonomi yang bersifat kerajaan. Oleh karenanya, pemerintah NIT menyadari

293. *From the Formation of the State of East Indonesia Towards the Establishment of The United States of Indonesia*, halaman 144.

arti penting para raja dan menjamin hak-hak mereka. Pemerintah NIT tidak hendak mengurangi kekuasaan para raja selaku kepala swapraja.

Pada mulanya, NIT belum memiliki aparat pemerintahan. Pemerintah kolonial memutuskan pada bulan Maret 1947 bahwa seluruh aparat pemerintahan Belanda, baik residen, asisten residen, kontrolir, maupun lain sebagainya yang dahulunya tergabung dalam *Binnenlands Bestuur* (korps pegawai Hindia Belanda) menjadi pegawai NIT. Kedudukan mereka berada di bawah naungan departemen dalam negeri. Meskipun demikian, tidak semua bekas pegawai kolonial sanggup memahami kenyataan itu dan kurang dapat menerima bahwa era penjajahan telah berakhir. Mereka berpandangan bahwa pembentukan NIT hanya permainan politik pemerintah Hindia Belanda semata dan sesungguhnya tiada perubahan mendasar terhadap kedudukan maupun jabatan mereka.

Aparat-aparat pemerintahan semacam ini berupaya menggerogoti kekuasaan NIT yang makin nasionalistis dan menjalin hubungan lebih dekat dengan pemerintah RI. Lion Chachet, salah seorang aparat Belanda, mendekati para raja di Sulawesi Selatan dengan tujuan agar NIT tak dapat menggerakkan pemerintahannya di kawasan tersebut. Ia berhasil mendongkel Raja Bone La (Andi) Mappanyuki dan mengasingkannya beserta putranya, Andi Pangerang Petta Rani. La (Andi) Pabbenteng, raja baru yang pro-Belanda diangkat sebagai penggantinya. Chachet berharap agar Andi Pabenteng memengaruhi raja-raja Sulawesi Selatan lainnya mengganjal NIT.

Andi Pabenteng menggalang pertemuan dengan raja-raja lain di Watampone, ibukota kerajaan Bone. Tujuannya menghimbau agar para raja Sulawesi Selatan tidak mengakui NIT. Ide Anak Agung Gde Agung menyadari bahwa acara ini sangat penting bagi keberlangsungan NIT. Karenanya, ia segera bertolak menghadirinya dan bertatap muka langsung dengan para raja. Dia menjelaskan secara panjang lebar mengenai kedudukan raja dalam Negara Indonesia Timur. Bukan maksud pemerintah NIT mengecilkan atau mengurangi kedudukan para raja selaku kepala swapraja, melainkan sebaliknya; NIT bertujuan memajukan daerah swapraja serta memberikan otonomi yang lebih besar bagi para raja dalam mengelola daerahnya. Setelah melalui sesi pembicaraan dan tanya jawab, raja-raja di Sulawesi Selatan menyadari kekeliruan mereka dan berbalik mendukung Negara Indonesia Timur. Dengan demikian, tujuan Chachet gagal total.

Dalam bidang ekonomi, Najamuddin Daeng Malewa yang merangkap sebagai menteri ekonomi memiliki tiga program sebagai berikut:[294]

1. Bekerja keras memajukan produksi pangan dan sandang.
2. Meningkatkan ekspor
3. Memajukan transportasi bahari dan pelayaran.

Perdana menteri menyatakan bahwa sesungguhnya produksi pangan di NIT cukup memenuhi kebutuhan penduduk. Bahkan sebagian hasil pertanian masih dapat dikirim ke Kalimantan Timur yang dilanda kekurangan pangan. Meskipun demikian, bagaimanapun juga peningkatan produksi pertanian tetap wajib diupayakan mengingat pentingnya persediaan pangan dalam menghadapi masa paceklik atau serangan hama. Sementara itu, kemandirian dalam sandang boleh dikatakan kurang karena pemerintah NIT harus mengimpor 70 juta meter tekstil yang belakangan meningkat menjadi 110 juta demi mencukupi keperluan warganya.

Kabinet Najamuddin mengalami *reshuffle* (perubahan susunan) pada 2 Juni 1947 dan menjalankan tugasnya hingga 11 Oktober 1947. Dukungannya bagi Agresi Militer Belanda I terhadap RI merupakan kesalahan politik Najamuddin sehingga menuai protes berbagai pihak. Selain itu, Najamuddin dituduh terlibat perkara korupsi. Najamuddin kemudian ditangkap dan kabinetnya jatuh pada 11 Oktober 1947. Saat itu, Presiden Cokorda Gede Raka Sukawati sedang berada di negara Belanda dan kedudukannya sementara waktu diwakili oleh Sultan Sumbawa, Muhammad Kaharuddin, selaku pejabat presiden.

Dr. S.J. Warrouw diangkat sebagai perdana menteri NIT menggantikan Najamuddin dan dipercaya membentuk kabinet baru dengan susunan sebagai berikut:[295]

Perdana Menteri merangkap Menteri Kesehatan	: Dr. S. J. Warrouw
Menteri Dalam Negeri merangkap Wakil PM	: Ide Anak Agung Gde Agung
Menteri Kehakiman	: Dr. Mr. Ch. R.S. Soumokil
Menteri Keuangan	: M. Hamelink
Wakil Menteri Keuangan	: R. E. J. Matekohy
Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum	: Ir. A. M. Semawi
Menteri Pendidikan	: E. Katoppo

294. Lihat *From the Formation of the State of East Indonesia Towards the Establishment of The United States of Indonesia*, halaman 192.

295. *From the Formation of the State of East Indonesia Towards the Establishment of The United States of Indonesia*, halaman 310.

Menteri Penerangan	: Sonda Daeng Mattajang
Wakil Menteri Penerangan	: R. Claproth
Menteri Perekonomian	: J. Tahija
Wakil Menteri Ekonomi	: Hoesain Poeang Limboro
Menteri Urusan Sosial	: A.D. Mappoedji
Wakil Menteri Urusan Sosial	: Drs. Tan Tek Heng.

Warrouw sendiri bukanlah politisi dan sebelumnya berprofesi sebagai dokter mata. Ia belum berpengalaman dalam politik sehingga berbagai kalangan meragukan kemampuannya. Sementara itu, jiwa nasionalis makin berkembang dalam parlemen NIT. Mereka menghendaki pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merdeka dan berdaulat. Negara tersebut akan berbentuk federasi namun tak boleh bertentangan dengan semangat persatuan Indonesia. Sehubungan dengan para raja, NIT yang merupakan bagian RIS akan tetap menjamin serta menghormati hak-hak mereka.

Kabinet Warrouw tidak panjang usianya dan jatuh pada 15 Desember 1947. Pemilihan Warrouw sendiri sebelumnya telah menimbulkan keraguan berbagai pihak. *Pertama,* karena minimnya pengalaman politik yang dimilikinya. *Kedua*, ia terkenal sebagai sosok yang pro-Belanda. Ia juga mendukung agresi militer Belanda terhadap pemerintah RI, dimana hal ini ditentang oleh banyak pihak. Sebagai pengganti Warrouw, Ide Anak Agung Gde Agung diangkat sebagai perdana menteri NIT. Pada 15 Desember 1947, terbentuk kabinet baru dengan susunan sebagai berikut:[296]

Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri	: Ide Anak Agung Gde Agung
Menteri Kehakiman	: Mr. Dr. Ch. R. S. Soumokil
Menteri Perekonomian	: Hoessain Poeang Limboro
Menteri Keuangan	: M. Hamelink
Menteri Pendidikan	: E. Katoppo
Menteri Kesehatan	: Dr. S. J. Warrouw
Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum	: Ir. D. P. Diapari
Menteri Urusan Sosial	: Mr. S. S. Palenkahoe
Menteri Penerangan	: Boerhanuddin

296. *From the Formation of the State of East Indonesia Towards the Establishment of The United States of Indonesia*, halaman 336.

Wakil Menteri Dalam Negeri	: Mr. S. Binol
Wakil Menteri Kehakiman	: R. Claproth
Wakil Menteri Perekonomian	: Drs. Tan Tek Heng
Wakil Menteri Keuangan	: R. E. J. Matekohy
Wakil Menteri Pendidikan	: J. E. Tatengkeng
Wakil Menteri Urusan Sosial	: Mohammad Sjafei
Wakil Menteri Penerangan	: I. H. Doko

Kebijakan kabinet baru akan didasari oleh semangat nasionalisme dan menggalang dukungan seluruh elemen dalam NIT. Hubungan yang lebih erat dengan RI dan negara bagian lainnya akan dikembangkan sebagai landasan mengadakan pembicaraan inter-Indonesia demi memecahkan permasalahan bersama.

Dalam kunjungannya ke Jakarta pada bulan Januari 1948, Ide Anak Agung Gde Agung melangsungkan pembicaraan dengan Mr. Amir Syarifuddin, perdana menteri RI, dalam suasana yang penuh persahabatan. Amir Syarifuddin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ide Anak Agung Gde Agung atas kesediaan membina hubungan yang lebih erat dengan pemerintah RI. Pemerintah NIT menjamin keberlangsungan kerajaan atau swapraja yang berada di lingkungannya. Kendati demikian, keberadaan berbagai swapraja itu bergantung pula kesediaan para raja mengembangkan iklim demokrasi di daerahnya. Para raja wajib menghapuskan feodalisme dan hal-hal lain yang tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Guna membahas masalah swapraja atau kerajaan yang berada dalam wilayah NIT, diadakanlah konferensi di Malino, dekat Makassar, pada 12–13 Mei 1948. Tujuannya merumuskan kebijaksanaan mengenai berbagai swapraja tersebut serta menyesuaikan kedudukan para raja dengan arus perubahan saat itu. Pada zaman kolonial, para raja diwajibkan menandatangani kontrak berupa *Korte Verklaring* yang berisikan pengakuan terhadap kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Sebaliknya, pemerintah kolonial menjamin status mereka dan keberlangsungan swapraja yang bersangkutan. Oleh karena era kolonialisme telah berakhir, hal seperti ini tentunya tak dapat dipertahankan lagi sehingga perlu dirumuskan suatu kebijaksanaan baru.

Konferensi dihadiri oleh 18 raja yang berasal dari Buleleng, Jembrana, Gianyar, Bone, Buton, Wajo, Bolaang Mongondow, Tabukan, Banggai, Sumbawa, Bima, Amarasi, Sikka, Sumba, Kodi, Ternate, dan Bacan. Hadir pula dalam pertemuan itu A.P. Kertanegara (sekretaris negara bagi urusan pemerintahan swapraja), Dr. M.

Brouwer (wakil mahkota Belanda), dan C. H. J. R. de Waal (penasihat umum dalam bidang hukum). A.P. Kertanegara menyampaikan berbagai usulan yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

- Perlu diadakan kontrak baru antara pemerintah NIT dengan masing-masing swapraja sebagai pengganti kontrak lama, yang dahulu diadakan dengan pemerintah kolonial.
- Kontrak baru itu akan ditandatangani tiga pihak, yakni wakil pemerintah Kerajaan Belanda, wakil NIT, dan kepala swapraja bersangkutan. Hadirnya wakil Belanda diperlukan sebagai saksi bahwa swapraja tersebut tidak lagi terikat pada kontrak beserta ikrar kesetiaannya yang lama. Dengan demikian, menjamin bahwa pembatalan kontrak lama telah disetujui pula oleh pemerintah Belanda.
- Kontrak dengan masing-masing raja akan menjamin bahwa status mereka tak akan dihapuskan.
- Perjanjian lebih baik diadakan dengan masing-masing raja secara pribadi dan bukannya wakil federasi berbagai swapraja.

Perdana Menteri Ide Anak Agung Gde Agung pada dasarnya setuju dengan saran-saran di atas dan pemerintah NIT akan berupaya menjalankannya sebatas kewenangan yang dimiliki. Upaya menegakkan demokrasi di berbagai wilayah swapraja dikembangkan dengan membentuk dewan perwakilan rakyat.

Sebagai wujud protes terhadap Agresi Militer Belanda II, kabinet NIT yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ide Anak Agung Gde Agung membubarkan dirinya pada 20 Desember 1948. Tindakan ini didukung oleh Fraksi Progresif dan Nasional yang merupakan mayoritas dalam parlemen NIT. Belanda sangat terkejut dengan sikap tegas parlemen NIT yang condong kepada Republik Indonesia. Sementara itu, kaum nasionalis, baik di dalam maupun luar parlemen, menunjuk kembali Ide Anak Agung Gde Agung sebagai perdana menteri dan membentuk kabinet dengan program-program yang lebih progresif dibanding sebelumnya, yakni

- Mencela tindakan Belanda yang menyerang RI secara membabi buta.
- Hanya bersedia membentuk Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan terlepas dari Belanda.
- Menuntut pembebasan Bung Karno beserta Bung Hatta.
- Mendesak dilangsungkannya Konferensi Meja Bundar (KMB) selekas mungkin.

Parlemen menolak RUU yang telah disetujui pemerintah Belanda sebagai hasil Konferensi Federal Bandung, dimana isinya mengenai pembentukan RIS dalam bentuk Uni Indonesia-Belanda, namun kekuatan militer tetap berada di tangan Belanda. Bahkan I.H. Doko, tokoh dari Timor yang sangat gigih menentang Belanda, diangkat sebagai menteri penerangan dalam kabinet Ide Anak Agung Gde Agung.

Partai-partai politik yang pro-Republik dengan segera merapatkan barisannya melalui pembentukan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) yang berpusat di Makassar dan diketuai oleh Arnold Monomitu. PDI menunjuk I.H. Doko sebagai wakil tetapnya dalam GAPKI, padahal saat itu dia merangkap sebagai menteri penerangan NIT. GAPKI mengdakan kongres pertamanya di Makassar dan menetapkan berbagai hal sebagai arahan perjuangan GAPKI:[297]

- Bung Karno dan Bung Hatta dianggap sebagai simbol perjuangan dan persatuan Indonesia.
- Yogyakarta dijadikan ibukota perjuangan kemerdekaan Indonesia.
- Merdeka hanya bersama-sama dengan Republik.

Dengan berani GAPKI mendesak pemerintah NIT agar bertindak lebih tegas terhadap Belanda. Bahkan dua orang anggota kabinet yang merangkap sebagai anggota GAPKI, yakni I.H. Doko dan Y. Tatengkeng, dengan berani menyatakan bahwa mereka siap mengundurkan diri dari kabinet bila tak diizinkan merangkap sebagai anggota badan perjuangan tersebut. Ternyata kedua orang tokoh tersebut tetap dibiarkan menduduki jabatannya.

BFO dibubarkan setelah RIS terbentuk dan Mr. Moh. Roem diangkat sebagai komisaris tinggi RIS di Negeri Belanda. Ide Anak Agung Gde Agung yang sebelumnya menduduki jabatan perdana menteri NIT diangkat sebagai menteri dalam negeri RIS, sedangkan kedudukannya sebagai perdana menteri digantikan oleh J.E. Tatengkeng. Tetapi ia mengundurkan diri pada 20 Februari 1950 dan digantikan oleh Ir. P.D. Diapari. Kabinet NIT yang baru ini mengalami berbagai goncangan karena desakan kaum Republik yang menuntut pembubaran NIT. Sebaliknya, tokoh-tokoh yang pro-Belanda, seperti anggota Lima Serangkai di Timor, menghendaki Negara Indonesia Timur yang merdeka dalam ikatan dengan Negeri Belanda. Meskipun mendapatkan dukungan Belanda, niat golongan yang memihak kaum penjajah ini dapat digagalkan.

297. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) di Daerah Nusa Tenggara Timur*, halaman 62.

Rakyat mulai bergerak mengadakan aksi-aksi yang menuntut pembubaran NIT beserta negara-negara bagian lainnya dan meleburkan diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

c. Muktamar Raja-raja Sulawesi Tengah

Raja-raja yang berasal dari *afdeeling* Poso dan Donggala mengadakan pertemuan di Parigi pada 27–30 November 1948 yang dihadiri oleh

1. Wongko Lemba Ta Lasa, Raja Poso
2. Muslaini, Raja Tojo
3. Lasahido, Raja Una-Una
4. Abdul Rabbie, Raja Bungku
5. Lamakampali, Raja Tawaili
6. Tombolotutu, Raja Moutong
7. Tagunu, Raja Parigi
8. Rumampuo, wakil Raja Mori
9. Lamakarate, Raja Sigi-Dolo
10. S.A. Amir, Raja Banggai
11. Caco Ijazah, Raja Palu
12. S. Kabo, Raja Lore
13. La Marauna, Raja Banawa
14. W. Djiloi, Raja Kulawi
15. Rajawali Muhammad Pusadan, *Voorzitter Zelfbestuurscommisie* Toli-Toli[298]

Pertemuan yang dikenal sebagai "Muktamar Raja-Raja se-Sulawesi Tengah" ini merumuskan keputusan penting, yakni ditetapkannya Undang-undang Dasar Sulawesi Tengah pada 2 Desember 1948, yang disahkan oleh residen Manado pada 25 Januari 1948. Tujuan diadakannya pertemuan itu adalah menetapkan daerah Sulawesi Tengah sebagai daerah otonom di NIT.

Undang-undang yang ditetapkan itu mengandung beberapa poin penting, yakni bentuk pemerintahan di Sulawesi Tengah lebih diarahkan pada pembentukan daerah otonom dalam Republik Indonesia yang setingkat dengan kabupaten. Selanjutnya, Rajawali Muhammad Pusadan selaku ketua dewan raja-raja Sulawesi Tengah diangkat sebagai gubernur Sulawesi Tengah yang pertama.

---

298. *Sejarah Poso*, halaman 274.

d. Bubarnya NIT

Berbagai gerakan timbul di daerah-daerah yang menghendaki NIT dibubarkan. Di daerah Bolaang Mongondow, rakyat ingin bergabung dengan RI dan menghendaki pembubaran Dewan Raja-raja yang dianggap mereka bersifat feodalistis serta tidak demokratis. Demi memperjuangkan aspirasi ini dibentuklah GAPRIBOM (Gabungan Perjuangan Republik Indonesia Bolaang Mongondow), yang merupakan gabungan berbagai organisasi politik seperti BNI, GIM, PSII, dan Muhammadiyah. Belakangan, bergabung pula organisasi lainnya, seperti PPI Laskar Banteng, SPK, dan KPM sehingga makin memperkuat GAPRIBOM. Mereka bersatu padu menuntut agar NIT dan Dewan Raja-raja dibubarkan. Rapat besar-besaran digelar pada 4 Mei 1950 di Kotamobagu dengan tujuan membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) sebagai sarana mengambil alih kekuasaan pemerintahan sebelum digabungkan dengan RI. Pihak NIT sendiri tidak sanggup menghalangi diadakannya rapat itu sehingga dapat berlangsung tanpa hambatan sedikitpun.

Pada 1950-an, pecah pemberontakan Andi Azis dan Soumokil dengan gerakan RMS (Republik Maluku Selatan)yang menggoncang kawasan Indoneseia Timur. Meskipun demikian, pergolakan ini berhasil dipadamkan. Perdana Menteri Diapari dan beberapa menterinya dituduh oleh pemerintah RIS terlibat dalam gerakan Andi Azis. Mereka ditangkap dan jatuhlah kabinet Diapari. Gerakan menuntut penggabungan dengan RI makin gencar. Sebagai pengganti Diapari, Ir. J. Putuhena terpilih sebagai perdana menteri terakhir NIT. Kabinet baru terbentuk pada 10 Mei 1950 yang beranggotakan:[299]

Perdana Menteri/ Menteri Kemakmuran/ Menteri Perhubungan	: Ir. J. Putuhena
Menteri Dalam Negeri	: Lanto Daeng Pasewang
Menteri Kehakiman	: Mr. I Gusti Ketut Puja
Menteri Urusan Sosial	: Andi Boerhanoeddin
Menteri Penerangan	: H. Rondonoewoe
Menteri Pendidikan merangkap Menteri Kesehatan	: Ir. Ingkiriwang
Menteri Keuangan	: Abdoel Razak

299. *From the Formation of the State of East Indonesia Towards the Establishment of the United States of Indonesia*, halaman 774

Usia kabinet terakhir NIT ini tidak panjang dan tugasnya semata-mata mempersiapkan peralihan kekuasaan menuju penggabungan dengan pemerintah RI. Menjelang berakhirnya NIT, pecah insiden di Makassar antara anggota APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dan mantan anggota KNIL (angkatan perang Hindia Belanda). Pertumpahan darah yang terjadi pada 5 Agustus–8 Agustus 1950 ini menewaskan 2.000–3.000 orang.

Pada 15 Agustus 1950, NIT resmi dibubarkan dan keesokan harinya perdana menteri NIT terakhir, Ir. J Putuhena, meletakkan jabatannya. Presiden Soekarno mengumumkan pada 15 Agustus 1950 bahwa kini NKRI mencakup seluruh Indonesia. Meskipun demikian, perjuangan belum selesai karena wilayah Irian Barat masih berada dalam genggaman Belanda. Presiden Soekarno menyampaikan dalam pidato peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agutus 1950 bahwa penjajahan Belanda di Irian Barat harus berakhir tahun itu juga. Apabila penyelesaian secara damai gagal diselenggarakan, pemerintah NKRI akan menempuh jalan kekerasan demi menentukan siapa yang berhak atas kawasan tersebut. Perjuangan akan dilanjutkan hingga Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI.

e. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Timur

Wilayah Negara Indonesia Timur dibagi menjadi 13 daerah otonom yang masing-masing masih dibagi lagi menjadi daerah-daerah swapraja (kerajaan atau *zelfbestuur*). Saat itu, di seluruh NIT terdapat 115 kerajaan yang menjalankan kekuasaan dan pemerintahannya berdasarkan undang-undang *zelfbestuur regeling* tahun 1938. Guna menjalankan tugas pemerintahan yang lebih tinggi, dibentuk gabungan *zelfbestuur* yang bekerja sama dengan kekuasaan pemerintahan yang lebih tinggi, berupa 13 daerah otonom di atas. Adapun ketigabelas daerah otonom tersebut, berdasarkan bab III, pasal 14 Aturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (*Regulations for Formation of the State of East Indonesia*), adalah sebagai berikut:[300]

1. Sulawesi Selatan, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (1) Wajo, (2) Soppeng, (3) Malusetasi, (4) Suppa, (5) Sawito, (6) Batulappa, (7) Kassa, (8) Sidenreng, (9) Tanette, (10) Rappang, (11) Maiwa, (12) Enrekang, (13) Malua, (14) Buntu-Batu, (15) Alla, (16) Barru, (17) Soppengriaja, (18) Majene, (19) Pambuang, (20) Cenrana, (21) Balangnipa, (22) Binuang, (23) Mamuju, (24)

300. Lihat *From the Formation of the State of East Indonesia Towards the Establishment of the United States of Indonesia*, halaman 817. Beberapa ejaan penulisan nama swapraja diubah agar sesuai dengan bagian lainnya buku ini, sebagai contoh Goa ditulis Gowa.

Tapalang, (25) Luwu, (26) Tana Toraja, (27) Buton, (28) Laiwui, (29) Gowa, dan (30) Bone.

2. Bali, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (31) Buleleng, (32) Jembrana, (33) Badung, (34) Tabanan, (35) Gianyar, (36) Klungkung, (37) Bangli, dan (38) Karangasem.
3. Maluku Utara, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (39) Ternate, (40) Tidore, dan (41) Bacan.
4. Maluku Selatan
5. Minahasa
6. Timor dan pulau-pulaunya, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (42) Kupang, (43) Amarasi, (44) Fatuleu, (45) Amfoan, (46) Rote, (47) Sawu, (48) Mollo, (49) Amanuban, (50) Miomaffo, (51) Biboki, (52) Insana, (53) Belu, (54) Alor, (55) Barnusa, (56) Pantar Matahari Naik, (57) Kui, (58) Kolana, (59) Batulolong, dan (60) Pureman.
7. Lombok
8. Sumbawa, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (61) Bima, (62) Dompu, dan (63) Sumbawa.
9. Flores, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (64) Ende, (65) Lio, (66) Larantuka, (67) Adonara, (68) Sikka, (69) Ngada, (67) Riung, (68) Nage-Keo, dan (69) Manggarai.
10. Sumba, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (70) Kanatang, (71) Lewa, (72) Tabundung, (73) Melolo, (74) Rendi, (75) Waijelo, (76) Masu Karera, (77) Laura, (78) Waijewa, (79) Kodi, (80) Lauli, (81) Mamboro, (82) Umbu Ratu Nggai, (83) Anakalang, (84) Wanokaka, dan (85) Lamboya.
11. Sulawesi Tengah, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (86) Tojo, (87) Poso, (88) Lore, (89) Una-una, (90) Bungku, (91) Mori, (92) Banggai, (93) Banawa, (94) Tawaili, (95) Palu, (96) Sigi-Dolo, (97) Kulawi, (98) Parigi, (99) Moutong, dan (100) Toli-Toli.
12. Sulawesi Utara, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (101) Buol, (102) Bolaang Mongondow, (103) Bolaang Uki, (104) Bintauna), dan (105) Kaidipang Besar.
13. Sangihe-Talaud, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (106) Tabukan, (107) Siau, (108) Kendahe-Tahuna, (109) Manganitu, (110) Tagulandang, dan (111) Kepulauan Talaud.

Susunan pemerintahan di berbagai swapraja yang tercakup dalam NIT secara umum tidak mengalami perubahan dibandingkan semasa penjajahan Belanda. Para raja tetap memerintah didampingi oleh asisten residen dan kontrolir. Kendati demikian, pada perkembangan selanjutnya, peranan para pejabat Belanda makin dikurangi, terutama semenjak tahun 1947. Pemerintah NIT memberikan perintah untuk membebastugaskan secara bertahap para pegawai pemerintahan Belanda. Residen dan asisten residen kini hanya berfungsi sebagai penasihat saja, meski kekuasaan mereka dalam praktiknya tetap besar. Kontrolir-kontrolir Belanda yang semenjak zaman kolonial bertugas mendampingi para raja kini diganti oleh Kepala Pemerintahan Setempat (KPS).

Para raja juga berperanan aktif dalam pemerintahan NIT. Sebagai contoh, Ide Anak Agung Gde Agung adalah Raja Gianyar yang kemudian menduduki jabatan sebagai perdana menteri NIT. Raja Umbu Tunggu Mbili dan Lende Kalumbang dari Pulau Sumba pernah menjadi anggota parlemen NIT.

III. Negara Sumatera Timur

a. Kondisi Sumatera Timur Hingga Meletusnya Revolusi Sosial

Terdapat beberapa faktor yang mendorong berdirinya Negara Sumatera Timur (NST). Pertama-tama adalah sikap para sultan sendiri dalam menanggapi proklamasi kemerdekaan. Semenjak abad 19, hubungan Belanda dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera Timur mengalami peningkatan yang intensif. Belanda mengadakan kontrak politik dengan para penguasa di kawasan tersebut, seperti Sultan Basyaruddin dari Serdang pada 16 Agustus 1862. Perjanjian yang dikenal sebagai *Acte van Erkenning* itu menyatakan bahwa Serdang beserta daerah vasalnya, seperti Padang Bedagai, Denai, Percut, dan Perbaungan, mengakui kedaulatan Belanda. Selanjutnya diadakan pula perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lainnya, misalnya dengan Bilah pada 11 Agustus 1862, Kota Pinang pada 2 Oktober 1864, Langkat pada 21 Oktober 1885, dan Asahan pada 2 Maret 1886. Secara praktis, antara 1870 hingga 1942, kerajaan-kerajaan yang berada di Sumatera Timur telah bergabung dengan Hindia Belanda. Meskipun demikian, masing-masing kerajaan yang digolongkan sebagai daerah swapraja itu tetap diberi wewenang menyelesaikan permasalahan internal berdasarkan hukum adat atau agama sehingga seolah-olah kedaulatan para penguasa di negerinya sendiri tetap terjaga.

Pemerintah Belanda membuka perkebunan beserta pertambangan di kawasan Sumatera Timur serta bekerja sama dengan para sultan dalam hal pengelolaannya. Para penguasa setempat selain memperoleh gaji dari pemerintah Belanda dan pemasukan dari sektor pajak, juga menerima bagi hasil yang berasal dari usaha perkebunan serta pertambangan tersebut. Pada 1915, 51,9 % pajak di Serdang, 37,9 % di Langkat, dan 39,2 % di Deli masuk ke kas pribadi sultan. Sementara itu, para raja di Dataran Simalungun dan Karo mendapatkan 16,1 % dan 10,9 %. Minyak yang ditemukan di Pangkalanbrandan, wilayah kekuasaan Langkat, makin menambah kemakmuran bagi kesultanan. Itulah sebabnya kekayaan pribadi para raja makin menggelembung. Pendapatan mereka sungguh fantastis untuk ukuran saat itu. Sultan Langkat memperoleh fl.184.568 pada 1931. Raja-raja di Simalungun meski penghasilannya tidak sebesar para raja di pesisir Timur, tetap memeroleh keuntungan yang cukup besar dari usaha perkebunan di negerinya.

Mengingat pendapatan dan gaji yang besar dari pemerintah Belanda di atas, bergabung dengan negara republik mungkin bukan merupakan pilihan yang menarik bagi mereka. Sultan Deli secara terang-terangan tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Saat penobatan Sultan Osman Sani (Tengku Otteman) menggantikan Sultan Amaludin Sani Perkasa Amasyah yang meninggal dunia pada 5 Oktober 1945, pasukan Belanda dipakai sebagai pengawal upacara. Tamu-tamu penting berkebangsaan Belanda, seperti mantan Gubernur Dr. Beck, mantan Residen Bruggeman, dan lain sebagainya, dipersilakan masuk ke dalam ruang kehormatan. Sementara itu, para tamu Republik hanya ditempatkan di ruangan umum. Dua minggu setelah dinobatkan, sultan mengirim surat pernyataan kesetiaannya kepada Ratu Belanda. Meskipun demikian, ada juga anggota kerajaan yang mendukung Republik, seperti Datuk Jamil dan Tengku Musa. Sultan Serdang, Langkat, dan Asahan setelah negosiasi dengan para pemuda pendukung republik yang tergabung dalam Barisan Pemuda Indonesia (BPI) baru bersedia mengibarkan bendera merah putih di istananya.

Kondisi keamanan Sumatera Timur pada awal era kemerdekaan mengalami kemerosotan drastis. Muncul gerombolan-gerombolan perampok yang mengancam kaum keturunan China dan India. Adanya laskar-laskar bersenjata yang berdalih mempertahankan kemerdekaan turut memperkeruh suasana. Para pendukung Republik sendiri mencemaskan kondisi ini karena jalannya roda pemerintahan menjadi terhambat. Masyarakat mulai mencemaskan jatuhnya kekuasaan ke tangan komunis.

Kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur merasa tak nyaman dengan perkembangan yang berlangsung saat itu. Guna melindungi kepentingan kerajaan dan orang-orang Melayu, pada bulan Oktober 1945 mereka mendirikan Perkoempoelan Anak Deli (PADI). Sejumlah 5.000 orang pemuda Melayu berhasil direkrut menjadi anggota PADI yang bertujuan mempertahankan status kerajaan. Pembentukan PADI ini sesungguhnya tak lepas dari kecemasan berbagai kerajaan terhadap ketidakpastian arah perkembangan republik yang masih sangat muda usianya itu.

Sebagai wakil pemerintah RI, Tengku Muhammad (T.M.) Hasan diangkat sebagai gubernur Sumatera. Ia membuka kantor gubernur di Medan dan memerintahkan mobilisasi umum serta pembentukan TKR. Gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas penting peninggalan Belanda diambil alih oleh Republik. Diserukan pula kepada para pegawai dan pejabat agar menolak bekerja pada kantor-kantor yang tidak bersedia mengibarkan bendera merah putih. Guna melancarkan roda pemerintahan Republik dibentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI), upacara peresmian berdirinya pemerintah RI diselenggarakan pada 6 Oktober yang dilanjutkan dengan pawai besar-besaran di Medan. Pawai ini bermaksud memperlihatkan kepada Sekutu beserta NICA bahwa kemerdekaan itu merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia dan bukannya Soekarno–Hatta saja. Gerakan mendukung Republik makin merebak pada awal bulan Oktober 1945. Hal ini berlangsung pula di kota-kota besar lainnya, seperti Binjai, Brastagi, Kabanjahe, dan Tebing Tinggi.

Meski otoritas Republik telah ditegakkan di Sumatera Timur, kedudukannya masih rapuh. Hampir 99% wilayah Karesidenan Sumatera Timur terdiri dari swapraja atau daerah otonomi bersifat kerajaan. Hampir sebagian besar penguasanya belum bersedia mengakui Republik. Dengan demikian, pemerintah Republik di Sumatera Timur hanya berfungsi sebagai perantara saja. Kenyataan ini tentunya kurang menguntungkan bagi perjuangan menghadapi Belanda. Selain itu, KNI tak dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena diganjal oleh wakil-wakil kerajaan. Akhirnya, KNI diambil alih oleh para pemuda berjiwa radikal, terutama yang berasal dari BPI.

Tentara Sekutu yang tergabung dalam Divisi India ke-26 di bawah pimpinan Brigadir T.E.D. Kelly mendarat di Belawan pada 10 Oktober 1945. Mereka bergerak menduduki Medan, Palembang, dan Padang. Belanda dengan NICA-nya turut membonceng kedatangan pasukan Sekutu ini. Pihak kerajaan yang merasa terancam

oleh sikap radikal para pemuda menyambut baik kedatangan Sekutu beserta NICA. Mereka berharap agar pasukan asing itu dapat memberikan perlindungan serta memulihkan kondisi sebelum meletusnya Perang Dunia II. Sebaliknya, para pendukung Republik menganggap kerja sama antara Sekutu, NICA, dan pihak kerajaan sebagai pelecehan terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan. Hal ini malah memicu sikap anti-Belanda dan kerajaan.

Tengku Muhammad Hasan menyadari dilema yang dihadapi para sultan karena ia sendiri merupakan keturunan bangsawan. Para sultan pada satu sisi terikat dengan *Korte Verklaring*, sedangkan pada sisi lain masih meragukan niat pemerintah RI. Oleh karenanya, politik yang diterapkannya lebih mengarah pada rekonsialisasi dengan para sultan dan berupaya merangkul mereka ke dalam pangkuan RI. Upaya menarik sultan-sultan Sumatera Timur dilakukan dengan mendudukkan kaum bangsawan dalam susunan pemerintahan yang baru.

Pada 29 Oktober 1945, T.M. Hasan mengangkat Tengku Hafas dari kerajaan Deli sebagai residen Sumatera Timur, Mr. Mohamad Yusuf diangkat sebagai walikota Medan, Tengku Musa sebagai asisten residen Labuhan Batu, Tengku Amir Hamzah, seorang bangsawan Langkat, sebagai asisten residen Langkat, Madja Purba sebagai asisten residen Simalungun, Negerajai Meliala sebagai asisten residen di Tanah Karo, dan Tulus sebagai asisten residen di Deli. Seluruh pengangkatan pejabat Republik ini dimaksudkan menepis keraguan para sultan. T.M. Hasan menyampaikan pula kesanggupan Republik mengakui kedudukan raja-raja dan menawarkan kepada Sultan Deli beserta Langkat tunjangan sebesar setengah juta uang Jepang yang diambil dari kas Republik[301].

Kendati demikian, tawaran T. M. Hasan tak memperoleh tanggapan serius pihak sultan. Para pemuda yang berjiwa radikal tidak dapat menoleransi lagi sikap raja-raja tersebut. Pada 1 Desember 1945, para pemuda yang tergabung dalam Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) Tanjung Pura menekan Sultan Langkat agar mengakui RI, menyerahkan senjatanya kepada anggota Pesindo setempat, dan menghentikan seluruh hubungannya dengan NICA. Sultan Langkat mengikuti kemauan para pemuda ini dan mengibarkan bendera merah putih di depan istananya. Sebagai wujud nyata dukungannya, ia menyerahkan uang sebesar 100.000 Rupiah kepada pemerintah RI. Selanjutnya, dia mengajukan permohonan kepada Presiden Soekarno

301. Lihat *Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia*, halaman 64–65.

agar mengakui otonomi Kesultanan Langkat. Sultan Serdang dan Asahan mengajukan pula permintaan senada kepada presiden RI agar otonomi kedua kesultanan itu diakui.

Mereka juga dipaksa mengeluarkan pengakuan resmi terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Tak berapa lama setelah itu, berkibarlah bendera merah putih di depan istana dan kantor mereka. TKR dan Pesindo membuat pengumuman bersama yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjalin kerja sama dengan NICA akan dijatuhi hukuman mati. Bersamaan dengan itu merebak permusuhan terhadap keturunan China. Barisan pemuda dan laskar-laskar merampas toko-toko milik etnis China di Medan dan kota-kota lainnya sehingga situasi menjadi mencekam. Penyebab tindakan anarkis ini adalah tuduhan bahwa etnis China kerap bekerja sama dengan NICA. Meskipun demikian, terdapat pula tiga organisasi etnis Tionghoa yang pro-Republik dan banyak mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yakni Liga Demokratik Cina Perantauan, Federasi Asosiasi Pemuda Cina, dan Masyarakat Persahabatan Indonesia[302]. Ketiga organisasi ini merupakan penghubung efektif bagi aktivitas perjuangan dalam bidang politik beserta ekonomi antara Sumatera Timur dengan Malaya dan Singapura.

Bersamaan dengan kondisi yang tak menentu ini, pecahlah revolusi sosial di Aceh yang bertujuan melumat kekuasaan para *uleebalang* (kepala distrik). Para raja khawatir pergolakan seperti ini akan meluas pula ke Sumatera Timur. Oleh sebab itu, mereka memutuskan mengadakan pendekatan terhadap Republik. T.M. Hasan menawarkan perundingan kepada pihak kerajaan. Ia kembali menyampaikan pula bahwa pemerintah RI siap melindungi hak dan kekuasaan para penguasa tradisional. Tawaran ini disambut oleh Sultan Deli, Serdang, dan Langkat.

Pertemuan pertama terselenggara pada 12 Januari 1946 dan dihadiri baik oleh Amir, T.M. Hasan, Loet Siregar, Muhamad Yusuf, dan Yunus Nasution (wakil Republik); Tengku Mr. Bahriun dan Tengku Hafaz (wakil Republik dan kerajaan); Sultan dan raja muda Langkat beserta putra mahkota dan Datuk Hafiz Haberham dari Deli (wakil kerajaan).

Loeat Siregar dan Amir menyarankan agar para sultan meneladani Sultan Yogyakarta yang menegakkan demokrasi di daerahnya. Wakil-wakil kerajaan akhirnya sepakat membentuk Dewan Perwakilan Rakyat di daerahnya masing-masing. Mereka mengakui pula KNI sebagai Dewan Perwakilan Sementara serta berjanji melaksanakan

302. Lihat *Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia*, halaman 68.

demokratisasi sebaik-baiknya. Wakil republik menyatakan kegembiraanya dengan hasil pertemuan ini. Tetapi sebagian besar pemuda yang beraliran radikal masih belum puas dengan keputusan di atas.

Perundingan kembali diadakan pada 3 Februari 1946 di gedung KNI Medan. Kali ini pihak kerajaan diwakili sultan-sultan Asahan, Deli, Langkat, Panai, Siak, dan Bilah; Yang Dipertuan Kualuh Ledong, serta raja-raja Karo dan Simalungun. Sementara itu, delegasi Republik dipimpin oleh T.M. Hasan, Amir, Loeat Siregar, Xarim M.S., Mohamad Yusuf, Tengku Dr. Mansoer, Tengku Hafaz, T. Damrah, dan T. Bahriun. Karena berdasarkan UUD 45 pasal 18, kedudukan istimewa para raja diakui secara resmi, T.M. Hasan mendesak pihak kerajaan memutuskan hubungannya dengan Belanda. Lebih jauh lagi, Loeat Siregar menekankan bahwa tujuan pemerintah RI adalah menegakkan demokrasi dan melenyapkan feodalisme. Menanggapi hal ini, Sultan Langkat atas nama raja-raja Sumatera Timur menyatakan dukungannya kepada Republik. Sultan berjanji mendukung proses demokratisasi beserta prinsip-prinsip yang dikemukakan T.M. Hasan. Semua pihak tampaknya puas terhadap hasil pertemuan di atas, namun tidak demikian halnya dengan para pemuda.

Menindak lanjuti pertemuan di atas, dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. Mahadi dan dikoordinatori oleh Yunus Nasution dengan tugas mempersiapkan proses demokratisasi di berbagai daerah swapraja. Gubernur T.M. Hasan beserta Xarim M.S. mengadakan kunjungan ke Sumatera Selatan pada 6 Februari 1946. Sementara itu, Panitia Mahadi sendiri tidak sanggup melakukan kemajuan berarti. Kepergian gubernur dipergunakan para pemuda meluapkan amarahnya terhadap para sultan dan kaum bangsawan sehingga meletuslah revolusi sosial di Sumatera Timur.

b. Revolusi Sosial di Sumatera Timur

Selama gubernur Sumatera mengadakan perjalanan, Dr. Amir ditunjuk sebagai wakilnya. Namun, ia tak dapat menguasai keadaan. Para pemuda tidak memercayai niat para sultan dalam menjalankan demokratisasi di kerajaannya. Bahkan Jusuf Abdullah Puar yang mewakili Pesindo menegaskan pada rapat 17 Februari 1946 bahwa setiap kompromi antara Republik dengan kerajaan hanya memperpanjang usia berbagai kerajaan tersebut. Situasi makin memanas dengan dibentuknya PP (Persatuan Perjuangan) yang menjadi motor pengganyangan terhadap swapraja. Dalam rapat-rapat mereka kerap dibicarakan jalinan kerja sama antara para raja dengan

Belanda, pembentukan pengawal bersenjata oleh berbagai kerajaan, dan propaganda-propaganda NICA yang disimpan di istana.

Dr. Amir mengadakan kunjungan pada 27 Februari 1946 guna meredakan suasana. Rombongannya dicegat rakyat di Tebing Tinggi dan Kisaran yang menuntut agar segenap musuh dan penghalang cita-cita kemerdekaan dihabisi. Setibanya di Tanjung Balai, rombongan dijamu dengan ramah oleh Sultan Asahan. Dalam pertemuan keesokan harinya, sultan berjanji memberikan dukungannya bagi perjuangan. Kendati demikian, 20.000 pengunjung menyerukan agar sultan memperlihatkan bukti nyata bagi janjinya itu. Ketika sampai di Siantar, rombongan Dr. Amir menyaksikan coretan-coretan di tembok yang berbunyi "Raja-raja Mengisap Darah Rakyat" dan "Rakyat Menjadi Hakim."[303] Rombongan terus menerus disambut dengan seruan mengganyang kekuasaan para raja. Dr. Amir tiba kembali di Medan pada 2 Maret dan merasa yakin bahwa para pemuda akan menunda aksinya.

Ternyata dugaan Dr. Amir ini meleset karena keesokan harinya meletus revolusi pengganyangan para raja. Selamat Ginting memimpin pasukan terkuat di Karo dan menangkap 17 *raja urung* (raja-raja kampung besar) beserta *sibayak* (kerajaan)-nya serta mengasingkan mereka ke Aceh Tengah. Dua orang politisi terkemuka, yakni Nerus dan Nolong Ginting Suka, turut pula ditangkap. Raja kerajaan Panai, salah satu kerajaan di Simalungun ditangkap oleh laskar Barisan Harimau Liar (BHL), beserta bebeberapa orang pengikutnya ia dibawa ke markas BHL dan dihabisi nyawanya. Keesokan harinya, gerombolan BHL menangkap dan membunuh Raja Raya. Tempat kediamannya diobrak-abrik dan emas beserta barang-barang berharga lainnya dirampas oleh mereka. Raja Silimakuta kebetulan sedang tak berada di rumahnya yang kemudian dibakar oleh BHL. Raja Purba tertangkap oleh BHL, tetapi dapat dibebaskan oleh TRI (Tentara Republik Indonesia). Sementara itu, Raja Silimakuta yang lolos dari pembantaian mendapatkan pula perlindungan TRI.

Pada 3 Maret 1946, massa bersenjata mengepung istana Sultan Asahan di Tanjung Balai. Terjadi baku tembak antara TRI dan polisi yang bertugas mempertahankan istana. Kendati demikian, akhirnya mereka menyerah dan membiarkan istana diserbu oleh massa. Sultan meloloskan dirinya dan berhasil menyelamatkan diri setelah 17 hari dikejar-kejar oleh laskar rakyat. Para pemuda melampiaskan amarahnya kepada Tengku Musa, pejabat Republik yang dianggap terlalu bersimpati terhadap kerajaan.

303. Lihat *Yang Berlawanan*, halaman 170.

Ia beserta istri Belandanya dibunuh secara brutal. Pembantaian juga melanda kaum bangsawan sehingga dalam beberapa hari saja 140 orang menjadi korbannya. Istana kerajaan kemudian diduduki oleh massa. Di daerah Kualuh, massa menyerbu istana sultan di Tanjung Pasir dan seluruh penghuninya ditawan. Sultan beserta putranya kemudian ditemukan luka berat karena tusukan tombak di sebuah kuburan Tionghoa. Petinggi-petinggi kerajaan lainnya ditangkap dan demikian pula dengan keluarga mereka. Tengku Hasnan dan Tengku Long dipenggal kepalanya oleh laskar rakyat.

Keluarga Kesultanan Serdang luput dari pembantaian. Kapten Tengku Nurdin, komandan TRI di Perbaungan yang masih keturunan bangsawan, mendapat perintah Kolonel Ahmad Tahir agar mengambil alih kekuasaan. Pada 4 Maret 1946, segera setelah berlangsungnya penyerahan kekuasaan, para bangsawan beserta pejabat tinggi kesultanan ditawan di istana oleh TRI sehingga lolos dari kebrutalan para pemuda. Istana Kesultanan Deli berada dekat markas Sekutu sehingga begitu revolusi sosial meletus mereka mendapatkan perlindungan Inggris.

Istana Kesultanan Langkat di Tanjungpura sebenarnya memiliki basis pertahanan yang kuat. Pasukan PADI dan Pasukan Ke-V yang dipimpin Dr. Nainggolan merupakan pendukung kesultanan dan bersiap membela sultan hingga titik darah penghabisan. Selain itu, istana memiliki pasukan pengawalnya sendiri yang disebut PIL (Penjaga Istana Langkat). Beberapa waktu sebelumnya, mereka telah mendapat bantuan 40 pucuk senjata dari Inggris. Sultan sendiri hendak diselamatkan oleh Inggris, tetapi dia menolaknya karena menyadari ancaman yang akan menimpa kaum bangsawan lainnya. Pada 4 Maret, anggota Pesindo menangkap kaum bangsawan dan para pendukung kerajaan. Di antara mereka yang menjadi korbannya adalah Tengku Amir Hamzah, penyair Pujangga Baru. Tengku Amir Hamzah sendiri sesungguhnya adalah wakil pemerintah RI. Selain itu, banyak pula anggota Pasukan Ke-V yang dihabisi nyawanya.

Demi menghindari konfrontasi lebih lanjut, Sultan Langkat bersedia menarik mundur PIL dari Tanjungpura. Kendati demikian, pada 8 Maret para pemuda mengepung istana Langkat. Listrik diputuskan pada malam hari tanggal 9 Maret dan dilancarkan serbuan terhadap istana. Para penghuni istana ditangkap dan tujuh orang tengku dibantai secara brutal. Dua orang putri sultan diperkosa oleh para pemimpin pemuda. Namun, pelakunya kemudian dijatuhi hukuman mati. Secara keseluruhan diperkirakan 38 bangsawan Langkat menjadi korban revolusi sosial ini.

Para pemimpin Republik mengecam tindakan brutal di atas dan menyatakan bahwa hal seperti itu merugikan perjuangan. Pemerintah Republik seolah-olah kehilangan wibawanya di hadapan pasukan Sekutu karena tak sanggup mengendalikan keadaan. Dr. Amir, pejabat gubernur yang mewakili T.M. Hasan, merasa jiwanya terancam dan meminta perlindungan Inggris pada 25 April 1946. Terlepas dari semua itu, efek yang ditimbulkan revolusi sosial ini sungguh dashyat karena dalam waktu singkat berhasil menyapu kekuasaan para sultan dan raja.

c. Berdirinya Negara Sumatera Timur (NST)

Langkah awal pembentukan berbagai negara boneka adalah Konferensi Malino yang diprakarsai oleh van Mook pada bulan Juli 1946. Konferensi ini bertujuan memecah belah bangsa Indonesia sehingga menuai kecaman wakil presiden RI, Drs. Moh. Hatta. Pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan Agresi Militer I dan berhasil menduduki Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Brastagi, Tanjung Balai, Seribu Dolok, dan Kabanjahe. Belanda melakukan pembersihan terhadap para pendukung Republik dan demikian pula laskar-laskar rakyat. Namun, Dewan Keamanan PBB mengecamnya sehingga Belanda terpaksa menghentikan aksinya. Pasukan Belanda kemudian membebaskan para sultan dan kaum bangsawan yang ditawan laskar rakyat, seperti Sultan Langkat dan Asahan serta Raja Tanah Jawa dan Siantar.

Karena wilayahnya telah diduduki Belanda, TNI dan laskar rakyat mengundurkan diri ke pedalaman sambil melaksanakan aksi bumi hangus. Orang-orang Melayu dan China menjadi sasaran kemarahan laskar rakyat. Para pemuka adat Melayu meminta perlindungan kepada Belanda seraya melaporkan bahwa petani-petani Melayu telah diusir dari tanahnya oleh TNI dan laskar-laskar rakyat seperti BHL. Tindakan-tindakan seperti ini mencoreng eksistensi Republik di Sumatera sehingga membuka peluang lahirnya Negara Sumatera Timur (NST).

Pada 30 Juli 1947, diadakan rapat umum di Medan dengan tujuan menuntut didirikannya Otonomi Sumatera Timur. Pertemuan itu dihadiri pula oleh Kolonel Scholten, komandan Brigade Z; Mr. J. Gerritsen, residen Sumatera Timur; dan Dr. J.J. van de Velde, penasihat politik pemerintah kolonial. Djomat Purba yang bertindak sebagai juru bicara pertemuan menyerang pimpinan Republik karena gagal menertibkan kondisi Sumatera Timur. Ia mengajukan permohonan kepada pemerintah Belanda agar mengizinkan pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Timur (DIST) yang otonom. Sebagai persiapan, Djomat Purba menyatakan bahwa

tak lama kemudian akan dibentuk Komite DIST. Van de Velde memuji niat ini dan menganggapnya sebagai keberanian rakyat Sumatera Timur menentukan nasibnya sendiri. Rapat umum ini boleh dianggap sebagai embrio pembentukan NST.

Pemerintah Belanda menegaskan bahwa NST hendaknya menjunjung tinggi demokrasi. Pejabat-pejabat Belanda beserta anggota komite DIST menyusun birokrasi pemerintahan NST. Naskah konstitusi NST dipersiapkan di bawah pimpinan Dr. Tengku Mansoer dan komisi teknik dewan, beranggotakan Mr. Djaidin Purba, Tengku Mr. Bahriun, Tengku Hafas, G. J. Forch, G. van Gelder, dan Tengku Ubaidullah. Dewan Sumatera Timur yang beranggotakan 28 orang terbentuk pada 30 Oktober 1947. NST sedianya akan dikepalai oleh seorang wali negara. Pemilihan wali negara dilangsungkan pada 15 November 1947. Hasilnya, Dr. Tengku Mansoer terpilih sebagai wali negara NST. Sementara itu sebagai ketua dewan sementara I dan II, masing-masing terpilih Tengku Bahriun dan C. J. J. Hoogenboom.

Negara Sumatera Timur resmi berdiri pada 25 Desember 1947 berdasarkan dekrit yang dikeluarkan van Mook yang mengangkat status Daerah Istimewa Sumatera Timur sebagai negara. Kendati demikian, proklamasinya baru dilangsungkan pada 29 Januari 1948, dan bersamaan dengan itu Dr. Tengku Mansoer diambil sumpah jabatannya selaku wali negara. Bendera NST yang berwarna kuning, putih, dan hijau untuk pertama kalinya dikibarkan. Warna kuning melambangkan kemuliaan atau kebesaran, putih melambangkan ketenangan, dan hijau melambangkan kesejahteraan.

Proklamasi NST menuai kecaman pemerintah RI yang menuduhnya sebagai boneka Belanda. Bahkan Muhamad Said merendahkan NST sebagai Negara *Nasotontu* (Negara Tidak Menentu). Kendati demikian, segenap tuduhan ini dibantah oleh para petinggi NST, walaupun Tengku Mansoer dalam pidatonya mengakui bahwa berdirinya negara tersebut dapat terlaksana berkat bantuan Belanda. Pendirian NST ini sesungguhnya berakar dari ketakutan setelah merebaknya revolusi sosial yang mengacaukan segenap tatanan di Sumatera Timur. Tidak semua pendukung NST adalah pro-Belanda. Tidak sedikit di antara mereka yang pada mulanya adalah pendukung Republik, tetapi terpaksa meminta perlindungan Belanda akibat tidak menentunya situasi masa itu.

d. Perkembangan dan Pembubaran NST

Konstitusi NST mengacu kepada NIT, meskipun demikian pada mulanya terdapat hal-hal mendasar yang belum ditetapkan. Sebagai contoh adalah pembagian

kekuasaan legislatif, eksekutif, wilayah, dan barisan pengawal NST. Wilayah NST belum dapat ditetapkan secara pasti karena beberapa kawasan masih berada dalam genggaman Republik. Akhirnya diambil ketentuan bahwa wilayah NST adalah daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Belanda atau terletak di belakang "Garis van Mook" (garis batas kekuasaan Belanda). Menjelang pertengahan 1949, wilayah NST mulai terorganisasi. Berdasarkan surat keputusan wali negara tertanggal 1 Juni 1949, NST dibagi menjadi 5 *afdeeling*, yakni Langkat, Tanah Karo, Deli dan Serdang, Sentral Sumatera Timur, dan Asahan[304]. Masing-masing *afdeeling* dikepalai oleh orang Belanda, yakni

- A.C. Moree (Langkat)
- Ch. Van Hespen (Tanah Karo)
- Dr. Th. H. M. Loze (Deli dan Serdang)
- J.W. Burger (Sentral Sumatera timur)
- W. Veenbaas (Asahan)

Banyaknya jabatan yang diduduki orang Belanda menunjukkan bahwa roda pemerintahan NST dikendalikan oleh Belanda. NST secara politis berada di bawah kendali pemerintah Belanda atau pemerintah federal sementara di Jakarta sehingga kekuasaannya sangat terbatas.

Reorganisasi administrasi diumumkan oleh wali negara berdasarkan surat keputusan tertanggal 21 Desember 1949. Berdasarkan surat tersebut, NST dibagi menjadi enam wilayah yang membawahi berbagai luak, yakni

	Nama wilayah	**Ibukota**	**Luak (Distrik)**
1	Langkat	Binjai	Langkat Hulu Langkat Hilir
2	Tanah Karo	Kabanjahe	
3	Deli Serdang	Meddan	Deli Hilir (ibukota: Medan) Deli Hulu (ibukota: Pancurbatu) Serdang (ibukota: Lubuk Pakam) Padang (ibukota: Tebing Tinggi)
4	Simalungun	Pemantang Siantar	

304. Lihat *Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia*, halaman 106.

5	Asahan	Tanjung Balai	Asahan Batubara
6	Labuhan Batu	Rantau Prapat	

Pengangkatan kepala masing-masing wilayah dan luak di atas dikukuhkan berdasarkan S.K. no. 417 24 Desember 1949. Secara umum struktur pembagian wilayah NST secara berjenjang adalah sebagai berikut: wilayah (*afdeeling*)–luak (*onder-afdeeling*)–distrik (*district*)–kampung (*onder-district*). Meski telah dilakukan pembagian wilayah, sesungguhnya kekuasaan NST hanyalah mencakup kota-kota besar. Kawasan pedalaman dan pedesaan merupakan basis pendukung Republik yang teguh.

Sebagian pihak menduga bahwa gerakan NST identik dengan kaum bangsawan atau kerajaan, hal ini tidak sepenuhnya benar. Masalah kerajaan tidak pernah dibicarakan dengan tegas dalam konstitusi NST, walaupun beberapa kerabat kerajaan menduduki jabatan penting dalam negara tersebut, seperti Saibun Abdul Jalil Rahmatsyah dari Asahan yang menjabat sebagai kepala departemen keamanan NST. Isu seputar status kerajaan mencuat kembali pada Januari hingga Maret 1949. Sultan Deli mengajukan permohonan pemulihan status kerajaan seperti sebelum Perang Dunia II kepada wakil pemerintah Belanda di Jakarta. Ia memprotes pengalihan kekuasaan Kesultanan Deli kepada pemerintah NST. Pembicaraan antara sultan, wakil pemerintah Belanda, dan wali negara NST menemui jalan buntu.

Itulah sebabnya, Sultan Deli menggalang penentangan terhadap NST. Partai-partai politik terbentuk di Serdang dan Langkat yang bertujuan menuntut pemulihan otonomi kesultanan. Partai-partai pro-otonomi kerajaan yang terbentuk di Sumatera Timur antara lain di Langkat Sepakat, Serdang Sepakat, dan Deli Sepakat. Sultan Deli mengadakan rapat dengan sebelas raja Sumatera Timur lainnya di istananya pada 20 Februari 1949 yang dihadiri oleh Raja Langkat, Serdang, Asahan, Indrapura, Kualuh, Lima Puluh, Kota Pinang, Tanah Datar, Siantar, dan Suku Dua. Para raja menjalin kerja sama yang lebih erat demi melangsungkan eksistensi mereka di masa mendatang.

Sultan Deli atas nama para raja Sumatera Timur mengajukan resolusi kepada pemerintah federal dan Belanda agar ikatan *Korte Verklaring* tetap berlaku antara mereka. Tuntutan Sultan Langkat membentuk dewan raja-raja kembali disuarakan. Tetapi pemerintah Belanda tampaknya kurang mempedulikan berbagai tuntutan di

atas, mengingat saat itu mereka menghadapi permasalahan dengan bekas jajahannya itu karena agresi militer mereka.

Gerakan-gerakan bawah tanah yang mendukung Republik berupaya menggulingkan NST secara diam-diam. Menjelang akhir 1949, marak berbagai demonstrasi mementang NST. Rakyat Karo pada 28 November 1949 menyatakan kebulatan tekad mereka di Tiganderket dan menuntut agar Sumatera Timur segera dilebur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyusul rakyat Deli Hulu yang berjumlah 8.000 orang berdemonstrasi besar-besaran ke Medan guna mengajukan tuntutan senada pada 31 Agustus 1950. Kendati demikian, kaum demonstran ini tidak diperbolehkan meneruskan perjalanannya ke Medan dan hanya diperkenankan mengirim wakilnya. Gelombang demonstrasi terus melanda Sumatera Timur dan makin meluas. Pemerintahan boleh dikatakan tidak berjalan secara efektif. Hal ini pada akhirnya membawa NST pada akhir hayatnya.

IV. Negara Madura

Berdirinya Negara Madura tidak dapat dipisahkan dari keinginan Belanda yang membonceng kedatangan Sekutu untuk menguasai kembali Madura dan kerjasama mereka dengan salah seorang keturunan bangsawan Madura bernama Raden Adipati Aria Cakraningrat. Guna menduduki Madura, Belanda mengerahkan sekitar satu resimen tentara yang terdiri dari gabungan KL (*Koninklijk Leger*, nama resmi tentara Belanda), KNIL, dan VB (*Veiligheids Brigade,* semacam polisi tentara rahasia). Belanda juga menyiapkan suatu pasukan khusus bernama Pasukan Cakra di bawah pimpinan Kapten Muhi, salah seorang bekas perwira Korps Barisan, yang telah ada semenjak zaman kolonial. Pasukan tersebut berkekuatan sekitar 450 orang, terdiri dari para penganggur, buruh-buruh kasar, dan tahanan yang sengaja dibebaskan dari penjara.

Pengintaian dari udara dimulai pada 2 Agustus 1947, tetapi dua pesawat terbang Belanda berhasil ditembak jatuh oleh para pejuang yang bermarkas dekat Kamal. Kapal-kapal perang Belanda kemudian berlabuh di Prenduan serta Ambunten dan menembaki Kalianget. Pendaratan secara serentak baru dilaksanakan pada 4 Agustus 1947. Tank amfibi dan perlengkapan perang lainnya didaratkan di Kesek (sebelah timur Kamal), Camplong (dekat Sampang), dan Branta (dekat Pamekasan). Persenjataan Belanda saat itu lebih unggul dibandingkan dengan para pejuang yang bersenjata seadanya sehingga tidak mengherankan apabila dalam pertempuran yang

tidak seimbang tersebut Belanda dapat mendesak para pejuang ke daerah pedalaman. Kota-kota di Madura, seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan lain sebagainya, satu persatu jatuh ke tangan Belanda. Pasukan Republik mundur dan menyusun pertahanan baru di berbagai lokasi, seperti Arosbaja dan Pagantenan.

Belanda memperkirakan bahwa mereka akan sanggup menguasai Madura dalam waktu seminggu karena musuh yang dihadapi hanya satu resimen tentara Indonesia dan laskar-laskar perjuangan lainnya dengan jumlah keseluruhan sekitar 5.700 orang. Kendati demikian, Belanda mengalami perlawanan yang gigih. Bahkan, pada 16 Agustus 1947 malam–sehari sebelum peringatan Proklamasi Kemerdekaan–para pejuang sekonyong-konyong menyerang Pamekasan yang telah dikuasai Belanda secara besar-besaran. Kaum pejuang berhasil menduduki kota selama beberapa jam. Korban yang berjatuhan di kedua belah pihak boleh dikatakan besar. Pada akhirnya karena kekurangan persenjataan dan bahan makanan, kaum Republikan memutuskan hijrah ke Jawa, yang diikuti pula oleh beberapa aparat pemerintahan.

R.A.A. Cakraningrat yang sebelumnya telah diangkat sebagai residen Madura oleh pemerintah Republik tidak ikut hijrah dan tiba-tiba minta berhenti sebagai pejabat Republik dengan alasan kesehatan. Ternyata sebelum Madura jatuh ke tangan penjajah, ia telah menjalin kerja sama dengan mereka dan mengakui kekuasaan Belanda yang diwujudkan dalam *Regerings Commisatris voor Bestuurangelegenheden* (*Recomba* atau Komisi Pemerintah untuk Masalah Administrasi Pemerintahan). Cakraningrat menuduh bahwa pemerintah Republik telah mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi sehingga ia memutuskan hubungan dengan RI. Ia berdalih bahwa orang Madura ingin diperintah oleh bangsanya sendiri. Karenanya, Cakraningrat berkeinginan mendirikan suatu negara terpisah dengan dirinya sebagai pemimpin. Bahkan, ia tidak keberatan menandatangani kontrak politik dengan Belanda seperti para lelulurnya dahulu, yang artinya menempatkan Madura kembali di bawah perlindungan Belanda. Cakraningrat lalu diangkat oleh Belanda sebagai penguasa yang sah atas pulau tersebut. Saat itu, daerah Sumenep masih dikuasai oleh para pejuang. Oleh sebab itu, Belanda segera mengerahkan kekuatan militernya ke sana. Rakyat dengan gigih mempertahankan negerinya dari aneksasi Belanda hingga gugurlah beberapa pejuang, seperti K.H. Abdullah Sajjad, Ke Late, dan lain sebagainya. Akhirnya, sisa-sisa para pejuang yang masih bertahan di Sumenep itu dapat dihalau ke Jawa.

Agresi Militer I yang dilancarkan Belanda menuai kecaman dunia internasional sehingga memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Atas dasar itulah, pada 17 Januari 1948 diadakan suatu perundingan di atas kapal perang Amerika Serikat bernama *Renville*. Oleh karenanya, kesepakatan yang dihasilkan disebut Perjanjian Renville. Meskipun demikian, seminggu setelah perjanjian itu, Belanda mengadakan pemungutan suara secara diam-diam di Madura, tanpa sepengetahuan komisi pengawas yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Plebisit (jajak pendapat) itu bertujuan menentukan apakah rakyat setuju dengan pendirian Negara Madura atau tidak. Karena dilaksanakan di bawah tekanan Belanda, kurang lebih didapatkan 95% suara yang mendukung dibentuknya Negara Madura. Berdasarkan hasil plebisit, Letnan Gubernur Jenderal van Mook lantas mengesahkan dibentuknya Negara Madura pada 21 Februari 1948 dengan R.A.A. Cakraningrat sebagai wali negaranya.



R.A.A. Cakraningrat beserta istri
Sumber: *Madoera en zijn Vorstenhuis*, halaman 70

Dewan Perwakilan Rakyat Madura dibentuk dua bulan kemudian. Ternyata rakyat memilih 31 orang pro-Republik di antara 40 anggota dewan. Namun, dewan semu ini tidak dapat berfungsi dengan baik karena 20 orang yang berani mendukung Republik diberhentikan dan dipenjarakan oleh Belanda. Sementara itu, R.A.A. Cakraningrat malah dinaikkan gelarnya sebagai pangeran. Belanda yang masih tidak puas dengan hasil Persetujuan Renville melancarkan Agresi Militer II guna melemahkan Republik pada 18 Desember 1948. Di luar dugaan, negara-negara boneka mengecam tindakan Belanda itu. Negara-negara lain juga mengutuk keras aksi tersebut dan melakukan boikot terhadap Belanda. Akhirnya PBB memaksa Belanda membebaskan para pemimpin Republik yang ditawan serta mengadakan perundingan lagi dengan RI.

Tingkat kepuasan rakyat Madura terhadap Negara Madura juga makin menurun. Rakyat mulai menyadari bahwa "negara" mereka belum mempunyai undang-undang dasar sehingga tidak layak dianggap sebagai sebuah negara dalam arti sebenarnya. Selain itu, penyerahan kekuasaan dari tentara pendudukan Belanda ke rakyat Madura tidak kunjung diselenggarakan. Kebebasan mengeluarkan pendapat atau menyuarakan aspirasi boleh dikatakan tidak ada. Belanda melarang pendirian partai politik dalam bentuk apapun. Kehidupan masyarakat juga tidak tenang karena rakyat terpecah antara penentang dan pengikut Belanda. Peraturan Negara Madura baru disahkan pada September 1949 oleh *Recomba* sehingga parlemen mulai berfungsi sebagaimana mestinya. Pemerintahan dibentuk dengan melibatkan orang Belanda sebagai kepala departemen keuangan sehingga memperlihatkan ketergantungan negara boneka itu terhadap Belanda. Faktor lain yang menyebabkan ketidakpuasan rakyat adalah dipegangnya berbagai jabatan strategis oleh kaum kerabat maupun orang kepercayaan R.A.A. Cakraningrat, seperti Mr. Sis Tjakraningrat, putra R.A.A. Cakraningrat, sebagai bupati Bangkalan; Roeslan Tjakraningrat, putra R.A.A. Cakraningrat sebagai sekretaris umum wali negara Madura; Abdul Rachman, kepala Departemen Pemerintahan, Polisi, dan Keamanan Umum Negara Madura, orang kepercayaan R.A.A. Cakraningrat; Kiai Abdoel Hamid Moedlahary, wedono *ter berschikking* wali negara, orang kepercayaan Cakraningrat; Hasjim Sosrodanuatmojo, kepala Kepolisian Negara Madura, orang kepercayaan R.A.A. Cakraningrat; R.P. Abdoel Azis, ajudan R.A.A. Cakraningrat, keponakan R.A.A. Cakraningrat; R.Ar. Abdul Rahman, wedono Bunder, keponakan R.A.A. Cakraningrat, R.T.A. Zainalfatal, bupati Pamekasan,

kerabat R.A.A. Cakraningrat; dan lain sebagainya[305]. Pendukung Republik yang tidak puas merancang gerakan bawah tanah guna membubarkan Negara Madura.

Konferensi Meja Bundar (KMB) diselenggarakan dan sebagai hasilnya terbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari Republik Indonesia dan negara-negara bagian. Rakyat Madura makin merasakan ketidakpuasan pada negaranya. Mereka menyadari bahwa pembentukan negara boneka tersebut dimaksudkan untuk mengikat mereka secara ekonomi kepada Belanda. Timbul berbagai demonstrasi menuntut pembubaran Negara Madura. Rakyat menuntut agar R.A.A. Cakraningrat mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada bupati Pamekasan, Raden Tumenggung Aria Nataadikusuma, yang selanjutnya diangkat sebagai pejabat residen Republik Indonesia. Tuntutan rakyat makin menghebat sehingga demi mencegah terjadinya hal-hal yang lebih buruk, pemerintah RIS mengesahkan undang-undang yang memperbolehkan pembubaran negara bagian pada 9 Maret 1950. Berdasarkan undang-undang ini, Negara Madura dibubarkan secara damai dan wilayahnya kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Sebelumnya, pada 9 Februari 1950, R.A.A. Cakraningrat telah menyerahkan kekuasaannya kepada Komisaris RIS. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Pamekasan pada 15 Februari 1950 karena DPR Madura (DPRM) dirasa lambat dalam menangani aspirasi rakyat. Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan menyerbu gedung DPRM yang kebetulan saat itu anggotanya sedang bersidang. Mereka menuntut pembubaran secara resmi Negara Madura. Suasana memanas ketika demonstran memasuki gedung dan menuntut agar DPRM dibubarkan hari itu juga. Mereka sudah tak memercayai lagi "wakil-wakilnya." Dalam waktu lima menit keputusan harus diambil, bila tidak rakyat akan memberontak. Secara aklamasi seluruh anggota DPRM meletakkan jabatannya[306].

Mereka lantas bergerak ke rumah R.A.A. Cakraningrat yang ketika itu sedang sakit. Para demonstran ditemui oleh wakil wali negara yang merangkap bupati Pamekasan, Zainal Patah Noto Adi Kusumo. Dia berkata kepada para demonstran, *"Enggi mon… ra'yat pon ta' endha' dha' badhana Negara Madura, bula enggi keya. Sarengngan pole se Molja Wali Negara R.A.A. Cakraningrat empon nyerra' agi kakobasa' anna dha' Komisaris RISe e tanggal 9 Februari 1950. Bula ngarep sopaja ra'yat bubara*

305. Lihat *Pembentukan Negara Madura Tahun 1948 dan Dampaknya Terhadap Republik*, halaman 175–176.
306. Lihat *Perjuangan Rakyat Madura dari Daerah RI ke Daerah RI*, halaman 82.

kalaban tenang." (Ya, kalau… rakyat pun tidak mau adanya negara Madura, saya begitu juga. Lagipula Yang Mulia Wali Negara R.A.A. Cakraningrat sudah menyerahkan kekuasaannya kepada Komisaris RIS pada 9 Februari 1950. Saya harap supaya rakyat bubar dengan tertib.")[307] R.A.A. Cakraningrat kemudian pensiun dari jabatannya. Namun, adiknya yang bernama Ruslan Cakraningrat diangkat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Presiden Soekarno.

---

307. *Perjuangan Rakyat Madura dari Daerah RI ke Daerah RI*, halaman 82.



Bab 11
KESIMPULAN DAN TREN KE DEPAN

A. SEJARAH SEBAGAI SUATU PEMBELAJARAN

Sejarah bukan hanya sekumpulan fakta yang terjadi di masa lampau saja, melainkan juga sebuah pembelajaran. Oleh karena itu, sejarah hendaknya tidak hanya menghadirkan kejayaan, keindahan, atau romantisisme masa lalu saja, melainkan juga sisi gelap atau kelamnya perjalanan suatu bangsa. Dengan demikian, para penelaah sejarah dapat menarik pelajaran demi merencanakan masa depan yang lebih baik. Sejarah hendaknya sanggup menghadirkan objektivitas, kejujuran, dan keterbukaan. Masa lalu sesungguhnya menyampaikan banyak hal yang dapat diteladani, entah itu bersifat baik ataupun buruk. Oleh karenanya, bagian ini akan menghadirkan berbagai kilas balik mengenai apa yang sudah diulas dalam buku ini.

Pertama, sejarah membuktikan bahwa kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara pernah terseret pusaran persaingan bangsa-bangsa asing, seperti Portugis, Belanda, dan Inggris. Sebagai contoh, hal ini tampak nyata pada Kerajaan Ternate dan Tidore. Perseteruan antara kedua kerajaan tersebut makin menghebat dengan masuknya pengaruh asing; pihak yang satu didukung oleh Portugis, sedangkan pihak lainnya disokong Belanda. Kendati pada akhirnya Portugis tersingkir oleh Belanda, persaingan pengaruh asing ini tentu saja sedikit banyak memberikan dampak negatif terhadap persatuan antara berbagai kerajaan tersebut. Pada masa sekarang, pengaruh-pengaruh asing ini tetap perlu diwaspadai karena berpotensi melemahkan ketahanan nasional

Republik Indonesia, baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial–budaya, maupun pertahanan keamanan.

Kedua, kurang kuatnya persatuan dan kesatuan antara berbagai kerajaan, memudahkan mereka diadu domba oleh bangsa-bangsa asing yang hendak menanamkan kekuasaannya di Kepulauan Nusantara. Dengan demikian, pada masa sekarang, seyogianya kenyataan ini jangan sampai terlupakan. Apakah persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan telah terjalin dengan baik? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab oleh seluruh elemen bangsa. Sejarah membuktikan bahwa rakyat Kepulauan Nusantara dari Sabang hingga Merauke pernah merasakan penderitaan akibat penjajahan. Perlawanan terhadap kolonialisme bukan monopoli satu suku atau pulau saja. Namun, kesamaan nasib ini ternyata belum berhasil menyatukan seluruh bangsa Indonesia hingga kesadaran ini dibangkitkan pada era kebangkitan nasional.

Ketiga, dengan menyadari kekalahan persenjataan yang dialami berbagai kerajaan terhadap bangsa asing, pengalaman ini seyogianya menggugah semangat rakyat Indonesia mengejar ketertinggalan dalam teknologi. Dewasa ini, teknologi telah berkembang begitu pesatnya, bila tak sanggup mengejarnya akan dilindas oleh arus pusaran kemajuan tersebut. Pengejaran ketertinggalan dalam teknologi sudah seharusnya menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan negara. Kendati demikian, pembangunan yang sedang digiatkan itu hendaknya tidak meninggalkan ataupun mengabaikan warisan budaya bangsa.

B. PENJAJAHAN SELAMA 350 TAHUN?

Menarik pula menelaah karya G.J. Resink yang mengungkapkan bahwa di akhir abad 19 masih terdapat kerajaan-kerajaan merdeka di Kepulauan Nusantara. Mungkin lebih tepatnya adalah kemerdekaan dan kedaulatan terbatas karena Belanda merasa berhak melakukan intervensi apabila kepentingannya terancam. Secara bertahap derajat kebebasan dan kedaulatan ini makin diperkecil oleh pemerintah kolonial. Pada awal hingga pertengahan abad 19, Belanda mengakui adanya negara-negara yang masih "merdeka" di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial berdasarkan pasal 25 *Regeeringsreglement* (Peraturan Tata Pemerintahan Hindia Belanda) tahun 1834 memiliki wewenang mengadakan *tractaten* (perjanjian internasional) dengan masing-

masing kerajaan tersebut. Dengan demikian, status antara pemerintah kolonial dengan kerajaan bersangkutan bersifat antar negara yang berdaulat.

Secara umum, wilayah-wilayah di Kepulauan Nusantara pada abad 19 dan awal abad 20 digolongkan menjadi beberapa kategori, yakni (1) kerajaan-kerajaan yang mengakui pertuanan Belanda tetapi bukan vasal atau bawahan, contohnya adalah perjanjian awal yang diadakan dengan kerajaan-kerajaan di Bali; (2) kerajaan yang menjadi vasal Belanda, seperti Sambas dan tujuh kerajaan di Sulawesi Utara; (3) mengakui pertuanan Belanda tanpa mempermasalahkan kedaulatannya sendiri, seperti Riau; (4) Kerajaan-kerajaan yang setara dan dianggap sebagai sekutu Belanda (*contractueele bondgenooten*), seperti Bone, Wajo, Soppeng, Gowa, dan lain sebagainya; (5) kerajaan-kerajaan yang masih merdeka sepenuhnya tetapi bukan sekutu Belanda; dan (6) daerah-daerah yang diperintah langsung oleh Belanda. Dengan demikian, secara ringkas di Kepulauan Nusantara terdapat kerajaan-kerajaan dengan berbagai derajat kedaulatan.

Antara 1870–1910, Belanda menganggap kerajaan-kerajaan kecil di Sumba, Aceh, daerah-daerah Batak, Langkat, dan lain sebagainya sebagai negara-negara merdeka. Menurut *Kroniek van Sumatra's Oostkust* yang berasal dari 1916, wilayah merdeka terakhir di Sumatra adalah "daerah-daerah swapraja Kerajaan nan Sembilan dan Kerajaan nan Sepuluh, dua kompleks kampung Batak di batas udik Bila."[308] Baru pada 1915 kedua kawasan itu dimasukkan ke dalam daerah kekuasaan Bila yang menjadi bagian Gubernemen Pantai Sumatra Timur.

Pada mulanya para raja memiliki hak mengadili rakyatnya, lalu berdasarkan perjanjian yang diadakan dengan para raja, dibedakan antara *kaula* (warga negara) gubernemen (pemerintah kolonial) dan warga kerajaan bersangkutan. Warga Timur asing (China, Arab, Jepang, dan lain-lain) dan bangsa barat lainnya digolongkan sebagai warga negara gubernemen. Bagi golongan-golongan yang berbeda ini diterapkan pula sistem peradilan berlainan. Warga negara suatu kerajaan atau swapraja tunduk pada hukum dan sistem peradilan yang berlaku di negerinya. Sebagai contoh, pada 1904 seorang pangeran Kutai melakukan tindak pidana di wilayah Kerajaan atau Swapraja Gunung Tabur[309]. Tetapi ia naik banding ke pengadilan tinggi di Surabaya. Meskipun demikian, pengadilan memutuskan bahwa "dengan sendirinya para kaula

308. Lihat *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850–1910: Enam Tulisan Terpilih*, halaman 28.
309. Lihat *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850–1910: Enam Tulisan Terpilih*, halaman 7.

swapraja, menurut azas umum yang juga berlaku kepada orang-orang pribumi, tetap tunduk kepada pembesar pengadilan negeri mereka…”[310]. Contoh lain adalah putusan pengadilan negeri Takalar pada 1910 yang menganggap bahwa tersangka yang merupakan warga Gowa sebagai “orang asing” atau “orang luar negeri” dalam artian hukum. Dengan demikian, berdasarkan pengertian ini Gowa dipandang sebagai suatu negara berdaulat.

Sebelum tahun 1881, berbagai kerajaan masih diperkenankan mengibarkan benderanya masing-masing. Namun, kebijakan ini belakangan dihapuskan dan masing-masing kerajaan diwajibkan mengibarkan bendera Belanda baik di darat maupun laut[311]. Pada 1910, *Inlandsche vorsten* (raja-raja Nusantara) diturunkan kedudukannya menjadi *Inlandsche zelfbestuurder* (kepala swapraja). Istilah *gezanten* (duta) diganti menjadi *afgezanten* (utusan), yang diikuti dengan penghapusan tembakan merian kehormatan bagi mereka. Berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu dipertimbangkan lagi apakah benar Kepulauan Nusantara telah dijajah Belanda selama 350 tahun, mengingat hilangnya kedaulatan di masing-masing kerajaan tidaklah dalam waktu yang bersamaan.

C. CIKAL BAKAL KERAJAAN-KERAJAAN DI KEPULAUAN NUSANTARA

Asal muasal berbagai kerajaan di Kepulauan Nusantara pascakeruntuhan Majapahit sebagian besar diperoleh dari legenda, cerita rakyat, atau tradisi lisan. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, asal usul para pendirinya dapat dikategorikan menjadi:

1. Keturunan kerajaan-kerajaan yang lebih tua.
2. Makhluk-makhluk gaib
3. Kaum pendatang dari luar kawasan.
4. Kesepakatan dengan rakyat.

Contoh pendiri kerajaan yang menarik leluhurnya dari kerajaan lebih tua adalah Demak. Raden Patah diriwayatkan sebagai putra Raja Majapahit terakhir dengan putri Champa. Makhluk-makhluk gaib ini contohnya adalah tokoh-tokoh yang turun dari langit atau memiliki asal usul ajaib serta di luar kelaziman. Sosok-sosok yang turun dari langit ini di Gowa dikenal sebagai Tumanurunga ri Tammalate. Ia kemudian diangkat

310. Lihat *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850–1910: Enam Tulisan Terpilih*, halaman 8.
311. Lihat *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850–1910: Enam Tulisan Terpilih*, halaman 61.

sebagai raja pertama Gowa. Leluhur raja-raja Tawaili konon keluar dari daun yang dapat bergerak ke sana kemari. Sementara itu, para penguasa Timor menganggap diri mereka keturunan para pendatang dari Sina Mutin Malaka. Negeri yang penguasanya diangkat berdasarkan kesepakatan dengan rakyat adalah Wajo.

Perunutan leluhur suatu dinasti kepada dinasti lain yang lebih tua erat hubungannya dengan legitimasi kekuasaan. Karena masih berdarah Majapahit, Raden Patah dianggap berhak meneruskan tampuk pemerinrahan nenek moyangnya. Leluhur berupa tokoh-tokoh gaib juga berkaitan erat dengan legitimasi karena keturunan sosok-sosok yang melebihi manusia biasa, tentunya ia layak diserahi kekuasaan atas orang lain. Kaum pendatang yang menurunkan raja-raja di suatu tempat pada umumnya membawa suatu budaya yang lebih maju. Itulah sebabnya mereka kemudian dipercaya memimpin penduduk setempat. La Tenribali, batara Wajo pertama, diangkat sebagai penguasa setelah mengadakan suatu kontrak politik dengan rakyatnya. Oleh sebab itu, penguasa Wajo dapat dilengserkan bila melanggar kesepakatan yang telah dijalin dengan rakyatnya.

D. KERAJAAN-KERAJAAN LAIN YANG MENARIK

Berikut ini terdapat topik-topik menarik yang terkait kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara, yakni mengenai "kerajaan" orang kulit putih di Kalimantan Selatan serta sebuah kerajaan yang didirikan oleh pendatang dari Kepulauan Nusantara di Madagaskar. Topik-topik semacam ini barangkali memerlukan penelitian lebih lanjut.

I. "Kerajaan" Orang Kulit Putih di Kalimantan Selatan

Di Kalimantan Selatan terdapat Kerajaan Maluka yang didirikan oleh seorang pedagang Inggris bernama Alexander Hare (1775–1834)[312]. Ia pernah menjalani beberapa pekerjaan dalam hidupnya. Sewaktu berusia 20 tahun, Hare pernah bekerja sebagai juru tulis pada perusahaan dagang Inggris di Portugal. Selanjutnya pada 1807, ia pindah ke Malaka dan menjadi pedagang. Kepindahannya ke Malaka itu membawanya berkenalan dengan Raffles, yang kelak akan menjadi letnan gubernur jenderal Inggris di Batavia[313]. Sewaktu Kepulauan Nusantara jatuh ke tangan Inggris, Hare diangkat sebagai residen komisioner di Banjarmasin pada 1812, sambil terus menjalankan kegiatannya sebagai pedagang.

312. Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hare (diakses tanggal 15 September 2012).
313. Lihat *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia*, halaman 137.

Sultan Banjar mengizinkan Hare membuka daerah baru bersama 200 orang budak guna membantunya merintis kawasan baru tersebut. Daerah seluas 1.400 mil persegi (sekitar 362.598 hektar) tersebut lantas menjadi "kerajaan" bernama Maluka[314]. Hare merupakan penggemar wanita, dan menjadikan budak-budak wanitanya sebagai istri-istrinya. Dengan demikian, Hare membentuk semacam harem, dan disebut sebagai "pria yang mengumpulkan wanita."[315] Ketika kekuasaan Inggris berakhir, Hare harus hengkang dari Kalimantan dan berpindah ke Jawa Timur. Tentu saja istri-istrinya juga turut menyertai Hare yang mempunyai berkantong-kantong uang. Hare kemudian pindah ke Batavia, namun karena kehidupan seksualnya yang dianggap tak bermoral, pemerintah kolonial Belanda mengusir Hare dari sana pada 1819. Perjalanan hidup selanjutnya membawa Hare berpindah-pindah dari Lombok, Bengkulu, dan Afrika Selatan[316].

Di Afrika, Hare tetap meneruskan kegemarannya membeli budak-budak wanita guna dijadikan istrinya. Tindakan ini dianggap tak bermoral oleh para pendeta gereja sehingga mereka mendesak pemerintah setempat agar mengusir Hare pada 1826. Tempat kediaman Hare berikutnya adalah Kepulauan Kokos. Namun, kehidupan nyaman Hare kembali terganggu oleh kedatangan seorang petualang Inggris bernama John Clunie Ross. Para pria yang menjadi anggota rombongan Ross merayu budak-budak wanita Hare sehingga akhirnya tinggal tersisa empat atau lima orang di antara istri-istrinya yang sebelumnya berjumlah 14 orang[317]. Merasa terusik dengan hal itu, Hare pindah lagi ke Bengkulu dan wafat di sana.

II. Kerajaan Merina di Madagaskar

Kerajaan ini didirikan oleh para pendatang dari Nusantara di Madagaskar pada kurang lebih pertengahan abad 16. Berapa jumlah mereka tidaklah diketahui secara pasti. Tidak pula diketahui apakah mereka membawa keluarganya ataukah hanya kaum pria saja yang datang[318]. Mereka mula-mula menetap di pantai timur Madagaskar. Sebelumnya, di kawasan tersebut telah ada suku bernama Vazimba yang dipimpin seorang ratu bernama Vangita. Ratu tersebut dinikahi oleh pemimpin rombongan

---

314. Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hare (diakses tanggal 15 September 2012).
315. Lihat *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia*, halaman 137.
316. Lihat *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia*, halaman 138.
317. Lihat *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia*, halaman 139.
318. Lihat *Pasang Surut Keradjaan Merina: Sedjarah Sebuah Negara Jang Didirikan Oleh Perantau2 Indonesia di Madagaskar*, halaman 67.

dari Kepulauan Nusantara tersebut. Pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Andriamanelo (kurang lebih 1590–1615), yang merupakan pendiri dinasti penguasa Merina. Penguasa Merina pertama ini menikahi seorang putri Vazimba bernama Randapavola dan memiliki tujuh orang anak. Keenamnya meninggal dan hanya tersisa seorang anak bernama Ralambo yang akan menjadi Raja Merina kedua (1615–1640). Ia berjuang mempersatukan suku-suku yang ada di Madagaskar.

Para penguasa Merina berikutnya adalah Andrianyaka (1640–1665), Andriantsitakatradriana (1665–1680), Andriantsimitoviaminandriandehibe (1680–1695), Razakatsitakatrandriana (1695–1696), dan Andriamasinavalona (1696–1740)[319]. Upaya perluasan wilayah terus dilanjutkan selama pemerintahan raja-raja tersebut. Sepeninggal Andriamasinavalona, Kerajaan Merina mengalami perpecahan menjadi empat bagian, tetapi yang terpenting hanya dua cabang penguasa saja, yakni Tananarive dan Ambohimanga. Pada 1787 dari cabang Ambohimanga muncul seorang raja bernama Andrianampoinimerina (terkadang juga disebut Nampoinimerina atau Nampoina (1787–1810). Ia dianggap sebagai Raja Merina terbesar, dan semenjak pemerintahannya, Merina memasuki zaman bersejarahnya. Raja Nampoina ini mengeluarkan tiga ketetapan penting, yakni (1) menciptakan persatuan sosial dan politik rakyat Merina, (2) menegakkan kekuasaan raja yang absolut, dan (3) menyatukan seluruh Madagaskar di bawah panji kekuasaan Merina[320].

Raja Nampoina digantikan oleh Radama I (1810–1828) yang meneruskan cita-cita persatuan Raja Nampoina. Pada masa pemerintahannya terjadi hubungan pertama dengan bangsa Barat, yakni dengan Inggris. Bangsa Perancis pada permulaan abad 19 juga telah mendirikan pusat-pusat perdagangannya di pantai Madagaskar. Kendati demikian, mereka belum memasuki daerah pedalamannya. Sir Robert Farquhar, gubernur yang diangkat oleh pemerintah kolonial Inggris di Mauritius mengirimkan utusan bernama Captain la Sage guna menjalin hubungan dengan Radama I. Pemerintah kolonial Inggris mengusulkan agar Radama I mengirimkan saudaranya ke Mauritius guna mengenyam pendidikan Inggris. Raja sepakat mengirimkan dua orang saudaranya bernama Marotafika dan Rahova belajar di bawah Hastie, sekretaris pribadi Sir Robert Farquhar. Radama I tampaknya puas dengan hasil pendidikan

319. Lihat *Pasang Surut Keradjaan Merina: Sedjarah Sebuah Negara Jang Didirikan Oleh Perantau2 Indonesia di Madagaskar*, halaman 68.
320. Lihat *Pasang Surut Keradjaan Merina: Sedjarah Sebuah Negara Jang Didirikan Oleh Perantau2 Indonesia di Madagaskar*, halaman 71.

tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh Hastie membujuk Radama I agar menghapuskan perbudakan. Sebagai imbalannya, kedudukan Radama I sebagai Raja Madagaskar akan diakui oleh pemerintah Inggris. Radama menyetujuinya dan sebagai imbalannya ia menerima tunjangan sebesar 2.000 Pound setiap tahunnya. Pada Oktober 1817, pemerintah Inggris mengakui Radama I sebagai raja seluruh Madagaskar, dan sebagai balasannya Radama I mengizinkan penyebaran agama Kristen[321]. Lebih jauh lagi, Radama I melakukan pembaharuan bagi negerinya dengan memperkenalkan huruf latin, dipekerjakannya para penasihat berkebangsaan Barat, dan lain sebagainya.

Radama I digantikan oleh Ratu Ranavalona I (1828–1861). Ia merupakan seorang penguasa yang bersikap anti-Barat dan mengeluarkan ketetapan bahwa kedudukan orang-orang asing itu disetarakan dengan bangsa Madagaskar. Seluruh penasihat asing yang dipekerjakan oleh Radama I diberhentikan oleh sang ratu. Akibat kebenciannya ini, Perancis melakukan politik pecah belah dengan menghasut suku bangsa Sakalava agar melawan Merina pada 1841. Kendati membenci bangsa Barat, namun Ratu Ranavalona I mengangkat seorang organisator ulung dari Perancis bernama Laborde sebagai penasihatnya dan memintanya menciptakan meriam-meriam bagi tentara Merina.

Laborde berhasil menjadi sahabat baik Pangeran Rakoto, putra mahkota Merina, dan bahkan dijadikan ayah angkat sang pangeran. Belakangan Laborde berniat memanfaatkan kedudukannya itu guna mengeruk kekayaan alam Madagaskar. Ia menyodorkan rencana kepada Pangeran Rakoto untuk mendirikan perusahaan besar yang modalnya berasal dari Perancis. Dalihnya adalah demi membebaskan rakyat Madagaskar dari kemiskinan. Namun, agar modal itu aman, Madagaskar harus dijadikan daerah protektorat Perancis. Sang pangeran menyetujui usulan tersebut dan Lambert, rekan Laborde, dikirim ke Perancis guna menyampaikan surat raja kepada Kaisar Napoleon III perihal pendirian perusahaan eksploitasi kekayaan alam itu. Pemerintah Perancis juga ingin melibatkan pemerintah Inggris dalam usaha penggalian kekayaan alam Madagaskar. Laborde diutus ke London guna membicarakannya dengan Lord Clarendon dari kementrian luar negeri Inggris. Ia juga membocorkan rencana bahwa Madagaskar akan diletakkan di bawah payung kekuasaan Perancis dan

321. Lihat *Pasang Surut Keradjaan Merina: Sedjarah Sebuah Negara Jang Didirikan Oleh Perantau2 Indonesia di Madagaskar*, halaman 79.

sebagai imbalannya, Raja Merina akan diakui sebagai penguasa seluruh Madagaskar oleh Perancis.[322]

Inggris dengan piawai memanfaatkan rencana Perancis di atas dan membocorkan kepada pihak Madagaskar bahwa Perancis akan menjadikan Madagaskar sebagai protektoratnya. Ratu Ranavalona I sangat marah mendengarnya dan mengusir serta menangkap orang-orang Perancis di Madagaskar, termasuk Laborde dan Lambert. Meskipun demikian, Ranavalona I mangkat pada 1861 dan Pangeran Rakoto menggantikannya dengan gelar Radama II (1861–1863). Berkat hubungan baiknya dengan sang pangeran yang kini telah menjadi raja, Laborde dan Lambert dipulihkan kedudukannya. Orang-orang Perancis yang diusir kini mulai kembali ke Madagaskar. Radama II tampak lebih menyukai Perancis ketimbang Inggris. Kesempatan ini dipergunakan Perancis menanamkan pengaruhnya di Madagaskar. Radama II dengan demikian telah menjadi boneka Perancis, hal ini menimbulkan ketidakpuasan sebagian kalangan dan pecah pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Radama II.

Pengganti Radama II adalah istrinya yang bernama Ratu Rasoherina (1863–1868). Sementara itu, Rainivoninahitrioniony, putra Rainiharo (perdana menteri terdahulu) diangkat sebagai perdana menterinya. Sang ratu lalu menikahi perdana menterinya dan saat itu dimulai tradisi bahwa ratu yang memerintah harus menikah dengan perdana menterinya. Pada perkembangan selanjutnya, Rainivoninahitrioniony digulingkan oleh saudaranya bernama Rainilaiarivony. Sepeninggal Ratu Rasoherina, Merina diperintah oleh dua orang ratu lagi, yakni Ratu Ranavalona II dan Ratu Ranavalona III. Rainilaiarivony juga menikahi keduanya. Dengan demikian, perdana menteri Merina tersebut menikahi tiga orang ratu secara berturut-turut dan merupakan penguasa tertinggi sebenarnya di Merina. Sementara itu, Perancis terus menanamkan kekuasaannya di Madagaskar. Kerajaan Merina berakhir dengan diasingkannya Ratu Ranavalona III oleh penjajah Perancis pada 1895.

E. TREN KE DEPAN

Masih banyak data sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara yang belum diungkapkan dalam buku ini. Selain itu, sangat mungkin terdapat informasi yang keliru atau kurang akurat. Oleh karenanya, penulis memohon dengan rendah hati apabila para

322. Lihat *Pasang Surut Keradjaan Merina: Sedjarah Sebuah Negara Jang Didirikan Oleh Perantau2 Indonesia di Madagaskar*, halaman 89.

pembaca memiliki tambahan informasi seputar kerajaan-kerajaan tersebut ataupun kritik dan saran, sudilah kiranya menghubungi penulis di **ivan_taniputra@yahoo.com**. Sewaktu menyusun buku ini, penulis mendapati perbedaan dan variasi penulisan nama-nama yang terdapat dalam berbagai literatur. Agar tidak membingungkan generasi mendatang, penulis menghimbau agar para sejarawan duduk bersama guna membicarakan penyeragaman penulisan nama-nama tersebut. Pencantuman angka-angka tahun terkadang masih simpang siur satu sama lain. Karena itu, pertentangan-pertentangan semacam ini hendaknya mendapat perhatian serius para sejarawan Indonesia. Sejarah awal mula berbagai kerajaan kebanyakan masih diselimuti kabut. Sebagian besar riwayat pendiriannya diperoleh dari legenda. Karenanya, diperlukan bukti-bukti arkeologis lebih lanjut demi mengungkap kebenarannya.

Buku ini hanya membahas kerajaan-kerajaan yang terdapat dalam ruang lingkup Republik Indonesia. Kendati demikian, kerajaan-kerajaan yang ada di luar perbatasan Republik Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan tetangganya yang berada di dalam ruang lingkup wilayah NKRI. Sebagai contoh adalah Kerajaan Johor yang merupakan pecahan Imperium Johor Riau Lingga. Kesultanan Sulu yang kini terletak di Republik Filipina telah lama menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di pesisir Kalimantan Timur. Liurai Suai Kamanasa yang sebelumnya membentuk Kerajaan Wesei Wehali kini wilayahnya terletak di Republik Timor Leste. Barangkali pada masa mendatang dapat diadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai hubungan antar kerajaan baik di dalam maupun luar perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian lebih mendalam mengenai sistem pemerintahan dan ketatanegaraan masing-masing kerajaan masih belum banyak terjamah. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan telaah lebih rinci sehubungan dengan hal ini dapat dilaksanakan di masa mendatang. Kemudian dapat dilakukan perbandingan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di luar perbatasan NKRI. India juga merupakan negeri yang terpecah menjadi banyak kerajaan. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan di India cocok sekali dijadikan objek studi banding. Bagaimana satuan-satuan pemerintahan tersebut berintegrasi dengan Republik India dan Pakistan sangat menarik pula dikaji lebih jauh.

GLOSARI

Amaf = sebutan bagi jabatan yang setingkat kepala desa (*temukung*) di Timor.

Arumpone = gelar bagi raja di Bone, selain *mangkau'e*

Bawar = pusaka yang dianugerahkan Sultan Aceh kepada raja-raja bawahannya.

Besluit = surat keputusan pemerintah kolonial Belanda.

Blah = suku, puak, atau keturunan di Tanah Gayo, Aceh.

Bobato = menteri atau anggota dewan kerajaan di Maluku.

Boki = sebutan bagi putri raja atau bangsawan wanita di Maluku dan daerah pengaruhnya.

Eenheidstaat = Negara Kesatuan (Belanda)

Fetnai = sebutan bagi putri raja di Timor.

Garwa padmi = permaisuri atau istri resmi raja-raja di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Jannang = terkadang juga dieja *jennang*. Jabatan setingkat bupati bagi daerah-daerah bawahan atau taklukkan Gowa ataupun kerajaan-kerajaan lain yang berada di bawah pengaruhnya.

Jogugu = sebutan bagi perdana menteri di Maluku (Ternate, Tidore, dll.) beserta daerah-daerah pengaruhnya.

Jumenengan = upacara penobatan raja-raja di Jawa.

Kaicili (*kaicil*) = gelar bagi putra raja di Maluku.

Kemutar = daerah-daerah taklukan atau vasal Kerajaan Sumbawa.

Kenpetai = polisi rahasia Jepang yang terkenal kebiadabannya.

Kolano = gelar lama raja-raja di Maluku.

Meo = panglima perang di Timor.

Mokole = sebutan bagi raja atau penguasa (terutama di Sulawesi Tengah).

Naimnuke = sebutan bagi putra raja di Timor.

Nusak = sebutan bagi kerajaan di Pulau Rote.

Nyaicili = gelar bagi putri raja di Maluku.

Pangeran ratu = jabatan setingkat perdana menteri

Penyimbang = kepala adat di Lampung.

Petulai = satuan kemasyarakatan atau kesukuan di Bengkulu.

Riwabatang = wali sultan di Sumbawa.

Salahakan = gubernur di kerajaan-kerajaan Maluku

Sangaji = gelar bagi raja di Kepulauan Maluku dan daerah pengaruhnya (seperti Solor dan Manggarai). Namun, gelar ini juga mencerminkan pengaruh Jawa.

Sonaf = sebutan bagi istana raja (terutama di Pulau Timor).

Suco = gelar bagi raja atau kepala swapraja semasa penjajahan Jepang. Terkadang juga dieja *syuco*.

Sunan = gelar bagi raja-raja Mataram setelah Sultan Agung dan raja-raja Surakarta.

Syuco = lihat *suco*.

Wano kalada = desa inti atau induk di Pulau Sumba.

Weti = sebutan bagi upeti di Buton.

Zelfbestuurder = gelar bagi raja atau kepala swapraja semasa pemerintahan kolonial Belanda.

Tambahan 1
KRONOLOGI RAJA-RAJA NUSANTARA PASCA KERUNTUHAN MAJAPAHIT

RAJA-RAJA DI NUSATENGGARA BARAT

Raja – raja di Lombok

BANJAR GETAS (PRAYA)		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Arya Banjar Getas	
2	Raden Ronton	
3	Raden Lombok	
4	Dene' Bangli	
5	Raden Mumbul	
6	Raden Wiratmaja	- 1841

KEDIRI		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Gusti Ketut Rai	± 1700
2	Anak Agung Gede Karangasem	
3	Anak Agung Wayan Karangasem I.	
4	Anak Agung Wayan Karangasem II	
5	Anak Agung Nyoman Rai	- 1805

MATARAM		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Anglurah Ketut Karangasem I (Anak Agung Bagus Jelantik atau Dewata Patandakan)	1767 – 1775
2	Angkurah Ketut Karangasem II (Dewata Pasaren Anyar Mataram)	? – 1830
3	Anglurah Ketut Karangasem III (Dewata Ruma)	1830 – 1838
4	Anak Agung Ketut Karangasem, Anak Agung Made Karangasem, dan Anak Agung Gede Ngurah Karangasem (Agung Agung Gede Ngurah Karangasem)	1838 - 1850

5	Anak Agung Made Karangasem, dan Anak Agung Gede Ngurah Karangasem (Agung Agung Gede Ngurah Karangasem)	1850 - 1872
6	Anak Agung Gede Ngurah Karangasem (Agung Agung Gede Ngurah Karangasem)	1872 - 1894

PAGESANGAN		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Gusti Nyoman Agung	± 1700
2	Anak Agung Putu Lebah (Gusti Wayan Lebah)	± abad ke-18
3	Gusti Nengah Tegeh	
4	Gusti Wayahan Tegeh	1741 – 1775
5	Gusti Ketut Karang	1775 - ± 1783
6	Anak Agung Lanang Nengah Karangasem	± 1800
7	Anak Agung Nengah Tegeh	1804 – 1836

PAGUTAN		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Anak Agung Wayan Sidemen	± abad 18
2	Anak Agung Nengah Sidemen I	± abad 18
3	Anak Agung Nengah Sidemen II	± 1800
4	Anak Agung Ketut Karang	- 1838/ 1840/ 1842 wafat di Taker
Kerajaan Pagutan ditaklukan oleh Mataram		

PEJANGGIK		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Deneq Mas Komala Dewa Sempopo	
2	Deneq Mas Unda Putih	
3	Deneq Mas Bekem Buta Inten Komala Sari	
4	Pemban Mas Meraja Sakti	
5	Pemban Mas Komala Kusuma	
6	Pemban Mas Meraja Kusuma	

SAKRA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Pemban Penganten Purwadadi (Pemban Mas Meraja Kusuma)	
2	Pemban Ilang Mudung dan Deneq Laki Mas Orpa	
3	Dewa Mas Panji Komala	

SELAPARANG - KAYANGAN		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Deneq Mas Putra Pengendeng Segara Katon Rambitan	
2	Deneq Mas Komala Jagad	
3	Deneq Mas Kerta Jagat (Deneq Mas Kerta Jagat Rinjani)	
4	Deneq Mas Kerta Bumi	
5	Dewa Mas Pakel	
6	Mas Kerta Jagat	

SENGKONGO		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Anak Agung Ketut Sidemen	± abad 18
2	Anak Agung Wayan Prasi	
3	Anak Agung Nengah Prasi	- 1803

SINGASARI KARANGASEM		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Gusti Ngurah Made Karangasem I	± abad 19
2	Gusti Ngurah Made Karangasem II (Ratu Ngurah Panji)	± 1800 - 1835
3	Gusti Ngurah Made Karangasem III (Ratu Gusti Ngurah Panji)	1835 - 1838
	Menurut sumber lain:[323]	
1	I Gusti Anglurah Ketut Karangasem	1691-1720
2	I Gusti Anglurah Made Karangasem	1720-1741
3	I Gusti Wayan Tegeh (wakil raja)	1741-1775
4	I Gusti Made Karang (memerintah di Tanjungkarang) dan I Gusti Wayan Karang (memerintah di Pagesangan)	1775-1806
5	Ratu Ngurah Made Karangasem	1806-1835
6	I Gusti Ngurah Panji (I Gusti Ngurah Made Karangasem)	1835-1839

Raja-raja di Pulau Sumbawa

BIMA		
1	Abdul Kahir (Mabata Wadu)	Pertengahan 1600-an
2	Abdul Khair (I Ambela atau Mantau Uma Jati)	1620 – 1682
3	Nuruddin Abubakar Ali atau Mapparabung Nuruddin Daeng Matali Karaeng Panaragang (Mawaa Paju)	1682 – 1687
4	Jamaluddin atau Jamal ad Din (Mawaa Romo)	1687 – 1696
5	Hasanuddin Muhammad (Hasan ad Din Mohammad), gelar lengkap Mapatalle Saad Shah Hasan ad Din Mohammad (Mabata Bou)	1696 – 1731

323. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 94.

6	Alauddin Muhammad Syah (Ala ad Din Mohammad), gelar lengkap Mura Lanie Alisa Ala ad Din Mohammad (Manuru Daha)	1731 – 1748
7	Bumi Partiga Kamala Shah (Makalosa Weki Ndai)	1748 – 1751
8	Sri Nawa Abdul Karim Muhammad atau Abdul Kadim Muhammad Syah (Mawaa Taho)	1751 – 1773
9	Abdul Hamid Muhammad (Mantau Asi Saninu)	1773 – 1817
10	Ismail atau Ismail Muhammad Syah (Mantau Dana Sigi)	1817 – 1854
11	Abdallah atau Abdullah (Mawaa Adil)	1854 – 1868
12	Abdul (Abdal) Azis (Mawaa Sampela)	1868 – 1881
13	Ibrahim (Ma Taho Parange)	1881 – 1917
14	Muhammad Salahuddin	1917 – 1951

DOMPU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Indra Kemala (Dewa Batara Dompu)	
2	Dewa Indra Dompu	
3	Dewa Mambara Bisu	
4	Dewa Mambara Belanda	
5	Dewa yang punya kuda	
6	Dewa yang mati di Bima	
7	Dewa Mawaa Lapatu	
8	Dewa Mawaa Tahoo	
selanjutnya bergelar sultan		
9	Syamsuddin (Mawaa Tunggu)	1545 -
10	Jamaluddin (Manuru Dorongso)	- 1640
11	Sirajuddin (Manuru Beta)	1640 – 1682
12	Ahmad (Manuru Kilo)	1682 – 1686
13	Abdulrasyul I (Manuru Laju)	1686 – 1701
14	Usman (Mawaa Parabo)	1701 – 1702
15	Abdulkahar (Manuru Midi)	1702 – 1717
16	Syamsuddin (Mawaa Sampela)	1717 – 1727
17	Kamaluddin	1727 – 1737
18	Ahmad Syah (Manuru Kambu)	1737
19	Abdul Kadir (Manuru Alus)	1737 – 1746
20	Abdul Rahman (Manuru Kempo)	1746 – 1748
21	Abdul Wahab (Mawaa Cau)	1749 – 1792
22	Abdullah I (Mawaa Saninu)	1793 – 1798
23	Yakub	1798 – 1799
24	Abdullah Tajul Arifin I	1799 – 1801
25	Abdulrasyul II	1801 – 1857
26	Muhammad Salahuddin	1857 – 1870
27	Abdullah II	1871 – 1882
28	Muhammad Sirajuddin	1882 – 1934
29	Muhammad Tajul Arifin II (Mawaa Sama)	1947 – 1958

PEKAT (PAPEKAT)		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Intshied (Ince)	± 1675 – 1701
2	Abdul Cili Mandarsyah (Mandar Syah Janili)	± 1701 – 1707
3	Daeng Mangalla	1701 – 1719
4	Si Tangoli	1719 -?
5	Abdul Said	? – 1735
6	Abdul Burhan (Abdul Brahim)	1735 – 1739
7	Daeng Sado	± 1739 - ?
8	Abdul Gafur (Abdul Rasul)	- ± 1755
9	Abdurrahman	1755 – 1768
10	Abdulhalim	1768 – 1794
11	Abdul Muhammad	1794 – 1815
Pekat digabungkan dengan Dompu		

SANGGAR		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Hasanuddin	1701 – 1704
2	Daeng Panai (Daeng Ngaseng atau Daeng Samaling)	1704 – 1708
3	Putera Hasanuddin yang tak disebutkan namanya	1708 - ?
4	Abdul Saleh	1724 – 1740
5	Abdul Muhammad Daeng Manaba	1740 - ± 1747
6	Muhammad Johan Syah	±1765 - 1781
7	Datu Daeng Madenjung	1781 – 1783
8	Adam Safiullah	1783 – 1790
9	Muhammad Sulaiman	1790 – 1805
10	Ismail Ali Lot Dayang (Ismail Halilud Dayan atau Ismail Lujang)	± 1805
11	La Lira Daeng Jai 1836	± 1827
12	Daeng Malaba	1836 – 1845
13	Manga Daeng Manasse	1845 – 1869
14	La Kamea Daeng Nganjo Syamsuddin	1869 – 1900
15	Abdullah Daeng Manggalai	1900 – 1926
Sanggar digabungkan dengan Bima		

SUMBAWA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Dewa Maja Paruwa	± 1618 – 1632
2	Mas Goa	1633 – 1637
3	Mas Cini	1637 – 1674
4	Harunurrasyid I (Dewa Dalam Bawa atau Mas Bantam)	1674 – 1702
5	Muhammad Jalaluddin Syah I (Amasa Samawa, Datu Bala Balong, Datu Apit Ai, Mas Madina, atau Amas Madina)	1702 – 1723
6	Dewa Loka Ling Sampar (Datu Bala Sawo)	1723 – 1725

7	Dewa Ling Gunung Setia (Datu Taliwang)	1726 – 1732
8	Muhammad Kaharuddin I (Dewa Mapasusung atau Datu Poro)	1733 – 1758
9	Sitti Aisyah (Dewa Bini Dewa Mapasusung atau I Sugiratu Karaeng Bontoparang)	1758 – 1760
10	Datu Ungkap Sermin (Dewa Langit Ling Dima atau lalu Onye	1761 – 1762
11	Sultan Muhammad Jalaluddin II (Gusti Mesir Abdurrahman atau Dewa Pangeran)	1762 – 1765
12	Dewa Mappaconga Mustafa (Datu Taliwang)	1765 – 1775/ 1776 wali sultan
13	Harunurrasyid II (Datu Busing Lalu Komak atau Datu Seran)	1777 – 1790
14	Shafiatuddin	1791 – 1796
15	Muhammad Kaharuddin II	1796 – 1816
	Nene Ranga Mele Manyurang	1816 – 1825 wali sultan
	Mele Abdullah	1825 – 1836 wali sultan
16	Amrullah	1836 – 1883
17	Muhammad Jalaluddin III	1883 – 1931
18	Muhammad Kaharuddin III (Muhammad Kaharuddin Daeng Manurung)	1931 – 1959

TAMBORA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Kalongkong	± 1675
	Jamaluddin	± 1687
	Nizamuddin	1687 – 1697
	Damala Daeng Mamangon	± 1701 – 1716
	Abdul Azis	1716 – 1726
	Abdurrahman	1726 – 1748
	Kadinding	1748
	Ujungpandang Abdul Said	1748 pemerintahan pertama
	Tureli Tambora	1748 – 1749
	Ujungpandang Abdul Said	1749 – 1771 pemerintahan kedua
	Tahmidullah Hidayatun Minalla	1771 – 1773
	Abdulrasyid	1773 – 1800
	Muhammad Tajul Masohor	1800 – 1801
	Abdulgafar	1801 – 1815
Tambora digabungkan dengan Dompu		

RAJA-RAJA DI NUSATENGGARA TIMUR

Raja-raja di Pulau Adonara

ADONARA		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Foramma	1650
2	Boli I	± 1681
3	Wuring	± 1710 – 1718
4	Boli II	±1720 – 1756
5	Lakabela Jo	± 1832
6	Begu Ama	± 1850
7	Pelang	1850 – 1857
8	Jouw (Jo)	1857 – 1868
9	Kamba Begu	1868 – 1893
10	Bapa Tuan	1893
11	Raja Arakiang Kamba	1893 – 1930
12	Bapa Ama	1930 – 1936
13	Bapa Nuhur	1936 – 1940
14	Bapa Kaya	1936 – 1954
15	Muhammad Eke	1954 – 1962

Raja-raja di Pulau Alor

ALOR		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
	Lau	± 1832
	Tulimau I	± 1844
	Baulolong	1844 – 1876
	Panggo Aman	1877 – 1895
	Tulimau II (Toelimau)	1895 – 1903
	Kawiha Tuli	1903 – 1908
	Nampira Bukan	1908 – 1915
	Balanampira	1915 – 1918
	Umar Watang Nampira	1918 – 1945 pemerintahan pertama
	Ahmad Balanampira	1945 pemerintahan pertama
	Umar Watang Nampira	1945 – 1952 pemerintahan kedua
	Ahmad Balanampira	1952 – 1962 pemerintahan kedua

BARNUSA[324]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Bara Mau Wolang	
2	Mau Bara	
3	Boli Mau	
4	Mau Boli	
5	Bara Mau	
6	Mau Bara	
7	Tonda Boli	
8	Boli Tonda	
9	Mau Boli	
10	Tonda Boli	
11	Boli Tonda	
12	Aku Boli	
13	Baso Aku	
14	Koliamang Baso	
15	M.K. Baso	

BATULOLONG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Karlau Kep	abad ke – 16
2	Maleikari I	± 1520 - ± 1550
3	Awenlo	± 1550 - ± 1570
4	Awengkari I	± 1570 - ± 1600
5	Losa	± 1600 - ± 1610
6	Asakarmen	± 1610 - ± 1640
7	Laubana	± 1640 - ± 1650
8	Maleikari II	± 1650 - ± 1670
9	Lauika	± 1670 - ± 1700
10	Karlau	± 1700 - ± 1720
11	Laubaki	± 1720 - ± 1750
12	Kamusawen	± 1750 - ± 1770
13	Karimalei	± 1770 - ± 1800
14	Sarata	± 1800 - ± 1810
15	Makunimau	± 1810 - ± 1830
16	Laukosi	± 1830 - ± 1850
17	Karimalei Gapada	± 1850 – 1897
18	Kamusi Kamusi Weng (Chasper)	1897 – 1914
19	Risi Bera (Alfonsus Frederik Karimalei)	1914 – 1937
20	Wilhelmus Awengkari	1937 – 1941
21	Christoffel Laubela (wali)	1941 – 1947
22	Lourens Karimatei	1941 – 1962

324. Sumber: Bapak Ridwan Paoh.

KOLANA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Makunimau I	
2	Takalamakunimau	
3	Makuingtakalamakaing	
4	Mautuka I	
5	Makunimau II	
6	Mautuka II	
7	Makunimau III	
8	Mautuku III (Mau Tuku atau Maoetokoe)	1889 – 1914
9	Alexander Makunimau	1914- 1933
10	Christofel Makunimau	1933 – 1944
11	Markus Makunimau	1944 – 1962

KUI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Maleilok	
2	Gawamalei	
3	Atamalei	
4	Maleilok	
5	Banla	
6	Pasoma	
7	Maleikili	
8	Kinanggi	
9	Maleilok	
10	Pasoma	
11	Atamalei	
12	Maleikili	
13	Atamalei	
14	Pasoma	
15	Kinanggi	
16	Atsom	
17	Pasoma	
18	Kinanggi	
19	Banla	
20	Gawamalei	
21	Banla	
22	Pasoma	1855 – 1891
23	Tarusoma I	1891 – 1897
24	Go Amakale	1897 – 1916
25	Tarusoma II	1916 – 1917
26	Dain Soma (Daeng Soma)	1918 – 1920
27	Katang Koli	1921 – 1939
28	B. Kinaggi	1939 – 1946

PUREMAN		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Sini Mau I Laka	1480 – 1500
2	Tubul Sini Mau	1500 – 1530
3	Sini Mau II	1530 – 1550
4	T ubulau I	1550 – 1580
5	Sini Mau II	1580 – 1600
6	Tubulau II	1600 – 1620
7	Sini Mau IV	1620 – 1640
8	Tubulau III	1640 – 1660
9	Lapuimakuni	1660 – 1680
10	Tubulau IV	1680 – 1710
11	Painteri I	1710 – 1730
12	Resibera	1730 – 1750
13	Tubulau V	1750 – 1770
14	Painteri II	1770 – 1800
15	Malakari I	1800 – 1820
16	Tubulau VI	1820 – 1850
17	Molana	1850 – 1870
18	Tubulau VII	1870 – 1880
19	Alobana	1880 – 1890
20	Raja Malakari II (Malaekarie)	1890 – 1918
21	Besi Lakoe	1918 – 1927

Raja-raja di Pulau Rote

BAA		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Lilo Dutamma	± abad 17
2	Tou Dengga Hua	± 1700- ± 1734
3	Tou Donggalilo (Teuw Denka Lilo)	
4	Izak Kuamain	
5	Muskanan	
6	Muskanan Pane	-1854
7	Johannes Muskanan	1854-1862
8	Alexander	1862 – 1873
9	Dun Muskanan	1873 – 1883
10	Lusi Detaq	1883 – 1887
11	Jesaja Dae Pane	1887 – 1895
12	Paulus Dae Pane	1895 – 1905
13	Sadrach Mandala	1905
14	Arnoldus Tule	
15	Muskanan Tule	
16	Dae Pane	- 1938
17	Solemon Stephanus Detaq	1938 – 1951
18	Izak Dae Pane	1951 – 1960
19	Tobias Mandala	1960 – 1963

BILBA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Mangarai	± 1660 – 1662
2	Reti	± 1673 – 1677
3	Lase Reti	1677 - ± 1680
4	Theon Mangarai	± 1691 – 1698
5	Balok Theon	± 1712 – 1749
6	Solu Tupa	± 1727
7	Daniel Jeuw (Iyu Solu)	1749 – 1768
8	David Solu Tupa	1768 – 1783
9	Theon Balok	± 1800 - ± 1801
10	Lenggu Saba	1830 – 1868
11	Pieter Lenggu	1868 – 1870 pemerintahan pertama
12	David Lenggu	1870 – 1874
13	Pieter Lenggu	1874 – 1884 pemerintahan kedua
14	Alexander Nero Lenggu (Manafe Ao)	1884 – 1886 pemerintahan pertama
15	Pedama Mangalai Saba	1886 – 1895
16	Alexander Nero Lenggu	1895 – 1908 pemerintahan kedua
17	Soleman Pedama Mangalai Saba	1908 – 1925
18	Yusuf Saba	1925 – 1926
19	Abraham S. Therik	1926 – 1936
20	Mathias Alexander Lenggu	1937 – 1945

BOKAI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Pelo Ey	
2	Geo Sude	± 1832
3	Dupe Geo	- 1851
4	Dule Dupe	1851 – 1868
5	Sima Sude Kappa	1868 – 1873
6	Salomon Dule	1873 – 1877
7	Marcus Daluh Dupe	1877 – 1887
8	Paoh Ndolu Dupe	1887 – 1892
9	Tazi Fodik	1892
10	Tae Taka (Mika Taka)	
11	Messak Dupe	1931 – 1969

DENGKA		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Tullia	± 1662 - ± 1676
2	Luse Tullia dan Moni Lusi	
3	Henuk Kane	± 1691 – 1727
4	Manafe Henoek (Manafe Henuk)	1727 – 1779
5	Andries Henuk Pah Manafe	1779 - ± 1800
6	Doki Pah Manafe	± 1803
7	Bauk	± 1832
8	Tungga Koten	1854 – 1858
9	Adu Tungga	1859 – 1890
10	Paulus Adu Tungga (Kote Adu)	1891 – 1903
11	Alexander Adu Tungga	1904 – 1906
12	Alexander Paulus Tungga	1907 – 1911

DIU		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Noi Bessu	± abad 17
2	Manafe Boleh	± abad 18
3	Duri Teti (Doeri Tety)	
4	Jacobus Manafe	± 1832 – 1851
5	Detan Manafe	1851 – 1879
6	Poli Lio	1879 – 1884
7	Jacobus Paulus Manafe	1884-1887
8	Soleman Manafe	1887 - ± 1900
9	Paulus David Manafe	± 1905
10	S. Ch. Manafe (1937 – 1938	
11	David Paulus Manafe	
12	Albertus Paulus Manafe	

KORBAFO		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Pelau	± 1660
2	Ndun	± 1662
3	Sadok	±1690 - ± 1694
4	Pikatik	± 1692 - ± 1740/43
5	Leuana Leuana	± 1740/43 – 1781
6	Lodong Dozain	1781 - ± 1800
7	Pelo Lodong	± 1800
8	Leuana	± 1832
9	Koliaman Bibikate	±1841 – 1852
10	Lukas Pakuleu	1853 – 1859
11	Jessak Manubulu	1860 – 1873
12	Soleman Izaak Manubulu	1876 – 1922
13	Cornelis Izaak	1922 – 1926
14	Christiaan Paulus	1926 – 1989

LANDU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Meno Balo	± 1673 – 1703/ 05
2	Belkamo	1703/ 05 – 1725/ 27
3	Dale Meno	1725/ 27 – 1732
4	Angi Meno	1732 – 1736/ 39
5	Geolima Belkamo (Geo Lima Balakama)	1736/ 39 – 1756
6	Bane Dale	1757 – 1775
7	Bane Dailafa	1775 - ?
8	Nai Lasa Bane	± 1784
9	Ba Bane	± 1790
10	Suzas Bane	± 1792
11	Adi Bane	± 1803
12	Ndun Adi	± 1832
13	Bane Suza	
14	Dai Lafa Ba	
15	Bane Dai Lafa	
16	Yusuf Willem Johannis (Dale Bane)	1883 – 1905
17	Daud Willem Johannis	1906 – 1908
18	Lasarus Yusuf Willem Johannis	1908 – 1916
19	Matheos Yusuf Willem Johannis	1916 – 1960
20	Marthen Matheos Johannis	1960 – 1966

NDAO		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Bungga Bauw	± 1753
2	Dulli Tetti	± 1755/6
3	Ledekke	± 1832
4	Lollei Kotten	1851 – 1870
5	Abraham Mingga	1870 – 1876
6	Hendrik Kotten	1876 – 1905
7	Zadrack Kotten	1905 – 1925
8	Frans Kotten	1925 – 1940
9	Ferdinand Baun	1940 – 1968

OENALE		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Limbe Longga	± abad 16
2	M'Boro Mesa	abad 17
3	Fanggi M'Boro	± 1691 - ± 1720
4	Nafi Fanggi	± 1720 - ± 1756
5	Sande Naie (Sande Nafi)	± 1756 - ± 1832
6	Daon Delthan	± 1832
7	Dethan Messa	- ± 1843
8	Messah Giri	1844 – 1868

9	Jacob Messah Giri	1868 – 1895
10	Soleman Messah Giri	1895 – 1900
11	Tobias Messah Giri	1900 – 1918
12	Hanok Lenggu	1918 – 1927
13	Simon Messah Giri	1927 – 1939
14	Hendrik Hanok Lenggu	1939 – 1961

OEPAO (OESIPOLA atau OSSIPOKO)		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Lere Mera	
2	Wolterus Namo	
3	Kurus	± 1832
4	Markus Meoh	- 1855
5	Sangu Resi	1855 – 1868
6	Tomas Marek Dungun	1868 – 1877
7	Tesa Dungun	1877 – 1879
8	Besi Sangu	1879 – 1889
9	Tobias Martinus Dungun	1889 – 1895
10	Dunggu Tesa Aek	1898 – 1905
11	Simon Besi	
12	Amos Besi	
13	Junus Besi	

RINGGOU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Christian Bacoma	

TERMANU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Ma Bulan	
2	Muskanan Mak	
3	Kila Muskanan	
4	Kelu Kila	
5	Leki Kelu	
6	Amalo Leki	
7	Tola Manu Amalo	
8	Seni Tola	
9	Kila Seni	1660 – 1678
10	Pelo Kila	1678 – 1699
11	Sinlae Kila	1699 – 1717
12	Ndaumanu Sinlae	1717 – 1745
13	Fola Sinlae	1745 – 1771
14	Sadok Ndaomanu	1776 – 1786
15	Amalo Muda	1786 – 1817

16	Mauk Amalo	1817 – 1832
17	Kiuk Pelo	1832 – 1851
18	Fangidae Kiuk	1851 – 1859
19	Pelo Keluanan	1860 – 1875
20	Stepanus Paulus Amalo	1876 – 1887
21	Salmon Pela	1888 – 1892
22	Johannis Jeremias Michel Amalo	1894 – 1912
23	Christoffel Jeremias Michel Amalo	1912 – 1942
24	Chr. J. M. Amalo	1942 – 1943
25	Albert Chr. J. M. Amalo	1944 – 1946
26	Ernest Johanis Jeremias Michel Amalo	1947 – 1966

THIE		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Pande	abad ke-17
2	Messakh Mbura	± 1678 – 1694
3	Moy Messsakh	± 1697
4	Nale Messakh	1697 – 1717
5	Mbura Messakh	1718 – 1728
6	Benyamin Messakh Foembura	1728 – 1746
7	Daniel Foukay Pah	1746 – 1749
8	Alexander Messakh Pah (Yohanes Mesa)	1749 – 1771
9	Bastian Mbura Messakh	1771 – 1783
10	Paulus Pah Mbesialu	1783 – 1811
11	Kobi Pah	1811 – 1816
12	Gandi For	1816
13	Baba Henu	1816 – 1841
14	Ndu Kobi	1841 – 1861
15	Paulus Messakh (Urai Ndu)	1861 – 1882
16	Jonas Nicolaas Messakh (Helo Ndu)	1882 – 1907
17	Salmon Messakh (Modo Helo)	1907 – 1918
18	David Jacobis Messakh (Lani Helo)	1918 – 1921
19	Foe Moy	1921 – 1927
20	Tobias Arnoldus Messakh (Ndu Helu)	1927 – 1931
21	Jeremias Wilhelmus Messakh	1931 – 1948 pemerintahan pertama
22	Wilhelmus Moy	1948
23	Saudale	1948 – 1949
24	Jusuf Messakh	1949 – 1951
25	Jeremias Wilhelmus Messakh	1951 – 1953 pemerintahan kedua
26	Hermanus Haning	1953 – 1956
27	Jeremias Arnoldus Messakh (Kobi Pah)	1956 – 1962
28	Thobias Arnoldus Messakh	1962 – 1970

Raja-raja di Pulau Flores

ENDE		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Jari Jawa	
2	Raki Nggera	
3	Marhaba	
4	Ngi-i Ramo	
5	Muli	
6	Arubusman	- 1851
7	Inderdewa	
8	Arubusman	1861 – 1895
9	La Usuf Pua Natek (La Usif, La Yusu, atau Pua Notek)	1896 – 1908
10	Harun	1908 - 1909
11	Pua Meno Arubusman	1909 - 1923
12	Busman Abdurrahman	1925 - 1947
13	Haji Hasan Arubusman	1949 - 1962

KANGAE[325]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Bemu Aja	
2	Godo Eng Gawe	
3	Ria Ian Bangu Tara Bogar	
4	Sira Ria Rapa	
5	Sia Sawu Nata Raga	
6	Dea Manu Moan Lesu	
7	Kau Lalan	
8	Dara Bogar Jeu Jenga	
9	Sasa Lai Gasang	
10	Desa Mau Bago	
11	Leti Gusi Bara Laka	
12	Ehak Wuli Laka	
13	Gesang Pari Neang	
14	Lai Puan Garang Igor	
15	Sugi Sao Bata Warat	
16	Toing Tala	
17	Padu Laju	
18	Koro Kelan Mada Lelo	
19	Pule Plaju Loreng Bala	
20	Nago Raga Iga	
21	Sia Naga	
22	Laju Lodan Gada Goleng	
23	Karung Koda Goleng	
24	Sawu Beo Bapa Goleng	
25	Sia Sona Kakun Goleng	

325. Diambil dari *Sistim Kemasyarakatan/ Sistim Pemerintahan Tradisional di Kabupatan Sikka.*

26	Sua Sia Daru Mada	
27	Sareng Balik	
28	Bewat Bete Baring Bala	
29	Hing Hila Hitong	
30	Keu Iku	
31	Leing Lusi	
32	Rang Bata Sanggolo	
33	Koro Watu Kelan	
34	Mitan Koro	
35	Bapa Li Nutur	
36	Goleng Bapa	
37	Keu Nago	1862-1902

KEO		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Raja Moewa Tanga	1913 – 1920
2	Goa Tunga	1920 – 1930
2	Dato Bali	1930 – 1931
Keo disatukan dengan Nage membentuk Nage Keo		

LARANTUKA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Paji Golo Arkiang	
	Padu Ile Pook Wolo	
1	Sira Demon	
2	Patigolo Lobalu	
3	Mauboli	
4	Sirapain	
5	Siranapan	
6	Igo	
7	Adowurin	
8	Adobala	
9	Ola Ado Bala (Don Fransisco Ola Ado Bala Diaz Vieira de Godinho)	1645 – 1680
10	Don Gaspar I	1680 – 1750
11	Don Manuel	1750 – 1812
12	Don Andre I	± 1812
13	Dona Lorenza Gonsalvi	± 1820
14	Don Lorenzo I	± 1830 – 1849
15	Don Andre II	1849 – 1861
16	Don Gaspar II	1861 – 1877
17	Don Domingo	1877 – 1882
18	Don Lorenzo II (Lorenzo Usi)	1882 – 1910
19	Don Luis Blantaran de Rozari	1910 – 1912
20	Don Ohannus Servus Diaz Vieira de Godinho	1912 – 1919
21	Don Antonio Blantaran de Rozari	1919 – 1941
22	Don Lorenzo III	1941 – 1962

LIO		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Pius Rasi Wangge	1924 - 1940
2	Johan Christiaan Rambing	1940 – 1942
3	Markus Kunu Nduri	1947 – 1956

MANGGARAI		
TODO		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Ra Ratung Masa (Kraeng Lolo Bali)	
2	Ilang	
3	Ilang Randut	
4	Tuluk	
5	Mbohong	
6	Paku	
7	Bale (Pahu)	
8	Taluk	1901 – 1909
9	Tamur	1909 – 1921
CIBAL		
1	Tamelo	
	Tekele	
	Rendong Mataleso	
	Paju	
	Paja, Pangge Tande, Gande Ame Rambe, dan Pasat	
	Dapang Lando Kakor Nalo Holes dan Touk Ame Tara	
	Ponjung Ame Gater	
	Ugal Ame Sumpak	
	Ngampot	
	Bako	
	Lambe	±1915
BAJO		
	Mesa (Ama Keka)	
	Lali	
	Kota	
	Bagung	
	Rappang	
	Jamaha	
	Mage	- 1926
	Hasa	1926 – 1930
SWAPRAJA MANGGARAI		
	Karaeng Bagung	1924 – 1930
	Aleksander Baruk	1930 – 1949
	Konstantinus Ngambut	1949 – 1960

NAGE		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Roga Ngole	1917 – 1928
NAGE KEO		
	Joseph Juwa Dobe Ngole	1928 – 1962

NDONA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Mbani	
2	Baro	
3	Rangga	
4	Jau	
5	Ndosi	
6	Mbani	
7	Bara	
8	Ara	
9	Nggau	
10	Mbani	
11	Waru	
12	Titu	
13	Raja	
14	Tuga	
15	Manggu	
16	Mbani	
17	Raja Baki Bani	1909 – 1922
18	Pius Rasi Wangge	1922 – 1924

NGADA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Jawa Tai	1915 – 1918
2	Pajo Eso	1918 – 1920
3	Pea Mole	1920 – 1951

NITA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Moang Raga	
2	Desa Nita	
3	Sisa Mitan dan Hila Bura	
4	Lolojong	
5	Maujong	
6	Manuel	
7	Moang Noko	
8	Don Fransisco da Silva (Moang Digung)	1885 - 1892
9	Don Salipi da Silva (Moang Nong)	1893 - 1909
10	Don Juan da Silva	1909 - 1926

SIKKA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Zaman para *Mo'ang Gete*	
1	Rae Raja	
2	Sugi Sao (Mo'ang Sugi)	
3	La'i Sao (Mo'ang Sao)	
4	Mo'ang Saru	
5	Mo'ang Weling	
6	Mo'ang Mada	
7	Mo'ang Pedong	
8	Mo'ang Herong	
9	Mo'ang Mage	
10	Mo'ang Béwat	
11	Mo'ang Bata Jati Jawa	
12	Mo'ang Igor	
13	Mo'ang Baga Ngang	
	Zaman para raja	
1	Alésu Mo'ang Kéu	
2	Kapitang (Mo'ang Pitang)	
3	Dona Maria	
4	Mo'ang Samao (Samadu) atau Oriwis da Silva	
5	Dona Ines (Agnes) da Silva	
6	Jujé Juaniku da Silva	
7	Mbako I Kikir Hiwa	
8	Prispin da Cunha (Mo'ang Prispin)	
9	Don Luis da Silva (Mo'ang Bia)	
10	Thomas Mo'ang Bo da Silva	
11	Andreas Jati da Silva	
12	Don Josephus Ximenes da Silva (Don Joseph Mo'ang Mbako da Silva)	1898 - 1902
13	Nong Méak (Josef da Silva)	1903 - 1920
14	Thomas da Silva	1920 - 1948
15	Centis da Silva	1948 -

TANAREA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Kakadupa atau Uwa Dambo	1907 - 1915
2	Iju Uwa	1915 - 1917
3	Josef Ute	1917 - 1923
Tanarea disatukan dengan Ende		

Kerajaan-kerajaan di Pulau Sawu (Sabu)

LIAE		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Kale Lodo	
2	Riwu Manu	
3	Jami Riwu Manu	± 1721
4	Mone Bengu	± 1726
5	Mone Bengu	± 1740
6	Kore Rohi	1752 – 1756
7	Kore Lone	1758 – 1760
8	Manu Kore	± 1767 - ± 1794
9	Ama Moye Keloa	± 1832
10	Ama Iye Yote	± 1852 – 1859
11	Ama Baki Bela	1859 – 1868
12	Hendrik Ratu Manu (Ama Amu)	1868 - 1918

MENIA		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Tero Weo	
2	Ama Gaja Bengu Tagi	± 1760 - ± 1790
3	Gaja Bengu	- ± 1794
4	Rehi Bengu	± 1794 -
5	Ama Piga Tagi	± 1832
6	Tagi Rehi Ama Gaya	1842 – 1868
7	Ama Lena Rihi	1868 – 1873

MESARA		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Wele Jami	± 1717 – 1721
2	Kore Wele	± 1752
3	Ama Loni Dimu Kore	± 1756 – 1760
4	Rugi Dimu	1760 -
5	Jaga Biwu	1761 – 1781
6	Buki Dimu	1781 - ± 1794
7	Ama Bisi Ulu Buku	1832 – 1868
8	Ama Lebe Ju Uli	1868 – 1893
9	Ama Tengo Doko Ju (Domingoes Buki)	1893 - 1914

SEBA		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Kore Rohi	
2	Ojami Kore	
3	Haba Ojaba (Haba Jami)	
4	Lay Haba	

5	Bire Lay	
6	Riwu Bire	
7	Lomi Riwu	
8	Jara Lomi	
9	Lomi Jara	
10	Wadu Lay	
11	Jara Wadu	
12	Ama Doko	
13	Lomi Jara	
14	Doko Lomi	± 1790 – 1794
15	Ama Lomi Jara	1830 – 1859
16	Ama Dima Talo	1859 – 1863
17	Ama Nia Jawa	1863 – 1868
18	Ama Doko Kaho	1868 – 1881
19	Lazarus Rosi Jawa	1882 – 1889
20	Aleksandar Rihi Jawa	1890 – 1901
21	Elias Luji Raja Pono	1901 – 1906
22	Samuel Thomas Jawa	1907 – 1918
SWAPRAJA SAWU		
1	Samuel Thomas Jawa	1918 - 1935
2	Paulus Charles Jawa	1935 - 1963

TIMU (DIMU)		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Talo	± 1672
2	Ama Rohi (Ama Rosi)	± 1676
3	Luji	± 1696
4	Rohi Rano (Rasi Rano)	1710 – 1731
5	Hili (Sili) Haba	1731 – 1798
6	Elias Jara Hili (Sili)	1798 - ± 1805
7	Rewa Daga	± 1832
8	Ama Hili Haba	± 1851 - ?
9	Ama Lai Daga	±1858 - ?
10	Eduard Jara Luji	
11	Ama Piga Jara	1868 – 1911
12	Saul We Tanya	1911 – 1918

Kerajaan-kerajaan di Pulau Solor

LOHAYONG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Kaicili Pertawi	1613 - 1645
2	Nyai Cili	1646 - 1664
3	Nyai Cili Muda	1664 - 1686
4	Sangaji Cili	1687 - 1700
5	Poro	1700 - 1703
6	Samong	1703 - 1715 pemerintahan pertama
7	Persiko	1715 - 1718
	Samong	1718 - 1728 pemerintahan kedua
8	Kabe	1728 - 1729
9	Gesi Engel	1729 - 1736
10	Talleway	1736 - 1739
11	Wayang atau Waluyang	1739 - 1743
12	Sangaji Lesing	1743 - 1744
13	Lakaya Sambu	1744 - 1748
14	Jou	1748 - 1758
15	Jumat	1760 - 1765
16	Rama Geokama	1765 - 1795
17	Rote Geokama Baoama	1795 - 1803
18	Kraeng Geokama	1832
19	Kelas Raja	1840
20	Seneng	1840 - 1859
21	Kidin Siko	1860 - 1869
22	Amang Kalake	1870 - 1896
23	Kalake Amang	1896 - 1925
24	Banu Kapitan	1925 - 1928
25	Amang Kalake	1930 - 1956

Raja-raja di Pulau Sumba

ANAKALANG atau ANAKALANGU		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
	Umbu Dongu Ubini Mesa	- 1913
	Umbu Ngailu Dedi	1913 - 1927
	Umbu Sapi Pateduku	1927 - 1953
	Umbu Remu Samapati (ketika menjabat sebagai anggota Majelis Pemerintahan Harian Daerah Kabupaten Sumba Barat, tugas sebagai raja Anakalang diwakili oleh Umbu Sulkungi Ibilona)	1953 – 1962 Bupati Sumba (1958 – 1973)

KADUMBULU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Umbu Hiwa Kambuku	-1862

KAMBERA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Salay Patar	± 1726
	Umbu Hina Hanguwali	
	Umbu Gaba Hingu	
	Raja Umbu Tunggu Jama Kareminjawa atau Umbu Pingi Ai	± 1845 – 1861
Kerajaan Kambera disatukan dengan Lewa		

KANATANG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Umbu Nggala Lili	- 1848
2	Umbu Nggaba Hambangu Bani	1848 – 1891
3	Umbu Maramba Kambaru Windu Maru Mata	1892 – 1897
4	Umbu Lai Sumbu (Umbu Gala Lili)	1898 – 1913
5	Umbu Hai Retanggu Hadambiwa (Umbu Nai Haru,	1919 - 1946
6	Umbu Tunggu Mbili Nggamunahu atau Umbu Janggatera	1946 – 1959
7	Umbu Kambangu Hamara (Umbu Kadambungu Nggedingu atau Umbuina I Wulangu)	1959 - 1962
KAPUNDUK		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Juku Awang	± 1749 – 1756
2	Umbu Kambang	± 1845
3	Umbu Panda Huki Landu Jama	± 1870 – 1901
4	Raja Umbu Janggatara (Umbu Lai Dundu atau Umbu Tunggu Mbili Nggamunahu atau Umbu Tunggu Namu Praing)	1901 - 1904
5	Umbu Delu Jara Belu	1906 – 1914
6	Umbu Nggaba Mekengukonda (Mehangukonda)	1914 - 1927
7	Umbu Nggaba Mekengukonda (Mehangukonda) atau Umbuna i Taku (Oemboe Nai Takoe)	1914 - 1927
8	Umbu Nai Haru	1926 – 1946

KARERA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Umbu Haru Halamatu (Parawangu) - semenjak bergabung dengan Mahu (Masu) menjadi raja bantu	
	Umbu Bal Nggiku atau Umbuna I Kambaru	- 1946
	Umbu Manja Nggaharu (Umbu Hungameha atau Umbuna I Nggaba)	

KODI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Loghe Kandua	1901 - 1911
	Nderaa Wula (Dera Woela atau Dera Wula)	1912 - 1945
	Hermanus Rangga Horo (H.R. Horo)	1945 - 1962

LAULI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Umbu Ngailu Beku	- 1912
	Dangi Lade	1912 - 1920
Dewan pemerintahan 1920 - 1932, yang terdiri dari raja Lauli Bodo, Lauli Bawa, dan Waibangga		
Lauli Bodo	**Lauli Bawa**	**Waibangga**
Toda Leru	Keba Buningani	Giku Umbu Wolika
	Koki Umbu Daka	Lede Mude
		Dato Goro
Dewan pemerintahan dihapuskan		
	Koki Umbu Daka	1932 - 1940
	Saba Ora	1940 - 1960 an

LAURA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Umbu Lele Kondi	1862 - 1901
2	Umbu Tangga Amabulu (Lende Nggolughola I)	1901 - 1911
3	Ama Mbiri Kalumbang (Mbulu Kalumbang Danggangara)	1911 - 1928
4	Timoteus Tako Geli	1928 - 1932
5	Rua Kaka (raja sementara)	1932 - 1947
6	Lende Kalumbang (Lende Nggolughola II)	1947 - 1961

LAWANDA (LAWONDA) atau UMBU RATU NGGAI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Umbu Bili	±1850
	Umbu Siwa Sambawali I	1913 - 1932
Semenjak 1930 menjadi Kerajaan Umbu Ratu Nggai		
	Umbu Mbili Nggemunasu	1932 - 1935
	Umbu Sakala Maramba Jawa	1935 - 1949
	Umbu Siwa Sambawali II (Umbu Tipuk Marisi) - ketika mengemban tugas sebagai bupati dan ketua dewan Raja-raja Sumba, Beliau diwakili oleh Habil Hudang sebagai raja Umbu Ratu Nggai.	1949 - 1962

LEWA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Pura	± 1750 – 1756
2	Umbu Hina Hanggu Walu	
3	Umbu Nggala Lili Kani Paraingu	
4	Umbu Diki Kama Pira Ndawa	± 1860
5	Taralandu (Umbu Tunggu Mbili Maramba Namu Paraingu atau I Taralandu I Jangga Mbulu)	±1860 - 1891
6	Umbu Biditau atau Umbu Tunggu Yama Kareminjawa	1892 – 1917
7	Umbu Ngaba Haumara	1917 – 1924
8	Umbu Rarameha (Umbu Diki Kama Pira Ndawa II)	1924 – 1940
9	Umbu Nggaka (Nggaba) Hunga (Hungu) Rihieti	1940 – 1962

MAHU (MASU) KARERA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Umbu Ndawa Hawula (Umbuna I Laki atau I Landuwulangu Janggamemangu)	1909 - 1932
	Umbu Nengi Landumeha (Umbuna I Hamba)	1932 - 1954
	Umbu Hina Pekambani (Umbu Maramba)	1954 - 1962

MANGILI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Mandi	± 1696 – 1699
	Umbu Tanga Ndemalulu (Kiuka Kajuko)	± 1725
	Ama Gega	? – 1734
	Nggala	± 1738
	Manyuka	± 1739
	Umbu Lakaru Taraandungu	± 1750 – 1775
	Umbu Dena Lakunara	± 1845
	Umbu Mangu	± 1845 - ± 1860
	Umbu Hina Hungguwali	1894 - 1911
	Umbu Tunggu Eta	1911 – 1912
	Pemerintahan militer (Letnan Rijnders) - pembagian menjadi Mangili Utara dan Mangili Selatan	
	Pemerintahan sipil (A.J.L. Covreur)	
Kerajaan Mangili disatukan dengan Kerajaan Rindi menjadi Rindi Mangili		

MBANGEDO		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Simba Dondong (Hemba Dondo)	
	Rija Kanda (Riedja Konda)	- 1919
	Rangga Kura	1919 - 1929
	Rya Bokolo (David Bulen)	1929 - 1931
Mbangedo disatukan dengan Kodi		

MELOLO		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Umbu Siwa Tanangunju	± 1750
2	Gallang	± 1750 - ± 1775
3	Umbu Hia (Hina) Hamatake I	
4	Umbu Nggala Lili	
5	Umbu Nggaba Haumara I	± 1863
6	Umbu Nggaharu Tanggurami (± 1867 – 1892	
7	Ama Luji Dimu	± 1890
8	Umbu Hina Hamasoko (Oemboe Hina Hamatake II/ Umbu Hina Hamataki II/ Umbu Maramba)	1893 - 1930
9	Umbu H. Jangga Kadu	1930 – 1946
10	Umbu Nggaba Haumara II	1946 – 1959
11	Umbu Windi Tanangunju	1959 – 1962

MOMBORO		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Umbu Nombu	± 1845
	Umbu Ndala Sombangu	± 1863 – 1869
	Umbu Laki Mbali	± 1880 – 1890 an
	Umbu Pombu Saramoni	1898 - 1915
	Umbu Karai	1915 - 1929
	Umbu Mbatu Pakadeta (Umbu Tuaranjani atau Umbu Mahama)	1929 - 1932
	Umbu Dondu Rawambaku	1932 - 1934
	Timotius Umbu Tunggu Mbili	1934 - 1962

NAPU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Umbu Kambaru Windi	
2	Umbi Dai Kudu beserta Umbu Renggi Taai	
3	Umbu Timba Nduka Laki Mora atau Umbu Tunibang (Oemboe Timbang)	1892 - 1910
4	Umbu Rawa	1910 – 1914
5	Umbu Landukura (Oemboe Landukura)	1914 - 1927
6	Umbu Ndilu Danguramba (Umbu Rada)	1927 – 1928

RINDI MANGILI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Umbu Hina Harumata	-1919
	Umbu Nggala Lili Kaniparaingu	1919 - 1935
	Umbu Hapu Hambandima	1935 -

TABUNDUNG		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Umbu Kaputing	
2	Umbu Hunga	
3	Umbu Mehang	
4	Umbu Tunggu Namu Paraingu (Oemboe Toenggoe Namoe Paraing)	1900 - 1918
5	Umbu Ndai Lili Ata	1918 – 1931
6	Umbu Mbangba (Umbu Hunga Wohangara)	1931 – 1956
7	Umbu Manja Mehangu	1956 – 1962

TAIMANU		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
	Umbu Nggaba	sekitar 1860

UMALULU		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
	Umbu Hia Hamataki (Umbu Maramba)	1912 - 1930
	Umbu Hina Janggakudu	1930 - 1946
	Umbu Nggaba Haumara	1946 -

WAIJELU		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Umbu Nggaba Kalai	1892 - 1899
2	Umbu Teulu Atakawau	1899 - 1927
3	Umbu Teulu Jawapangu	1927 - 1931
4	Umbu Yiwa Ngganja	1931 - 1942
5	Umbu Kambaru Windi	1942 - 1962

WANOKAKA		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Mawu Madoli	± akhir abad ke-19
2	Luju Meramba Dangu	- 1912
3	Kiring Semara	1912 - 1914
4	Baju Padedangu	1914 -1928
5	Guling Manyoba	1928 - 1956
6	Lau Mau	1956 - 1962

WAWEWA		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
	Mete Umbu Pati	
	Mbulu Engge	- 1934 pemerintahan pertama

	Dewan pemerintahan Wawewa: Wada Mbombo, raja bantu Mangutana; Gidion Mbulu, raja bantu Weemangura; dan Jakub Ingangele, raja bantu Pola	1934 - 1945
	Mbulu Engge	1945 - 1962 pemerintahan kedua

Raja-raja di Pulau Timor

AMABI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Fini Amabi	
2	Banao	
3	Aiputu (Funan Aiputu)	
4	Saroro	
5	Ama Kefi I	1675 - 1704
6	Ama Kefi II	1704 - 1726
7	Loti	1726 - 1732
8	Nai Balas	1732 - 1755
9	Balthazar Loti	1755 - 1790
10	Osu Loti (Osu I)	1791 - 1795
11	Afu Balthazar	1795 - 1830
12	Osu II	1830 - 1860
13	Mano	1860 - 1883
14	Lelo	1884 - 1894
15	Kusa (wakil raja)	1896
16	Arnoldus (Slolo)	1901
17	Junus Amtarm (wakil raja)	1901 - 1903
18	Kase Kome (Kas Komi)	1903 - 1912
19	Jacob Ch. Kome (Jacob Ch. Amabi)	1915 - 1917
Sejak 1917 digabungkan dengan Swapraja Kupang		

AMANATUN[326]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Tnai Pah Banunaek	
2	Tsu Pah Banunaek	
3	Nopu Banunaek	
4	Bnao Banunaek I (Suti Banunaek)	
5	Nifu Banunaek	
6	Kili Banunaek	
7	Bnao Banunaek II (Bnao Naktunmollo)	
8	Nono Luan Banunanaek	
9	Bnao Banunaek III (Bnao Nifusafe)	

326. Sumber: *Raja-raja Amanatun yang Berkuasa*.

10	Bnao Banunaek IV (Raja Bnao Muti)	
11	Bab'I Banunaek	1769 - 1808
12	Bnao Banunaek V (Bnao Nunkolo)	
13	Muti Banunaek I (Kusat Muti)	
14	Loit Banunaek	sekitar 1899
15	Muti Banunaek II	1900 - 1915
	Usif Kusa Banunaek (wakil raja)	1916 - 1919
16	Kolo Banunaek (Abraham Zacharias Banunaek)	1920 - 1945
17	Lodoweyk Lourens Don Louis Banunaek (Laka Banunaek)	1946 - 1965

AMANUBAN[327]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Don Michel	±1749 -1751
2	Don Louis	1751 - 1770
3	Don Jacobus Albertus	1770 - 1786
4	Tubani	1786 - ± 1808
5	Louis	± 1808 - ± 1824
6	Baki	± 1824 - 1862
7	Sanu	1862 - ± 1870
8	Bil Nope	± 1870 - 1910
9	Noni Nope	1910 - 1920
10	Pae Nope (Petrus Pae Nope)	1920 - 1946
11	Paulus Nope (Leu Nope atau Jhon Paulus Nope)	1946 - 1949
12	Kusa Nope	1949 - 1958
Sumber lain:[328]		
1	Olak Mai	
2	Ul Banu	
3	Bil Banu	
4	Tu Bani/ Tubani Bil	
5	Luis I	
6	Seo	± 1700
7	Bil (Pili)	± 1749 - 1751
8	Don Luis II (Boti)	±1751 - 1770
9	Tubani	± 1786 - ± 1808
10	Don Luis III	± 1808 - ± 1830
11	Baki Nope	± 1830 - 1882
12	Sanu Nope	?
13	Bil Nope	1883 - 1910
14	Noni Nope	1911 - 1920
15	Pae Nope (Petrus Pae Nope)	1920 - 1945
16	Paulus Nope (Leu Nope atau Jhon Paulus Nope)	1946 - 1949
17	Kusa Nope	1950 - 1965

327. Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Amanuban (diunduh pada tanggal 23 September 2009).
328. Lihat Regnal Chronologies

Sumber lain:[329]		
1	Don Michel (Seo Bil Nope?)	sebelum 1749 - 1751
2	Don Luis	1751 - 1770
3	Don Jacobus Albertus	1770 - 1786/ 1806
4	Tubani	1786 - sebelum 1808
5	Luis Nope	sebelum 1808 -± 1830
6	Baki Nope	± 1830 - 1882
7	Bil Nope	1883 - 1910
8	Noni Nope	1910 - 1920
9	Pae Nope	1920 - 1946
10	Kusa Nope	1949 - 1962

AMARASI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Nafi Rasi	
2	Dom Agostinho	1637 – 1664
3	Rais Jam	
4	Dom Agusto Fernandes	
5	Esu	
6	Don Alfonsus Ruatefu	
7	Don Rote Ruatefu	
8	Kefi Lote	1803 – 1832
9	Koro Kefi	
10	Obe Koro	
11	Rasi Koro	
12	Taku Obe	
13	Rasi Koroh	
14	Isak Koroh	1915 – 1923
15	Alex Koroh	1923 - 1925
16	H.A Koroh	1926 – 1951
17	Fiktor Koroh	1951 - 1962

AMFOAN				
Nama raja		**Tahun pemerintahan**		
Afoan Leu				
AMFOAN NAIKLIU			**AMFOAN TIMAU**	
Nama raja	**Tahun pemerintahan**		**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
Nai Aunoni		1	Nai Benao (Mano)	
Fini Mano		2	Maobai Maol	
Willem Aunoni (Sana Aunoni)	1858 – 1880	3	Muti Foan	
Ratu Anna Elisabeth Aunoni	1880 – 1902	4	Ani Foan	

329. Lihat *Historical Notes Timor Kingdoms*, halaman 41.

Willem Tafin Talnoni	1902 -1915	5	Nisnoni Foan	
		6	Nai Baki Mano	1901 – 1910
	Sejak 1910 Willem Tafin Talnoni menjadi raja seluruh Amfoan			
Soleman Willem Talnoni		1915 – 1921		
Adreanus Talnoni		1922		
Mutis Oil Amanit (garis keturunan Amfoan Timau)		1923 – 1930		
Semuel Amanit		1930 – 1943/44 Pemerintahan pertama		
Willem Oil Amanit		1943/44 – 1948		
Semuel Amanit		1948 – 1962 Pemerintahan kedua		

BELU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Henricus Seran Nahak	1926 - 1929
2	Seran Asit Fatin	1929 - 1931
	Loro Fialaran (Atok Samara), *loro* Lakekun (Benedictus Leki), dan *loro* Wewiku (Bere Nahak)	1931 - 1941
Dipecah menjadi tiga, yakni Malaka, Belu Tasifeto, dan Lamaknen		

BIBOKI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Tambesi Manlean	1878 – 1911
	Kaubauk (Kau Mauk)	1915 – 1940
	Leonardus Manlean (Leonardus Taek Kau)	1942 – 1962

FATULEU		
Ke*fettor*an		
	Nama *fettor*	**Tahun pemerintahan**
1	Kai Thaiboko	
2	Lelo Thaiboko	
3	Nuwe Thaiboko	
4	Baki Kooi	1874 – 1880 pemangku
5	Baki Tuha	1880 – 1900 pemangku
6	Fai Thaiboko	1900 - 1912
Kerajaan		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Christoffel Thaiboko	1912 - 1930
2	Nicolaas Isu Nisnoni (raja Sonbai Kecil dan Kupang)	1930 - 1942
3	Alfonsus Nisnoni	1942 - 1945
4	Hans Nisnoni	1945 - 1955

FIALARAN		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Taek Lakan	
2	Mau Bauk	
3	Suri Lulun	
4	Ato Surik	
5	Mau Aton	
6	Mau Bauk	
7	Atok Mauk	
8	Mau Aton	
9	Bessi Aton	
10	Mau Bessin	
11	Ato Lulin	
12	Mau Aton	
13	Ato Mauk	1858 – 1903
14	Atok Samara (Atok Bessin)	1904 – 1927

FUNAY		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Lafu I	± 1760 – 1762
2	Lelo	± 1832
3	Kolan I	
4	Lafu II	1840 – 1873
5	To	± 1874
6	Kolan II	1888 – 1906
7	Kolan Laurens Funay	1907– 1917
Disatukan membentuk Swapraja Kupang pada tahun 1917		

INSANA[330]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
Atupas		
1	Usif Nenomnanu	sekitar awal hingga pertengahan abad ke-19
2	Maklafu Nenobahlasi	1858 – 1908
3	Atolan Neno	
4	Malafu Tasaeb	
5	Tasaeb Malafu	1934 - 1936
6	Atolan Malafu (Ial Uala)	1936 - 1938
7	Malafu Atolan (Hae Koto)	1938 - 1940
8	Afu Tasaeb	1940 - 1942
9	Haki Atolan	1942 - 1958
10	Atolan Malafu	1958 - 1982
11	Atolan Tasaeb	1982 - 1999

330. Sumber: *Maubes Insana*

Jalur pemerintahan eksekutif		
1	Tanesib Ela Taiboko	1907 - 1913
2	Fatin Taolin	1913 - 1915
3	Kahlasi Taolin	1915 - 1933
	Commisie Zeflfbestuurde	1933 - 1934
4	Tasaeb Malafu	1934 - 1936
5	Afu Tasaeb	1936 - 1938
6	Dominikus Taolin	1938 - 1940
7	Nicolas Malafu Atolan	1940 - 1942
8	L.A.N. Taolin (Lorencius Taolin)	1942 - 1970

KUPANG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Daud Hanoch Obed Tanof (raja Taebenu)	1917 - 1918
2	Nicolaas Isu Nisnoni (raja Sonbai Kecil)	1918 - 1945
3	Alfonsus Nisnoni	1945 - 1965
4	Don Leopold Nisnoni	1992 -

LAKEKUN		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Banu Lorok	
2	Balok Lorok	
3	Hoar Teti	
4	Moru Lebok	
5	Tahu Leki	

MIOMAFFO (AMAKONO)		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
Manuskrip Mr. Hans Hägerdal berjudul *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 10 mencantumkan urutan raja-raja sebelum Manubait Lemon: Don Fransisco de Taynube, Atopa, dan Oenunu Amakono (± 1767).		
1	Kono	
2	Manubait Lemon	
3	Tokono	1873 – 1904 atau 1832 - 1879
4	Ui Nono Kono I	1879 - 1902
5	Ui Nono Kono II	1902 - 1920
6	Kefi Lelan	1920 - 1934
7	Sobe Senok	1934 - 1947
8	Kasper Afoan Kono	1947 - 1962

MOLLO		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Willem Frederik Hendrik OEmatan (Tabelak OEmatan atau Lay Akun)	1915 - 1930
2	Tua Sonbai	1930 - 1959

SONBAI KECIL		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Baki Nisnoni	
	Ama Babo	1672 - 1699
	Ama Baki	1699 - 1708
	Noni (Bi) Sonbai	1682 - 1717
	Bawa Leu (Bernardus)	1717 - 1727
	Korneo Leu	1728 - 1748
	Daniel Taffy (Taffij) Leu	1748 - 1760
	Jakobus Albertus Taffy (Nube Tafin)	1760 - 1776
	Baki Bena Sonbai (Bernardus Nisnoni)	1776 - 1794
	Derk Hendrik Aulasi	1795 - 1797
	Nube Bena Sonbai (Pieter Nisnoni)	1798 - 1820
	Gerek Baki Sonbai	1810 - 1820
	Isu Baki Nisnoni	1820 - 1830
	Ote Nuben Nisnoni	1832
	Babkas Nube Nisnoni	1842
	Meis Babkas Nisnoni	1842 - 1860
	Isu Meis Nisnoni (Pieter Messi Nisnoni)	1860 - 1874
	Bastian Isu Nisnoni	1875 - 1890
	Said Meis Nisnoni	1890 - 1902
	Saubaki	1902 - 1904
	Baki Bastian Meis Nisnoni	1905 - 1911
	Nicolaas Isu Nisnoni	1911 - 1917
Bergabung dengan Swapraja Kupang pada tahun 1917, dengan Nicolaas Nisnoni sebagai rajanya		

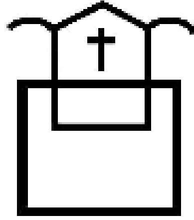
TAEBENU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Tanof I (Amatabenu)	± 1688 – 1700
2	Tanof II Lasi	1700 – 1737
3	Eki Tanof	1737 – ± 1756
4	Nai Kobe (Kobe Tanof)	± 1756 – 1803
5	Enus Kobe	± 1832
6	Salolo Kobe	
7	Kobe Tus	
8	Nobe Salolo (Hanoch Tanof)	1850 – 1873
9	Hanoch Tanof II	1874 – 1895
10	Jacob Tanof	1896 – 1901
11	Daud Hanoch Obed Tanof (1901 – 1917	

BENDERA BERBAGAI KERAJAAN DI KEPULAUAN NUSANTARA



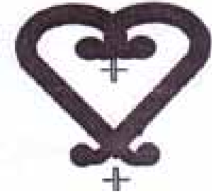
LAMBANG-LAMBANG BEBERAPA KERAJAAN DI KEPULAUAN NUSANTARA


Amanatun


Amanuban



Letta


Sonbai Kecil
(Kupang)

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Drs. Ma'moen (ketua). *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, Departemen Pendidikan & Kebudayaan–Bagian Proyek Inventarisasi & Pembinaan Nilai-nilai Budaya Provinsi Sumatera Selatan, 1991/ 1992.

Abdullah, Prof. Dr. Hamid. *Andi Pangerang Petta Rani: Profil Pemimpin yang Manunggal dengan Rakyat*, Grasindo, Jakarta 1991.

Abdullah, Taufik (ed.). *Sejarah Lokal di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Abidin, Prof. Mr. Dr. Andi Zainal. *Wajo' Pada Abad XV–XVI: Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara'*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.

_______, dibantu oleh: Sabang, Drs. Sudirman. *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Hasanuddin University Press, Ujungpandang, 1999.

Adiningrat, KRAT. Mas'ud Thoyib. *Renaissance Nusantara: Edisi Raja Sran Kaimana VIII*.

Adjin, Abdul Hadi; Y. A. H., Salim; Sahib, Rosihan. *Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung 1924–1950*, 1992.

Agung, Prof. DR. A.A. Gde Putra. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Agung, A.A. Gde Putra; Wirawan, A.A. Bagus; Sutjiatiningsih, Sri; Kuswiah, Wiwi (penyunting). *Puputan Badung 20 September 1906: Perjuangan Raja dan Rakyat Badung Melawan Kolonialisme Belanda*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi

Sejarah Nasional-Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional-Direktorat Jenderal Kebudayaan-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1999.

Ahmad, A. Samad. *Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 1997.

Ahmad, Zakaria; Ibrahim, Muhammad; Sulaiman, Nasruddin. *Cut Nyak Meutia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Direktorat Jenderal Kebudayaan - Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1993.

Alisjahbana, Puti Balkis. *Natal Ranah Nan Data: Kisah Perjalanan Dilengkapi Pokok-pokok Adat Istiadat Perkawinan Daerah Natal*, Dian Rakyat, 1996.

Alkhajar, Eka Nada Shofa. *Pahlawan2 Yang Digugat: Tafsir Kontroversi Sang Pahlawan*, Penerbit Katta, Solo, 2008.

Alwi, Des. *Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon*, Dian Rakyat, Jakarta, 2005.

Amal, M. Adnan. *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2010.

Amran, Rusli. *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1981.

Amran, Rusli. *Padang Riwayatmu Dulu*, C.V. Yasaguna, 1988.

Anak Agung Gde Agung, Ide. *Bali in the 19th Century*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.

________, *From The Formation of The State of East Indonesia Towards The Establishment of the United States of Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.

________, *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

Andre, WP dkk. *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat,* Depbudpar, Pontianak, 2008.

Anonim. *Sejarah Permulaan Jadinya Pulau Madura*, tanpa penerbit dan tahun terbit.

Anwar, Rosihan. *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.

Ardhana, I Ketut. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915–1950*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Arfah, Muhammad; Amir, Muhammad; Alimuddin, Muhammad; Amin, Asmah; Ernawati, A; Rachmad, Nur Asia; Rosmiah, Andi. *La Sinrang Bakka Lolona Sawitto Petta Lolo La Sinrang: Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan Republik Indonesia,* diterbitkan: dengan biaya dana Inpres Daerah Tingkat-I Provinsi Sulawesi Selatan, 1997/ 1998.

Arifin, Winarsih Partaningrat. *Babad Blambangan*, Ecole Française de'Extrême-Orient & Yayasan Bentang Budaya, 1995.

Arsip Nasional. *Surat-surat Perdjanjian Antara Keradjaan-keradjaan Bali/ Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda 1811 s/d 1938*, Arsip Nasional, Jakarta, 1964.

Asba, A. Rasyid. *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis di Kabupaten Barru*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010.

________, *Gerakan Sosial di Tanah Bugis: Raja Tanete Lapatau Menantang Belanda*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010.

Aspar, Muhammad. *Sejarah Kekaraengan Bontoa di Maros*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2011.

Assegaff, A.S. *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, 1982

Azhari, Ichwan & Syafri, Syaiful. *Jejak Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara*, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, Medan, 2009.

Azwar, Hj. Pocut Haslinda Muda Dalam. *Tun Sri Lanang: Dalam Sejarah Dua Bangsa Indonesia-Malaysia Terungkap Setelah 380 Tahun*, Dewan Penerbit Yayasan Tun Sri Lanang, 2011.

Badan Arsip Provinsi Jawa Timur. *Pembentukan Negara Madura Tahun 1948 dan Dampaknya Terhadap Republik*, Badan Arsip Provinsi Jawa Timur, 2002.

Badan Perencana Pembangunan Daerah Wajo. *Spirit of Wajo*, Yayasan Penamas, 2000.

Banunaek, Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek. *Raja-raja Amanatun yang Berkuasa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Bell, Alexander Drs.(penanggung jawab); Widyatmika, Munandjar Drs. (ketua); Loimalitna, Chatarina SE. (sekretaris); Djukana, Vonny S.Sos (anggota); Otemusu, Simson (anggota); Paratu, Dorkas (anggota). *Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupaten Alor*, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Arkeologi, Sejarah,

Nilai Tradisional - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinisi Nusa Tenggara Timur, 2009.

Berg, H.J. van den; Kroeskamp, Dr. H.; Prijohutomo, Dr.; Simandjoentak, I.P. *Asia dan Dunia Sedjak 1500*, JB. Wolters, Jakarta, 1954.

Bigalke, Terance. W. *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People*, KITLV Press, Leiden, 2005.

Bilfaqih, H.S. Ali Amin. *Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan dari Masa ke Masa*, C.V. Eka Jaya mandiri, Tarakan, 2006.

Bock, Carl. *The Head Hunters of Borneo: A Narrative of Travel Up the Mahakam and Down the Barito; also Journeyings in Sumatra*, Oxford University Press, 1985.

Bongenaar, Karel E.M. *De Ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indie: gedurende de Japanse bezeiting*, 2001.

Broersma, Dr. R. *Atjeh als Land voor Handel en Bedrijf*, Boekhandel Cohen, Utrecht, 1925.

Budhisantoso, S.; Gani, Ambo; G.S., Husnah; B. Baco; Yunus, Ahmad. *Wasiat-wasiat Dalam Lontarak Bugis*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.

Bukhari, RA.; Burhan, Drs.; Kasman, Ir.; & Suhami, Drs. *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK) Banda Aceh, 2008.

Buku Panduan KKL IV: Kota Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Sejarah Kerajaan di Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Program Studi Pendidikan Sejarah, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP-PGRI) Pontianak, 2001.

Bunru, Drs. Baharuddin; Cakrawaty, Dra. Dian; Dra. Rusmini; Muhammading, Dra. Sahriah (editor). *Bendera Kerajaan Sawitto*, Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan, 1995/ 1996.

Bustamam, Tengku Ferry. *Bunga Rampai Kesultanan Asahan*, ----

Chalik, Husein A (ketua); Bhurhanuddin, B.; Gonggong, Dr. Anhar. *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Tenggara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984/ 1985.

Chambert-Loir, Henri. *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2004 (terjemahan dari bahasa Perancis).

Chamber-Loir, Henri; Abdullah, Massir Q.; Oman Fathurahman, Suryadi; Maryam Salahudin, Siti. *Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima*, KPG, Jakarta, 2010.

Crawfurd F.R.S., John. *History of the Indian Archipelago*, *vol III*, Archibald Constable and Co., Edinburgh, 1820.

Creese, Helen; Putra, Dharma; & Nordholt, Henk Schulte (ed.). *Seabad Puputan Badung: Perspektif Belanda dan Bali*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2006.

Cribb, Robert. *Historical Atlas of Indonesia*, Curzon Press, 2000.

Da Gomez, E. P. & Mandalangi, Oscar P. *Don Thomas Peletak Dasar Sikka Membangun*, Yayasan Pendidikan Thomas (Yapenthom), Maumere, 2003.

Damanik, Jahutar. *Raja Sang Naualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia*, Medan, 1987.

_______, *Jalannya Hukum Adat Simalungun*, bekerja sama dengan P.D. Aslan, 1974.

Damayanti, Desi & Atmoko, Rudi. *Mengenal Pahlawan Bangsa: Sejarah Perjuangan & Kisah-kisah Kehidupan Mereka*, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007.

Davidson, Jamie S.; Henley, David; dan Moniaga, Sandra. *Adat Dalam Politik Indonesia*, KITLV-Jakarta & Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

De Graaf, H.J. & Pigeaud, T.H. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Babad Arya Tabanan dan Ratu Tabanan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa tahun terbit.

_______, *Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyuki Sultan Ibrahim*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

_______, *Cerita Rakyat Daerah Kalimantan Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1982.

_______, *Lontarak TellumpoccoE*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa tahun terbit.

_______, *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa tahun terbit.

_______, *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1997.

_______, *Sejarah Daerah Jawa Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1984.

_______, *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/ 1978.

_______, *Sejarah Daerah Lampung*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.

_______, *Sejarah Daerah Maluku*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.

_______, *Sejarah Daerah Riau*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1982.

_______, *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun anggaran 1996/ 1997.

_______, *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/ 1978.

_______, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya - Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978/ 1979.

_______, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusatenggara Timur*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah–Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1978/ 1979.

_______, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Pusat Penelitian Sejarah Budaya - Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara, 1978/ 1979.

_______, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Pusat Penelitian Sejarah Budaya - Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara, 1978/ 1979.

_______, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Pusat Penelitian Sejarah Budaya - Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara, 1977/ 1978.

_______, *Sejarah Pendidikan Daerah Riau*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa tahun terbit.

_______, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Kalimantan Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1983.

_______, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Daerah Nusa Tenggara Timur, 1979/ 1980.

_______, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1983.

_______, *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Kalimantan Timur*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

_______, *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sulawesi Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1982.

_______, *Syair Sultan Mahmud*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1990.

_______, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta 1984.

_______, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Riau*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta 1984.

Detaq, Aco. *Memperkenalkan Kota Kupang*, tanpa penerbit, 1972.

Detaq, Yakob Y. *Memperkenalkan Kebudayaan Suku Bangsa Sawu*, Penerbit Nusa Indah, Flores, 1973.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. *Sistem Kemasyarakatan/ Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupaten Sikka*, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Arkeologi, Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2010.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Raja-raja Timor dan Pulau-pulaunya*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Arkeologi - Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, 2007.

_______, *Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Arkeologi - Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, 2007.

Djajadiningrat, Hoesein. *Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten*, Djambatan, Jakarta, 1983.

Djelenga, Ir. H. Lalu. *Keris di Lombok*, Yayasan Pusaka Selaparang, Mataram, Lombok, 2000.

Doko, I.H. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur*, Balai Pustaka, Jakarta 1981.

________, *Timor Pulau Gunung Fatuleu "Batu Keramat*", Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

Drakard, Jane (penyunting). *Sejarah Raja-raja Barus: Dua Naskah dari Barus*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Dwinanto, Djoko. *Perang Kusamba*, Balai Pustaka, 2007.

Dwiyanto M.Hum, Drs. Djoko. *Ensiklopedi Serat Centhini*, Panji Pustaka, Yogyakarta, 2008.

________, *Puro Pakualaman: Sejarah, Kontribusi dan Nilai Kejuangannya*, Paradigma Indonesia, 2009.

Emanuel; Dyson, Laurentius; dan Matius, Paulus. *Sejarah dan Mitologi Suku Asli Kalimantan Timur*, Citra Wacana, 2012.

Gayo, M.H. *Perang Gayo-Alas Melawan Kolonialis Belanda*, P.N. Balai Pustaka, 1983.

Geschiedenis van Nederlandsch Indië, NV. Uitgeversmaatschappij "Joost van den Vondel", Amsterdam 1938. Deel I: DR. A.N.J. Thomassen A Thessink van Der Hoop, Prof DR. N.J. Krom, & R. A. Kern; Deel II: Prof DR. C.C Berg, C. Wessels S.J. & DR. H. Terpstra.

Gomang, Drs. H. Syarifuddin; Hons, MA; Widiyatmika, Drs. Munandjar; Luth, Prof. Dr. Thohir. *Lohayong Solor: Refleksi Menuju Masa Depan*, JP. Books, Surabaya, 2008.

Gonggryp, G.F.E. *Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1934.

Gouda, Dr. Frances. *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900–1942*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007.

Groeneveldt, W.P. *Nusantara Dalam Catatan Tionghua*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2009.

Guillot, Claude. *Banten Sejarah dan Peradaban (Abad X–XVII)*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008 (terjemahan dari bahasa Perancis).

Haga, Dr. B.J. *Lima Pahalaa: Susunan Masyarakat, Hukum Adat dan Kebijaksanaan Pemerintahan di Gorontalo*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1981.

Hägerdal, Hans. *Kerajaan2 Indonesia: An alphabetic enumeration of the former princely states of Indonesia, from the earliest time to the modern period, with simplified genealogies and order of succession*, manuskrip yang tidak diterbitkan.

Hamkaz, Ismail. *Sejarah & Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*, 2000

Hanna, Willard A. & Alwi, Des. *Turbulent Times Past in Ternate and Tidore*, Yayasan Warisan dan Budaya Banda Naira, 1990.

Hanna, Willard Anderson. *Bali Profile: People, Events, Circumstances (1001–1976)*, American Universities Field Staff, New York, 1976 (reprinted by Rumah Budaya Banda Naira, 1990).

Harahap, E.St. *Perihal Bangsa Batak*, Bagian Bahasa Djawatan Kebudajaan - Dep. P.P. dan K., Jakarta, 1960.

Harahap SH., H. M. D. *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, Grafindo Utama, Jakarta, 1986.

Harahap, Parada. *Toradja.* N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, Bandung, 1952.

Hardjasaputra, Sobana A. *Bupati di Priangan: Kedudukan dan Peranannya pada abad ke-17–19* dalam Seri Sundalana, Pusat Studi Sunda, Bandung, 2004.

Hasan; Darwis; Mahdi, Syakir; Haliadi. *Sejarah Poso*, Tiara Wacana, Yogya, 2004.

Hasan M. Hum, Drs.; Nuraedah S.Pd, M.Pd; Lumangino, Wieman Darsono S.Pd. *Sejarah Tojo Una-Una*, Penerbit Ombak, 2006.

Hasan, Sabriah. *Andi Makkasau: Menakar Harga 40.000 Jiwa*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010.

Heidhues, Mary Somers. *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*, Yayasan Nabil, 2008.

Hermansyah. *Ilmu Gaib di Kalimantan Barat*, Kepustakaan Populer Gramedia; École française d'Extrême-Orient; STAIN Pontianak; & KITLV - Jakarta, 2010.

Heuken SJ, Adolf. *Be my Witness to the Ends of the Earth!: The Catholic Church in Indonesia before the 19th Century*, Cipta Loka Caraka, Jakarta, 2002.

Hisyam, Muhammad. *Sayyid-Jawi: Studi Kasus Jaringan Sosial Di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan*. Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1983.

Hugronje, Snouck C. *Tanah Gayo dan Penduduknya*, INIS, Jakarta, 1996.

________, *De Atjehers*, Batavia Landsdrukerij, 1893 (Terjemahan Inggris: *The Achehnese*, terjemahan A.W. S. O'Sullivan, Late E. J. Brill, Leyden, 1906).

_______, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1896–1936: Seri Khusus Inis jilid V*, Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), Jakarta, 1991.

Husny, Tengku H.M. Lah. *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1978.

Inglin, Flora. *UluMahakam: dari Long Iram sampai Long Apari: Riwayatmu Doeloe, Kini dan Esok*, CV. Sendawar Ayumas, 2005.

Ismail, M. Hilir. *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, Penerbit Lengge, Mataram, 2004.

Jonge, JHR. Mr. J. K. J. de. *De Opkomst van Het Nederlandisch Gezag in Oost Indie (1595–1610)*, 's Gravenhage, 1864.

Juniarti. *Raja Banawa Dari Belanda: Elite dan Konflik Politik Kerajaan Banawa 1888–1942*, Intra Pustaka Utama, Semarang, 2004.

Juwono, Harto & Hutagalung, Yosephine. *Limo Lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*, Ombak, 2005.

_______, *Tiga Tungku Sejarangan: Sejarah Kesultanan Indragiri Sampai Peristiwa 5 Januari 1949*, Ombak, 2006.

Kalimati, Wahyu Sunan. *Pilar-pilar Budaya Sumbaya*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat, 2005.

Kam Hing, Lee. *The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760–1824*, Oxford University Press, 1995.

Kana, Nico L. *Dunia Orang Sawu*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Kartadarmadja, Soenyata Drs. M (editor) & Kutoyo, Sutrisno (editor). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah - Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/ 1979.

Katoppo, E. Nuku: *Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1984.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Makassar, 2004.

Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia: Provinsi Kalimantan*, Kementerian Penerangan.

Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia: Provinsi Sumatra Tengah*, Kementerian Penerangan.

Kertawibawa, Besta Besuki. *Pangeran Cakrabuana: Sang Perintis Kerajaan Cirebon*, Kiblat Buku Utama, Bandung, 2007

Kesuma, Andi Ima. *Migrasi dan Orang Bugis: Penelusuran Kehadiran Opu Daeng Rilakka Pada Abad XVIII di Johor*, Ombak, 2004.

Keuning, J. *Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad ke-17*, Bhratara, Jakarta, 1973.

Kila, Drs. Syahrir; Amir, Drs. Muhammad; Sarapang SS, Simon S. *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata - Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan - Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, 2004.

Koentjaraningrat (red.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.

Koestarta, Drs. Tarib (koordinator); Finandar, Drs. Fidy; ARS, M. Noor; Ahmad, Hasjim; Hanan, Drs. Sjahrial. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Kalimantan Timur*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/ 1984.

Kolit, D.K. *Pengaruh Majapahit atas Kebudayaan Nusa Tenggara Timur*, tanpa penerbit dan tahun terbit.

Komando Resor Militer 121/ABW, Komando Distrik Militer 1206, *Sejarah Berdirinya Kota Putussibau yang Diawali dari Berdirinya Kerajaan Bunut,* Putussibau, 2006.

Kol, H.H. van. *Driemaal Dwars Door Sumatra En Zwerftochten Door Bali*, W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1914.

Kotten, BK.; Tukan, Beni; Kopong, Elias; Zesi, A.M.; Kotten, Domi D. *Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Nusa Tenggara Timur*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan–Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1990–1991

Kozok, Uli. *Surat Batak: Sejarah Perkembangan Tulisan Batak Berikut Pedoman Menulis Aksara Batak dan Cap Si Singamangaraja XII*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.

Kuntowijoyo. *Raja Priyayi dan Kawula*, Ombak, Yogyakarta, 2006.

Kurniawan, Dwi Mixa. *Maluku Negeri Para Raja*, PT. Multi Kreasi Satu Delapan, Jakarta, 2010.

Kutoyo, Sutrisno, dkk. (penyunting). *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya–Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisinoal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta, 1977.

Lahajir. *Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang: Etnografi Lingkungan Hidup di Dataran Tinggi Tunjung*, Galang Press, Yogyakarta, 2002.

Lapian, Adrian B. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, Komunitas Bambu, 2008.

________, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2009.

Latif, Abd. *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, Penerbit Ombak, 2014.

Leirissa, R. Z. *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, Balai Pustaka, 1996.

Lembaga Adat Nagari Talu. *Adaik Salingka Nagari Talu*, edisi I, 2008.

Lewis, E.D. & Mandalangi, Oscar Pareira (editor dan penerjemah). *Hikayat Kerajaan Sikka: Edisi Gabungan dari Dua Tulisan Tangan Tengang Sumber dan Sejarah Kerajaan Sikka oleh Dominicus Dionitius Pareira Kondi dan Alexander Boer Pareira*, Penerbit Ledalero, Maumere, 2008.

Locher-Scholten, Elsbeth. *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830–1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, Banana, Jakarta, 2008 (terjemahan dari bahasa Inggris, berjudul: *Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830–1907*).

Loebis, Parlindoengan. *Orang Indonesia di Kamp Konsentrasi NAZI: Autobiografi Parlindoengan Loebis*, Komunitas Bambu, Depok, 2006.

Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya (Jilid 3): Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

________, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008.

Lontaan, J.U. *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Pemda Tingkat I Kalbar, 1975.

Lubis, Mhd. Arbain. *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, 1993.

Lubis M.S., Dr. Hj. Nina H. dkk. *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*, Alqaprint, Bandung, 2000.

Lufti, Drs. Muchtar; M S, Drs. Suwardi; Syair, Drs. Anwar; Amin, Drs. Umar. *Sejarah Riau*, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 1977.

Machmud HK., *Babad Banggai Sepintas Kilas*,---------

Mahid, Syakir; Sadi, Haliadi, dan Darsono, Wilman. *Sejarah Kerajaan Bungku*, Penerbit Ombak, 2012.

Makkulau, M. Farid W. *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2008.

Manca, Lalu. *Sumbawa pada Masa Lalu: Suatu Tinjauan Sejarah*, Penerbit Rinta, Surabaya, 1984.

Mansoer, Drs. M.D.; Imran, Drs. Amrin; Safwan, Drs. Mardanas; Idris, Dra. Asmaniar Z.; Buchari, Drs. Sidi I. *Sedjarah Minangkabau*, Bhratara, Jakarta, 1970.

Mangkuto, H.A. Dt. Rajo. *Kesulthanan Minangkabau Pagaruyuang Darul Quorar: Sejarah dan Tambo Adatnya*, Taushia, 2010.

Manyambeang, A. Kadir. & Mone, Abd. Rahim. *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka (Sejarah Tallo),* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1979.

Mappangara, Suriadi. *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004.

Mappasanda, H.A.M. (penerjemah). *Kerajaan Luwu: Catatan Gubernur Celebes 1888 D.F. van Braam Morris*, Toaccae Publishing, Makassar, 2007.

Marihandono, Djoko & Juwono, Harto. *Sultan Hamengku Buwono II: Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa*, Banjar Aji, Yogyakarta, 2008.

Marsden, William. *Sejarah Sumatra*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2008 (terjemahan dari bahasa Inggris).

Matulada. dkk. (ed.). *Sawerigading*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1990.

Maulana, Andi Munir, SH. *La Maddukelleng: Sultan Pasir, Arung Peneki, Arung Siengkang, Arung Matoa Wajo XXXI*, Lamacca Press, 2003.

Mboi, Ben. *Ben Mboi: Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2011.

Melamba, Basrin. *Kota Pelabuhan Kolaka di Teluk bone, 1906–1942*, Pustaka Larasan, 2011.

Meuraxa, Dada. *Peristiwa Berdarah di Atjeh*, Pustaka Sedar, Medan, 1956.

Mirsha, Drs. I Gusti Ngurah Rai (koordinator); Parimartha, Drs. I Gde; Rama, Drs. Ida Bagus; Sukiada, Drs. I Nyoman; Ardhana, Drs. I Ketut; & Eddy, Drs. I Wayan Tagel. *Cokorda Alit Ngurah: Dari Pembuangan di Lombok Sampai Revolusi Fisik di Bali (1907–1950),* Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali, 1989.

Moedjanto M.A., Drs. G. *Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman: Tinjauan Historis Dua Praja Kejawen Antara 1755–1992*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994.

Moestadji BA., H. Mohammad & Hadidjah HS., Hj. Didik. *Perjuangan Rakyat Madura dari Daerah RI ke Daerah RI*, Agung Karya Perkasa, Surabaya, 2003.

Mu'jizah. *Iluminasi dalam Surat-surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19,* Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009.

Mukhlis (editor). *Dinamika Bugis-Makassar*, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu sosial dan YHS.

Munandar, Agus Aris. *Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri Bali Abad ke-14–19*, Komunitas Bambu, 2005.

Munoz, Paul Michel. *Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia: Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara (Jaman Pra Sejarah–Abad XVI)*, Penerbit Mitra Abadi, Yogyakarta, 2009 (terjemahan dari *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Penisula*, Editions Didier Millet, 2006).

Musa, H. Abd. Gaffar, Taufik, M., Agussalim, Musyawir. *Iyanae Paoda Adaengngi Attoriolonggne ri Tanete (Sejarah Kebudayaan Tanete)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan - Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1990.

Napitupulu, S.P., Sanusi, Sidabutar S., Lubis, Mukti. *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1991.

Nordholt, Henk Schulte, *The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650–1940*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2006.

Noresah bt. Baharom, BSc (Ketua Editor). *Kamus Dewan: Edisi Keempat*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2010.

Noor, H. Muhammad. Calon *Pahlawan Nasional Dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur: Sejarah Perjuangan Raja Alam (Sultan Alimuddin)*.

Nooy-Palm, Hetty. *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion*, Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut voor Taal, Land, en Volkenkunde 87, jilid 1, The-Hague-Martinus Nijhoff, 1979.

Ointoe, Reiner Emyot, & Mokodampit, M. Firasat. *Bolaang Mongondow: Etnik, Budaya dan Perubahan*, Yayasan Bogani Karya & Pemda Kabupaten Boolang Mongondow, 1996.

P. Mukhlis; Poelinggomang, Edward; Kallo, Abdul Majid; Sulistio, Bambang; Thosibo, Anwar; Maryam, Andi. *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta, 1995.

Palar, H.B. & Anes, L.A. Minahasa: Sejarah dan Derap Langkahnya Menuju Kemerdekaan Indonesia, Tarsius Celebes, Manado, 1994.

Pangeran Haji Muda Indra Sri Negara, gelar Pangeran Bendahara. *Kesaksian Sejarah di Masa Kejayaan Kerajaan Selimbau Darussalam*, Majelis Pemangku Keraton Selimbau Darussalam, 2004/ 2005.

Panghoeloe, M. Rasjid Manggis Dt. Radjo. *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1985.

Panitia Seminar Sejarah Lounusa Maatita di Amahai, *Amahai Dalam Lintasan Sejarah*, manuskrip tidak diterbitkan.

Parera, A.D.M. *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor: Suatu Kajian atas Peta Politik Pemerintahan Kerajaan-kerajaan di Timor Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994.

Patiara, Drs. John; Renwarin, Drs. Herman; Soedharto, Drs. Bondan; Palangan, M. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Irian Jaya,* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984.

Pattipeilohy, J.J. SH. *Arsitektur Tradisional Masyarakat Ohirata*,--

Pelras, Christian. *Manusia Bugis*, Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta Paris, Jakarta, 2006 (terjemahan Indonesia dari *The Bugis*, Oxford Blackwell Publishers Ltd, 1996).

Pelzer, Karl J. *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1985.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang. *Kupang dari Masa ke Masa*, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang.

Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Tanjungpinang: Land of Malay History*, Pemerintah Kota Tanjungpinang - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2006.

Perret, Daniel. *Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta 2010.

Pik Tjoe, Tan. *Madoera en zijn Vorstenhuis*, Boekhandel Kolf,-----

Poelinggomang, Edward L. *Kerajaan Mori, Sejarah dari Sulawesi Tengah*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2008.

________, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2002.

Poesponegoro, Marwati Djoenoed & Notosusanto, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia III*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

________, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

________, *Sejarah Nasional Indonesia V*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Praja, Putra. *Sejarah Berdirinya Kerajaan Padang Tebing Tinggi*, manuskrip tidak diterbitkan.

Prinst SH., Darwan dan Prinst SH., Darwin. *Sejarah dan Kebudayaan Karo*, Yrama.

Proyek A.P.B.D. Prop. Dati I Bali. *Sejarah Perang Jagaraga*, Proyek A.P.B.D. Prop. Dati I Bali, tahun 1980/ 1981.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1978.

Purba SH., D. Kenan & Poerba, Drs. J.D. *Sejarah Simalungun*, Bina Budaya Simalungun, Parsadaan Ni Purba Pak-pak, Boru Pakon Panagolan, Jakarta, 1995.

Purba Tambak, Drs. Herman. *Kerajaan Silou: Historiae Politia*, Edisi Kedua, Pematang Siantar, 2008.

Purwadi, M. Hum, Dr. *The History of Javanese Kings: Sejarah Raja-raja Jawa*, Ragam Media, 2010.

Purwadi, M. Hum, Dr. & Dwiyanto, Drs. Djoko. *Kraton Surakarta: Sejarah, Pemerintahan, Konstitusi, Kesustraan, dan Kebudayaan,* Panji Pustaka, Yogyakarta, 2008.

Pustaha Panei Bolon.

Putra, Heddy Shri Ahimsa. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Gajah Mada University Press, 1988.

Putro, Brahma. *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman*, Penerbit Ulih Saber, Medan, 1995.

Raba, Manggaukang. *Fakta-fakta Tentang Samawa*, Yayasan Pemuda Kreatif Sumbawa–KASA Indoneisa dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar, 2002.

Rahman, Drs. Ansar; Achmad, H. Ja'; Muhadi. *Syarif Abdurrahman Alkadri: Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*, Pemerintah Kota Pontianak, 2000.

Ranawidjaja, Mr. Usep. *Swapradja: Sekarang dan dihari Kemudian*, Penerbit Djambatan.

Rapi, H. Ahmad Massiara Daeng. *Menyingkap Tabir Sejarah Budaya di Sulawesi Selatan*, Lembaga Penelitian & Pelestarian Sejarah dan Budaya Sulawesi Selatan dari Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1988.

Rauf, Prof. Dr. H. La Ode Abdul. *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi: Suatu Studi Kasus di Muna*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Reid, Anthony. *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

Resink G.J. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850–1910: Enam Tulisan Terpilih*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987.

Rifai, Mien A. *Lintasan Sejarah Madura*, Yayasan Lebbur Legga, Surabaya 1993.

Riwut, Tjilik. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, NR Publishing, Yogyakarta, 2007.

Rizal, Hannabi; Tika, Zainuddin; & Syam, M. Ridwan. *Profil Raja & Pejuang Sulawesi Selatan*, jilid 1 dan 2, Pustaka Refleksi, Makassar, 2007.

Robinson, Geoffrey. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*, LKiS, Yogyakarta, 2006 (judul asli: *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*, Cornell University Press, 1995).

Ruchiat, Rachmat. *Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta*, Masup Jakarta, 2011.

Rudyansjah, Tony. *Kekusaan, Sejarah, & Tindakan: Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Sagimun, M.D. *Sultan Hasanudin Menentang V.O.C.*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1985.

Said, Mohammad. *Atjeh Sepandjang Abad*, diterbitkan oleh pengarang sendiri, 1961.

Said, Moehamad. *De Zelfsbesturende Landschappen Buitengewesten (Keradjaan-Keradjaan Boemipoetera Jang Berhak Memerintah Sendiri)*, N.V. Handelmaatschappij en Drukkerij "Sinar Deli", Medan, April 1937.

Said, H. Mohammad. *Soetan Koemala Boelan (Flora): Raja, Pemimpin, Wartawan, Penentang Kezaliman Belanda Masa 1912–1932*, UI-Press.

Saleh. Idwar M. *Pangeran Antasari*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1993.

Salim, Syahbuddin. *Memperkenalkan Kenegerian Belantu*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1983.

Salindeho, Winsulangi & Sombowadile, Pitres. *Kawasan Sangihe–Talaud–Sitaro: Daerah Perbatasan Keterbatasan Pembatasan*, Fuspad, Jogja, 2008.

Samin, Prof. Suwardi M, dkk. *Pemutakhiran Adat Kuantan Singingi*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006

Samingoen, Ir. Sampoerno (pengantar). *Album Arsitektur Tradisional Aceh. Sumatera Barat. Sulawesi Selatan, Nusatenggara Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Media Kebudayaan, 1983/1984.

Samroni, Imam; Astiyanto, Heniy; Sugiarto, Toto; Ebo, Kurnia; Munarsih; Rudi; Hananti, Hilda; Yusdani; Megandaru; Sukatmi; Yuliani; Sulistyorini, Dyah; Soekirman; Junita, Dewi. *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta Ditinjau dari Perspektif Historis, Sosiologis, Filosofis, & Yuridis*, Pura Pustaka Yogyakarta, 2010.

Sangti, Batara. *Sejarah Batak*, Karl Sianipar Company, Balige, 1978.

Schoorl, Pim. *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton,* Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.

Sedyawati, Edi & Zuhdi Susanto (penyunting). *Arung Samudera: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lapian*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Depok, 2001.

Sellato, Bernard. *Forest, Resources and People in Bulungan: Elements for a History of Settlement, Trade, and Social Dynamics in Borneo, 1880-2000, Center* for International Forestry Research, Jakarta, 2001.

Setiyanto, Agus. *Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad ke-19*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Siddik, Prof. Dr. H. Abdullah. *Sejarah Bengkulu: 1500–1990*, Balai Pustaka, 1996.

Sidemen, Ida Bagus. *Nilai Historis Uang Kepeng*, Larasan–Sejarah, Denpasar, 2002.

Sinaga, Rosmaida & Syukur, Abdul. *Singgirei Rumagesan: Pejuang Integrasi Papua*, Ruas, 2013.

Sinar, Tengku Luckman. *Sari Sejarah Serdang 1*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1985.

________, *Sari Sejarah Serdang 2*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1985.

________, *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur*, Kesultanan Negeri Serdang, 2001.

Sitonda, Mohammad Natsir. *Sejarah Massenrempulu jilid 1*, Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2012.

Situmorang, Sitor. *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII–XX*, Komunitas Bambu, Jakarta 2004.

Soebandi, Jro Mangku Gde Ktut. *Mengenal Leluhur dari Dunia Babad*, Penerbit BP, Denpasar. 1998.

Soejono, Imam. *Yang Berlawanan*, Resist Book, Yogyakarta, 2006.

Soelarto, B. *Sekitar Tradisi Ternate*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, ---

Stuart-Fox, David J. *Pura Besakih: Pura, Agama, dan Masyarakat Bali*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2010.

Stutterheim, Dr. W. F. *Het Hinduisme in de Archipel*, seri *Cultuurgeschiedenis van Indonesie II*, J.B. Wolters, Groningen, Jakarta, 1951.

Sudrajat, M. Usep, & Ardi, Toni. *Atlas Lengkap Kabupaten Sumedang*, CV. Sudrajat & CV Cintya Group, 2013.

Sueta, Drs. I Wayan. *Babad Ksatrya Taman Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 1992.

Suhusilawane, Dra. Florence, et.al. *Sejarah Kerajaan Kisar*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku

dan Maluku Utara Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2008.

Sulendraningrat, P.S. *Sejarah Cirebon*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Sunardjo SH., RH. Unang. *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479–1809*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1983.

Suny, Prof Dr. Ismail. *Bungai Rampai Tentang Aceh*, Penerbit Bhratara Karya Askara, Jakarta, 1980.

Supit, Bert. *Minahasa*, Sinar Harapan, 1986.

Suprayitno. *Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia*, Yayasan Untuk Indonesia, Yogyakarta, 2001.

Sutaba, I Made; Astawa, Anak Agung Gede Oka; Wirawan, Anak Agung Bagus. *Sejarah Gianyar Dari Jaman Prasejarah Sampai Masa Baru-Modern*, Pemerintah Kabupaten Gianyar-Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2007.

Suyanto, Sunar Tri. *Sejarah Berdirinya Kerajaan Surakarta Hadiningrat*, Tiga Serangkai, Solo, 1985.

Syahzaman & Hasanuddin. *Sintang Dalam Lintasan Sejarah*, Romeo Grafika, Pontianak, 2003.

Tajabu, A. *Riwayat Benteng Otanaha, Otahiya, dan Ulupahu*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1986.

Tambak, T.B.A. Purba. *Sejarah Simalungun*, tanpa penerbit dan tahun terbit.

Tamburaka, M.A., Prof. DR. H. Rustam E, et. al. *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 45 Tahun Sultra Membangun* (Cetakan Kedua), Unhalu Press, 2010.

Tangke, W. Wanua dan Nasyaruddin, Anwar (editor). *Orang Soppeng Orang Beradab: Sejarah, Silsilah Raja-raja, Obyek Wisata*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2006.

Tarimana, Abdurrauf. *Kebudayaan Tolaki*, Balai Pustaka, Jakarta 1993.

Tasrif S.H., S. *Pasang Surut Keradjaan Merina: Sedjarah Sebuah Negara Jang Didirikan Oleh Perantau2 Indonesia di Madagaskar*, Balai Buku Media, Djakarta, 1966.

Team Perumus Hasil-hasil Diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II. *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, Biro Bina Mental Spiritual Setwilda Provinsi Daerah Tk. I Sumatera Selatan, Palembang, 1981.

Terombo Siri Kerajaan Tambusai dari Ibu Tengku Dini (www.TengkuDini.com).

Tim Bali. *Islam Masuk Jembrana*, PT. Karya Unipress, 1984.

Tim Sejarah Yayasan Kerti Budaya (Drs. A.A.N. Putra Darmanuraga-penulis utama). *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali*, Pustaka Larasan, Denpasar, Bali, 2011.

Tim Yayasan Mitra Budaya Indonesia, *Cerbon*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta 1982.

Tjandrasasmita, Uka. *Arkeologi Islam Nusantara*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009.

Tobing, Adniel L. *Sedjarah Si Singamangaraja I-XII*, Toko Buku & Co. Penerbit Mutiara, Tarutung, 1951.

Tjokrowinoto, Prof. Drs. H. Sardanto. *Sejarah Hari Jadi Kota Semarang: Edisi Revisi*, Wisma Tjakrawinatan, Semarang, 2004.

Umberan, Musni; Nurcahyani, Lisyawati; Purba, Juniar; Hendraswati. *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Direktorat Jenderal Kebudayaan - Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1994.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Arkeologi, Sejarah dan Nilai Tradisional. *Perlawanan Ndaumanu Sinlae Terhadap Kekuasaan Kolonial Belanda di Termanu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009.

Untoro, Heriyanti Ongkodharma, *Kapitalisme Pribumi Awal: Kesultanan Banten 1522–1684*, Komunitas Bambu, 2007.

Usfinit, Alexander Un. *Maubes Insana: Salah Satu Masyarakat di Timor dengan Struktur Adat yang Unik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Usman, Syafaruddin & Din, Isnawita. *Peristiwa Mandor Berdarah: Eksekusi Massal 28 Juni 1944 oleh Jepang*, Media Pressindo, 2009.

Usman, Syafaruddin. *Dari Koubou ke Kubu Raya*, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, 2010.

________, *Landak Dibalik Nukilan Sejarah*.

Utomo, Mulyanto; Susilo, Wahyu; & Achmadi, Farid. *Di Balik Suksesi Keraton Surakarta Hadiningrat*, PT. Aksara Solopos, Solo, 2004.

Utrecht, Dr. E. *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, Penerbitan Sumur Bandung, 1962.

Van Bemmelen, Sita & Raben, Remco (penyunting). *Antara Daerah Dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

Veth, P. J. *Borneo's Wester Afdeeling: Geographisch, Statistisch, Historisch Voorafgegaan der Eene Algemeene Sehets des gansehen Eilands* (jilid 1 dan 2), Zalbommen Joh. Noman en Zoon, 1854.

Vlekke. Bernard H.M. *Nusantara: Sejarah Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, 2008 (Terjemahan dari: *Nusantara: A History of Indonesia*).

Wahl, S.L. van der. (penyunting). *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920–1942*, Penerbit Djambatan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001.

Wallace, Alfred Russel. *Kepulauan Nusantara: Sebuah Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2009 (terjemahan bahasa Inggris dari *The Malay Archipelago. The Land of the Orang-utan and the Bird of Paradise. A Narrative of Travel, with Studies of Man and Nature*, Macmilland and Company, London, 1869).

Wani, Drs. Yusuf A.; Ansyori, M. Nur; Ismail, M. Yusuf; Balip, A. Gopar. *Batanghari Sembilan dari Abad ke Abad*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1980.

Widyatmika, Munandjar. *Syarif Abdurahman bin Abubakar Algadrie Pendiri Kota Waingapu*, Pusat Pengembangan Madrasah, Kupang, 2005.

_______, *Cendana & Dinamika Masyarakat Nusa Tenggara Timur*, Pusat Pengembangan Madrasah NTT, 2007.

Willink, H.D. Tjeenk. *Landschappen en Volkstypen van Nederlandsch-Indië*, Harlem, 1883.

Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie. 4th ed.

Wiryawan, Hari. *Mangkunegoro VII & Awal Penyiaran Indonesia*, LPPS, Solo, 2011.

Wiryoprawiro, Zein M. *Arsitektur Tradisional Madura Sumenep dengan Pendekatan Historis dan Deskriptif*, Laboratorium Arsitektur Tradisional FTSP ITS Surabaya, 1986.

Wolf, Charles Jr. *The Indonesian Story: The Birth, Growth, and Structure of Indonesian Republic*, John Day Company, New York, 1948.

Yamin, Muhammad. *Atlas Sedjarah*, Djambatan, 1956.

Yayasan Parisada Hindu Dharma Kabupaten Badung, *Babad Buleleng*, Yayasan Parisada Hindu Dharma Kabupaten Badung, 1974.

Yudoseputro, Wiyoso. *Jejak-jejak Tradisi Bahasa Rupa Indonesia Lama*, Yayasan Seni Visual Indonesia, 2008.

Yusuf, Drs. Tayar; Effendy, Drs. Rousman; Kutoyo Sutrisno. *Sejarah Sosial Daerah Lampumg:Kotamadya Bandar Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984/1985.

Zahari, A.M. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) I*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

________, *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) II*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

________, *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) III*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

Zainuddin, H.M. *Tarich Atjeh dan Nusantara*, jilid 1, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961.

Zaman, Kahrul. *Riwayat Kesultanan Dompu Setelah Tahun 1934: Perjuangan Sebuah Negeri yang Berdaulat untuk Memenuhi Kehendak Rakyat*, Maharani Persada, Mataram, 2005.

Zuhdi, Susanto (penyunting). *Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993.

Zuhro, R. Siti, dkk. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*, Penerbit Ombak, 2009.

Zulkarnain, Drs. H. Iskandar (ketua). *Sejarah Sumenep*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep.

ARTIKEL, JURNAL, & TESIS

Achyan, Drs. Ade Djamadin. *Aji Melayu: Pendiri Kerajaan Sintang dan Perkembangan Sejarah Kerajaan Melayu di Kabupaten Sintang*, makalah seminar di Hotel Holiday Inn, Kuching, Sarawak, 22-24 Agustus 2006.

Caldwell, I & Bougas, W. of *The Early History Binamu and Bangkala*, South Sulawesi dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 160 (2004), no: 4, Leiden, 456-510 (didownload dari http://www.kitlv-journals.nl).

Suryadi. *Sepucuk Surat dari Seorang Bangsawan Gowa di Tanah Pembuatan (Ceylon)* dalam Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, vol. 10 No.2, Oktober 2008, halaman 214–245, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Mansoben, Johszua Robert. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan*, tesis doktoral di Rijkuniversiteit te Leiden, 14 Juni 1994.

Mattulada, Prof. Dr. H.A. *Sekelumit Sejarah Kebudayaan Kaili* dalam Antropologi Indonesia: Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia, no. 48 th XV Januari April 1991, halaman 133–156, Jurusan Antropologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Okushima, Mika. *Commentary on the Sebuku Document: Local History from the Perspective of a Minor Polity of Coastal Northeast Borneo* dalam *The Journal of Sophia Asian Studies No. 20 (2002).*

_______, *Ethnic Background of the Tidung: Investigation of the Extinct Rulers of Coastal Northeast Borneo* dalam *The Journal of Sophia Asian Studies No. 21 (2003)*.

Schapper, Antoinette. *Crossing the border: Historical and linguistic divides among the Bunaq in central Timor* dalam *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Budaya*, vol. 13 no.1 (April, 2011).

Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, XXXIX, 1897.

SURAT KABAR

Geger Pakualaman Mencuat Kembali, *Jawa Pos*, 19 Oktober 2009, halaman 11.

Penobatan, Sultan Deli XIV Isap Permen, Jawa Pos, 23 Juli 2005, halaman 1.

Permaisuri Jogja Bacabub Bantul, Jawa Pos, 19 Oktober 2009, halaman 11

Raja Minta Diikutsertakan Pembahasan RUU Hukum Adat, Suara Merdeka, 8 Agustus 2009, halaman 2.

Raja Jogja Tak Harus Sultan: Hamengkubuwono X Bicara Suksesi Kraton, Jawa Pos, 14 Mei 2010, halaman 16.

Raja Kembar Keraton Solo Berakhir, Jawa Pos, 21 Mei 2012, halaman 3.

VCD

Situs-situs Tiga Kerajaan Besar yang Berkuasa di Kab. Timor Tengah Selatan: Amanatun (Onam), Amanuban (Banam), dan Mollo (Oenam), Hasta Community–dari Yang Mulia Bapak Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek.S.T., M.T.

WEBSITE

http://www.kitlv-journals.nl/
http://kitlv.pictura-dp.nl/
http://www.kutaikartanegara.com
http://kerajaan-indonesia.blogspot.com
http://www.sultanpalembang.com
http://www.kesultananasahan.com/
http://melayuonline.com/?lang=Indonesia
http://pagatan.co.cc/sejarah-kerajaan-tanah-bumbu
http://www.royaltimor
http://www.sidrap.go.id/
http://pinrangkab.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=10
http://pangkep.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=68
http://muhlissuhaeri.blogspot.com/2008/04/roborob.html
http://pontianakonline.com/
http://www.sumbawanews.com/berita/photo/perjalanan-ke-sumbawa-23-keris-pedang-kerajaan-sumbawa.html
http://www.dompu.go.id/index.php?option=isi&task=view&id=103&Itemid=104
http://mandar.web44.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1
http://www.polewalimandarkab.go.id/index.php?jenis=content&id=202
http://djawatempodoeloe.multiply.com/photos/album/144#9.JPG
http://east-borneo.co.cc/general/50-history
http://peusangan.wordpress.com/2008/12/01/the-history-of-uleebalang-keudjroeen-peusangan-bag-terakhir/#comment-260
http://beritasore.com/2007/05/22/titah-raja-raja-untuk-amandemen-uud-45/
epress.anu.edu.au/austronesians/sharing/pdf/ch08.pdf
http://epress.anu.edu.au/austronesians/precedence/mobile_devices/index.html
http://kratonsurakarta.com/pakubuwono1.shtml
http://thetidung.blogspot.com/

http://www.thefreelibrary.com/Abang+in+the+middle+and+upper+Kapuas%3a+additional+evidence.-a0166350035
http://serdangbedagaikab.go.id/indonesia/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=117
http://kerajaanbanjar.wordpress.com/silsilah-anak-sultan/
http://www.guide2womenleaders.com/indonesia_substates.htm
http://www.asiafinest.com/forum/lofiversion/index.php/t16300.html
http://www.inimaumere.com/2008/10/kerajaan-nita.html
http://www.inimaumere.com/2008/04/don-thomasketurunanpendidikan-dan.html
http://iimanda.multiply.com/journal/item/2/Kerajaan_Kotawaringin_Yang_Pertama
http://jalian.wordpress.com/2008/02/18/peranan-keturunan-sultan-kotawaringin-di-beberapa-bidang-sebelum-dan-sesudah-tahun-1950-an/
http://www.bongkar.co.id/khas-kaltim/cerita-khas-johansya-balham/850-sambaliung-berontak.html
http://kesultanan_pasir.tripod.com/sadurangas/id10.html
http://sumedanglarang.blogspot.com/
http://anakgunungakaan.blogspot.com/
http://www.gatra.com/artikel.php?id=23352
http://www.myheritage.com/site-50124411/kerajaan-bone-web-site
http://sejarahkerajaan-indonesia.blogspot.com/2008/12/kerajaan-tanah-hitu.html
http://sejarahkerajaan-indonesia.blogspot.com/2008/12/kerajaan-pagatan.html
http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=4426&Itemid=9
http://www.nttprov.go.id/ntt_09/index.php?hal=sejsobe
www.geocities.com/konferensinasionalsejarah/didik_prajoko.pdf
http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1800.htm
http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1840.htm
http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1870.htm
http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1900.htm
http://www.pos-kupang.com/read/artikel/35387
http://www.putralangkat.blogspot.com/2008_09_01_archive.html
http://takapana.blogspot.com/2009/07/kerajaan-tidung-bag-1.html
http://takapana.blogspot.com/2009/07/kerajaan-tidung-bag-1.html

http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/kerajaan-rimpulaeng-tabukan.html
http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/kingdom-manganitu-kauhis.html
http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/siau-kingdom.html
http://www.mandailing.org/ind/asal-ren2.html
http://aneukcotirie.blogspot.com/2009/02/teuku-panglima-maharaja-tibang-muhammad.html
http://nazarmargolang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=85
http://www.pinatih.org/category/sejarah
http://www.semestaindonesia.com/cbn/?p=2404
http://www.karoweb.or.id/page/3/
http://www.reocities.com/Heartland/8178/sejarah1.htm
http://www.reocities.com/Heartland/8178/sejarah2.htm
http://www.sagangonline.com/index.php?sg=full&id=274&kat=16#
http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=news.detail&id_news=22
http://buol.org/bole/node/1
http://rokan.org/?Sejarah_Rokan:Silsilah_Raja
http://belitungkab.go.id/module.php?id=sejarah1
http://frirac.multiply.com/journal
http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3027
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/12/02424075/batas.keraton.majapahit.harus.segera.ditentukan
http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=30034
http://www.antaranews.com/print/?i=1185687059
http://forum.detik.com/showthread.php?p=2529504
http://sinagaeone.blogspot.com/

http://rajasamusamuvi.blogspot.com
http://en.rodovid.org/wk/Person:305400
http://www.buaynyerupa.blogspot.com/
http://sultanskalabrak23.blogspot.com/2008/12/naik-tahta.html

http://buaypernong.blogspot.com/2008/12/pangeran-suhaimi.html
http://buaypernong.blogspot.com/2008/12/pangeran-maulana-balyan.html
http://www.paksibuaybejalandiway.blogspot.com/
http://buaybelunguh01.wordpress.com/category/buay-belunguh/
http://melayuonline.com/ind/history/dig/409
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Celebesu#W.C5.82adcy_Attinggoli
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Celebesu#Kr.C3.B3lowie_Suwawy
http://puakmelayu.blogspot.com/search/label/IKHWAL%20DAN%20SEJARAH%20MELAYU
http://sejarah-puri-pemecutan.blogspot.com/2011/02/kerajaan-jembrana.html
http://sejarah-puri-pemecutan.blogspot.com/2011/02/sejarah-kerajaan-karangasem.html
http://www.ubb.ac.id/featurelengkap.php?judul=Menguak%20Sejarah%20Di%20Pulau%20Belitung%20%28Belitong%20/%20Biliton%29&&nomorurut_berita=109
http://manukallodanga.wordpress.com
http://khuzmayudi.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-awal-mula-nama-kotabaru-tanah.html

RIWAYAT HIDUP

Ivan Taniputera dilahirkan pada 1974 di Semarang, Jawa Tengah. Seselesai pendidikan SMA pada 1992, setahun kemudian ia melanjutkan studinya ke *Technische Fachhochschule* (*University of Applied Science*) Berlin, Jerman. Setelah lulus pada 1997, ia kembali tanah air dan bekerja sebagai tenaga profesional. Sebelum buku *Ensiklopedi Kerajaan Nusantara*, pemerhati sejarah ini juga punya karya lain seperti *History of China* dan *Astrologi dan Sejarah Dunia*, yang diterbitkan oleh penerbit Ar-Ruzz Media.



Bersalaman dengan Yang Terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
Tanggal 31 Mei 2011



Pahlawan Nasional Indonesia

- Abdoel Moeis (1883–1959)
- Ki Hadjar Dewantara (1889–1959)
- Raden Mas Soerjopranoto (1871–1959)
- Mohammad Hoesni Thamrin (1894–1941)
- K.H. Samanhoedi (1868–1956)
- Raden H. Oemar Said Tjokroaminoto (1883–1934)
- Danoedirdja Setiaboeddhi (1897–1950)
- Raja Si Singamangaradja XII (1849–1907)
- Dr. G.S.S.J. Ratulangi (1890–1949)
- dr. Soetomo (1888–1938)
- K.H. Ahmad Dahlan (1868–1923)
- H. Agus Salim (1884–1954)
- Jend. Gatot Soebroto (1907–1962)
- Sukardjo Wirjopranoto (1903–1962)
- Dr. Ferdinand Lumban Tobing (1899–1962)
- K.H. Zainul Arifin (1909–1963)
- Tan Malaka (1884–1949)
- Mgr. Albertus Soegijapranata, S.J. (1896–1963)
- Ir. R. Djoeanda Kartawidjaja (1911–1963)
- Dr. Sahardjo, S.H. (1909–1963)
- Tjoet Nja' Dhien (1848–1908)
- Tjoet Nja' Meutia (1870–1910)
- Raden Adjeng Kartini (1879–1904)
- dr. Tjipto Mangoenkoesoemo (1886–1943)
- K.H. Fakhruddin (1890–1929)
- K.H. Mas Mansoer (1896–1946)
- Alimin bin Prawirodirdjo (1889–1964)
- dr. Moewardi (1907–1948)
- K.H. Abdul Wahid Hasjim (1914–1953)
- Sri Susuhunan Paku Buwono VI (1807–1849)
- K.H. Mohammad Hasjim Asj'arie (1875–1947)
- RMT Ario Soerjo (1896–1948)
- Jend. Besar Soedirman (1916–1950)
- Jend. Oerip Soemohardjo (1893–1948)
- Prof. Dr. Mr. Soepomo (1903–1958)
- Dr. Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja (1898–1952)
- Jend. Ahmad Yani (1922–1965)
- Letjen R. Soeprapto (1920–1965)
- Letjen Mas Tirtodarmo Harjono (1924–1965)
- Letjen Siswondo Parman (1918–1965)
- Mayjen Donald Isaac Pandjaitan (1925–1965)
- Mayjen Soetojo Siswomihardjo (1922–1965)
- Kapten Pierre Tendean (1939–1965)
- Aipda Karel Satsuit Tubun (1928–1965)
- Brigjen Katamso Darmokusumo (1923–1965)
- Kol. Sugijono Mangunwijoto (1926–1965)
- Soetan Sjahrir (1909–1966)
- Laks. R. Edy Martadinata (1921–1966)
- Raden Dewi Sartika (1884–1947)
- Prof. Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes (1895–1952)
- Pangeran Antasari (1809–1862)
- Sersan Usman *alias* Djanatin bin H. Ali (1943–1968)
- Kopral Harun *alias* Tohir bin Said (1947–1968)
- Jend. Basoeki Rachmat (1921–1969)
- Arie Frederik Lasut (1918–1949)
- Martha Christina Tiahahu (1800–1818)
- Maria Walanda Maramis (1872–1924)
- Supeno (1916–1949)
- Sultan Ageng Tirtajasa (1631–1683)
- Wage Rudolf Soepratman (1903–1938)
- Nyai Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlam (1872–1946)
- K.H. Zainal Moestafa (1907–1944)
- Sultan Hasanuddin (1631–1670)
- Kapitan Pattimura (1783–1817)
- Pangeran Diponegoro (1785–1855)
- Tuanku Imam Bondjol (1772–1864)
- Tengku Tjik di Tiro (1836–1891)
- Teuku Oemar (1854–1899)
- dr. Wahidin Soedirohoesodo (1852–1917)
- Raden Oto Iskandar di Nata (1897–1945)
- Robert Wolter Monginsidi (1925–1949)
- Prof. Mr. Mohammad Yamin (1903–1962)
- Laksda Josaphat Soedarso (1925–1962)
- Prof. dr. R. Soeharso (1912–1971)
- Marsda Prof. dr. Abdurrachman Saleh (1909–1947)
- Marsda Mas Agustinus Adisutjipto (1916–1947)
- Teuku Njak Arief (1899–1946)
- Nji Ageng Serang (1752–1828)
- Hj. Rangkayo Rasuna Said (1910–1965)
- Marsda Abdul Halim Perdana Kusuma (1922–1947)
- Marsma R. Iswahjudi (1918–1947)
- Brigjen I Gusti Ngurah Rai (1917–1946)
- Soeprijadi (1923–1945)
- Sultan Agung Anyokrokusumo (1593–1645)
- Untung Suropati (1660–1706)
- Tengku Amir Hamzah (1911–1946)
- Sultan Thaha Sjaifuddin (1816–1904)
- Sultan Mahmud Badaruddin II (1767–1852)
- Dr. Ir. H. Soekarno (1901–1970)
- Dr. H. Mohammad Hatta (1902–1980)
- Raden Pandji Soeroso (1893–1981)
- Radin Inten II (1834–1856)
- KGPAA Mangkunegara I (1725–1795)
- Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1912–1988)
- Sultan Iskandar Muda (1593–1636)
- I Gusti Ketut Jelantik (????–1849)
- Frans Kaisiepo (1921–1979)
- Silas Papare (1918–1978)
- Marthen Indey (1912–1986)
- Sultan Nuku Muhammad Amiruddin (1738–1805)
- Tuanku Tambusai (1784–1882)
- Syekh Yusuf Tajul Khalwati (1626–1699)
- R.A. Hj. Fatimah Siti Hartinah Soeharto (1923–1996)
- Raja Haji Fisabilillah (1727–1784)
- H. Adam Malik (1917–1984)
- Marsma Tjilik Riwut (1918–1987)
- La Maddukelleng (1700–1765)
- Sultan Syarif Kasim II (1893–1968)
- H. Ilyas Yacoub (1903–1958)
- Prof. Dr. Hazairin, S.H. (1906–1975)
- Abdul Kadir (1771–1875)
- Hj. Fatmawati Soekarno (1923–1980)
- Ranggong Daeng Romo (1915–1947)
- Brigjen H. Hasan Basry (1923–1984)
- Jend. Besar Abdul Haris Nasution (1918–2000)
- Jend. GPH Djatikoesoemo (1917–1992)
- Andi Djemma (1901–1965)
- Pong Tiku *alias* Ne' Baso (1846–1907)
- Prof. Mr. R. H. Iwa Koesoema Soemantri (1899–1971)
- H. Nani Wartabone (1907–1986)
- Maskoen Soemadiredja (1907–1986)
- Andi Mappanyukki (1885–1967)
- Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad (1808–1873)
- K.H. Ahmad Rifa'i (1786–1870)
- Gatot Mangkoepradja (1898–1968)
- Ismail Marzuki (1914–1958)
- Kiras Bangun *alias* Garamata (1852–1942)
- Bagindo Azizchan (1910–1947)
- Andi Abdullah Bau Massepe (1918–1947)
- Dr. Mr. H. Teuku Mohammad Hasan (1906–1997)
- R.M. Djokomono Tirto Adhi Soerjo (1880–1918)
- K.H. Noer Ali (1914–1992)
- H. Pajonga Daeng Ngalle (1901–1958)
- Opu Daeng Risadju (1880–1964)
- Izaak Huru Doko (1913–1985)
- Sri Sultan Hamengku Buwono I (1717–1792)
- H. Andi Sultan Daeng Radja (1894–1963)
- Mayjen dr. Adenan Kapau Gani (1905–1968)
- Mr. dr. Ide Anak Agung Gde Agung (1921–1999)
- Mayjen Prof. Dr. Moestopo (1913–1986)
- Brigjen Ignatius Slamet Rijadi (1927–1950)
- Dr. Mohammad Natsir (1908–1993)
- K.H. Abdul Halim (1887–1962)
- Soetomo *alias* Bung Tomo (1920–1981)
- Laksda Jahja Daniel Dharma *alias* John Lie (1911–1988)
- Prof. Dr. Ir. Herman Johannes (1912–1992)
- Prof. Mr. R. Achmad Soebardjo (1896–1978)
- Dr. Johannes Leimena (1905–1977)
- Mayor Dr. Johannes Abraham Dimara (1916–2000)
- Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911–1989)
- K.H. Idham Chalid (1921–2010)
- H. Abdul Malik Karim Abdullah (1908–1981)
- Ki Sarmidi Mangunsarkoro (1904–1957)
- I Gusti Ketut Pudja (1908–1977)
- Sri Susuhunan Paku Buwono X (1866–1939)
- Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahjono (1900–1986)
- dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat (1879–1957)
- Lambertus Nicodemus Palar (1900–1981)
- Letjen Tahi Bonar Simatupang (1920–1990)
- Letjen Djamin Ginting (1921–1974)
- Soekarni Kartodiwirjo (1916–1971)
- H. R. Mohamad Mangoendiprodjo (1905–1988)
- K.H. Abdul Wahab Hasbullah (1888–1971)




BHINNEKA TUNGGAL IKA



UNITY IN DIVERSITY

AR·RUZZMEDIA